



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 ((Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 30);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD ini merupakan dokumen visi, misi dan program Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - Bab IV : Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
 - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
 - Bab VI : Penutup.
- (4) Uraian rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD ini.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2015 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2015 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 26

Daftar Isi

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	9
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	10
1.5 Maksud dan Tujuan.....	11
BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	13
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	13
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	13
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	13
2.1.1.2 Topografi.....	17
2.1.1.3 Geologi.....	19
2.1.1.4 Hidrologi	23
2.1.1.5 Klimatologi.....	25
2.1.1.6 Penggunaan Lahan.....	26
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	30
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	33
2.1.4 Demografi	35
2.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	41
2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi	41
2.1.5.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	54
2.1.5.3 Fokus Budaya, Pemuda dan Olahraga	66
2.1.6 Aspek Pelayanan Umum	81
2.1.6.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....	81
2.1.6.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	182
2.1.7 Aspek Daya Saing Daerah	197
2.1.7.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	197
2.1.7.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	201
2.1.8 Fokus Iklim Berinvestasi.....	208

2.1.9	Fokus sumber Daya Manusia	212
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	214
2.3	Permasalahan Pembangunan	281
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	281
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	288
2.3.2.1	Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	288
2.3.2.2	Kependudukan dan Demografi	289
2.3.2.3	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	290
2.3.2.4	Sosial dan Budaya	292
2.3.2.5	Pemerintahan dan Politik	296
2.3.2.6	Prasarana Wilayah	297
BAB 3	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	300
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	300
3.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi	300
3.1.2	Struktur Sektor Ekonomi	302
3.1.3	Inflasi	304
3.1.4	ICOR	306
3.1.5	Ketenagakerjaan	306
3.1.6	Kemiskinan	308
3.1.7	Ketimpangan Regional	310
3.1.8	Ketimpangan Pendapatan	310
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	311
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	312
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	314
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	318
3.2.4	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	320
BAB 4	TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	321
4.1	Tema Pembangunan Daerah	321
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	329
4.3	Prioritas Pembangunan Kewilayahan	333
4.4	Sasaran Pembangunan	338
BAB 5	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	342
5.1	Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015 (Dana APBD)	347
	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	389
	Dinas Kesehatan	421
	RS. Ghrasia	458
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM	459
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	484
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	508
	Badan Lingkungan Hidup	527

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	549
Dinas Sosial	582
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	606
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	625
Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.....	636
Dinas Kebudayaan	649
Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas.....	654
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	664
Satuan Polisi Pamong Praja.....	676
Biro Tata Pemerintahan	687
Biro Hukum	700
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	707
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	717
Biro Administrasi Pembangunan	726
Biro Organisasi.....	735
Biro Umum, Humas, dan Protokol	744
Sekretaris DPRD	758
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset	769
Badan Pendidikan dan Pelatihan	788
Inspektorat.....	799
Badan Kepegawaian Daerah.....	808
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.....	821
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.....	834
Dinas Pertanian	846
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	863
Dinas Pariwisata	877
Dinas Kelautan dan Perikanan.....	887
5.2 Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015 (Dana	
Keistimewaan)	908
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	915
Dinas Kesehatan	919
RS. Ghrasia	921
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM	922
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	929
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	930
Badan Lingkungan Hidup.....	933
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	934
Dinas Sosial	935
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	936
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	937
Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.....	939
Dinas Kebudayaan	941
Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas.....	953
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	954
Satuan Polisi Pamong Praja.....	955
Biro Tata Pemerintahan	956

Biro Hukum.....	958
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.....	962
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	963
Biro Administrasi Pembangunan	964
Biro Organisasi.....	965
Biro Umum, Humas, dan Protokol	967
Sekretaris DPRD	968
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset.....	969
Badan Pendidikan dan Pelatihan	970
Inspektorat	971
Badan Kepegawaian Daerah	972
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	973
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	974
Dinas Pertanian	976
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	977
Dinas Pariwisata	978
Dinas Kelautan dan Perikanan	980
BAB 6 PENUTUP.....	992

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota, 2012	15
Tabel 2.2	Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis DIY	16
Tabel 2.3	Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY	16
Tabel 2.4	Potensi Ketersediaan Air Sampai Tahun 2011 (dalam juta m ³).....	24
Tabel 2.5	Debit Rerata Sungai di DIY	24
Tabel 2.6	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY, 1971-2010	36
Tabel 2.7	Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012	37
Tabel 2.8	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012	38
Tabel 2.9	IPM DIY Menurut Komponen, 2009-2012	39
Tabel 2.10	IPM Antar Kabupaten/Kota di DIY, 2008-2011.....	40
Tabel 2.11	Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2009-2013.....	43
Tabel 2.12	Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2009-2013.....	43
Tabel 2.13	Distribusi Persentase PDRB DIY ADHB Menurut Lapangan Usaha, 2008-2012	44
Tabel 2.14	PDRB DIY ADHB Menurut Penggunaan, 2009-2013.....	45
Tabel 2.15	Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran 2008-2013.....	48
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 2009-2013.....	51
Tabel 2.17	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2012-September 2013	52

Tabel 2.18	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Daerah, September 2012-September 2013	54
Tabel 2.19	Jumlah Kejahatan Yang terselesaikan Tahun 2008-2012.....	54
Tabel 2.20	Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012.....	55
Tabel 2.21	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota, 2009-2012	57
Tabel 2.22	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010-2012/2013.....	58
Tabel 2.23	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010-2012/2013.....	59
Tabel 2.24	Angka Kelulusan Menurut Jenjang di DIY, 2009-2013	61
Tabel 2.25	Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kelahiran Hidup DIY Tahun 2009-2013	63
Tabel 2.26	Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013	63
Tabel 2.27	Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2008-2013 ..	65
Tabel 2.28	Jumlah Organisasi Kesenian di DIY, 2009-2013	66
Tabel 2.29	Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013.....	67
Tabel 2.30	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2009-2013	67
Tabel 2.31	Perkembangan Sistem Budaya di DIY, 2008-2012	67
Tabel 2.32	Perkembangan Pembangunan Kebudayaan di DIY, 2009-2013	68
Tabel 2.33	Klasifikasi Kelompok Seni, 2012	73
Tabel 2.34	Kawasan Cagar Budaya	74
Tabel 2.35	Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2009-2013.....	75
Tabel 2.36	Penanganan Cagar Budaya, 2009-2013.....	75
Tabel 2.37	Klasifikasi BCB Hingga 2011.....	75
Tabel 2.38	Perbandingan Data BCB DIY dan Nasional, Tahun 2013.....	76
Tabel 2.39	Daftar Museum di DIY	78
Tabel 2.40	Pemuda dan Olah Raga di DIY, 2009-2013.....	80
Tabel 2.41	Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, 2008-2013.....	81
Tabel 2.42	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah 9APS) Pendidikan Dasar DIY Tahun 2009-2013	82

RKPD Tahun 2015

Tabel 2.43	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten/Kota di DIY, 2013.....	82
Tabel 2.44	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di DIY, 2009-2013.....	83
Tabel 2.45	Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013	83
Tabel 2.46	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di DIY, 2009-2013	84
Tabel 2.47	Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013	85
Tabel 2.48	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah di DIY, 2008-2012	86
Tabel 2.49	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Usia 16-18 per Kabupaten/Kota di DIY, 2013	86
Tabel 2.50	Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di DIY, 2009-2013.....	87
Tabel 2.51	Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Pendidikan Menengah Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013	87
Tabel 2.52	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah di DIY, 2009-2013	88
Tabel 2.53	Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013	88
Tabel 2.54	Jumlah Lembaga, Murid PAUD di DIY, 2013.....	89
Tabel 2.55	Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan MI DIY Tahun 2008/2009-2012/2013	90
Tabel 2.56	Angka Putus Sekolah Tingkat SMP dan MTs DIY Tahun 2008-2009 s/d 2012/2013	91
Tabel 2.57	Angka Putus Sekolah Tingkat SMA dan MA DIY Tahun 2008/2009-2012/2013	92
Tabel 2.58	Angka Lulusan Tingkat SD dan MI DIY Tahun 2008/2009-2012/2013	93
Tabel 2.59	Angka Lulusan Tingkat SMP dan MTs DIY Tahun 2008/2009-2012/2013	94
Tabel 2.60	Angka Lulusan Tingkat SMA dan MA di DIY Tahun 2008/2009-2012/2013	95

Tabel 2.61	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1-DIV Per Jenjang Pendidikan di DIY, 2009-2013.....	96
Tabel 2.62	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1-DIV (SD-SLTA) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2009-2013.....	96
Tabel 2.63	Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu Per Satuan Balita DIY Tahun 2009-2013	97
Tabel 2.64	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2012.....	98
Tabel 2.65	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2011-2013....	99
Tabel 2.66	Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011	99
Tabel 2.67	Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2009-2013.....	100
Tabel 2.68	Jumlah dan Rasio Perawat dan Bidan Per 100.000 Penduduk di DIY, 2009-2011.....	101
Tabel 2.69	Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu DIY Tahun 2011-2013.....	102
Tabel 2.70	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2009-2013	102
Tabel 2.71	Rusunawa di DIY.....	109
Tabel 2.72	Jumlah Simpul Transportasi Jalan di DIY	116
Tabel 2.73	Load Factor Angkutan Umum Perkotaan dan AKDP di DIY	117
Tabel 2.74	Jumlah Simpul Transportasi Kereta Api di DIY	117
Tabel 2.75	Jumlah Simpul Transportasi Udara di DIY.....	118
Tabel 2.76	Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet, 2012	119
Tabel 2.77	Kualitas Udara Ambien di Sekitar Ruas-Ruas Jalan Protokol di DIY, 2012.....	123
Tabel 2.78	Capaian IPG Menurut Kabupaten/Kota DIY, 2008-2011	129
Tabel 2.79	Capaian Menurut Komponen, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota DIY, 2010-2011.....	130
Tabel 2.80	Capaian IDG DIY, 2010-2011.....	130
Tabel 2.81	Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012	131
Tabel 2.82	Rasio Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2012.....	132

RKPD Tahun 2015

Tabel 2.83	Rasio Perempuan Pada Jabatan Struktural Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota/DIY, 2012.....	132
Tabel 2.84	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di DIY, 2009-2012.....	133
Tabel 2.85	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY, 2010-2012	133
Tabel 2.86	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY	134
Tabel 2.87	Rasio Akseptor KB.....	136
Tabel 2.88	Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY, 2009-2011	138
Tabel 2.89	Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2012	138
Tabel 2.90	Jumlah Panti Sosial Milik Pemerintah dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2013.....	140
Tabel 2.91	PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2009-2013	141
Tabel 2.92	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2012-2013	141
Tabel 2.93	Jenis dan Jumlah PSKS di DIY, 2008-2013	142
Tabel 2.94	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2008-2012	149
Tabel 2.95	Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2009-2013.....	149
Tabel 2.96	Perkembangan Wirausaha Baru Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013	150
Tabel 2.97	Perkembangan Investasi di DIY.....	150
Tabel 2.98	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di DIY, 2009-2013.....	153
Tabel 2.99	Produksi Telur Unggas DIY Tahun 2008-2012	163
Tabel 2.100	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) di Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012.....	168
Tabel 2.101	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012.....	168
Tabel 2.102	Persentase Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2011	169
Tabel 2.103	Persentase PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011	169
Tabel 2.104	LSM Aktif DIY Tahun 2011-2012	170
Tabel 2.105	Jumlah PMKS Tahun 2009-2013	170
Tabel 2.106	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2009-2013	170

Tabel 2.107	Jumlah LSM DIY, 2009-2013	170
Tabel 2.108	LPM Berprestasi Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2012.....	171
Tabel 2.109	Data Pengolahan Arsip Statis BPAD Hingga Tahun 2013	176
Tabel 2.110	Data Alih Media BPAD Hingga Tahun 2012.....	176
Tabel 2.111	Data Alih Media BPAD Hingga Tahun 2012.....	177
Tabel 2.112	Jumlah Sambungan Telepon di DIY (%), 2007-2012.....	177
Tabel 2.113	Jumlah Warnet di DIY, 2010-2013	178
Tabel 2.114	Jumlah Media/Sarana Komunikasi di DIY, 2008-2012	178
Tabel 2.115	Jumlah Perpustakaan di DIY Per Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013.....	179
Tabel 2.116	Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2011-2013	180
Tabel 2.117	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah DIY	180
Tabel 2.118	Persentase Perpustakaan Desa di DIY Tahun 2013	182
Tabel 2.119	Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY 2009-2013	185
Tabel 2.120	Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2013	186
Tabel 2.121	Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2009-2013...	187
Tabel 2.122	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY	190
Tabel 2.123	Perkembangan Ekspor DIY	194
Tabel 2.124	Perkembangan Jumlah Kumulatif SIUP Yang Terdaftar di DIY	194
Tabel 2.125	Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional	195
Tabel 2.126	Perkembangan IKM di DIY	195
Tabel 2.127	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, 2008-2012	197
Tabel 2.128	Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di DIY, 2008-2012	198
Tabel 2.129	Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnya di DIY 2009-2013 (Januari)	200
Tabel 2.130	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, 2008-2012.....	200
Tabel 2.131	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, 2009-2012	201
Tabel 2.132	Panjang Jalan Berdasarkan Kelas dan Kondisi dalam Km	202
Tabel 2.133	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga DIY Terlayani Sanitasi Layak, 2010-2012	204

RKPD Tahun 2015

Tabel 2.134	Persentase Lokasi Kumuh Yang Telah Ditangani	204
Tabel 2.135	Jumlah Simpang ATCS di DIY	206
Tabel 2.136	Jumlah Halte Terpasang BTS/BIS di DIY	206
Tabel 2.137	Transaksi Penggunaan Kartu Elektronik Trans Jogja	206
Tabel 2.138	Luas Wilayah Produktif (Ha)	207
Tabel 2.139	Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kasus di DIY, 2008-2012	208
Tabel 2.140	Jumlah Demo di DIY, 2008-2013	210
Tabel 2.141	Rata-rata Lama Pengurusan Izin, 2013	210
Tabel 2.142	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di DIY, 2013.....	211
Tabel 2.143	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di DIY, 2010.....	212
Tabel 2.144	Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Wilayah dan Pendidikan Tertinggi Yang Diamanatkan di DIY, 2010	213
Tabel 2.145	Rasio Ketergantungan di DIY, 2009-2013.....	213
Tabel 2.146	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dawerah Tahun 2013.....	216
Tabel 3.1	Proyeksi Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015=2016.....	301
Tabel 3.2	Kontribusi PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), 2013-2017 (%).....	302
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000) Tahun 2013-2017 (%).....	304
Tabel 3.4	Perbandingan Inflasi DIY dengan Inflasi Nasional Tahun 2005- 2013 (%)	305
Tabel 3.5	Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2015-2016 (%)	305
Tabel 3.6	Perkembangan ICOR DIY Tahun 2010-2016	306
Tabel 3.7	Penduduk Bekerja, Pengangguran Terbuka, dan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2009-2016.....	307
Tabel 3.8	Indeks Williamson DIY Tahun 2007-2016	310
Tabel 3.9	Indeks Gini DIY Tahun 2008-2016	311
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2013-2016	312
Tabel 4.1	Tahapan Utama RPJPD 2005-2025	323
Tabel 4.2	prosentase sinkronisasi prioritas DIY dengan prioritas Nasional	333
Tabel 4.3	Jumlah Sasaran RTS Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha dan Kabupaten-Kota Tahun 2014	335
Tabel 4.4	Sasaran Kewilayahan Tahun 2015.....	338
Tabel 4.5	Sasaran pembangunan Nasional terhadap DIY Tahun 2015	338

Tabel 4.6	Prioritas dan Sasaran Tahun 2015	339
Tabel 4.7	Keselarasan Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan ...	339
Tabel 4.8	Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	340
Tabel 5.1	Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015 (Dana APBD) ...	347
Tabel 5.2	Rekapitulasi usulan kegiatan dan pendanaan Keistimewaan Tahun 2015.....	908
Tabel 5.3	Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015 (Dana Keistimewaan)	908
Tabel 5.4	Rekapitulasi usulan kegiatan dan pendanaan pembangunan melalui APBN Tahun 2015	981
Tabel 5.5	Usulan Kegiatan Dan Pendanaan APBN DIY 2015	982
Tabel 5.6	Program Kegiatan Dak Dan Dana Pendampingan DIY TAHUN 2015.....	989

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pada Tahap Penyusunan RKPD	6
Gambar 1.2	Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD	10
Gambar 1.3	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY	12
Gambar 2.1	Peta Administrasi DIY	14
Gambar 2.2	Komposisi Luas Wilayah DIY	15
Gambar 2.3	Peta Satuan Fisiografis DIY	19
Gambar 2.4	Peta Geologi DIY	22
Gambar 2.5	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di DIY	23
Gambar 2.6	Peta Iklim di DIY	26
Gambar 2.7	Peta Penggunaan Lahan DIY, 2012	27
Gambar 2.8	Luas Hutan Menurut Tata Guna Hutan di DIY (Hektar), 2012	29
Gambar 2.9	Luas Hutan Menurut Kabupaten/Kota di DIY (Hektar), 2012	29
Gambar 2.10	Peta Rawan Bencana DIY	35
Gambar 2.11	Perkembangan Jumlah Penduduk DIY Menurut Sensus Penduduk dan Sensus Penduduk Antar Sensus, 1971-2010	36
Gambar 2.12	Luas Pertumbuhan Penduduk DIY (%), 2012	38
Gambar 2.13	Peta Kepadatan Penduduk di DIY	39
Gambar 2.14	Peta IPM di DIY	41
Gambar 2.15	Pertumbuhan Ekonomi di DIY, 2009-2013	42
Gambar 2.16	Distribusi PDRB DIY Menurut Penggunaan ADHB (%), 2009-2013	45
Gambar 2.17	Perkembangan Laju Inflasi Kota Yogyakarta (%), 2008-2013	47
Gambar 2.18	Nilai PDRB Per Kapita DIY (Rupiah), 2009-2013	49

Gambar 2.19	Rasio Gini di DIY (%), 2009-2013	49
Gambar 2.20	Indeks Williamson DIY, 2009-2013	50
Gambar 2.21	Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2009-2013.....	51
Gambar 2.22	Indeks Keparahan Kemiskinan DIY, 2009-2013.....	53
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Tahun 2009-2012.....	55
Gambar 2.24	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) DIY 2009-2013....	56
Gambar 2.25	Perbandingan Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Antar Provinsi 2012	62
Gambar 2.26	Perkembangan Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013	62
Gambar 2.27	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2008-2012..	64
Gambar 2.28	Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk DIY Tahun 2008-2012	65
Gambar 2.29	Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan MI DIY Tahun 2008/2009- 2012/2013	90
Gambar 2.30	Angka Putus Sekolah Tingkat SMP dan MTS DIY Tahun 2008/2009-2012/2013	91
Gambar 2.31	Angka Putus Sekolah Tingkat SMA dan MA DIY Tahun 2008/2009- 2012/2013	92
Gambar 2.32	Angka Lulusan Tingkat SMP dan MI DIY Tahun 2008/2009- 2012/2013	94
Gambar 2.33	Angka Lulusan Tingkat SMP dan MTs DIY Tahun 2008/2009 s/d 2012/2013	94
Gambar 2.34	Angka Lulusan Tingkat SMA dan MA di DIY Tahun 2008/2009- 2012/2013	95
Gambar 2.35	Peta Jalur Jalan Lintas Selatan.....	112
Gambar 2.36	Perkembangan IPG DIY, 2008-2011	129
Gambar 2.37	Perkembangan TFR DIY	136
Gambar 2.38	Perkembangan Unmet Need DIY, 2010-2013	137
Gambar 2.39	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional, 2009-2013 (%).....	144
Gambar 2.40	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY (%) 2011-2013	145
Gambar 2.41	Perkembangan TPAK di DIY	147
Gambar 2.42	TPAK Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011-2013 (Agustus).....	148
Gambar 2.43	Persentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2012 Per Kabupaten/Kota.....	151

RKPD Tahun 2015

Gambar 2.44	Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu Tahun 2009-2013	161
Gambar 2.45	Produksi Daging Sapi, Kambing dan Domba Tahun 2008-2012	162
Gambar 2.46	Produksi Daging Ayam Tahun 2008-2012	162
Gambar 2.47	Ketersediaan Energi DIY Tahun 2009-2013.....	163
Gambar 2.48	Ketersediaan Energi DIY Tahun 2009-2013.....	164
Gambar 2.49	Desa Rawan Pangan DIY Tahun 2009-2013	165
Gambar 2.50	Konsumsi Energi DIY, 2008-2013 (Kkal/Kapita/hari)	166
Gambar 2.51	Konsumsi Protein DIY, 2008-2013 (gram/kapita/hari)	166
Gambar 2.52	PPH DIY, 2009-2013 (gram/kapita/hari).....	167
Gambar 2.53	Luas Sawah di DIY Yang Cenderung Menurun, 2008-2012	183
Gambar 2.54	Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu DIY, 200-2013.	184
Gambar 2.55	Tingkat Konsumsi Ikan DIY (Kg/Kapita/Tahun), 2009-2013	192
Gambar 2.56	Produksi Perikanan Budidaya DIY (Ton), 2009-2013.....	193
Gambar 2.57	Produksi Perikanan Tangkap DIY (Ton), 2009-2013.....	193
Gambar 2.58	Nilai Tukar Petani DIY, 2008-2013.....	199
Gambar 3.1	Persentase Tingkat Kemiskinan DIY, Tahun 2011-2016.....	309
Gambar 4.1	Posisi Dokumen RKPD 2015 Terhadap RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2012-2017	322
Gambar 4.2	Posisi Dokumen RKPD 2015 Terhadap Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2012-2017	324
Gambar 4.3	Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2013	326
Gambar 4.4	Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan <i>Key Word</i> Tema Tahun 2015.....	328
Gambar 4.5	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah 2015 dengan RPJMD DIY 2012-2017	331
Gambar 4.6	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional....	332
Gambar 4.7	Arah Pembangunan Kewilayahan DIY.....	334
Gambar 4.8	Persentase Proporsi RTM Berdasarkan Kabupaten-Kota, Tahun 2014	335
Gambar 4.9	Skema Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberian Bantuan Kepada Kabupaten-Kota Tahun 2015	336
Gambar 4.10	Titik Lokasi Sasaran Pengurangan Kemiskinan.....	337

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ditengah tantangan realitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan berbagai aspek seperti konservasi lingkungan, hak asasi manusia, dan teknologi informasi menghasilkan sebuah tantangan baru bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Daerah Istimewa Yogyakarta dihadapkan kepada suatu kompleksitas permasalahan yang saling terkait antar sektor, meskipun demikian cita-cita pembangunan DI Yogyakarta yang berkarakter, berbudaya, maju, dan makmur adalah sebuah tujuan akhir yang harus dicapai. Dibutuhkan suatu landasan pemikiran yang komprehensif untuk menangkap peluang dan tantangan yang ada dimana landasan ini mampu memetakan kerangka permasalahan secara jelas dan terukur dan juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di tengah kompleksitas. Optimalisasi sumber daya dan peningkatan pemahaman kebutuhan masyarakat digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program pembangunan. Hadirnya sebuah landasan yang kuat bagi pembangunan di DI Yogyakarta akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebuah agenda pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh bagian masyarakat dan sektor di dalam DI Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X (2012) dalam menyongsong peradaban baru yang mana DI Yogyakarta dihadapkan oleh realitas sosial yang begitu dinamis dan saling terkait, perlu kebijakan konkret untuk melaksanakan pembangunan yang fokus, terarah, dan efektif melalui prioritas sektor yang dijelaskan di 9 bidang strategis dalam Arah Kebijakan Renaisans Yogyakarta. Prioritas Renaisans Yogyakarta terdiri dari: (1) Pendidikan, (2) Pariwisata, (3) Teknologi, (4) Ekonomi, (5) Energi, (6) Pangan, (7) Kesehatan, (8) Keterlindungan Warga, dan (9) Tata Ruang dan Lingkungan.

Kesembilan sektor ini akan menjadi prioritas pembangunan dengan berpegang kepada Budaya Sebagai Payung dan Arus Utama dalam Pembangunan.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi atas potensi SDA dan SDM diharapkan agar mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Kedua prasarat yang saling berkausalitas tersebut merupakan inti dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan juga tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD DIY.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY.
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan,

indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum SKPD. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara SKPD, Bappeda DIY dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan *sharing*. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY.
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKP.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD.

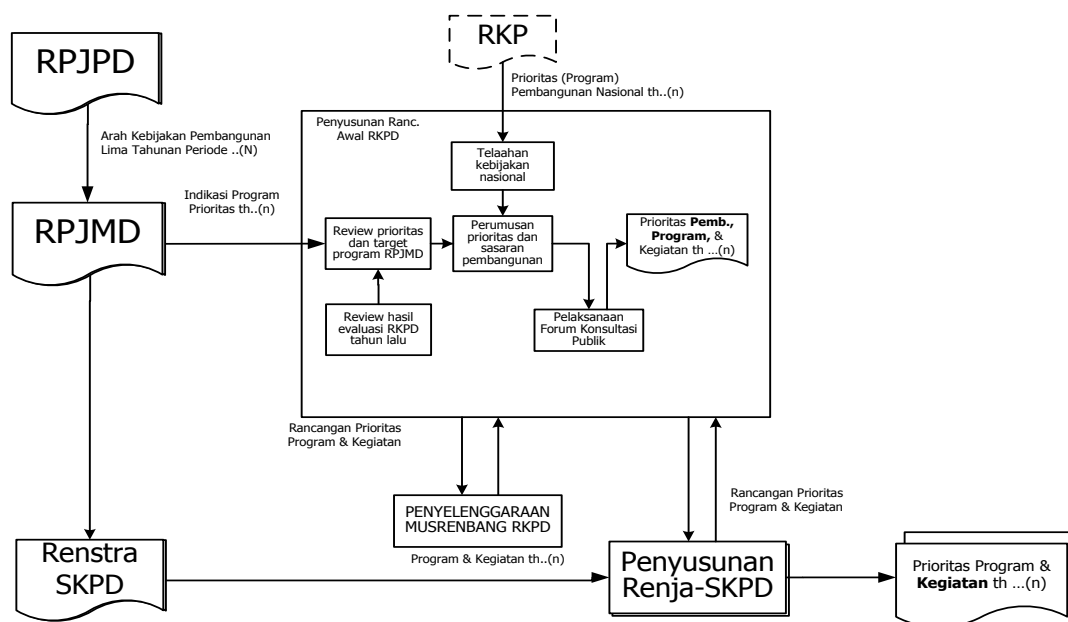
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyelarasan:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah DIY dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD DIY.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah DIY dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD DIY.

Sedangkan mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyalarsan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD DIY 2012-2017. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Gambar 1.1 Baglan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pada Tahap Penyusunan RKPD

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD DIY Tahun 2015 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

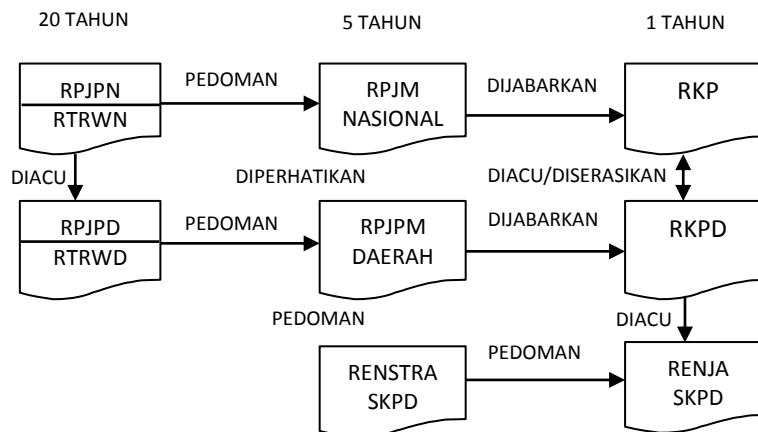
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 ((Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 30);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Gambar 1.2 Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang

diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. Bab IV Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

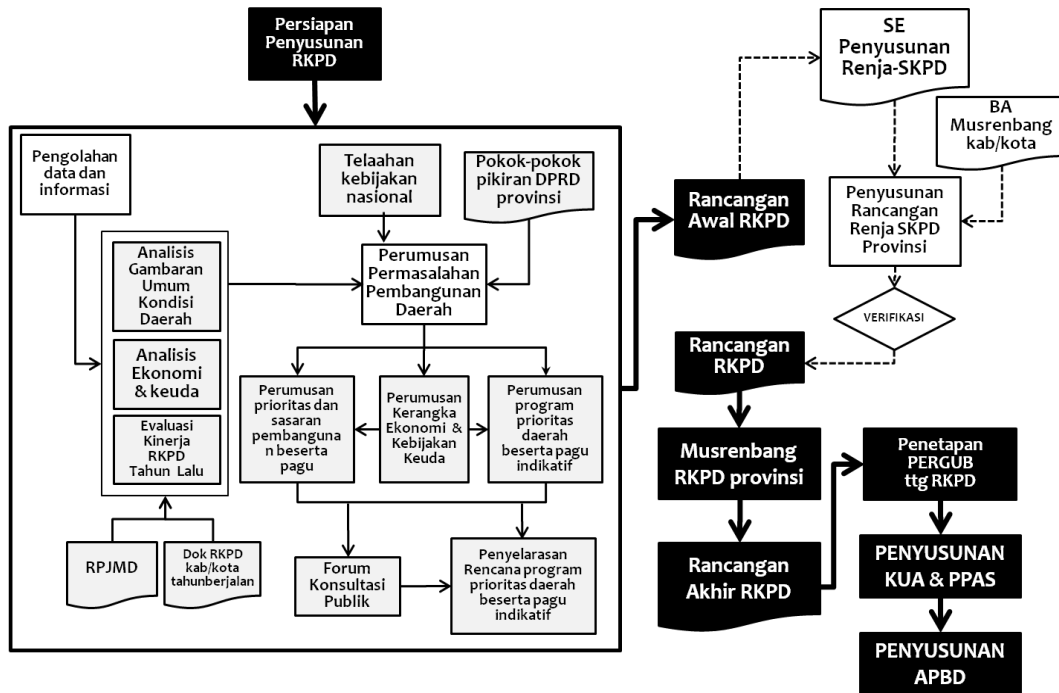
5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2015.



Gambar 1.3 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY

BAB 2

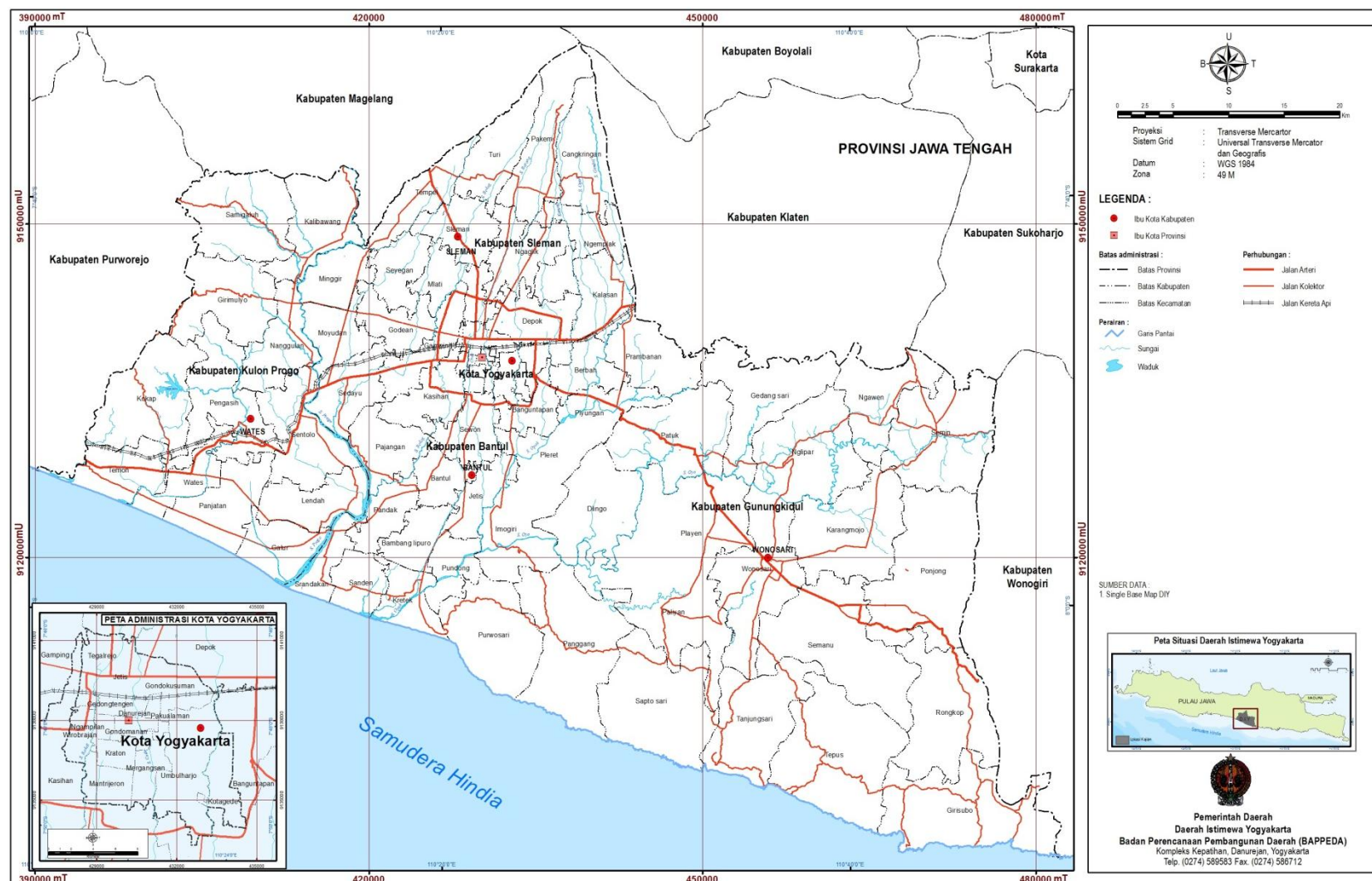
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

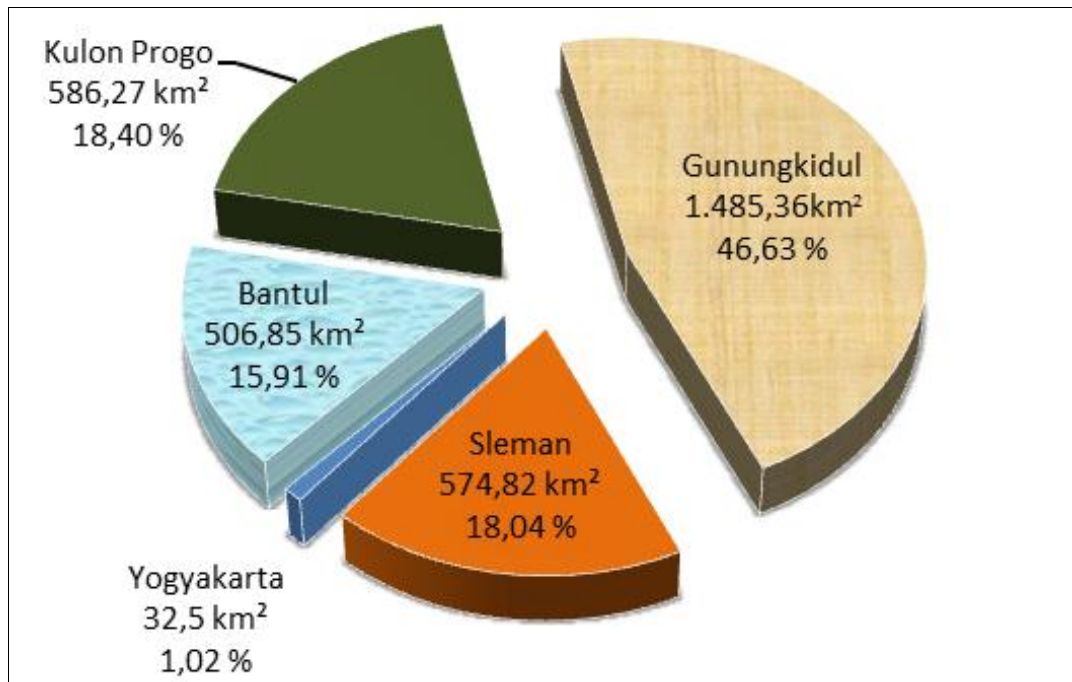
Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DIY secara astronomis terletak antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Sementara itu dilihat dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan dan berbatasan dengan beberapa Provinsi di Jawa Tengah, yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri, sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia.



Gambar 2.1 Peta Administrasi DIY

RKPD Tahun 2015

Wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02% seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Sumber : DDA 2012, Provinsi DIY

Gambar 2.2 Komposisi Luas Wilayah DIY

Secara administratif, DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota, 2012

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/Desa
Kulonprogo	Wates	12	88
Bantul	Bantul	17	75
Gunungkidul	Wonosari	18	144
Sleman	Sleman	17	86
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
DIY	Yogyakarta	78	438

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

2.1.1.2 Letak Dan Kondisi Geografis

DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan

daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis DIY

Kabupaten/Kota	Pesisir	Bukan Pesisir			Jumlah
		Lembah/Daerah Aliran Sungai	Lereng/Punggungan Bukit	Dataran	
Kulon Progo	10	-	22	56	88
Bantul	5	-	11	59	75
Gunungkidul	18	-	56	70	144
Sleman	-	-	11	75	86
Yogyakarta	-	-	-	45	45
DIY	33	0	100	305	438

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan, hal ini menjadikan DIY berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIY memiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah DIY tersebut disajikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
1	Purwosari	Giricahyo	Gunungsemar
2	Panggang	Giriwungu	Payung
3	Tanjungsari	Kemadang	Ngrawe Jumpina Lawang
		Banjarejo	Drini
		Ngestirejo	Watupayungsiratan
4	Tepus	Sidoharjo	Watulawang
		Tepus	Timang
		Purwodadi	Ngondo Watupayungsiyung Watupanjang Watunglambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek
5	Girisubo	Jepitu	Watutogog Jungwok Watutopi Ngusalan

No	Kecamatan	Desa	Nama Pulau
		Tileng	Kalong Amben
		Pucung	Watugrek
		Songbanyu	Gungunggandul Godeg Baron Layar Krokoh

2.1.1.2 Topografi

Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan. Penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Kemiringan lahan

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km², lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km², lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km², dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km².

b. Ketinggian lahan

Luas wilayah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terbagi kedalam beberapa karakter topografis. Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.

DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

- Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;

- Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80–2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
- Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;
- Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Sumber: Bappeda DIY, 2013

Gambar 2.3 Peta Satuan Fisiografis DIY

2.1.1.3 Geologi

Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000 tahun 1977. Formasi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tm_{pk}), Formasi Wonosari - Punung (Tm_{wl}), Formasi Sentolo (Tm_{ps}), Formasi Oyo (Tm_o), Formasi Wuni (Tm_w), Formasi Sambipitu (Tm_{ss}), Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Nglanggran (Tm_{ng}), Formasi Kebo-Butak (Tm_{bk}), dan Formasi Mandalika (Tm_{md}).

Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Oya (Tm_o), Formasi Wonosari-Punung (Tm_{wl}) dan Formasi Kepek (Tm_{pk}). Patahan berupa sesar turun dengan pola *antithetic fault block*, terdapat antara lain pada terban Bantul.

a. Aluvium (Qa)

Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal.

Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.

b. Formasi Gunungapi Merapi (Qvm)

Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.

c. Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo)

Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.

d. Formasi Kepek (Tmpk)

Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.

e. Formasi Wonosari-Punung (Tmwl)

Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan.

Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batugamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu.

Karakteristik yang tersusun dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memiliki karakteristik mudah meloloskan air.

f. Formasi Sentolo (Tmps)

Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari dari batugamping dan batupasir napalan.

g. Formasi Oyo (Tmo)

Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ni terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.

h. Formasi Sambipitu (Tmss)

Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batulempung.

i. Formasi Semilir (Tms)

Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batulempung tufaan.

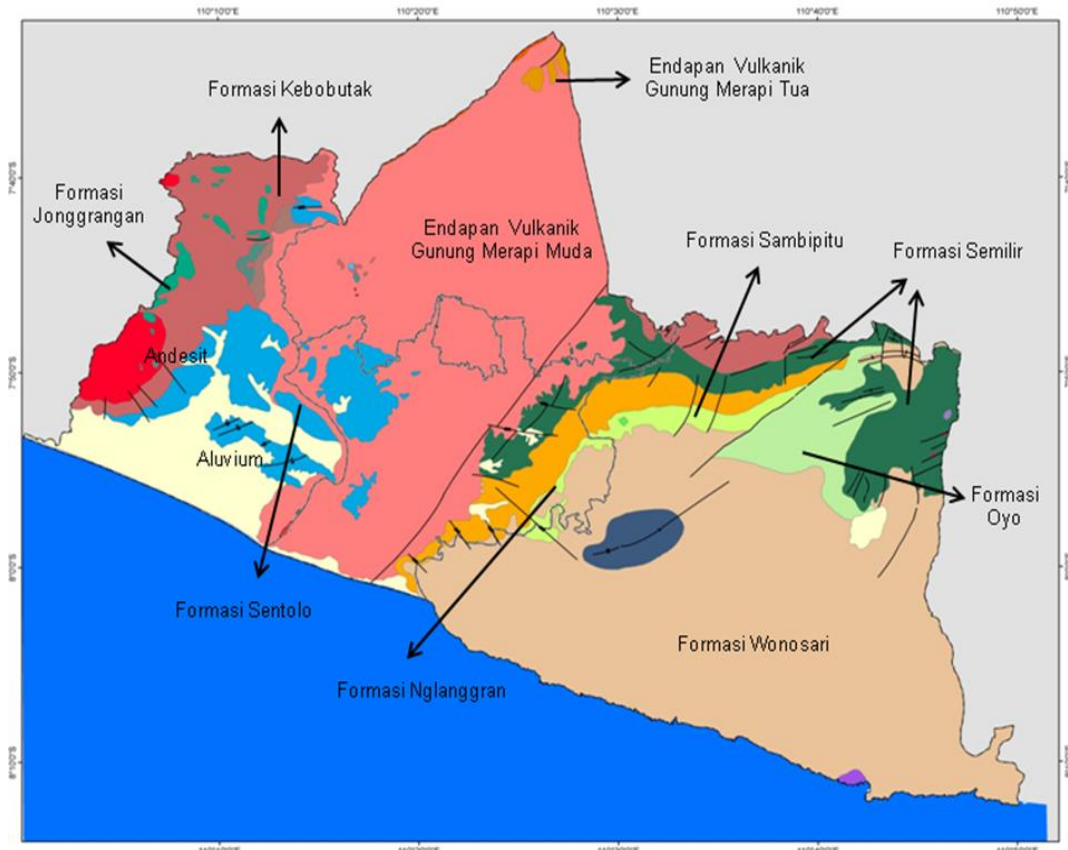
j. Formasi Kebo-Butak (Tomk)

Formasi Kebo-Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintoogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini terusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batupasir dan batu lempung andesit di bagian atasnya.

Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah.

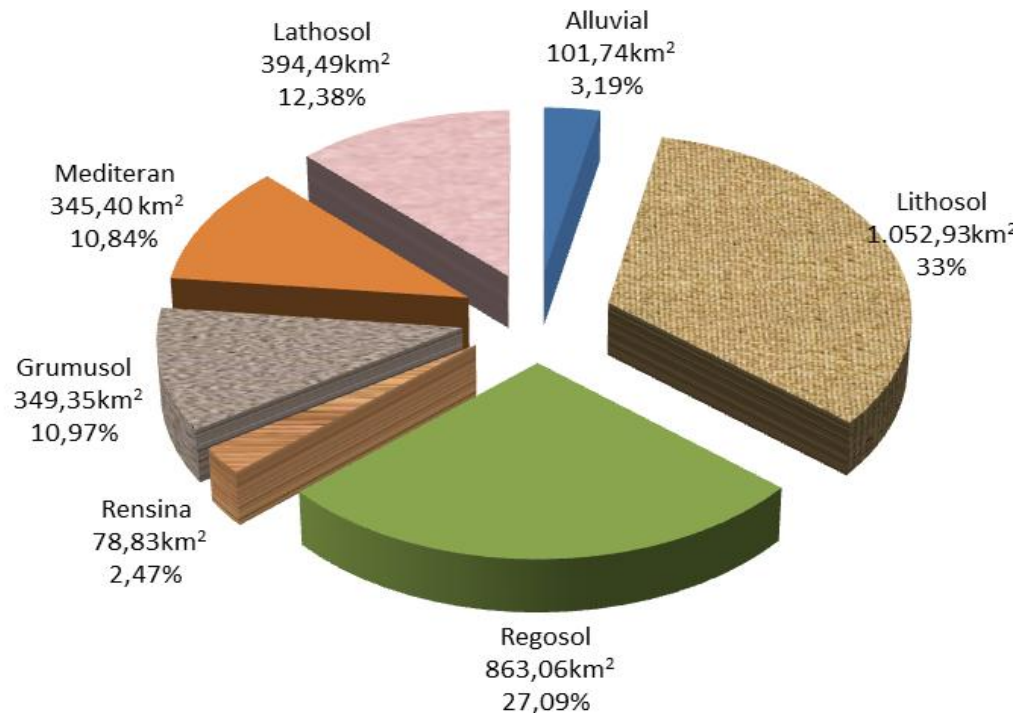
Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis

(batu pasir dan batu lanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.



Gambar 2.4 Peta Geologi DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal ini disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunung Api Merapi yang mengandung tanah regosol seluas 863,06km² atau sekitar 27,09%. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sementara jenis tanah lain di DIY berupa tanah aluvial seluas 101,74 km², lithosol 1.052,93km², resina 78,83km², grumusol 349,35km², mediteran 345,40km², dan lathosol 394,49km².



Sumber : DDA 2012, Provinsi DIY

Gambar 2.5 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di DIY

2.1.1.4 Hidrologi

Ketersediaan air dalam pengertian sumberdaya air berasal dari air hujan sebagai sumber utamanya. Potensi sumberdaya air di DIY terdiri dari air permukaan, dan air tanah. Potensi air permukaan berada di DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, DAS Oyo dan DTA Karst. Sedangkan untuk potensi air tanah adalah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta, CAT Sleman dan CAT Wates.

Secara umum DIY dibagi dalam Daerah Aliran Sungai besar dan kecil, yaitu : DAS Progo, Bedog, Winongo, Code, Gajah Wong, Opak, Serang dan Oya sebagai penyedia sumber air irigasi. Terminologi DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia melalui wilayah Kab. Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah :

- a) DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul.

- b) DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- c) DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekikjamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha.

Tabel 2.4 Potensi Ketersediaan Air Sampai Tahun 2011 (dalam juta m³)

DAS	DAS Serang	DAS Progo	DAS Opak	DAS Oyo	DTA Karst
Volume Air Permukaan	311,59	3.964,59	610,48	1.455,37	1.478,18
Volume Air Tanah	51,12	458,12	432,01	2.224,41	1.013,73
Potensi Sumberdaya Air	362,70	4.422,71	1.042,49	3.679,78	2.491,91

Sumber: Bappeda DIY, 2012

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Selain memiliki potensi pemenuhan kebutuhan sumber daya air, beberapa diantaranya juga memiliki potensi daya rusak yang mendapatkan cukup perhatian dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel 2.5 Debit Rerata Sungai di DIY

Sungai	Debit Rerata Bulanan (m ³ /det)			
	2011		2012	
	Maks	Min	Maks	Min
Sungai Progo (Sta. Karangtalun)	189,50	6,70	107,6	17,9
Sungai Opak (Sta. Tirtorejo)	70,90	0,50	49,50	0,40
Sungai Oyo (Sta. Bunder)	28,0	0,8	17,4	0,3
Sungai Code (Sta. Sidomulyo)	28,85	1,40	8,40	0,90
Sungai Gadjahwong (Sta. Bangerang)	15,50	0,60	3,80	0,40
Sungai Winongo (Sta. Tanjung)	17,60	2,00	9,00	2,00
Sungai Bedog (Sta. Pijenan)	32,20	1,10	62,80	1,80

Sumber: Data BLH dan DPUP-ESDM DIY Diolah, Tahun 2012

Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk SBT Bribin sebesar 0,95 m³/det, SBT Ngobaran 0,70 m³/det, SBT Seropan 0,80 m³/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m³/det.

Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan CAT yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1200 km², yang meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

Perhitungan volume resapan airtanah yang dilakukan melalui rumusan kesetimbangan air dan pengukuran fluktuasi muka airtanah mendapatkan bahwa volume imbuhan air di cekungan ini mencapai 443 juta m³ /tahun. Perhitungan volume air dalam akuifer mendapatkan bahwa 3,5 milyar m³ air terkandung dalam akuifer. Hal ini menunjukkan bahwa, pada musim kemarau yang panjang eksploitasi terhadap airtanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air. Walaupun demikian, menurut Suharyadi (1998), dan Wilopo, (1999) pada beberapa daerah yang bersifat lokal degradasi muka airtanah tercatat cukup signifikan akibat pengumpulan lokasi-lokasi sumur eksploitasi airtanah pada beberapa area.

Total ketersediaan air di DIY adalah 11.999.000,58m³/tahun dan pemanfaatannya untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian sebanyak 1.672.000,98 m³/tahun. (*Neraca Sumber Daya Alam Daerah DIY; 2012*)

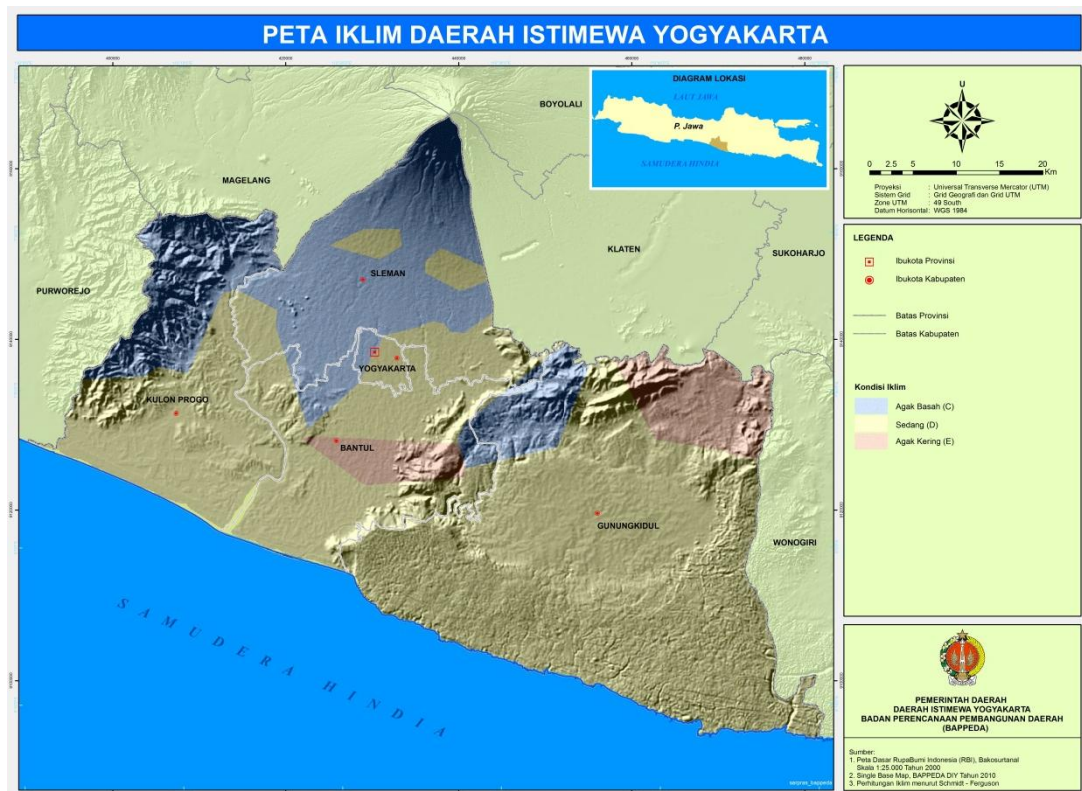
Untuk keperluan pertanian, pemenuhan kebutuhan air irigasi juga dilaksanakan dengan memanfaatkan air tanah dalam atau sumur bor atau dikenal dengan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat pada 95 jaringan irigasi air tanah, Kabupaten Gunungkidul 51 buah dan Kabupaten Sleman 44 buah. (*Dinas PUP PSDM, 2012*)

2.1.1.5 Klimatologi

Suhu udara tahunan di DIY berkisar antara 18°C sampai dengan 24°C. Curah hujan tahunan di DIY berkisar antara 718 mm/th sampai 2292,3 mm/th. Curah hujan yang rendah umumnya dijumpai di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, sedangkan curah hujan yang relatif tinggi dijumpai di wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan fakta ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya air yang besar ditinjau dari banyaknya input dari air hujan.

Kelembaban udara tercatat minimum 31% dan maksimum 97%, tekanan udara antara 986,4 – 1001,6 mb dengan arah angin antara 1°-360° dan kecepatan angin antara 0,0 - 18 knot.

Peta iklim dibawah ini menunjukkan kondisi iklim di wilayah DIY yang terbagi menjadi agak basah, sedang dan agak kering.

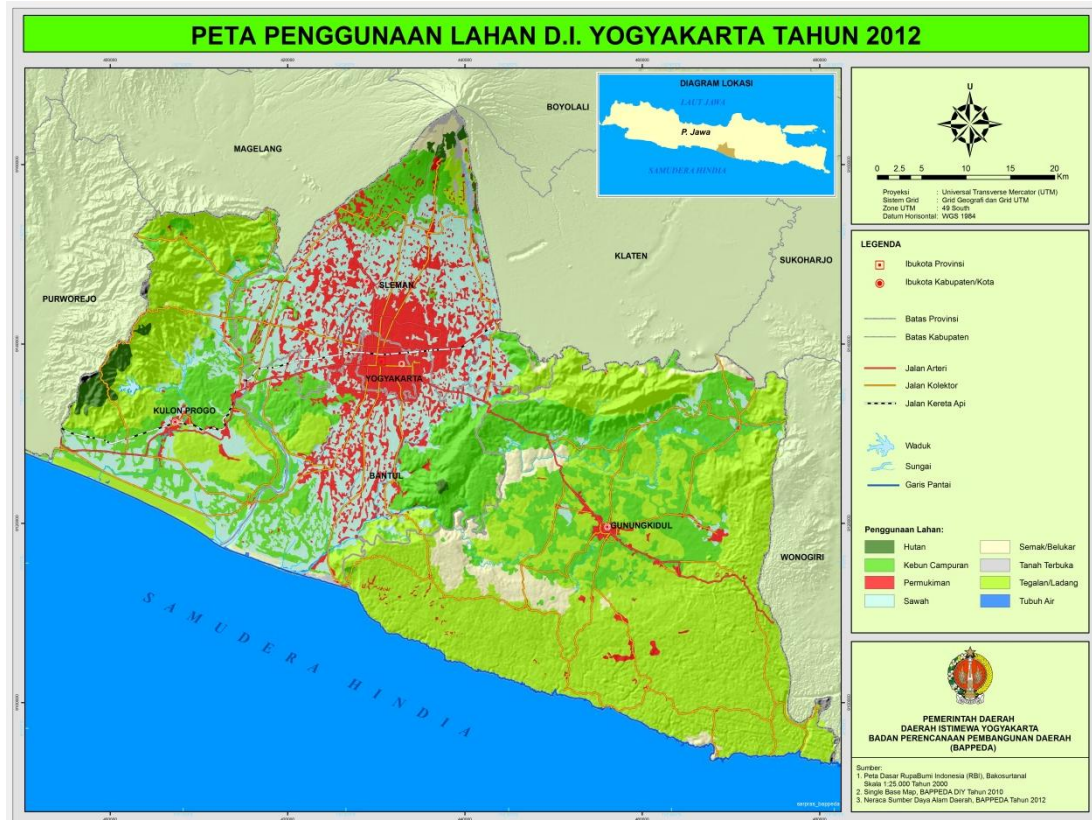


Sumber : BAPPEDA DIY, 2013

Gambar 2.6 Peta Iklim di DIY

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.



Sumber : BAPPEDA DIY, 2013

Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan DIY, 2012

Selanjutnya, menurut Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY No. 2 Tahun 2010, penetapan kawasan lindung bawahan terdiri dari:

- 1) Penetapan hutan lindung seluas 2.312,8000 ha tersebar di tiga kabupaten, yaitu:
 - a. Kabupaten Bantul seluas 1.041,2000 ha di Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri;
 - b. Kabupaten Kulon Progo seluas 254,9000 ha terletak di Kecamatan Kokap;
 - c. Kabupaten Gunungkidul seluas 1.016.7000 ha terletak di Kecamatan Karangmojo, Playen, dan Panggang.
- 2) Penetapan Hutan Fungsi Lindung di:
 - a. Kabupaten Sleman terletak di Kecamatan Tempel;
 - b. Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Dlingo;
 - c. Kabupaten Kulon Progo terletak di Kecamatan Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, dan Temon;

d. Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Gedangsari, Ngawen, dan Semin, dan zona Gunungsewu meliputi Kecamatan Ponjong, Purwosari, dan Rongkop.

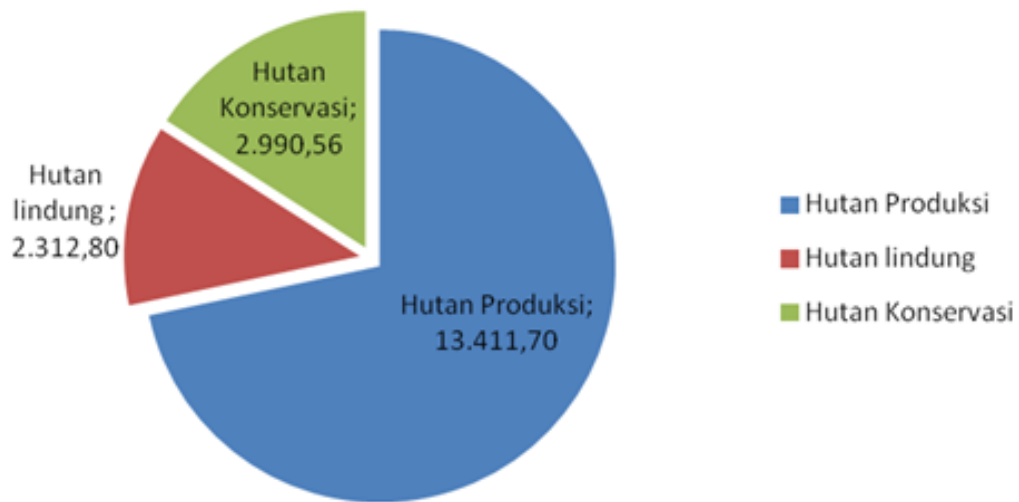
- 3) Penetapan kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Penetapan kawasan lindung setempat, yaitu: 1) kawasan sepadan pantai ditetapkan sepanjang dataran Pantai Selatan. 2) kawasan sepadan sungai di luar kawasan perkotaan ditetapkan pada Sungai Bogowonto, Progo, dan Opak. 3) Kawasan sepadan waduk, embung, telaga, dan laguna ditetapkan di kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. 4) kawasan sepadan mata air ditetapkan di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan suaka alam DIY yang merupakan bagian dari kawasan lindung ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Cagar alam geologi dan hutan penelitian di Kabupaten Gunungkidul;
- 2) Cagar alam di Kecamatan Gamping (Kabupaten Sleman) seluas 0,0150 ha dan cagar alam di Kecamatan Imogiri (Kabupaten Bantul) seluas 11,4000 ha;
- 3) Taman hutan raya terletak di Kecamatan Patuk dan Playen (Kabupaten Gunungkidul) seluas 617 ha;
- 4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terletak di seluruh kabupaten/kota.

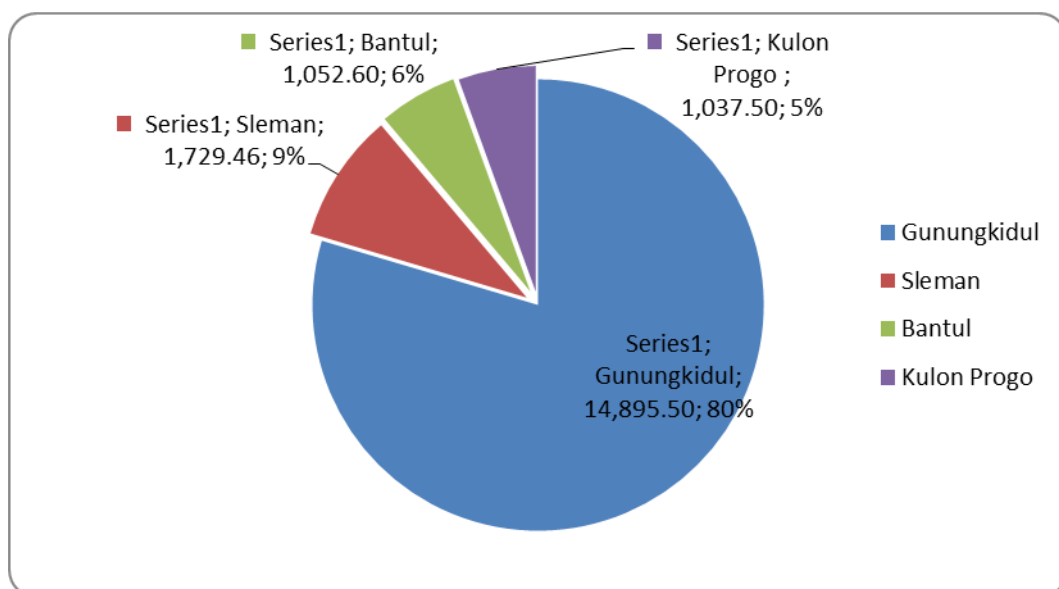
Kondisi tahun 2012, hutan di DIY tercatat seluas 18.715,06 ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 13.411,70 ha, hutan lindung seluas 2.312,80 ha dan hutan konversi seluas 2.990,56 ha. Hutan konversi terdiri dari Cagar Alam 11,40 ha; Taman Wisata Alam 1.046,00 ha; Suaka Margasatwa 615,60 ha; Taman Nasional 1.729,46 ha; dan Taman Hutan Raya 634,10 ha.



Sumber : DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.8 Luas Hutan Menurut Tata Guna Hutan di DIY (Hektar), 2012

Hutan di DIY tersebar di empat kabupaten, hutan terluas terletak di Kabupaten Gunungkidul 14.895,50 ha diikuti oleh Kabupaten Sleman 1.729,46 ha; Kabupaten Bantul 1.052,60 ha; dan Kabupaten Kulon Progo seluas 1.037,50 ha.



Sumber : DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.9 Luas Hutan Menurut Kabupaten/Kota di DIY (Hektar), 2012

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, kawasan budidaya di DIY terdiri dari:

1) Kawasan Hutan Produksi

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diantaranya adalah :

- a. melestarikan kawasan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan papan, energi dan pangan;
- b. mengembangkan hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
- c. mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan produksi;
- d. mempertahankan fungsi kawasan hutan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diarahkan pada:

- a. Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,1000 ha;
- b. Kabupaten Kulon Progo seluas 601,6000 ha

2) Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering. Kebijakan pada kawasan pertanian lahan basah antara lain adalah:

- a. melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, mpenjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Kebijakan pada kawasan pertanian lahan kering diantaranya adalah:

- a. melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
- b. mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;
- c. mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan kering;
- d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum.

Penetapan kawasan pertanian di DIY diarahkan sebagai berikut:

- a. Kawasan pertanian lahan basah terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
- b. Kawasan pertanian lahan kering terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

DIY dalam rangka melindungi lahan pertanian abadi dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan telah mempunyai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW Daerah ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha (merupakan lahan inti). Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di wilayah:

- a. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha;
- b. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha;
- c. Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan
- d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha.

3) Kawasan Pertambangan

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertambangan adalah memanfaatkan potensi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan diarahkan sebagai berikut:

Kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi dapat dilakukan di:

- a. kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana alam;
- b. kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, kawasan industri, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Gunungkidul untuk pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong dan Panggang, sementara untuk pertambangan kaolin di Kecamatan Semin
- b. Kabupaten Kulon Progo yaitu:
 - Perbukitan Menoreh untuk pertambangan emas di Kecamatan Kokap, mangaan di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, dan Pengasih;
 - Kawasan Pesisir Pantai Selatan untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur.
- c. Kabupaten Sleman untuk pertambangan pasir di Kecamatan Pakem dan Minggir.

4) Kawasan Industri

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi a) mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b) mengembangkan kegiatan industri yang tidak menimbulkan pencemaran. Arahan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

5) Kawasan Pariwisata

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata adalah memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam. Arahan penetapan kawasan peruntukan pariwisata meliputi :

- a. Kawasan pariwisata budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
- b. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

- c. Kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

6) Kawasan Pendidikan Tinggi

Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan tinggi meliputi a) Memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada; b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendukung kawasan pendidikan tinggi. Arah penetapan kawasan pendidikan tinggi sebagai berikut:

- a. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru;
- b. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada terletak di kawasan perkotaan Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
- c. kawasan pendidikan tinggi baru terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

7) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan pariwisata, pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut. Arah penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY, yaitu:

- a. kawasan pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul
- b. kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul.

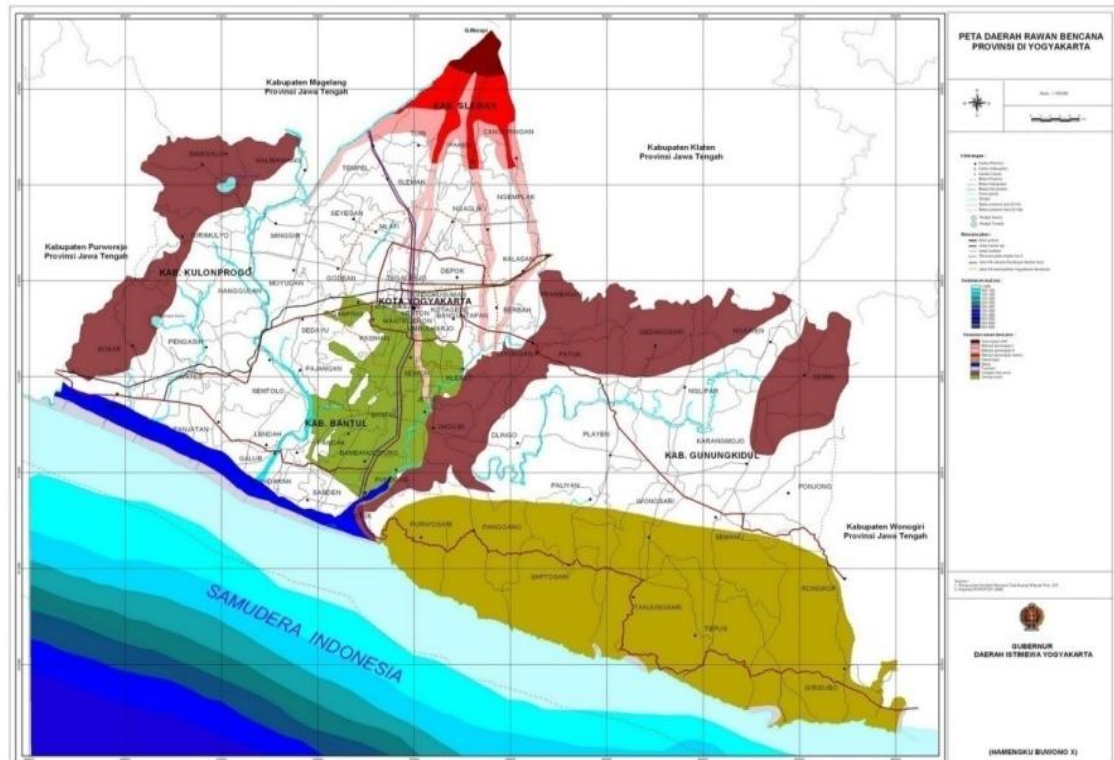
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, penetapan kawasan rawan bencana alam di DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi.
- 2) Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung)

yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.

- 3) Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.
- 4) Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst.
- 5) Kawasan rawan angin topan di Kabupaten/Kota.
Bencana alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta.
- 6) Kawasan rawan gempa bumi di Kabupten/Kota.
Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempa bumi.
- 7) Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut).



Sumber: RTRW DIY, 2009-2029

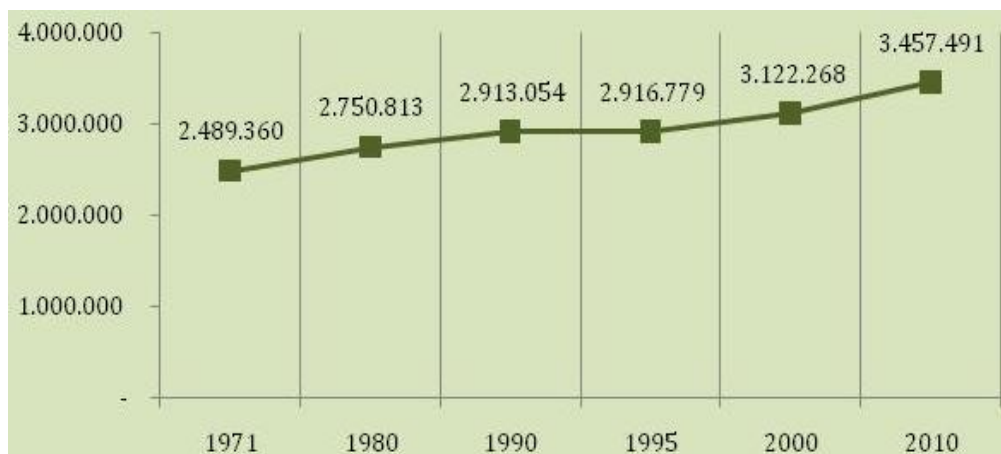
Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana DIY

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yang mungkin terjadi di wilayah DIY antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Sedangkan potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam dan manusia/sosial, baik frekuensi maupun kerawannya selama ini relatif kecil.

2.1.4 Demografi

Pertumbuhan penduduk DIY secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 1971 hingga 2010 jumlah penduduk DIY terus mengalami

peningkatan. Jumlah penduduk DIY tahun 1971 sebanyak 2.489.360 orang meningkat menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010 kemudian diperkirakan meningkat sebanyak 29.834 orang menjadi 3.487.325 orang pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dari hasil estimasi diperkirakan mencapai 3.514.762 jiwa.



Sumber : DDS 2012, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.11 Perkembangan Jumlah Penduduk DIY Menurut Sensus Penduduk dan Sensus Penduduk Antar Sensus, 1971-2010

Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 1971-2010 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1990, struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY, 1971-2010

Kelompok Umur	1971	1980	1990	2000	2010
0 – 14	40,90	35,06	28,28	22,38	21,96
15 – 64	54,82	59,14	64,46	69,10	68,53
65 +	4,38	5,80	7,26	8,53	9,51
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY

Kondisi tahun 2012 menunjukkan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.514.762 orang yang sebagian besar terpusat di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.114.833

orang. Sementara itu Kabupaten Kulonprogo memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebanyak 393.221 orang.

Sementara itu jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan DIY sebesar 50,57% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yang sekitar 49,43%. Hal tersebut juga terlihat dari besarnya *sex ratio* DIY sebesar 97,76% yang berarti bahwa terdapat sekitar 97 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Wilayah DIY yang memiliki *sex ratio* tertinggi adalah Kabupaten Sleman, yaitu 100,53% dan terendah adalah Gunungkidul, yaitu 93,69%. Untuk Kabupaten Sleman jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.7 **Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012**

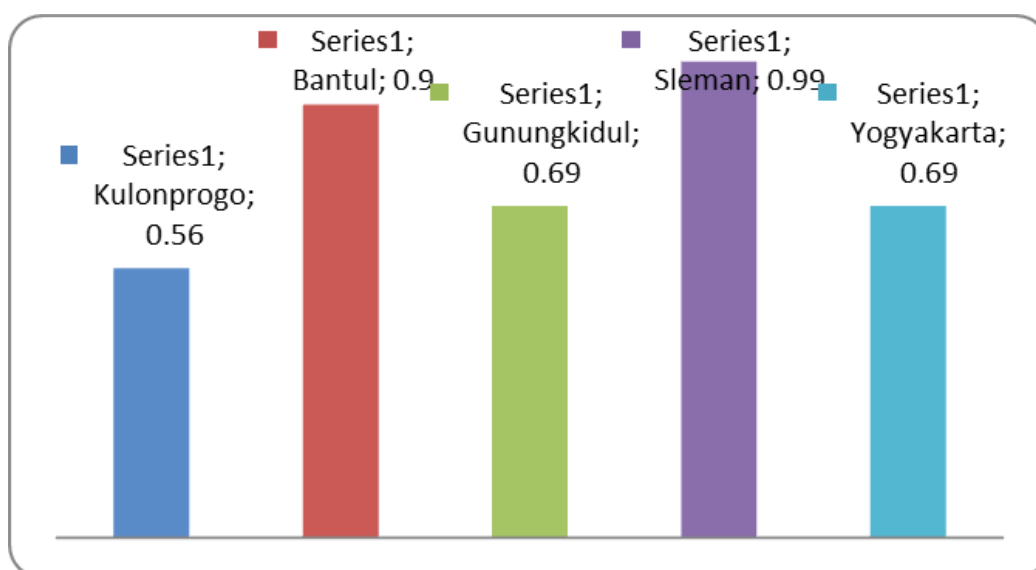
Kabupaten/Kota	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio (%)
Kulon Progo	192.829	200.392	393.221	96,23
Bantul	462.793	465.158	927.956	99,49
Gunungkidul	331.220	353.520	684.740	93,69
Sleman	558.900	555.933	1.114.833	100,53
Kota Yogyakarta	191.759	202.253	394.012	94,81
DIY	1.737.506	1.777.256	3.514.762	97,76

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY relatif rendah. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk DIY tercatat sebesar 0,82% turun dari tahun 2010 yang sebesar 1,02%. Rendahnya laju pertumbuhan penduduk tak lepas dari keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan kelahiran seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut wilayah, hampir seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami pertumbuhan penduduk yang positif. Pada tahun 2012 Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Kulonprogo sebesar 0,56% dan tertinggi berada di Kabupaten Sleman, yaitu 0,99%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dan Bantul dimungkinkan karena pergeseran lokasi perguruan tinggi ke arah kedua kabupaten tersebut sehingga banyak pendatang baru yang datang untuk belajar di DIY yang kemudian tinggal di kedua kabupaten tersebut. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Sleman dan Bantul tersebut juga disebabkan oleh semakin jenuhnya Kota Yogyakarta untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman sehingga banyak penduduk yang memilih bermukim di daerah penyangga kota. Secara grafis laju

pertumbuhan penduduk kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada diagram batang dibawah ini :



Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.12 Luas Pertumbuhan Penduduk DIY (%), 2012

Luas wilayah mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2012, Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai wilayah terluas dengan jumlah penduduk 684.740 orang (19,48%) tercatat sebagai kabupaten berkepadatan penduduk terendah, yaitu 461 orang/km² sedangkan Kota Yogyakarta yang memiliki wilayah terkecil dengan jumlah penduduk 394.012 orang (11,12%) tercatat sebagai wilayah DIY yang berkepadatan penduduk tertinggi, yaitu 12.123 orang/km².

Tabel dibawah ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten dan Kota diwilayah DIY pada tahun 2012 :

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan Penduduk
Kulonprogo	586,27	393.221	671
Bantul	506,85	927.956	1.831
Gunungkidul	1.485,36	684.740	461
Sleman	574,82	1.114.833	1.939
Yogyakarta	32,50	394.012	12.123
DIY	3.185,80	3.514.762	1.103

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

RKPD Tahun 2015

Selanjutnya tingkat kepadatan penduduk Kabupaten/kota di DIY dapat dilihat pada peta dibawah ini :



Sumber : BAPPEDA DIY, 2013

Gambar 2.13 Peta Kepadatan Penduduk di DIY

Angka IPM DIY merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk DIY. IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik.

Tabel 2.9 IPM DIY Menurut Komponen, 2009-2012

Tahun	Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil per kapita (ribu rupiah)	IPM
2009	73,16	90,18	8,78	644,67	75,23
2010	73,22	90,84	9,07	646,56	75,77
2011	73,27	91,49	9,20	650,16	76,32
2012	73,27	92,02	9,21	653,78	76,75

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2012

Angka IPM DIY selama kurun waktu 2009 hingga 2012 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2012, IPM DIY tercatat sebesar 76,75 naik dari angka IPM tahun 2011 yang sebesar 76,32. Nilai IPM DIY tahun 2012 menduduki peringkat 4 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya nilai IPM DIY ini didukung oleh tingginya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Sementara itu jika dilihat menurut kabupaten/kota, peringkat IPM Kota Yogyakarta selalu menempati posisi pertama atau nilainya terbesar jika dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY dan peringkat kedua capaian IPM adalah Kabupaten Sleman.

Tabel 2.10 IPM Antar Kabupaten/Kota di DIY, 2008-2011

Kabupaten/Kota	IPM				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kulon Progo	73,26	73,77	74,49	75,04	75,33
Bantul	73,38	73,75	74,53	75,05	75,58
Gunungkidul	70,00	70,18	70,45	70,84	71,11
Sleman	77,24	77,70	78,20	78,79	79,31
Kota Yogyakarta	78,95	79,29	79,52	79,89	80,24
DIY	74,88	75,23	75,77	76,32	76,75

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008-2012

Dibawah ini adalah peta IPM masing-masing Kabupaten/Kota di DIY, pada tahun 2012.



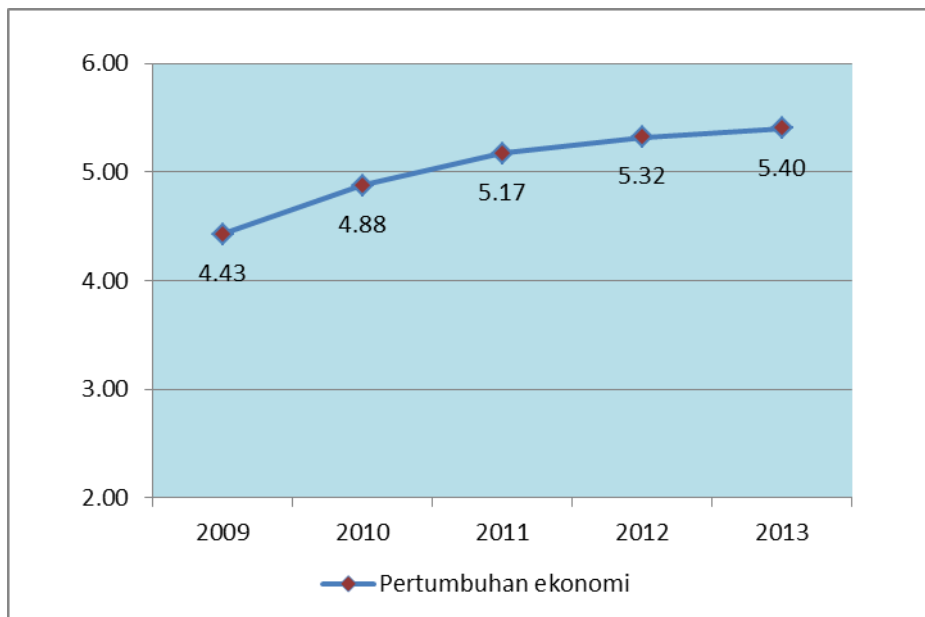
2.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan tertinggi berikutnya dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih (6,54%) serta sektor pengangkutan dan komunikasi (6,30%). Kemudian disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa yang masing-masing

tumbuh sebesar 6,20% dan 5,57%. Sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih tumbuh positif sebesar 0,63%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Gambar 2.15 Pertumbuhan Ekonomi di DIY, 2009-2013

Pertumbuhan ekonomi DIY jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa relatif masih rendah. Bahkan lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena wilayah DIY relatif kecil sehingga sumber daya alam yang dimiliki terbatas dan skala pengembangan industri pengolahan tidak sebesar provinsi lain di Jawa.

Perekonomian DIY lebih mengandalkan sektor tersier terkait dengan perkembangannya sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan peranan sektor pertanian yang merupakan sektor primer cenderung menurun. Penurunan kontribusi sektor pertanian sebagai akibat konversi lahan pertanian dan kenaikan harga biaya produksi pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian DIY mengalami pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga jasa. Industrialisasi yang biasanya terjadi pada beberapa wilayah yang semula berbasis pertanian tidak sepenuhnya terjadi di DIY.

Selama kurun waktu 2009-2013, nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB ADHB tercatat sebesar 41,41 triliun rupiah dan pada tahun 2013 mencapai 63,69 triliun rupiah yang berarti

RKPD Tahun 2015

PDRB DIY secara nominal mengalami kenaikan sebesar 22,28 trilyun rupiah atau 53,82% selama kurun lima tahun tersebut.

Tabel 2.11 Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2009-2013

Lapangan Usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	6.366.771	6.644.695	7.373.852	8.355.326	8.861.281
Pertamb. & Penggalian	293.983	304.660	361.793	379.951	416.531
Industri Pengolahan	5.528.856	6.396.639	7.434.020	7.611.825	8.771.188
Listrik, Gas & Air Bersih	560.316	607.072	675.912	727.714	796.704
Konstruksi	4.431.411	4.833.423	5.580.599	6.186.322	6.908.381
Perdagangan, Hotel & Restoran	8.165.613	9.008.181	10.246.578	11.457.201	13.152.524
Pengangkutan & Komunikasi	3.809.094	4.119.970	4.572.928	4.903.522	5.400.530
Keu., Real Estate & Js Perusahaan	4.090.675	4.552.667	5.158.229	5.876.203	6.543.153
Jasa-jasa	8.160.329	9.158.283	10.381.238	11.536.320	12.840.026
PDRB	41.407.049	45.625.589	51.785.150	57.034.383	63.690.318

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Demikian halnya dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 selama kurun waktu 2009-2013 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB riil tercatat sebesar 20,06 trilyun rupiah kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 24,57 trilyun rupiah sehingga selama periode tersebut secara riil PDRB DIY naik sebesar 4,51 trilyun rupiah atau 22,44%. Peningkatan nilai PDRB terjadi di semua sektor.

Tabel 2.12 Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2009-2013

Lapangan Usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	3.642.696	3.632.681	3.557.865	3.706.923	3.730.297
Pertamb. & Penggalian	138.748	139.967	156.711	159.808	167.669
Industri Pengolahan	2.610.760	2.793.580	2.983.167	2.915.722	3.142.836
Listrik, Gas & Air Bersih	185.599	193.027	201.243	215.597	229.640
Konstruksi	1.923.720	2.040.306	2.187.805	2.318.448	2.459.173
Perdagangan, Hotel & Restoran	4.162.116	4.383.851	4.611.402	4.920.045	5.225.056
Pengangkutan & Komunikasi	2.128.594	2.250.664	2.430.696	2.581.620	2.744.146
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	1.903.411	2.024.368	2.185.221	2.402.718	2.552.445
Jasa-jasa	3.368.614	3.585.598	3.817.665	4.088.337	4.316.214
PDRB	20.064.257	21.044.042	22.131.774	23.309.218	24.567.476

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Tabel diatas menunjukkan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB yang dapat menggambarkan seberapa besar peranan suatu sektor dalam menunjang perekonomian. Selama periode 2009-2013 struktur perekonomian DIY didominasi oleh empat sektor, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa; sektor pertanian; serta sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengolahan cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Sedangkan peranan sektor lainnya mengalami penurunan pada tahun 2013.

Sektor jasa memberikan kontribusi terbesar pada PDRB DIY dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar 20,04%. Setelah itu diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,99%); sektor pertanian (14,54%), serta sektor industri pengolahan dengan kontribusi 13,77%.

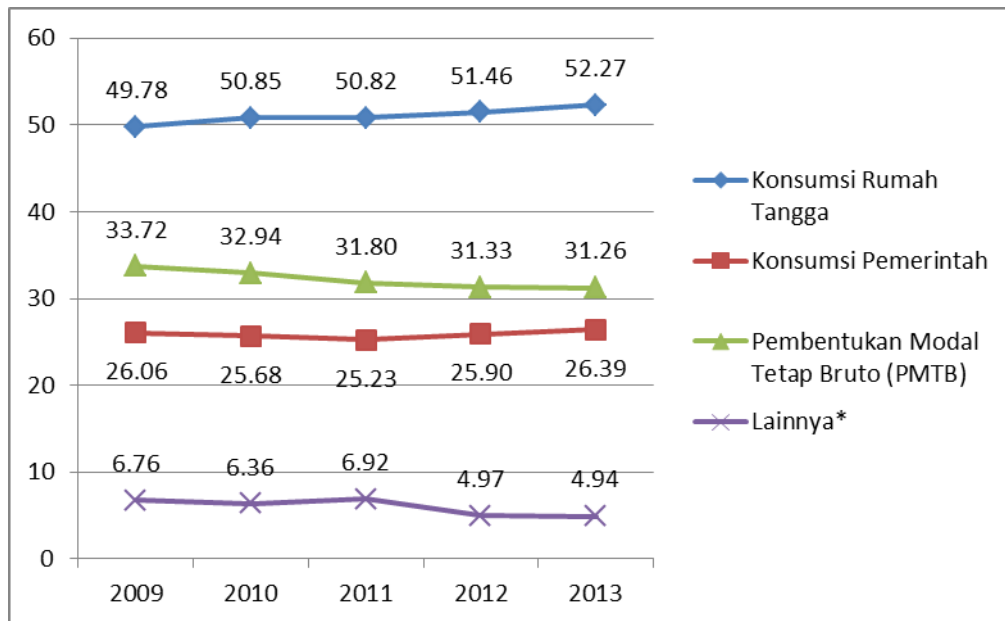
Tabel 2.13 Distribusi Persentase PDRB DIY ADHB Menurut Lapangan Usaha, 2008-2012

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian	15,38	14,56	14,24	14,65	13,91
2. Pertambangan & Penggalian	0,71	0,67	0,70	0,67	0,65
3. Industri Pengolahan	13,35	14,02	14,36	13,35	13,77
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,35	1,33	1,31	1,28	1,25
5. Konstruksi	10,70	10,59	10,78	10,85	10,85
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	19,72	19,74	19,79	20,09	20,65
7. Pengakutan & Komunikasi	9,20	9,03	8,83	8,60	8,48
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	9,88	9,98	9,96	10,30	10,27
9. Jasa-Jasa	19,71	20,07	20,05	20,23	20,16
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2012

Tabel diatas menunjukkan nilai PDRB DIY menurut penggunaan. Selama kurun waktu 2009-2013 PDRB DIY menurut penggunaan didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga; investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Ketiga komponen pengeluaran tersebut perkembangannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

RKPD Tahun 2015



Keterangan: *)termasuk Konsumsi Lembaga Nirlaba, Perubahan Inventori, dan Diskrepansi Statistik
Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.16 Distribusi PDRB DIY Menurut Penggunaan ADHB (%), 2009-2013

Selama tahun 2013 perekonomian DIY didorong oleh meningkatnya semua komponen permintaan akhir dalam PDRB penggunaan, terutama konsumsi rumah tangga yang mampu tumbuh sebesar 5,82%. Dibandingkan dengan pertumbuhan selama tahun 2012 yang mencapai 6,74%, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2013 sedikit melambat sebagai dampak dari melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga (inflasi) barang dan jasa kebutuhan rumah tangga yang mencapai level 7,32% selama tahun 2013.

Komponen PMTB selama tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02%. Hal ini berarti mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Komponen konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh positif sebesar 5,31% selama tahun 2013. Pencairan dana khusus sebagai implementasi Keistimewaan Yogyakarta memberi sedikit pengaruh terhadap peningkatan konsumsi pemerintah selama tahun 2013. Ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah dan luar negeri oleh penduduk DIY masih cukup tinggi.

Tabel 2.14 PDRB DIY ADHB Menurut Penggunaan, 2009-2013

Jenis Penggunaan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Konsumsi Rumah Tangga	20.610.786	23.198.864	26.319.415	29.350.917	33.293.530
2. Konsumsi	10.789.365	11.709.925	13.066.881	14.773.182	16.809.330

Jenis Penggunaan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pemerintah					
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	13.964.317	15.027.836	16.466.550	17.868.279	19.908.290
4. Lainnya*	2.797.188	2.903.463	3.585.611	2.833.175	3.143.380
5. Ekspor Barang & Jasa :	15.989.976	17.873.357	20.145.476	23.528.777	26.907.820
Dikurangi :					
6. Impor Barang & Jasa :	22.744.584	25.087.856	27.781.823	31.319.947	36.372.040
P D R B	41.407.049	45.625.589	51.785.150	57.034.383	63.690.320

Keterangan: *)termasuk Konsumsi Lembaga Nirlaba, Perubahan Inventori, dan Diskrepansi Statistik

Sumber: BPS Provinsi DIY

Pertumbuhan ekonomi DIY Nilai konsumsi yang dibelanjakan oleh rumah tangga pada tahun 2013 tercatat sebesar 33,29 trilyun rupiah dari total nilai PDRB DIY sebesar 63,69 trilyun rupiah atau mencapai sekitar 52,57%. Persentase tersebut meningkat dibanding tahun 2012 yang mencapai 51,46%. Relatif tingginya persentase konsumsi rumah tangga dalam PDRB penggunaan menunjukkan bahwa komponen ini masih berperan besar untuk menggerakkan perekonomian.

Selama rentang waktu tahun 2009-2013, kecenderungan besarnya porsi konsumsi non makanan dalam konsumsi rumah tangga di DIY terkait dengan konsumsi penduduk di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang telah mengarah pada pola konsumsi penduduk perkotaan yang ditandai dengan konsumsi non makanan relatif besar. Hal ini dapat mengindikasikan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk. Hukum Engel menyatakan, bahwa dengan meningkatnya tingkat pendapatan penduduk maka porsi makanan akan semakin berkurang.

Nilai PDRB yang berasal dari konsumsi pemerintah selama tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata kontribusi sebesar 25,85%. Pada tahun 2013, pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat sebesar 16,81 trilyun rupiah atau memberi andil sekitar 26,39% terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2011. Hal ini berarti terjadi peningkatan kontribusi sebesar 0,49%.

Nilai investasi fisik (PMTB) DIY tahun 2013 mencapai 19,91 trilyun rupiah atau naik sekitar 2,04 trilyun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 17,87 trilyun rupiah. Namun demikian, kontribusinya terhadap PDRB DIY justru mengalami penurunan sebesar -0,07% dari 31,33% pada tahun 2012 menjadi 31,26% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB DIY lebih didominasi oleh konsumsi yang kontribusinya terus menggeser pengeluaran untuk investasi.

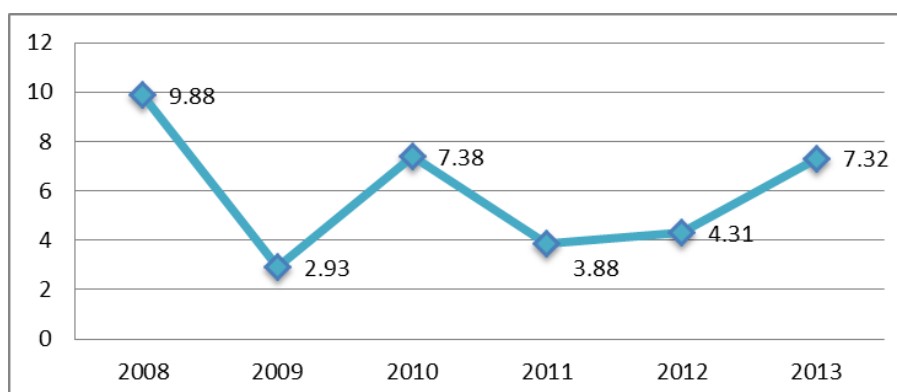
Sementara itu, nilai ekspor barang dan jasa DIY meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar 3,38 trilyun rupiah. Namun, nilai impor barang dan jasa juga meningkat pada tahun 2013, bahkan melampaui nilai ekspor pada tahun yang sama, sehingga nilai ekspor neto DIY bertanda negatif sebesar -9,46 trilyun yang berarti barang dan jasa yang diimpor lebih besar dari barang dan jasa yang diekspor ke luar wilayah.

Sumbangan impor dalam PDRB cenderung meningkat dari 54,93% pada tahun 2009 menjadi 57,11% pada tahun 2013. Disamping untuk memenuhi konsumsi domestik, beberapa komoditas yang diimpor juga digunakan untuk konsumsi para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Fenomena ini dapat menjelaskan bahwa impor yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di DIY sebagian dire-ekspor karena tidak dikonsumsi seluruhnya.

b. Laju Inflasi

Laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta. Potensi terjadinya kenaikan harga-harga di DIY biasanya terjadi menjelang perayaan hari besar dan musim liburan sekolah yang menyebabkan lonjakan permintaan barang/jasa tertentu. Selain itu, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor seperti cuaca ekstrem, yang akan menyebabkan gangguan pasokan pada beberapa komoditas sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang kemudian akan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.

Selama tahun 2008-2013, inflasi Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 9,88% sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu 2,93%.



Ket: Tahun 2013 angka sementara
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Gambar 2.17 Perkembangan Laju Inflasi Kota Yogyakarta (%), 2008-2013

Tahun 2013, berdasarkan angka sementara diketahui bahwa inflasi Kota Yogyakarta tercatat sebesar 7,32% yang disumbang dari inflasi kelompok bahan makanan sebesar 12,31% dan dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 8,15%.

Inflasi pada tahun 2013 mengalami peningkatan pada hampir seluruh kelompok pengeluaran kecuali kelompok sandang. Kelompok transportasi dan komunikasi bahkan meningkat sangat signifikan sumbangannya pada inflasi tahun 2013. Hal ini dimungkinkan karena adanya kenaikan harga BBM.

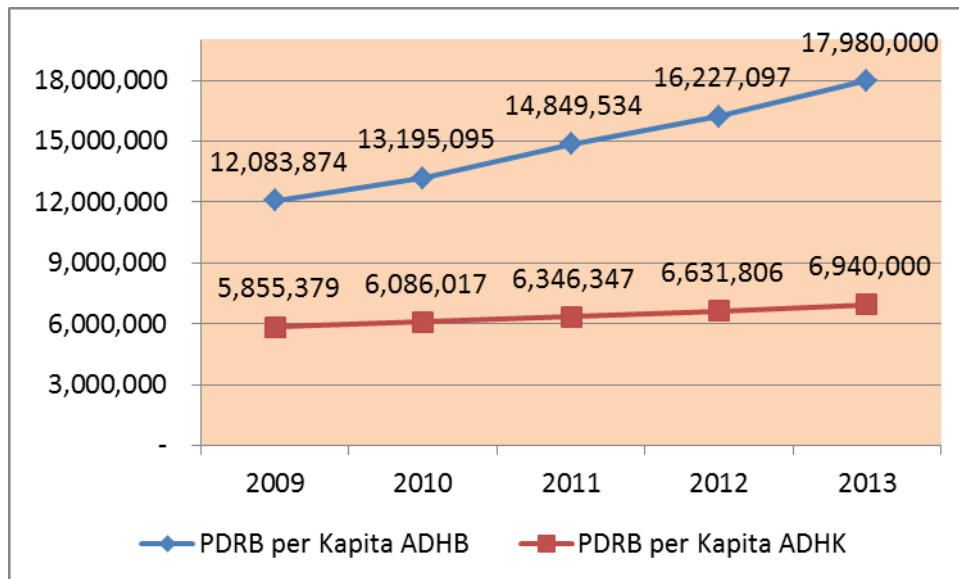
Tabel 2.15 Perkembangan Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran 2008-2013

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Bahan Makanan	14,87	3,91	18,86	1,82	8,10	12,31
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	9,40	7,50	5,47	7,07	6,90	8,15
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	13,60	1,40	5,49	3,01	2,99	5,18
4	Sandang	8,36	5,81	5,41	9,40	3,56	0
5	Kesehatan	8,23	1,86	1,97	5,64	1,93	3,08
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	5,77	2,26	4,25	1,73	1,43	3,17
7	Transportasi & komunikasi	2,97	(1,23)	5,57	2,40	1,30	10,45
	Inflasi Kota Yogyakarta	9,88	2,93	7,38	3,88	4,31	7,32

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

c. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per kapita DIY baik secara riil maupun nominal selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, nilai PDRB per kapita secara nominal tercatat sebesar 12,08 juta rupiah, kemudian naik mencapai 17,98 juta rupiah pada tahun 2013 atau naik sebesar 5,89 juta rupiah. Sementara itu, secara riil PDRB per kapita pada tahun 2009 sebesar 5,86 juta rupiah naik menjadi 6,94 juta rupiah pada tahun 2013 atau naik sebesar 1,08 juta rupiah.

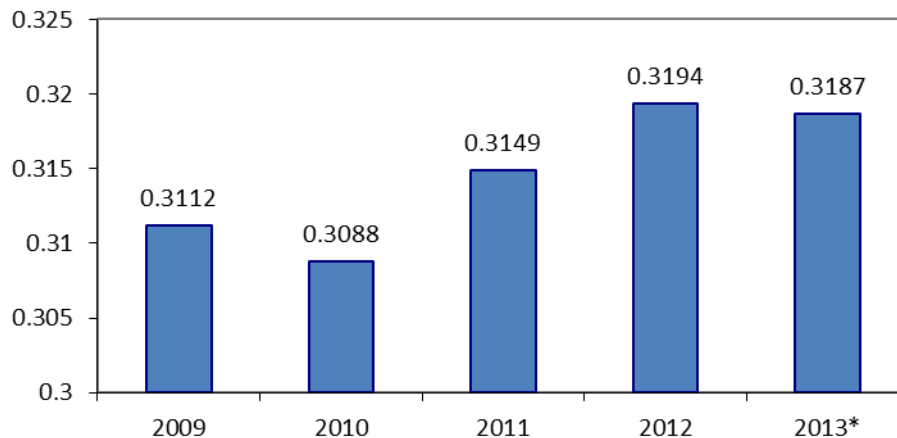


Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.18 Nilai PDRB Per Kapita DIY (Rupiah), 2009-2013

d. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ukuran tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif dapat dilihat dari besar Indeks Gini.



Keterangan: *) angka estimasi

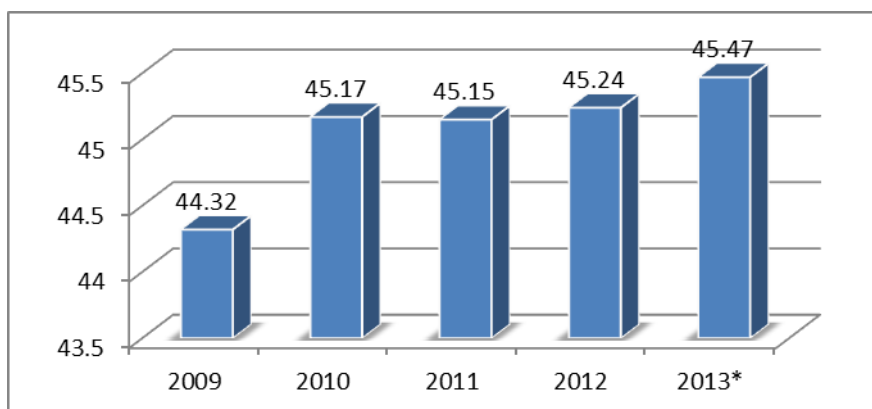
Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.19 Rasio Gini di DIY (%), 2009-2013

Indeks Gini tahun 2009-2013 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Menurut kategori yang dibuat Oshima, angka Gini Rasio DIY tergolong pada kelompok ketimpangan moderat (0,3-0,5). Indeks Gini pada tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk di DIY semakin menyempit walaupun belum terlalu signifikan.

e. Indeks Ketimpangan Regional

Ketimpangan antar wilayah di DIY yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2009-2013 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 44,32% tahun 2009 menjadi 45,47% tahun 2013. Menurut Tipologi Klassen meningkatnya kesenjangan perekonomian ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di DIY, sehingga pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang ke depan lebih diarahkan untuk pemerataan ekonomi antar kabupaten/kota.



Keterangan: *) angka estimasi

Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar 2.20 Indeks Williamson DIY, 2009-2013

f. Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

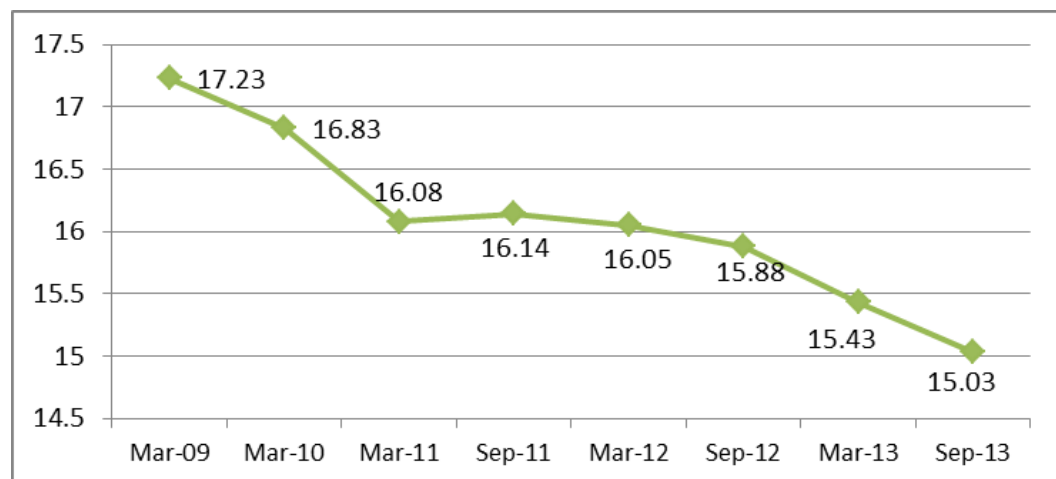
Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan DIY selama periode 2009-2012 mengalami peningkatan. Pada Maret 2009 garis kemiskinan DIY tercatat sebesar 220.830 rupiah per kapita per bulan. Sementara kondisi tahun 2013, pada posisi Maret tercatat sebesar 283.454 rupiah per kapita per bulan naik menjadi 303.843 rupiah per kapita per bulan pada bulan September sehingga selama enam bulan telah terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 7,19%. Kenaikan tersebut dimungkinkan karena terjadinya inflasi selama periode tersebut yang mencapai 3,49%.

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 2009-2013

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Penduduk Miskin (ribu orang)
Maret 2009	220.830	585,78
Maret 2010	234.282	577,30
Sept 2011	257.909	564,23
Maret 2012	260.173	565,32
Sept 2012	270.110	562,11
Maret 2013	283.454	550,19
Sept 2013	303.843	535,18

Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2013

Jumlah penduduk miskin DIY pada periode 2009 hingga 2013 cenderung mengalami penurunan dari 585,78 ribu orang pada Maret 2009 menjadi 535,18 ribu orang pada September 2013. Hal ini berarti terjadi penurunan sejumlah 50,6 ribu orang selama kurun waktu empat tahun walaupun sempat terjadi kenaikan pada periode Maret 2012.



Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2013

Gambar 2.21 Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2009-2013

Sementara itu jika dilihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2009-2013 tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan DIY pada Maret 2009 tercatat mencapai 17,23% kemudian menurun menjadi 15,03% pada September 2013 atau terjadi penurunan sebesar 2,2% dalam empat tahun.

Penduduk miskin tersebar di perkotaan (60,83%) maupun perdesaan (39,17%). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2013 sebanyak 325,53 ribu orang, bertambah 19,02 ribu orang bila dibandingkan keadaan September 2012 yang mencapai 306,51 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di

daerah perdesaan pada September 2013 sebanyak 209,66 ribu orang, mengalami penurunan sekira 46 ribu dari keadaan September 2012 yang jumlahnya mencapai 255,60 ribu orang. Hal ini sebagai akibat dari urbanisasi penduduk ke wilayah perkotaan

Tabel 2.17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2012-September 2013

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
September 2012	306,51	13,10
Maret 2013	315,47	13,43
September 2013	325,53	13,73
Perdesaan		
September 2012	255,60	21,29
Maret 2013	234,73	19,29
September 2013	209,66	17,62
Kota+Desa		
September 2012	562,11	15,88
Maret 2013	550,19	15,43
September 2013	535,18	15,03

Sumber: Susenas September 2012, Maret 2013, dan September 2013

Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih kecil daripada di perdesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2013 sebesar 13,73 persen mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan keadaan September 2012 yang besarnya mencapai 13,10 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2013 sebesar 17,62 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan keadaan September 2012 yang mencapai 21,29 persen.

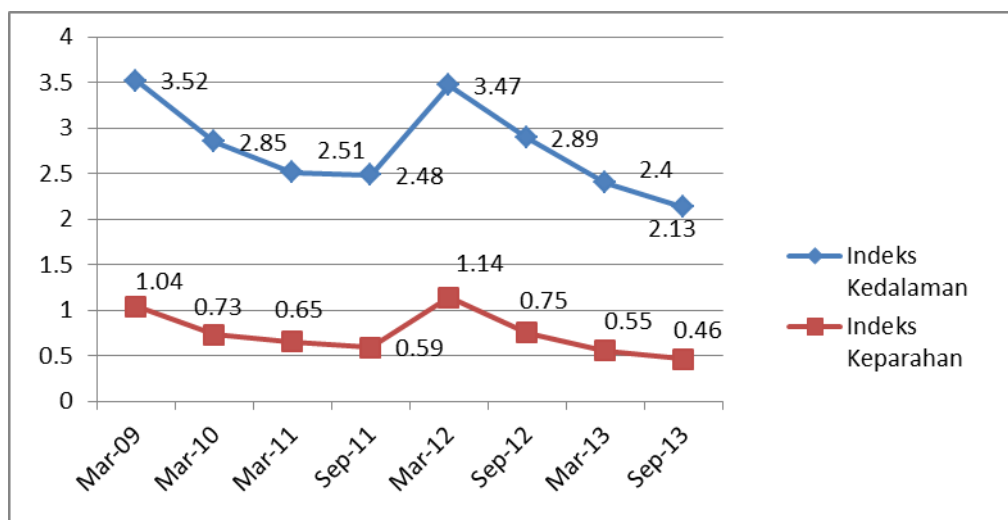
Meskipun tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun upaya menurunkan kemiskinan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi juga mencakup penurunan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode September 2012-September 2013 mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 2,89 pada September 2012 menjadi 2,13 pada September 2013. Secara umum dalam kurun waktu Maret 2009 hingga September

RKPD Tahun 2015

2013 cenderung mengalami penurunan, walaupun pada periode Maret 2012 sempat mengalami kenaikan.

Demikian pula Indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,75 menjadi 0,46 pada periode yang sama (Tabel 2). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit. Selama kurun Maret 2009 hingga September 2013, Indeks keparahan kemiskinan juga memiliki kecenderungan yang sama dengan Indeks Kedalaman.



Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2013

Gambar 2.22 Indeks Keparahannya Kemiskinan DIY, 2009-2013

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada September 2013 di daerah perkotaan lebih tinggi dari pada perdesaan. Pada bulan September 2013 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan mencapai 2,18, sementara di daerah perdesaan mencapai 2,04. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah perkotaan 0,52 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,34. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di perkotaan lebih besar dibandingkan di perdesaan. Kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin di daerah perkotaan juga lebih lebar dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Tabel 2.18 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Daerah, September 2012-September 2013

Tahun	Kota	Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		
September 2012	2,29	4,07
Maret 2013	2,08	3,02
September 2013	2,18	2,04
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
September 2012	0,58	1,10
Maret 2013	0,50	0,63
September 2013	0,52	0,34

Sumber: Susenas Maret 2012, September 2012, dan Maret 2013

g. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Jumlah kejahatan yang terselesaikan adalah penanganan kejahatan oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kejahatan yang diselesaikan merupakan jumlah kejahatan yang diselesaikan selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Jumlah kejahatan yang terselesaikan di DIY dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 2.19 Jumlah Kejahatan Yang Terselesaikan Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Kejahatan	Terselesaikan	Persentase Kasus Kejahatan Terselesaikan
2008	5.669	2.639	47
2009	7.034	2.682	38
2010	7.980	2.728	34
2011	7.123	2.942	41
2012	6.377	2.950	46

Sumber : BPS Provinsi DIY

Jumlah kejahatan di DIY dari tahun 2008 sampai dengan 2012 cenderung fluktuatif, meskipun demikian jumlah kejahatan yang terselesaikan dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang positif.

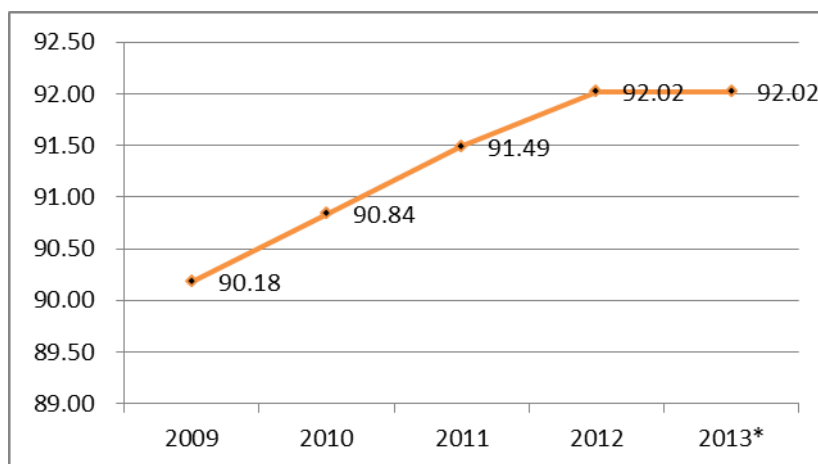
2.1.5.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial DIY terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja.

a. Angka Melek Huruf

Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalan potensi.

Angka melek huruf DIY selama kurun waktu 2009-2012 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2009 capaian angka melek huruf DIY tercatat sebesar 90,18% kemudian naik menjadi 90,84% di tahun 2010 dan menjadi 91,49% dan 92,02% di tahun 2012. Berdasar data BPS, sekitar 8% penduduk DIY buta huruf, yang sebagian besar ditengarai berusia 50 tahun keatas.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2013

*: Angka Sementara

Gambar 2.23 Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Tahun 2009-2012

Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian angka melek huruf tahun 2012 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 98,10% sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 84,97%. Capaian Angka Melek Huruf DIY tahun 2009-2012 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.20 Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012

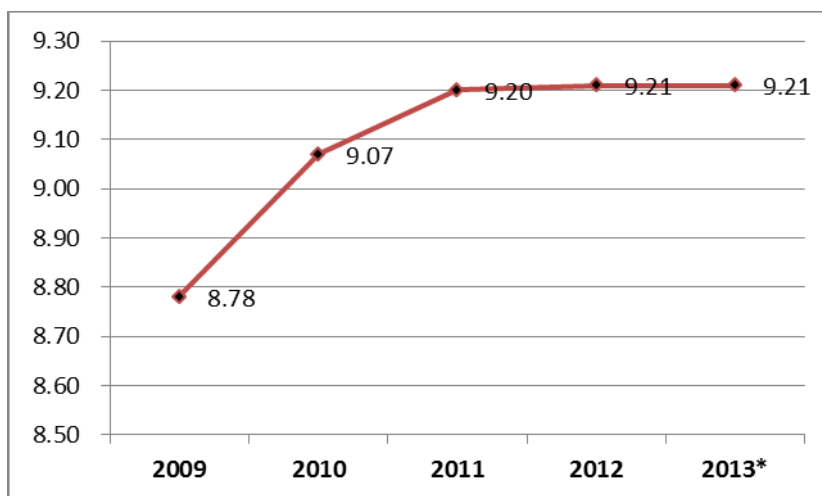
Kab/Kota	Angka Melek Huruf			
	2009	2010	2011	2012
Kota Yogyakarta	97,94	98,03	98,07	98,10
Kabupaten Bantul	89,14	91,03	91,23	92,19
Kabupaten Kulon Progo	89,52	90,69	92,00	92,04

Kab/Kota	Angka Melek Huruf			
	2009	2010	2011	2012
Kabupaten Gunungkidul	84,52	84,66	84,94	84,97
Kabupaten Sleman	92,19	92,61	93,44	94,53
DIY	90,18	90,84	91,49	92,02

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2013

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2013

*: Angka sementara

Gambar 2.24 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) DIY 2009-2013

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di DIY, selama 2009-2012 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 8,78 di tahun 2009 menjadi 9,21 di tahun 2012 (setara SLTA). Peningkatan rata-rata lama sekolah di DIY ini dapat dimaknai bahwa penduduk DIY semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2012 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,56 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,70 tahun. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Capaian rata-rata lama sekolah DIY tahun 2009-2012 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.21 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota, 2009-2012

Kab/Kota	Rata-rata lama Sekolah			
	2009	2010	2011	2012
Kota Yogyakarta	11,48	11,48	11,52	11,56
Kabupaten Bantul	8,64	8,82	8,92	8,95
Kabupaten Kulon Progo	7,89	8,20	8,37	8,37
Kabupaten Gunungkidul	7,61	7,65	7,70	7,70
Kabupaten Sleman	10,18	10,30	10,51	10,52
DIY	8,78	9,07	9,20	9,21

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2013

Sedangkan apabila dilihat dari data pilah rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Untuk tahun 2010, rata-rata lama sekolah laki-laki di DIY 9,73 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah bagi perempuan 8,45 tahun. Sedangkan untuk tahun 2011, rata-rata lama sekolah laki-laki di DIY 9,78 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah bagi perempuan 8,67 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan dibanding laki-laki antara lain: faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2009/2010 – 2012/2013 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010-2012/2013

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	p	Rata-rata
APK Tingkat SD												
Kota Yogyakarta	150,12	131,06	140,25	149,32	129,88	139,29	148,87	129,09	138,63	141,59	138,60	140,13
Kabupaten Bantul	112,74	96,62	104,39	113,61	96,52	104,76	114,05	97,14	105,29	108,46	103,21	105,90
Kabupaten Kulon Progo	109,52	103,67	106,64	109,55	104,20	106,92	109,22	103,87	106,58	108,01	103,62	105,87
Kabupaten Gunungkidul	106,38	95,23	100,75	106,10	94,68	100,33	105,77	94,36	100,01	105,67	94,04	99,80
Kabupaten Sleman	142,58	96,98	116,43	117,70	115,22	116,50	118,58	114,37	116,53	119,63	114,93	117,34
DIY	122,74	101,30	111,44	116,78	106,19	111,46	116,97	105,95	111,43	114,89	108,56	111,78
APK Tingkat SMP												
Kota Yogyakarta	142,45	131,65	136,93	136,90	125,35	131,00	147,01	135,77	141,25	148,73	148,82	148,78
Kabupaten Bantul	106,21	106,47	106,34	106,12	105,68	105,90	110,21	109,09	109,66	103,13	109,78	106,38
Kabupaten Kulon Progo	122,78	113,43	118,07	122,66	113,32	117,95	125,20	115,85	120,49	120,36	128,43	124,28
Kabupaten Gunungkidul	118,86	107,11	112,92	116,92	107,10	111,96	111,55	101,85	106,65	105,04	103,65	104,34
Kabupaten Sleman	128,89	102,28	114,43	115,49	113,34	114,43	114,75	112,57	113,68	112,83	114,65	113,72
DIY	121,50	109,69	115,47	117,01	111,67	114,36	118,16	112,80	115,50	113,99	116,90	115,43
APK Tingkat SMA												
Kota Yogyakarta	137,23	125,66	131,23	134,69	125,72	130,04	134,52	124,81	129,49	122,67	125,82	124,23
Kabupaten Bantul	83,96	80,98	82,45	81,23	82,76	81,98	85,63	86,26	85,94	84,74	85,57	85,15
Kabupaten Kulon Progo	85,13	90,98	87,84	86,41	101,07	93,19	85,63	101,07	92,77	97,59	89,59	93,63
Kabupaten Gunungkidul	72,59	65,39	68,96	75,05	67,77	71,37	74,44	68,06	71,22	72,06	68,83	70,46
Kabupaten Sleman	85,12	68,64	75,72	75,02	78,19	76,61	74,70	78,39	76,56	75,27	79,47	77,35
DIY	91,43	83,04	87,06	87,92	88,32	88,12	88,57	89,00	88,79	87,83	88,24	88,04

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2013

Dari periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013, capaian APK SD DIY menunjukkan peningkatan dari 111,4 menjadi 111,78. Pada periode 2011/2012 terjadi penurunan dari 111,46 di periode 2010/2011 menurun menjadi 111,43 di periode 2011/2012.

Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, periode 2012/2013 APK SD seluruh Kabupaten/Kota di DIY kecuali Kabupaten Gunungkidul mencapai di atas 100 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa banyak anak yang sekolah di SD

RKPD Tahun 2015

umurnya diluar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Begitu pula APK SLTP juga diatas 100 persen. Karena banyak kita jumpai anak-anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100 persen. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA.

Sedangkan untuk capaian APK SLTP DIY, terjadi penurunan dari periode 2011/2012 sebesar 115,50 menurun menjadi 115,43 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTP tertinggi periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta sebesar 148,78 dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 104,23.

Capaian APK SLTA DIY juga mengalami penurunan dari 87,83 di periode 2011/2012 menurun menjadi 88,04 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTA tertinggi periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta sebesar 124,23 dan terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 70,46.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode 2009/2010-2012/2013

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
APM Tingkat SD												
Kota Yogyakarta	130,30	113,41	121,55	130,49	113,29	121,59	131,45	113,66	122,24	124,29	121,49	122,93
Kabupaten Bantul	97,97	84,47	90,98	99,06	84,86	91,71	99,94	85,48	92,45	94,62	90,35	92,54
Kabupaten Kulon Progo	93,52	89,01	91,30	93,33	89,53	91,46	93,05	89,26	91,18	92,24	89,53	90,92
Kabupaten Gunungkidul	93,77	84,29	88,98	93,63	83,90	88,72	93,35	83,65	88,45	93,35	83,65	88,45

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni											
	2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata	L	P	Rata-rata
Kabupaten Sleman	121,99	83,35	99,83	101,77	99,92	100,87	103,12	99,96	101,58	103,31	99,77	101,59
DIY	106,26	88,03	96,65	101,31	92,54	97,15	102,19	92,93	97,53	100,02	94,97	97,54
APM Tingkat SLTP												
Kota Yogyakarta	102,01	94,22	98,03	85,91	90,65	95,70	111,93	100,10	105,87	109,08	102,88	105,99
Kabupaten Bantul	81,11	80,74	80,93	71,29	72,16	71,71	74,34	74,99	74,65	75,51	76,06	75,78
Kabupaten Kulon Progo	90,33	85,73	88,01	90,24	85,64	87,92	86,85	82,13	84,47	81,94	83,19	82,55
Kabupaten Gunungkidul	80,87	73,72	77,26	81,49	75,06	78,24	77,05	70,95	73,97	74,55	68,46	71,47
Kabupaten Sleman	97,12	77,83	86,64	82,92	80,58	81,77	80,31	78,96	79,65	82,51	81,15	81,85
DIY	88,88	80,79	84,78	80,85	79,23	81,06	82,78	79,37	81,08	82,21	80,01	81,13
APM Tingkat SLTA												
Kota Yogyakarta	102,69	89,63	95,92	90,49	86,04	88,18	89,94	86,42	88,11	86,83	90,50	88,65
Kabupaten Bantul	63,20	56,48	59,80	55,54	52,02	53,81	64,90	59,72	62,36	66,93	59,07	63,04
Kabupaten Kulon Progo	56,89	55,18	56,10	62,05	65,03	63,43	69,60	71,89	70,66	69,60	64,34	66,99
Kabupaten Gunungkidul	54,85	43,61	49,18	52,47	47,56	49,99	54,48	49,55	51,99	53,45	50,49	51,99
Kabupaten Sleman	54,78	46,89	50,28	53,02	55,09	54,06	52,91	55,15	54,04	52,77	57,39	55,06
DIY	65,44	56,65	60,87	60,94	59,66	60,30	64,31	62,58	63,45	64,13	63,17	63,65

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2013

Secara umum dalam lima periode terakhir, terjadi peningkatan APM di DIY untuk tingkat SD dan SMA. Rata-rata kenaikan APM SD dari periode 2009/2010 sampai dengan 2012/2013 0,88 poin. Capaian APM tingkat SD periode 2012/2013 sebesar 97,54 naik dari periode 2011/2012 sebesar 97,53. Menurut kabupaten/kota di DIY capaian APM tingkat SD periode 2012/2013 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 122,93 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 88,45. Sedangkan untuk tingkat SMP, APM mengalami penurunan pada periode 2010/2011 81,06 turun dari tahun periode sebelumnya yang mencapai 84,78 kemudian kembali naik pada periode berikutnya menjadi 81,08 pada periode 2011/2012 dan menjadi 81,13 pada periode 2012/2013. Capaian APM tingkat SLTP periode 2012/2013 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 105,99 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 71,47.

Untuk APM tingkat SLTA DIY, dalam lima periode terakhir mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan sebesar 0,73 poin. APM tingkat SLTA DIY periode 2009/2010 sebesar

RKPD Tahun 2015

60,87 menurun pada periode 2010/2011 menjadi sebesar 60,30 dan meningkat pada periode 2011/2012 menjadi 63,45 dan 63,65 pada periode 2012/2013. Capaian tertinggi APM tingkat SLTA periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 88,65 dan terendah di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 63,65.

e. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di DIY selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Angka Kelulusan Menurut Jenjang di DIY, 2009-2013

Jenjang Pendidikan	Angka Kelulusan				
	2009	2010	2011	2012	2013
SD/MI					
- Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	47.549	45.928	45.754	48.540	50.230
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI tahun sebelumnya	49.429	47.611	46.427	49.184	50.235
- Persentase kelulusan ujian nasional	96,20	96,47	98,55	98,69	99,99
SMP/MTS					
- Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS	43.104	40.354	48.022	46.229	47.302
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS tahun sebelumnya	47.814	44.760	48.409	46.950	47.335
- Persentase kelulusan ujian nasional	90,15	90,16	99,20	98,46	99,93
SMA/SMK/MA					
- Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	38.162	37.405	41.540	40.069	44.057
- Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA tahun sebelumnya	40.045	39.873	41.701	40.579	44.067
- Persentase kelulusan ujian nasional	95,30	93,81	99,61	98,74	99,98

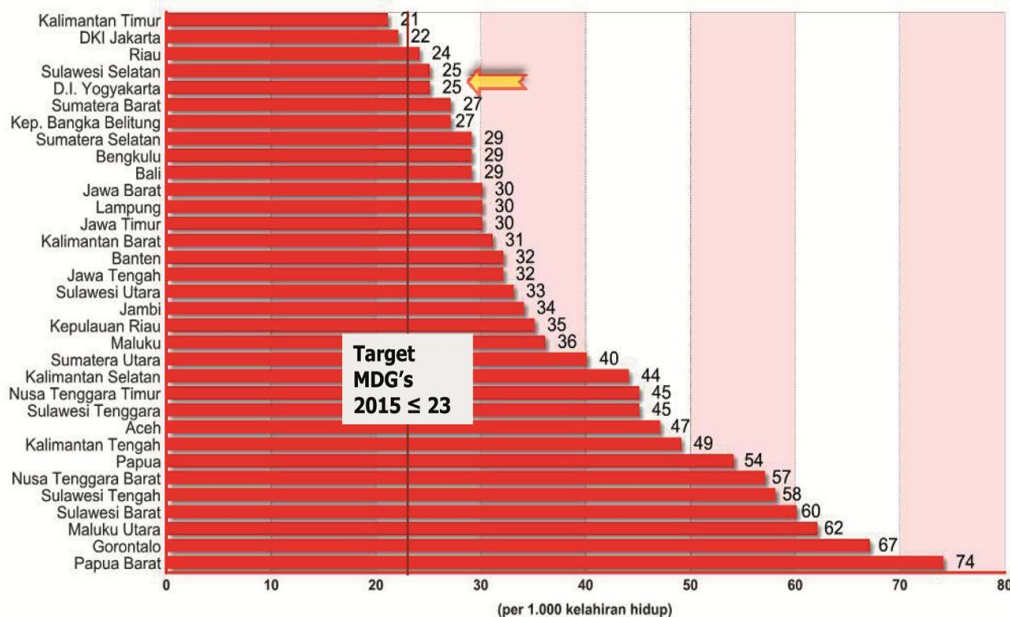
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2013

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi angka kelulusan di jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2010 terjadi penurunan angka kelulusan yang sangat signifikan. Sedangkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI cukup stabil. Capaian angka kelulusan DIY tahun 2013 cukup menggembirakan yaitu hampir 100 di semua jenjang pendidikan.

f. Angka Kematian Bayi (AKB)

Berdasarkan SDKI 2012, Angka Kematian Bayi (AKB) di DIY tahun 2012 adalah 25 per 1000 kelahiran hidup. Secara nasional, angka ini berada di bawah Provinsi

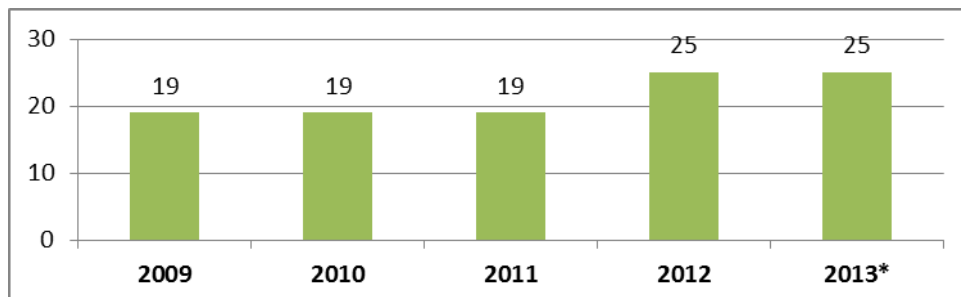
Kalimantan Timur (21 per 1000 kelahiran hidup), Provinsi DKI Jakarta (22 per 1000 kelahiran hidup), dan Riau (24 per 1000 kelahiran hidup).



Sumber : SDKI 2012

Gambar 2.25 Perbandingan Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Antar Provinsi 2012

Selama kurun 2009 sampai dengan 2013, Angka Kematian Bayi per 100 kelahiran hidup DIY mengalami peningkatan. Tahun 2009 sampai dengan 2011, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran adalah 19 kemudian naik menjadi 25 per 1000 kelahiran bayi di tahun 2012. Kenaikan AKB tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus terkait upaya penurunannya, dikarenakan kenaikannya yang drastis dan angka tersebut melebihi dari target *Millennium Development Goals* (MDGs) Nasional di tahun 2015 yang sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup.



Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2013

Gambar 2.26 Perkembangan Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013

RKPD Tahun 2015

Jumlah Kematian bayi yang dilaporkan di DIY dalam kurun waktu 2009-2013 menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah kematian bayi pada tahun 2009 sebesar 330 naik pada tahun 2010 menjadi 346 dan naik lagi pada tahun 2011 menjadi 419 baru kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 400.

Tabel 2.25 Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kelahiran Hidup DIY Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang dari 1 tahun)	330	346	419	400	449
Jumlah Kelahiran Hidup	43.724	43.048	44.839	45.803	45.436

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2013

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator yang sangat penting untuk melihat derajat kesehatan ibu. SDKI 2012 tidak memunculkan besaran Angka Kematian Ibu (AKI) di DIY, sehingga untuk melihat derajat kesehatan ibu digunakan jumlah kasus kematian ibu yang terjadi pertahun. Jumlah kematian ibu di DIY dari tahun 2009 sd 2013 mengalami fluktuasi. Gambaran kasusnya adalah sebagai berikut: jumlah kematian ibu di 2009 47 kasus menurun 43 kasus di 2010, naik cukup tajam di tahun 2011 menjadi 56 kasus dan menurun cukup tajam di tahun 2012 menjadi 40 kasus. Akan tetapi di tahun 2013 terjadi kenaikan kasus menjadi 46 kasus. Kenaikan kasus di tahun 2013 ini bertolak belakang dengan pencapaian indikator kesehatan ibu yang lain seperti cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan cakupan pelayanan pada ibu hamil (K1 dan K4) yang mengalami kenaikan.

Tabel 2.26 Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013

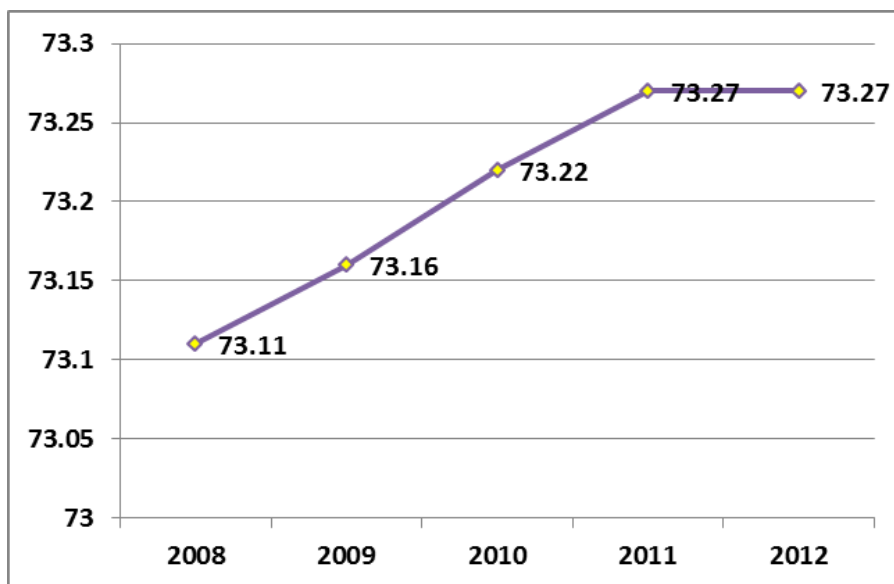
Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah kasus kematian ibu	47	43	56	40	46
Jumlah lahir hidup	43724	43048	44839	45803	45436

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

g. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013

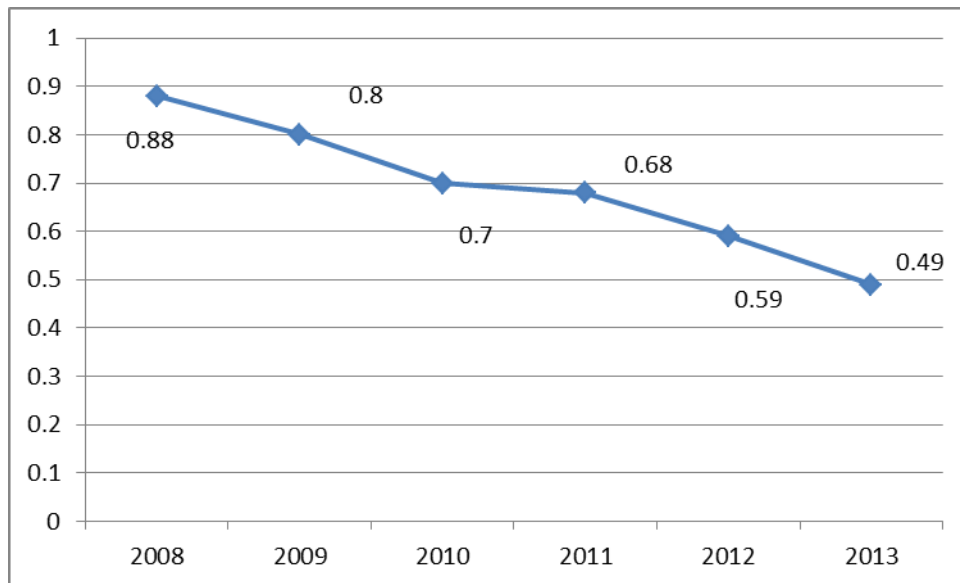
Gambar 2.27 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2008-2012

h. Status Gizi Balita

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan prevalensi balita gizi buruk dalam kurun waktu 2012-2012 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012, prevalensi balita gizi buruk DIY adalah 0,59% dari sebelumnya di tahun 2011 sebesar 0,68. Capaian tersebut telah jauh melampaui target nasional (15% pada tahun 2015).

RKPD Tahun 2015



Gambar 2.28 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk DIY Tahun 2008-2012

Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, atau dengan kata lain seluruh balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan perawatan.

i. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), jumlah penduduk yang bekerja di DIY tahun 2012 sebanyak 1.867.708 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.944.858 orang dengan rasio 96,03 naik dari tahun 2011 yang sebanyak 1.798.595 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.872.912 orang dengan rasio yang sama sebesar 96,03. Sementara tahun 2013 penduduk yang bekerja dan angkatan kerja diproyeksikan masing-masing sebanyak 1.847.070 orang dan 1.910.959 orang dengan rasio penduduk bekerja sebesar 96,6. Rasio tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja ada 96,6 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tabel 2.27 Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2008-2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Penduduk yang Bekerja	1.892.205	1.895.648	1.775.148	1.798.595	1.867.708	1.847.070
Angkatan Kerja	1.999.734	2.016.694	1.882.296	1.872.912	1.944.858	1.910.959
Rasio Penduduk yang bekerja	94,62	94,00	94,31	96,03	96,03	96,66

Sumber : Dinas Nakertrans DIY, 2013

*: Angka sementara

2.1.5.3 Fokus Budaya, Pemuda dan Olahraga

a. Budaya

“... Budaya sebagai Payung dan Arus Utama (mainstreaming) dalam Pembangunan di segala bidang. Renaisans Yogyakarta yang dipayungi filosofi hamêmayu-hayuning bawânâ, dihidupi semangat gotong-royong yang mengacu pada konsep aworing kawulâ-gusti dan golong-gilig, serta diekspresikan oleh sikap satriyâ: sawiji, grêgêt, sêngguh, ora-mingkuh, memberikan vitalitas dan ruh baru, arah baru, nilai baru, serta kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke Timur, seraya meluruskan kembali ‘rasa keTuhanan’ kita. . . ” (Sri Sultan Hamengku Buwana X, Gubernur DIY, 2012).

Pada Tahun 2012 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melaksanakan kewenangan aspek kebudayaan dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Langkah awal untuk melaksanakan kewenangan tersebut adalah perlunya identifikasi data dan perkembangan budaya di DIY.

Berikut gambaran umum kondisi eksisting kebudayaan/potensi budaya yang ada di DIY tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam berbagai jenis yang merupakan andalan DIY:

1) Adat Istiadat, Tradisi, dan Seni Budaya

Tabel 2.28 Jumlah Organisasi Kesenian di DIY, 2009-2013

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013
Organisasi Sinematografi	14	14	14	14	42
Organisasi Seni Pertunjukkan	4.203	4.219	4.269	5.401	5.239
Organisasi Seni Rupa	8	25	25	25	25
Perusahaan Film	9	10	10	10	20
Perusahaan Bioskop	4	4	4	4	1
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	37	37	37	37	38

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Tabel 2.29 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013

Kab/Kota	Rasio Grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio Gedung kesenian per 10.000 penduduk
Kabupaten Bantul	13,55	0,42
Kabupaten Sleman	9,73	0,25
Kabupaten Gunungkidul	11,58	0,17
Kabupaten Kulon Progo	16,71	0,23
Kota Yogyakarta	12,98	0,23
DIY	12,24	0,26

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Festival, Karnaval, Gelar Budaya, Pasar Rakyat dan event-event budaya lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional semakin banyak diselenggarakan baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah, antara lain yaitu : Pekan Budaya Rusia, Pekan Budaya Tionghoa, Gelar Budaya Jogja, Bienalle, FKY, Gelar Ketoprak, Karnaval Jogja, Jogja Fashion Week, Sekaten, Kirab Budaya, Festival Adat Istiadat, Festival Dalang Anak, Festival Film Indie, Festival Desa Budaya, Pagelaran Musik, Festival Budaya Kotagede. Data penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukkan peningkatan kuantitas pada tahun 2009 sebanyak 720 menjadi 1.025 pada tahun 2013. Hal ini mengisyaratkan adanya pemberlanjutan dari pelestarian seni dan budaya.

Tabel 2.30 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2009-2013

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	720	720	720	980	1.025
Prasarana Budaya	92	135	137	412	412
Lembaga Budaya	107	107	107	107	107
Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan	31	31	31	31	31

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Tabel 2.31 Perkembangan Sistem Budaya di DIY, 2008-2012

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013
Upacara Adat dan Tradisi Daur Hidup	34	34	34	34	34
Organisasi Penghayat Kepercayaan	90	90	90	90	90
Makanan Tradisional	137	137	137	137	137
Tokoh Seniman Budayawan	369	369	369	486	486
Penghargaan seniman Budayawan	258	258	258	260	275
Jenis Permainan Tradisional	241	241	241	241	241
Permainan Tradisional	34	34	34	34	34

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Kebudayaan juga akan menjadi potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Menurut Maynard dan Mehrtens (1993) setelah gelombang ketiga Alvin Toffler, dunia akan dilanda gelombang keempat (*fourth wave economic*) yang mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun industrialisasi. Ekonomi gelombang keempat adalah kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Geliat nasional juga menunjukkan kepada orientasi ke arah tersebut. Kebudayaan juga menjadi media diplomasi yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan internasional, karena memiliki kekuatan citra positif bangsa yang berperadaban. Bukti dari kekayaan budaya tersebut adalah DIY memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi baik budaya kasat mata (*tangible*) maupun tidak kasat mata (*intangible*).

Di DIY sampai saat ini masih memiliki 358 jenis upacara adat yang tersebar di kabupaten/kota. Upacara tradisi yang menandai daur hidup manusia di tiap kabupaten dan kota ada 34 jenisnya, kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamat. Terdapat keanekaragaman maksud atau keperluan sebuah upacara adat, misalnya untuk pemujaan, permohonan, pencucian, inisiasi, tasyakur, pengukuhan atau sekedar ekspresi kegembiraan. Dalam upacara adat akan ditampilkan symbol-simbol kesakralan, kekhidmatan, keagungan, keindahan, dan bahkan keceriaan. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya incidental dan tidak teragendakan secara tetap.

Potensi budaya yang ada di DIY tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam berbagai jenis yang merupakan andalan DIY yang tercermin tabel dibawah ini :

Tabel 2.32 Perkembangan Pembangunan Kebudayaan di DIY, 2009-2013

Aspek	Satuan	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah kunjungan museum	Orang	360.000	575.000	623.500	1.375.000	1.636.000
Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju	Organisasi	36	36	38	40	54
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Buah	194	214	220	225	230
Jumlah Gelar Seni Budaya	Kali	720	790	920	980	1.025
Jumlah Desa Budaya	Desa	5	6	8	12	12

RKPD Tahun 2015

Aspek	Satuan	Capaian				
		2009	2010	2011	2012	2013
berkategori Maju						
Jumlah Dokumen seni Budaya dan karya seni yang dilestarikan	Dokumen	43	91	104	120	120
Jumlah sumber sejarah yang terkelola	Sumber sejarah	44	300	500	700	700
Jumlah Gedung Seni Budaya	Gedung	92	94	94	96	107
Peristiwa Sejarah	kali	94	94	94	94	95
Pelaku Sejarah	orang	-	-	16	16	22
Ceritera Rakyat	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	80
Naskah Kuno	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	509
Upacara Adat	buah	342	358	358	358	447
Motif Batik	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	185
Motif Lurik	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	64
Kerajinan Property Budaya	buah	34	34	34	34	34

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2012 & Data Pembangunan Daerah DIY, Bappeda DIY 2013

Organisasi kepercayaan yang hidup ada 90 organisasi yang tersebar di Kab Bantul sebanyak 18, Kab Kulonprogo sebanyak 22, Kab. Gunungkidul sebanyak 14, Kab. Sleman sebanyak 16, dan Kota Yogyakarta sebanyak 20. Setiap kabupaten dan kota memiliki 138 makanan tradisional, 15 jenis pakaian adat. Adat rias dan busana pengantin yang diwujudkan dalam bentuk sanggar rias ada 349 sanggar yang melestarikan upacara pengantin gaya Yogyakarta lengkap dengan busana dan aksesorisnya.

Dalam kebudayaan Jawa Yogyakarta, upacara adat yang telah menjadi tradisi amat luas cakupannya, di antaranya berkenaan dengan daur hidup manusia, peribadatan keagamaan, dan persahabatan manusia dengan alam. Upacara adat yang berkenaan dengan daur hidup manusia dimulai dari ketika manusia masih berbentuk janin berusia tujuh bulan (*mitoni; tingkeban*), lahir (*brokohan*), putus tali pusarnya (*pupak puser; puputan*) pemberian nama (*njenengi*), aqiqah (*kékahan*), turun ke tanah (*tedhun lemah; tedhak sitèn*), khitanan anak laki-laki (*sunatan; supitan*) dan perempuan (*tetesan*), menikah (*omah-omah*), dan meninggal dunia (*tilar donya*) dengan segala rangkaian upacara setelahnya. Di samping upacara daur hidup, terdapat pula upacara ruwatan, yakni suatu upacara yang dimaksudkan untuk “membersihkan” pengaruh buruk (*sukerta*) yang mungkin timbul pada diri seseorang. Untuk melestarikan upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali

upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Organisasi Penghayat Kepercayaan yang masih berkembang ada sekitar 90 kelompok. Mereka juga melakukan ritual budaya sendiri. Balai-balai budaya di desa budaya dikembangkan untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di pedesaan yang berperan penting dalam pertahanan ketahanan budaya di DIY.

Permainan tradisional yang dapat ditemukan ada sekitar 34 macam yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. DIY sebenarnya masih memiliki 43 desa budaya, tetapi baru 32 desa budaya yang termasuk dalam SK Gubernur tentang Desa Budaya. Dari ke 43 desa budaya, baru 41 desa budaya yang telah diklasifikasikan tingkat perkembangannya yaitu 1 desa bertaraf embrional, 31 bertaraf berkembang, 9 bertaraf maju. Desa budaya merupakan kantong pertahanan budaya rakyat. Desa budaya merupakan kantong budaya dan benteng pertahanan budaya tradisional yang berpotensi untuk menjadi tujuan wisata.

Desa budaya berkategori maju adalah desa budaya yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan tujuh unsur kebudayaan yang universal, mengaktualisasikan kekayaan potensi secara maksimal serta mengkonservasi kekayaan budaya yang dimiliki. Capaian realisasi indikator persentase desa budaya berkategori maju tahun 2013 sebesar 27,91% dari 43 desa budaya yang telah ditetapkan telah mencapai target yang ditetapkan dan lebih besar jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 20,9%. Tentu keberhasilan ini akan lebih nyata lagi apabila 11 desa budaya yang lainnya segera di-SK-kan.

Di pedesaan sendiri masih tumbuh dan berkembang desa-desa yang menjaga budaya rakyat. Pada tahun 1995 Gubernur menetapkan 32 desa bina budaya melalui SK Gubernur Nomor 325/Kpts/1995. Pada tahun 2006 telah dilakukan penilaian terhadap desa-desa di DIY, dan terdapat 41 desa budaya termasuk yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan tersebut. Desa budaya tersebut diklasifikasikan menurut tingkat perkembangannya yaitu 1 desa bertaraf embrional, 31 bertaraf berkembang, 9 bertaraf maju. Hingga akhir 2013 tercatat menjadi 43 desa yang berpotensi sebagai benteng pertahanan budaya tradisional yang perlu dipetakan kembali potensi dan tingkat perkembangannya, serta dilindungi dalam suatu regulasi. Desa budaya dapat berperan sebagai wadah konservasi dan pengembangan budaya baik yang *tangible* maupun *intangible*.

Adat-istiadat dan tradisi mewarnai kehidupan masyarakat DIY. Dalam kejadian-kejadian proses daur hidup pada saat kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan

tempat tinggal, hari-hari besar agama dan peringatan terbentuknya suatu kawasan masih dilakukan upacara-upacara adat dan tradisi. Sampai tahun 2012 masih ditemukan 377 jenis upacara adat istiadat dan 34 jenis tradisi daur hidup yang menyebar di berbagai desa yang dilaksanakan oleh kesatuan masyarakat desa, kelompok organisasi budaya, maupun keluarga, antara lain berupa *mitoni*, *tetakan*, *pitung dinanan*, *slametan*, *nyatus*, *nyewu* dan lain-lain. Beberapa desa, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di desa lain, antara lain *merti dusun*, *ruwatan*, *labuhan*, *bersih desa*, *sedekah bumi* dan sebagainya. Makanan tradisional yang masih dapat dijumpai masih ada 137 jenis, seperti *nagasari*, *gudheg*, *mendhut*, *lemper*, *pecel*, *wedang uwuh*, *bakpia*, *yangko*, *geplak*, dan lain-lain. Permainan tradisional yang masih dikenal ada 34 jenis, antara lain *dakon*, *benthik*, *dhelik-dhelikan*, *gobag sodhor*, *jamuran* yang memiliki nilai-nilai kebersamaan, kreativitas dan inovasi.

2) Kesenian

Kehidupan kesenian di DIY berkembang pesat karena bermunculannya SDM yang sangat inovatif dan kreatif menciptakan karya seni baik yang diadaptasi dari seni tradisi maupun kontemporer sehingga membangkitkan kembali kelompok seni yang sudah lama tidak aktif dan bermunculan kelompok seni yang baru, walaupun secara kuantitatif menunjukkan penurunan. Kesenian bagi masyarakat Yogyakarta memiliki fungsi mediasi, symbol, pendidikan, dan hiburan. Masing-masing fungsi seni seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi beberapa fungsi seni bisa saling melekat dalam suatu karya atau pertunjukan seni. Potensi kesenian Yogyakarta sangat beragam, meliputi seni pertunjukan, seni kriya, seni rupa, seni audio visual, dari yang klasik sampai kontemporer.

Sampai saat ini ada 5426 kelompok seni yang mengembangkan seni rupa, pertunjukan, dan sinematografi. Organisasi budaya berkategori maju adalah organisasi budaya yang memiliki kelengkapan administrasi, peralatan dalam kondisi baik, kegiatan latihan yang dilakukan secara terjadwal, pementasan pada tingkat nasional dan internasional serta mendapatkan penghargaan tingkat provinsi, nasional dan internasional. Indikator persentase organisasi budaya berkategori maju, realisasi 1% dari target 1,03 berasal dari 54 organisasi budaya berkategori maju dibandingkan organisasi budaya yang terdata sejumlah 5.426.

Perkembangan kesenian di DIY berjalan dengan baik, baik di dalam maupun di luar keraton. Hingga saat ini terdapat 5.426 organisasi kesenian yang tersebar di wilayah DIY. Di Kota Yogyakarta terdapat 271 organisasi kesenian dengan 31 jenis kesenian, di Kab. Sleman 1.242 organisasi kesenian dengan 52 jenis kesenian, di Kab. Bantul 1.193 organisasi kesenian dengan 52 jenis kesenian, di Kab. Kulonprogo 1.206 organisasi kesenian dengan 46 jenis kesenian, di Kab. Gunung kidul 1.514 organisasi kesenian dengan 51 jenis kesenian. Meskipun belum dikelola secara profesional, sesungguhnya seni-budaya tersebut memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat setempat yang masih bisa dioptimalkan mengingat karakteristik kesenian terlebih kesenian tradisional yang melibatkan banyak orang. *Sumber : Renstra Dinas kebudayaan DIY Tahun 2012-2017*

Galeri seni yang didirikan ada 26 buah. Dinas Kebudayaan sendiri telah memproduksi beberapa film seperti 'Rindu di Hati Tara', 'Loro Blonyo', 'Titik 0 Km', dan sebagainya. Beberapa film Indie memperoleh prestasi di tingkat nasional dan internasional

Grup-grup kesenian diklasifikasikan dalam tiga tahapan perkembangan, yaitu : tumbuh, berkembang, dan maju. SDM industri kreatif nasional diwarnai oleh tokoh seniman dan budayawan kreatif dari DIY, yaitu antara lain : Soimah, Kelik Pelipur Lara, Hanung Bramantyo, Seventeen, Jogja Hip Hop Foundation, Petakumpet, Dagadu, Shaggydog, Sheila On 7, Butet Kertarajasa, Jaduk Feriyanto, Anggito Abimanyu, Cak Nun, Letto dan lain-lain.

Perkembangan kesenian Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi *profane* atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Di sisi lain, terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perubahan akan selalu terjadi, sebagai akibat adanya kreativitas seniman, tuntutan perubahan fungsi dan selera masyarakat yang terus berubah. Perkembangan kesenian di Yogyakarta juga tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, artshop dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi

RKPD Tahun 2015

pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Menurut hasil pengkategorian tahun 2012 dapat kita lihat pengklasifikasian kelompok seni sebagai berikut :

Tabel 2.33 Klasifikasi Kelompok Seni, 2012

No	Kab/Kota	Jumlah	Jenis Kesenian	Kriteria		
				Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Kota Yogyakarta	271	45	82	172	13
2	Kabupaten Sleman	1242	52	729	507	6
3	Kabupaten Bantul	1193	52	845	242	12
4	Kabupaten Gunungkidul	1514	51	1036	398	3
5	Kabupaten Kulon Progo	1206	46	415	117	2
	DIY	5426		3107	1436	36

Sumber : Dinas Kebudayaan, 2013

Setelah tahun 2008, pembaharuan data klasifikasi kelompok seni belum dilakukan lagi. Untuk tahun-tahun mendatang diperlukan pendataan kembali dan regulasi kelembagaan kelompok seni.

3) Sejarah dan Purbakala

Yogyakarta mewarisi budaya prasejarah, Mataram Kuno, Mataram Islam, Indisch, Cina, dan Arab. Suatu kawasan yang mempunyai dominasi potensi benda cagar budaya dalam wilayah yang cukup luas dan tidak mengenal batas administratif disebut Kawasan cagar Budaya. Sejumlah kawasan memiliki tinggalan fisik yang sangat dominan terutama yang berupa monumen dan tidak banyak terkait dengan kehidupan masa kini sehingga sering dipahami sebagai *dead monument*.

Setiap Bangunan Cagar Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya. Kekayaan BCB di DIY menduduki peringkat ketiga nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kawasan Cagar Budaya di DIY ada 13 Kawasan, dan yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, yang lain menjadi kewenangan pusat (Prambanan dan Ratu Boko) dan kabupaten (Ambarketawang, Ambarbinangun, Parangtritis, Sokoliman).

Terdapat sebanyak 13 kawasan cagar budaya di wilayah DIY yang tersebar di Kab. Bantul sebanyak 2 kawasan cagar budaya, di Kab. Gunungkidul sebanyak 1 kawasan cagar budaya, di Kab. Sleman sebanyak 3 kawasan cagar budaya, di Kota Yogyakarta sebanyak 6 kawasan cagar budaya. Museum yang tersebar di DIY ada sekitar 38 museum yang tersebar di Kab Bantul sebanyak 5, Kab. Gunungkidul sebanyak 1, Kab. Sleman sebanyak 12, dan Kota Yogyakarta sebanyak 20, yang sudah masuk menjadi anggota Barahmus (Badan Musyawarah Museum) ada 32 Museum. Keseluruhan koleksi yang ada di 42 museum tersebut sekitar 68.217 buah benda cagar budaya. Dari 42 museum tersebut, museum Ullen Sentalu dan museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat. Melalui museum masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur sejarah bangsa di masa lalu yang dapat diterapkan di masa sekarang. Kelestarian cagar budaya di DIY dilindungi oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pemerintah Daerah memperkuat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional. Sampai pada tahun 2012 benda cagar budaya terdapat 715 buah, yang ditetapkan sudah mencapai 517 buah. Jumlah kawasan cagar budaya ada 16 buah, baru 6 buah yang ditetapkan melalui SK Gubernur. Juru Pelihara BCB dan situs di DIY ada 4 orang. BCB dan situs ada yang menyebar di Kawasan-Kawasan Cagar Budaya, ada yang parsial di berbagai tempat, dan ada pula yang tersimpan di museum.

Tabel 2.34 Kawasan Cagar Budaya

No	Kawasan Cagar Budaya	SK Penetapan
1	Kraton	SK Gubernur 2011
2	Puro Pakualaman	SK Gubernur 2011
3	Kotagede	SK Gubernur 2011
4	Imogiri	SK Gubernur 2011
5	Kotabaru	SK Gubernur 2011
6	Malioboro	SK Gubernur 2011
7	Ambarketawang	SK Bupati
8	Ambarbinangun	SK Bupati
9	Pleret	Situs, dalam proses penetapan
10	Sokoliman	Situs, dalam proses penetapan
11	Prambanan	SK Menteri
12	Ratu Boko	SK Menteri
13	Parangtritis	Situs, dalam proses penetapan

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

Tabel 2.35 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, 2009-2013

Jenis Data	2009	2010	2011	2012	2013
Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	511	511	515	517	517
Kawasan Cagar Budaya	12	13	13	16	16
Situs	96	96	96	96	96
Monumen Sejarah Perjuangan	44	44	44	44	44
Museum	34	34	38	42	42

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Tabel 2.36 Penanganan Cagar Budaya, 2009-2013

Aspek	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	194	214	220	225	230
Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	1.272	1.279	1.279	1.410	1.410

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013

Sementara itu, cagar budaya tidak bergerak berkategori kondisi baik adalah Cagar budaya yang direhabilitasi, direkonstruksi, dieskavasi, mendapat penghargaan serta ditetapkan menjadi cagar budaya. Untuk indikator persentase capaian tahun 2013 sama dengan yang ditargetkan, yaitu masing-masing 44,49% karena rencana target BCB yang direhabilitasi, direkonstruksi dipenuhi oleh kegiatan yang ada di dinas kebudayaan. Angka 44,49% diperoleh dari 220 Cagar Budaya dengan kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh cagar budaya yang terdata yaitu sejumlah 517. Capaian tahun 2011 tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2010 untuk indikator persentase BCB tidak bergerak berkategori kondisi baik sebesar 43%.

Tabel 2.37 Klasifikasi BCB Hingga 2011

No	Klasifikasi	Yk	Btl	KP	GK	Slm	DIY	SK
1	A/Internasional	1	-	-	-	3	4	SK Mendikbud
2	B/Nasional	14	1	-	-	4	19	SK Mendikbud, Gubernur, Walikota
3	C/Provinsi	82	3	5	2	10	102	SK Gubernur
4	D/Kab/Kota	23	6	3	9	5	46	SK Gubernur/SK Walikota
5	E/Lokal	3	3	-	2	-	8	SK Walikota
	Total yang sudah diklasifikasikan	123	13	8	13	22	179	
	Total yang belum diklasifikasikan	354	2	-	-	2	358	
	Total	477	15	8	13	24	517	

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY

Kemunculan bangunan baru di dalam kawasan Cagar Budaya mempunyai segi-segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata, tetapi akan bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali. Penegakan regulasi seringkali mengalami berbagai hambatan sehingga menimbulkan konflik di lapangan.

Ancaman kelestarian Bangunan/Benda Cagar Budaya dapat timbul karena faktor kimia, biologis, fisika, lingkungan, kasus-kasus kriminalitas. Keunikan, keindahan, kelangkaan BCB acapkali menjadi daya tarik bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pengrusakan dan pencurian, bahkan BCB yang tersimpan dalam museum pun terancam keselamatannya. BCB di DIY pun tidak luput dari ancaman itu. Perusakan BCB baik sengaja maupun tidak sengaja banyak terjadi.

BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional, tetapi prosentasenya masih kecil yaitu 3 %. Sampai pada tahun 2010 BCB dan situs yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan mencapai 7 % dari semua BCB dan situs nasional. BCB dan situs yang terpelihara dibandingkan dengan Provinsi lain di seluruh Indonesia ada 4 %. Juru Pemelihara BCB dan situs di DIY ada 10 % dari juru pemelihara BCB dan situs di seluruh Indonesia.

Tabel 2.38 Perbandingan Data BCB DIY dan Nasional, Tahun 2013

No	Aspek	DIY	%	Nasional
1	BCB/Situs	1353	3 %	43.405
2	BCB/Situs yang ditetapkan	56	7 %	749
3	BCB/Situs yang dipugar	35	5 %	643
4	BCB/Situs yang dipelihara	71	4 %	1895
5	Juru Pemelihara BCB/Situs	294	10 %	2988
6	Konservasi	64	44 %	146
7	Kasus	1	4 %	24

Sumber : Bappenas RI, tahun 2013

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, disebutkan urusan Pemerintah Provinsi dibidang Kebudayaan Sub Bidang Purbakala antara lain ;

- Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional *“Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage”* skala provinsi.
- Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/ situs skala provinsi.

- c. Penetapan BCB/situs skala provinsi.
- d. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi.
- e. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi.
- f. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.
- g. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs skala provinsi.
- h. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.
- i. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.
- j. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.

Indonesia telah memiliki UU terbaru untuk Pengelolaan Cagar Budaya, yaitu UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menggantikan UU No 5 Tahun 1992. DIY sangat kaya akan cagar budaya baik *tangible* maupun *intangible* yang bernilai besar bagi peradaban manusia yang harus terjamin kelestariannya dan merupakan Daerah Istimewa. Di DI Yogyakarta masih menggunakan Perda No 5 Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KCB dan BCB, yang disusun berdasarkan regulasi UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Isi-isi pasal dalam Perda harus disesuaikan dengan UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena banyak konsep dan objek yang berbeda. Akhir Juni 2012 Raperda berhasil dituntaskan oleh legislatif dan eksekutif setelah melalui proses yang panjang dan menjadi Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Inti isi Perda adalah pengembangan budaya Yogyakarta yang terintegrasi dalam konsep keistimewaan; pengelolaan meliputi kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan; dan pengawasan cagar budaya, pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029 Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sebagaimana bunyi ketentuan berikut:

Pasal 43 :

Kebijakan penetapan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c memantapkan fungsi lindung kawasan cagar alam,

kawasan taman hutan raya, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 44 :

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud di dalam

Pasal 43 sebagai berikut :

Pada Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dengan :

- a. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya;
- b. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan zona-zona pengembangan ilmu pengetahuan, dan pariwisata rekreasi dan pendidikan; dan
- c. melarang kegiatan budi daya apa pun yang tidak berkaitan dengan fungsinya dan tidak berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya.

Museum yang tersebar di DIY ada 38 museum yang tersebar di Kab Bantul sebanyak 5, Kab. Gunungkidul sebanyak 1, Kab. Sleman sebanyak 12, dan Kota Yogyakarta sebanyak 20, yang sudah masuk Barahmus ada 33 Museum. Sebagian besar museum di DIY berada di perkotaan. Kulon Progo adalah Kabupaten yang tidak memiliki museum. Gunungkidul hanya memiliki satu museum. Apresiasi kunjungan museum sebagai wujud kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya seperti Karnaval museum, Kemah Museum, Program Museum Sahabat Anak.

Tabel 2.39 Daftar Museum di DIY

No	Museum	Alamat
1.	Museum Biologi UGM	Sultan Agung No.22 Bintaran Wirogunan Mergangsan Yogyakarta
2.	Museum Affandi	Jl. Laksda Adi Sucipto 167 yk Papringan Caturtunggal Depok Sleman
3.	Museum Anak Kolong Tangga	Jl. Sriwedari No. 1 Suryatmajan danurejan Yogyakarta
4.	Museum Bahari Yogyakarta	Jl. Remartadinata 69 Wirobrajan RT 07 RW 02 Wirobrajan Yogyakarta
5.	Museum Batik dan Sulaman Yogyakarta	Jl. Dr. Sutomo No.13A Bausasran RT 49 RW XII Danurejan Yogyakarta
6.	Museum Batik Imogiri	Imogiri Imogiri Bantul
7.	Museum Batik Joglo Cipto Wening	Ketandan Tengah Wukirsari Imogiri bantul
8.	Museum Batik Kraton Yogyakarta	Kompleks Kraton Yogyakarta Kadipaten Kraton Yogyakarta
9.	Museum Benteng Vredeburg	Jendral A. Yani No.6 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta

RKPD Tahun 2015

No	Museum	Alamat
10.	Museum BI	Ngupasan Gondomanan Yogyakarta
11.	Museum Dewantara Kirti Griya	Tamansiswa No.31 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta
12.	Museum Dr. YAP	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 5 Terban Gondokusuman Yogyakarta
13.	Museum Gembira Loka	Kebun raya No.2 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
14.	Museum Geoteknologi Mineral	Jl. Babarsari 2 Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal, Depok Sleman
15.	Museum Gumuk Pasir	Depok Parangtritis Kretek Bantul
16.	Museum Gunung Merapi	Jl. Boyong Banteng Harjobinangun Pakem Sleman
17.	Museum Kayu Wanagama	Jl. Jogja-Wonosari KM. 30 gading Playen Gunungkidul
18.	Museum Kereta	Rotowijayan Kadipaten Kraton Yogyakarta
19.	Museum Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia	Jl. Adisucipto 88 Demangan Caturtunggal Depok Sleman
20.	Museum Kristal Kraton Yogyakarta	Kompleks Kraton Yogyakarta kadipaten kraton Yogyakarta
21.	Museum Memorial H.M Soeharto	Kumusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul
22.	Museum Monumen Yogya Kembali	Jl. Lingkar Utara, jongkang Sariharjo Ngaglik Sleman
23.	Museum Pahlawan Pancasila	Pandega Sakti Kentungan Condongcatur Depok Sleman
24.	Museum Paleoantropologi UGM	Jl. Medika Sekip Caturtunggal Depok Sleman
25.	Museum Pendidikan Indonesia	Jl. Colombo No.1 Karangmalang Caturtunggal Depok Sleman
26.	Museum Perjuangan	Kolonel Sugiyono No.24 Brongtokusuman Mergangsan Yogyakarta
27.	Museum Purbakala Pleret	Pleret Pleret bantul
28.	Museum Purbakala Tamanwisata Prambanan	Jl. Raya Yogya – Solo KM. 16 Prambanan Bokoharjo Prambanan Sleman
29.	Museum Puro Pakualaman	Jl. Sultan Agung – Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta
30.	Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama	Jenderal Sudirman 75 Terban Gondokusuman yogyakarta
31.	Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta	Jl. Solo Kompleks Lanud Adisucipto Maguwo Banguntapan bantul
32.	Museum Sandi Negara	Faridan M Noto Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta
33.	Museum Sasana Wiratama	Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo TR. III No. 430 Tegalrejo Yogyakarta
34.	Museum Sasmita Loka Pangsar Jendral Sudirman	Bintaran wetan No. 3 Yogyakarta, Gunungketur Pakualaman Yogyakarta
35.	Museum Seni Lukis Kontemporer Indonesia Nyoman Gunarsa	Jl. Wulung No. 43 Papringan caturtunggal Depok Sleman
36.	Museum Sonobudoyo Unit I	Jl. Trikora No.6 Prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta
37.	Museum Sonobudoyo Unit II	Wijilan Yogyakarta Cokrokiranan panembahan Kraton Yogyakarta
38.	Museum Sultan Hamengku Buwono IX	Bangsai Kencana, Kompleks Kraton Yogyakarta Kadipaten Kraton Yogyakarta
39.	Museum tani jawa Indonesia	Candaran Kebonagung Imogiri bantul
40.	Museum tembi	Jl. Parangtritis KM 8,4 tembi Timbulharjo Sewon bantul
41.	Museum Ullen Sentalu	Jl. Boyong Kaliurang Barat Hargobinangun

No	Museum	Alamat
		Pakem Sleman
42.	Museum Wayang Kekayon Yogyakarta	Jl. Yogya – Wonosari KM. 7 No. 277, Baturetno, Banguntapan, Bantul

Sumber : www.jogjabudaya.com

Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap kedua di tingkat nasional setelah Museum Nasional, sekarang sedang dalam proses revitalisasi.

Tahun 2010 Museum Sonobudoyo bersama Museum Vredeborg, Museum Budaya Tembi, Museum Ullen Sentalu mendapat penghargaan Sapta Pesona untuk Museum yang memiliki Toilet Umum bersih.

Selain kelompok kesenian, pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. Saat ini terdapat 43 desa budaya yang tersebar di Kab. Bantul sebanyak 9 desa budaya, Kab. Kulonprogo sebanyak 10 desa budaya, Kab. Gunungkidul sebanyak 10 desa budaya, Kab. Sleman sebanyak 6 desa budaya.

b. Pemuda dan Olahraga

Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan amanah (amanat penderitaan rakyat). Banyak atlet nasional maupun internasional yang lahir dari DIY, yaitu antara lain Yayuk Basuki, Winarsih, Doni Tata dan lain-lain. Sarana dan prasarana olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Stadion PSS Sleman, dan lain-lain.

Tabel 2.40 Pemuda dan Olah Raga di DIY, 2009-2013

Uraian	Tahun					Satuan
	2009	2010	2011	2012	2013	
Organisasi Kepemudaan	35	35	35	35	35	Buah
Jumlah Karang Taruna	442	440	437	440	440	Buah
Jumlah Organisasi Olah Raga	50	51	51	50	50	Buah
Sarana Olah Raga						
1) Standar Internasional	0	0	0	0	0	Unit
2) Standar Nasional	3	3	3	3	3	Unit

Sumber : *Disdikpora DIY, 2013*

RKPD Tahun 2015

Dari tabel di atas tampak bahwa perubahan dari tahun ke tahun tidak terlalu besar. Perubahan yang nampak pada jumlah Karang Taruna, yang mengalami kenaikan pada tahun 2010 namun pada tahun 2011 mengalami penurunan.

Tabel 2.41 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, 2008-2013

Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	12,10	12,14	12,34	12,34	15,42	15,42
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,30
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0,0007	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008

Sumber: Disbud DIY & Disdikpora DIY, 2013

2.1.6 Aspek Pelayanan Umum

2.1.6.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.6.1.1 Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SLTP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.42 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah 9APS) Pendidikan Dasar DIY Tahun 2009-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI (7-12 tahun)					
1.1.	Anak Usia 7-12 thn sedang sekolah	266.611	268.466	271.130	268.289	266.337
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	281.389	276.343	277.987	275.046	277.023
1.3.	APS Anak Usia 7-12 tahun	105,52	104,81	107,49	108,89	107,68
2	SMP/MTs (13-15 tahun)					
2.1.	Anak Usia 13-15 thn sedang sekolah	115.590	113.185	108.851	108.029	114.186
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	136.595	139.763	134.311	133.163	136.356
2.3.	APS Anak Usia 13-15 tahun	105,26	112,19	110,35	111,5	113,64

Sumber : Disdikpora DIY & Data Pembangunan Daerah, Bappeda DIY, 2013

Angka partisipasi sekolah di DIY masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Untuk APS SD/MI terjadi penurunan pada tahun 2010 akan tetapi mulai tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk APS SMP/MTs pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup besar akan tetapi pada tahun selanjutnya terjadi fluktuasi capaian walaupun masih diatas 100%.

Tabel 2.43 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten/Kota di DIY, 2013

NO	Kabupaten/kota	SD/MI Usia 7-12 Thn			SMP/MTs Usia 13-15 Thn		
		Sedang Sekolah	Jumlah Penduduk	APS	Sedang Sekolah	Jumlah Penduduk	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Yogyakarta	39.583	32.430	141,73	18.361	17.117	162,25
2.	Kab. Bantul	66.079	70.846	102,64	27.371	35.525	101,67
3.	Kab. Kulon Progo	30.674	33.933	102,04	13.284	16.120	112,75
4.	Kab. Gunungkidul	50.249	61.424	90,80	23.772	29.592	103,00
5.	Kab. Sleman	79.752	78.390	113,82	31.398	38.002	111,59
	Provinsi	266.337	277.023	107,68	114.186	136.356	113,64

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

a) Rasio Ketersediaan sekolah terhadap Penduduk usia Sekolah

Dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar pemerintah senantiasa menyediakan sarana fasilitas pendidikan. Pembangunan sekolah baru tentunya harus mempertimbangkan keberadaan anak usia

sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.44 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di DIY, 2009-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	2.009	2.009	2.017	2.009	2.010
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	281.389	276.343	277.987	275.046	277.023
1.3.	Rasio (Per 10.000)	71	73	73	73	73
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	509	507	507	517	526
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	136.595	139.763	134.311	133.163	136.356
2.3.	Rasio (Per 10.000)	37	36	38	39	39

Sumber : Disdikpora DIY dan Data Pembangunan Daerah, Bappeda DIY, 2013

Secara umum dapat dilihat jika ketersediaan gedung sekolah semakin lama semakin berkurang. Data tersebut jika dilihat dari rata-rata layanan setiap Gedung SD/MI sebesar 137 anak, setiap gedung SMP/MTs sebesar 259, maka ketersediaan gedung SD/MI dan SMP/MTs sudah cukup memadai sehingga tidak perlu menambah gedung sekolah.

Tabel 2.45 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013

No	Kabupaten/kota	SD/MI Usia 7-12 Thn			SMP/MTs Usia 13-15 Thn		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Yogyakarta	170	32.430	52	67	17.117	39
2.	Kab. Bantul	384	70.846	54	111	35.525	31
3.	Kab. Kulon Progo	368	33.933	108	78	16.120	48
4.	Kab. Gunungkidul	561	61.424	91	138	29.592	47

No	Kabupaten/kota	SD/MI Usia 7-12 Thn			SMP/MTs Usia 13-15 Thn		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Kab. Sleman	527	78.390	67	132	38.002	35
	Provinsi	2010	277.023	73	526	136.356	39

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Rasio rata - rata pada jenjang SD/MI di DIY sebesar 72,56 dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 38,58. Untuk rasio tertinggi ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang SD/MI berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 108,45 dan diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 91,33. Sedangkan rasio tertinggi ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang SMP/MTs berada di Kabupaten Kulon Progo sebesar 48,39 dan diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 46,63. Untuk rasio terendah ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah pada jenjang SD/MI berada di Kota Yogyakarta dengan 52,42 dan SMP/MTs berada di Kabupaten Bantul sebesar 31,25.

b) Rasio Guru/Murid

Penunjang keberhasilan program pendidikan akan sangat tergantung ketersediaan tenaga pengajar/guru. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.46 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di DIY, 2009-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	20.379	23.820	23.719	23.222	22.548
1.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 thn di Sedang Sekolah)	266.611	268.466	271.130	268.289	266.337
1.3.	Rasio (per 1.000)	76	89	87	87	85
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	13.131	12.971	12.684	12.634	12.834
2.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn di	115.590	113.185	108.851	108.029	114.186

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sedang Sekolah)					
2.3.	Rasio (per 1.000)	114	115	117	117	112

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Rasio guru murid untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2013 sebesar 85 per seribu ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar 12 murid, sedangkan pada sekolah setingkat SLTP dengan rasio 112, setiap guru mengajar anak sekitar 10. Secara umum pada jenjang pendidikan dasar setiap guru mengajar sekitar 12 murid.

Tabel 2.47 Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013

NO	Kabupaten/kota	SD/MI Usia 7-12 Thn			SMP/MTs Usia 13-15 Thn		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 sdg sekolah)	Rasio per 1.000	Jumlah Guru	Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn sdg sekolah)	Rasio per 1.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kota Yogyakarta	2.654	39.583	67	1.862	18.361	101
2.	Kab. Bantul	5.014	66.079	76	3.044	27.371	111
3.	Kab. Kulon Progo	3.479	30.674	113	1.692	13.284	127
4.	Kab. Gunungkidul	5.232	50.249	104	2.869	23.772	121
5.	Kab. Sleman	6.169	79.752	77	3.367	31.398	107
	Provinsi	22.548	266.337	85	12.834	114.186	112

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

2) Pendidikan Menengah

a) Angka Partisipasi Sekolah

APS Pendidikan Menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah di DIY untuk anak usia 16-18 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2009 - 2013) menunjukkan nilai yang terus meningkat. Meningkatnya APS pendidikan menengah ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2.48 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah di DIY, 2008-2012

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SLTA sederajat (16-18 tahun)					
1.1.	Jumlah murid usia 16-18 thn	93.480	95.500	101.015	101.539	103.862
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	156.283	158.089	159.267	159.625	160.402
1.3.	APS Pendidikan Menengah (16-18 tahun) per 1.000	66,82	65,71	68,05	68,13	68,86

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Tabel 2.49 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Usia 16-18 per Kabupaten/Kota di DIY, 2013

NO	Kabupaten/kota	SLTA 16-18 Tahun		
		Sedang Sekolah	Jumlah Penduduk	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Yogyakarta	26.417	29.174	93,04
2.	Kab. Bantul	23.815	35.819	71,74
3.	Kab. Kulon Progo	12.370	17.786	75,08
4.	Kab. Gunungkidul	17.020	32.296	57,25
5.	Kab. Sleman	24.240	45.327	56,87
Provinsi		103.862	160.402	68,86

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Kalau kita perhatikan capaian APS pendidikan menengah 16-18 tahun per kabupaten/kota di DIY tahun 2012, maka terlihat sangat variatif dan kesenjangannya sangat tinggi. APS pendidikan menengah yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 52,70 dan yang tertinggi adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 93,55.

b) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Dalam menunjang program wajib belajar 12 tahun pemerintah senantiasa meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, salah satunya adalah pembangunan sekolah baru yang akan menampung anak usia 16-18 tahun. Pembangunan sekolah baru tentunya harus

mempertimbangan keberadaan anak usia sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk.

Tabel 2.50 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di DIY, 2009-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Menengah (SLTA)					
1.1.	Jumlah sekolah	390	396	399	406	411
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	162.056	154.765	158.089	159.267	159.625
1.3.	Rasio (per 10.000)	24	26	25	25	26

Sumber: Disdikpora DIY, 2013

Tabel 2.51 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Pendidikan Menengah Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013

NO	Kabupaten/kota	SLTA 16-18 Tahun		
		Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk	Rasio per 10.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Yogyakarta	83	29.174	28
2.	Kab. Bantul	95	35.819	27
3.	Kab. Kulon Progo	57	17.786	32
4.	Kab. Gunungkidul	73	32.296	23
5.	Kab. Sleman	114	45.327	25
Provinsi		422	160.402	26

Sumber: Disdikpora DIY, 2013

Rasio ketersediaan sekolah SLTA sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah di DIY mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan angka yang meningkat ini berarti untuk rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah juga meningkat. Peningkatan rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah ini merupakan cerminan perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana belajar bagi anak usia sekolah. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk tentunya juga harus diiringi penambahan fasilitas belajar berupa sekolah.

c) Rasio Guru terhadap Murid

Seperti halnya pada pendidikan dasar jumlah ketersediaan guru pada jenjang pendidikan menengah juga akan sangat mempengaruhi kualitas

dan mutu pendidikan. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran angka rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah (16-18 tahun). Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.52 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah di DIY, 2009-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Menengah (SLTA) usia 16-18 Tahun					
1.1.	Jumlah Guru	14.922	15.067	15.064	14.748	15.231
1.2.	Jumlah Murid	93.480	95.500	101.015	101.539	103.862
1.3.	Rasio (per 10.000)	16	16	15	15	15

Sumber: Disdikpora DIY, 2013

Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dalam lima tahun terakhir (tahun 2009-2013) menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, Pada tahun 2009 rasio guru 16 terus meningkat hingga tahun 2013, yaitu 15, ini berarti bahwa pada tahun 2009 seorang guru membawahi sekitar 16 murid dan pada tahun 2013 seorang guru membawahi sekitar 15 murid.

Tabel 2.53 Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013

NO	Kabupaten/kota	Pendidikan Menengah		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid (Pddk Usia 16-18 sdg sekolah)	Rasio per 10.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Yogyakarta	3.509	26.417	13
2.	Kab. Bantul	3.495	23.815	15
3.	Kab. Kulon Progo	1.986	12.370	16
4.	Kab. Gunungkidul	2.602	17.020	15
5.	Kab. Sleman	3.639	24.240	15
Provinsi		15.231	103.862	15

Sumber: Disdikpora DIY, 2013

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak tidak hanya pada sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun)

bahkan batita (bawah tiga tahun). Diyakini bahwa masa balita seorang anak adalah masa keemasan pertumbuhan otaknya. Dimasa keemasan ini jika pertumbuhan anak dirangsang dengan benar dan baik maka akan sangat berpengaruh saat mereka nantinya dewasa.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Di DIY Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat digalakkan diberbagai daerah kabupaten maupun kota. Jumlah lembaga PAUD terus bertambah dari setiap tahunnya. Begitu pula jumlah murid PAUD terus meningkat.

Tabel 2.54 Jumlah Lembaga, Murid PAUD di DIY, 2013

No	PAUD NON FORMAL		PAUD FORMAL		Jumlah Anak terlayani	Juml belum	Prosen-tase	Prosen-tase	Prosen-tase Anak Terlayani (F+NF)
	lembaga	Peserta didik	lembaga	Peserta didik					
1.	1.448	71.412	218	11.782	29.989	5.665	51,06	33,04	84,11
2.	1.770	134.182	517	25.757	55.064	20.504	38,78	34,08	72,87
3.	1.540	107.166	532	25.056	46.147	18.837	32,46	38,56	71,01
4.	1.038	52.010	339	9.587	21.695	6.099	43,56	34,49	78,05
5.	1.244	80.658	507	20.656	35.546	15.332	29,27	40,6	69,87
6	7.040	445.428	2.113	92.638	188.441	66.437	37,51	36,42	73,93

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

c. Angka Putus Sekolah

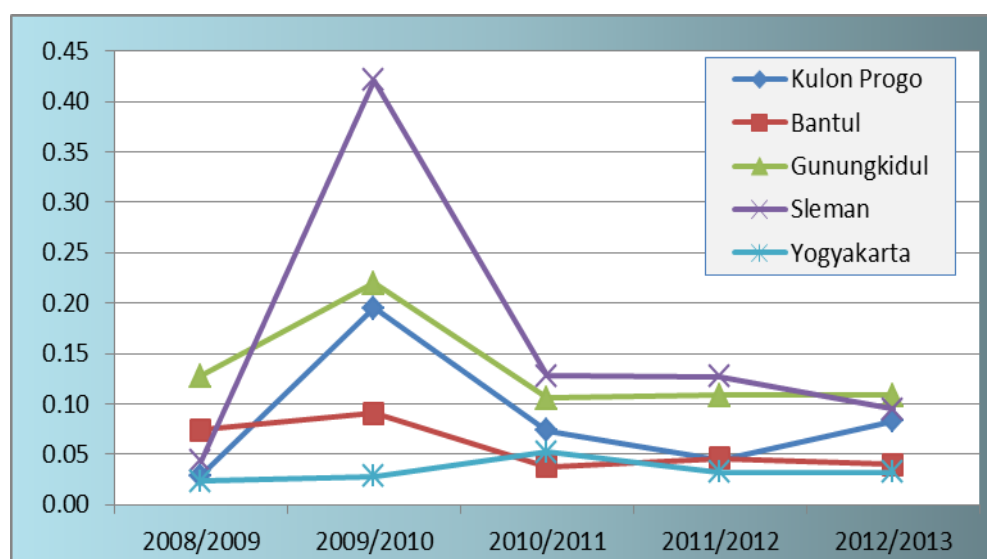
Berbagai program pemerintah dalam bidang pendidikan telah diberikan kepada masyarakat baik yang sifatnya umum seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan yang sifatnya khusus seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) disemua jenjang pendidikan mulai SD hingga SLTA dan juga ada Pogram Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan bagi masyarakat golongan sangat miskin. Salah satu tujuan dari program-program tersebut untuk mengurangi angka putus sekolah terutama bagi mereka yang kurang mampu. Namun pada kenyataannya masih juga terdapat siswa yang putus sekolah.

Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun SD/MI selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2009 - 2013) menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Akan tetapi terjadi kenaikan angka putus sekolah pada tahun 2010 sehingga mencapai angka 0,17.

Tabel 2.55 Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan MI DIY Tahun 2008/2009-2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	0,03	0,20	0,07	0,04	0,08
2	Bantul	0,07	0,09	0,04	0,05	0,04
3	Gunungkidul	0,13	0,22	0,11	0,11	0,11
4	Sleman	0,04	0,42	0,13	0,13	0,09
5	Yogyakarta	0,02	0,03	0,05	0,03	0,03
	Rata-rata	0,06	0,17	0,07	0,07	0,07

Sumber : Disdikpora DIY, 2013



Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Gambar 2.29 Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan MI DIY Tahun 2008/2009-2012/2013

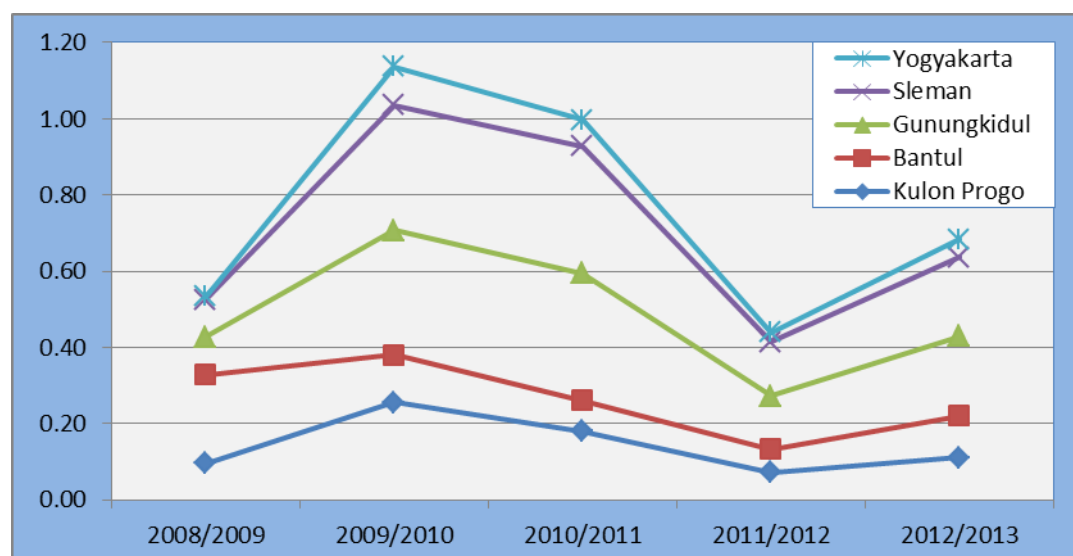
Untuk sekolah SMP/MTs angka putus sekolah penduduk usia 13-15 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2009 -2013) menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2009 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,18 persen dan meningkat hingga pada tahun 2012 sebesar 0,16 persen.

RKPD Tahun 2015

Tabel 2.56 Angka Putus Sekolah Tingkat SMP dan MTs DIY Tahun 2008-2009 s/d 2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	0,10	0,26	0,18	0,07	0,11
2	Bantul	0,23	0,12	0,08	0,06	0,11
3	Gunungkidul	0,43	0,31	0,25	0,19	0,36
4	Sleman	0,10	0,33	0,33	0,14	0,21
5	Yogyakarta	0,01	0,10	0,07	0,03	0,05
	Rata-rata	0,18	0,22	0,17	0,09	0,16

Sumber : Disdikpora DIY, 2013



Sumber : Disdikpora DIY, 2013

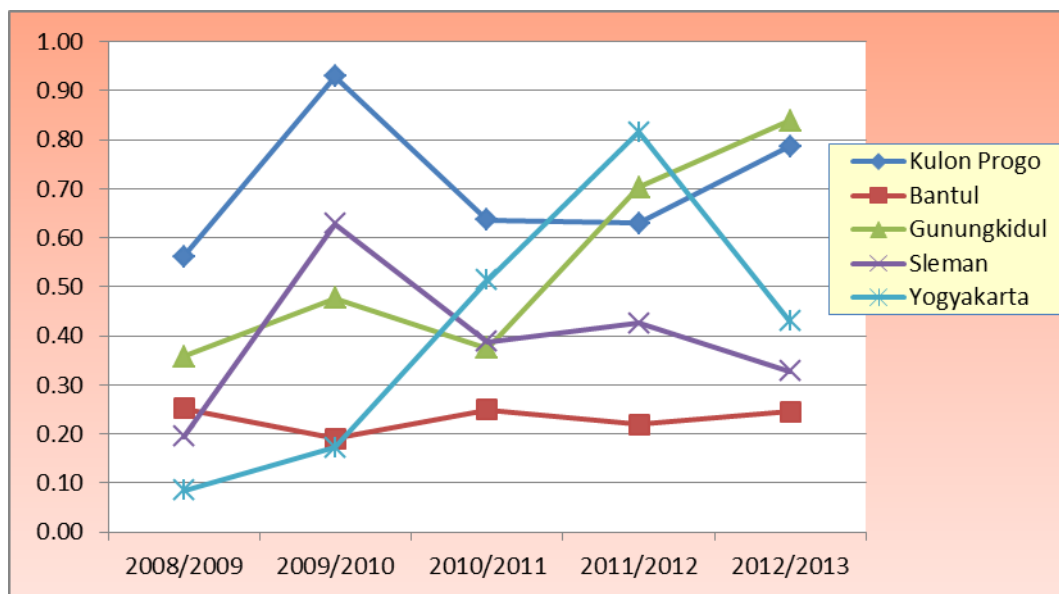
Gambar 2.30 Angka Putus Sekolah Tingkat SMP dan MTS DIY Tahun 2008/2009-2012/2013

Sedangkan pada sekolah SMA/SMK/MA angka putus sekolah penduduk usia 16-18 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2009 -2013) menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2009 angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,24 persen dan meningkat hingga sebesar 0,51 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.57 Angka Putus Sekolah Tingkat SMA dan MA DIY Tahun 2008/2009-2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	0,56	0,93	0,64	0,63	0,79
2	Bantul	0,25	0,19	0,25	0,22	0,25
3	Gunungkidul	0,36	0,48	0,37	0,70	0,84
4	Sleman	0,19	0,63	0,39	0,43	0,33
5	Yogyakarta	0,08	0,17	0,51	0,82	0,43
	Rata-rata	0,24	0,43	0,44	0,57	0,51

Sumber: Disdikpora DIY, 2013



Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Gambar 2.31 Angka Putus Sekolah Tingkat SMA dan MA DIY Tahun 2008/2009-2012/2013

Jika dilihat per Kabupaten/Kota di DIY, pada tahun 2013 angka putus sekolah untuk jenjang sekolah setingkat SD tertinggi adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 0,11 persen sedangkan terendah sebesar 0,3 persen yaitu di Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2013 angka putus sekolah setingkat SLTP tertinggi adalah Kabupaten Sampang dengan capaian angka 0,36 persen dan terendah Kota Yogyakarta sebesar 0,05 persen.

Sedangkan angka putus sekolah setingkat SLTA tertinggi juga Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 0,84 persen sementara terendah Kabupaten Bantul sebesar 0,25 persen.

d. Angka Kelulusan

Pada setiap jenjang pendidikan sekolah formal sebagai syarat kelulusan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi (kelas 6 untuk SD sederajat, kelas 3 untuk SLTP dan SLTA sederajat) diadakan ujian akhir atau Ujian Nasional (UN). Siswa yang hasil nilai ujian akhirnya memenuhi standart kelulusan akan dinyatakan lulus.

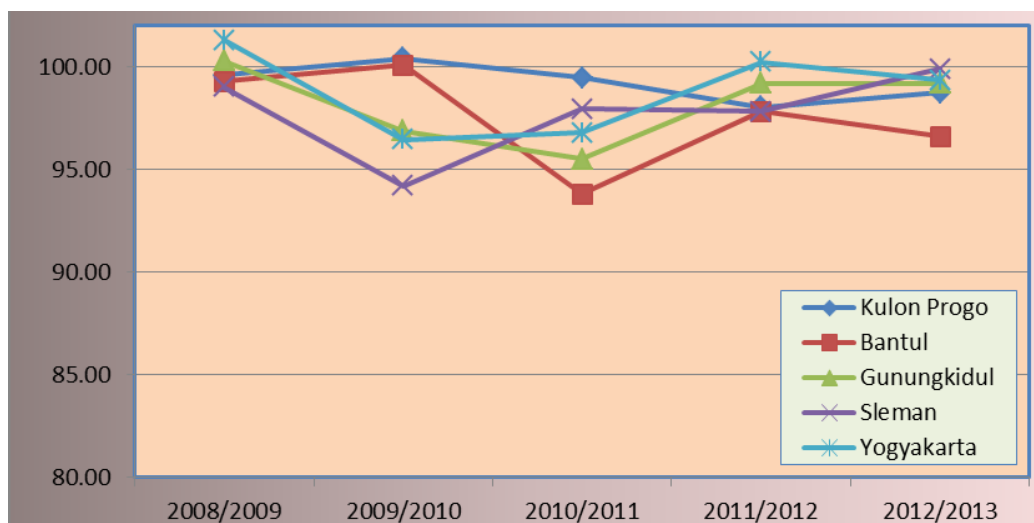
Angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas dari pendidikan tersebut, jika suatu sekolah banyak siswanya yang lulus maka sekolah tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding sekolah yang siswanya sedikit lulus.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2009 -2013) kelulusan sekolah SD/MI angkanya berfluktuasi, namun dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat. Berbeda halnya dengan angka kelulusan sekolah SMP/MTs, dalam lima tahun terakhir sangat berfluktuasi bahkan pada tahun 2010 terjadi penurunan yang cukup tajam, tahun 2011. Sedangkan angka kelulusan sekolah setingkat SMA/SMK/MA angka kelulusannya dalam lima tahun terakhir terus meningkat, kecuali tahun 2011.

Tabel 2.58 Angka Lulusan Tingkat SD dan MI DIY Tahun 2008/2009-2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	99,62	100,43	99,48	98,04	98,74
2	Bantul	99,31	100,08	93,80	97,82	96,60
3	Gunungkidul	100,30	96,89	95,52	99,20	99,20
4	Sleman	99,04	94,20	97,95	97,83	99,91
5	Yogyakarta	101,30	96,47	96,78	100,26	99,35
	Rata-rata	99,79	98,18	96,47	98,53	98,45

Sumber : Disdikpora DIY, 2013



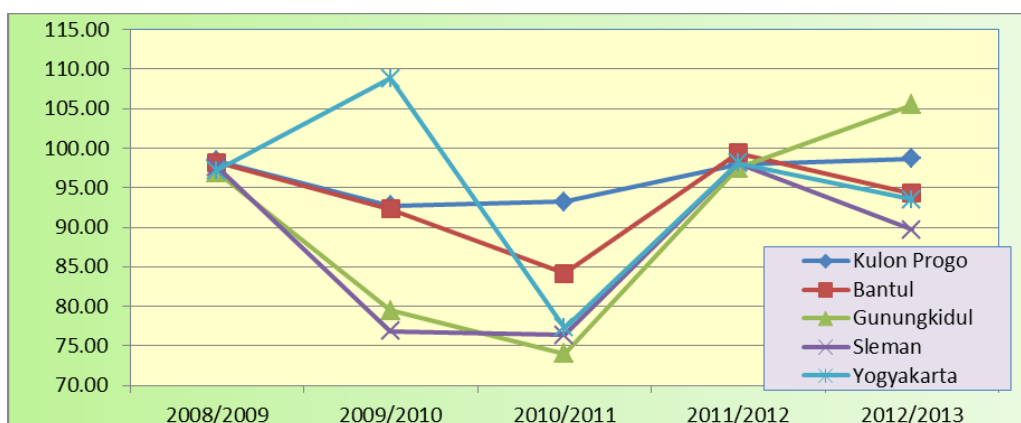
Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Gambar 2.32 Angka Lulusan Tingkat SMP dan MI DIY Tahun 2008/2009-2012/2013

Tabel 2.59 Angka Lulusan Tingkat SMP dan MTs DIY Tahun 2008/2009-2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	98,37	92,72	93,20	97,96	98,65
2	Bantul	98,18	92,28	84,16	99,40	94,27
3	Gunungkidul	96,91	79,46	74,01	97,51	105,50
4	Sleman	97,62	76,85	76,37	98,09	89,67
5	Yogyakarta	97,19	108,81	77,28	98,12	93,49
	Rata-rata	97,65	90,15	81,84	98,28	96,83

Sumber : Disdikpora DIY, 2013



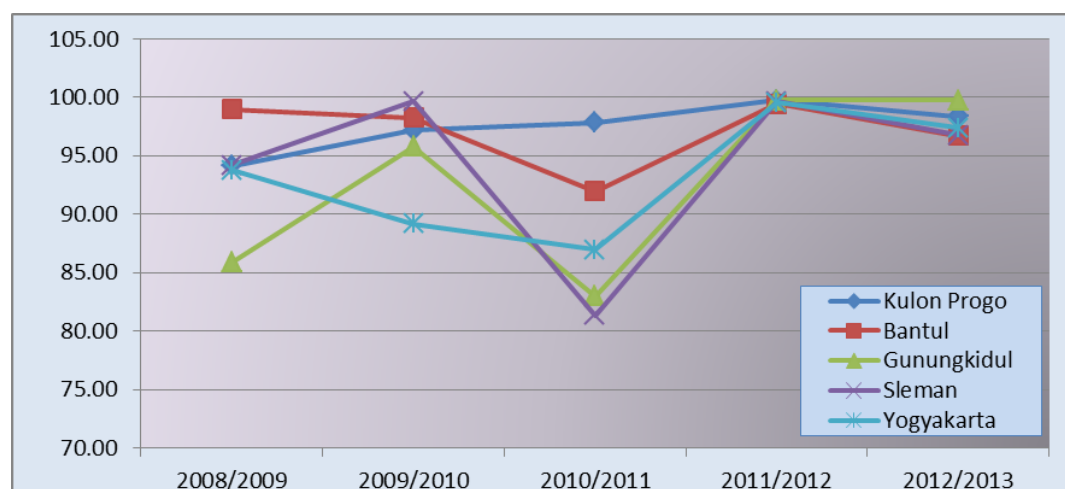
Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Gambar 2.33 Angka Lulusan Tingkat SMP dan MTs DIY Tahun 2008/2009 s/d 2012/2013

Tabel 2.60 Angka Lulusan Tingkat SMA dan MA di DIY Tahun 2008/2009-2012/2013

No.	Kabupaten	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kulon Progo	94,11	97,18	97,82	99,77	98,33
2	Bantul	98,96	98,26	91,96	99,45	96,73
3	Gunungkidul	85,89	95,79	83,00	99,76	99,76
4	Sleman	94,16	99,67	81,31	99,64	96,78
5	Yogyakarta	93,77	89,19	86,94	99,54	97,37
	Rata-rata	93,38	95,32	88,98	99,61	97,74

Sumber : Disdikpora DIY, 2013



Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Gambar 2.34 Angka Lulusan Tingkat SMA dan MA di DIY Tahun 2008/2009-2012/2013

e. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kemampuan seorang tenaga pendidik/guru sangat dipengaruhi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pendidikan seorang guru maka dia akan mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan yang pendidikannya rendah. Tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV pada jenjang Pendidikan Dasar dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, dari 35,5 % persen pada tahun 2009 menjadi 62 persen pada tahun 2013. Begitu juga pada jenjang Pendidikan Menengah terjadi peningkatan, dari 59 persen pada tahun 2009 menjadi 82,1 persen pada tahun 2012. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV pada jenjang Pendidikan Dasar

jumlahnya lebih tinggi jika dibanding pada Pendidikan Menengah. Secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV terus mengalami peningkatan, hal ini merupakan tuntutan jaman serta adanya sistem sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.61 Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1-DIV Per Jenjang Pendidikan di DIY, 2009-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Dasar (SD/MI)					
1.1.	Jumlah Guru	23.542	20.379	23.820	23.719	23.222
1.2.	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV	8.361	9.602	11.385	12.813	14.447
1.3.	Persentase	35,5%	47 %	47,8 %	54 %	62 %
2	Pendidikan Menengah (SMP/MTs)					
2.1.	Jumlah Guru	13.110	13.131	12.971	12.684	12.634
2.2.	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV	7.758	10.028	10.207	10.388	10.376
2.3.	Persentase	59 %	76,4 %	78,7 %	81,9 %	82,1 %

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

Jika dilihat secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV menurut kabupaten/kota di DIY pada tahun 2013 berkisar antara 60 hingga 83 persen. Persentase tertinggi adalah Kota Yogyakarta 83 persen dan terendah Kabupaten Gunungkidul 60 persen. Perbedaan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV antar kabupaten/kota di DIY antara yang terendah dan tertinggi sangat besar (hampir dua kali lipatnya), kondisi ini memberikan gambaran adanya kesenjangan tingkat pendidikan guru.

Tabel 2.62 Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1-DIV (SD-SLTA) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2009-2013

NO	Kabupaten/kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Yogyakarta	70	76	77	80	83
2.	Kab. Bantul	56	69	69	75	80
3.	Kab. Kulon Progo	51	64	61	62	73
4.	Kab. Gunungkidul	46	62	60	60	60
5.	Kab. Sleman	55	64	66	71	76
Provinsi						

Sumber : Disdikpora DIY, 2013

2.1.6.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

a. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi, dan balita.

Selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 jumlah posyandu di DIY mengalami peningkatan dari 5.643 unit di tahun 2009 dengan jumlah balita sebanyak 207.901 balita. Dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tahun 2010 sebanyak 5.652 unit, sedangkan tahun 2011 sebanyak 5.675 unit dan di tahun 2012 meningkat menjadi 5.691 unit, dan di 2013 diproyeksikan sebanyak 5.691 unit.

Jumlah balita di DIY 2009-2013 mengalami fluktuasi. Tahun 2011 meningkat menjadi 214.262 balita dari tahun 2010 sebanyak 209.856. Jumlah balita di tahun 2012 sebanyak 182.088 dan meningkat di tahun 2013 menjadi 196.265 balita. Perkembangan jumlah balita DIY yang fluktuatif juga mempengaruhi rasio posyandu per satuan balita di DIY. Rasio posyandu per satuan balita DIY tahun 2011 sebesar 26,49, kemudian naik di tahun 2012 menjadi 31,25, dan turun menjadi 29,00 di tahun 2013.

Tabel 2.63 Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu Per Satuan Balita DIY Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Posyandu	5.643	5.652	5.675	5.691	5.691
Jumlah Balita	207.901	209.856	214.262	182.088	196.265
Rasio Posyandu per satuan balita	27,14	26,93	26,49	31,25	29,00

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2013

*: Angka sementara

b. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah DIY dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat. Hasil survey Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2008 menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk DIY lokasi tempat tinggalnya hanya berjarak 1-5 km terhadap puskesmas dan lebih dari 70% penduduk hanya berjarak 1-5 km terhadap rumah sakit dan dokter praktek swasta. Tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km terhadap sarana pelayanan puskesmas, dokter praktek swasta dan bidan. Hal ini menunjukkan mudahnya akses jarak jangkauan penduduk terhadap sarana pelayanan.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2012 sebanyak 441 unit dengan rasio sebesar 0,122. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 8.131 penduduk. Sedangkan untuk proyeksi 2013, jumlah penduduk yang meningkat akan mempengaruhi rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk.

Tabel 2.64 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.501.374	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Puskesmas	118	120	121	121	121
Jumlah Puskesmas Pembantu	321	321	321	320	320
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	439	441	442	441	441
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,128	0,126	0,125	0,123	0,122

Sumber : BPS Provinsi DIY & Dinas Kesehatan DIY, 2013, diolah

*: Angka sementara

c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk.

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit di DIY dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penambahan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaitu sebanyak 66 rumah sakit pada tahun 2011 dan 2012, menjadi 71 rumah sakit pada tahun 2013. Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.627.821 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 0,0195. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 50.386 jiwa.

Tabel 2.65 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2011-2013

Uraian	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Rumah Sakit	66	66	72
Rumah Sakit Umum Pusat	1	1	1
Rumah Sakit Umum Daerah	6	6	6
Rumah Sakit Umum Swasta	37	37	41
Rumah Sakit TNI/ POLRI	3	3	3
Rumah Sakit Khusus	19	19	21
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0186	0,0184	0,0195

Sumber : BPS Provinsi DIY & Dinas Kesehatan DIY, 2013, diolah

*: Angka Sementara

Dalam memberikan pelayanan yang baik, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang baik pula. Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Data BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka 48,3% dari semua kelas tempat tidur rumah sakit. Jumlah penduduk DIY pada tahun 2011 mencapai 3.487.325 jiwa. Jumlah RS pemerintah dan swasta sebanyak 66 buah, BOR masih tergolong rendah yaitu 48,3 %. Standar angka ratio tempat tidur dibanding penduduk adalah 1 : 1000, sehingga dengan demikian dibutuhkan sebanyak 3.487 TT, data yang ada menunjukkan bahwa di DIY sudah mempunyai 5.950 TT. Dengan demikian di DIY jumlah tempat tidur di rumah sakit dirasa sudah cukup terpenuhi. Apalagi didukung dengan cakupan kunjungan penduduk miskin ke fasilitas kesehatan masih sangat rendah (0,49 %), sehingga penting bagi semua provider untuk menjalankan sistim rujukan dengan benar. Berikut adalah tabel ketersediaan rumah sakit, jumlah tempat tidur, dan BOR menurut kabupaten/kota di Yogyakarta:

Tabel 2.66 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah RS	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tempat Tidur Kelas 3	Jumlah Hari Perawatan	Bed ocupansy ratio (BOR)
1	Kota Yogyakarta	390.553	18	1.875	682	361.072	50,8%
2	Kab Bantul	921.263	11	879	415	158.445	53,3%
3	Kab Kulonprogo	390.207	8	524	201	32.933	18,2%
4	Kab Gunungkidul	677.998	3	257	109	59.471	62,7%
5	Kab Sleman	1.107.304	26	2.415	931	332.592	54,7%
6	DIY	3.487.325	66	5.950	2.338	944.513	48,3%

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Ketersediaan tenaga dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi sudah di atas target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014. Pada tahun 2013, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 1.378 orang atau mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang sebanyak 1.214 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk di tahun 2013 sebesar 37,98. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di DIY melayani 2.633 penduduk. Walaupun rasio dokter umum di DIY sudah di atas target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 (30 per 100.000 penduduk), tetapi jumlah tersebut masih di bawah ideal (1 dokter umum melayani 2.500 penduduk).

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2013 adalah sebanyak 1.180 orang menurun dari tahun 2012 yang sebanyak 1.354 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 32,53. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 3.074 penduduk. Rasio tersebut sudah jauh di atas target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 (9 per 100.000 penduduk).

Jumlah dokter gigi DIY tahun 2013 sebanyak 608 orang meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 597 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 16,76.

Tabel 2.67 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.501.374	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Dokter Umum	1.304	773	1.358	1.214	1.378
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	38,05	22,08	38,32	33,85	37,98
Jumlah Dokter Spesialis	931	789	1.245	1.354	1.180

RKPD Tahun 2015

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	27,17	22,53	35,13	37,76	32,53
Jumlah Dokter Gigi	222	304	385	597	608
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	6,48	8,68	10,86	16,65	16,76

Sumber : BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, diolah

*: Angka Sementara

e. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan faktor penentu dalam memberikan gambaran pelayanan kesehatan kepada penduduknya. Adapun tenaga medis yang dimaksud adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dicakup dalam hal ini adalah tenaga dokter dan paramedis.

Rasio perawat di DIY tahun 2013 sebesar 200,40 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka target Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 yang sebesar 158 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2013 sebesar 47,30 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah target renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 yang sebesar 75 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.68 Jumlah dan Rasio Perawat dan Bidan Per 100.000 Penduduk di DIY, 2009-2011

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*
Jumlah Penduduk	3.426.637	3.501.374	3.543.740	3.585.922	3.627.821
Jumlah Perawat	4.874	4.371	6.369	6.560	7.270
Rasio Perawat per 100.000 penduduk	142,24	124,84	179,73	182,94	200,40
Jumlah Bidan	1.009	1.172	1.828	1.927	1.716
Rasio Bidan per 100.000 penduduk	29,45	33,47	51,58	53,74	47,30

Sumber : BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, diolah

*: Angka sementara

f. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas (**Pusat Kesehatan Masyarakat**) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah puskesmas di DIY pada tahun 2013 sebanyak 121 puskesmas yang tersebar di 78 kecamatan. Angka kunjungan puskesmas sebesar 4.025.741. Sedangkan

jumlah Puskesmas Pembantu di DIY sebanyak 320 puskesmas pembantu yang tersebar di 438 desa/kelurahan.

Tabel 2.69 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu DIY Tahun 2011-2013

No	Uraian	2011	2012	2013
1	Jumlah Puskesmas	121	121	121
2	Jumlah Kecamatan	78	78	78
3	Jumlah Kunjungan Puskesmas	3.924.814	3.802.382	4.025.741
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	321	320	320
5	Jumlah Desa/Kelurahan	438	438	438

Sumber : Dinas Kesehatan DIY, diolah

g. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2012 mencapai 99,85%, angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 82,2%. Secara nasional, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2010, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 97,69 % meningkat pada tahun 2011 menjadi 99,73% dan meningkat lagi di tahun 2012 mencapai 99,85%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2.70 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Ibu yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	44.041	43.038	44.847	45.880	45.880
Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	47.599	44.057	44.968	45.948	45.948
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan (%)	92,53	97,69	99,73	99,85	99,85

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

2.1.6.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Penanganan pembangunan di bidang sumber daya air, kebinamargaan, keciptakarya dan jasa konstruksi, merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum. Dalam menjalankan pelayanan urusan tersebut, Pemerintah DIY bertanggungjawab untuk :

1. melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan , dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
2. melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di wilayah DIY.
3. menyediakan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan keciptakarya ini meliputi: (1) Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Melalui dana APBD 2013 telah dilakukan konservasi sumber daya air dengan menyelesaikan DED untuk 2 embung dan pengerjaan pembangunan 3 unit embung baru. Pada tahun 2014 telah dialokasikan perencanaan pembangunan 4 embung, dan pembangunan baru sebanyak 4 unit, serta melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi pada embung yang telah terbangun dan waduk Sermo. Kegiatan-kegiatan tersebut selain menjadi bagian dari konservasi sumber daya air juga sebagai bagian kegiatan untuk penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku pada tahun 2013 telah berhasil menambah ketersediaan air baku di DIY sebanyak 34 lt/detik, dan akan dilanjutkan pada tahun 2014 dengan mengalokasikan kegiatan Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku yang diharapkan menjadi landasan bagi pencapaian target penambahan penyediaan air baku sebanyak 1.200liter/detik dari kondisi awal pada tahun 2015.

Dalam rangka meningkatkan persentase luasan Daerah Irigasi (DI) terlayani dilakukan kegiatan perencanaan rehabilitasi, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi DI kewenangan provinsi, serta peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif. Pada tahun 2013 telah diselesaikan penyusunan inventarisasi dan detail desain

rehabilitasi jaringan irigasi pada 4 (empat) daerah irigasi dengan total areal seluas 2.497,93 ha, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada 44 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY, dan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan pada 14 (empat belas) daerah irigasi. Serangkaian kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun 2014 yang diharapkan dapat menambah persentase luasan DI terlayani sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir dalam rangka pemeliharaan sungai dan bantaran sungai. Penanganan banjir terhadap daerah potensi banjir dilakukan untuk menangani sejumlah 60 titik sampai dengan tahun 2014 melalui serangkaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai yaitu dengan penguatan tebing sungai yang mengalami gerusan dengan konstruksi yang ramah lingkungan berupa pasangan bronjong;
2. Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan, yaitu dengan melakukan monitoring dan persiapan menghadapi banjir serta pengadaan bahan banjiran berupa bronjong dan karung plastik;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya berupa bantuan teknis serta pemberian bantuan bahan banjiran kepada masyarakat yang berada di daerah potensi banjir;

Penanganan terhadap potensi banjir juga dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak meliputi pengerukan sedimen dan normalisasi sungai, terutama di sungai-sungai yang berhulu di Merapi.

Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 151/ KEP/2012 Tahun 2012, Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, total panjang jaringan jalan berstatus Jalan Provinsi adalah 619,34 Km dan panjang jembatan 4.393,09 m. Persentase kondisi Jalan Provinsi dengan kondisi mantap adalah sebesar 73,15% pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 72,87% atau sepanjang 451,3 km. Persentase ini diharapkan dapat terus meningkat dengan pelaksanaan rincian kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut:

1. Peningkatan jalan provinsi sepanjang 8,02 km dan peningkatan jembatan provinsi sepanjang 171 m
2. Rehabilitasi jalan provinsi sepanjang 11,5 km (APBD), dan 2,7 km (DAK)
3. Rehabilitasi 1 unit jembatan sepanjang 7 m

4. Pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 512,5 km dan pemeliharaan rutin jembatan provinsi sepanjang 3686,7 m

Untuk mengatasi kesenjangan dan sebagai upaya percepatan pertumbuhan pembangunan di kawasan selatan Pulau Jawa yang didasari oleh adanya potensi di daerah tersebut maka dibangun jalur lintas selatan. Manfaat pembangunan jalur lintas selatan adalah merupakan salah satu usaha untuk membuka seluruh potensi daerah selatan di DIY seperti potensi wisata dan industri kelautan dan pertanian, yang diharapkan bisa merupakan satu kesatuan jaringan jalan di Pulau Jawa sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jalan.

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 117,60 km terbagi menjadi 4 (empat) segmen. Untuk Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela)/ JJLS, pada tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Jalan Strategis Nasional Belum Tersambung dengan panjang 125,125 km. Sampai dengan tahun 2012 tahapan pembangunan JJLS yang meliputi studi kelayakan, penyusunan AMDAL, penyusunan Detail Engineering Design (DED), pembebasan tanah serta kegiatan fisik berupa pembangunan jalan telah menangani 44,575 km sehingga menyisakan 80,550 km yang belum tertangani. Pada tahun 2013 Pemerintah DIY telah melakukan pembebasan lahan seluas 76.984 m² atau sebesar 28,55%.

Pembangunan pada sub sektor bidang air minum berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas. Hal ini sebagai salah satu usaha untuk mendukung pencapaian MDGs khususnya target 7C yakni menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses air minum yang layak pada tahun 2015.

Sampai dengan tahun 2013, persentase rumah tangga dengan sumber air minum yang layak di DIY mencapai 74,25%. Peningkatan persentase penduduk dengan akses air minum yang layak dicapai dengan melakukan ; pengembangan dan optimalisasi SPAM IKK dan SPAM Desa. Sebagai perwujudan peran serta masyarakat di DIY, telah terbentuk PAMASKARTA (Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta) yang beranggotakan kelompok-kelompok masyarakat pengelola air minum di

perdesaan. Sampai dengan bulan Juli tahun 2012 jumlah anggota PAMASKARTA telah mencapai 482 kelompok, dimana masing-masing kelompok mengelola sumber air rata rata 1 s.d. 2 liter/detik.

Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah merupakan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dengan fokus penanganan pada wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelayanan sistem terpusat oleh IPAL Sewon.

Hingga tahun 2013 cakupan pelayanan IPAL Sewon telah mencapai sekitar 16.191 SR. Angka ini telah melampaui target di RPJMD 2012-2017, namun masih terdapat gap terhadap pencapaian target MSMHP hingga tahun 2014. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan kabupaten/kota untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam penyediaan SR. Pada tahun anggaran 2103 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Lateral Air Limbah Terpusat di Kawasan Depok Kabupaten Sleman dan di Kawasan Kasihan Kabupaten Bantul. Sedangkan melalui pendanaan APBN telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Induk Air Limbah Terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sesuai skenario kesepakatan MSMHP.

Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Skenario pengelolaan persampahan ramah lingkungan didasarkan pada pendekatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala rumah tangga, selanjutnya pada skala kawasan dikembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengelolaan sampah pada skala regional di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dilakukan dengan sistem sanitary landfill pada TPA Piyungan di Bantul. Adapun untuk wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo telah dibangun masing-masing satu TPA dengan sistem controlled landfill.

Pada tahun anggaran 2013 melalui pendanaan APBN telah melaksanakan kegiatan optimalisasi kinerja TPA Sanitary Landfill Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul, kegiatan penyediaan TPST 3R di Kabupaten Bantul 2 TPST 3R

RKPD Tahun 2015

(Panggungharjo & Mrisi), di Kabupaten Sleman 1 TPST 3R (Bayen), dan di Kabupaten Gunungkidul 1 TPST 3R (Selang). Melalui pendanaan APBD DIY pada TA 2013 telah dilaksanakan penyusunan NSPM Pengelolaan Persampahan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut presentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan pada tahun 2013 telah meningkat mencapai 53%.

Sesuai dengan data Masterplan Penanganan Drainase KPY, telah teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di KPY. Pada akhir tahun 2012 telah tertangani 14 titik genangan (27,90%) dari total titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2013 melalui pendanaan APBN telah dilakukan penyediaan jaringan drainase untuk menangani 2 titik genangan di Kawasan Janti dan Kawasan Samirono di wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan melalui pendanaan APBD DIY telah ditangani 2 titik genangan di Kawasan Sewon Kabupaten Bantul dan Kawasan Mantrijeron Kota Yogyakarta, sehingga sampai dengan tahun 2013, sejumlah 18 titik genangan telah tertangani atau mencapai 35,29%.

Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan dimana kawasan tersebut berada. Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan yang merupakan penguatan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasiskan kekuatan internal, akan mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi inter dan intra regional. Sampai tahun 2012 sudah sekitar 28% dari kawasan agropolitan, minapolitan, dan desa-desa pusat pertumbuhan yang dikembangkan.

Pada tahun 2013 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan Penyediaan Infrastruktur di Kawasan Ngemplak Sleman dan Kawasan Desa Pertumbuhan Srandakan Bantul, sedangkan melalui fasilitasi APBN telah terfasilitasi penyediaan infrastruktur dasar di Kawasan Minapolitan Sindumartani dan Ngemplak di Kabupaten Sleman, Kawasan Agropolitan Banjaroyo di Kabupaten Kulon Progo dan Kawasan Agropolitan Dlingo dan Sanden di Kabupaten Bantul, sehingga selama tahun 2013 telah terfasilitasi sejumlah 6 Kawasan Agropolitan/Minapolitan, dan dari 6 kawasan tersebut 2 kawasan telah dinyatakan tuntas penanganannya adalah Kawasan Agropolitan Banjaroyo dan Sanden, sehingga sampai dengan tahun 2013 telah dibangun dukungan infrastruktur di 10 kawasan agropolitan/minapolitan telah tertangani atau mencapai 34%.

Pada kawasan perkotaan terdapat 125 lokasi yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya. Pada akhir tahun 2012 sejumlah 66 lokasi atau 53% yang tersebar di 4 kecamatan miskin telah terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas

kawasan. Pada tahun 2013 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan berupa pembangunan sarana prasarana jalan lingkungan di 14 lokasi, sehingga sampai dengan akhir tahun 2013 aksesibilitas di kawasan perkotaan Yogyakarta khususnya pada kecamatan miskin telah meningkat menjadi 80 lokasi atau 64%.

Secara keseluruhan di DIY terdapat 2.375 lokasi pada kawasan perdesaan yang perlu ditingkatkan aksesibilitasnya. Pada akhir tahun 2012 sejumlah 926 lokasi atau 39% wilayah yang telah terfasilitasi sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan. Sampai dengan tahun 2013 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan/jalan lingkungan di 196, sehingga aksesibilitas kawasan miskin di wilayah perdesaan telah meningkat menjadi 1.122 lokasi atau 47%.

2.1.6.1.4 Urusan Perumahan

Pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 6.325 unit rumah. Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 2,5% per tahun hingga tahun 2020. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah di DIY, Pemerintah DIY melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
- 2) Pengembangan Perumahan Swadaya.
- 3) Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Berdasarkan data Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) DIY 2011 masih terdapat 91.200 keluarga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Dari jumlah tersebut yang tidak layak huni terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan. Penanganan sampai dengan tahun 2013 dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni melalui pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulan. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan perbaikan RTLH sejumlah 4.911 dan pada tahun 2013 sejumlah 4.734 unit. Perwujudan rumah sehat juga dilakukan melalui upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah secara swadaya, maka

RKPD Tahun 2015

Pemerintah DIY setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan.

Jumlah komunitas perumahan total di DIY tercatat 438 komunitas. Sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan fasilitasi bagi komunitas perumahan sebanyak 169 komunitas. Pada tahun 2013 ada 50 (lima puluh) Komunitas Perumahan yang difasilitasi Pemerintah Daerah DIY melalui kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan rincian meliputi :

1. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat, telah dilakukan bagi komunitas perumahan di 45 (empat puluh lima) Komunitas.
2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan, dilakukan melalui penyuluhan kepada komunitas perumahan pada 5 (lima) komunitas.

Pembangunan unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan telah mencapai 24 unit sampai dengan tahun 2013. Keseluruhan pembangunan Rusunawa bersumber dari APBN sedangkan untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebaran Rusunawa yang ada di DIY sebagian besar berlokasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Adapun peruntukan penggunaan dari Rusunawa tersebut adalah untuk ; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, dan pendidikan. Rincian Rusunawa yang ada di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71 Rusunawa di DIY

No	Nama Rusun	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Twin Blok	Unit
1	Cokrodirjan	Kota Yogyakarta	Danurejan	Suryatmajan	1	72
2	Tegal Panggung	Kota Yogyakarta	Danurejan	Tegalpanggung	1	68
3	Jogoyudan	Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan	1	96
4	Jogoyudan	Kota Yogyakarta	Jetis	Gowongan	1	96
5	Ust	Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Tahunan	1	96
6	Uad	Kota Yogyakarta	Umbulharjo	Giwangan	1	96
7	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	96
8	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	
9	Gemawang	Sleman	Mlati	Sinduadi	1	
10	Pringwulung 1	Sleman	Depok	Condongcatur	2	196
11	Pringwulung 2	Sleman	Depok	Condongcatur		72
12	UII	Sleman	Ngemplak	Umbulmartani		96
13	UII	Sleman	Ngemplak	Umbulmartani	1	96
14	UGM	Sleman	Depok	Caturtunggal	1	96
15	UGM	Sleman	Depok	Caturtunggal	1	96

No	Nama Rusun	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Twin Blok	Unit
16	UGM	Sleman	Depok	Caturtunggal		
17	Sanata Dharma	Sleman	Maguwoharjo	Plangan	1	96
18	STIKES	Sleman	Gamping	Ambarketawang	1	96
19	JONGKE	Sleman	Mlati	Sendangdadi	4	384
20	Panggunharjo	Bantul	Sewon	Panggunharjo	2	192
21	UMY	Bantul	Kasih	Tamantirto	3	288
22	Lanud Adisucipto	Bantul	Banguntapan	Banguntapan	1	96
23	Tambak	Bantul	Kasih	Ngestiharjo	1	96
24	UNY	Kulonprogo	Pengasih	Pengasih	2	192

Sementara itu, pada akhir tahun 2014 diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun dan secara terus menerus telah melahirkan dynamic phenomenon of urbanization. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan, baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah. Kompetisi penggunaan lahan di daerah perkotaan mengakibatkan fenomena kawasan kumuh. Luas kawasan permukiman kumuh yang mencapai 107 titik lokasi (54.000 ha) pada tahun 2009 menjadi 57.800 ha pada akhir tahun 2012 atau sebanyak 31 titik lokasi kawasan kumuh. Sampai dengan tahun 2013 Pemerintah DIY melakukan kegiatan penataan kawasan kumuh untuk mengurangi jumlah lokasi/luasannya dan telah dilakukan pada 36 titik lokasi.

2.1.6.1.5 Urusan Penataan Ruang

Sesuai dengan PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Ruang terdapat Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dimana dalam RPJMD 2012 – 2017 , target pelaksanaan kegiatan penataan Ruang DIY adalah tercapainya ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis sebanyak 16 kawasan strategis, tercapainya 70% kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi, serta tercapainya 60% pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan kawasan lindung bawahan.

Ketugasan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kegiatan Penataan Ruang antara lain adalah berkewajiban untuk menyusun perencanaan tata ruang skala provinsi berdasarkan Undang-Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan telah dituangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, untuk

selanjutnya agar lebih implementatif dijabarkan pada rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi.

Berdasarkan Status Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, saat ini dari 530 wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk melakukan penyesuaian RTRW-nya, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan melalui Peraturan daerah 1 RTRW Provinsi (DIY), 4 RTRW Kabupaten (Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul) dan 1 RTRW Kota (Yogyakarta). Namun demikian sehubungan dengan telah terjadinya bencana erupsi merapi, yang telah mengakibatkan berubahnya kondisi struktur dan pola ruang pada wilayah DIY, serta dengan telah ditetapkannya Undang- Undang no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, maka RTRW DIY perlu dilakukan peninjauan ulang atau review RTRW DIY. Sehingga diharapkan pada Tahun 2015 review Perda RTRW DIY sudah dapat ditetapkan.

Sejalan dengan Visi Gubernur dalam RPJMD 2012 – 2017 dengan tema Yogyakarta menyongsong peradaban baru dengan membalik paradigma “among tani menjadi dagang layar” yang konsekwensinya laut selatan tidak lagi ditempatkan sebagai halaman belakang melainkan menjadi halaman depan. Makna dari paradigam tersebut pada dasarnya menghadapkan DIY kearah selatan dilakukan melalui pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir DIY merupakan daerah tertinggal dan miskin. Dengan demikian perencanaan tata ruang harus mengakomodir terkait kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya kegiatan pembangunan baru di kawasan Pantai Selatan, yakni kegiatan yang memanfaatkan potensi adanya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan antara lain rencana pembangunan Bandara Baru, pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, pembangunan pabrik Pig Iron dan Konsentrat Biji Besi dan pengolahan pasir besi yang mempengaruhi kegiatan dan guna lahan di Kawasan Pansela.



Gambar 2.35 Peta Jalur Jalan Lintas Selatan

Selain itu di DIY terdapat kawasan strategis provinsi yang lain yakni Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional. Dalam dua kawasan strategis ini (kawasan strategis Pansela dan KPY) terdapat beberapa wilayah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, yang pengaturan penataannya telah ditetapkan dalam Undang-Undang no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, atas dasar hal tersebut dalam Review RTRW DIY, wilayah Sultan Ground dan Pakualaman Ground dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi. Sehingga perlu adanya kegiatan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung penataan dan pengembangan kawasan strategis tersebut, sebagai kawasan strategis baru yang akan ditumbuhkan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang no 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana salah satu keistimewaan yang ditetapkan adalah urusan Tata Ruang, telah disusun Perda Istimewa Tata Ruang, sebagai dasar dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang khususnya pada kawasan Kasultanan dan Kadipaten seperti yang tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang no 13 tahun 2012 tersebut. Namun demikian dalam pelaksanaannya, perencanaan tata ruang yang dilakukan tidak bisa hanya mengatur wilayah Kasultanan dan Kadipaten saja, tetapi

juga harus mengatur wilayah hinterland dari wilayah Kasultanan dan Kadipaten serta satuan-satuan ruang Keistimewaan di sekitarnya.

Bagian dari satuan-satuan ruang keistimewaan dimaksud adalah antara lain kawasan yang telah ditetapkan sebagai City Heritage yakni ; Kawasan Malioboro, Kraton, Kotabaru, Pakualaman dan Kotagede yang terdapat di Kota Yogyakarta, Kawasan Merapi dan Prambanan yang terdapat di Kabupaten Sleman, Kawasan Kotagede, Pleret, Imogiri dan Parangtritis yang terdapat di Kabupaten Bantul, Kawasan Sokoliman dan Gunung Purba Nglanggeran yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, serta Kawasan Pusat Kota Wates yang terdapat di Kabupaten Kulon progo.

Pemanfaatan ruang di DIY harus dilakukan sejalan dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan harapan dapat mengurangi laju konversi terhadap luasan lahan khususnya lahan pertanian produktif untuk mendukung LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi. Disamping itu untuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi, khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaan lahan pada kawasan lindung, untuk selanjutnya dievaluasi hasil dari pemantauan tersebut sebagai bahan dalam pengaturan pemanfaatan ruang.

2.1.6.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan SKPD.

Dokumen RPJP DIY untuk periode 2005-2025 adalah RPJP DIY Tahun 2005-2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2009. Pelaksanaan RPJP DIY telah berlangsung selama dua periode waktu RPJMD dan saat ini memasuki tahap ketiga, yang berarti saat ini merupakan proses pertengahan pelaksanaan RPJP DIY. Pada tahun 2013, telah dilakukan Review RPJP DIY 2005-2025. Hal tersebut dilakukan karena lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang dipastikan akan membawa dampak yang signifikan dalam pembangunan DIY. Disamping itu, Review terhadap dokumen RPJP DIY tersebut untuk penyelarasan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai pedoman penyusunan dan penyajian dokumen perencanaan. Beberapa hasil dari review tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kerangka logika penurunan dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pembangunan belum tertuang secara tertulis dalam dokumen RPJP DIY.
2. Terdapat perbedaan struktur redaksional yang dituangkan dalam dokumen RPJP DIY dengan yang dituntut dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Namun secara substansi sudah memenuhi yang dipersyaratkan.
3. Integrasi nilai dasar keistimewaan (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawulo Gusti) dengan visi dan misi dalam dokumen RPJP DIY.

Dokumen RPJM DIY yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan untuk periode 2012-2017 adalah RPJM DIY yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2013. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJPN dan RPJMN. RPJM DIY Tahun 2012-2017 ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan setelah Pelantikan Gubernur pada tanggal 10 Oktober 2012 (berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2012). Sementara itu, Penjabaran visi dan misi dalam dokumen RPJMD dituangkan dalam RKPD yang merupakan dokumen tahunan.

2.1.6.1.7 Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terbatas pada layanan transportasi darat (jalan dan jalan rel) dan transportasi udara, dengan fokus layanan adalah transportasi jalan, mengingat tanggung jawab dan urusan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah DIY. Di bidang transportasi jalan, sampai dengan saat ini kemacetan lalu lintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam upaya mencari solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan memasyarakatkan penggunaan angkutan umum, pada tahun 2008, khususnya di Perkotaan Yogyakarta telah diluncurkan pengoperasian Trans Jogja. Angkutan Trans Jogja ini merupakan alternatif penyediaan angkutan umum massal dengan berbasis pada “membeli layanan” dan bukan sistem setoran. Dengan konsep baru ini, diharapkan resiko yang dapat diterima oleh operator terkait dengan penyediaan biaya operasi kendaraan, dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. Selain itu, dengan standar pelayanan yang lebih baik dan kendaraan yang baru, diharapkan sedikit demi sedikit dapat memindahkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Keberadaan layanan Trans Jogja, tidak serta merta menghilangkan layanan angkutan perkotaan reguler. Banyaknya jumlah angkutan perkotaan reguler yang memiliki ijin trayek, menyebabkan tidak semua layanan angkutan perkotaan reguler melebur dalam layanan “buy the service” Trans Jogja.

Penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang ber-sinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan. Oleh karena itu, angkutan umum dan manajemen rekayasa lalu lintas menjadi 2 (dua) hal utama yang diprioritaskan oleh Pemerintah DIY saat ini.

Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan, pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep ATCS (area traffic control systems) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan Tahun 2013 telah terpasang 25 unit ATCS atau 45% dari 55 simpang yang direncanakan. Secara rinci, ATCS yang sudah terpasang adalah

16 unit yang dialokasikan melalui APBN, 1 unit melalui APBD-DIY dan 8 unit dari APBD Kota Yogyakarta. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan sinyal bus priority, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung sinyal bus priority. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY.

Untuk memudahkan perpindahan layanan angkutan umum di jalan, DIY memiliki beberapa terminal penumpang, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 2.72 Jumlah Simpul Transportasi Jalan di DIY

Simpul Transportasi	Tipe	2009	2010	2011	2012	2013
Terminal Bus	A	3	3	3	2	2
	B	2	2	2	3	3
	C	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Dari beberapa terminal yang ada, 2 (dua) terminal sudah terintegrasi layanan angkutan umum perkotaan dan AKDP, yakni terminal Giwangan (tipe A) di Kota Yogyakarta dan Terminal Jombor (tipe B) di Kabupaten Sleman.

Untuk memudahkan perpindahan trayek maupun akses layanan angkutan umum perkotaan, sampai dengan tahun 2013, telah tersedia 112 halte Trans Jogja statis dan 40 halte Trans Jogja portable di Perkotaan Yogyakarta. Dari 112 halte statis tersebut, 2 (dua) buah halte telah dilengkapi fasilitas park and ride, yakni halte Prambanan dan Ngabean. Fasilitas Park and Ride tersebut, merupakan fasilitas pendukung bagi pengguna angkutan umum perkotaan, dimana penumpang angkutan umum dapat menitipkan kendaraannya dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Sedangkan untuk angkutan perkotaan reguler selain Trans Jogja, proses perpindahan penumpang dan fasilitas untuk naik turun penumpang masih dilakukan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga keberadaan pengendalian dan pemantauan pelayanan angkutan umum di jalan, mutlak diperlukan.

Load faktor untuk angkutan umum perkotaan reguler sejak tahun 2008 terus mengalami penurunan, sedangkan angkutan perkotaan Trans Jogja selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat DIY cenderung untuk memilih menggunakan angkutan umum perkotaan yang dapat diandalkan dan nyaman. Secara keseluruhan, load faktor angkutan umum perkotaan jika

RKPD Tahun 2015

digabungkan akan menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

Tabel 2.73 Load Factor Angkutan Umum Perkotaan dan AKDP di DIY

Tahun	Angkutan Perkotaan (%)			Angkutan AKDP (%)
	Reguler	Trans Jogja	rata-rata	
2008	27,60	31,87	29,74	36,18
2009	27,29	33,60	30,45	32,40
2010	22,00	33,99	28,00	18,00
2011	24,01	38,26	31,14	23,00
2012	22,73	42,41	32,57	26,85
2013	20,21	48,77	34,49	34,79
Rata-Rata	24,73	36,03		27,29

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, & Informatika DIY, 2013

Untuk mendukung pergerakan angkutan umum di jalan dan mempersempit ruang gerak kendaraan pribadi di Perkotaan Yogyakarta, mulai tahun 2012 telah diterapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas berbasis kawasan. Terdapat 7 (tujuh) kawasan yang akan diatur, yakni Jati Kencana – Demak Ijo, Malioboro, Kraton, Kranggan, Demangan, Kota Gede dan Seturan.

Sedangkan untuk keselamatan lalu lintas di jalan diperlukan kebutuhan akan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan, berupa : rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman, lampu penerangan jalan (LPJU), rambu petunjuk pengarah jalan (RPPJ), *warning light*, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL/*traffic light*). Kebutuhan akan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan ini sangat kondisional, disesuaikan dengan manajemen rekayasa lalu lintas yang ada dan kajian keselamatan di jalan.

Untuk moda transportasi darat lainnya, penumpang kereta api didominasi angkutan kereta api jarak pendek (Yogyakarta - Solo) dan beberapa simpul stasiun yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.74 Jumlah Simpul Transportasi Kereta Api di DIY

Simpul Transportasi	Tipe	2009	2010	2011	2012	2013
Stasiun Kereta Api	Besar	2	2	2	2	2
	Kelas 1	--	--	--	--	--
	Kelas 2	1	1	1	1	1
	Kelas 3	4	4	4	4	4

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Pada tahun 2013, terdapat 12 (duabelas) layanan kereta api yang berangkat dari Stasiun Yogyakarta dan bukan merupakan kereta api terusan, dengan 3 (tiga) diantaranya merupakan kereta api jarak pendek. Sedangkan untuk kereta api terusan yang berhenti di Stasiun Yogyakarta, terdapat 23 layanan untuk semua jurusan dan tipe layanan.

Kondisi transportasi udara dapat dilihat dari jumlah pergerakan pesawat di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Selama periode 2008-2011 telah terjadi perubahan preferensi masyarakat DIY khususnya dalam menggunakan moda transportasi jarak jauh yaitu ditandai dengan mulai beralihnya masyarakat menggunakan pesawat terbang dibanding moda transportasi lainnya. Pada tahun 2013, pergerakan pesawat untuk penerbangan domestik sebesar ± 1.714 gerakan atau mengalami kenaikan 10,6 % dari ± 1.533 gerakan pada tahun 2012. Sedangkan untuk penerbangan luar negeri, terdapat ± 125 gerakan pada tahun 2013 atau naik sebesar 36 % dari ± 80 gerakan di tahun 2012. Jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi udara untuk penerbangan domestik adalah sebesar ± 234.703 atau naik sebesar 14,42 % dari ± 200.860 pada tahun 2012. Untuk pengguna layanan luar negeri, jumlah penumpang sebesar ± 13.739 atau naik sebesar 31,4 % dari ± 9.427 penumpang pada tahun 2012. Kondisi itu menunjukkan bahwa pergerakan pesawat atau operasi penerbangan yang ditunjukkan dengan adanya proses *take off/landing* di Bandara Adisutjipto meningkat sangat pesat.

Sampai dengan tahun 2013, terdapat 1 (satu) bandar udara di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melayani penerbangan domestik maupun luar negeri, dengan klas layanan I-B sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.75 Jumlah Simpul Transportasi Udara di DIY

Simpul Transportasi	Klas	2009	2010	2011	2012	2013
Bandar Udara	I-B	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

2.1.6.1.8 Urusan Lingkungan Hidup

A. Kondisi Kualitas Air

1. Kondisi Kualitas Air Sungai

DIY memiliki 11 sungai utama. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun pada beberapa ruas sungai dari hulu sampai hilir. Pada tahun 2012 pemantauan kualitas air sungai mengukur parameter

fisik (suhu, TDS, TSS, dan DHL) , Parameter kimia (pH, Oksigen terlarut (DO), BOD, COD, Klorin bebas, Sulfida (H_2S), Fluorida, Fosfat (PO_4), Nitrat (NO_3-N), Nitrit, Kadmium (Cd), Krom (Cr^{+6}), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Boron, Sianida (CN), Minyak dan Lemak, Seng (Zn), Fenol, Amoniak, Permanganat dan Deterjen), serta parameter biologi (Bakteri Koli Tinja (Fecal Coli) dan Total Coli). Sedangkan analisis hasil pemantauan kualitas air untuk menentukan status mutu air sungai digunakan metode storet. Dari hasil analisis storet tersebut secara umum sungai di Provinsi DIY mulai pada bagian hulu sampai bagian hilir sudah masuk kategori cemar berat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 2.76 Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet, 2012

NO	Nama Sungai	Nilai Baku Storet	Nilai Eksisting Kualitas Air Sungai	Keterangan
1	Winongo	≤ -31	-91 hingga -106	Cemar Berat
2	Code	≤ -31	-88 hingga -117	Cemar Berat
3	Gajahwong	≤ -31	-94 hingga -113	Cemar Berat
4	Sungai Bedog	≤ -31	-89 hingga -111	Cemar Berat
5	Tambakbayan	≤ -31	-86 hingga -101	Cemar Berat
6	Oyo	≤ -31	-96 hingga -105	Cemar Berat
7	Sungai Kuning	≤ -31	-95 hingga -109	Cemar Berat
8	Sungai Konteng	≤ -31	-95 hingga -115	Cemar Berat
9	Sungai Belik	≤ -31	-102 hingga -124	Cemar Berat

2. Kondisi Pantai dan Air Laut

Secara geografis, laut dan pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari pantai selatan Pulau Jawa yang memanjang dari ujung barat Kabupaten Kulon Progo hingga ujung timur Kabupaten Gunungkidul. D.I. Yogyakarta mempunyai panjang garis pantai 113 km dengan pantai yang datar - landai (kemiringan lereng 0 – 2 %) sepanjang kurang lebih 42 km yang berada di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dengan ketinggian berkisar 0 hingga 50 m dari permukaan laut (dpl). Sedangkan pantai yang berada di Kabupaten Gunungkidul memiliki kemiringan lereng yang bervariasi 2% hingga lebih dari 40% dengan ketinggian berkisar 0 hingga 250 m sepanjang lebih kurang 71 km.

Kedalaman maksimum laut di selatan pantai DIY hingga sejauh 12 mil mencapai 500 m. Semakin ke arah selatan, kedalaman perairan Samudra Hindia secara gradual bertambah lebih curam hingga mencapai kedalaman 4000 m. Daerah ini merupakan palung laut yang memanjang dari arah barat

ke timur. Ini merupakan zona tumbukan antara lempeng tektonik samudra dengan lempeng tektonik benua Asia.

Pasang surut merupakan proses naik-turunnya permukaan air laut (*mean sea level*) secara berkala, yang ditumbulkan oleh gaya tarik-menarik dari benda-benda angkasa terutama bulan dan matahari terhadap massa air di bumi. Perairan selatan Yogyakarta memiliki tipe pasang surut *mixed tide predominantly semi diurnal* atau pasang campuran yang condong ke harian ganda. Ini berarti dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut.

Arus yang terjadi di perairan Laut Selatan DIY ditimbulkan oleh gelombang datang, dengan 2 (dua) pola arus yang dibentuk oleh arus menyusur pantai (*longshore current*) dan arus meratas pantai (*rip current*). Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai (*nearshore current*) yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi dan abrasi pantai. Pola arus pantai ditentukan oleh besarnya sudut yang dibentuk oleh gelombang atau ombak datang menuju garis pantai. Sudut datang gelombang di perairan Pantai Selatan DIY kurang lebih 110° , sehingga lebih dominan membentuk arus menyusur pantai. Pola arus menyusur pantai berdampak besar terhadap pengangkutan material pasir, sedimen, dan sampah pantai. Kondisi ini terlihat jelas di sepanjang Pantai Selatan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Pada beberapa wilayah pantai seperti di teluk dan muara sungai terjadi penumpukkan material pasir, sedangkan di tempat lain terjadi penggerusan pantai akibat terangkutnya material pasir oleh masa air yang ditimbulkan oleh gelombang datang.

Umumnya wilayah perairan Laut Selatan Jawa dan khususnya di Pantai Selatan DIY, ombak dan gelombang yang dihasilkan cukup besar dan sering dikatakan sebagai daerah yang sangat ganas karena menimbulkan abrasi sepanjang tahun dan sewaktu-waktu menelan korban jiwa. Dari hasil pengamatan, besarnya gelombang Laut Selatan DIY yang berkisar antara 2,25 m – 3,30 m dipengaruhi secara langsung oleh kondisi oseanografi perairan Samudera Hindia yang sangat luas, dengan kondisi angin yang bertiup cukup kuat sepanjang tahun. Kondisi ombak atau gelombang di sepanjang pantai Selatan DIY relatif sama besar, namun cenderung lebih tinggi di pantai Kabupaten Gunungkidul. Tinggi dan besarnya gelombang laut, selain dipengaruhi oleh kondisi oseanografi Samudera Hindia, juga dipengaruhi topografi pantai pesisir setempat. Terdapat kecenderungan di

wilayah bertebing karang (Kabupaten Gunungkidul) memiliki gelombang yang lebih tinggi dan besar dibandingkan daerah landai dan bermaterial pasir, seperti di pantai Kabupaten Bantul dan Kulon Progo.

Kecerahan perairan pesisir DIY hampir konstan sepanjang tahun dengan kondisi kecerahan yang rendah dan atau kekeruhan yang tinggi akibat proses abrasi pantai oleh ombak dan gelombang. Ombak dan gelombang yang sangat besar di pantai Selatan DIY, memiliki daya perusak pantai yang juga sangat besar, sekaligus menimbulkan efek pencucian yang tinggi terhadap material (pasir dan tanah) pembentuk garis pantai. Akibatnya terjadi kekeruhan sepanjang waktu, dimana material pasir dan tanah yang menimbulkan kekeruhan tersebut dapat mengganggu pola migrasi ikan.

Luas tutupan karang yang ada di pantai selatan DIY, tersebar dari Pantai Sadeng sampai dengan Congot pada lokasi 2 – 4 mil dari pantai pada kedalaman 15 – 25 m. Beberapa jenis karang yang sering dijumpai antara lain karang jahe (*Coral submassive* atau *Acropora submassive*), karang bundar (*Coral encrusting*), karang putih atau karang yang sudah mati (*bleaching*), karang otak (brain coral atau *Coral massive*), karang gondong (karang seperti daun atau *Coral foliose*), karang biru (*Acropora*). Sebaran karang di lepas pantai biasanya terjadi secara spot-spot dan lebih mengarah berbentuk gosong karang. Gosong karang adalah tempat berbagai makhluk hidup bersama-sama, terbentuk dari kerangka batu kapur, karang laut yang sudah mati yang tercampur akibat aktivitas ganggang penyusun karang.

Luas tutupan karang di pantai selatan Kabupaten Gunungkidul diperkirakan seluas 5.100 Ha. Hal tersebut didasarkan bahwa tutupan karang terjadi mulai dari tepi pantai sampai 400 m dari pantai, dengan rata-rata lebar tutupan 200 m. Dari panjang pantai Kabupaten Gunungkidul 71 km tidak semua tertutupi karang dan diperkirakan hanya sebesar 50 % terjadi penutupan karang. Sedangkan untuk pantai di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo ditemukan spot-spot pertumbuhan karang yang lebih mengarah bentuk gosong karang dan terjadi di sepanjang pantai pada jarak 2 – 5 mil dari pantai pada perairan yang tidak terlalu dalam.

Kualitas air laut dari hasil pengukuran parameter fisika, kimia, biologi dan logam terlarut di Pantai Baron, Pantai Depok, Pantai Glagah , Pantai Kuwaru, Pantai Sundak dan Pantai Trisik pada tahun 2012 yang dilaksanakan dalam dua periode selama satu tahun (bulan Maret dan Juli), menunjukkan bahwa

secara fisik, suhu air laut sejuk sampai panas, yaitu antara 24° C – 31°C. Untuk wisata bahari suhu 31°C termasuk kurang nyaman, apalagi jika kondisi pantai minim penghijauan.

Secara kimia, derajat keasaman (pH) air laut antara 7,5 – 8,36, nilai pH menunjukkan rata-rata masih di bawah ambang atas, namun perlu diwaspadai karena nilainya hampir mendekati maksimal. Nilai pH air laut normal menurut baku mutu berkisar antara 7 – 8,5 ($\pm < 0,2$), sementara pH yang mempunyai tingkat keasaman tinggi atau basa tinggi menunjukkan bahwa air laut mengalami polusi. Selain itu, tingginya fosfat dan nitrat yang berasal dari limbah rumah makan yaitu air cucian yang mengandung detergen dan ketidakdisiplinan pelaku usaha dalam pengolahan limbah. Salinitas yang telah diukur menunjukkan bahwa air laut di DIY berada dalam batas normal, yaitu antara 0,91% - 2,99%. Kadar salinitas lebih tinggi pada bulan Juli dari pada bulan Maret yang berbanding lurus dengan berkurangnya curah hujan.

3. Kondisi Kualitas Air Tanah

Hasil pemeriksaan kualitas air sumur pada tahun 2012 yang dilakukan di beberapa lokasi permukiman penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah sampel adalah 68 titik, dimana 34 sampel diambil bulan April dan sisanya diambil bulan Agustus. Parameter fisika yang diuji adalah bau dan kekeruhan. Parameter kimia yang diuji meliputi kandungan besi, fluorida, kesadahan, klorida, chrom heksavalent, mangan, nitrat, nitrit, pH, deterjen dan permanganat. Parameter biologi yang diuji adalah bakteri koli tinja dan bakteri total koli. Secara keseluruhan ada 15 parameter yang diuji. Hasil analisis laboratorium menunjukkan ada empat parameter yang melebihi baku mutu dan satu parameter yang di bawah baku mutu. Parameter yang melebihi baku mutu adalah mangan, bakteri coliform dan bakteri koli tinja. Sedangkan parameter yang di bawah baku mutu adalah parameter pH.

Parameter bakteri koli tinja dan bakteri total koli yang melebihi baku mutu ditemukan di sebagian besar sampel. Terdeteksinya bakteri total koli mengindikasikan bahwa air tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia atau hewan. Sedangkan adanya bakteri koli tinja merupakan indikator yang lebih spesifik yaitu mengindikasikan adanya kontaminasi kotoran manusia.

Sebagian besar sumur yang diteliti telah tercemar oleh bakteri koli sehingga tidak memenuhi persyaratan biologis untuk air bersih.

B. Kondisi Udara Ambien

Penyumbang polutan udara terbesar di Provinsi DIY sekitar 80 persen berasal dari sumber bergerak (sektor transportasi). Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode pasif di ruas-ruas jalan protokol yang notabene mempunyai kadar polutan udara lebih tinggi dari pada di wilayah permukiman, kompleks pertokoan dan pedesaan, secara umum untuk parameter kunci pencemaran udara ambient seperti karbonmonoksida (CO), Hidrokarbon (HC), Timah Hitam(Pb), Oksida Nitrogen (NO_x) dan Sulfur dioksida (SO₂) menunjukkan konsentrasi zat pencemar udara tersebut masih di bawah baku mutu yang ditetapkan (kualitas udara ambient baik). Namun demikian sektor transportasi perlu tetap diwaspadai karena merupakan ancaman potensial pencemaran kualitas udara di DIY. Hasil Pemantauan Kualitas Udara ambient dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.77 Kualitas Udara Ambien di Sekitar Ruas-Ruas Jalan Protokol di DIY, 2012

No	Parameter Pencemar Udara	Baku Mutu	Satuan	Eksisting Konsentrasi	Keterangan
1	Karbon Monoksida (CO)	35	ppm	0,297 – 6,83	Baik
2	Timah Hitam(Pb)	2	µg/m ³	0,22 – 0,34	Baik
3	Oksida Nitrogen (NO _x)	0,212	ppm	0,011 – 0,018	Baik
4	Sulfur Dioksida (SO ₂)	0,340	ppm	0,0159 – 0,0244	Baik
5	Hidro karbon (HC),	160	µg/m ³	61,13 - 67,03	Baik

C. Kondisi Hutan dan Lahan

Luas hutan di DIY 22.138 Ha atau 6,95% dari luas DIY. Hutan tersebut tersebar di 4 (empat) wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul dan Kulonprogo. Pengelolaan hutan di DIY dibagi menjadi 5 (lima) Bagian Daerah Hutan (BDH) untuk mempermudah pengelolaannya, yaitu : BDH Karangmojo, BDH Playen, BDH Panggang, BDH Paliyan, dan BDH Kulonprogo-Bantul.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha, luas Hutan Produksi di DIY seluas 13.411,70 Ha, luas Hutan Lindung di DIY seluas 2.312.800 Ha, sedangkan Taman Nasional seluas 1.743.250 Ha dan Taman Hutan Raya seluas 617.000 Ha. Luas Cagar Alam di DIY berdasarkan Keputusan

menteri pertanian No. : 526/Kpts/Um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982 tentang penunjukan areal batu gamping Eosin seluas 1,117 Ha yang terletak di desa gamping, Sleman sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Cagar alam (seluas 0,015 Ha) dan sebagai Taman Wisata alam (seluas 1,102 Ha). Sedangkan Cagar Alam Imogiri seluas 11,400 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha. Luas Suaka Margasatwa 615,600 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha. Luas Taman Nasional di DIY seluas 1.743,250 Ha berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan No. ; 234/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi seluas \pm 6.410 Ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten provinsi Jawa tengah dan Kabupaten Sleman DIY menjadi Taman Nasional Gunung Merapi. Perhitungan luas kelompok hutan cikal bakal TNGM yang berada di wilayah DIY adalah CA dan TWA Turgo (seluas 282,25 Ha) dan hutan lindung (seluas 1.461 Ha).

Luas lahan DIY 318.580 Ha, hanya 18,40% saja yang berupa lahan sawah dan 60% berupa lahan kering/marginal. Setiap tahun lahan sawah mengalami penyempitan rata-rata 0,3 % per tahun. Pertambahan penduduk merupakan salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan, yang menuntut tersedianya sarana perumahan dan infrastruktur lainnya. Akan lebih memprihatinkan lagi jika penyempitan lahan diikuti dengan penurunan tingkat kesuburan karena penggunaan pupuk kimia yang intensif, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, juga kerugian sosial. Penurunan kesuburan tanah diketahui dari hasil monitoring kerusakan lahan akibat produksi biomassa, yaitu pada sifat berkurangnya permeabilitas tanah, meningkatnya volume (BV) dan meningkatnya Daya Hantar Listrik (DHL) pada beberapa sampel tanah.

D. Kondisi Partisipasi Masyarakat

Adanya peningkatan peranserta masyarakat dalam penanganan lingkungan yaitu munculnya kelompok-kelompok warga masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan yang peduli dalam hal penanganan sampah rumah tangga, pembuatan sumur resapan/biopori, penghijauan dan konservasi sumberdaya alam, meskipun jumlahnya masih terbatas.

E. Kondisi Pentaatan / Penegakan Hukum Lingkungan

Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan muncul setiap saat. Hal ini sebagai dampak dari kegiatan/ aktifitas manusia termasuk di dalamnya kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal, karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Di sisi lain masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan berkecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengesahkan masa mendatangi kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Bertolak dari itu dirasakan betapa pentingnya peran pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, mediator untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan LH. Untuk itu Pemerintah DIY dalam hal ini Gubernur DIY bersama Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan Kepolisian Daerah Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY melakukan koordinasi penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui suatu wadah yaitu Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

2.1.6.1.9 Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Rasio luas tanah bersertifikat di wilayah DIY menunjukkan nilai rata-rata sebesar 16,23%. Rasio luas bidang tanah bersertifikat di wilayah DIY rata-rata sebesar 7,67%. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2012, DIY mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai daerah otonom dan daerah istimewa. Sebagai daerah otonom, DIY harus mengemban dan melaksanakan urusan-urusan yang diamanahkan dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Sebagai daerah istimewa, DIY mempunyai urusan-urusan keistimewaan yang diamanahkan dan ditentukan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012. Penetapan urusan pertanahan sebagai salah satu bidang Keistimewaan dan sesuai dengan amanah Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Keistimewaan DIY di bidang pertanahan bertumpu pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Di bidang pertanahan perlu diwujudkan semangat keistimewaan atau nilai-nilai dasar sebagaimana telah diuraikan, yaitu: Tahta Untuk Rakyat, Garis

lurus simbolis Gunung Merapi-Laut Selatan, Catur Gatra Tunggal, dan Pathok Nagara. Nilai-nilai dasar yang secara eksplisit berdiri sendiri ini teranyam di bawah “filosofi payung” Hamemayu Hayuning Bawana.

Sebagai bagian dari tata ruang istimewa DIY, Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten merupakan “modal” sekaligus sebagai “model” keberlanjutan dan perubahan dimasa datang. Sebagai “modal”, tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah memberikan dasar dan bentuk nyata tatanan fisik ruang DIY yang berbasis budaya dan telah menjadi identitas ke-DIY-an. Sedangkan sebagai “model”, tanah Kasultanan dan Kadipaten telah memberikan panduan dalam hal: (i) pemanfaatan (mencakup: keberlanjutan budaya, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat), (ii) status tanah (mencakup: tanah keprabon dan tanah bukan keprabon), (iii) penggunaan tanah (mencakup: tanah hak andarbe tan keno diliyerke atau hak mengelola tidak boleh dipindahtangankan serta tanah hak anganggo turun temurun yakni hak pemanfaatan tanah oleh individu).

Dengan kedudukan Kasultanan dan Kadipaten masing-masing sebagai “badan hukum khusus” maka Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ada di seluruh wilayah DIY juga digunakan bagi keberlangsungan kelembagaan, kebudayaan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat di DIY. Dalam kaitan ini maka pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan maupun Tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.

Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun masyarakat yang menempati tanahnya.

Sasaran strategis Pemda DIY pada periode pembangunan 2013-2017 untuk urusan pertanahan adalah meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Indikator kinerja pada urusan pertanahan adalah bidang tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground, dan Tanah Kas Desa yang memiliki kepastian hukum. Pada tahun 2013 untuk indikator bidang tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground, dan Tanah Kas Desa yang memiliki kepastian hukum dari target sebesar 8.805 bidang tanah, realisasinya sebesar 8.911 bidang tanah atau persentase realisasi sebesar 101%.

Untuk tanah kas desa, masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa, sehingga perlu adanya kepastian data administrasi dalam rangka mengatur tentang kepastian hukum tanah kas desa di DIY.

Secara umum, masih banyak permohonan pemanfaatan tanah (baik SG, PAG, maupun Tanah Kas Desa) yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu pengawasan lebih mendalam dalam hal perizinan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.

2.1.6.1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Maksudnya adalah bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan yang dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan

berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sasaran strategis Pemda DIY pada periode pembangunan 2013-2017 untuk urusan kependudukan dan catatan sipil adalah meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil. Indikator kinerja pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah persentase penduduk yang ber-KTP (NIK/Nomor Induk Kependudukan).

Pada tahun 2013 untuk indikator persentase penduduk yang ber-KTP (NIK/Nomor Induk Kependudukan) dari target sebesar 86%, realisasinya sebesar 95% atau persentase realisasi terhadap target sebesar 110%. Sebagian besar Wajib KTP yang belum perekaman tersebut diduga telah pindah dari DIY, merekam di tempat lain atau meninggal tetapi belum di-update.

Sementara itu untuk dokumen administrasi kependudukan yang lain, kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah. Berdasarkan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) tahun 2013, jumlah penduduk DIY yang memiliki akta kelahiran kurang dari 40% dari total penduduk DIY, pemilik akta perkawinan masih di bawah 50% dari total penduduk DIY, dan kepemilikan akta kematian tidak lebih dari 50% dari total penduduk yang meninggal dalam satu tahun. Penyebab dari masalah ini antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

2.1.6.1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan peran perempuan untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses, kontrol, manfaat terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur dan meningkatkan kualitas diri. Tujuan dari pemberdayaan perempuan antara lain : mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

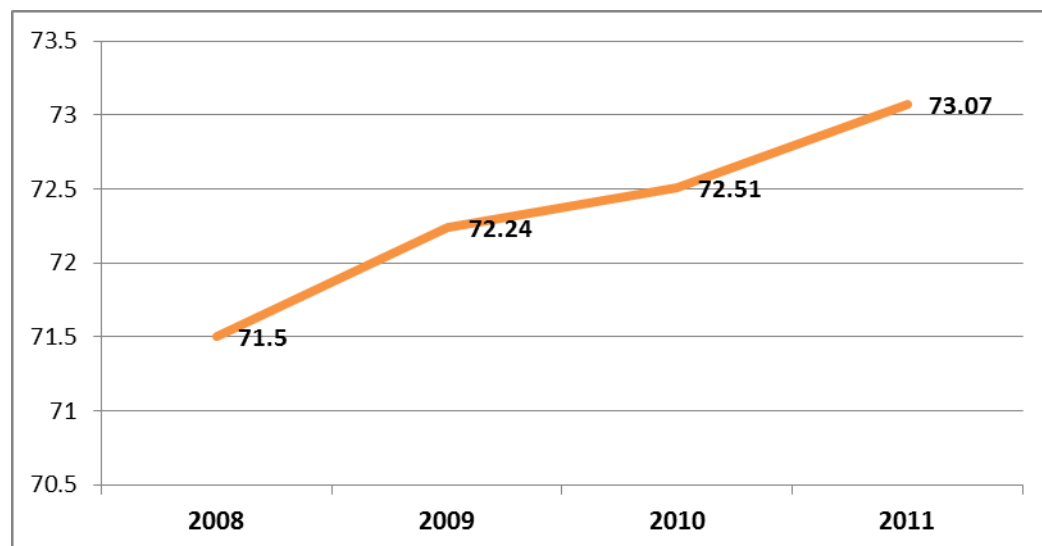
Sedangkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya. (UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak).

RKPD Tahun 2015

Beberapa indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain : Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak, dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.



Sumber : BPS, Kementerian PP dan PA

Gambar 2.36 Perkembangan IPG DIY, 2008-2011

Capaian IPG dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2011, capaian IPG DIY sebesar 73,07. Berdasarkan sebaran kabupaten/kota di DIY capaian IPG tahun 2011 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 77,92 dan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2.78 Capaian IPG Menurut Kabupaten/Kota DIY, 2008-2011

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
DIY	71,50	72,24	72,51	73,07	74,11
Kota Yogyakarta	77,05	77,10	77,56	77,92	78,71

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Kab. Bantul	71,20	71,20	71,33	71,71	72,69
Kab. Kulon Progo	66,13	66,56	67,04	67,85	68,41
Kab. Gunungkidul	64,69	64,77	65,42	66,04	66,62
Kab. Sleman	73,73	73,94	74,17	74,75	75,76

Sumber : BPS, Kementerian PP & PA

Tabel 2.79 Capaian Menurut Komponen, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota DIY, 2010-2011

Provinsi/ Kabupaten	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Sumbangan Pendapatan		IPG		
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Persen)				
	L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011	2012
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
D I YOGYAKARTA	71,37	75,16	96,28	87,09	9,78	8,67	60,82	39,18	72,51	73,07	74,11
Kulon Progo	72,53	76,24	96,98	86,50	9,15	8,07	68,03	31,97	67,04	67,85	68,41
Bantul	69,42	73,32	96,39	86,25	9,35	8,36	62,06	37,94	71,33	71,71	72,69
Gunung Kidul	69,07	72,99	92,22	78,63	7,84	6,32	61,60	38,40	65,42	66,04	66,62
Sleman	73,21	76,86	97,90	89,76	11,18	9,97	62,21	37,79	74,17	74,75	75,76
Kota Yogyakarta	71,59	75,37	99,78	96,85	11,96	11,30	57,92	42,08	77,56	77,92	78,71

Sumber : BPS, Kementerian PP & PA

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG DIY merupakan yang terbaik secara nasional. Hal ini menandakan peran serta perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan lebih baik dibandingkan provinsi lain. Sedangkan capaian IDG DIY 2010 sampai 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.80 Capaian IDG DIY, 2010-2011

Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	(%)	(%)	(%)	2010	2011
D I YOGYAKARTA	21,82	44,54	39,18	77,70	77,84
Kulon Progo	12,50	44,93	31,97	61,18	61,15
Bantul	15,56	46,53	37,94	67,85	68,46
Gunung Kidul	13,33	44,97	38,40	59,36	62,22
Sleman	18,00	44,02	37,79	70,74	70,52
Kota Yogyakarta	15,00	42,74	42,08	69,85	70,00

Sumber : BPS Provinsi DIY & Kementerian PP & PA, diolah

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), seperti halnya dengan IPG, dihitung dengan disparitas, atau perbedaan ketimpangan dengan laki-laki. Untuk DIY, besarnya masing-masing elemen dasar untuk menghitung kesetaraan pemberdayaan gender dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

b. Partisipasi Perempuan di Legislatif

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik diatur dalam Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta Undang-Undang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Untuk DIY, perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga perwakilan rakyat masih dibawah kuota undang-undang, yaitu 21,82%. Hal ini berarti masih diperlukan kebijakan dan strategi dalam penyadaran dan pembelajaran politik bagi perempuan di DIY dengan harapan akan mendorong peningkatan kepesertaan perempuan di DIY dalam politik baik secara kualitas dan kuantitas.

Tabel 2.81 Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	DPRD	2012			
		L	P	L+P	%
1	Kota Yogyakarta	30	6	36	16,67
2	Kabupaten Bantul	39	6	45	13,33
3	Kabupaten Kulon Progo	36	4	40	10,00
4	Kabupaten Sleman	30	6	36	16,67
5	Kabupaten Gunungkidul	39	6	45	13,33
6	DPRD DIY	46	13	59	22,03
	Jumlah	220	41	261	15,71

Sumber : Data terpilah gender dan anak diolah

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di DIY baik DPRD DIY maupun DPRD kabupaten/kota masih belum mencapai 30%. Beberapa faktor yang menjadikan masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif selain tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang rendah, masih ada keengganan perempuan untuk

tampil dalam bidang politik dikarenakan adanya anggapan bahwa ranah politik adalah ranah laki-laki, dan tingkat kepercayaan diri yang masih rendah perempuan untuk berpolitik. Diperlukan *affirmatif policy* dalam mengadvokasi perempuan untuk lebih berperan dalam politik.

c. Partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah

Representasi perempuan dalam lembaga pengambil keputusan dapat juga dilihat dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Dari 1.669.172 pekerja perempuan di DIY tahun 2012, 30.211 bekerja di lembaga pemerintahan. Rasio pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan pekerja perempuan di DIY masih rendah sebesar 1,8. Hal ini bukan berarti perempuan mendapatkan akses yang lebih kecil dibandingkan laki-laki lembaga pemerintahan. Semua penduduk memiliki akses yang sama untuk bekerja di lembaga pemerintah sesuai formasi dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Formasi yang dibutuhkan memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang bekerja.

Tabel 2.82 Rasio Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2012

No	Uraian	2011	2012
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	24	28
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	234	245
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	1.213	1269
4	Pekerja perempuan di pemerintah	39.735	30.211
5	Jumlah pekerja perempuan	1.593.084	1.669.172
6	Rasio pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2,49	1,81

Sumber : Sakernas dan BPPM, diolah

Berdasarkan struktur jabatan pemerintahan, rasio perempuan yang menempati jabatan struktural masih rendah. Semakin tinggi jabatan struktural yang ada, semakin rendah perempuan yang menempati jabatan tersebut.

Tabel 2.83 Rasio Perempuan Pada Jabatan Struktural Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota/DIY, 2012

No	Kab/Kota	Eselon I		Eselon II			Eselon III			Eselon IV		
		L	P	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio
1	Kota Yogyakarta			20	5	25,00	89	45	50,56	369	319	86,45
2	Kab Bantul			30	3	10,00	124	40	32,26	304	221	72,70
3	Kab. Kulon Progo			20	6	30,00	105	30	28,57	281	145	51,60
4	Kab. Gunungkidul			17	2	11,76	144	21	14,58	362	135	37,29
5	Kab. Sleman			22	6	27,27	98	51	52,04	343	229	66,76

No	Kab/Kota	Eselon I		Eselon II			Eselon III			Eselon IV		
		L	P	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio
6	Provinsi	1	-	30	6	20,00	140	58	41,43	323	220	68,11
Jumlah		1	-	139	28	20,14	700	245	35,00	1.982	1.269	64,03

Sumber : BPPM DIY, diolah

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.84 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di DIY, 2009-2012

Kabupaten/Kota	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			
	Agust-09	Agust-10	Agust-11	Agust-12
Angkatan Kerja Perempuan	864.071	848.745	830.449	867.492
Perempuan Usia Kerja	1.435.659	1.383.524	1.393.149	1.404.126
Persentase	60,19	61,35	59,61	61,78

Sumber : Pusdatinaker Kemenakertrans, diolah

e. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Menunjukkan upaya pemerintah menangani pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap kasus yang diajukan ke unit-unit pelayanan tindak kekerasan. Tabel berikut menunjukkan persentase jumlah pengaduan yang ditangani di unit-unit pelayanan pengaduan di DIY tahun 2010-2011 :

Tabel 2.85 Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY, 2010-2012

Uraian	2010			2011			2012		
	Perempuan	Anak	Total	Perempuan	Anak	Total	Perempuan	Anak	Total
Jumlah unit pelayanan pengaduan	25	25	25	27	27	27	27	27	27
Jumlah Pengaduan yang tertangani	873	329	1305	596	310	999	795	301	1.096
Jumlah Pengaduan	929	360	1305	647	343	999	795	301	1.096

Uraian	2010			2011			2012		
	Perem-puan	Anak	Total	Perem-puan	Anak	Total	Perem-puan	Anak	Total
Persentase (%)	94	91	100	92	90	100	100	100	100

Sumber : FPKK DIY

Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari 647 menjadi 795 atau 18,61%, Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh adanya UU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak mengalami penurunan dari 310 menjadi 301 atau 2,99%. Namun demikian perlu diambil penanganan lebih lanjut karena amanah dari UU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

f. Pernikahan di Bawah Umur

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun fenomena yang terjadi beberapa tahun ini adalah banyaknya permohonan nikah dari masyarakat dengan usia perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Oleh sebab itu, Kantor Kementerian Agama melalui Kantor Urusan agama (KUA) harus mengeluarkan surat dispensasi nikah.

Bila dilihat lebih jauh pada faktor penyebabnya, diketahui bahwa adanya budaya menikah muda, *married by accident*, atau karena faktor ekonomi. Bila fenomena ini tetap terjadi tanpa ada campur tangan kebijakan pemerintah, dapat dibayangkan akibat yang akan terjadi. Mulai dari ledakan penduduk, penurunan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kriminalitas sampai timbulnya masalah ketahanan pangan.

Tabel 2.86 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY

No	Wilayah	2009		2010		2011		2012	
		<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun
		P	L	P	L	P	L	P	L
1	Kota Yogyakarta	15	18	24	27	14	32	56	52
2	Kabupaten Bantul	31	56	93	52	42	105	27	86
3	Kab. Kulon Progo	21	33	19	44	30	26	20	27
4	Kab. Gunungkidul	19	19	42	36	59	68	51	63
5	Kab. Sleman	189	17	22	28	25	46	30	79

No	Wilayah	2009		2010		2011		2012	
		<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun	<16 tahun	< 19 tahun
		P	L	P	L	P	L	P	L
	DIY	275	143	200	187	170	277	184	307

Sumber : Data pilah gender dan anak

2.1.6.1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa diperlukan kebijakan afirmatif dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

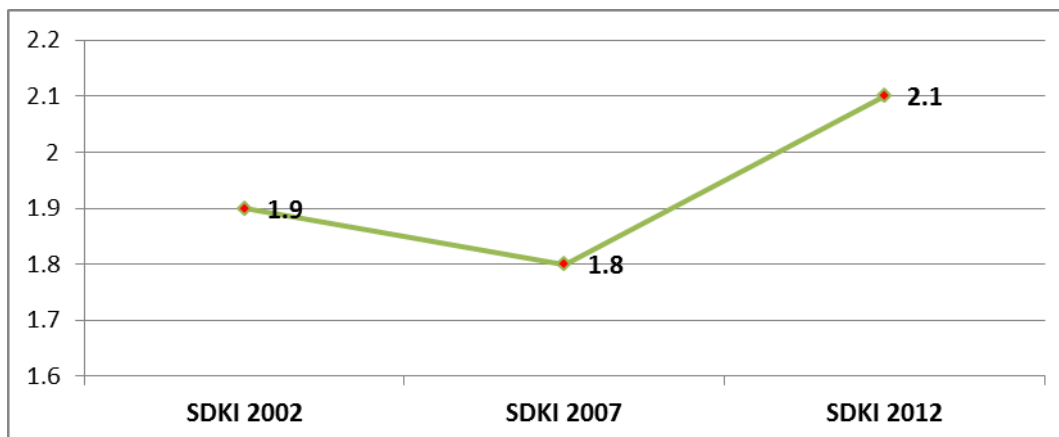
Pembangunan kependudukan erat kaitanya dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah peningkatan jumlah Total Fertility Rate (TFR), masih tingginya unmet need, masalah kesehatan reproduksi, perkembangan jumlah penduduk yang melebihi proyeksi, kepesertaan KB pria masih rendah.

a. *Total Fertility Rate (TFR)*

TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun.

Perkembangan TFR DIY berdasarkan SDKI 2012 sebesar 2,1 naik dari SDKI 2007 yang sebesar 1,8. Peningkatan TFR menjadi 2,1 ini perlu mendapatkan perhatian karena peningkatan jumlah anak dalam sebuah keluarga akan menyebabkan permasalahan kependudukan di masa datang terkait kualitas penduduk, permasalahan lahan, permasalahan pangan dan sebagainya. Walaupun Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki total *fertility rate* (TFR) terendah di Indonesia, tetapi melihat tren yang ada terjadi lonjakan dari 1,8 (SDKI 2007) menjadi 2,1 (SDKI 2012). Beberapa faktor yang mempengaruhi TFR antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. Salah satu sebabnya adalah, masih ada anggapan di tengah

masyarakat bahwa mempunyai dua anak terlalu sedikit. Berikut adalah perkembangan TFR DIY :



Sumber : BPS Provinsi DIY

Gambar 2.37 Perkembangan TFR DIY

b. Rasio Akseptor KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB DIY pada 2013 tercatat sebanyak 441.981 peserta meningkat dari tahun 2012 yang sebesar 438.788 peserta dengan rasio terhadap jumlah pasangan usia subur di tahun 2013 sebesar 79,87.

Tabel 2.87 Rasio Akseptor KB

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Peserta KB	432.024	430.231	432.989	438.788	441.981
Jumlah Pasangan Usia Subur	549.313	544.057	549.894	552.422	553.395
Rasio Jumlah	78,65	79,08	78,74	79,43	79,87

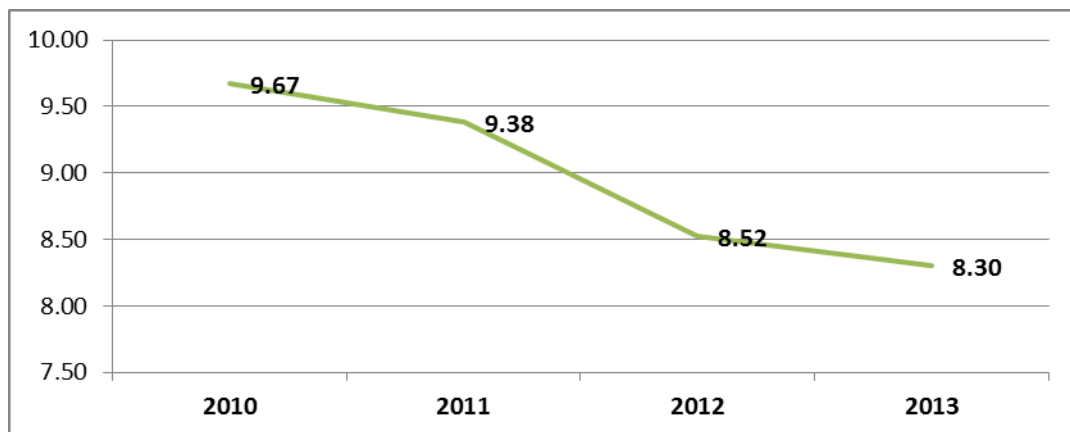
Sumber : BKKBN Perwakilan DIY, diolah

c. *Unmet Need*

Indikator *unmet need* persentase wanita usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB. Beberapa alasan yang menyebabkan wanita usia subur tidak ingin mempunyai anak lagi tetapi tidak melakukan KB antara lain : motivasi yang lemah dalam mengatur fertilitas, adanya kekhawatiran perempuan usia subur terhadap kegagalan kontrasepsi, dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi.

Perkembangan *Unmet Need* DIY dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 9,67 menjadi 8,30 di tahun 2013. Berdasarkan data Riskesdas 2010, capaian rata-rata nasional *unmet need* adalah sebesar 14% yang berarti capaian DIY sudah lebih baik dari capaian nasional.

Capaian *Unmet Need* DIY yang semakin turun menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan akses terhadap pelayanan kontrasepsi semakin mudah.



Sumber : BKKBN Perwakilan DIY

Gambar 2.38 Perkembangan *Unmet Need* DIY, 2010-2013

d. Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Keluarga di kategorisasikan kedalam 5 tahapan keluarga, yaitu keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Tabel 2.88 Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY, 2009-2011

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Tahun					
		2009		2010		2011	
		Jumlah KK	Persentase	Jumlah KK	Persentase	Jumlah KK	Persentase
1.	Pra S	174.534	18,35	187.277	20,15	225.823	24,30
2.	KS I	214.083	22,51	208.367	22,42	200.008	21,52
3.	KS II	222.674	23,41	198.237	21,33	146.038	15,72
4.	KS III	281.481	29,60	281.909	30,33	302.792	32,59
5.	KS III Plus	58.230	6,12	53.665	5,77	54.575	5,87
	Jumlah KK	951.002		929.455		929.236	

Sumber : BKKBN DIY, diolah

Tabel Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa jumlah KK Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III.

e. Lembaga Bina Keluarga

Lembaga Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program Bina Keluarga merupakan suatu wadah yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran keluarga (Bapak/Ibu dan anggota keluarga lain) untuk membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua perlu ditingkatkan. Keluarga adalah garis utama pertahanan masyarakat terhadap pertumbuhan masalah penduduk lansia. BKB, BKR, BKL di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami pertumbuhan.

Tabel 2.89 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2012

Kabupaten/ Kota	BKB				BKR				BKL			
	2011		2012		2011		2012		2011		2012	
	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)
Kota Yogyakarta	95	28	102	28	35	13	66	14	48	14	80	80
Bantul	260	35	310	55	52	19	79	23	24	19	57	23
Kulonprogo	387	24	387	12	92	11	91	12	89	13	88	12
Gunung Kidul	459	39	446	23	81	15	84	18	114	19	119	106

Kabupaten/ Kota	BKB				BKR				BKL			
Tahun	2011		2012		2011		2012		2011		2012	
	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKB	Jml BKB P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKR	Jml BKR P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)	Jml BKL	Jml BKL P *)
Sleman	150	37	204	54	90	17	143	34	142	18	171	27
Jumlah	1351	163	1449	172	350	75	463	101	417	83	515	248

Sumber Data : BPPM DIY diolah

*) P= Percontohan.

2.1.6.1.13 Urusan Sosial

1. Panti Sosial

Untuk mewujudkan masyarakat DIY yang sejahtera, Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Sosial melakukan berbagai program berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan harkat, martabat serta kualitas hidup manusia. Selain itu mencegah dan mengendalikan serta mengatasi masalah sosial, meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan sosial masyarakat, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial serta mengembangkan sistem dan sarana serta prasarana Unit Kesejahteraan Sosial.

Panti-panti sosial yang dikelola Dinas Sosial merupakan implementasi nyata dari hal di atas. Terdiri dari panti untuk balita, anak, remaja dan usia lanjut terlantar, panti anak jalanan, panti penyandang cacat, panti untuk gelandangan dan pengemis, panti bagi mantan wanita tuna susila, dan panti bagi mantan pengguna narkoba dikelola secara serius untuk mengatasi permasalahan sosial di DIY.

Layanan yang diberikan di panti-panti sosial ini meliputi perawatan dan asrama, kesehatan dan gizi, pembinaan dan mental, pendidikan, kesejahteraan sosial, bimbingan dan latihan keterampilan, penampungan sementara, identifikasi dan motivasi hingga pembinaan awal rujukan. Berikut ini panti sosial milik pemerintah Daerah DIY.

1. Panti Sosial Asuhan Anak
2. Panti Sosial Bina Remaja
3. Panti Sosial Tresna Wreda
4. Panti Sosial Pamardi Putra
5. Panti Sosial Karya Wanita
6. Panti Sosial Bina Karya
7. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)

Lebih detail tentang keberadaan panti sosial milik pemerintah dan Swasta di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.90 Jumlah Panti Sosial Milik Pemerintah dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2013

NO	KABUPA TENKOTA	ANAK TERLANTAR			LANJUT USIA			PENYANDANG CACAT			TUNA SUSILA			NAPZA		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	KOTA YOGYAKARTA	10	10	9	3	3	2	3	3	3	5	5				
2	GUNUNGKIDUL	5	5	5				8	8	8						
3	KULONPROGO	15	15	17	1	1	1	2	2	1				1	1	1
4	BANTUL	14	14	15	2	2	0	3	3	4	1	1	1			
5	SLEMAN	21	21	26	1	1	0	9	9	10	3	3	2	4	5	4
	JUMLAH	65	65	72	7	7	3	25	25	26	9	9	3	5	6	5

Sumber : Dinas Sosial DIY

Tabel tersebut menunjukkan keberadaan panti sosial yang ada di masing-masing kabupaten/kota di DIY dan berdasarkan layanan yang dilakukan. Keberadaan panti tersebut menunjukkan komitmen terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial baik oleh pemerintah maupun kelompok sosial kemasyarakatan/swasta. Keberadaan panti anak terlantar dan penyandang cacat mengalami peningkatan, sedangkan panti untuk lanjut usia, tuna susila dan korban NAPZA mengalami penurunan.

2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang arena satu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Upaya-upaya dalam penanganan PMKS telah diberikan melalui berbagai bentuk. Namun demikian tentunya tidak serta-merta bisa menjangkau kepada seluruh PMKS karena berbagai keterbatasan. Tabel di bawah ini menunjukkan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap PMKS di DIY. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial memang masih terbatas.

Tabel 2.91 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2009-2013

Tahun	PMKS yang seharusnya menerima bantuan	PMKS yang diberikan bantuan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2009	416.858	13.192	3,16%
2010	403.666	8.023	1,98%
2011	377.819	9.304	2,46%
2012	497.080	41.646	8,37%
2013 *)	497.080	7.349	1,47%

Keterangan : *) data sementara

Sumber : Data Pembangunan Daerah DIY

Penanganan PMKS merupakan masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan upaya-upaya penanganan terus-menerus dan terpadu. Masalah ini tidak berdiri sendiri, dibutuhkan strategi yang sistematis dan terarah untuk kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Tabel 2.92 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2012-2013

No	Jenis PMKS	Tahun		Jumlah Naik/Turun	Kondisi
		2012	2013		
1	Anak Balita Terlantar	2.569	2.443	-126	Menurun
2	Anak Terlantar	26.165	26.149	-16	Menurun
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	302	119	-183	Menurun
4	Anak Jalanan	497	212	-285	Menurun
5	Anak dengan Kedisabilitas	3.910	3.858	-52	Menurun
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	919	796	-123	Menurun
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	275	73	-202	Menurun
8	Lanjut Usia Terlantar	37.199	36.698	-501	Menurun
9	Penyandang Disabilitas	29.543	28.158	-1385	Menurun
10	Tuna Susila	166	158	-8	Menurun
11	Gelandangan	161	121	-40	Menurun
12	Pengemis	199	216	17	Meningkat
13	Pemulung	116	126	10	Meningkat
14	Kelompok Minoritas	733	216	-517	Menurun
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	3.658	4.168	510	Meningkat
16	Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	1.408	1.797	389	Meningkat
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1.627	1.470	-157	Menurun
18	Korban Trafficking	9	5	-4	Menurun
19	Korban Tindak Kekerasan	4.325	4.070	-255	Menurun

No	Jenis PMKS	Tahun		Jumlah Naik/Turun	Kondisi
		2012	2013		
20	Pekerja Migran Bermasalah	760	292	-468	Menurun
21	Korban Bencana Alam	3.749	1.655	-2.094	Menurun
22	Korban Bencana Sosial	16	158	142	Meningkat
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.337	12.057	-280	Menurun
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3.356	3.395	39	Meningkat
25	Keluarga Fakir Miskin	361.081 (PPLS 2011)	361.081 (PPLS 2011)	0	Tetap (karena belum ada updating data PPLS)

Sumber : Dinas Sosial DIY (Laporan Hasil Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 2013)

Dari data tersebut terdapat 18 jenis PMKS mengalami penurunan serta 6 jenis PMKS mengalami kenaikan jumlah populasinya baik secara signifikan maupun tidak. Penurunan jumlah pada beberapa jenis PMKS secara langsung atau tidak langsung disebabkan berhasilnya intervensi melalui pelayanan sosial oleh berbagai pihak, menurunnya kejadian bencana alam serta meningkatnya keberdayaan para PMKS. Sedangkan meningkatnya 6 jenis PMKS disebabkan dari berbagai hal seperti pendatang musiman yang kemudian menetap di DIY menjadi PMKS seperti pengemis dan pemulung, meningkatnya penularan kasus HIV/AIDS akibat perilaku seks beresiko dan penggunaan alat suntik tidak steril, serta permasalahan keluarga akibat problem ekonomi.

3. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah sumber dan potensi yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan sebagai usaha kesejahteraan sosial. PSKS berperan dalam penanganan dan pencegahan berbagai permasalahan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu PSKS juga berperan membantu pelaksanaan program-program pemerintah.

Tabel 2.93 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY, 2008-2013

No	Jenis PSKS	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pekerja Sosial Profesional/ Pekerja sosial fungsional	n/a	n/a	n/a	n/a	41	37
2	Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM	213	78	78	134	121	4572

RKPD Tahun 2015

No	Jenis PSKS	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	Taruna Siaga Bencana	n/a	n/a	n/a	n/a	873	505
4	LKS / Orsos	53	10	10	88	83	354
5	Karang Taruna	63	20	10	102	85	438
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	n/a	n/a	n/a	11	12	15
7	Keluarga Pioner	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	7	5	n/a	23	25	87
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS),	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Penyuluh Sosial	n/a	n/a	n/a	n/a	7	7
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),	n/a	n/a	n/a	n/a	78	78
12	Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	n/a	130	43	135	100	45

Keterangan : n/a (belum ada pendataan terhadap jenis PSKS tersebut)

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2013

Tabel di atas menunjukkan secara umum kuantitas PSKS mengalami peningkatan. Peningkatan PSKS disebabkan peran kelompok masyarakat semakin besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping itu juga dipengaruhi peran pemerintah dalam pembinaan PSKS semakin optimal.

Untuk meningkatkan kinerja PSKS, Dinas Sosial melakukan berbagai upaya seperti pengembangan kapasitas melalui pelatihan, pemberian stimulan kelembagaan, manajemen organisasi, penguatan jaringan kemitraan dunia usaha. Dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas PSKS di DIY diharapkan mampu untuk membantu mengatasi problem sosial dan membantu peningkatan kesejahteraan di DIY.

2.1.6.1.14 Urusan Ketenagakerjaan

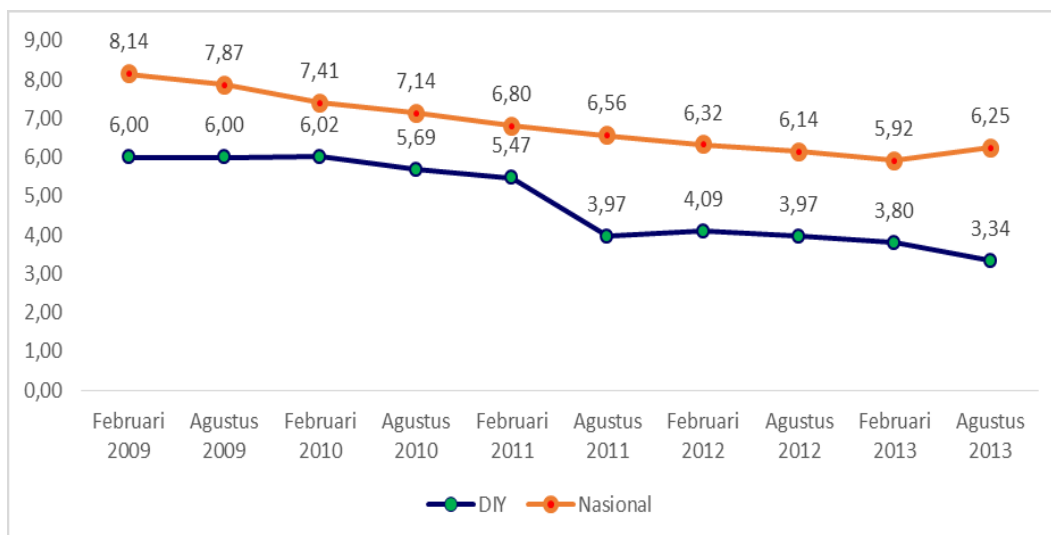
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki

pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Di D.I. Yogyakarta TPT laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Pada Agustus 2013, TPT masing-masing sebesar 3,69 persen untuk laki-laki dan 2,91 persen untuk perempuan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan mencapai 3,34 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dapat digunakan untuk melihat perkembangan angka pengangguran. Fluktuasi TPT di DIY dari tahun 2009 ke 2013 berada dalam kisaran 3-6%, kecenderungan mengalami penurunan. Pada Agustus 2009 TPT sekitar 6,00%, pada Agustus 2010 sebesar 5,69%, dan pada Agustus 2011 dan 2012 sebesar 3,97%. Dan pada Agustus 2013 sebesar 3,34% Angka ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional 6,25%.

Tingkat pengangguran terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, antara 15-24. TPT usia muda pada Februari 2013 sekitar 13,5 persen, atau lebih dari 3 kali lipat TPT semua umur (DIY). Pada Februari 2013 pada kelompok umur 15-99, 35-39 dan 40-44 tingkat pengangguran terbuka perempuan lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka laki-laki, sedangkan pada kelompok umur lainnya lebih tinggi tingkat pengangguran terbuka laki-laki.



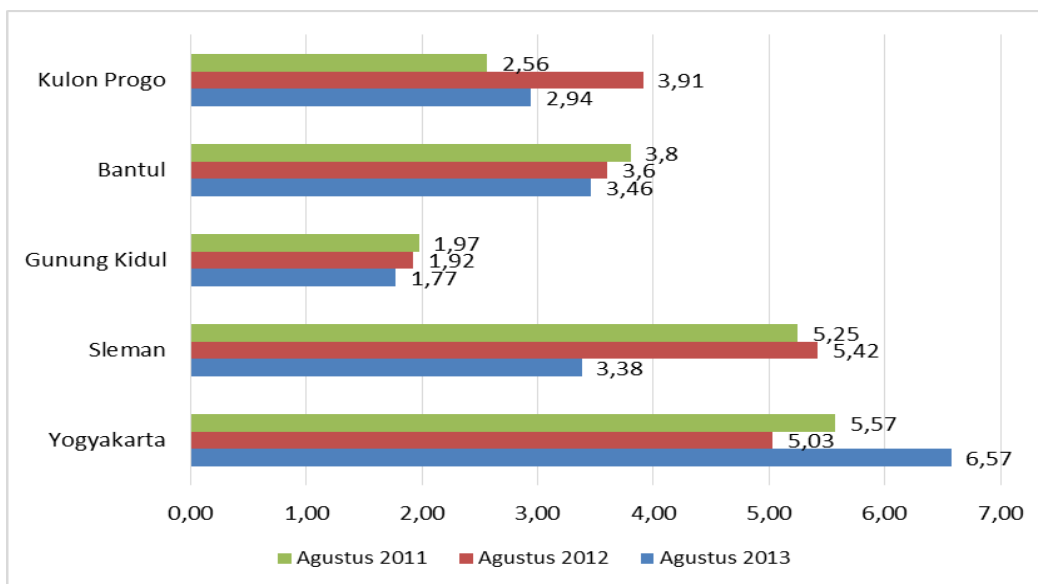
Sumber :BRS November 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional, 2009-2013 (%)

Pada Agustus 2013 TPT di daerah perkotaan DIY sekitar 4,04%, sementara di perdesaan hanya 2,12%. TPT di perkotaan selalu lebih tinggi dibanding di perdesaan di DIY. Tingginya TPT di perkotaan dipengaruhi oleh beragamnya

lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sementara di perdesaan umumnya didominasi pertanian dengan daya tampung yang terbatas. Angkatan kerja baru yang mencari pekerjaan pindah atau mondok di perkotaan, sehingga pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan. Sementara itu, penduduk daerah perdesaan biasanya tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan, sehingga mereka akan melakukan kegiatan apa saja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Penganggur yang tersisa di daerah perdesaan sebagian di antaranya memang mencari pekerjaan di perdesaan juga, dan sebagian lagi tetap tinggal di desanya sambil mencari pekerjaan dengan cara melaju (nglajo/commute/ulang-alik/ pulang-pergi) ke perkotaan.

TPT di kabupaten/kota mengalami variasi perkembangan pada periode Agustus 2012 ke Agustus 2013. Pola TPT antar kabupaten/kota juga terdapat perubahan, dimana nilai TPT di Kota Yogyakarta menjadi yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY (6,57%) disusul Kabupaten Bantul (3,46%), Kabupaten Sleman (3,38%) dan Kabupaten Kulonprogo (2,94%). TPT terendah terjadi di Kabupaten Gunung Kidul (1,77%).



Sumber :BRS November 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.40 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY (%) 2011-2013

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja untuk memproduksi barang dan jasa, semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Pada Agustus 2013 TPAK D.I. Yogyakarta 68,89 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas 69 orang adalah angkatan kerja.

TPAK berdasarkan kelompok umur secara umum juga mengikuti pola umum struktur tenaga kerja, yaitu: rendah pada usia 15-19 tahun, kemudian meningkat pada usia lebih tua, mencapai puncak pada usia antara 40-49 tahun, dan menurun kembali setelah melewati usia 55 tahun. TPAK yang rendah pada kelompok usia 15-19 tahun mencerminkan tingginya penduduk pada kelompok ini yang melakukan kegiatan utama bersekolah, sehingga mereka tidak tergolong dalam kelompok angkatan kerja.

TPAK perempuan pada hampir semua kelompok umur baik di pedesaan maupun perkotaan cenderung lebih rendah daripada TPAK laki-laki,. Pola ini menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja relatif tinggi pada tingkat pendidikan SD dan perguruan tinggi. Pola umum yang dapat dipetik yaitu pada pendidikan sangat rendah apapun pekerjaan diterima, sehingga TPAK-nya relatif tinggi, sementara pada kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SLTP/SLA mulai memilih pekerjaan sehingga TPAK-nya lebih rendah. Pada tingkat pendidikan yang relatif tinggi (perguruan tinggi) TPAK-nya tampak tinggi, meskipun pekerjaan yang dilakukan belum tentu sesuai dengan tingkat pendidikannya.

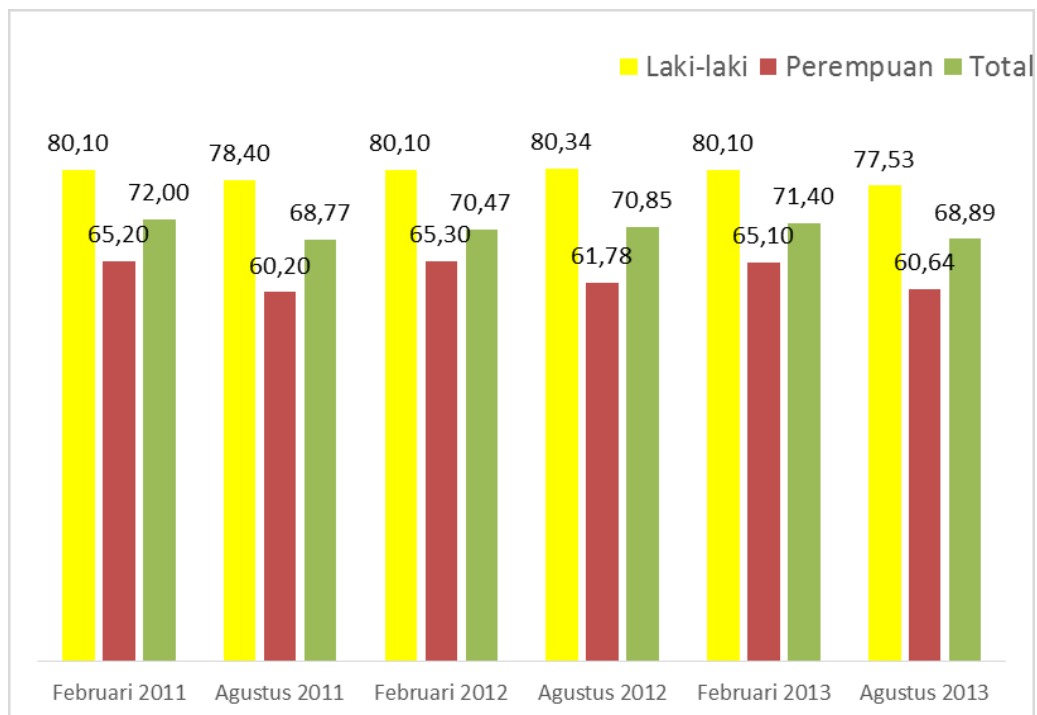
Indikasi tersebut terlihat pada mekanisme push down, misalnya pada penerimaan PNS terdapat banyak pelamar yang menggunakan ijazah pada tingkat pendidikan yang lebih rendah dari yang dimilikinya. Akibatnya lulusan SLTA menjadi tersisih. Pola ini sepenuhnya diikuti oleh angkatan kerja perempuan maupun laki-laki.

Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut pendidikan di perkotaan maupun di pedesaan juga menunjukkan pola yang hampir sama, yaitu menonjol pada pendidikan rendah dan pendidikan tinggi, meskipun di pedesaan relatif menonjol di tingkat pendidikan rendah. Di daerah pedesaan, tingkat partisipasi angkatan kerja mereka yang mempunyai tingkat pendidikan SD 77,52 persen. Lain halnya TPAK mereka yang lulusan universitas sangat menonjol baik di perkotaan maupun di pedesaan.

RKPD Tahun 2015

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara penduduk tergolong angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK DIY pada Agustus 2013 sekitar 68,89%, turun sekitar 1,96 poin bila dibandingkan keadaan Agustus 2012 (70,85%) atau turun sekitar 0,38 poin dibanding Februari 2013 (69,27%).

Pola perkembangan TPAK pada periode 2010-2013 juga menunjukkan pola yang menarik. TPAK tidak banyak berubah tetapi terdapat kecenderungan pada bulan Agustus TPAK lebih rendah bila dibandingkan kondisi bulan Februari, meskipun Agustus 2012 dan Agustus 2013 yang perubahannya tidak begitu tampak dibandingkan dibanding Februari 2012 dan Februari 2013. Sementara bila TPAK dibedakan menurut jenis kelamin terdapat kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. TPAK laki-laki pada Agustus 2013 mencapai sekitar 77,53%, sementara TPAK perempuan sebesar 60,64%.

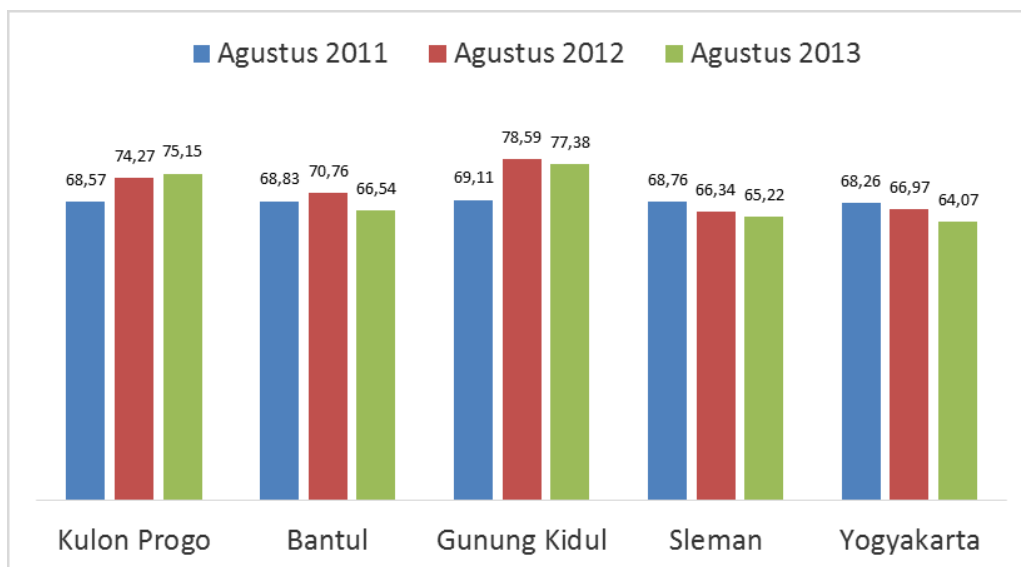


Sumber: BRS November 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.41 Perkembangan TPAK di DIY

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, hampir semua kabupaten cenderung mengalami penurunan TPAK pada Agustus 2013, hanya Kabupaten Kulon Progo yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,88 poin. TPAK tertinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul 77,38 persen, kemudian Kabupaten Kulon Progo 75,15 persen,

Kabupaten Bantul 66,54 persen, Kabupaten Sleman 65,22 dan terendah Kota Yogyakarta 64,07 persen.



Sumber :BRS November 2013, BPS Provinsi DIY

Gambar 2.42 TPAC Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011-2013 (Agustus)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama kurun waktu 2009-2013 menunjukkan angka yang dinamis. Data pada tahun 2009 menunjukkan TPAC sebesar 70,23% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 69,76%, angka ini menurun kembali di tahun 2011 menjadi 68,77%, pada tahun 2012 meningkat menjadi 70,85% dan pada tahun 2013 TPAC mengalami penurunan menjadi 68,89%.

2.1.6.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan UKM mendapatkan perhatian dalam pembangunan DIY mengingat perannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan di DIY. Peningkatan peran Koperasi dalam perekonomian DY ditunjukan dengan peningkatan data keragaan koperasi selama 5 (lima tahun) terakhir baik dari aspek jumlah koperasi aktif maupun volume usaha. Sementara itu, perkembangan unit usaha di DIY yang didominasi skala kecil dan menengah menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.

Perkembangan jumlah koperasi dan UKM di DIY dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2013, jumlah koperasi aktif sebanyak 2.176 koperasi aktif, mengalami kenaikan sebesar 4% dibanding tahun 2012. Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 79,74% dari total koperasi di DIY.

RKPD Tahun 2015

Sementara itu, dilihat dari volume usaha, terlihat adanya pertumbuhan volume usaha dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 pertumbuhan volume usaha seluruh koperasi di DIY sebesar 0,7 % dari Rp. 2.304.127 Juta menjadi Rp. 2.320.617 Juta

Tabel 2.94 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2008-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Koperasi Aktif	1.518	1.926	1.981	2.090	2.176
Koperasi Tidak aktif	721	484	485	427	499
Koperasi Beku					58
Modal Sendiri (Rp Juta)	437.233	692.622	929.556	1.015.396	1.440.948
Modal Luar (Rp Juta)	474.820	415.550	513.936	572.156	572.159
Volume Usaha (Rp Juta)	1.695.971	2.296.146	2.304.123	2.304.127	2.320.617

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014

Jumlah UMKM pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan sebesar 1.215 UKM atau sebesar 0.6 % dibanding dengan tahun 2012. Dilihat dari jenis usaha, UKM di DIY didominasi oleh usaha Perdagangan dan Industri Pertanian. Komposisi ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2013, jenis usaha perdagangan menguasai sebesar 28,56% dari total UKM di DIY dan diikuti oleh industri pertanian sebesar 27,18%.

Tabel 2.95 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2009-2013

No	Jenis Usaha Menurut Sektor	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Aneka Usaha	34.009	39.036	43.471	43.976	44.452
2	Perdagangan	48.292	52.420	57.858	58.363	58.601
3	Industri Pertanian	46.017	49.554	54.991	55.496	55.767
4	Industri Non Pertanian	36.529	41.222	45.655	46.160	46.390
	Jumlah	164.847	182.232	201.975	203.995	205.210

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014

Sebagai bentuk penumbuhan sektor UKM, telah dilakukan program pengembangan kewirausahaan. Hingga tahun 2013 telah dilakukan pembinaan terhadap 81.407 wirausaha baru. Berbagai Kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan pelatihan teknis penunjang telah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya.

Tabel 2.96 Perkembangan Wirausaha Baru Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013

No.	Kab / Kota	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Kota Yogyakarta	4.552	4.561	4.590	4.598	4.643	22.946
2	Sleman	2.534	2.541	2.587	2.592	2.608	12.862
3	Bantul	4.433	4.439	4.463	4.468	4.479	22.282
4	Kulon Progo	1.550	1.552	1.565	1.571	1.578	7.816
5	Gunung Kidul	3.090	3.096	3.099	3.105	3.113	15.501
	Jumlah	16.159	16.189	16.304	16.334	16.421	81.407

Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014

2.1.6.1.16 Urusan Penanaman Modal

Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dibutuhkan investasi di DIY. Keterlibatan pelaku usaha sangat besar dalam upaya penumbuhan investasi. Meskipun DIY terbuka terhadap investasi baik dari dalam maupun luar negeri, tetap investasi diutamakan untuk industri-industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif serta industri yang ramah lingkungan. Sehingga dalam perkembangannya, investasi yang tumbuh di DIY sesuai dengan daya dukung lingkungan.

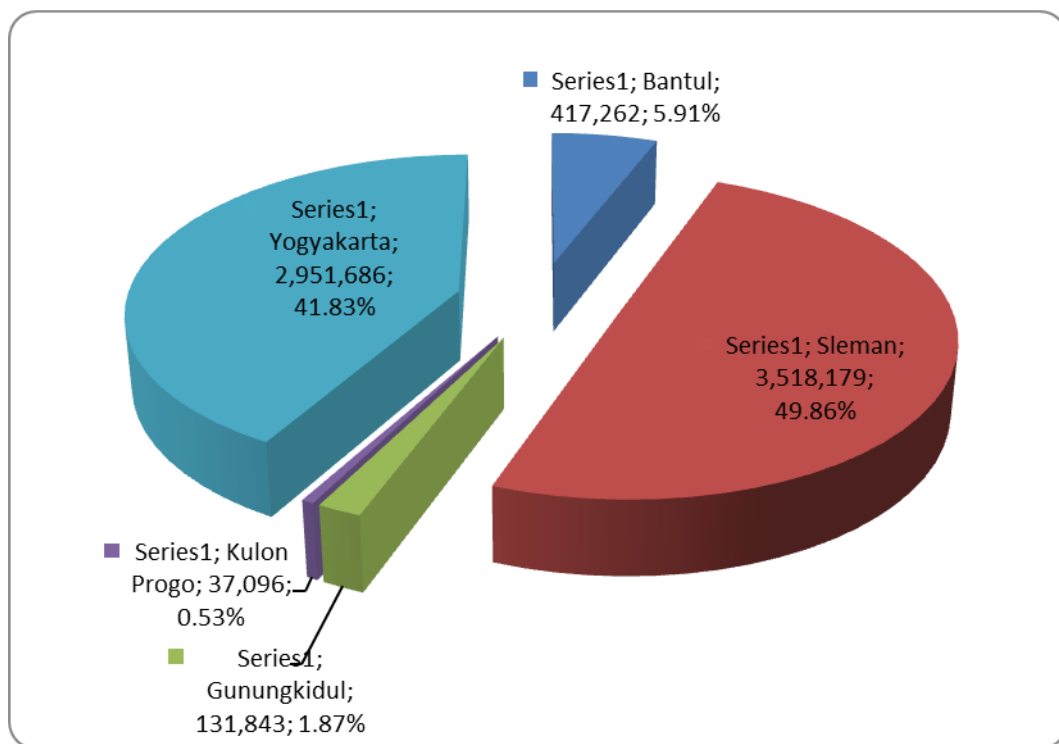
Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi PMA/PMDN di DIY sebesar 14,34%. Total investasi di DIY tahun 2013 adalah Rp. 8.067.770.134.638,- yang terdiri dari PMDN Rp 2.864.654.491.755 dan PMA sebesar Rp5.203.115.642.883,-. Rincian Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 239 perusahaan, yang terdiri dari 115 PMA dan 124 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 40.178 TKI dan 166 TKA.

Tabel 2.97 Perkembangan Investasi di DIY

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	Total Investasi	Pertumbuhan Investasi
2009	1.882.514.536.845	2.508.131.163.857	4.390.645.700.702	4,00
2010	1.884.923.869.797	2.696.046.957.447	4.580.970.827.244	4,33
2011	2.313.141.695.784	4.110.436.324.224	6.423.578.020.008	40,22
2012	2.805.944.605.930	4.250.121.535.829	7.056.066.141.759	9,85
2013	2.864.654.491.755	5.203.115.642.883	8.067.770.134.638	14,34

RKPD Tahun 2015

Meskipun secara keseluruhan investasi di DIY mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi presentasi di kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk mengangkat potensi unggulan di tiga kabupaten tersebut dan mempromosikannya kepada calon investor potensial.



Gambar 2.43 Persentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2012 Per Kabupaten/Kota

2.1.6.1.17 Urusan Kebudayaan

Visi DIY sesuai RPJPD 2005-2025 (Perda Nomor 2 tahun 2009) adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera’.

Selain itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kewenangan aspek kebudayaan dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Lima pilar utama dalam urusan kebudayaan menyangkut pembentukan karakter bangsa (jatidiri bangsa); peningkatan apresiasi masyarakat terhadap karya seni, budaya daerah, kesejarahan, permuseuman; pengelolaan cagar budaya yang optimal; regenerasi SDM kebudayaan; dan penataan lingkungan yang ramah budaya, sadar budaya dan kondusif untuk kreatif dan inovasi.

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah DIY sebagai Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara adalah mewujudkan:

1. Kelompok kesenian yang maju, mandiri, mempunyai jaringan internasional;
2. Cagar budaya yang lestari dan berdaya guna;
3. Desa budaya yang maju, dan mandiri serta mampu menjadi benteng ketahanan budaya;
4. Museum-museum berstandar internasional;
5. Peristiwa budaya yang bertaraf internasional;
6. Dokumen dan karya seni klasik serta tradisi yang lestari, mampu memberikan arah kehidupan masyarakat karena kandungan nilai-nilai budi pekerti luhur yang ada di dalamnya;
7. Ruang seni budaya yang representatif di mana masyarakat bisa mengapresiasi seni budaya serta penghormatan dan pemanfaatan sejarah lokal DIY oleh seluruh masyarakat dalam pembangunan yang bersifat fisik maupun nonfisik.

Isu strategis dalam urusan kebudayaan adalah pengembangan desa budaya dan penyiapan Heritage City. Desa budaya baik dalam tahap embrional maupun berkembang, diharapkan dengan pembinaan dan pendampingan dapat menjadi desa yang maju dan mandiri serta mampu menjadi benteng ketahanan budaya. Sedangkan desa maupun kantong budaya yang potensial menjadi desa budaya, dibina dan didorong agar bisa menjadi embrio desa budaya, dan nantinya juga berdiri menjadi desa budaya yang maju.

Heritage City diarahkan dalam upaya penataan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk menjamin kelestarian eksistensi kawasan cagar budaya. Pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya dalam berbagai sektor kepentingan masyarakat hendaknya dapat berjalan sinergis dan suportif, sehingga kelangsungan kelestarian cagar budaya menjadi warisan bagi generasi mendatang.

Pembangunan kebudayaan di DIY tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk memanfaatkan budaya yang merupakan salah satu kekayaan DIY dalam bidang ekonomi. Kekayaan budaya DIY merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila

RKPD Tahun 2015

dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan. Gelombang ekonomi keempat (fourth wave economic) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Keunggulan kompetitif Yogyakarta dalam bidang kebudayaan menjadi komponen unggulan bagi pembangunan ekonomi DIY.

Pembangunan kebudayaan di DIY yang dilakukan bersama stakeholder terkait dalam kurun waktu 2010-2014 dilakukan dengan menyusun program program/kegiatan untuk memperkuat ketahanan budaya dan mempertahankan budaya lokal yang ada serta memanfaatkan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari pembinaan sampai pada aktivitas pendukungnya. Program yang dilaksanakan tersebut adalah: Program pengembangan nilai budaya; program pengelolaan kekayaan budaya; program pengelolaan keragaman budaya; program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; program peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.

2.1.6.1.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa indikator dapat menggambarkan aspek pelayanan umum pada urusan kepemudaan dan olahraga. Jumlah klub olahraga meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2012. Adapun gedung olahraga dan organisasi pemuda di DIY dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan jumlahnya. Lebih lanjut untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga cenderung fluktuatif jumlahnya dari tahun ke tahun.

Tabel 2.98 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di DIY, 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah klub olahraga	50	50	51	51	50
2	Jumlah gedung olahraga	4	5	5	5	5
3	Jumlah organisasi pemuda	35	35	35	35	35
4	Jumlah kegiatan kepemudaan	na	440	437	440	440
5	Jumlah kegiatan olahraga	50	50	51	51	50

2.1.6.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

DIY selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut DIY perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa.

Selain pembinaan kesatuan bangsa, Pemerintah DIY juga melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik yang ada dalam upaya membentuk masyarakat madani. Suasana kondusif, sejuk, aman, tenteram, diantaranya meningkatnya penanaman modal, kunjungan wisata, pendidikan.

Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis 2013 menunjukkan capaian demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menggembirakan. Indeks demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta melampaui rerata nasional (71,67 dari rerata 65,48). Lebih detail, capaian kebebasan sipil (87,22 dari rerata nasional 80,79), capaian hak-hak politik (52,35 dari rerata nasional 47,54) dan lembaga demokratis (82,81 dari rerata nasional 74,72).

Namun demikian masih ada beberapa tantangan demokrasi di DIY, karena terdapat capaian beberapa indikator yang masih di bawah rerata nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi barometer toleransi masih dihadapkan dengan masalah kekerasan horizontal yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain, sehingga menghambat kebebasan sipil baik dalam berserikat dan berkumpul maupun kebebasan sipil berkeyakinan.

Kelompok-kelompok 'minority within' atau yang memiliki ideologi yang berbeda seringkali sangat rentan mengalami kekerasan fisik. Ironisnya, diskriminasi dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya juga masih mewarnai proses politik dan sosial keseharian baik dalam bentuk tulisan maupun pernyataan. Sedangkan dalam capaian hak-hak politik, aksesibilitas, khususnya fasilitas bagi kelompok difabel untuk mengekspresikan hak politik mereka masih menyisakan persoalan. Hal ini ditambah oleh administrasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang buruk.

Kinerja lembaga demokratis di DIY juga menyisakan beberapa catatan. Komitmen penyelenggara pemerintahan di DIY terhadap pemenuhan hak kesehatan warga masih tidak cukup kuat bila dilihat dari alokasi anggaran kesehatan di DIY yang masih di bawah rerata nasional. Demikian juga dengan kinerja lembaga DPRD di DIY. Lembaga yang mestinya menjadi representasi warga untuk mengartikulasikan kepentingan ini tidak cukup signifikan dalam memberikan rekomendasi secara

kelembagaan kepada eksekutif. Sementara itu, aksi afirmasi keterwakilan perempuan di DPRD di DIY juga di bawah rerata nasional.

Tantangan-tantangan tersebut menjadi penting untuk direspon tata pemerintahan lokal di DIY. Sebab tatanan politik yang demokratis pada dasarnya sangat dasar dan penting namun tidak akan punya makna berarti bila tidak memberikan kontribusi yang efektif bagi kesejahteraan, termasuk di dalamnya keamanan, pemenuhan hak-hak dasar, tidak adanya diskriminasi dsb.

Oleh karena itu ada beberapa agenda kebijakan yang penting untuk dikembangkan ke depan di wilayah DIY. Ke depan Pemda perlu memfasilitasi ruang-ruang interaksi dan komunikasi yang lebih intens antar komunitas sebagai 'melting pot' bagi berbagai kelompok sosial dengan latar belakang beragam, gesekan sosial yang tidak jarang berakhir pada kekerasan fisik sering terjadi. Dibutuhkan adanya upaya untuk mendorong komunikasi dan dialog yang lebih intens melalui forum komunikasi warga keseharian yang sebenarnya sudah mengakar kuat di DIY. Ruang-ruang publik (public space) yang memungkinkan interaksi lintas identitas semestinya semakin banyak dikembangkan, seperti taman kota, pengembangan Malioboro sebagai pedestrian, dsb. Sementara itu, pembentukan enclave-enclave sosial yang mempertegas identitas, seperti perumahan khusus bagi identitas tertentu, asrama mahasiswa, harus dipastikan tidak menjadi sumber "pembatas sosial" baru. Upaya-upaya mewujudkan keterlindungan warga berbasis komunitas (community policing), sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini dan mediasi konflik sosial juga penting untuk terus dirawat agar kohesi sosial terus-menerus bisa dijaga.

Sebagai konsekuensi predikat miniatur Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta merasakan dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan. Heterogenitas masyarakat tersebut menyebabkan Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya.

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah DIY dilakukan dengan pendekatan preemptif, preventif, persuasif dan represif yang lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi,

pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan tersebut. Dari hasil pemantauan dapat diketahui tingkat kesadaran masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan dikenakan operasi non yustisi, yaitu diberikan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perlakuan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan diproses secara hukum.

Unjuk rasa yang terjadi di DIY ditangani dengan cara-cara yang persuasif dan sinergis antar petugas yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan cara penanganan yang persuasif dan sinergis, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diminimalisir.

2.1.6.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP nomor 38 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Dengan demikian perlu adanya penjelasan dan batasan ketegasan urusan lintas kabupaten/kota yang perlu diharmonisasikan dengan pemerintahan

kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pasal 9 dan 10 vide bahwa Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan dan urusan pilihan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Namun dalam pelaksanaan NSPK masing-masing Kementerian/ Lembaga Non Departemen masih banyak yang tumpang tindih.

Pasal 12 UU Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah menyerahkan kewenangan disertai dengan unsur pendukung yang meliputi personil, pembiayaan, sarana prasarana dan dokumen, sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Namun hal pelaksanaannya masih banyak permasalahan berkaitan dengan penyerahan P3D tersebut yang belum diselesaikan.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemda DIY telah mendapatkan beberapa penilai prestasi. Diantaranya dalam riset IGI (Indonesian Government Index) DIY menempati peringkat pertama pada tahun 2012 dengan nilai 6,80 unggul dari 32 provinsi lainnya di Indonesia. Nilai index DIY yang berada di atas rata-rata nasional, secara konsisten juga terjadi pada masing-masing arena yaitu di Arena Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi. Di Arena Pemerintah nilai indeks tersebut adalah 6,52, lebih tinggi di banding nilai rata-rata nasional yaitu 5,28. Untuk Arena Birokrasi, nilai indeksnya adalah 7,46, berada di atas nilai rata-rata nasional yaitu 5,68. Sedangkan untuk Arena Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi secara berturut-turut adalah 6,72 dan 6,12. Keduanya juga lebih besar dibanding nilai indeks rata-rata nasional yaitu 6,33 dan 5,72.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan DIY adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, Untuk tahun 2011 dan tahun 2012 disusun 5 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Gubernur tentang APBD sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2011 disusun 4 Peraturan Daerah dan 7 Peraturan Gubernur sedangkan tahun 2012 akan disusun 12 Peraturan Gubernur.

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas. Sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, yakni:

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan merespon tuntutan reformasi birokrasi dimaksud, Pemerintah DIY telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Melalui pelaksanaan program tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan antara lain organisasi,

tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem reward and punishment. Disiplin PNS ditegakkan antara lain dengan penggunaan mesin presensi elektronik bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah DIY. Kedisiplinan PNS digunakan sebagai salah satu indikator kinerja PNS dan selanjutnya diberikan reward bagi PNS sesuai dengan kinerjanya. Penilaian kinerja PNS juga mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu PNS. Formulasi penilaian kinerja PNS akan dikembangkan dari tahun ke tahun. Reward juga diberikan dalam bentuk pemberian penghargaan tali asih bagi PNS dan PTT yang memasuki masa purna tugas. Punishment diterapkan bagi PNS dengan penegakan peraturan perUndang-Undangan bagi PNS.

Pengembangan SDM tidak dapat dipisahkan dari peran pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan menjadi daya ungkit (leverage) yang paling kuat dalam mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang kompeten dan profesional, yang dicapai melalui upaya inovasi dan pengembangan dalam program, kurikulum, metode, serta sarana dan prasarana diklat.

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, sampai saat ini dinilai sebagai upaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam peningkatan kompetensi pegawai. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya secara profesional. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki para peserta, maka kinerja individu mereka sekembalinya ke tempat kerja diharapkan akan meningkat, dan pada akhirnya berpengaruh pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Upaya reformasi birokrasi yang selalu menyertai proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun telah mencapai berbagai prestasi keberhasilan, semakin menemukan relevansinya dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasi undang-undang dimaksud berdampak sangat signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. Amanat tujuan keistimewaan dan atribusi tambahan kewenangan keistimewaan yang ada di dalamnya menjadi kekuatan pendorong (driving force) bagi jajaran Pemerintah Daerah DIY untuk menata diri semakin lebih baik lagi.

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) pada tahun 2012 sudah tergelar Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) antar pemerintah provinsi se-Indonesia dan Pemerintah, sedangkan Sisdina di lingkungan Pemerintah DIY tergelar antara Unit Teknis Persandian (UTP) dengan UTP di kabupaten/kota se DIY serta UTP Jajaran persandian Muspida yang meliputi :

- 1) Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi se Indonesia
- 2) Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-DIY;
- 3) Jajaran TNI meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan AAU;
- 4) Jajaran POLDA;
- 5) Jajaran Kejaksaan Tinggi.

Untuk mewadahi personil sandi di DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY), khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah DIY.

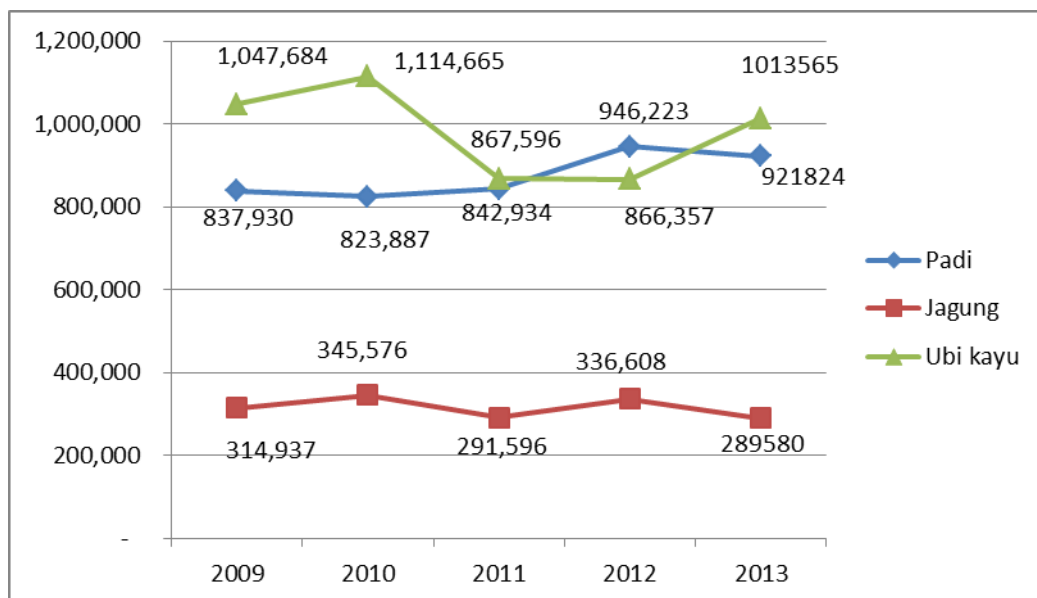
2.1.6.1.21 Urusan Ketahanan Pangan

Kedaulatan Pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pembangunan ketahanan pangan adalah mewujudkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

1. Ketersediaan Pangan

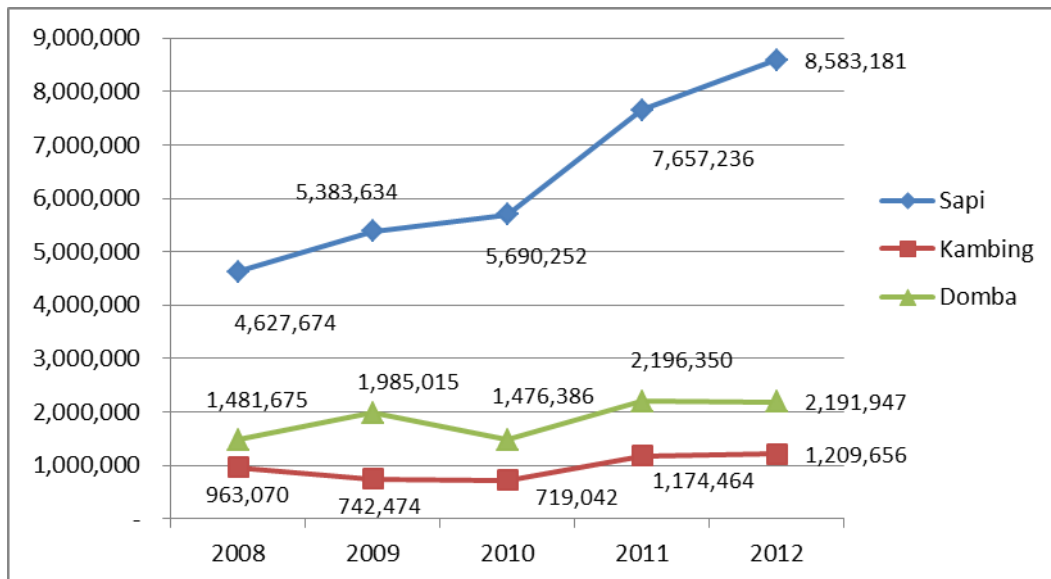
Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, DIY mengalami trend peningkatan produksi pangan nabati pada komoditas utama yaitu padi dan ubi kayu. Peningkatan produksi padi pada tahun 2012 diantaranya dikarenakan adanya penambahan lahan baru di Sleman. Namun, akibat kemarau basah, produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2013. Sementara produksi ubi kayu terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 dikarenakan peningkatan produktivitasnya. Di sisi lain, produksi jagung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Bahkan produksi pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012. Hal ini juga diakibatkan oleh musim kemarau basah yang mengganggu produksinya.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013

Gambar 2.44 Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu Tahun 2009-2013

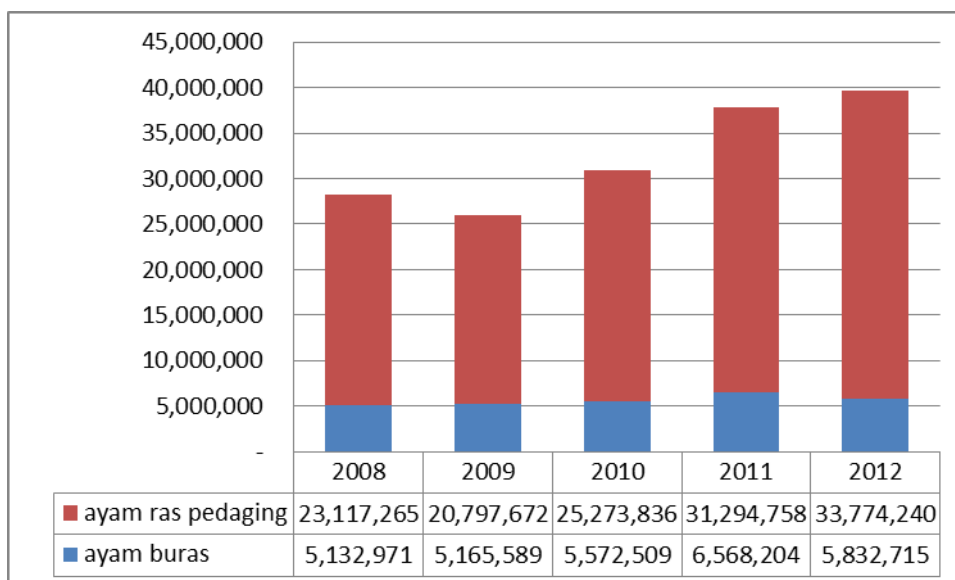
Produksi pangan hewani untuk komoditas daging sapi, kambing, dan domba mengalami peningkatan. Peningkatan produksi daging ini sejalan dengan populasi sapi potong, kambing, dan domba yang cenderung mengalami peningkatan.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013

Gambar 2.45 Produksi Daging Sapi, Kambing dan Domba Tahun 2008-2012

Seiring dengan peningkatan populasi unggas, produksi dari unggas, baik berupa daging maupun telur juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013

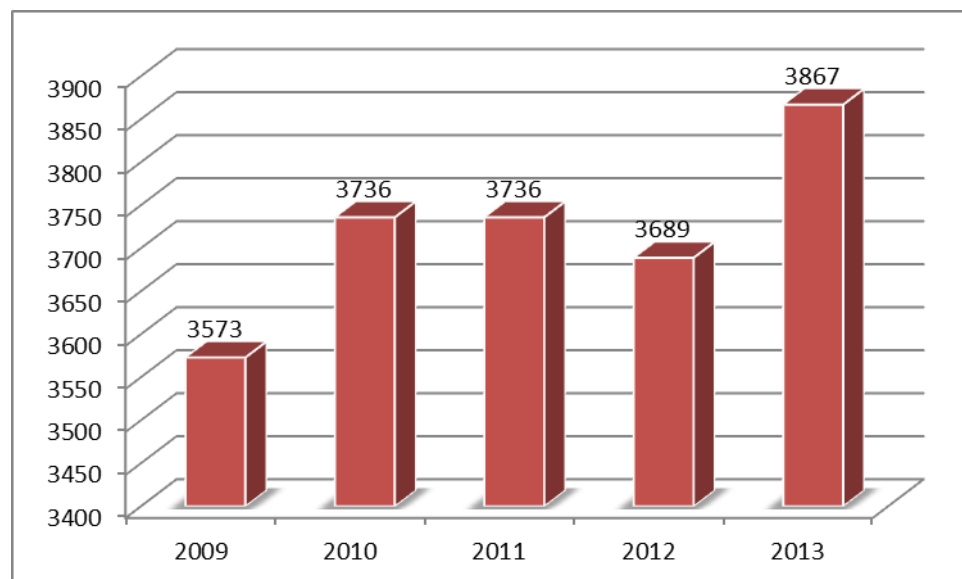
Gambar 2.46 Produksi Daging Ayam Tahun 2008-2012

Tabel 2.99 Produksi Telur Unggas DIY Tahun 2008-2012

Tahun	Produksi Telur (butir)			Jumlah
	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik	
2008	50.154.114	361.841.526	36.497.767	448.493.407
2009	50.035.025	397.725.963	36.786.074	484.547.062
2010	49.332.909	17.850.425.555	41.029.816	17.940.788.280
2011	50.819.481	386.696.413	43.594.957	481.110.851
2012	51.875.725	393.557.022	43.632.242	489.064.988

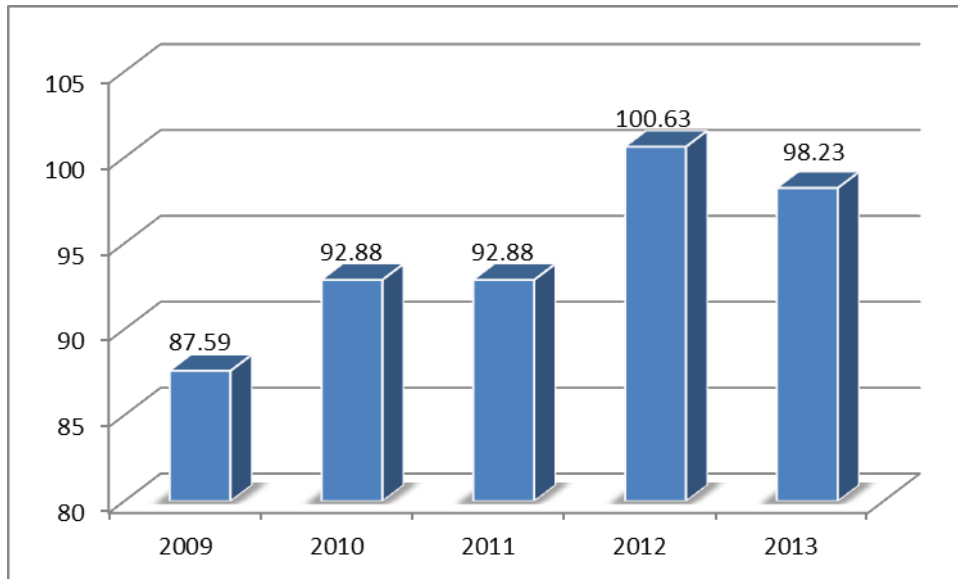
Sumber: BPS DIY

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2200 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 55 gram/kapita/hari, maka posisi DIY jauh melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 2013 sebesar 3.867 Kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein ketersediannya sebesar 98,23 gram/kapita/hari.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

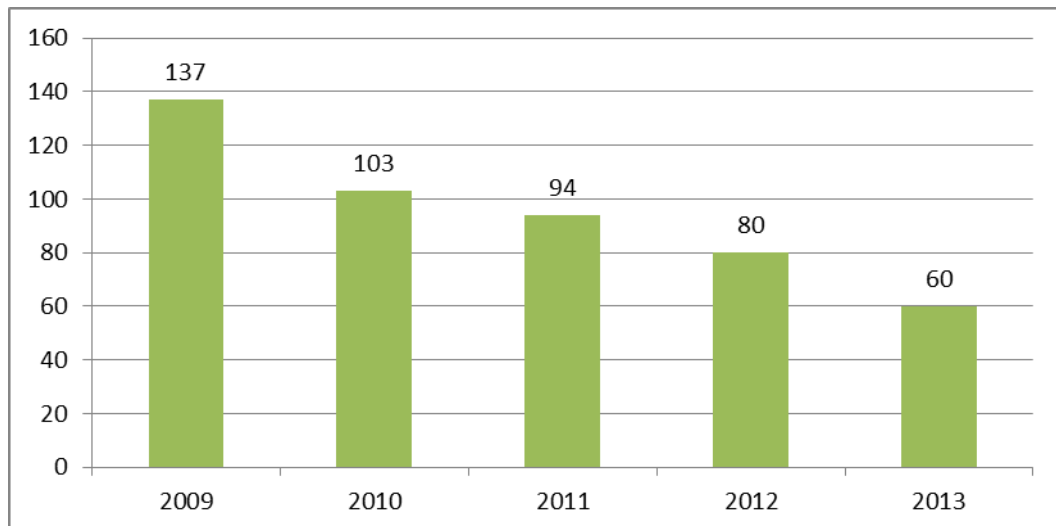
Gambar 2.47 Ketersediaan Energi DIY Tahun 2009-2013



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014

Gambar 2.48 Ketersediaan Energi DIY Tahun 2009-2013

Jumlah desa rawan pangan di DIY terus menurun dari 137 desa pada tahun 2009 menjadi 60 desa pada tahun 2013. Jumlah desa rawan pangan terbanyak berada di Kulon Progo sejumlah 27 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Hal tersebut dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa rawan pangan diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut.



Sumber: BPS DIY

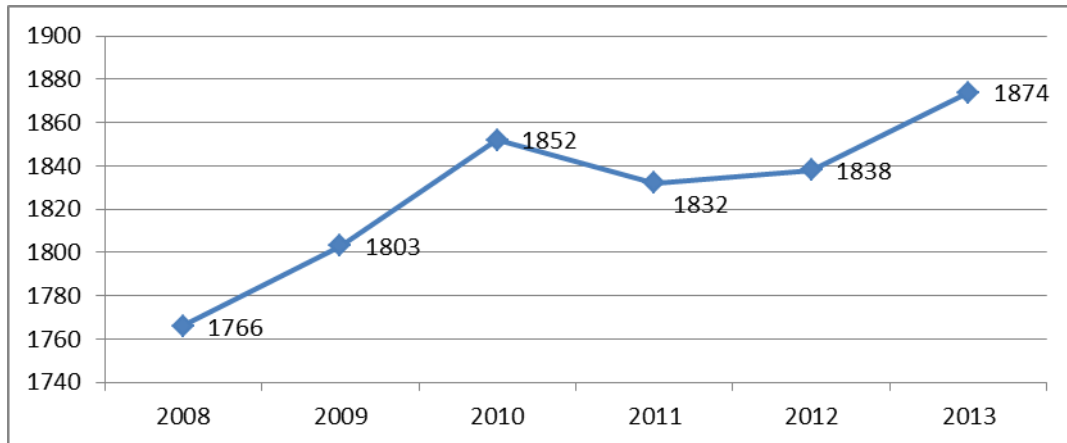
Gambar 2.49 Desa Rawan Pangan DIY Tahun 2009-2013

2. Distribusi Pangan

Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum penyelenggaraan distribusi pangan di DIY telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sekaligus pemberian/hibah kepada keluarga pra sejahtera yang dapat disalurkan memadai sesuai sasaran yang ditetapkan. Dalam upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, telah dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Sampai dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mengendalikan stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen.

3. Konsumsi dan Pengawasan Pangan

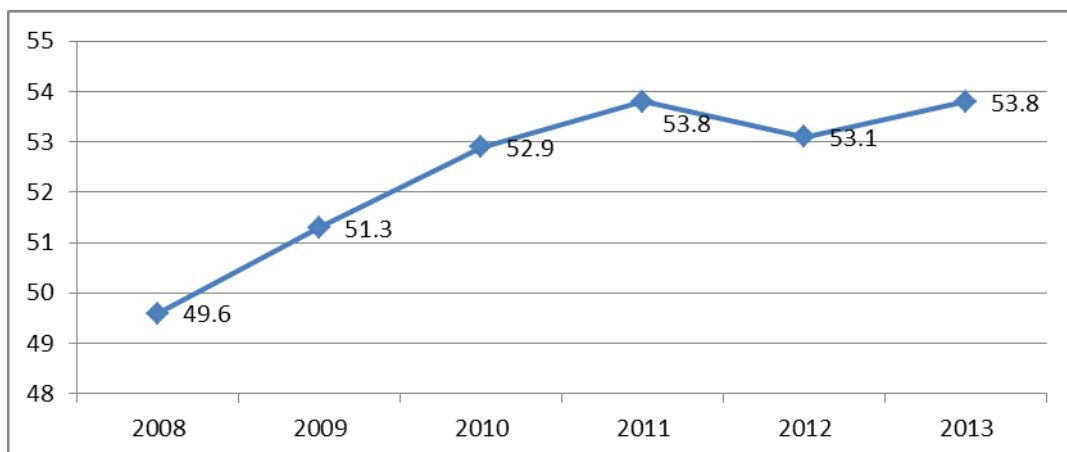
Jumlah konsumsi energi penduduk DIY mengalami fluktuasi dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Pada tahun 2013 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 1.874 Kkal/kapita/hari, namun masih berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah)

Gambar 2.50 Konsumsi Energi DIY, 2008-2013 (Kkal/Kapita/hari)

Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2013 mencapai sebesar 53,8 gram/kapita/hari. Konsumsi protein tersebut sudah melampaui angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari.

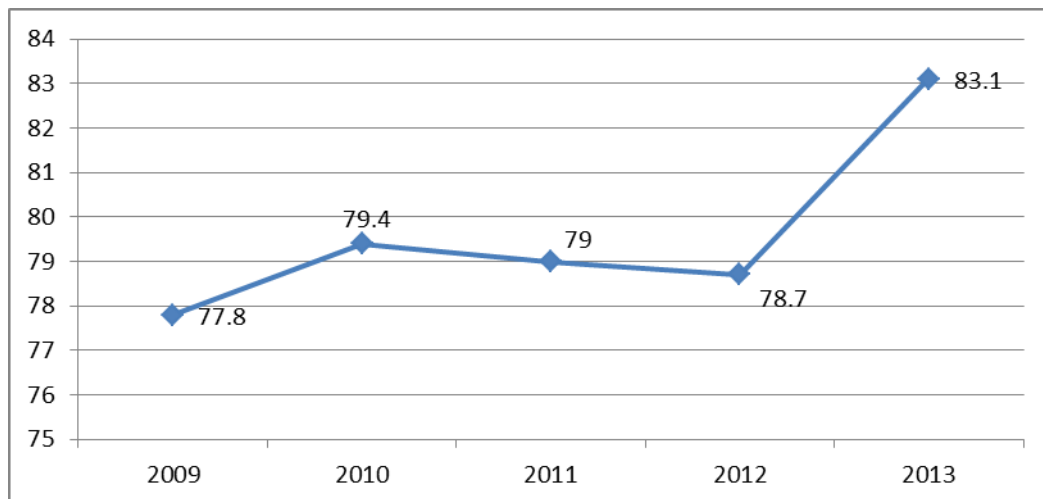


Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah)

Gambar 2.51 Konsumsi Protein DIY, 2008-2013 (gram/kapita/hari)

RKPD Tahun 2015

Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2013 adalah 83,1. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi.



Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah)

Gambar 2.52 PPH DIY, 2009-2013 (gram/kapita/hari)

2.1.6.1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Seluruh desa/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK. Tabel berikut menunjukkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah DIY menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2011 :

Tabel 2.100 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) di Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012

No	Kab/Kota	Jumlah LPMD/LPMK		Asosiasi LPMD/LPMK	Jumlah
		LPMD	LPMK		
1	Kota Yogyakarta	-	45	1	46
2	Kab. Bantul	75	-	1	76
3	Kab. Kulon Progo	88	-	1	89
4	Kab. Gunungkidul	144	-	1	145
5	Kab. Sleman	86	-	1	87
6	DIY	-	-	1	1
	Total	393	45	6	444

Sumber : BPPM DIY

Selain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat desa, dibentuk pula lembaga pemberdayaan ekonomi desa seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Lumbung Pangan, Pasar Desa, dan Badan Kredit Desa. Tabel berikut menunjukkan jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi desa di DIY tahun 2012 :

Tabel 2.101 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012

Kab/Kota	Jumlah LSM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif				Jumlah
	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	Lumbung Pangan	Pasar Desa	Badan Kredit Desa	
Kota Yogyakarta	45	44	31	0	120
Kab.Bantul	75	48	55	10	160
Kab. Kulon Progo	88	72	41	20	232
Kab. Gunungkidul	144	77	138	15	304
Kab. Sleman	86	69	43	35	238
Jumlah DIY	438	310	308	80	1.136

Sumber : BPPM DIY

Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat deasa diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan persentase posyandu aktif di DIY.

Tabel 2.102 Persentase Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2010-2011

Kabupaten/Kota	2010			2011		
	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	%
Kota Yogyakarta	622	449	72,19	622	531	77,73
Kab.Bantul	1.123	518	46,13	1.123	669	59,57
Kab.Kulon Progo	960	670	69,79	961	747	83,11
Kab. Gunungkidul	1.461	1.287	88,09	1.462	1215	74,59
Kab. Sleman	1.504	1.161	77,19	1.511	1127	72,19
Jumlah DIY	5.670	4.085	72,05	5.679	4.289	75,52

Sumber : Profil Kesehatan DIY 2010 – 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah posyandu yang aktif semakin meningkat dari 449 pos pada tahun 2010 menjadi 531 pos pada tahun berikutnya dengan jumlah persentase lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah posyandu di masing-masing kabupaten/kota. Cukup tingginya persentase Posyandu aktif di DIY ini cukup berarti signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan balita.

Begitu pula dengan PKK aktif menunjukkan angka yang menggembirakan dimana dari 522 kelompok PKK seluruhnya tergolong aktif (100%) seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.103 Persentase PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2011

Kabupaten/Kota	Jumlah PKK	Jumlah PKK Aktif	%
Kota Yogyakarta	60	60	100
Kab.Bantul	93	93	100
Kab. Kulon Progo	101	101	100
Kab. Gunungkidul	163	163	100
Kab. Sleman	104	104	100
DIY	1	1	100
Jumlah DIY	522	522	100

Sumber : BPPM DIY

LSM aktif di DIY setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dari Tahun ke Tahun selalu mengalami penambahan dari 1418 (2011) menjadi 1428 (2012).

Tabel 2.104 LSM Aktif DIY Tahun 2011-2012

Tahun	Jumlah
2011	1418
2012	1428

Sumber : BPPM DIY

Tabel 2.105 Jumlah PMKS Tahun 2009-2013

No.	Jenis data	Satuan	Nilai				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	PMKS yang tertangani	Buah	13.192	8.023	9.304	41.646	7.349
2	PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Buah	416.858	403.666	377.819	497.808	497.080
3	PMKS yang diberikan bantuan	Buah	13.192	8.023	9.304	41.646	7.349

Sumber : Dinas Sosial DIY

Tabel 2.106 Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2009-2013

No.	Jenis data	Satuan	Nilai				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Karang taruna	buah	438	438	438	438	438
2.	Tenaga Kessos Masyarakat (TKSM)	buah	78	78	78	78	78
3.	Organisasi Sosial	buah	273	316	316	394	394

Sumber : Dinas Sosial DIY

Tabel 2.107 Jumlah LSM DIY, 2009-2013

No.	Jenis data	Satuan	Nilai				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	LSM	buah	273	316	316	394	394

Sumber : Dinas Sosial DIY

LPM berprestasi di DIY setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa LPM mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa. Tabel berikut menunjukkan LPM Berprestasi di DIY menurut Kabupaten/Kota di tahun 2012:

Tabel 2.108 LPM Berprestasi Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2012

Kabupaten/Kota	2011		2012	
	Jumlah LPM	Jumlah LPM Berprestasi	Jumlah LPM	Jumlah LPM Berprestasi
Kota Yogyakarta	45	6	45	6
Kab.Bantul	75	12	75	12
Kab. Kulon Progo	88	9	88	9
Kab. Gunungkidul	144	15	144	15
Kab. Sleman	86	8	86	8
DPD & Asosiasi	6		6	
Jumlah DIY	444	50	444	50

Sumber : BPPM DIY

2.1.6.1.23 Urusan Statistik

Salah satu urusan wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah urusan statistik. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dimaksud dengan statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik.

Statistik penting artinya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan. Hal tersebut mendasari perlu diselenggarakan kegiatan statistik daerah yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008, Bappeda DIY merupakan instansi Pemerintah Daerah DIY yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD provinsi/kabupaten/kota di DIY. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini dituangkan dalam program pengembangan statistik daerah.

Program pengembangan statistik daerah dijabarkan dalam 2 kegiatan, yaitu kegiatan Pengolahan, Analisis, Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah dan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. Dalam 2 kegiatan tersebut, diantaranya dihasilkan produk DIY Dalam Angka (DDA), Analisis PDRB DIY, dan Data Perencanaan Pembangunan DIY.

2.1.6.1.24 Urusan Kearsipan

Fungsi kearsipan adalah menyimpan, memelihara, menyelamatkan, dan mengaktualisasikan kembali arsip kepada publik/masyarakat. Masalah utama kearsipan adalah masih digunakannya pengelolaan secara manual dan belum terotomasi. Pada tingkat kelurahan atau kecamatan, pengolahan arsip masih berbasis teknologi informasi. Hal ini tentu akan mengurangi rasa kepuasan masyarakat pada layanan kearsipan. Oleh karena itu perkembangan jumlah perpustakaan dan kearsipan ini harus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini sesuai dengan UU No 43 tahun 2007 pasal 8 yaitu Pemerintah menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

Pekerjaan kearsipan menjadi suatu kebutuhan dan keharusan yang perlu diperhatikan oleh setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta. Arsip tercipta seiring berjalannya aktivitas instansi bersangkutan. Semakin besar instansi maka arsip yang tercipta pun semakin banyak. Permasalahan yang terkait dengan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan tentunya semakin kompleks, sehingga membutuhkan pengelolaan arsip yang tepat. Permasalahan pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi milik organisasi besar saja, melainkan juga organisasi kecil, misalny di orgnisasi tingkat pemerintah desa yang memiliki tanggungjawab pelayanan kepada masyarakat yang permintaannya tidak mengenal waktu / jam kerja.

Buruknya pengelolaan arsip di desa akan berdampak pada keterlambatan proses layanan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa juga perlu memperhatikan pengelolaan arsip untuk menunjang pelayanan publik. Layanan dapat diberikan dengan cepat apabila arsip tertata dengan baik. Setiap Pemerintah Desa pasti mempunyai kewajiban memberikan layanan kebutuhan masyarakat yang harus melalui administrasi desa, seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte kepemilikan tanah, dll. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah banyak pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tugas kearsipan dengan cepat dan rapi. Pekerjaan kearsipan sangat berpengaruh terhadap proses

administrasi yang pada akhirnya bermuara pada pelayanan kepada masyarakat / publik.

Di lingkungan instansi pemerintahan, lembaga kearsipan bertugas sebagai ujung tombak pengelolaan kearsipan atau lebih khusus lagi lembaga kearsipan adalah instansi laboratorium di bidang pengelolaan kearsipan sehingga banyak sistem kearsipan yang diciptakan dan diujicobakan di lembaga tersebut. Salah satu sistem kearsipan yang saat ini sedang diujicoba di lembaga kearsipan adalah Sistem Pengendalian Naskah Dinas.

Esensi Pengelolaan arsip adalah mengelola informasi, dalam hal ini kompetensinya adalah memanfaatkan arsip dalam perannya sebagai bahan kerja instansi. Mutu informasi yang disajikan sangat mempengaruhi kinerja instansi sehingga kearsipan perlu dilaksanakan dengan baik dan tertib agar menghasilkan mutu informasi yang baik pula. Adapun dalam pelaksanaan kearsipan itu sendiri dituntut untuk mampu mengoptimalkan fungsi seluruh sub sistem, baik sistem sumber daya manusia, sistem, sarana prasarana, maupun anggaran.

Lebih dari 30 tahun sejak Undang-Undang Kearsipan Nomor 7 tahun 1971 tentang Pokok-pokok Kearsipan diundangkan, dapat dikatakan kearsipan belum dikelola secara maksimal. Pada umumnya terdapat kendala internal berkenaan dengan pemahaman yang keliru tentang arsip, yaitu arsip sering dianggap sebagai kertas kumal yang berdebu, serta rendahnya minat di bidang kearsipan ini karena dianggap pekerjaan kearsipan kurang bergengsi. Selain hal tersebut dukungan dan apresiasi pimpinan instansi masih perlu ditingkatkan, karena kondisi ini akan membuat tidak optimalnya pemanfaatan arsip di instansi.

Permasalahan di bidang Kearsipan yang dihadapi dalam pembinaan kearsipan secara prinsip adalah hal yang menyangkut kebijakan pembinaan kearsipan di daerah. Sebenarnya permasalahan yang timbul bukan sekedar masalah bagi arsiparis atau petugas arsip, akan tetapi permasalahan instansi secara menyeluruh. Permasalahan tersebut secara garis besar meliputi :

a. Sumber Daya Manusia

Persepsi. Adanya persepsi bahwa arsip adalah tanggungjawab TU/Sekretaris. Lebih detail lagi adalah tanggung jawab arsiparis atau petugas arsip. Akibatnya setiap permasalahan kearsipan, selain arsiparis, petugas arsip atau kepala bagian TU/sekretaris tidak merasa memiliki tanggungjawab.

Pengetahuan. Ketidakseragaman pemahaman tentang kearsipan maupun keterbatasan pengetahuan dari berbagai elemen di suatu instansi merupakan hambatan bagi pelaksanaan tata kearsipan.

Kuantitas. Selain kualitas, jumlah arsiparis maupun petugas arsip tidak sebanding dengan volume arsip yang tercipta di instansi.

Kesadaran. Kesadaran akan arti penting arsip yang masih rendah merupakan hambatan utama pelaksanaan tata kearsipan instansi.

b. Sistem

Tingkat kesulitan. Harus diakui bahwa sistem Kartu Kendali memerlukan keterpaduan serta kesamaan persepsi dari berbagai elemen di suatu instansi, dari kepala sampai staf terendah harus memiliki pemahaman yang sama tentang sistem yang digunakan. Hal tersebut selain terkait dengan berbagai aspek, sistem Kartu Kendali juga rumit dibanding sistem agenda.

Kebiasaan. Kebiasaan penggunaan buku agenda menjadi kendala tersendiri. Kebiasaan dan keengganan untuk mengenal sistem kartu kendali mengakibatkan dualisme sistem di instansi.

Pengorganisasian. Penentuan organisasi kearsipan di instansi masih sering tidak jelas. Pembagian kewenangan serta tugas antara Unit Kearsipan dan Unit Pengolah belum tergambar dengan jelas. Demikian halnya dengan petugas dimasing-masing Unit . Hal ini ditunjang dengan tidak adanya kesadaran untuk menyerahkan arsip pada petugas. Pimpinan maupun staf cenderung menyimpan arsip yang 'merasa' menjadi miliknya.

c. Sarana Prasarana

Keterbatasan sarana kearsipan merupakan hambatan bagi terlaksananya tata kearsipan yang baik. Selain itu juga tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan, mengakibatkan arsip tidak bisa ditata secara sistematis.

d. Anggaran

Masalah alokasi anggaran di bidang kearsipan menjadi alasan klasik hampir di setiap instansi berkaitan dengan tidak baiknya pengelolaan tata kearsipan instansi. Memang tidak dipungkiri selama ini anggaran kearsipan menjadi satu pos dengan alat tulis kantor, selain tidak bisa menopang bagi pemenuhan sarana kearsipan, kontraprestasi petugas pengelola arsip juga masih terabaikan.

Usaha – usaha Pemerintah dalam menciptakan tertib arsip , tercantum dalam pasal 6 UU nomor 7 Tahun 1971, tertulis bahwa untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan, pemerintah harus : a. Menyelenggarakan kearsipan yang membimbing kearah kesempurnaan, b. Melaksanakan pendidikan kader ahli kearsipan, c. Melaksanakan penerangan/control/pengawasan, d. Menyediakan perlengkapan-perengkapan teknis kearsipan, e. Mengadakan penyelidikan-penyelidikan ilmiah di bidang kearsipan pada umumnya.

Persoalan mendasar yang dihadapi para pengelola kearsipan sebenarnya bukan terletak pada sulitnya menerapkan suatu sistem kearsipan ,tetapi lebih pada bagaimana menyakinkan orang untuk mau menerapkan sistem kearsipan. Realitas tersebut dapat dilihat dalam berbagai kesempatan diskusi dan seminar bidang kearsipan yang senantiasa muncul keluhan dan persoalan klasik seputar tidak diperhatikannya bidang kearsipan suatu instansi atau organisasi, pimpinan yang memandang sebelah mata tetapi selalu ingin pelayanan cepat dan tentu saja persoalan tidak sebandingnya insentif yang diperoleh pengelola kearsipan dengan beban kerja yang ditanggungnya.

Problema-problema tersebut tentu menjadi keprihatinan bersama, mengingat kearsipan merupakan bidang yang paling vital dalam kerangka kerja suatu administrasi. Tertib administrasi yang diharapkan akan menjadi sia-sia ketika tidak dimulai dari tertip kearsipannya.

Dipandang dari nilai pentingnya arsip, arsip adalah hal yang penting. Namun demikian harus dipahami bahwa arsip itu menjadi bermanfaat jika tidak diikuti dengan upaya pengelolaan arsip secara baik dan benar serta konsisten memandang dan menempatkan arsip sebagai informasi lebih dari sekedar *by product* dari kegiatan organisasi.

Dalam perkembangannya, perpustakaan dan kearsipan di DIY mengalami berbagai tantangan dan permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 3 menerangkan fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, maka perpustakaan dituntut untuk bisa menjalankannya. Begitu pula fungsi kearsipan adalah menyimpan, memelihara, menyelamatkan, dan mengaktualisasikan kembali arsip kepada publik/masyarakat. Dua fungsi tersebut menjadi salah satu prioritas dalam pelayanan publik dalam mewujudkan visi-misi pembangunan di DIY:

Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Hingga saat ini di DIY telah disusun pedoman-pedoman yang terkait dengan kearsipan. Arsip yang terkait dengan pelestarian telah dilaksanakan penarikan baik arsip dinamis inaktif yang ada di SKPD yang bergabung, terlikuidasi maupun berkembang. Kegiatan yang bersentuhan dengan SKPD di Pemerintah DIY akan menjadi arsip dinamis inaktif, sementara arsip statis merupakan arsip permanen yang mempunyai nilai guna tinggi yang harus disimpan dan dilestarikan selamanya.

Pengelolaan arsip statis meliputi: 1). Pengolahan, 2). Alih media, tulisan, dan bahasa. Arsip yang diolah dikelompokkan menjadi 3(tiga) kategori yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip rekaman, arsip audiovisual.

Tabel 2.109 Data Pengolahan Arsip Statis BPAD Hingga Tahun 2013

No	Pengolahan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Arsip Tekstual	3211	2842	2641	2540	2800
2	Arsip Foto	286	326	264	474	674
3	Arsip Rekaman	0	0	0	0	0
4	Arsip Audiovisual	0	12	0	0	0

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah dilakukan pengalih tulisan dan bahasa naskah-naskah yang ada di BPAD mencapai hampir 700 koleksi. Masih dibutuhkan kerja keras untuk menalihmediakan koleksi yang ada. Kendala kurangnya sumberdaya manusia yang dapat dikaryakan perlu mendapat perhatian serius.

Tabel 2.110 Data Alih Media BPAD Hingga Tahun 2012

No	Pengolahan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Alih Media	6019	7193	7193	9619	11619
2	Alih Tulisan	3507	4295	5048	5799	6549
3	Alih Bahasa	2178	2680	3183	4208	5131

Untuk penanganan arsip dinamis dapat dikategorikan menjadi 3(tiga) meliputi: penanganan arsip tekstual, penanganan arsip kartografi, serta penanganan arsip inaktif foto.

Tabel 2.111 Data Alih Media BPAD Hingga Tahun 2012

No	Penanganan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Arsip Inaktif Tekstual	29742	35106	40219	45739	50800
2	Arsip Inaktif Kartografi	1568	1568	1568	2153	2691
3	Arsip Inaktif Foto	8855	11658	11758	15587	39308

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan hampir sama. Masih kurangnya jumlah tenaga perpustakaan atau pustakawan serta tenaga arsiparis yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan dan arsipasi di seluruh DIY. Sebagai contoh, banyak petugas perpustakaan sekolah dan arsipasi yang masih dirangkap oleh guru mata pelajaran, padahal sesuai dengan standarnya harus dipegang oleh pustakawan murni dari segi akademisnya.

Permasalahan alokasi sumber dana yang tersedia perpustakaan dan kearsipan masih sangat minim. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber anggaran dari pemerintah melalui APBN/APBD. Sementara sumbangan dari pihak lain seperti masyarakat atau sponsor masih sangat terbatas. Masalah berikutnya adalah koleksi bahan pustaka yang masih terbatas jumlah dan macamnya, sehingga terkadang tidak mampu mencukupi kebutuhan pengunjung perpustakaan.

2.1.6.1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi sangat bermanfaat untuk memperpendek jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat. Selama kurun waktu 2008-2012, jumlah sambungan telepon di DIY mengalami kenaikan untuk tahun 2008 sebanyak 379.648 menjadi sebanyak 452.565 pada tahun 2011. Sementara itu, kondisi tahun 2012 terdapat 134.849 jumlah sambungan telepon di DIY mengalami penurunan sebesar 70,20% dibandingkan dengan tahun 2011. Dari jumlah sambungan telepon di DIY tersebut 100% merupakan wireline.

Tabel 2.112 Jumlah Sambungan Telepon di DIY (%), 2007-2012

Jenis	2008	2009	2010	2011	2012
WIRELINE	122.664	122.563	123.081	134.849	139.777
Kulon Progo	2.340	2.372	2.412	2.631	2.700
Bantul	4.134	4.085	4.261	5.940	6.234
Gunungkidul	3.276	3.286	3.356	3.553	3.577
Sleman	18.081	17.894	17.926	21.611	22.534
Yogyakarta	94.833	94.926	95.126	101.114	104.732
CDMA	316.769	328.621	329.484	--	371.673
Pasca bayar	31.439	32.074	31.864	--	15.644

Jenis	2008	2009	2010	2011	2012
Pra Bayar	285.330	296.547	297.620	--	356.029
DIY	439.433	451.184	452.565	134.849	511.450

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Rasio warnet atau rasio ketersediaan warnet adalah jumlah warnet per 1000 penduduk. Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Semakin besar rasio warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tabel 2.113 Jumlah Warnet di DIY, 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Jumlah Warnet	166	168	322	500

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informasi DIY

Jumlah warnet di DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena bisnis warnet menjadi bisnis yang menjanjikan ditengah kemajuan jaman yang menuntut setiap orang untuk menggunakan jasa internet dalam mempermudah komunikasi maupun pendukung kegiatan lainnya.

Perkembangan jumlah sarana komunikasi di DIY dari tahun 2008 hingga 2012 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Sarana komunikasi yang ada berupa media cetak, stasiun radio, dan stasiun TV. Pada tahun 2012, di DIY tercatat jumlah media cetak sebanyak 30, stasiun radio sebanyak 57, dan stasiun TV sebanyak 4 sedangkan jumlah wartawan terdaftar sebanyak 250 orang.

Tabel 2.114 Jumlah Media/Sarana Komunikasi di DIY, 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Media Cetak	30	30	30	30	30
Stasiun Radio	57	57	57	57	57
Stasiun TV	4	4	4	4	4
Wartawan Terdaftar	250	250	250	250	250

Sumber : DDA 2013, BPS Provinsi DIY

2.1.6.1.26 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara garis besar kearsipan meliputi meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan (kronologis).

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses sumber belajar, Pemerintah DIY telah mengembangkan layanan perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan, serta perpustakaan keliling. Upaya tersebut dimaksudkan agar proses mencerdaskan kehidupan masyarakat dapat dipercepat.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di bidang pendidikan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Upaya yang ditempuh adalah dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang berstandar nasional ataupun bertaraf internasional, mengembangkan pusat keunggulan ilmiah; penyediaan sumber daya pendidikan yang handal; penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan; menarik minat peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY; mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia; meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya; dan meningkatkan proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi. Dalam posisi inilah, perpustakaan maupun kearsipan memiliki peran strategis bagi peserta didik, pendidik, serta masyarakat di dalam mengembangkan wawasannya melalui perpustakaan.

1. Jumlah Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan sangat didukung oleh keberadaan jumlah perpustakaan. Banyaknya perpustakaan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses perpustakaan dan juga memperbanyak alternatif pilihan bagi pengunjung perpustakaan sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 2.115 Jumlah Perpustakaan di DIY Per Kabupaten/Kota Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	2012	2013
1	Kota Yogyakarta	145	262
2	Bantul	193	385
3	Gunungkidul	182	184

No	Kabupaten/Kota	2012	2013
4	Kulon Progo	126	131
5	Sleman	216	220

Sumber : BPAD DIY

Dari data di atas disimpulkan bahwa ada pertumbuhan jumlah perpustakaan di Kabupaten/kota di DIY cukup baik. Setiap kabupaten/kota mengalami peningkatan jumlah perpustakaan di mana pertumbuhan perpustakaan paling pesat di Kabupaten Bantul.

2. Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Baik buruknya kinerja pelayanan perpustakaan dapat dilihat dari seberapa banyak kunjungan ke perpustakaan.

Tabel 2.116 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah Kunjungan	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	rata-rata kunjungan setiap orang (pemakai) ke perpustakaan
2010	194.118	3.000	65
2011	194.116	2.750	70
2012	201.881	2.500	81
2013	509.964	3.500	145

Sumber: Data Pembangunan Daerah DIY

Tabel tersebut menggambarkan bahwa rata-rata kunjungan setiap orang ke perpustakaan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Usaha selanjutnya adalah bagaimana merencanakan peningkatan kinerja perpustakaan di DIY.

3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY

Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal perpustakaan dituntut untuk menyediakan buku sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Semakin banyak dan semakin lengkap koleksi buku di perpustakaan pasti akan menarik minat masyarakat untuk mendatangnya.

Tabel 2.117 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah DIY

Tahun	Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah
2010	154.355	332.746
2011	179.609	367.095
2012	191.988	388.484
2013	169.683	381.366

Sumber : Data Pembangunan Daerah DIY

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah koleksi jumlah buku di Perpustakaan Daerah dari tahun 2010-2013 meningkat secara signifikan.

4. Layanan Unik Perpustakaan di DIY

Layanan Perpustakaan di DIY mempunyai beberapa keunikan/kekhususan tersendiri yang tidak ditemui di daerah lain. Keunikan layanan perpustakaan di DIY tersebut diantaranya :

- 1) Layanan Center of Excellence. Center of Excellence adalah layanan perpustakaan dan informasi tentang budaya lokal terutama budaya-budaya masyarakat yang berada di wilayah Jawa. Koleksi ini terdiri dari jenis buku dan audio visual dan koleksi ini hanya dipinjamkan hanya boleh dibaca ditempat.
- 2) Layanan Kyoto Corner. Kyoto corner merupakan hasil kerja sama Pemerintah Daerah DIY dengan Prefektur Kyoto, diresmikan tanggal 17 Oktober 2010 oleh wakil Gubernur DIY Pakualam IX dan Gubernur Prefektur Kyoto Keiji Yamada dalam rangka memperingati hanya dibaca ditempat, jumlah koleksi ada 481 judul, 581 eksemplar.
- 3) Layanan Yogyasiana Berisi koleksi buku tentang Yogyakarta, hanya dibaca ditempat.
- 4) Layanan Pustaka Nusantara Koleksi pustaka nusantara terdiri dari buku, majalah, audio visual berisi tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia. Koleksi ini hanya dibaca di tempat.

5. Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah juga mendorong peningkatan perpustakaan desa/kelurahan. Diharapkan berkembangnya perpustakaan desa/kelurahan mampu meningkatkan daya baca masyarakat, khususnya bacaan yang sesuai dengan berbagai aktivitas kesehariannya. Di samping itu juga menciptakan masyarakat DIY yang intelek, serta mempunyai pengetahuan global.

Tabel 2.118 Persentase Perpustakaan Desa di DIY Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Desa/ Kelurahan	% Desa/ Kelurahan yang sudah memiliki Perpustakaan	% Desa/ Kelurahan yang belum memiliki Perpustakaan
1	Kota Yogyakarta	45	45	100	0
2	Bantul	75	60	80	20
3	Gunungkidul	144	110	76,39	23,61
4	Kulon Progo	88	71	80,68	19,32
5	Sleman	86	66	76,74	23,26
	Jumlah	438	352	80,37	19,63

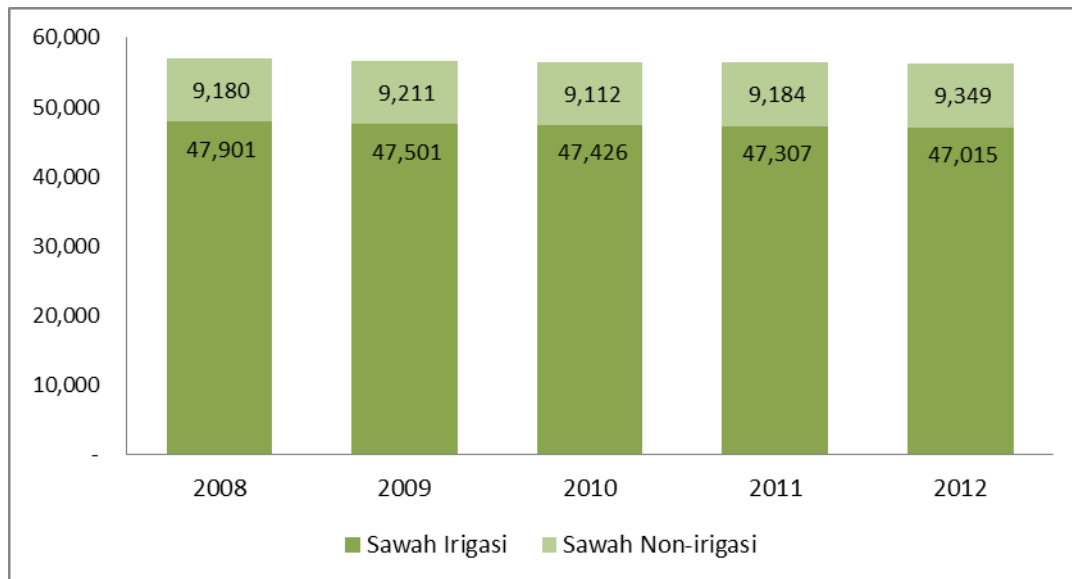
Sumber : BPAD DIY

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari jumlah keseluruhan desa/kelurahan di DIY 438 desa/kelurahan, sebanyak 233 atau lebih dari 50 persen desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan. Tentunya dibutuhkan dukungan berbagai pihak supaya setiap desa/kelurahan mempunyai perpustakaan yang manajemennya baik yang bisa dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa/kelurahan.

2.1.6.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.6.2.1 Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis bagi DIY. Sektor pertanian memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Bagi DIY, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY yang menempati posisi ketiga setelah sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasa-jasa. Dalam rentang waktu 2008-2012 kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan. Akibat kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan laju 0,31% per tahun selama kurun waktu 2008-2012. Alih fungsi lahan itu lebih banyak terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Bantul dan Sleman. Fakta tersebut tetap merupakan tantangan cukup berarti dalam pembangunan sektor pertanian ke depan, yang juga dibayang-bayangi dengan problem semakin rendahnya kualitas & kuantitas SDM produktif, harga yang tidak stabil, anomaly iklim, dan skema jejaring pasar yang tidak berpihak pada petani.

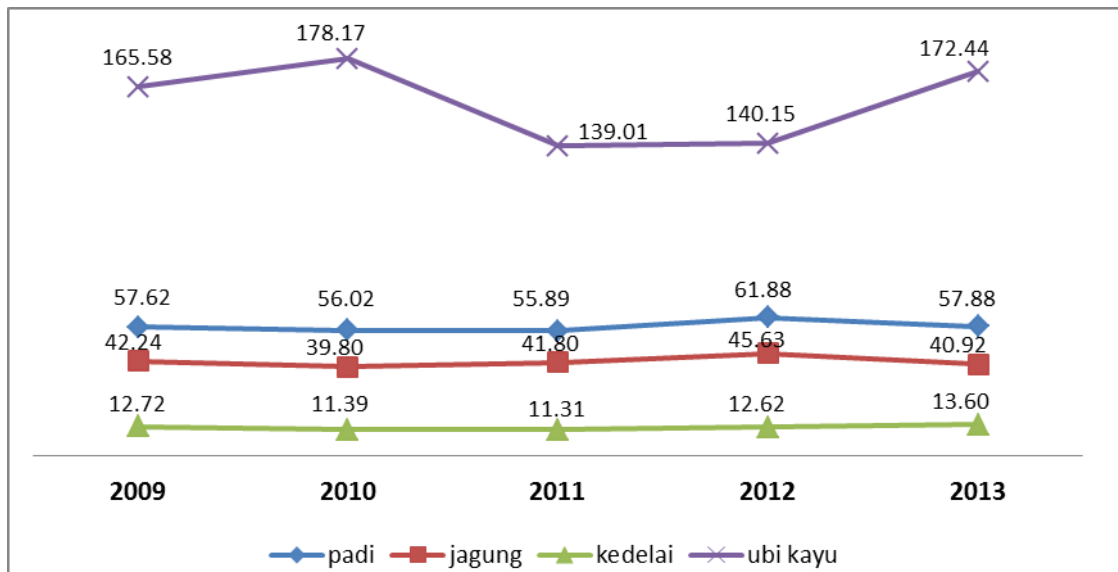


Sumber: analisa data BPS Provinsi DIY

Gambar 2.53 Luas Sawah di DIY Yang Cenderung Menurun, 2008-2012

Arahan pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan, ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara wilayah. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi renaissans pangan yang berintegrasi dengan strategi renaissans ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat.

Upaya strategis yang terus digiatkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sub sector tanaman pangan, diantaranya melalui upaya peningkatan produktifitas. Data menunjukkan produktifitas sub sektor tanaman pangan di DIY mempunyai capaian yang cukup tinggi, terutama komoditas padi. Capaian produktifitas komoditas padi bahkan berada di atas rerata nasional. Selain itu, produktifitas tinggi juga ditemui pada komoditas ubi kayu. Luasan lahan kering yang cukup dominan di DIY memberikan implikasi bahwa produksi ubi kayu di DIY memberikan hasil yang sangat tinggi di DIY. Adapun, capaian produktivitas komoditas tanaman pangan unggulan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: Analisa Data BPS Provinsi DIY

Gambar 2.54 Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu DIY, 200-2013

Wilayah DIY juga merupakan sentra tanaman sayuran terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai besar. Kedua komoditas tersebut memiliki luasan panen terluas dari total 16 komoditas sayuran di DIY atau memiliki besaran areal sebesar 57% pada tahun 2012. Untuk bawang merah sebagian besar menjadi komoditas unggulan daerah Bantul (67%) dan Kulon Progo (26%). Sedangkan untuk komoditas cabe besar menjadi sentra pada wilayah Kulonprogo (53.48%) dan Sleman (25.68%). Peningkatan produktifitas yang berpengaruh pada peningkatan produksi menunjukkan bahwa aspek teknis budidaya komoditas tanaman sayuran senantiasa mengalami peningkatan dengan dukungan lahan yang subur, ketinggian yang memadai, pengairan yang cukup, dan iklim/temperatur yang cocok. Salah satu problem dalam pengembangan komoditas sayuran adalah fenomena anomaly iklim, yang mengakibatkan tingkat cekaman yang tinggi dan munculnya hama penyakit serta turunnya harga akibat dari kualitas panen yang buruk.

Adapun potensi komoditas buah-buahan dijumpai pada semua kabupaten/kota di DIY. Sekurangnya terdapat 20 komoditas buah-buahan yang dibudidayakan pada wilayah DIY. Sebagaimana komoditas sayuran, sebagian besar komoditas buah-buahan banyak dijumpai pada Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Tiga besar produksi buah-buahan di DIY pada tahun 2012, secara berturut-turut diantaranya adalah : pisang (193.861 ton), mangga (35.858 ton), dan salak (31.955 ton). Komoditas salak merupakan andalan pada Kabupaten Sleman dan buah pisang menjadi tanaman andalan bagi Kabupaten Kulonprogo.

Sementara itu, untuk sub sektor peternakan, wilayah DIY memiliki sebaran ternak besar maupun kecil pada sejumlah kabupaten dan kota. Untuk ternak besar pada wilayah DIY, sebagian besar atau 98% terdiri atas jenis sapi potong, kambing, dan domba. Konsentrasi sapi potong dan kambing pada wilayah DIY didominasi pada Kabupaten Gunungkidul. Namun, selama 2012-2013, populasi ternak sapi potong di DIY cenderung tertekan karena pengeluaran dan pemotongan ternak sapi potong di DIY, tidak seimbang dengan pemasukan ternak sapi potong ke DIY. Sementara itu, populasi ternak unggas di DIY cenderung meningkat, terutama untuk ayam kampung dan ayam ras yang populasinya banyak ditemui pada Kabupaten Sleman.

Wilayah DIY yang memiliki luasan lahan kering dengan kontur yang bergelombang (berbukit/bergunung) menunjukkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, diantaranya : kelapa, kakao, kopi, tembakau, tebu, dan seterusnya. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut, memiliki cakupan luas yang cukup besar, prospek pasar yang potensial, memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu).

Tabel 2.119 Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY 2009-2013

Komoditas Perkebunan Strategis (Ha)	2009	2010	2011	2012	2013
Kelapa	43,172.84	42,939.27	42,903.95	43,371.38	43,815.39
Kakao	4,546.15	4,618.81	4,693.39	4,811.00	5,012.15
Kopi	1,652.91	1,371.98	1,407.44	1,778.84	1,725.92
Tembakau	2,093.77	1,731.50	2,154.86	2,209.52	2,310.90
Tebu	3,669.99	3,476.29	3,620.60	3,613.13	3,602.66

Sumber: analisa data Dishutbun DIY & BPS Provinsi DIY

Untuk itu, desain agribisnis perkebunan yang berdaya saing dengan nilai tambah yang berkelanjutan, akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, perbaikan produktifitas dan penanganan mutu produk yang dihasilkan, focus pada pengolahan produk yang memiliki nilai tambah, dan upaya pemasaran hasil yang memadai melalui branding yang tepat, serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai. Penerapan agribisnis ini dapat diciptakan apabila kegiatan yang

dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna dan penguatan tingkat kemampuan petani serta kelembagaan petani dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis yang memadai.

Efisiensi usaha tani dalam rangka penguatan desain agribisnis diharapkan dapat tercapai apabila produksi yang optimal dapat diimbangi dengan biaya produksi yang efisien. Pemanfaatan peluang pasar yang baik bisa dicapai melalui penanganan pengolahan hasil melalui integrasi nilai tambah yang sesuai dengan selera pasar, penguatan system informasi, dan branding produk yang berkelanjutan. Harapannya, aspek keterbatasan yang dimiliki DIY, terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di DIY, maka langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk mampu memenuhi permintaan dan selera pasar.

2.1.6.2.2 Urusan Kehutanan

Wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2013 sebesar 23,58% dari luas wilayah DIY atau seluas 75.120,31 Ha (analisa data Dishutbun DIY). Dari luas tersebut, 17,71% merupakan hutan rakyat (sangat dominan) dan sisanya 5,87% merupakan hutan negara. Keberadaan wilayah hutan (baik hutan rakyat dan hutan negara) pada wilayah DIY, sangat dominan ditemui pada wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki peran sebagai wilayah hulu dari DAS Opak (sub DAS Oya). Luasan hutan pada Kabupaten Gunungkidul sebesar 58.622,43 ha, terdiri dari 41.953,93 ha (hutan rakyat) dan 16.668,50 ha (hutan negara, termasuk hutan AB). Luasan hutan di Kabupaten Gunungkidul sangat strategis karena memiliki proporsi dominan sebesar 62,47 % dari luas hutan total di DIY, dengan segenap persoalannya, seperti : adanya lahan kritis, ancaman pencurian hasil hutan, potensi bencana alam, dan ancaman kebakaran hutan.

Tabel 2.120 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2013

Kabupaten	Hutan Negara (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Total Hutan (Ha)	% Total hutan
Gunungkidul	14.895,50	41.953,93	56.849,43	60,58
Bantul	1.052,60	8.570,00	9.622,60	10,25
Sleman	1.729,46	4.418,69	6.148,15	6,55
Kulonprogo	1.037,50	20.177,69	21.215,19	22,62
HUTAN di DIY	18.715,06	75.120,31	93.835,37	100,00

Sumber : analisa data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2014

RKPD Tahun 2015

Berdasarkan wilayah administrasi kehutanan, kawasan hutan negara tersebar pada 4 wilayah yaitu Kabupaten Gunungkidul seluas 14.895,50 Ha (ditambah 1.773 ha sebagai wilayah hutan AB), Kabupaten Bantul 1.052,60 Ha, Kabupaten Sleman 1.729,46 ha dan Kabupaten Kulon Progo seluas 1.037,50 Ha. Sedangkan berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas : hutan produksi 13.411,70 Ha, Hutan lindung 2.312,80 Ha, Hutan konservasi 2.990,56 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,60 Ha). Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts-II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB dikelompokkan menjadi hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi di DIY memiliki kekhususan dibandingkan wilayah lain karena dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dishutbun DIY). Potensi hutan produksi (13.411,70 ha) di DIY didominasi oleh tanaman jati (50,79%) dan tanaman kayu putih (34,32%). Saat ini, hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Problem pengembangan tanaman kayu putih di DIY adalah produktifitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat setempat dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 2.121 Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2009-2013

Tahun	Produksi daun (ton)	Produksi MKP (liter)	Nilai Pejualan (Rp.)
2009	4,300.00	41,082.60	4,050,406,200.00
2010	4,800.00	43,352.00	5,028,309,000.00
2011	4,950.00	44,957.00	6,110,306,400.00
2012	4,794.48	46,321.00	7,581,090,000.00
2013	4,743.77	44,669.00	7,330,657,000.00

Sumber : analisa data Dishutbun DIY, 2014

2.1.6.2.3 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Ratio elektrifikasi DIY pada tahun 2012 tercapai 76,80%, meningkat sebesar 0,59% dari tahun 2011 (DPU-P dan ESDM, 2013). Pada tahun 2012, jumlah Rumah tangga tercatat 1.037.976 RT, dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD pada tahun 2012, dapat dilaksanakan penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 225 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,023% dari target sebesar 0,015 %. Sedangkan melalui dana APBN jumlah rumah tangga ber listrik

meningkat sebanyak 5.851 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,564%. Sasaran bagi intervensi program ini adalah 238 dusun yang sebagian besar rumah tangga nya belum berlistrik terutama di wilayah-wilayah yang terpencil yang pada umumnya belum berkembang.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD DIY tahun 2013, dapat dilakukan penambahan RT berlistrik sebanyak 955 RT, sedangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Sleman tahun 2013 dapat dilakukan penambahan RT berlistrik sebanyak 189 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,107%. Melalui dana APBN 2013, jumlah RT yang dapat dilistriki sebanyak 39.674 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 3,695%. Sehingga total pencapaian ratio elektrifikasi di DIY sampai dengan tahun 2013 mencapai 80,6% dari target sebesar 77,4%.

Kapasitas energi listrik yang telah dibangkitkan melalui program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2012 sebesar 47 kW, sehingga total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan sebesar 629,35 kW. Angka ini meningkat 0,47% dari target sebesar 0,30% dari angka di tahun 2011 dengan total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan baru sebesar 582,35 kW dari total potensi 10.000 kW. (10 MW). Capaian pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di DIY pada tahun 2013 yang diperoleh dari tenaga air sebesar 630 kW atau 8.674,84 SBM, tenaga surya 37 unit atau setara dengan 101,89 SBM, biogas sebanyak 82 unit atau mencapai 262,91 SBM, tenaga hybrid surya dan angin 20 kW atau sama dengan 275,39 SBM. Total dari keseluruhan program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2013 telah dicapai penyediaan EBT sebesar 114.035,02 SBM dari target sebesar 107.790 SBM.

Kegiatan konservasi energi yang diamanatkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait konservasi energi dilakukan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi. Program ini bertujuan untuk melakukan implementasi dan penerapan konservasi energi dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas.

Sampai dengan tahun 2013, target pelaksanaan konservasi energi melalui audit energi di DIY sebesar 3,33% (5 gedung pemerintah) dari 150 gedung pemerintah DIY. Dari pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2013, Pemda DIY yang didukung oleh APBN telah melakukan audit energi di Dinas PUP-ESDM DIY Bumijo,

RKPD Tahun 2015

Gedung Setda Kota Yogyakarta; Balai IPAL Sewon, Bantul; Rumah Sakit Ghrasia, Pakem, Sleman dan PD Tarumartani.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012, pemenuhan air baku di daerah sulit air tercapai sebesar 6% sesuai target kinerja tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 6%, salah satunya dicapai melalui pembangunan sumur bor air tanah dalam di daerah sulit air. Sampai dengan tahun 2013, sudah terbangun sumur bor di 15 lokasi dari total 46 lokasi daerah sulit air.

Produksi dari 7 (tujuh) mineral non logam dan batuan pada tahun 2012 yang banyak diusahakan di DIY saat ini adalah sirtu/pasir dengan produksi 741.783 m³, batu gamping/kapur dengan produksi 146 m³, tanah liat dengan produksi 789 m³, andesit dengan produksi 109.280 m³, zeolit dengan produksi 350 m³, breksi batuapung dengan produksi 600 m³, dan tanah urug dengan produksi 70.463 m³. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012, total peningkatan nilai produksi bahan gali dari 7 mineral non logam dan batuan sebesar 551,39 juta Rupiah atau meningkat 1,84 % dari target yang hanya sebesar 0,37 %. Pada tahun 2013, Pemda DIY melakukan peningkatan nilai tambah komoditas tambang batu andesit 1 (satu) lokasi di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo sehingga kinerja pengelolaan usaha pertambangan di tahun 2013 mencapai sebesar 9%.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar pada tahun 2012, realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tercatat jenis premium 504.632 KL atau 99,7% dari kuota, solar 130.527 KL atau 108,8% dari kuota, serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 61.961,06 Ton atau 102,8% dari kuota. Kuota solar untuk tahun 2013 di DIY adalah sebesar 126.166 KL atau menurun sebesar 3% dari kuota di 2012, sedangkan untuk premium kuota naik sebesar 3% dari tahun sebelumnya atau sebesar 521.374 KL. Kelancaran distribusi Bahan Bakar Bersubsidi didukung melalui koordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, Kabupaten/Kota, PT. Pertamina (Persero), dan HISWANA MIGAS DIY.

Pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 93 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi melalui 43 agen anggota Hiswana Migas DIY beserta 3.130 pangkalannya. Dari keseluruhan penyalur bahan bakar bersubsidi tersebut, terdapat 600 penyalur yang perlu ditingkatkan kinerja kelancaran distribusinya.

Upaya peningkatan kinerja Pengelolaan Bahan Bakar dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi. Sampai tahun 2012 telah dilakukan pembinaan terhadap 180 penyalur (30%). Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap 90 penyalur yang kinerja kelancaran distribusinya belum optimal, sehingga sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan peningkatan kelancaran distribusi terhadap 270 penyalur (45%).

2.1.6.2.4 Urusan Pariwisata

Perkembangan jumlah wisatawan dilihat dari wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi penginapan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013. Jumlah Wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 2.837.962 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara 2.602.074 orang dan wisatawan mancanegara 235.888 orang. Secara keseluruhan jumlah tersebut meningkat sebesar 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Lima besar wisatawan mancanegara yang mengunjungi DIY adalah Belanda, Malaysia, Perancis, Jepang dan Jerman.

Tabel 2.122 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,98	1,94	1,98	1,82	1,90
lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,74	1,70	1,72	1,56	1,59
Jumlah Wisatawan (Orang)	1.426.057	1.456.980	1.608.194	2.215.832	2.837.962
a. Wisatawan Nusantara	1.286.565	1.304.137	1.438.629	2.013.314	235.888
b. Wisatawan Mancanegara	139.492	152.843	169.565	202.518	2.602.074

Sumber: Dinas Pariwisata DIY

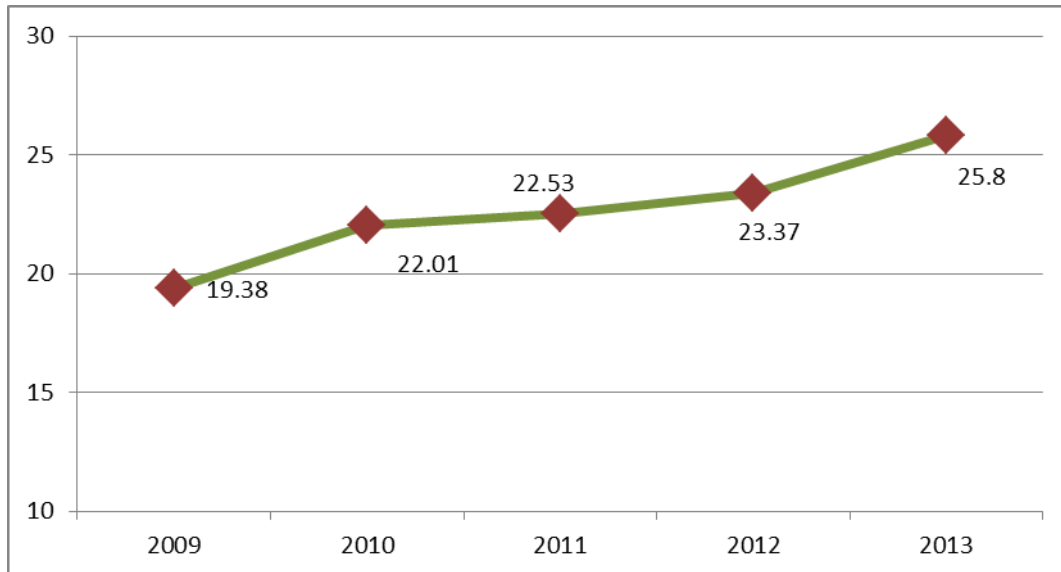
Angka kunjungan yang meningkat dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan perkembangan sektor kepariwisataan yang menggembirakan. Akan tetapi, ada dua isu strategis, yaitu rendahnya angka kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY dan tidak meratanya sebaran kunjungan dari segi waktu kunjungan (berpuncak pada long weekends dan libur lebaran dan sekolah) dan destinasi wisata yang dikunjungi

(sehingga mengancam carrying capacity destinasi-destinasi tertentu). Dilihat dari kunjungan ke destinasi wisata, konsentrasi kunjungan masih ada pada Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Sementara itu, pada tahun 2013 jumlah pengunjung destinasi wisata di kabupaten/kota meningkat 22,01% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 jumlah pengunjung daya tarik wisata (DTW) sebesar 11.379.640 orang, sementara untuk tahun 2013 berhasil dicapai 13.883.950 orang pengunjung. Hal ini menunjukkan DTW di wilayah DIY terus dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pertumbuhan pariwisata DIY juga didorong peningkatan penyelenggaraan Meetings Incentives Conferencing Exhibitions (MICE) . Tercatat pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan 13.695 MICE di hotel berbintang DIY. Jumlah ini meningkat 6,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan infrastruktur hotel dan ruang pertemuan lainnya yang semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Pertumbuhan MICE yang cukup baik ini menjadikan DIY berpeluang untuk menjadi pusat penyelenggara MICE baik tingkat nasional maupun regional.

2.1.6.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Pemenuhan kebutuhan akan protein hewani, khususnya ikan, dapat dilihat dengan adanya peningkatan ketersediaan ikan per kapita untuk dikonsumsi dari tahun ke tahun. Ketersediaan ikan per kapita DIY selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di DIY yang terus bertumbuh walaupun masih disertai dengan adanya pasokan ikan yang masuk ke wilayah DIY dari luar daerah. Pertumbuhan ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



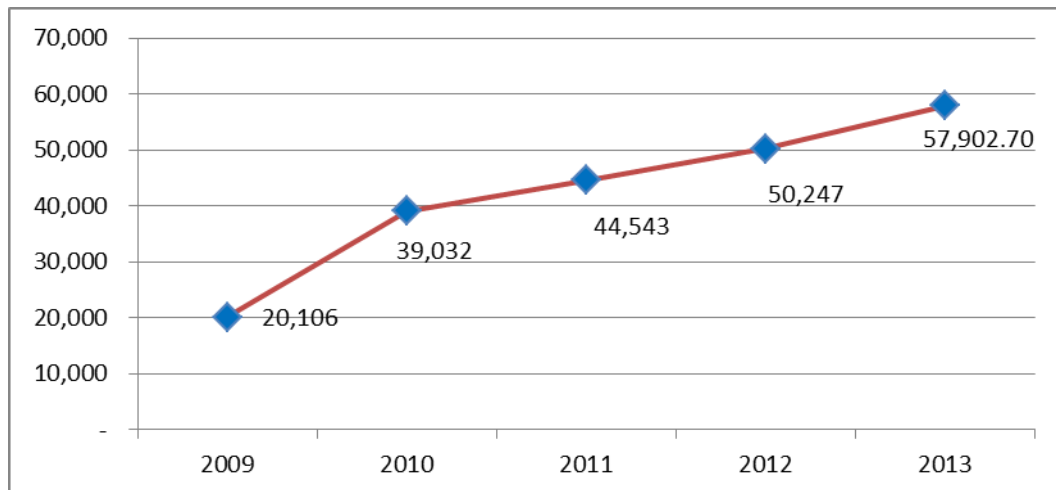
Ket: tahun 2013 Angka Sementara

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (diolah)

Gambar 2.55 Tingkat Konsumsi Ikan DIY (Kg/Kapita/Tahun), 2009-2013

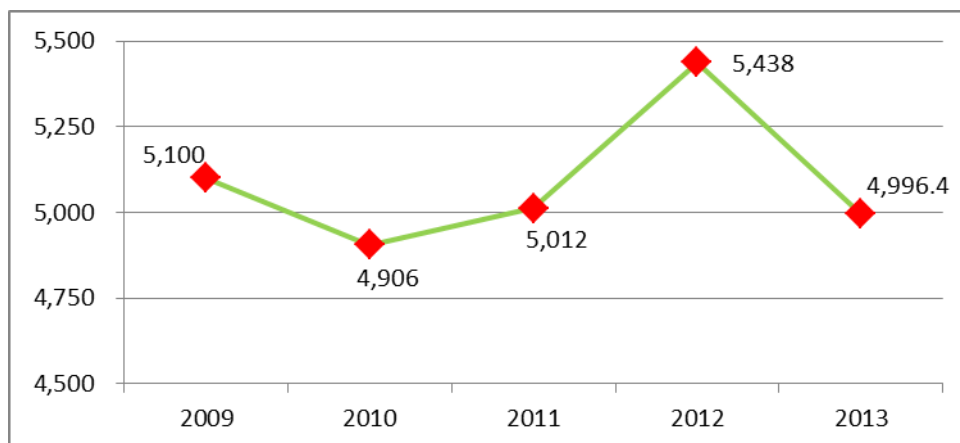
Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan DIY terus mengalami peningkatan sejak tahun 2009. Jumlah produksi perikanan DIY selama periode 2009-2013 rata-rata tumbuh sebesar 28,11%.

Produksi perikanan di DIY didominasi oleh perikanan budidaya. Rata-rata kontribusi perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan DIY selama lima tahun terakhir mencapai 88,16%, bahkan pada tahun 2013 mencapai 92,06%. Sementara kontribusi perikanan tangkap cenderung menurun dari 20,23% pada tahun 2009 menjadi 7,94% pada tahun 2013. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan sering terjadinya *over fishing* dan *illegal fishing* serta belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap. Namun demikian, faktor cuaca adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY dikarenakan menyebabkan berkurangnya jumlah trip nelayan melaut.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (diolah)

Gambar 2.56 Produksi Perikanan Budidaya DIY (Ton), 2009-2013



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (diolah)

Gambar 2.57 Produksi Perikanan Tangkap DIY (Ton), 2009-2013

2.1.6.2.6 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor strategis bagi DIY yaitu sebagai penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB setelah sektor jasa-jasa. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di DIY karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya. Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY selama tahun 2009 hingga 2013 dapat dilihat pada perkembangan ekspor. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2013 tercatat 211,76 US\$. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh 5 (lima) komoditas utama ekspor

yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit (stk), stk sintetis dan kerajinan kulit. Tujuan ekspor komoditas DIY terutama pada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia dan Korea Selatan.

Tabel 2.123 Perkembangan Ekspor DIY

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Volume (Juta kg)	31	35	27	33,54	34,03
Nilai (Juta US \$)	109	140	144	177,07	211,76
Komoditi	106	116	102	108	127
Negara	99	93	87	98	111
Eksportir	270	251	208	235	286

Sumber: Dinas Indagkop & UKM

Sementara itu, perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri tercatat pada tahun 2009-2013 secara umum mengalami perkembangan positif, yaitu terlihat dari perkembangan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan jumlah pasar di DIY. Realisasi jumlah penerbitan SIUP sepanjang tahun 2013 sebanyak 1.873 buah, sehingga jumlah kumulatif menjadi 43.818 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh pengusaha mikro dan kecil sebesar 91,59%.

Tabel 2.124 Perkembangan Jumlah Kumulatif SIUP Yang Terdaftar di DIY

No	Golongan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pengusaha Besar	756	910	988	1.040	1.057
2	Pengusaha Menengah	1.548	1.820	1.999	2.316	2.629
3	Pengusaha Kecil	33.425	35.298	36.607	38.589	40.132
Jumlah		35.729	38.028	39.594	41.945	43.818

Sumber: Dinas Indagkop & UKM

Perkembangan sektor perdagangan DIY, didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Perkembangan sarana perdagangan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah toko modern hingga tahun 2013 sejumlah 416 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 333 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian.

Tabel 2.125 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional

Jenis Toko	2009	2010	2011	2012
Toko Modern	350	405	405	416
Pasar Tradisional	336	308	308	333
Jumlah	686	713	713	749

Sumber: Dinas Indagkop & UKM

2.1.6.2.7 Urusan Industri

Kontribusi sektor industri pengolahan pada struktur PDRB DIY mencapai 13,77% pada tahun 2013. Dengan kontribusi sebesar itu, sektor Industri menempati urutan ke empat setelah sektor Jasa, Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Pertanian. Industri di DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dilihat dari pertumbuhan unit usaha, jumlah IKM mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2013. Jumlah unit usaha pada tahun 2013 sebanyak 84.234 unit atau meningkat sebesar 3,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan penyerapan tenaga kerja yang meningkat sebesar 3,21% pada tahun 2013 sehingga sebanyak 310.173 orang terserap dalam sektor industri pengolahan.

Tabel 2.126 Perkembangan IKM di DIY

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Unit Usaha	77.851	78.122	80.056	81.523	84.234
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	291.391	292.625	295.461	300.539	310.173
Nilai Investasi (Rp Milyar)	871.11	878.063	1.003.678	1.010.585	1.064.180
Nilai Produksi (Rp Milyar)	2.325.582	2.821.218	3.053.031	3.199.224	3.294.485
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp Milyar)	1.251.173	1.358.293	1.352.479	1.388.023	1.449.435

Sumber: Dinas Indagkop & UKM

Meskipun indikator tersebut di atas menunjukkan perkembangan yang positif, namun perlu adanya perhatian khusus terkait pengembangan sektor industri mengingat pada tahun mendatang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah berlaku. Terbukanya pasar perdagangan bebas di ASEAN menjadi tantangan bagi DIY apakah produk-produk IKM dapat bersaing dengan produk dari negara lain di ASEAN. Untuk itu perlu dioptimalkan kembali program-program terutama terkait dengan peningkatan daya saing produk seperti penjaminan mutu, sertifikasi dan standarisasi.

2.1.6.2.8 Urusan Ketrasmigrasian

Program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya , peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tapi juga meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dalam meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi dengan diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Berhak memperoleh bantuan berupa informasi lokasi tujuan, pelatihan, perbekalan, pelayanan pengangkutan sampai tujuan, lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah, sarana prasarana di daerah penempatan dan fasilitasnya serta pembinaan pengembangan usaha.

Ada 3 (tiga) jenis Transmigrasi (UU 15/1997 dan UU 29/2009 tentang Ketrasmigrasian) yaitu ;

1. Transmigrasi Umum (TU) adalah Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) adalah Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) adalah Transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Hingga kurun 2008 – 2013. Pemerintah DIY telah memberangkatkan transmigrasi total sebanyak 1.036 KK, yaitu masing-masing 205 KK pada tahun 2008, 223 KK pada tahun 2009, 175 KK pada tahun 2010, 125 KK pada tahun 2011, 158 KK pada tahun 2012 dan 150 KK pada tahun 2013 selain itu juga DIY telah melaksanakan program transmigrasi local. Pemerintah DIY juga melakukan kegiatan Pelatihan Dasar Umum (PDU) untuk semua transmigran yang akan diberangkatkan

ke masing-masing lokasi tujuan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan di lokasi penempatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, sampai saat ini ada 1.193 KK animo yang ingin bertransmigrasi dan 814 KK yang sudah terdaftar sebagai calon transmigrasi dari DIY dan menunggu untuk diberangkatkan.

Untuk mempermudah evaluasi transmigrasi, perlunya pemerintah menetapkan kriteria daerah tujuan dan tolak ukur keberhasilan transmigrasi dengan lebih jelas. Komitmen daerah penempatan dalam pengusulan program pembangunan transmigrasi baru harus benar-benar sudah memenuhi kriteria kelayakan program yaitu 2C (Clear & Clean) dan 4L (layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan), adanya kejelasan status lahan dan tidak adanya tumpang tindih peruntukan lahan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari. Berkaitan dengan adanya otonomi daerah di Indonesia pelaksanaannya harus mengakomodasikan program ini yang antara lain dengan mengedepankan peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijaksanaan penempatan transmigrasi.

2.1.7 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.7.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.7.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Selama periode 2008-2012, pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita DIY cenderung mengalami kenaikan. Pengeluaran konsumsi RT per kapita DIY tahun 2012 sebesar 27,528 juta rupiah atau meningkat sebesar 55,24% dibandingkan tahun 2008. Sementara itu rata-rata pengeluaran konsumsi Rumah Tangga per kapita tumbuh sebesar 11,64%.

Tabel 2.127 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Total Pengeluaran RT (dalam juta rupiah)	18.100.621	20.610.786	23.198.864	26.319.415	29.350.917
2.	Jumlah RT	1.020.842	1.049.587	1.046.873	1.041.925	1.066.280
3.	Pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita (dalam juta rupiah)	17,731	19,637	22,160	25,260	27,528

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah)

Pengeluaran rata-rata per kapita menurut golongan pengeluaran di DIY pada tahun 2008 hingga 2012 mengalami pergeseran. Jumlah rumah tangga dengan golongan pengeluaran di bawah 500 ribu rupiah cenderung mengalami penurunan sedangkan jumlah rumah tangga dengan golongan pengeluaran lebih besar dari 500 ribu rupiah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan pendapatan di tingkat rumah tangga.

Tabel 2.128 Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di DIY, 2008-2012

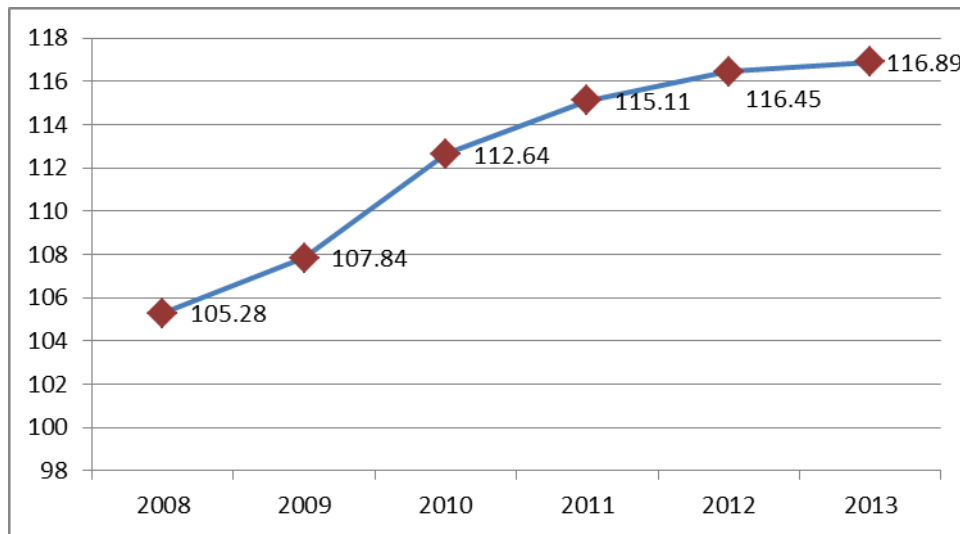
Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan	Jumlah Rumah Rangka				
	2008	2009	2010	2011	2012
< 100.000	1.206	693	193	-	10
100.000 – 149.999	33.876	17 831	8.821	7.495	6.873
150.000 – 199.999	82.121	82 671	59.040	46.381	35.259
200.000 – 299.999	161.777	230 077	217.222	175.341	172.813
300.000 – 499.999	339.546	316 194	328.385	302.419	283.642
≥ 500.000	402.136	402 121	433.212	510.289	567.685

Sumber: DDA DIY 2009-2013

2.1.7.1.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

NTP DIY selama kurun waktu 2008-2013 menunjukkan adanya trend yang meningkat, dimana tahun 2008 tercatat sebesar 105,28 dan kemudian menjadi 116,89 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan pilihan mata pencarian yang menguntungkan bagi masyarakat DIY. Terlebih dengan penajaman peran subsistem agribisnis hilir (pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian) yang mampu memberikan nilai tambah sangat signifikan.



Ket: NTP tahun 2013 merupakan rata-rata NTP bulan Januari sd. November
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2007-2013

Gambar 2.58 Nilai Tukar Petani DIY, 2008-2013

Mulai Desember 2013, perhitungan NTP yang dikeluarkan BPS menggunakan tahun dasar tahun 2012 (2012=100), menggantikan bulan-bulan sebelumnya yang masih menggunakan tahun dasar penghitungan tahun 2007. Pada Desember 2013, NTP DIY mencapai angka 103,15. Hal ini berarti mengalami peningkatan dibandingkan NTP tahun 2012. Pertumbuhan NTP yang signifikan menggambarkan derajat kesejahteraan petani yang semakin baik apabila tingginya daya beli petani dipicu oleh faktor produktivitas yang stabil atau meningkat, serta permintaan yang tinggi.

Data perkembangan NTP pada bulan Januari selama 2009-2013 menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan nilai NTP di DIY untuk semua sub sektor pertanian kecuali peternakan. Subsektor hortikultura merupakan subsektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar 5,94%. Hal ini dikarenakan subsektor hortikultura mengembangkan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi diantaranya sayur, buah, dan tanaman hias. Sementara itu, subsektor peternakan justru mengalami pertumbuhan yang negatif dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar -0,37%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan populasi ternak yang diiringi dengan kebijakan impor sapi.

Tabel 2.129 Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnya di DIY 2009-2013 (Januari)

NTP Sektor/Sub sektor	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
NTP Pertanian	104.62	110.29	113.89	116.50	116,98
NTP Pertanian Pangan	102.88	109.45	113.52	117.11	117,05
NTP Hortikultura	103.64	117.56	127.30	128.96	129,91
NTP Perkebunan Rakyat	118.11	115.90	121.44	123.62	123,81
NTP Peternakan	107.24	106.16	103.66	103.79	105,61
NTP Perikanan	110.18	112.28	112.69	113.79	115,64

Sumber : Analisa Data BPS Provinsi DIY

2.1.7.1.3 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan per Kapita dari tahun 2008 hingga tahun 2012 cenderung meningkat. Pengeluaran Konsumsi per Kapita pada tahun 2012 meningkat sebesar 19,07% dibandingkan tahun 2008. Peningkatan tersebut karena terjadi kenaikan baik dari pengeluaran komoditas makanan maupun non makanan.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Proporsi rata-rata pengeluaran non makanan selama kurun waktu lima tahun sebesar 57,13% dan sisanya sebesar 42,87% untuk komoditas makanan.

Tabel 2.130 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY, 2008-2012

Tahun	Pengeluaran Makanan	Pengeluaran Non Makanan	Pengeluaran Total
2008	239.447	371.184	610.631
2009	206.689	258.322	465.011
2010	244.004	309.963	553.967
2011	276.323	348.721	625.044
2012	308.587	418.516	727.103

Sumber: DDA BPS Provinsi DIY

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan selama tahun 2009-2012 mengalami fluktuasi. Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan, dan Air; Kelompok Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala; serta Kelompok Pajak Pemakaian dan Premi Asuransi mempunyai rata-rata pertumbuhan yang negatif selama kurun waktu 4 tahun. Sedangkan di sisi lain, Kelompok Barang dan Jasa; Kelompok Barang Tahan Lama; serta Kelompok Keperluan Pesta dan

RKPD Tahun 2015

Upacara mengalami rata-rata pertumbuhan positif. Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi di Kelompok Barang Tahan Lama yaitu sebesar 9,59%.

Tabel 2.131 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY, 2009-2012

Kelompok	Nilai (Rupiah)			
	2009	2010	2011	2012
1. Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	160.063	109.997	121.996	135.795
2. Barang-Barang & Jasa	183.534	124.291	151.625	170.509
3. Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	25.538	15.912	14.128	20.967
4. Barang Tahan Lama	70.084	40.722	34.823	64.473
5. Pajak Pemakaian & Premi Asuransi	16.939	10.601	12.348	14.191
6. Keperluan pesta dan upacara	15.267	8.440	13.802	12.580
Jumlah	471.425	309.963	625.044	727.102

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2013

Proporsi terbesar dalam pengeluaran konsumsi Rumah Tangga non makanan adalah Kelompok Barang dan Jasa dengan rata-rata proporsi selama 4 tahun sebesar 40,81%. Kemudian disusul oleh Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan, dan Air dengan rata-rata proporsi selama 4 tahun sebesar 34,22%. Proporsi ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non makanan sebagian besar diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Di sisi lain, Kelompok Keperluan Pesta dan Upacara merupakan kelompok dengan proporsi terkecil sebesar 3,23%.

2.1.7.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.7.2.1 Pekerjaan Umum

a. Panjang Jalan

Berdasarkan Data Pembangunan Daerah tahun 2009–2013 dapat diketahui tingkat pelayanan jalan berdasarkan untuk semua jalan di DIY berdasarkan kelas dan kondisi, sebagai berikut:

Tabel 2.132 Panjang Jalan Berdasarkan Kelas dan Kondisi dalam Km

Panjang Jalan Berdasarkan Kelas dan Kondisi	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Panjang Jalan Berdasarkan Kelas					
1. Jalan Nasional	168.61	168.61	223.16	223.16	223.16
2. Jalan Propinsi	690.25	690.25	690.25	619.34	619.34
3. Jalan Kabupaten	4040.8	4040.8	4040.8	4040.8	3.656.23
Panjang Jalan Berdasarkan kondisi					
1. Jalan Baik	1.733.83	1.812.75	1.815.91	2.010.35	2.215.17
2. Jalan Sedang	1.763.87	1.656.83	1495.10	1.353.47	1.369.71
3. Jalan Rusak Sedang	891.52	816.96	764.48	739.50	741.60
4. Jalan Rusak Berat					
5. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	145.00	243.95	257.40	243.16	243.16
	35.04	36.32	38.56	42.45	54.98

Sumber: Dinas PUP & ESDMDIY, 2011

b. Jaringan Irigasi

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi bagi pertanian, dilakukan upaya penyediaan air melalui kegiatan perencanaan teknis prasarana jaringan irigasi, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi seluas 17.112,87 ha yang tersebar pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah DIY di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul, meliputi 44 daerah irigasi.

c. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di wilayah DIY

Pengelolaan sampah di DIY dilakukan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Pada tahun 2012 melalui fasilitasi pendanaan APBN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan APBD telah dibangun 5 Unit TPST 3R serta penyediaan alat berat di TPA *Sanitary Landfill* di Kab. Gunungkidul.

Kondisi capaian kumulatif jumlah TPA Sampah yang menggunakan Sistem *Sanitary Landfill* sampai tahun 2012 adalah sebanyak 2 lokasi yang diantaranya dilakukan dengan Program Pengelolaan Persampahan dan pembangunan TPA *Sanitary landfill* dengan pendanaan bersama-sama antara APBD kabupaten/ kota dan APBN melalui

Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

d. Identifikasi Genangan

Sistem drainase tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berhubungan dengan subbidangs infrastruktur lainnya, seperti perumahan, jalan perkotaan, dan pengembangan kawasan baru. Penyelesaian permasalahan genangan di suatu kawasan bersifat lintas subbidang dan lintas wilayah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi penanganan perlu dilakukan agar hasilnya optimal. Pembangunan drainase perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh yang dimulai dari saluran primer-sekunder-tersier. Sesuai dengan data Masterplan Penanganan Drainase KPY teridentifikasi sebanyak 51 titik genangan di Kawasan Perkotaan

2.1.7.2.2 Perumahan

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Pada tahun 2010 rasio rumah tangga pengguna air bersih di DIY adalah sebesar 64%. Pencapaian pada tahun 2012 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dimana terjadi peningkatan persentase penduduk berakses air minum layak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 70,38% atau melayani 2.460.539 jiwa dari total jumlah penduduk DIY sebesar 3.496.100 jiwa.

b. Rasio Elektrifikasi

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pemenuhan Peningkatan Rasio Elektrifikasi, diarahkan pada peningkatan penyediaan listrik melalui kegiatan :

- 1) Perencanaan pembangunan jaringan listrik pedesaan
- 2) Pengadaan dan Pemasangan PLTS

c. Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi diasumsikan bahwa rumah tangga telah menggunakan fasilitas sanitasi layak antara lain meliputi: a) pembuangan tinja (MCK); b) pembuangan air limbah (SPAL); c) pembuangan sampah.

Tabel 2.133 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga DIY Terlayani Sanitasi Layak, 2010-2012

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Perkotaan			Perdesaan			Total Rumah Tangga Terlayani	
		Jumlah Rumah Tangga Perkotaan	Rumah Tangga Terlayani Perkotaan		Jumlah Rumah Tangga Perdesaan	Rumah Tangga Terlayani Perdesaan			
	(RT)	(RT)	(RT)	(%)	(RT)	(RT)	(%)	(RT)	(%)
2010	691.498	442.516	389.088	89,71	248.982	176.903	72,78	565.991	81,85
2011	693.440	443.759	394.190	90,61	249.681	182.303	74,74	576.493	83,14
2012	699.220	447.458	404.790	92,24	251.762	192.403	78,15	597.193	85,41

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2013

d. Jumlah Kawasan Kumuh yang ditangani

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Berdasarkan kajian dari NUSSP Tahun 2009 bahwa kawasan kumuh di DIY sebanyak 69 kawasan yakni di Kabupaten Bantul sebanyak 9, Kabupaten Kulonprogo 10, Kabupaten Gunungkidul 9, Kabupaten Sleman 12 dan Kota Yogyakarta 29 yang terdiri dari 107 titik lokasi kumuh.

Tabel 2.134 Persentase Lokasi Kumuh Yang Telah Ditangani

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Persentase lokasi kumuh yang telah ditangani (%)	2,8	5,6	8,4	11,2	14
Jumlah lokasi kumuh yang telah ditangani	3	3	3	3	3
Jumlah lokasi kumuh (titik)	107	107	107	107	107

Sumber: Bappeda DIY, 2013, diolah

e. Rumah layak Huni

Tahun 2013 masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 91.200 unit rumah dari keseluruhan jumlah rumah sebesar 1.038.233 unit rumah. Jadi jumlah rumah layak huni di DIY adalah sebesar 947.033 unit rumah atau sebesar 91,22% dari total rumah di DIY yang terdiri dari 822.687 unit rumah permanen dan 124.346 unit rumah semi permanen (Sumber : Data Pembangunan Daerah Tahun 2013).

2.1.7.2.3 Perhubungan

Didalam penyelenggaraan urusan perhubungan, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penerapan teknologi informatika merupakan pendukung yang dapat meningkatkan dan memudahkan kegiatan penataan, pengaturan maupun pengendalian lalu lintas angkutan jalan, khususnya di daerah perkotaan. Konsep penerapan teknologi informatika ini, selanjutnya dikenal dengan nama Intelligent Transport Systems (ITS). Sistem ITS ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan, sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk mendapatkan informasi, mempermudah transaksi, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi, mengurangi kemacetan atau antrian, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, mengurangi polusi lingkungan dan mengoptimalkan pengelolaan transportasi.

Intelligent Transport System (ITS) pada prinsipnya adalah penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman serta ramah lingkungan.

ATCS (Area Traffic Control System)

ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi di suatu kawasan atau area tertentu yang berbasis pada teknologi informasi. Keberadaan ATCS akan mengkoordinasikan APILL di satu simpang dengan APILL di simpang yang lainnya, sehingga pelayanannya akan lebih efektif dan dapat disesuaikan dengan jam sibuk pada masing – masing simpang.

Tabel 2.135 Jumlah Simpang ATCS di DIY

Simpang ATCS	2009	2010	2011	2012	2013
Tidak dilengkapi bus priority	0	0	1	1	12
Dilengkapi bus priority	0	0	0	8	15
Total ATCS Terpasang	0	0	1	9	27

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Bus Tracking System

Bus Tracking System adalah sistem untuk memantau perjalanan bus Trans Jogja berbasis GPS (Global Positioning System). Sistem ini bermanfaat untuk mengetahui posisi tiap-tiap armada dan pola perjalanan bus Trans Jogja. Sistem BTS ini juga terintegrasi dengan BIS (Bus Information System) sehingga informasi kedatangan bus dapat diketahui oleh penumpang melalui layar LCD yang terpasang pada halte.

Pemasangan dan penerapan ITS untuk angkutan umum ini, mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.

Tabel 2.136 Jumlah Halte Terpasang BTS/BIS di DIY

BTS/BIS	2012	2013
Jumlah Halte	30	30

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

e-Ticketing

Sistem tiket bus Trans Jogja telah mengadopsi *electronic ticketing* (*e-ticketing*) pada tahun 2008. Dalam perkembangannya, sistem tiket tersebut ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan (melalui *e-money*/uang elektronik) dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta melalui kartu GAMA Card. *e-money* sendiri baru dilaksanakan pada tahun 2012.

Tabel 2.137 Transaksi Penggunaan Kartu Elektronik Trans Jogja

Simpang ATCS	2011	2012	2013
reguler Trans Jogja	1.218.162	5.549.083	5.764.072
<i>e-money</i> perbankan		271.214	214.346

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

2.1.7.2.4 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah, Pemerintah DIY menetapkan kebijakan penataan ruang melalui Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 2009-2029. Untuk itu pelaksanaan pembangunan di DIY telah dilakukan sesuai dengan arahan dari Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

2.1.7.2.5 Luas wilayah produktif

Dilihat dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sehingga untuk tercapainya tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatan wilayah produktif secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Berikut data luas wilayah produktif menurut Dinas PUP&ESDM per Kabupaten / Kota di DIY.

Tabel 2.138 Luas Wilayah Produktif (Ha)

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif (Ha)		
	Luas wilayah budidaya (Ha)	Luas wilayah produktif (Ha)	Rasio (%)
Kabupaten Kulon Progo	37,685.23	24,433.41	64.84
Kabupaten Bantul	49,809.89	29,093.00	58.41
Kabupaten Gunungkidul	25,419.00	139,471.00	18.23
Kabupaten Sleman	24,889.61	56,218.16	44.27
Kota Yogyakarta	2,549.60	2,843.42	89.67

Sumber : DPUP & ESDM

2.1.7.2.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY disusun atas dasar amanat Undang-Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor:15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi , telah dituangkan dan ditetapkan melalui perda no 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri PU Nomor :16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Menteri PU

Nomor:17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten / Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayahnya sehingga DIY berikut Kabupaten/Kota nya telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam penyusunannya, Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, telah disusun Rencana Rinci dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan strategis jawa-bali maupun kawasan strategis provinsi.

2.1.8 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Angka kriminalitas selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.139 Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kasus di DIY, 2008-2012

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah kasus narkoba	332	268	266	262	257
2.	Jumlah kasus pembunuhan	15	15	14	10	9
3.	Jumlah kejahatan seksual	29	19	18	13	20
4.	Jumlah kasus penganiayaan (ringan-berat)	474	627	579	536	461
5.	Jumlah kasus pencurian (curat,	2341	3199	3902	3042	2.446

RKPD Tahun 2015

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
	curanmor, curas, pencurian ringan-biasa)					
6.	Jumlah kasus penipuan	940	1.038	1.428	1.301	1.364
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	12	5	5	6	4
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	2.706	3.128	3.719	3.072	4.561
9.	Jumlah penduduk	3.393.003	3.426.637	3.457.491	3.487.325	3.514.762
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,12	0,15	0,18	0,15	0,13

Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY

Jumlah tindak kejahatan menurut jenis kasus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2010 tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 hingga 2012. Jumlah kasus yang berfluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah kasus pencurian dan penipuan dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 5 tahun masing-masing sebesar 4,25% dan 10,99%. Namun, kondisi tahun 2012 kasus pencurian turun cukup signifikan menjadi 2.446 kasus. Sedangkan kasus penipuan pada tahun 2012 menjadi 1.364 kasus atau lebih tinggi daripada tahun 2011 sejumlah 1.301. Dalam rangka penurunan jumlah kasus tersebut membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

b. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di DIY relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Jumlah unjuk rasa yang terjadi di DIY dari kurun waktu 2009–2013 berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2013 merupakan jumlah yang terkecil dalam periode 5 tahun terakhir.

Unjuk rasa di DIY di dominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi dengan proporsi rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 74,6%. Sementara itu unjuk rasa di bidang politik mempunyai proporsi rata-rata 6,42% selama 5 tahun. Namun pada tahun 2013 terjadi pergeseran dalam proporsi unjuk rasa dimana terjadi penurunan proporsi cukup signifikan dalam unjuk rasa di bidang politik dan ekonomi masing-masing menjadi sebesar 2,23% dan 49,55%. Sementara di sisi lain, proporsi unjuk rasa di bidang lainnya meningkat signifikan menjadi 48,21% pada tahun 2013.

Tabel 2.140 Jumlah Demo di DIY, 2008-2013

Tahun	Jumlah Unjuk Rasa
2009	269
2010	240
2011	267
2012	315
2013*	224

Sumber: SIPD DIY, 2013

Ket: * Angka Sementara

c. Lama Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Upaya dilakukan Pemerintah Daerah DIY melalui Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikelola oleh Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Daerah DIY. Selain prosedur perizinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada.

Tabel 2.141 Rata-rata Lama Pengurusan Izin, 2013

Jenis Izin usaha	Rata-rata Lama Pengurusan Izin (hari)
Izin Prinsip	3
Izin Usaha	7
Izin Kawasan Industri	14

Jenis Izin usaha	Rata-rata Lama Pengurusan Izin (hari)
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kapasitas 2000-6000 m ³ /tahun	30
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya	30
Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan	30
Izin Usaha Pertambangan	30
Izin Usaha Pengolahan/Pengawetan Ikan Laut	7
Izin pendirian koperasi primer dan sekunder	90

Sumber: BKPM DIY, 2013

d. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak Daerah yang menjadi kontributor PAD DIY adalah:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi terdiri atas:

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha;
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

e. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Sejalan dengan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan pengaturan melalui regulasi yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Regulasi dalam bentuk Perda tersebut haruslah mengandung prinsip bertanggungjawab, transparan, serta akuntabel. Perda tersebut juga diharapkan dapat melindungi semua pemangku kepentingan yaitu, Pemda, dunia usaha, masyarakat, serta lingkungan.

Jumlah Perda DIY yang mendukung iklim usaha dalam kurun waktu 2008 hingga 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.142 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di DIY, 2013

Uraian	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Perda terkait perizinan	1	0	0	3	2	1

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2013

2.1.9 Fokus sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan.

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas SDM terkait dengan kualitas tenaga kerja dan produktivitas penduduk. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.143 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di DIY, 2010

NO	Uraian	2010
1.	Jumlah lulusan S1	185.651
2.	Jumlah lulusan S2/S3	19.267
3.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	204.918
4.	Jumlah penduduk	3.457.491
5.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	592,58

Sumber: SP 2010, BPS Provinsi DIY

Menurut data Sensus Penduduk (SP) 2010 oleh BPS, jumlah penduduk DIY yang tamat Diploma I/II sebanyak 30.767 orang, tamat Diploma III sebanyak 73.037

orang, tamat Diploma VI/S1 sebanyak 185.651 orang, dan tamat S2/S3 sebanyak 19.267 orang.

Lulusan S2/S3 terbanyak berada di Kabupaten Sleman, yaitu 10.565 orang, sedangkan yang terkecil berada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebanyak 436 orang. Sementara lulusan Diploma IV/S1 terbanyak berada di Kabupaten Sleman (82.904 orang) dan terkecil di Kabupaten Gunungkidul (9.324 orang).

Tabel 2.144 Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Wilayah dan Pendidikan Tertinggi Yang Diamanatkan di DIY, 2010

Kabupaten/Kota	Diploma I/II	Diploma III	S1/ Diploma IV	S2/S3
Kulon Progo	3.650	4.491	11.349	436
Bantul	8.072	17.198	43.940	3.745
Gunungkidul	4.047	3.650	9.324	552
Sleman	11.585	32.103	82.904	10.565
Yogyakarta	3.413	15.595	38.134	3.969
DIY	30.767	73.037	185.651	19.267

Sumber: SP 2010, BPS Provinsi DIY

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Tabel 2.145 Rasio Ketergantungan di DIY, 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	634.400	602.600	608.500	615.100	622.100
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	323.500	324.200	328.300	331.700	336.600
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	957.900	926.800	936.800	946.800	958.700
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	2.544.000	2.512.200	2.530.400	2.549.300	2.566.600

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)	37,65	36,89	37,02	37,14	37,35

Sumber : Proyeksi Penduduk SP 2010, BPS Provinsi DIY, diolah

Pada tahun 2012, angka Rasio Ketergantungan DIY sebesar 37,35 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 orang penduduk usia non produktif. Dalam kurun waktu 2011-2013, Angka Ketergantungan DIY selalu mengalami peningkatan. Salah satu faktor kenaikan angka ketergantungan di DIY adalah terkait dengan semakin tingginya capaian angka usia harapan hidup di DIY dan peningkatan TFR DIY. Peningkatan jumlah penduduk yang belum dan tidak produktif di DIY diikuti oleh pemerintah DIY dengan beberapa kebijakan dan program terkait pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Kondisi ideal bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah dilaksanakan secara sinergis baik Antara tingkatan maupun antar tahapan. Pertahapan pembangunan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) direncanakan dalam RPJMD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode lima tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui program/kegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Secara umum faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada dana keistimewaan memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, sehingga tidak semua keluaran dapat terpenuhi. Selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya

kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah 100% dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan, dimana kegiatan tersebut harus melakukan lelang sehingga proses lelang tidak dapat dilakukan karena waktu yang terbatas. Waktu perencanaan program/kegiatan dengan dana keistimewaan harus disesuaikan,
- b) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena bersifat antisipatif harus tetap dianggarkan karena harus dilaksanakan bilamana dibutuhkan,
- c) Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) penting untuk menjadi acuan didalam pelaksanaan program/kegiatan,
- d) Indikator keluaran yang berupa jumlah orang/volume harus didukung dengan data yang akurat dan didukung dengan analisis tren.

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pengawalan pelaksanaan supaya tidak melampaui tahapan waktu kritis pengumuman lelang dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya gagal lelang.

Tabel 2.146 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daperdes Tahun 2013

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
1			WAJIB											
1	1		Pendidikan											
		5	Program Pendidikan Anak Usia Dini*)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	82	78,31	80	95,31	119	82	82	100	Disdikpora
		6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	Persen	84,08	80,31	83,25	83,51	100,31	84,08	84,08	100	Disdikpora
		7	Program Pendidikan Menengah*)	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	Persen	79,25	78,33	78,79	78,85	100,08	79,25	79,25	100	Disdikpora

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		8	Program Pendidikan Non Formal dan Informal*)	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	orang	7000	6000	6000	10000	166,67	7000	7000	100	Disdikpora
		9	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	Persen	70,78	69,89	70,33	80,61	115	70,78	70,78	100	Disdikpora
		10	Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar	Persen	0	74,01	74,21	85,32	114,97	0	0		Disdikpora
		11	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	Persen	74,47	74,01	74,24	79,32	107	74,47	74,47	100	Disdikpora
		12	Program Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan aksesibilitas Pendidikan Tinggi	Persen	57,5	55,43	56,93	57,2	100,47	57,5	57,5	100	Disdikpora

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		13	Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka*)	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Persen	45	20	40	66,36	166	45	45	100	Disdikpora
		14	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar	peserta didik	1849	1713	1796	1796	100	1849	1849	100	Disdikpora
		15	Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya*)	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Persen	5	NA	1	-	-	5	5	100	Disdikpora

RKPD Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
							Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	13	14
	16	Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	Persen	5	NA	0	0	100	5	5	100	Disdikpora
	17	Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	Persen	30	NA	0	-	-	30	30	100	Disdikpora
1	2	Kesehatan											
	5	Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98	98	98	99,92	101,96	98	98	100	Dinas Kesehatan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		6	Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan	Persentase ketersediaan obat esensial generik di fasyankes dasar	Persen	95,5	94,1	95	95,14	100,15	95,5	95,5	100	Dinas Kesehatan
		7	Program Pelatihan Kesehatan dan Peningkatan Mutu Diklat Kesehatan	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	Persen	70	61	64	74,33	116,14	70	70	100	Dinas Kesehatan
		8	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	Persen	52,6	45,57	48,2	73,27	152,01	52,6	52,6	100	Dinas Kesehatan
		9	Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	Persentase cakupan penjangkaran kesehatan siswa sekolah	Persen	98	97	98	99,71	101,74	98	98	100	Dinas Kesehatan

RKPD Tahun 2015

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1				2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*)	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen	42	33,07	37	36,27	98,03	42	42	100	Dinas Kesehatan	
		11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat*)	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	Persen	8,8	8,95	8,9	8,56	103,97	8,8	8,8	100	Dinas Kesehatan	
		12	Program Pencegahan dan pengendalian Masyarakat*)	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	Persen	63,2	55,5	61,98	109,87	177,27	63,2	63,2	100	Dinas Kesehatan	
		13	Program Pembinaan Lansia	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada Usila (PSU)	Persen	80	52,89	57,85	61,16	105,72	80	80	100	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	Persen	100	80	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	15	Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	Persen	98,25	97,5	98	99,69	101,72	98,25	100	Dinas Kesehatan
	16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapeljamkesos	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapeljamkesos	Persen	65,25	55	60,85	69,36	113,99	65,25	100	Dinas Kesehatan

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Ghrasia	Persentase penderita jiwa yang dirawat di RSJ Ghrasia	Persen	51,04	42,16	46,81	48,55	103,72	51,04	51,04	100	RSJ Ghrasia
		18	Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	Persen	40,25	38,48	38,75	46,04	118,81	40,25	40,25	100	Dinas Kesehatan
		19	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	Persen	100	100	100	-	-	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dandeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
							Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	2	3			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	20		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	Persen	100	100	100	-	-	100	100	Dinas Kesehatan
1	3		Pekerjaan Umum										
	5		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	72,64	71,09	72,04	72,87	101,15	72,64	100	Dinas PUPESDM
	6		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan										Dinas PUPESDM
	7		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPESDM

RKPD Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	8	Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur	Persentase Penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	Persen	29,91	24,20	26,97	28,55	105,86	29,91	29,91	100	Dinas PUPESDM
	9	Program Pemngembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi	Persen	78,00	75,06	76,50	76,81	100,41	78,00	78	100	Dinas PUPESDM
	10	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya	Penambahan penyediaan air baku	l/det	900	600	700	767,6	109,66	900	900	100	Dinas PUPESDM

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		11	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku											Dinas PUPESDM
		12	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Persentase Penduduk berakses air minum	Persen	77,36	70,38	73,87	74,25	100,51	77,36	77,36	100	Dinas PUPESDM
		13	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	SR	15800	14329	14.300	16.191	113,22	15800	15800	100	Dinas PUPESDM
		14	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	Persen	55	45	50	53	106	55	55	100	Dinas PUPESDM

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		15	Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	Persen	61	53	57	64	112,28	61	61	100	Dinas PUPESDM
		16	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	Persen	47	39	43	47	109,30	47	47	100	Dinas PUPESDM
		17	Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan Desa Potensi	Dukungan Infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	Persen	40	28	34	34	100,00	40	40	100	Dinas PUPESDM

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		18	Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pengurangan jumlah titik genangan	Persen	39,90	27,90	33,90	35,29	104	39,90	39,9	100	Dinas PUPESDM
		19	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen	82	78	80	82	102,5	82	82	100	Dinas PUPESDM
		20	Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	titik	60	20	40	43	107,5	60	60	100	Dinas PUPESDM
		21	Program Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa	Persen	81,25	70	75	75	100	81,25	81,25	100	Dinas PUPESDM

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
				laboratorium pengujian										
		22	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan performance/kine rja jasa konstruksi	Persen	80	75	77,50	78,34	101,08	80	80	100	Dinas PUPESDM
		23	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	Persen	77,50	72,50	75	75	100	77,50	77,5	100	Dinas PUPESDM
1	4		Perumahan											

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	Persen	34	23,20	29	32,71	112,79	34	34	100	DINAS PUPESDM
		2	Program pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	Persen	49	38,58	44	50	113,64	49	49	100	DINAS PUPESDM
		3	Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	Persen	7,50	8,50	8,00	8,00	100	7,50	7,5	100	DINAS PUPESDM
1	5		Penataan Ruang											
		1	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	kawasan strategis	14	10	12	12	100,00	14	14	100	DINAS PUPESDM

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		2	Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi	Persen	60	45	50	63,93	127,86	60	60	100	DINAS PUPESDM
		3	Program Pengendalian Pemanfaatan ruang	Persentase Pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	Persen	40	10	20	20	100	40	40	100	DINAS PUPESDM
1	6		Perencanaan Pembangunan											
		5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi	Persen	20,45	28,19	24,16	26,82	88,99	20,45	20,45	100	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun 2013	Realisasi RKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		tahunan										
	6	Program Perencanaan Pembangunan pemerintahan	Persen	0,97	1,34	1,15	12,73	-906,96	0,97	0,97	100	BAPPEDA
	7	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persen	4,87	6,71	5,75	3,64	136,70	4,87	4,87	100	BAPPEDA

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	Persen	12,66	17,45	14,96	6,82	154,41	12,66	12,66	100	BAPPEDA
		9	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	Persen	1,95	2,68	2,30	3,64	41,74	1,95	1,95	100	BAPPEDA
		10	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	Persen	79	0	74	77	104	79	79	100	BAPPEDA

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		11	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat di akses	Persen	70	50	60	71,24	119,04	70	70	100	BAPPEDA
1	7		Perhubungan											
		5	Program Peningkatan manajemen dan Rekayasa Lalulintas	Penerapan manajemen lalulintas perkotaan berbasis kawasan	Persen	16,80	4,20	8,40	8,40	100	16,80	16,8	100	DISHUBKOMINF O
		6	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	Persen	82	75	80	80,65	100,81	82	82	100	DISHUBKOMINF O
		7	Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal	Pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta	Persen	30	10	20	20	100	30	30	100	DISHUBKOMINF O

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		8	Program Peningkatan Pelayanan angkutan	Load Factor penumpang angkutan umum perkotaan Yogyakarta	Persen	36,57	32,57	34,57	34,49	99,77	36,57	36,57	100	DISHUBKOMINF O
		9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi di DIY	Persen	30,42	26,67	27,08	27,08	100	30,42	30,42	100	DISHUBKOMINF O
		10	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan Pelayanan transportasi antar moda	Persen	35	25	30	30	100	35	35	100	DISHUBKOMINF O
		11	Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	Persen	100	80	90	90	100	100	100	100	DISHUBKOMINF O

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISHUBKOMINFO
	13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISHUBKOMINFO
1	8	Lingkungan Hidup										
	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Persen	6,29	2	3,14	3,14	100	6,29	100	BLH
	6	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH	Persentase peningkatan akses informasi sumber daya air dan lingkungan hidup	Persen	20	10	15	15	100	20	100	BLH

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		7	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	Persen	5	2	3	3	100	5	5	100	BLH
		8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	unit usaha	37	413	360	360	100	37	37	100	BLH
		9	Program Pengelolaan RTH	Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persen	23,33	7	11,67	10	85,65	23,33	23,33	100	BLH
		10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	Ha	18	3	9	17	189	18	18	100	BLH
1	9		Pertanahan											

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1				2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Perbaikan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah	Persentase Kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	Persen	40	0	20	0	0	40	40	100	Biro Tata Pemerintahan	
		2	Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	Persen	20	10	15	15	100	20	20	100	Biro Tata Pemerintahan	
		3	Program Pengembangan Sistem informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	Bidang	9229	8381	8805	8426	95,70	9229	9229	100	Biro Tata Pemerintahan	
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil												

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang ber-KTP (NIK)	Persen	87	84	86	95	110,47	87	87	100	Biro Tata Pemerintahan
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
		5	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	Orang	657	NA	670	795	84,28	657	657	100	BPPM
		6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	Anak	316	NA	322	301	106,98	316	316	100	BPPM
		7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*)	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik	Persen	36,1	35,50	35,97	35,5	98,69	36,1	36,1	100	BPPM

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
				di lembaga pemerintah										
		8	Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	96,58	96,41	96,50	96,65	100,16	96,58	96,58	100	BPPM
		9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase pembinaan organisasi perempuan	Persen	62,64	37,64	50,14	50,14	100	62,64	62,64	100	BPPM
		10	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan	Terlaksananya program keserasian kebijakan peningkatan anak dan perempuan	Persen	-	NA	100	-	-	-	-		BPPM

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		11	Program Pendidikan politik bagi Perempuan	Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik	Persen	11,06	NA	8,41	8,61	102,38	11,06	11,06	100	BPPM
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
		1	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*)	Persentase cakupan peserta KB aktif	Persen	71,60	71,36	71,48	80,22	112,23	71,60	71,6	100	BPPM
		2	Program Kesehatan reproduksi remaja	Persentase penurunan pernikahan usia di bawah 20 tahun	Persen	0,515	0,530	0,520	0,520	100	0,515	0,515	100	BPPM
		3	Program Peningkatan kesejahteraan Keluarga	Persentase tahapan keluarga sejahtera	Persen	44,60	45,83	45,20	44,1	102,49	44,60	44,6	100	BPPM

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		4	Program Pengembangan Bina Keluarga	Persentase lembaga bina keluarga berkatagori percontohan	Persen	22,13	21,47	21,47	21,49	100,09	22,13	22,13	100	BPPM
		5	Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR	Terlaksananya program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persen	0	NA	100,00	-	-	0	0	-	BPPM
		6	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	Terlaksananya program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS	Persen	-	NA	100,00	-	-	-	-	-	BPPM
1	13		Sosial											

RKPD Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
							Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		5	Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial *)	Persen	7,55	6,50	6,92	9,76	141,04	7,55	7,55	100	Dinas Sosial
		6	Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia terlarut	Persen	7,85	7,18	7,27	6,79	93,40	7,85	7,85	100	Dinas Sosial
		7	Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Persen	8,54	7,60	7,80	51,61	661,67	8,54	8,54	100	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dandeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	8	Program Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Korban tindak Kekerasan, Pekerja Migran bermasalah Sosial psikologis, dan korban Trafficking	Persen	5,95	5,40	5,60	4,22	75,36	5,95	5,95	100	Dinas Sosial
	9	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	Persen	4,90	4,85	4,67	2,04	43,68	4,90	4,9	100	Dinas Sosial

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		10	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya)	Persentase keberfungsian sosial bagi tuna sosial	Persen	3,77	3,10	3,25	5,43	167,08	3,77	3,77	100	Dinas Sosial
		11	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya*)	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	Persen	9,33	8,10	8,24	8,76	106,31	9,33	9,33	100	Dinas Sosial
		12	Program Pemberdayaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*)	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	Persen	66,40	62,45	65,39	71,54	109,40	66,40	66,4	100	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
	13	Program Pembinaan Pelestarian Nilai-NilaiKepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial *)	Persen	45,00	33,35	35,00	33,34	95,26	45,00	45	100	Dinas Sosial
	14	Program Pembinaan Panti Sosial/jompo	Persen	2,07	1,70	1,91	1,91	100	2,07	2,07	100	Dinas Sosial
	15	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial	Persen	38,56	NA	37,44	25,34	67,68	38,56	38,56	100	Dinas Sosial
	16	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persen	-	NA	1,22	-	-	-	-		Dinas Sosial

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persen	-	NA	27,13	-	-	-	-		Dinas Sosial
	14		Ketenagakerjaan											
		1	Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat'	%	24,2	22,29	23,5	19,29	82	24,2	24,2	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2	Program Peningkatan Kesempatan kerja	presentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	%	9	7,81	8,2	5,96	72	9	9	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Presentase perusahaan yang melaksanakan K3 sesuai dengan standar/peraturan	%	0	87,92	88,01	71,89	81,68	0	0	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan	Presentase lembaga yang terstandarisasi	%	48,35	NA	NA	NA	NA	48,35	48,35	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5	Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	60	NA	NA	NA	NA	60	60	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		6	Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	%	14,35	NA	NA	NA	NA	14,35	14,35	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	15		Koperasi dan Usaha kecil Menengah											
		1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UKM	unit usaha	220.641	212.155	212.155	205.210	96,73	220.641	220.641	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	koperasi	2.261	2.174	2.174	2.176	100,09	2.261	2.261	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
		3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	UMKM	130	30	80	87	108,75	130	130	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	16		Penanaman Modal											
		1	Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rp. (000)	8.946.874.000	7.056.066.141	7.809.763.000	8.067.134.638	103,30	8.946.874.000	8.946.874.000	100	BKPM

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		2	Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi	Jumlah Surat Persetujuan/Ijin Prinsip	ijin	347	334	341	354	103,81	347	347	100	BKPM
	17		Kebudayaan											
		1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase organisasi budaya berkategori maju	%	1,11	0,94	1,03	1	97,08	1,11	1,11	100	Dinas kebudayaan
		2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	%	46,42	43	44,49	NA	NA	46,42	46,42	100	Dinas kebudayaan
		3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	13	5	11	14	127,27	13	13	100	Dinas kebudayaan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase implementasi hasil kesepakatan	%	7	3	5	5	100	7	7	100	Dinas kebudayaan
		5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Persentase ruang seni dan budaya yang reprepresentatif	%	30	15	20	20,76	103,8	30	30	100	Dinas kebudayaan
	18		Kepemudaan dan Olahraga											
		1	Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda	Dokumen pembangunan kepemudaan	%	0	74,01	74,24	NA	NA	0	0	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
		2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	sentra	12	9	10	10	100	12	12	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda	Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda	kelompok	345	225	325	NA	NA	345	345	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
		4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	orang	2.100	1.800	2.000	2.000	100	2.100	2.100	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
		5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga	%	44,29	16,67	28,13	NA	NA	44,29	44,29	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
		6	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	medali	23	21	22	NA	NA	23	23	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		7	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	organisa si	39	35	37	37	100	39	39	100	Dinas Pendidikan dan Olahraga
	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
		1	Program Pendidikan Masyarakat	Persentase Partisipasi dalam Pemilu	%	70	67	67	NA	NA	70	70	100	Badan Kesbanglinmas
		2	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah kab./Kota yang telah terbentuk Community Policing	NA	22	NA	1	NA	NA	22	22	100	Badan Kesb anglinmas
		3	Program Pemeliharaan kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan kasus tindak kriminal	kasus	964	987	972	NA	NA	964	964	100	Satuan Polisi Pamong Praja

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penurunan kasus pelanggaran Perda	kasus	260	299	285	155	54,39	260	260	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		5	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Penurunan kasus pekat	kasus	315	318	316	NA	NA	315	NA	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan kasus konflik sosial	kasus	25	30	10	10	100	8	8	100	Badan Kesbanglinmas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	unit	2	80	80	80	100	2	2	100	Biro Organisasi
2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase untuk kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	%	35	35	20	NA	NA	35	35	100	Biro Umum Humas dan Protokol

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	%	45	75	60	61,76	NA	45	NA	100	Inspektorat
		4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayan pimpinan	%	90	85	85	NA	NA	90	NA	100	Biro Umum Humas dan Protokol
		5	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase prolegda yang terselesaikan	%	93	92,3	93	99,16	106,62	93	93	100	Sekretariat DPRD
		6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	persentase rancangan produk hukum yang	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	Biro Hukum

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
				terselesaikan										
		7	Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang dibatalkan	%	0	0	0	NA	NA	0	NA	100	Biro Hukum
		8	Program Analisis Kebijakan Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	%	31,77	24,35	26,13	NA	NA	31,77	NA	100	Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan, Biro Am. Perekonomian & SDA, Biro Adm. Pembangunan

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		9	Program Pencegahan Dini Bencana	Peningkatan jumlah desa tangguh	desa	25	11	7	10	143	25	25	100	BPBD
		10	Program Penanggulangan Korban Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	70	NA	NA	NA	NA	70	NA	100	BPBD
		11	Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	%	11,57	11,29	11,43	11,53	100,87	11,57	11,57	100	DPPKA
		12	Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah serta Lembaga Keuangan Mikro	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	26,13	22	31,56	25,34	80,29	26,13	26,13	100	DPPKA

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		13	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Persetanse kelembagaan yang efektif dan efisien	%	80	70	75	0	0	80	0	100	Biro Organisasi
		14	Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	%	22,5	18	20	NA	NA	22,5	NA	100	Badan Diklat
		15	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Kelancaran Pindah/Purna Tugas PNS	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	BKD
		16	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	%	60	55	55	69,23	126	60	60	100	BKPM
		17	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kasus konflik antar daerah yang terselesaikan	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	Biro Tata Pemerintahan

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		18	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (norma standar, prosedur dan kriteria)	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	Biro Tata Pemerintahan
		19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Permasalahan Desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	Biro Tata Pemerintahan
		20	Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Gubernur/Wagub	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	Biro Tata Pemerintahan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan urusan kab/Kota dan provinsi	%	100	95	100	NA	NA	100	NA	100	Biro Tata Pemerintahan
		22	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD terlayani tata kearsipan berbasis TI	%	100	90	100	NA	NA	100	NA	100	Biro Tata Pemerintahan
		23	Program Kerjasama dengan Mass Media	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	%	100	90	100	NA	NA	100	NA	100	Biro Umum Humas dan Protokol

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		24	Program Fasilitas Bantuan dan Layanan Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	%	100	100	100	126,8	127	100	100	100	Biro Hukum
		25	Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase tindak lanjut atas klarifikasi dan konsultasi rancangan produk hukum Kab./Kota	%	100	100	100	120	120	100	100	100	Biro Hukum
		26	Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	Persentase tindaklanjut pelaksanaan diklat atas kesepakatan pengiriman peserta diklat dari	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	Badan Diklat

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dandeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
				luar DIY										
		27	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kab./Kota	Peningkatan Pengelolaan Keuangan kab./Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	DPPKA
		28	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	Badan Diklat, Biro Adm. Pembangunan

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		29	Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
		30	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	Inspektorat
		31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	Badan Diklat
	21		Ketahanan Pangan											
		1	Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan	desa	62	80	71	60	222,22	62	62	100	BKPP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12	
	2	Program Peningkatan Ketersediaan dan Keamanan Pangan	Ketersedian dan cadangan pangan	???	290	190	230	172,5	75	290	290	100	BKPP
	3	Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Presentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	???	78	73,5	75,5	85	112,58	78	78	100	BKPP
	4	Program Peningkatan Distribususi dan Akses Pangan	Presentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	???	99,15	94,55	96,87	96,87	100	99,15	99,15	100	BKPP
	5	Program Pemberdayaan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	%	61	35	48	48	100	61	61	100	BKPP
22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											

RKPD Tahun 2015

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
									Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1				2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa	%	33,08	24,76	28,46	35,18	123,61	33,08	33,08	100	BPPM	
		2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	%	27,96	NA	26,76	26,76	100	27,96	27,96	100	BPPM	
		3	Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase profil desa sesuai standar	%	55	28,54	42	39,95	95,12	55	55	100	BPPM	
		4	Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	%	34	32	33	36,36	110,18	34	34	100	BPPM	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terselenggarany a peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA	BPPM
		6	Program peningkatan prasarana/sarana dan penataan administrasi pemerintahan desa	Terselenggarany a peningkatan prasarana/sarana dan penataan administrasi pemerintahan desa	%	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA	BPPM
	23		Statistik											
		1	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	%	96	92	94	92,39	98	96	96	100	Bappeda
	24		Kearsipan											
		1	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	SOPD	15	5	10	19	190	15	15	100	BPAD

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	%	9	5	7	11,67	166,7	9	9	100	BPAD
		3	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	%	15	5	10	7,16	71,6	15	15	100	BPAD
	25		Komunikasi dan Informatika											
		1	Program Pengembanga Komunikasi Informasi dan Media Massa	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	urusan/bi dang	11	9	10	10	100	11	11	100	Dishubkominfo
		2	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	Penguatan jaringan IT di Pemda DIY	%	60	10	40	42	105	60	60	100	Dishubkominfo

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		3	Program Fasilitas Pos Telekomunikasi Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	%	65	55	60	60	100	65	65	100	Dishubkominfo
		4	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT	%	100	100	100	NA	NA	100	NA	100	Dishubkominfo
	26		Perpustakaan											
		1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Peningkatan Fasilitas Perpustakaan	%	82,5	70	80	73,13	91,40	82,5	82,5	100	BPAD
		2	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan desa	%	70	50	60	NA	NA	70	NA	100	BPAD

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		3	Program Pengembangan Budaya Baca	Peningkata pemustaka	%	18	14	16	14,51	90,68	18	18	100	BPAD
2			Urusan Pilihan											
2	1		Pertanian											
		5	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	Persen	1,7	1,7	1,7	0,96	56	1,7	1,7	100	Dinas Pertanian
		6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	Komoditas	3	3	3	3	100	3	3	100	Dinas Pertanian
		7	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi pertanian tanaman pangan	ton	2.321.800	2.135.582	2.287.400	2.332.884	102	2.321.800	2.321.800	100	Dinas Pertanian

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		8	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi pertanian hortikultura	ton	383.200	375.714	379.400	383.678	101,13	383.200	383.200	100	Dinas Pertanian
		9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi peternakan	AU	671.634	619.268	644.257	568.127	88,18	671.634	671.634	100	Dinas Pertanian
2	2		Kehutanan											
		5	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Perkebunan	Ton	86.300	82.797	84.600	78.619,81	93	86.300	86.300	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		6	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	NTP sektor perkebunan	-	125,86	123,84	124,23	113,38	91,27	125,86	125,86	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis	Ha	27000	29000	28000	27.291,871	103	27000	27000	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		8	Program Penataan Kawasan Hutan	Persentase luas hutan	Persen	27,5	27,04	27,34	29,45	107,72	27,5	27,5	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		9	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan produksi hasil hutan	Persen	4,7	1,98	3,52	230,77	6555,97	4,7	4,7	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		10	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Persentase jumlah industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah dilakukan pembinaan	Persen	75	61,6	70	70	100	75	75	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase kerusakan hutan	Persen	31,84	37,24	34,54	9,97	171	31,84	31,84	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	3		Energi dan Sumber Daya Mineral											

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		1	Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pencapaian rasio elektrifikasi	%	78	76,8	77,4	80,6	104,13	78	78	100	Dinas PUPESDM
		2	Program Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	SBM	112 (000)	104,72	107.79 (000)	114,035 (000)	105,79	112 (000)	112 (000)	100	Dinas PUPESDM
		3	Program Pembinaan Pengawasan Pengendalian Pengelolaan Pendayagunaan Air Tanah	Rerata penurunan muka air tanah	%	<20	<20	<20	<20	100	<20	<20	100	Dinas PUPESDM
		4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi	Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi	%	6	3	3	3,33	111	6	6	100	Dinas PUPESDM

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		5	Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar	pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	%	50	30	40	45	112,5	50	50	100	Dinas PUPESDM
		6	Pembinaan dan Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	%	10	8	9	9	100	10	10	100	Dinas PUPESDM
	4		Pariwisata											
		1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	orang	14.595.763	11.036.493	12.691.967	13.883.950	109,07	14.595.763	14.595.763	100	Dinas Pariwisata
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	???	87	83	85	86	101,18	87	87	100	Dinas Pariwisata
		3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis	kelompok	81	71	76	77	101,32	81	81	100	Dinas Pariwisata

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		4	Program Pengembanga Desa Wisata	Jumlah Desa Wisata	Desa	75	65	70	71	101,43	75	75	100	Dinas Pariwisata
	5		Kelautan dan Perikanan											
		1	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaannya	kg/kapita /th dan kg/kapita /yh	14.91 dan 27.17	12.74 dan 23.01	14.18 dan 25.78	25,80	100,08	14.91 dan 27.17	27,17	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	6.400	5.437,50	5.900	4.996,4	84,68	6.400	6.400	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen	300	300	300	300	100	300	300	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjalan (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	ton	63.000	50.246,60	56.200	57.902,72	101,65	63.000	63.000	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
		5	Program Pengembanga Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar	Luas Kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	ha	13	11	12	15	125	13	13	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
		6	program peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	NTP sektor perikanan	rasio	115,42	113,71	114,92	116,31	101,21	115,42	115,42	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
		7	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	orang dan desa terisolir	1,350 orang dan 51 desa	990 orang dan 39 desa	1,170 orang dan 45 desa	1,170 orang dan 45 desa	100	1,350 orang dan 51 desa	1,350 orang dan 51 desa	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		8	Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	rasio	0,08	0	0,06	0	0	0,08	0,08	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
		6	Perdagangan											
		1	Program Peningkatan Pengembangan Ekspr	Nilai Ekspor	Juta US\$	201,15	191,46	196,25	211,76	107,90	201,15	201,15	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
		2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah SIUP	SIUP	43.371	40,732	41.701	43.818	105,07	43.371	43.371	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

RKPD Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluarank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun20 13	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP	45.106	215.539	222.712	204.511	91,83	228.000	228.000	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	7		Industri											
		1	Program Pengembangan IKM	Jumlah IKM	IKM	81.751	81.523	81.621	84.243	103,20	81.751	81.751	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
		2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Nilai Produksi	Ribu Rp.	3.290.733.829	3.199.224.964	32.440.141.113	3.294.485.488	101,56	3.290.733.829	3.290.733.829	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014	Realisasi Capaian Kinerja hasil program dankeluaranank egiatan sampai dengan Tahun 2012	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2013			Target program/ kegiatan RKPD Tahunberjal an (tahun 2014)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD PENANGGUNG JAWAB
								Target RKPD Tahun2013	Realisasi RKPD Tahun2013	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2014 (%)	
1			2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11	12
		3	Program Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah IKM Industri Kreatif	IKM	33.964	33.882	33.923	34,978	103,11	33.964	33.964	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
		8	Ketransmigrasian											
		1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	%	19,62	21,96	17,84	15,58	87,33	19,62	19,62	100	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
		2	Program Transmigrasi Regional	Jumlah calon transmigran yang mendapat pelatihan dasar umum	KK	0	150	150	150	100	0	150	100	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

2.3 Permasalahan Pembangunan

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Prioritas : Reformasi birokrasi dan tata kelola; Sasaran : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat; Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
 - a. Pemerintahan dan Politik
 1. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah belum optimal;
 2. Kapabilitas SDM Pemerintah dalam mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (e-Gov) belum optimal;
 3. Implementasi Good Governance belum optimal.
 - b. Hukum
 1. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
 2. Kapasitas dan kapabilitas aparaturnya penegak hukum pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
 3. Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
 4. Penegakan supremasi hukum masih lemah.
 - c. Kerjasama
 1. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
 2. Implementasi yang lebih bermanfaat dari kerjasama dengan para pihak di luar negeri masih sangat kurang;
 3. Kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri belum optimal.
2. Prioritas : Pendidikan; Sasaran : Aksesibilitas Pendidikan Meningkat; Daya saing Pendidikan Meningkat; Peningkatan melek huruf masyarakat
 - a. Kegiatan pembelajaran dalam proses pendidikan masih cenderung mekanistik;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;

- c. Keterkaitan system pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY belum optimal;
 - d. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan local namun berwawasan global masih kurang;
 - e. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
 - f. Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, system yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun system pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
 - g. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah pedesaan belum berjalan mantap dan sesuai dengan harapan;
 - h. Satuan pendidikan berbasis keunggulan local belum dikembangkan dengan baik;
 - i. Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
 - j. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai.
3. Prioritas : Kesehatan; Sasaran : Harapan Hidup Masyarakat Meningkat
- a. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga medis di wilayah pedesaan belum merata;
 - b. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
 - c. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
 - d. Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional yang berlangsung cepat dan dinamis, belum diikuti peningkatan

- profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedic, bidan, ahli gizi dan ahli sanitasi;
- e. Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat Yogyakarta belum optimal;
 - f. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia, memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.
4. Prioritas : Penanggulangan Kemiskinan; Sasaran : Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun
- a. Tingkat kemiskinan masih diatas rata-rata nasional;
 - b. Ketimpangan distribusi penduduk;
 - c. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
 - d. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
 - e. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih belum optimal;
 - f. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
5. Prioritas : Ketahanan Pangan; Sasaran : Pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat meningkat
- a. Pertanian
 - 1. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
 - 2. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
 - 3. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
 - 4. Produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
 - b. Perikanan dan Kelautan
 - 1. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat;

2. Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
3. SDM dan kelembagaan usaha perikanan belum memadai;
4. Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai;
5. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal;
- c. Ketahanan Pangan
 1. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
 2. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
 3. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan local masih kurang;
 4. Masih adanya daerah rawan pangan;
 5. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh masih rendah.
6. Prioritas : Infrastruktur ; Sasaran : Meningkatnya layanan publik bagi masyarakat
 - a. Transportasi
 1. Beberapa ruas jalan kondisinya mulai mengalami penurunan;
 2. Mulai terjadinya kemacetan pada titik-titik simpangan yang merupakan akses utama masyarakat;
 3. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
 4. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal;
 - b. Keciaptakaryaan
 1. Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
 2. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
 3. Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang layak;
 4. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan;

5. Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
 6. Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
 7. Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal.
- c. Tata Ruang
1. Pengaturan tata ruang dan wilayah belum optimal;
 2. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
 3. Disparitas antar wilayah masih tinggi;
 4. Perlunya percepatan pengembangan kawasan strategis;
 5. Masih belum optimalnya perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat.
 6. Belum adanya kerangka umum kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten sebagai implementasi Undang-Undang Keistimewaan DIY;
 7. Belum optimalnya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten;
 8. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan.
- d. Komunikasi dan Informatika
1. Masih minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang layanan teknologi informasi dalam rangka implementasi DGS;
 2. Masih belum optimalnya layanan unggulan DGS;
 3. Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi.
7. Prioritas : Iklim investasi dan usaha; Sasaran : Kunjungan wisatawan, investasi dan pengembangan industri serta UKM meningkat
- a. Pariwisata
1. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan;
 2. Masih belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
 3. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam menghadapi globalisasi;
 4. Standarisasi kualitas pelayanan wisata belum maksimal;

5. Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata.
 6. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
 7. Pengembangan produk pariwisata cenderung stagnan karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
 8. Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata;
 9. Masih tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain.
- b. Koperasi dan UMKM
1. Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
 2. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
 3. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
 4. Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah;
 5. Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
- c. Investasi
1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
 2. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
 3. Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan untuk lokasi proyek;
 4. Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;
 5. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
 6. Masih tingginya ketimpangan investasi antar kabupaten/kota.
- d. Industri
1. Daya saing produk UMKM belum kuat;
 2. Penggunaan bahan baku local belum optimal;
 3. Ketergantungan terhadap bahan baku/penolong impor masih tinggi;
 4. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
 5. Kemampuan teknologi IKM masih kurang.
- e. Perdagangan
1. Akses pasar masih rendah;
 2. Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;

3. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
 4. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;
 5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk lokal;
 6. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.
8. Energi
- a. Minimnya sumberdaya energi di wilayah DIY;
 - b. Upaya untuk penyediaan energi terbarukan belum maksimal;
 - c. Gerakan penghematan energi belum berjalan efektif;
 - d. Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal.
9. Lingkungan Hidup dan Bencana
- a. Tingginya konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun;
 - b. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan;
 - c. Belum optimalnya pengendalian terhadap penambangan dan pembangunan di kawasan lindung karst;
 - d. Peningkatan pencemaran air tanah;
 - e. Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan hutan;
 - f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah;
 - g. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah secara kewilayahan;
 - h. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca;
 - i. Semakin meningkatnya limbah cair, padat dan B3;
 - j. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau, khususnya di kawasan perkotaan;
 - k. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - l. Masih lemahnya kelembagaan pengelola air irigasi;
 - m. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, kekeringan dan potensi bahaya tsunami.

10. Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik

- a. Masih terdapat daerah yang akses dengan pusat pemerintahan/bisnis dengan fasilitas yang minim;
- b. Masih terdapat potensi konflik ditengah masyarakat baik karena sentimen agama maupun persoalan lainnya;

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

- a. Upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi belum berjalan optimal
- b. Arus globalisasi dan budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan budaya lokal cenderung semakin meningkat;
- c. Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) semakin terancam kelestariannya
- d. Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset untuk menarik kunjungan wisata belum optimal;
- e. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
- f. Penataan bangunan dan lingkungan pada area kawasan budaya masih belum optimal;
- g. Sarana dan Prasarana serta manajemen pengelolaan aset budaya masih belum memadai;
- h. Pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum maksimal;
- i. Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik untuk pengembangan riset/penelitian guna mendukung produktifitas dan daya saing daerah belum optimal;
- j. Kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar stake holders masih kurang;
- k. Penanggulangan kejahatan teknologi informasi masih lemah.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

- 1. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lerang tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung api Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama,

2. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun,
3. Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut,
4. Pencemaran air tanah meningkat menyebabkan tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi,
5. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin rebut, banjir tanah longsor, tsunami serta kekeringan menjadi tantangan di masa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan,
6. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan, serta sumberdaya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisannya lahan,
7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri,
8. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak,
9. Peningkatan limbah cair, padat dan B3,
10. Kurangnya penyediaan ruang hijau khususnya di Kawasan Perkotaan.

2.3.2.2 Kependudukan dan Demografi

1. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia,
2. Terjadinya ketimpangan penyebaran penduduk karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota khususnya kelompok usia muda produktif, dan lebih terdidik sehingga menghadapi kekurangan tenaga kerja dan sumber daya potensial untuk pembangunan wilayah, bahkan beberapa wilayah pedesaan mengalami pertumbuhan berkurang (*depupulasi*),
3. Pertambahan penduduk di kota juga diakibatkan oleh lulusan lembaga-lembaga pendidikan berasal dari luar daerah yang tidak ingin kembali kedaerahnya sesudah menamatkan pendidikannya,

4. Ketimpangan distribusi penduduk yang semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan social, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.

2.3.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Investasi, Industri dan Perdagangan

a. Investasi

- Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi,
- Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi,
- Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan belum siap,
- Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal,
- Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang,
- Tingginya ketimpangan investasi antara kabupaten/kota.

b. Industri

- Daya saing produk UMKM belum kuat,
- Penggunaan bahan baku lokal belum optimal dan tergantung bahan baku/penolong impor,
- Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan,
- Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI),
- Kemampuan teknologi IKM masih kurang.

c. Perdagangan

- Akses pasar masih rendah,
- Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung,
- Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan dan perlindungan konsumen masih kurang,
- Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor,
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri,

- Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.

2. Ketahanan Pangan

- a. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang,
- b. Belum optimalnya pemantauan, distribusi, harga dan akses pangan masyarakat,
- c. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang,
- d. Masih adanya daerah rawan pangan,
- e. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah.

3. Pertanian

- a. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian,
- b. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal,
- c. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang,
- d. Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan.

4. Perikanan dan Kelautan

- a. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat,
- b. Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal,
- c. SDM dan kelembagaan usaha perikanan kurang memadai,
- d. Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai,
- e. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal,
- f. Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan dan pengkayaan sumberdaya serta system ekologisnya secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

5. Kehutanan

- a. Perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal,
- b. Perbaikan ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu diperbaiki,
- c. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, social, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal,
- d. Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal.

6. Pariwisata

- a. Rendahnya lama tinggal wisatawan,
- b. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya,
- c. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan meadai dalam menghadapi globalisasi,
- d. Suasana kondusif masih seering terganggu oleh munculnya isu politik, keamanan dan kesehatan,
- e. Kualitas pelayanan wisata belum standar,
- f. Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata,
- g. System manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata,
- h. Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata,
- i. Tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain.

7. Koperasi dan UKM

- a. Jumlah koperasi aktif masih sedikit,
- b. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal,
- c. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang,
- d. Kualitas SDM pengelola koeprasi dan UMKM masih rendah,
- e. Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.

2.3.2.4 Sosial dan Budaya

a. Sosial

- 1) Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang sejatinya merupakan hak semua orang masih kurang dan belum merata.
- 2) Penurunan angka kemiskinan masih perlu terus diupayakan secara terpadu melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dengan mengedepankan program-program pemberdayaan.

- 3) Pola-pola Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial masih belum optimal.
- 4) Kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial masih belum optimal. Secara umum kapasitas dan kualitas tenaga kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan. Lembaga kesejahteraan sosial perlu didorong lebih sigap dan tanggap terhadap permasalahan sosial yang ada.
- 5) Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sesuai amanat Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum berjalan seperti yang diharapkan.
- 6) Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal

b. Kesehatan

- 1) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan kunjungan neonatus pertama (KN-1) belum optimal.
- 2) Mutu layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- 3) Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum masih perlu ditingkatkan.
- 4) Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional yang berlangsung cepat dan dinamis, belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
- 5) Rasio kemampuan pelayanan kesehatan dan tenaga medis di wilayah perdesaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat belum merata

c. Pendidikan

- 1) Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar masih belum optimal.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya atau ada kecenderungan terjadi kapitalisme pendidikan;

- 3) Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi
 - 4) Pendidikan cenderung mekanistik;
 - 5) Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY masih belum optimal;
 - 6) Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
 - 7) Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta;
 - 8) Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
 - 9) Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
 - 10) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;
 - 11) Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya;
 - 12) Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- d. Kebudayaan
- 1) Pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara optimal bahkan beberapa terancam keberadaannya.
 - 2) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan

budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal

- 3) Pengelolaan dan Pembinaan desa budaya sebagai beteng pertahanan nilai tradisional yang berpredikat maju masih jauh dari harapan.
 - 4) Belum optimalnya upaya untuk melakukan penggalan, revitalisasi dan aktualisasi terhadap nilai budaya, adat dan tradisi sebagai way of life bagi masyarakat pada umumnya.
 - 5) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa.
 - 6) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia.
 - 7) Regenerasi pelaku seni tradisi kurang diminati oleh generasi muda.
- e. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja
- 1) Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal.
 - 2) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dengan jenis kekerasan yang semakin beragam serta bersifat lintas daerah.
 - 3) Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
 - 4) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai
- f. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 1) Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi kebutuhan di pasar kerja. Kesenjangan ini membuat pencari kerja sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan.

- 2) Jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga tidak bisa menampung angkatan kerja yang ada. Perluasan kesempatan kerja belum optimal.
- 3) Minat penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan.
- 4) Kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih cukup tinggi.
- 5) Kerja sama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal. Kondisi daerah penempatan yang sudah disiapkan sering kali tidak sesuai dengan azas 2 C (*Clear and Clean*) dan 4 L (Layak huni, Layak berkembang, Layak lingkungan dan Layak usaha).

g. Agama

- 1) Masih terdapat potensi konflik di masyarakat yang berlatar belakang sentimen agama;

2.3.2.5 Pemerintahan dan Politik

a. Pemerintahan dan Politik

- 1) Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
- 2) Belum optimalnya implementasi *Good Governance*
- 3) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal
- 4) Internalisasi Budaya Satria Pemerintahan kurang intensif dan kurang efektif

b. Hukum

- 1) Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- 2) Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- 3) Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
- 4) Penegakan supremasi hukum masih lemah.

c. Kerjasama

- 1) Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;

- 2) Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;
- 3) Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.

2.3.2.6 Prasarana Wilayah

a. Transportasi

- 1) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
- 2) Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal;
- 3) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal;
- 4) *load factor* angkutan umum belum sesuai harapan disebabkan oleh minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang rendah.
- 5) Semakin banyaknya titik-titik kemacetan di wilayah perkotaan karena masyarakat mengandalkan kendaraan pribadi.

b. Sumber Daya Air

- 1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 2) Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air
- 3) Upaya peningkatan penyediaan air baku belum sebanding dengan meningkatnya kebutuhan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perkotaan di DIY.
- 4) Kelembagaan pengelola irigasi dan pengairan belum berfungsi secara optimal
- 5) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang rawan potensi Banjir dan bahaya kekeringan

c. Keciaptakaryaan

- 1) Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mengalami kesulitan memperoleh akses untuk mendapatkan lahan untuk perumahan / perumahan yang layak huni.

- 2) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin yang mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbandung.
- 3) Sarana dan prasarana untuk pengembangan perumahan dan permukiman belum dijalankan secara terpadu.
- 4) Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan
- 5) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan;
- 6) Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
- 7) Belum tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan budaya;
- 8) Masih terdapatnya lokasi genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta;
- 9) Belum optimalnya layanan jasa konstruksi

d. Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Upaya pemenuhan kebutuhan energi di DIY melalui penyediaan energi baru terbarukan masih belum maksimal;
- 2) Penyelenggaraan konservasi air tanah belum menjadi prioritas utama
- 3) Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal.

e. Tata Ruang

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah DIY belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
- 2) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.
- 3) Masih tingginya disparitas antar wilayah membutuhkan percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah;
- 4) Kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial;

- 5) Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan;
- 6) Belum adanya kerangka umum kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten sebagai implementasi Undang-Undang Keistimewaan DIY;
- 7) Belum optimalnya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten;
- 8) Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal, dan keberpihakan kepada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan.

f. Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

- 1) Pelaksanaan Program DGS belum sesuai dengan harapan, yakni belum terintegrasinya Program DGS di setiap SKPD
- 2) Belum optimalnya layanan unggulan DGS;
- 3) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi.

BAB 3

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah yang akan dibangun sesuai dengan Misi RPJMD 2012–2017 yaitu menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian DIY terkini dan proyeksinya di beberapa tahun mendatang yang dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 24,57 trilyun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40%.

RKPD Tahun 2015

Nilai proyeksi PDRB tahun 2015 sebesar Rp 27.407.014 juta dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 29.042.373 juta. Kenaikan PDRB DIY ini disebabkan berbagai faktor, salah faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB DIY adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi DIY baik industri, pariwisata, perdagangan, ataupun pendidikan.

Selain itu jumlah industri dan tenaga kerja juga merupakan faktor pendukung dari pertambahan PDRB DIY. Selain faktor internal tersebut faktor eksternal juga dapat mempengaruhi PDRB DIY seperti *regional spillover* atau pengaruh daerah batas. Perkembangan daerah perbatasan atau daerah sekitar DIY tersebut juga akan dapat berpengaruh positif atau dapat menjadi faktor pendorong tumbuhnya PDRB DIY.

Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi Renaisans Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di DIY. Peningkatan PDRB tersebut harus dilandasi semangat Renaisans Yogyakarta, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Tabel 3.1 **Proyeksi Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015=2016**

Uraian	2015		2016	
	m	o	m	o
PDRB DIY (Juta Rp)	23.295.962	27.407.014	24.686.017	29.042.373
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,96	5,83	5,07	5,97

Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,83% dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 5,97% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi DIY ini akan didorong oleh kegiatan-kegiatan di sektor konstruksi dengan akan terus terjadi pembangunan di DIY, khususnya di Kabupaten Kulon Progo dengan pembangunan bandara baru dan pembangunan daerah-daerah sekitarnya. Perkembangan perekonomian di DIY akan menarik investasi lebih besar dengan terus naiknya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi baik berupa PMA dan PMDN ini sangat diperlukan oleh sektor pariwisata dan perdagangan untuk mengembangkan pariwisata DIY.

Sektor industri juga sangat membutuhkan investasi untuk dapat mengembangkan usahanya, sehingga ketika kedua sektor andalan DIY (Pariwisata dan Industri) ini berkembang maka akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi di

DIY cukup baik, sehingga banyak investor berminat untuk terus menanamkan dananya di DIY. Kemudian untuk meningkatkan kinerja suatu industri agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan juga tenaga kerja yang terampil. Selain kedua faktor tersebut, faktor konsumsi juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi DIY, semakin tinggi konsumsi maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

Upaya peningkatan pertumbuhan pada wilayah potensial (Gunungkidul dan Kulon Progo) diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian DIY yang selama ini memiliki disparitas wilayah yang cukup tinggi dan daya saing yang belum optimal dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah Jawa, Jawa-Bali dan nasional, pertumbuhan ekonomi DIY masih dibawah rata-rata. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa tahun 2013 sebesar 6,14 %. Wilayah sekitar DIY pada tahun yang sama memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan DIY, yakni : 5,81% untuk Jawa Tengah, 6,55% untuk Jawa Timur, 6,06% untuk Jawa Barat, dan 6,11% untuk DKI Jakarta.

3.1.2 Struktur Sektor Ekonomi

Capaian pada tahun 2013, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalian. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi di bawah satu persen dari total PDRB.

Tabel 3.2 Kontribusi PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), 2013-2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014*	2015*	2016*	2017*
1. Pertanian	16,36	15,97	15,57	15,17	14,76
2. Pertambangan dan Penggalian	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64
3. Industri Pengolahan	12,41	12,17	11,94	11,70	11,46
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,94	0,95	0,95	0,95	0,96
5. Konstruksi	9,76	9,84	9,92	10,00	10,07
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	21,75	21,96	22,17	22,39	22,60
7. Transportasi dan Komunikasi	10,90	11,04	11,18	11,33	11,48
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	9,93	10,09	10,25	10,41	10,57
9. Jasa-jasa	17,25	17,31	17,36	17,41	17,47
PDRB	100	100	100	100	100

Keterangan: * adalah angka proyeksi

Sumber: analisa BRS BPS DIY & Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018

RKPD Tahun 2015

Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2015 diproyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang sampai tahun 2017, mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor karena beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat melalui perluasan pasar dan peningkatan daya saing, sehingga diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada tren meningkat dengan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era golden age angkatan kerja Indonesia.

Secara sektoral seperti ditampilkan dalam Tabel 3.3., pertumbuhan PDRB menunjukkan dinamika di hampir semua sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian yang proyeksi pertumbuhannya selalu di bawah tiga persen tiap tahunnya. Trend tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus karena pertumbuhan aktual sector pertanian pada beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tertekan (bahkan pernah mengalami kontraksi pada tahun 2010-2011), berkaitan dengan adanya dampak anomaly iklim. Pertumbuhan output sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian. Namun, sektor pertanian diharapkan masih memberikan kontribusi besar dalam perekonomian DIY karena kontribusi tenaga kerja sector pertanian masih cukup dominan dan luasan lahan pertanian (terutama pertanian lahan kering) yang masih cukup dominan di DIY serta kaitan erat sector strategis ini dengan problem ketahanan pangan.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000) Tahun 2013-2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014*	2015*	2016*	2017*
1. Pertanian	4,44	3,13	3,19	3,23	3,24
2. Pertambangan dan Penggalian	2,92	4,06	4,18	4,29	4,36
3. Industri Pengolahan	2,37	3,67	3,77	3,86	3,89
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6,93	6,22	6,36	6,51	6,57
5. Konstruksi	6,68	6,53	6,66	6,79	6,85
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,88	6,70	6,84	6,99	7,06
7. Transportasi dan Komunikasi	7,73	7,02	7,18	7,36	7,44
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	6,47	7,36	7,48	7,64	7,70
9. Jasa-jasa	4,58	6,01	6,15	6,24	6,45

Keterangan: * adalah angka proyeksi

Secara makro regional, kondisi internal domestik DIY yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi DIY adalah misi dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan good governance sebagai misi utama seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-nya. Perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan membuat lompatan perbaikan iklim investasi pada wilayah potensial sebagai penopang perekonomian makro yang senantiasa tumbuh secara berkualitas di DIY dalam satu dasawarsa mendatang.

3.1.3 Inflasi

Pada tahun 2005, 2008, dan 2013 tingkat inflasi DIY lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional. Selain pada tahun-tahun tersebut tingkat inflasi DIY selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional. Tingkat inflasi DIY melonjak dari 4,31% pada tahun 2012 menjadi 7,32% pada tahun 2013. Demikian juga tingkat inflasi nasional melonjak dari 4,3% menjadi 8,38%. Lonjakan tingkat inflasi ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak yang mencapai lebih dari 30% mengakibatkan naiknya harga-harga secara umum serta arus keluar modal dalam bentuk mata uang dollar mengakibatkan depresiasi terhadap mata uang rupiah sehingga barang-barang yang berasal dari luar negeri menjadi lebih mahal. Tabel 3.6. menunjukkan data tingkat inflasi tahunan dari tahun 2005 sampai tahun 2013.

RKPD Tahun 2015

Tabel 3.4 Perbandingan Inflasi DIY dengan Inflasi Nasional Tahun 2005-2013 (%)

Tahun	Yogyakarta	Nasional
2005	14,98	17,11
2006	10,40	6,60
2007	7,99	6,59
2008	9,88	11,06
2009	2,93	2,78
2010	7,38	6,96
2011	3,88	3,79
2012	4,31	4,30
2013	7,14	8,38

Sumber: BPS DIY, 2013

Proyeksi inflasi DIY mengalami kenaikan dari 7,45 pada tahun 2015 menjadi 8,02 pada tahun 2016. Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi Jumlah Uang Beredar (JUB) dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi. Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI.

Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran *supply* dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di DIY.

Tabel 3.5 Proyeksi Inflasi DIY Tahun 2015-2016 (%)

Tahun	Inflasi	
	Moderat	Optimis
2015	7,49	7,45
2016	8,06	8,02

Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

3.1.4 ICOR

Incremental Capital-Output Ratio atau ICOR merupakan rasio antara pertambahan modal dengan pertambahan output. Besarnya ICOR menunjukkan tambahan modal yang diperlukan untuk dapat meningkatkan satu unit output. Semakin kecil nilai ICOR, perekonomian dikatakan semakin efisien dalam hal penggunaan modal. Nilai ICOR juga berkaitan dengan produktivitas. Nilai ICOR yang kecil mencerminkan produktivitas yang tinggi karena dengan tingkat modal yang sama mampu dihasilkan tingkat output yang lebih tinggi. Tingkat output selanjutnya akan berdampak pada PDRB dan pertumbuhan ekonomi.

Nilai aktual ICOR dari tahun 2010 sampai tahun 2012 menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat diartikan bahwa perekonomian DIY semakin efisien dari tahun ke tahun. Penurunan nilai ICOR dapat disebabkan oleh adanya alih teknologi modern serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Teknologi dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan tingkat produktivitas serta efisiensi perekonomian.

Tabel 3.6 Perkembangan ICOR DIY Tahun 2010-2016

Tahun	2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*	2016*
ICOR	6,33	5,97	5,79	5,09	5,62	4,15	3,68

Sumber: Analisis ICOR Sektoral DIY, BPS, Bappeda

3.1.5 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dari tahun 2009 sampai tahun 2011 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebesar 7,13% atau dari 2.016.694 orang menjadi 1.872.912 orang. Jumlahnya kemudian naik sebesar 4% pada tahun 2012 menjadi 1.944.858 orang dan kembali turun sebesar 2% pada tahun 2013 menjadi 1.910.959 orang.

Proyeksi untuk tahun 2015 dan 2016 angkatan kerja di DIY terus mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan juga kondisi di DIY akan terus membaik, baik dari sisi tingkat kesehatan, usia harapan hidup yang lebih panjang, kesempatan kerja yang semakin terbuka, dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi maupun kesiapan calon pekerja masuk ke angkatan kerja.

Tabel 3.7 Penduduk Bekerja, Pengangguran Terbuka, dan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2009-2016

Tahun	Bekerja		Pengangguran Terbuka		Jumlah Angkatan Kerja
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2009	1.895.648	94	121.046	6,00	2.016.694
2010	1.775.148	94,31	107.148	5,69	1.882.296
2011	1.798.595	96,03	74.317	3,97	1.872.912
2012	1.867.708	96,03	77.150	3,97	1.944.858
2013	1.847.070	96,66	63.889	3,34	1.910.959
2014*	1.869.643	95,69	84.285	4,31	1.953.928
2015*	1.881.271	95,91	80.147	4,09	1.961.418
2016*	1.892.900	96,14	76.009	3,86	1.968.909

Sumber: BPS Provinsi DIY & Analisis Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

Pada tahun 2009 tingkat pengangguran terbuka DIY mencapai 6,00% dari total angkatan kerja. Tren yang semakin menurun terlihat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi DIY yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Data aktual menunjukkan bahwa pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka telah jauh berkurang menjadi 3,34%.

Untuk pengangguran terbuka di DIY selama 2008-2012 cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan di angka 121.046 orang dari angka 107.529 orang di tahun 2008. Tahun 2012 jumlah pengangguran terbuka di DIY juga mengalami kenaikan yaitu dari 74.317 orang di tahun 2011 menjadi 92.561 orang di tahun 2012.

Tetapi untuk proyeksi pengangguran terbuka tahun 2013 sampai 2016 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi bilamana kualitas pertumbuhan ekonomi di DIY dapat semakin baik dengan terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar, penyediaan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta tingkat upah yang terus membaik.

Selama periode 2009-2013 jumlah orang yang bekerja di DIY cenderung fluktuatif. Tahun 2010 merupakan tahun dengan kemampuan menyerap orang bekerja terendah di DIY yaitu sebesar 1.775.148 orang, jauh di bawah tahun sebelumnya (2009) yang dapat menyerap orang bekerja sebanyak 1.895.648 orang. Tetapi mulai tahun 2011 kemampuan perekonomian DIY dalam menyerap tenaga kerja terus meningkat mulai dari angka 1.798.595 orang, kemudian meningkat cukup

signifikan menjadi 1.867.708 orang di tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2012 di DIY telah berhasil dibuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Namun, di tahun 2013 sedikit mengalami penurunan jumlah orang bekerja menjadi 1.847.070 orang.

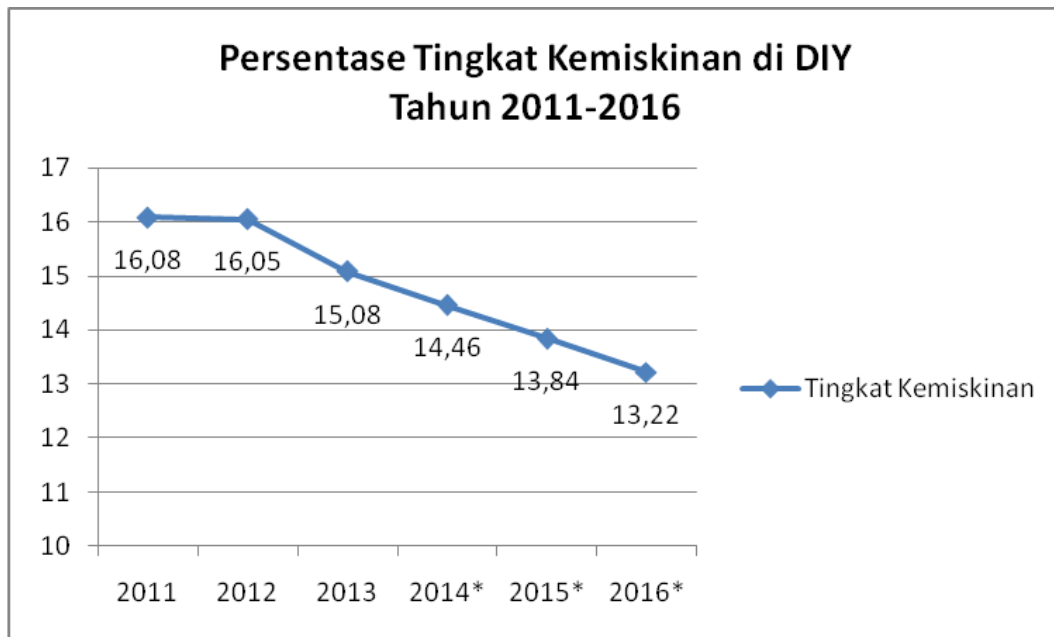
Proyeksi jumlah orang bekerja di DIY tahun 2015 sebanyak 1.881.271 orang dan naik lagi menjadi sebanyak 1.892.900 orang di tahun 2016. Hasil proyeksi yang naik ini mengindikasikan harapan semakin majunya perekonomian DIY ke depan akan dapat semakin membuka kesempatan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih besar lagi dari tahun ke tahun.

Jumlah angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketenagakerjaan di DIY di antaranya adalah tingkat upah, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan elastisitas penyerapan tenaga kerja.

Dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat pendidikan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta upah yang cukup maka akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja DIY, sehingga akan dapat membantu menurunkan tekanan permasalahan dari pengangguran di DIY. Proyeksi tahun 2015 dan 2016 untuk DIY tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dan orang yang bekerja sama-sama mengalami kenaikan, tetapi pengangguran terbuka mengalami penurunan. Ini menggambarkan adanya optimisme yang kuat pada kualitas laju pertumbuhan ekonomi DIY, khususnya kemampuan dalam menyerap tenaga kerja.

3.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan penting dalam pembahasan pembangunan ekonomi. Di DIY, sebaran penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Selama ini kegiatan ekonomi DIY lebih terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sehingga tidak terjadi pemerataan dalam berbagai hal seperti kesempatan kerja, fasilitas, dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, yang semua itu nantinya berdampak pada tidak meratanya tingkat pendapatan.



Sumber: BPS Provinsi DIY & Analisis Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

Ket: *Angka Proyeksi

Gambar 3.1 Persentase Tingkat Kemiskinan DIY, Tahun 2011-2016

Dari Grafik di atas terlihat persentase penduduk miskin DIY selama periode 2011-2016 mengalami penurunan setiap tahunnya baik untuk riil maupun untuk proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY. Hal ini mengindikasikan perubahan kondisi yang terus membaik di DIY, tetapi angka penurunan penduduk miskin tersebut dirasakan masih terlalu kecil.

Nilai proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY untuk tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY di proyeksikan sebesar 13,84% dan pada tahun 2016 menjadi 13,22%. Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang semakin tinggi merupakan faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin adalah naiknya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh tingkat upah atau gaji yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja maka semakin baik daya belinya. Begitu pula semakin baiknya tingkat pendidikan yang dicapai penduduk maka akan meningkatkan tingkat kualitas tenaga kerja yang dihasilkan sehingga akan memberi peluang lebih besar memperoleh pekerjaan dengan upah atau gaji yang lebih tinggi. Dengan demikian semakin

banyak orang yang memperoleh pekerjaan yang layak maka akan dapat meningkatkan tingkat pendapatannya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya akan dapat mengurangi kemiskinan di DIY.

3.1.7 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Besarnya Indeks Williamson berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya ketimpangan antar wilayah semakin rendah. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya ketimpangan antar wilayah semakin tinggi. Indeks Williamson DIY memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pemusatan kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu serta masalah tidak meratanya pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi menjadikan ketimpangan antar wilayah di DIY semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Indeks Williamson dari sebesar 0,441 pada tahun 2007 menjadi 0,454 pada tahun 2011. Diperkirakan ketimpangan regional DIY akan terus meningkat hingga mencapai 0,462 pada tahun 2016.

Tabel 3.8 Indeks Williamson DIY Tahun 2007-2016

Tahun	Indeks Williamson
2007	0,441
2008	0,443
2009	0,442
2010	0,451
2011	0,454
2012*	0,455
2013*	0,457
2014*	0,459
2015*	0,461
2016*	0,462

Sumber: Analisis PRDB DIY, BPS, Bappeda, diolah

3.1.8 Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini (IG) berfungsi untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah. Terdapat 3 (tiga) kategori tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yaitu ketika $IG < 0,3$ maka masuk ke dalam kategori ketimpangan rendah; $0,3 < IG < 0,5$ maka masuk kategori ketimpangan sedang dan $IG > 0,5$ maka masuk kategori ketimpangan tinggi. Dari grafik di atas terlihat selama periode 2008-2013 Indeks Gini DIY terlihat fluktuatif, dan indeks Gini memiliki nilai tertinggi sebesar 0,3221

RKPD Tahun 2015

pada tahun 2008. Untuk nilai proyeksi indeks Gini tahun 2015 dan 2016 mengalami trend penurunan. Secara keseluruhan indeks Gini DIY masih tergolong rendah.

Tabel 3.9 Indeks Gini DIY Tahun 2008-2016

Tahun	Indeks Gini
2008	0,322
2009	0,311
2010	0,308
2011	0,315
2012	0,319
2013	0,311
2014*	0,309
2015*	0,307
2016*	0,305

Sumber: BPS Provinsi DIY & Analisis Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY

Melihat proyeksi Indeks Gini di DIY tahun 2015 yang berada di angka 0,307 maka hal ini mengindikasikan ketimpangan di DIY masih rendah. Demikian juga melihat proyeksi IG di DIY tahun 2016 yang sebesar 0,305, maka ketimpangan distribusi di DIY tahun 2016 juga masih masuk kategori rendah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IG antara lain; pendapatan dan pengeluaran penduduk dan komposisi jumlah penduduk.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2013-2016

URAIAN	JUMLAH			
	Realisasi 2013 (n-2)	Tahun 2014 (n-1)	Proyeksi Tahun 2015 (n)	Proyeksi Tahun 2016 (n+1)
PENDAPATAN	2.583.088.480.752,71	3.100.197.642.855,00	2,556,623,591,480.00	3.930.844.900.784,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.216.134.468.845,71	1.233.738.561.833,00	1,280,328,436,949.00	1.406.008.528.671,96
Pajak Daerah	1.063.314.117.923,00	1.098.908.544.000,00	1,118,495,568,020.00	1.243.667.006.382,08
Hasil Retribusi Daerah	38.043.014.004,85	36.670.321.618,00	50,204,171,008.00	52.198.311.946,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.817.517.188,12	45.505.543.305,00	55,978,161,721.00	45.763.126.519,42
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73.959.817.729,74	52.654.152.910,00	55,650,536,200.00	64.380.083.823,91
DANA PERIMBANGAN	957.561.850.914,00	1.038.621.026.022,00	991,119,832,456.00	1.287.656.390.341,88
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	94.731.182.914,00	101.565.866.022,00	91,196,282,456.00	123.905.681.405,17
Dana Alokasi Umum	828.334.768.000,00	899.923.550.000,00	899,923,550,000.00	1.163.750.708.936,70
Dana Alokasi Khusus	34.495.900.000,00	37.131.610.000,00	991,119,832,456.00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	409.392.162.993,00	827.838.055.000,00	285,175,322,075.00	1.237.179.981.770,54
Pendapatan Hibah	10.291.886.370,00	9.176.500.000,00	9,014,782,075.00	7.250.381.066,16
Dana Darurat	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	399.100.276.623,00	818.661.555.000,00	276,160,540,000.00	1.229.929.600.704,38
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-

RKPD Tahun 2015

URAIAN	JUMLAH			
	Realisasi 2013 (n-2)	Tahun 2014 (n-1)	Proyeksi Tahun 2015 (n)	Proyeksi Tahun 2016 (n+1)
BELANJA	2.509.508.667.286,35	3.330.069.349.990,00	2.816,238,743,827	3.938.702.026.316,35
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.440.393.543.166,78	1.547.087.119.162,00	1,040,961,788,522	1.405.138.430.969,04
Belanja Pegawai	491.076.722.446,00	525.443.855.620,00	525,725,226,408	669.949.047.288,82
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	437.079.581.000,00	488.152.850.980,00	23,250,200,000	200.000.000.000,00
Belanja Bansos	12.509.468.500,00	14.631.602.000,00	-	20.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	376.702.290.858,78	378.007.606.000,00	392,312,420,614	373.100.101.914,62
Bantuan Keuangan	123.025.480.362,00	130.851.204.562,00	84,104,200,000	132.089.281.765,60
Belanja Tidak Terduga	-	10.000.000.000,00	15,569,741,500	10.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	1.069.115.124.119,57	1.782.982.230.828,00	1,775,276,955,305	2.533.563.595.347,31
Belanja Pegawai	143.752.008.434,00	96.354.895.896,00	-	132.671.450.284,68
Belanja Barang dan Jasa	555.967.321.646,57	1.287.507.707.310,00	-	811.567.442.435,99
Belanja Modal	369.395.794.039,00	399.119.627.622,00	-	389.324.702.626,64
DEFISIT/SURPLUS	73.579.813.466,36	(229.871.707.135,00)	(259,615,152,347)	(7.857.125.531,97)
PEMBIAYAAN	308.607.708.591,84	229.871.707.135,00	259,615,152,347	7.857.125.531,97
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	403.201.658.867,84	280.821.707.135,00	269,615,152,347	138.392.125.531,97
SILPA	379.241.941.052,56	280.821.707.135,00	269,615,152,347	124.982.125.531,97
Pencairan Dana Cadangan	3.224.600.842,28	-	-	-
Hasil Penjualan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	20.368.526.960,00	-	-	13.410.000.000,00
Penerimaan dari Penyusutan	366.590.013,00	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	94.593.950.276,00	50.950.000.000,00	10,000,000,000	130.535.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal	94.593.950.276,00	50.950.000.000,00	10,000,000,000	130.535.000.000,00
Pembayaran Hutang	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
DPAL	-	-	-	-
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu	-	-	-	-

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;

4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan

Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 63%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping

peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumberpungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

- 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
- 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- 8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- 9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

- 1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah,
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan

yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2015 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

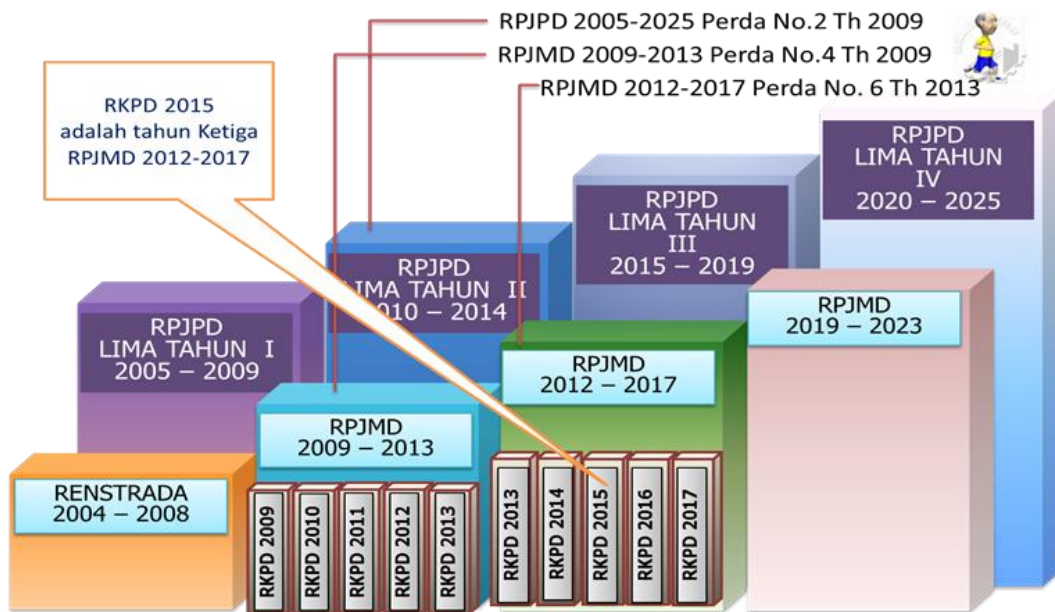
BAB 4

Tema, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1 Tema Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.



Gambar 4.1 Posisi Dokumen RKPD 2015 Terhadap RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2012-2017

2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009-2029
Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap II (2015-2019) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029, dalam rangka mewujudkan struktur ruang provinsi dan sistem transportasi yang meliputi:
 - a. Perwujudan Sistem Perkotaan Provinsi
 - b. Perwujudan sistem transportasi DIY
 - c. Perwujudan Sistem prasarana lainnya
 - d. Perwujudan kawasan lindung nasional dan provinsi
 - e. Perwujudan kawasan budidaya
 - f. Perwujudan pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017.
Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari RPJMD Tahun 2012-2017 untuk mewujudkan visi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. Tahapan Tahun 2015 sebagaimana dalam tahapan indikasi tema tahunan RPJMD 2012-2017 adalah mendayagunakan dan menguatkan (SDM unggul, kemiskinan dan pengangguran menurun, ekonomi tumbuh, pemerataan perekonomian serta infrastruktur mantap.

RKPD Tahun 2015

Skenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah. Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2009-2013, dimana tahun terakhir RPJMD 2009-2013 akan menjadi tahun awal Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2009-2013, maka tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan RPJPD Lima Tahun II dan tahapan RPJPD Lima Tahun III.

Tabel 4.1 Tahapan Utama RPJPD 2005-2025

RPJPD Lima Tahun I (2005 – 2009)	RPJPD Lima Tahun II (2010 – 2014)	RPJPD Lima Tahun III (2015 – 2019)	RPJPD Lima Tahun IV (2020 – 2025)
Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi ekonomi dan industri unggulan.	Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (<i>backward effect & forward effect</i>) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan.	Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.	Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energy.
<i>Keyword:</i> Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar	<i>Keyword:</i> Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan	<i>Keyword:</i> Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun	<i>Keyword:</i> Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita

2012-2017

Tahapan secara umum Tahun 2012-2017 dengan memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.2 Posisi Dokumen RKPD 2015 Terhadap Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2012-2017

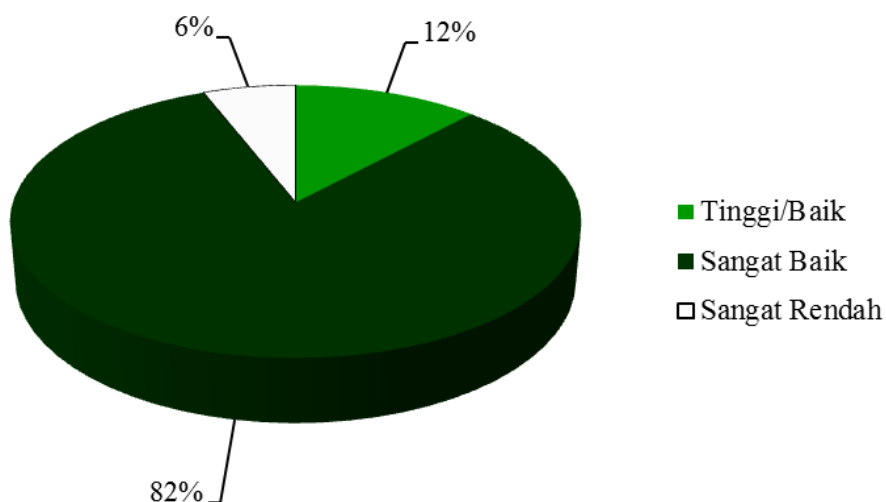
4. Tema Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 adalah *"Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan"*. Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan lptek yang terus meningkat. Berkeadilan pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan.
5. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 18/K/DPRD/2014, point-point arahan DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Berkenaan dengan pembangunan ekonomi, diharapkan untuk mencari terobosan-terobosan dalam rangka peningkatan investasi dan mengoptimalkan potensi daerah.
 - b. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki DIY tentunya perlu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan terutama terkait

dengan angka melek huruf karena sebagai daerah pendidikan maka sudah sewajarnya jika DIY dapat membuat semua penduduk DIY melek huruf. Selain itu tingginya angka harapan hidup yang berkorelasi dengan indikator kesehatan juga harus terus dijaga dan ditingkatkan diantaranya dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki serta mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DIY.

- c. Upaya penurunan kemiskinan sudah sangat diperlukan terobosan-terobosan baru, mengingat sudah beberapa tahun angka kemiskinan di DIY termasuk yang tertinggi di Indonesia dan berada di atas angka kemiskinan nasional. Diperlukan adanya kebijakan dan program yang langsung ditujukan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga miskin.
 - d. Melihat strategisnya sektor pariwisata bagi DIY maka diperlukan kebijakan dan program untuk menjaga dan meningkatkan daya tarik sektor pariwisata DIY agar dapat sebagai destinasi wisata utama di Indonesia. Meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke DIY dengan memberikan fasilitas-fasilitas akses dan mudah dijangkau.
6. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya RKPD Tahun 2013.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur tahun 2013 berjumlah 17, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 16 IKU telah memenuhi kriteria tinggi (2 IKU) maupun bahkan, lebih banyak yang masuk kriteria sangat baik (14 IKU). Satu IKU yaitu “Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya” belum ditentukan target kinerjanya pada tahun 2013. “Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya” mempunyai target N/A dan realisasi 0 disebabkan adanya penyesuaian indikator kinerja lama pada tahapan RPJMD yang lama menjadi indikator kinerja baru sesuai RPJMD 2012-2017 akan dihitung mulai tahun 2014. Dengan demikian, pada tahun 2014 baru akan dilakukan perhitungan jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembinaan model pendidikan berbasis budaya dan model unggulan mutu pendidikan.

Untuk 2 IKU yang masuk kriteria baik, adalah IKU “Lama Tinggal Wisatawan Nusantara” yang realisasinya mencapai 79.50% dari target, dan IKU “Lama tinggal wisatawan mancanegara” yang mencapai 88,37% dari target.

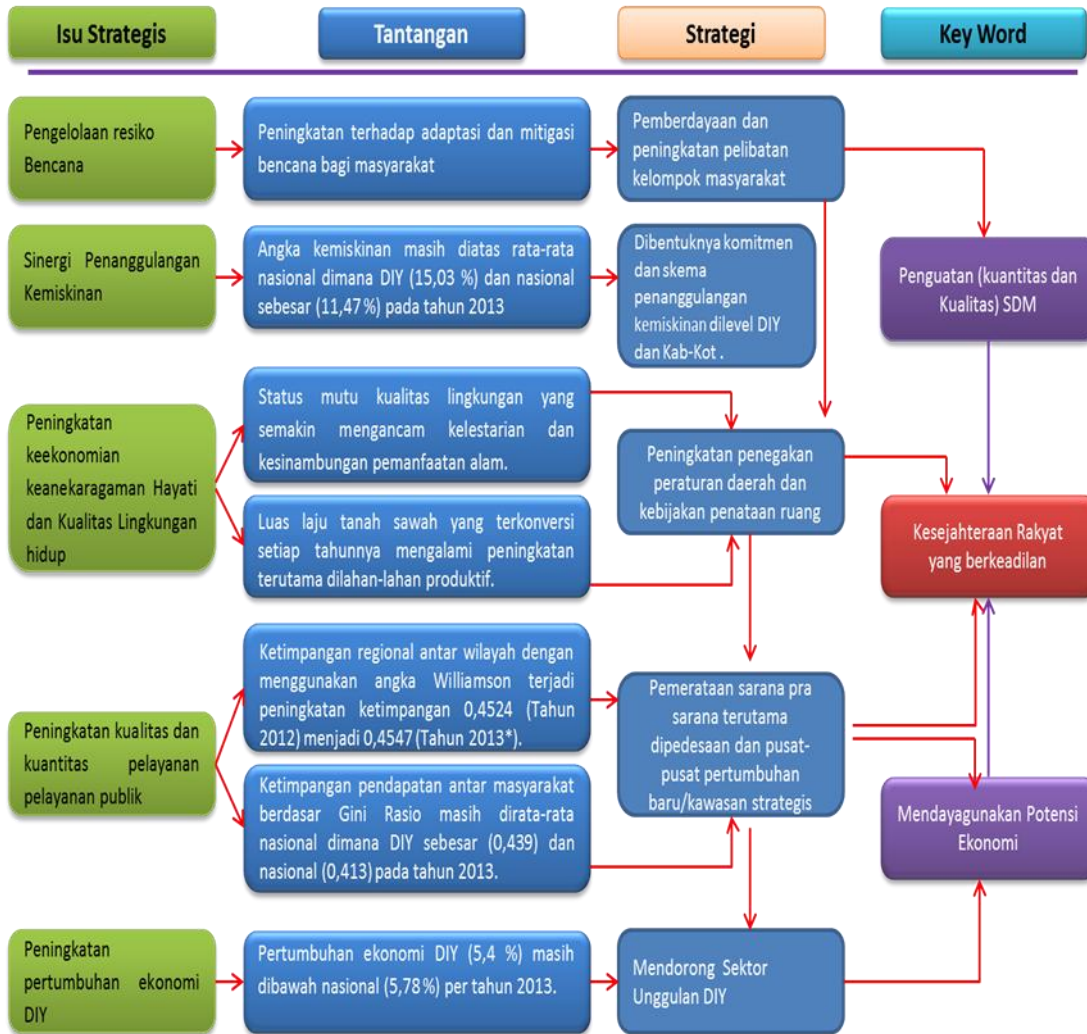


Gambar 4.3 Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2013

Sementara 14 IKU yang lain, pencapaiannya masuk kategori sangat baik ($\geq 91\%$). Bahkan, 7 IKU diantaranya, mencapai lebih dari 100% dari target tahun 2013. Mayoritas IKU Gubernur 2013 telah berhasil dicapai dengan kriteria tinggi (12%) dan sangat baik (82%). Untuk pencapaian dengan kriteria sangat baik, bahkan 6 dari 14 IKU atau 42.85% diantaranya, realisasinya bahkan mencapai lebih dari 100% dari rencana kinerja yang dicanangkan.

- b. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:
- 1) Sinergi Penanggulangan Kemiskinan, Angka kemiskinan masih diatas rata-rata nasional dimana DIY (15,03 %) dan nasional sebesar (11,47 %) pada tahun 2013.
 - 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY, Pertumbuhan ekonomi DIY (5,4 %) masih dibawah nasional (5,78 %) per tahun 2013.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan publik:
 - a) Cakupan Kunjungan penduduk miskin pada fasilitas kesehatan masih sangat rendah (0,49%).

- b) Ketimpangan regional antar wilayah dengan menggunakan angka Williamson terjadi peningkatan ketimpangan 0,4524 (Tahun 2012) menjadi 0,4547 (Tahun 2013*).
 - c) Ketimpangan pendapatan antar masyarakat berdasar Gini Rasio masih dirata-rata nasional dimana DIY sebesar (0,439) dan nasional (0,413) pada tahun 2013.
 - d) Pemenuhan pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.
- 4) Pengelolaan resiko Bencana,
- a. Peningkatan terhadap adaptasi dan mitigasi bencana bagi masyarakat.
 - b. Kawasan rawan bencana alam di DIY perdasarkan Peraturan Daerah DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW meliputi kawasan rawan letusan gunung berapi, Kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, kekeringan, dan gempa bumi.
- 5) Peningkatan keekonomian keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan hidup.
- a. Status mutu kualitas lingkungan yang semakin mengancam kelestarian dan kesinambungan pemanfaatan alam. Kualitas nilai baku 9 sungai di DIY yang dalam kondisi tercemar pada tahun 2012 dengan metode storet (merupakan salah satu metode untuk mengetahui status mutu air dengan membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air menggunakan sistem nilai dari US-EPA). Kualitas air tanah yang juga mengalami degradasi terutama dikarenakan adanya kandungan mangan, bakteri *coliform* dan bakteri coli tinja.
 - b. Luas laju tanah sawah yang terkonversi setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama dilahan-lahan produktif.



Gambar 4.4 Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan Key Word Tema Tahun 2015

Mendasarkan sebagaimana point-point diatas adapun tema RKPD DIY Tahun 2015 adalah **Menguatkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan**. Menguatkan SDM, baik kuantitas dan kualitas SDM, baik itu masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan aparatur pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan DIY yang semakin kompleks. Mendayagunakan Potensi Ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang optimal terutama pada sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kualitas lingkungan. Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, yang terukur dari sisi pengurangan kesenjangan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar regional kewilayahan.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan DIY Tahun 2015 adalah:

1. Sosial Budaya.

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka:

- a. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya.
- b. Memupuk apresiasi masyarakat terhadap penghargaan dan partisipasi terhadap pengembangan serta pelestarian kebudayaan.
- c. Menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan
- d. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
- e. Kualitas pengelolaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. Pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat
- g. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan penduduk meningkat.
- h. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat meningkat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung *pertama*, keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan). *Kedua*, RAD MDGs 2011-2015, yang merupakan tahun terakhir RAD percepatan capaian MDGs. Status capaian terdiri 19 indikator sudah tercapai, 36 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian khusus yakni: penurunan angka kemiskinan dan *un need meet* dalam pelaksanaan keluarga berencana dimana target 5,5 % sedang realisasi 8% di Tahun 2013.

2. Ekonomi;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang progresif. Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD 2012-2017 (Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif).

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:

- a. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan Melek Huruf

c. Daya Saing Pendidikan meningkat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD 2012-2017 (Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan).

4. Hukum dan Aparatur;

Prioritas ini ditetapkan untuk meningkatkan:

a. Kinerja pemerintah daerah

b. Pengelolaan keuangan daerah

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung misi 3 RPJMD 2012-2017 (Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik).

5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;

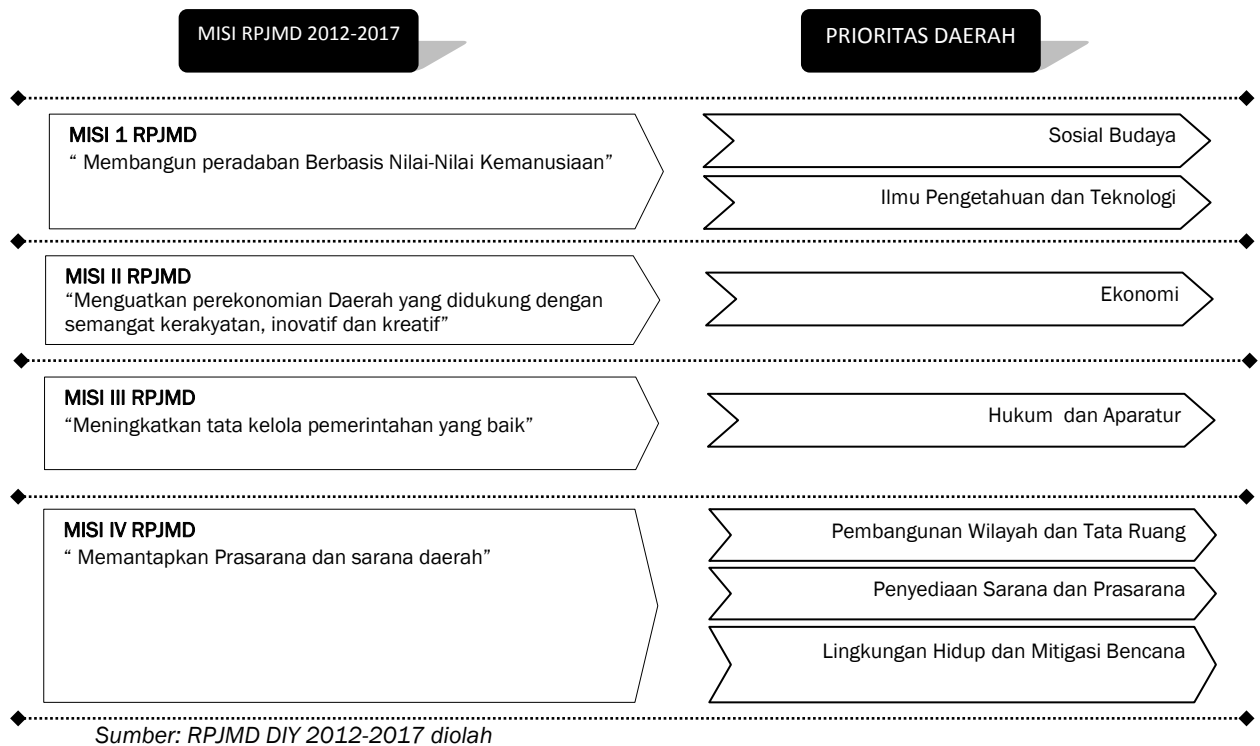
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pengembangan wilayah yang relatif tertinggal dan miskin, diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Termasuk dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan energy yang berkesinambungan.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang).

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan layanan publik baik disisi kualitas maupun kuantitasnya, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat dipedesaan, serta dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah).



Gambar 4.5 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah 2015 dengan RPJMD DIY 2012-2017

7. Lingkungan Hidup dan mitigasi Bencana;

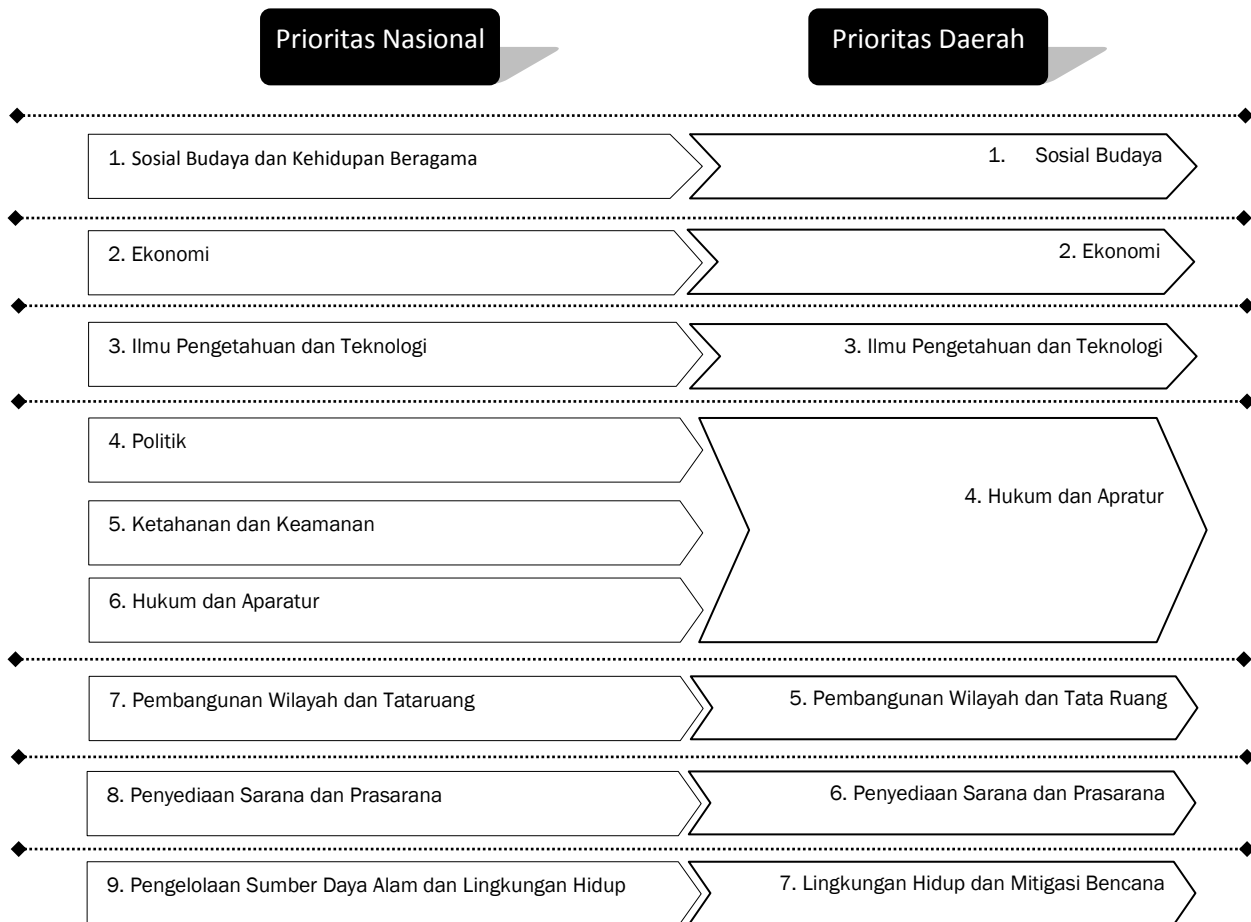
Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung *pertama*, keberhasilan misi 4 RPJMD 2012-2017 (Memantapkan prasarana dan sarana daerah). *Kedua*, mendukung pelaksanaan RAD Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2012-2020.

Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2015 bertumpu pada 9 prioritas nasional yaitu: (1). Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2). Ekonomi; (3). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4). Politik; (5). Ketahanan dan Kemanan; (6) Hukum dan Aparatur; (7). Pengembangan Wilayah dan tata ruang; (8). Penyediaan Sarana dan Prasarana dan (9) Pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Sebagai kelanjutan upaya mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan RKP dan RKPD, maka perlu dilakukan penyelarasan antara prioritas daerah dengan

nasional. Penyelarasan prioritas daerah dan nasional dapat lihat dalam bagan berikut ini.



Gambar 4.6 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional

Sinkronisasi Sembilan prioritas nasional dengan tujuh prioritas DIY tersaji dalam tabel berikut:

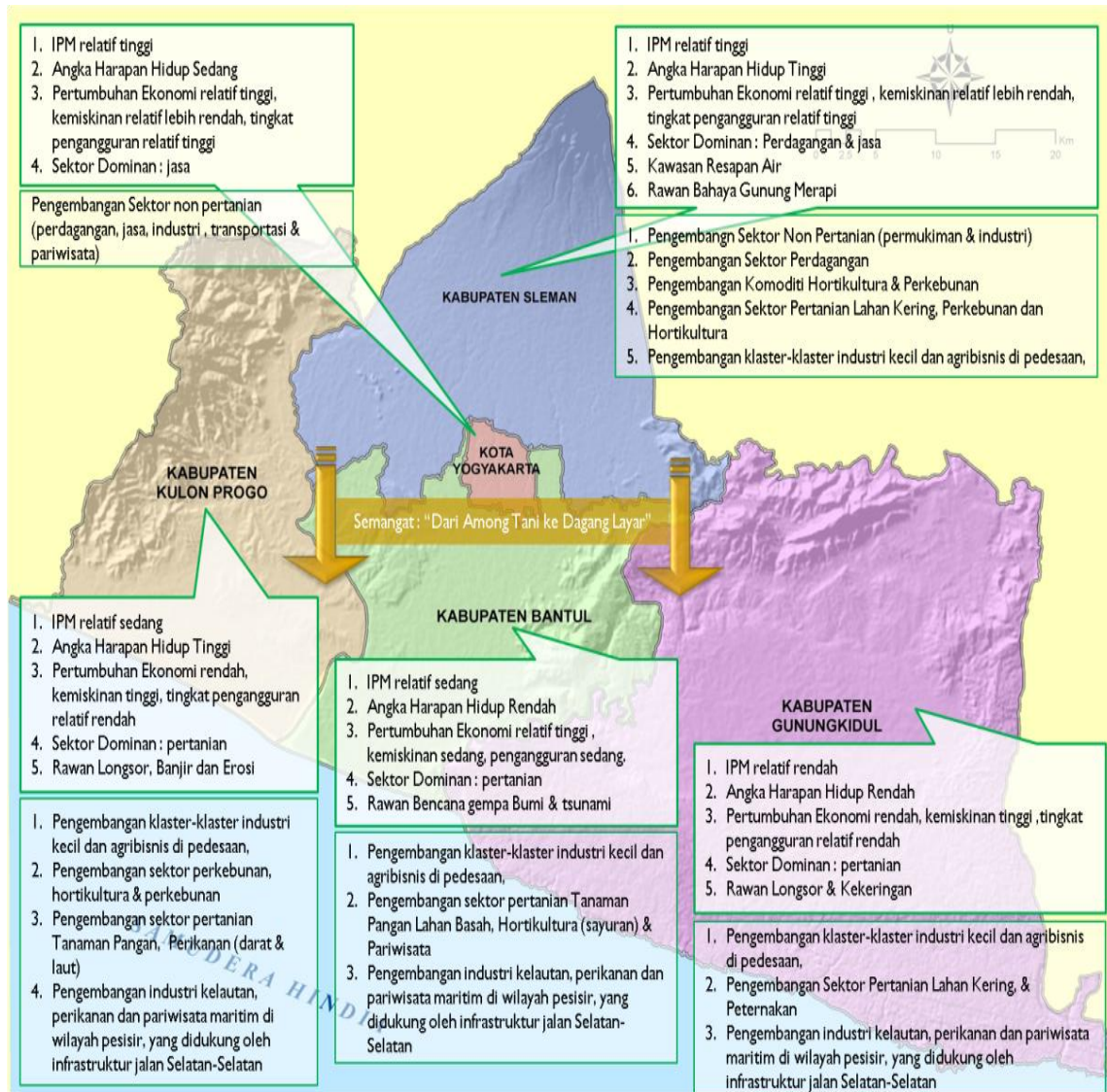
Tabel 4.2 prosentase sinkronisasi prioritas DIY dengan prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	ANGGARAN	PROSENTASE	PRIORITAS DAERAH
Ekonomi	122,449,461,110	6.90%	Ekonomi
Politik	38,310,994,500	2.16%	Hukum dan Aparatur
Ketahanan dan Keamanan	28,648,156,750	1.61%	
Hukum dan Aparatur	372,169,170,909	20.96%	
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	589,387,904,000	33.20%	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pembangunan Wilayah dan Tata ruang	277,651,383,300	15.64%	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	12,745,379,200	0.72%	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Penyediaan Sarana dan Prasarana	138,481,302,725	7.80%	Penyediaan Sarana dan Prasarana
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	195,433,202,811	11.01%	Sosial Budaya
Total	1,775,276,955,305	100%	Total

4.3 Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Prioritas pembangunan kewilayahan dititik beratkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.

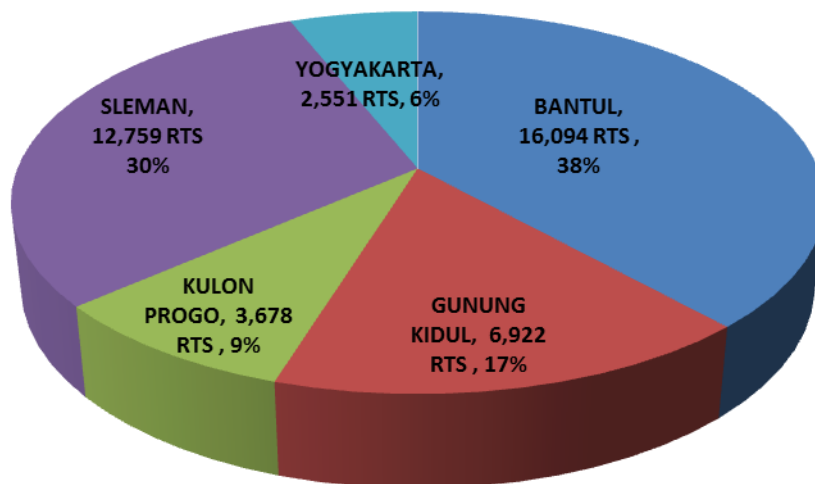
Berikut merupakan gambaran kondisi per-wilayah Kabupaten-Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta potensi pengembangannya.



Gambar 4.7 Arah Pembangunan Kewilayahan DIY

Berdasarkan data dan penentuan target sasaran rumah tangga miskin dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2014 diperoleh target sasaran rumah tangga miskin sebesar 42.004 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sasaran RTS tersebut terbagi dalam proporsi kabupaten-kota sebagai berikut:

RKPD Tahun 2015



Sumber: BPS DIY, Tahun 2014 diolah

Gambar 4.8 Persentase Proporsi RTM Berdasarkan Kabupaten-Kota, Tahun 2014

Pendetailan atas rumah tangga sasaran berdasarkan Jenis pekerjaan dilakukan untuk lebih meningkatkan efektivitas program pengurangan kemiskinan. Adapun pembagian sasaran berdasarkan sektor lapangan usaha adalah sebagai berikut ini:

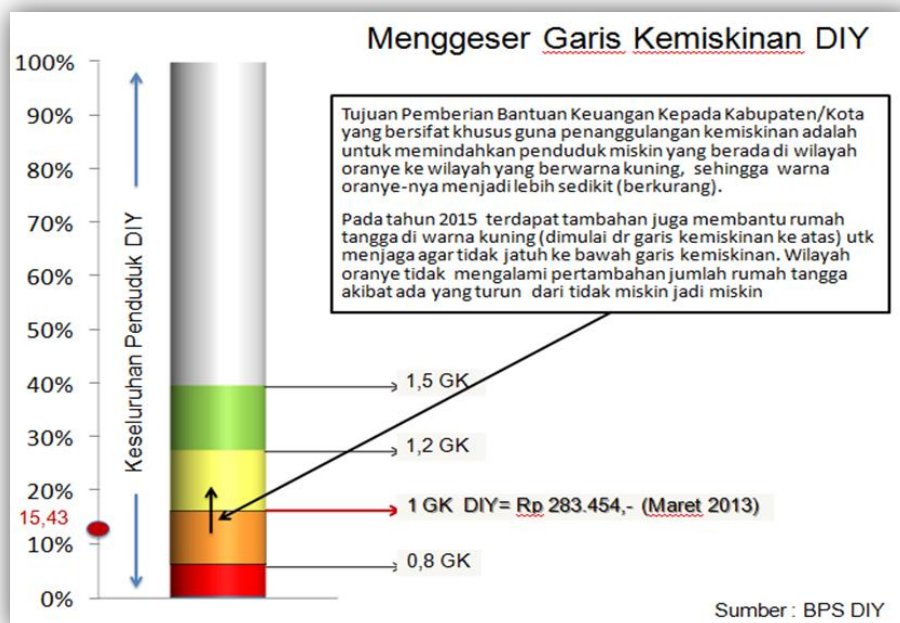
Tabel 4.3 Jumlah Sasaran RTS Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha dan Kabupaten-Kota Tahun 2014

Jenis Lapangan Usaha	Bantul	Gunungki dul	Kota Yogya	Kulon Progo	Sleman	Total
1	2	3	4	5	6	7
Lainnya	215	82	141	9	238	685
Tidak bekerja	621	149	136	118	627	1,651
Pertanian tanaman padi/palawija	3,754	4,234	3	1,187	3,388	12,566
Horikultura	62	36	-	221	135	454
Perkebunan	162	35	1	242	101	541
Perikanan	82	19	6	5	61	173
Peternakan	592	335	11	312	368	1,618
Kehutanan dan pertanian lain	85	74	2	39	81	281
Pertambangan/ penggalian	199	56	11	24	231	521
Industri pengolahan	1,947	248	155	337	739	3,426
Listrik, gas, air	32	5	3	1	19	60
Bangunan/konstruksi	4,525	864	237	788	4,098	10,512
Hotel dan rumah makan	118	23	101	4	81	327
Perdagangan	1,777	509	658	211	1,066	4,221

Jenis Lapangan Usaha	Bantul	Gunungkidul	Kota Yogya	Kulon Progo	Sleman	Total
1	2	3	4	5	6	7
Transportasi dan pergudangan	684	81	284	20	326	1,395
Keuangan dan asuransi	10	3	2	-	18	33
Informasi dan komunikasi	11	4	11	-	16	42
Jasa	1,218	165	789	160	1,166	3,498
TOTAL	16,094	6,922	2,551	3,678	12,759	42,004

Sumber: BPS DIY, Tahun 2014

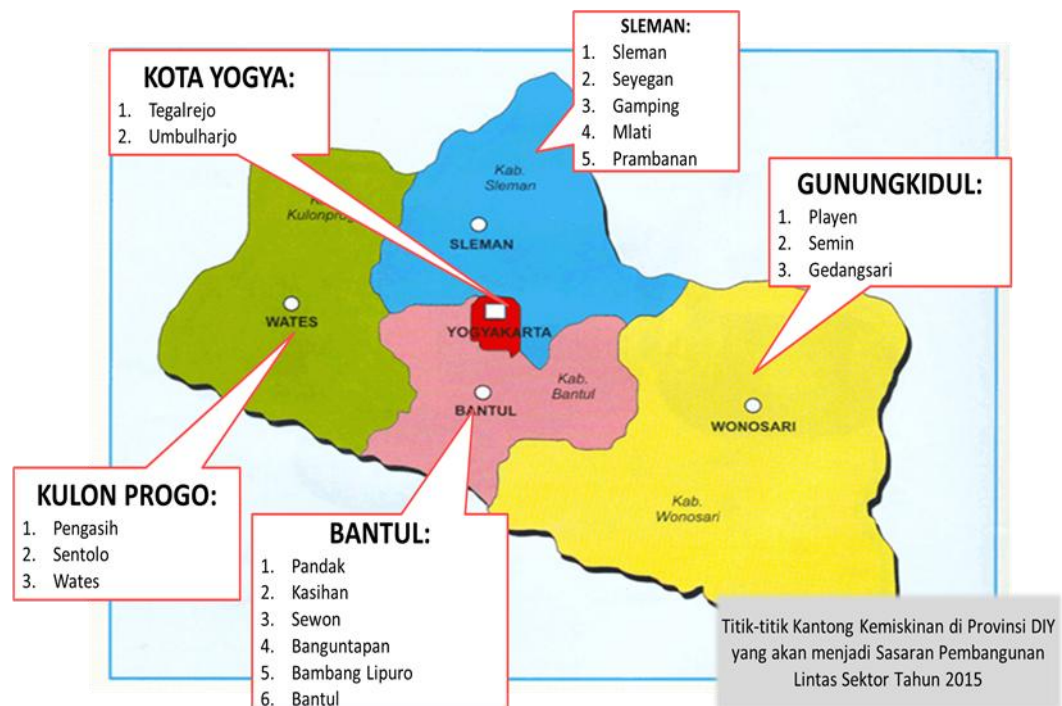
Titik lokasi sasaran kemiskinan pada tahun 2015 merupakan kelanjutan dan pengembangan dari titik sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2013 dan 2014. Penentuan lokasi kecamatan didasarkan atas Data PPLS TNP2K yang mendata 40 % penduduk berpendapatan terendah. Berdasarkan data tersebut kemudian diambil kebijakan penurunan kemiskinan sebesar 2 %, dengan sasaran RTS yang posisinya diambang garis kemiskinan BPS sebagaimana skema gambar dibawah.



Gambar 4.9 Skema Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberian Bantuan Kepada Kabupaten-Kota Tahun 2015

Kebijakan rencana pembangunan untuk penurunan kemiskinan tidak hanya melalui program-program regular namun juga melalui akselerasi terhadap rumah tangga sasaran berdasarkan garis kemiskinan. Wujud riil dari kegiatan akselerasi penurunan kemiskinan di DIY adalah dengan pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten-kota yang bersifat khusus.

Beberapa lokasi kecamatan sebagai sasaran kemiskinan melalui skema program pemberdayaan dan bantuan keuangan terdistribusi pada Kabupaten Sleman terdapat 5 (lima) Kecamatan; Gunungkidul 3 (tiga) kecamatan; Kota Yogyakarta 2 (dua) Kecamatan; Kulon Progo 3 (tiga) Kecamatan dan Bantul 6 (enam) Kecamatan. Penentuan kecamatan terpilih didasarkan atas proporsi sebaran RTS baik dilevel antar Kabupaten-Kota dan dilevel Kecamatan dalam satu Kabupaten-kota.



Sumber: Bappeda DIY, 2015

Gambar 4.10 Titik Lokasi Sasaran Pengurangan Kemiskinan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan di tingkat kabupaten/kota antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.4 Sasaran Kewilayahan Tahun 2015

No	Kabupaten-Kota	IPM	Kemiskinan	Tingkat Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi
1	2	3	4	5	6
1	Kota Yogyakarta	81.09	9.15 %	3.46 %	6.2 %
2	Sleman	80	15 %	6.45 %	5.93 %
3	Gunungkidul	71.83	22.47 %	1.53 %	4.89 %
4	Kulon Progo	76.67	17.73 %	1.93 %	5.30 %
5	Bantul	75.85	14.65 %	2.57 %	6.14 %

Sumber: RPJMD 2012-2017

4.4 Sasaran Pembangunan

Sasaran utama yang harus dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh nasional dan sasaran pembangunan daerah DIY. Sasaran pengembangan wilayah Jawa-Bali sebagaimana dalam RKP 2015 dalam buku III khususnya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup.

Tabel 4.5 Sasaran pembangunan Nasional terhadap DIY Tahun 2015

Pertumbuhan Ekonomi	• 5,21 - 5,47 %
Tingkat Kemiskinan	• 13,44 - 12,78 %
Tingkat Pengangguran	• 2,99 - 2,85 %
Angka Kematian Bayi ¹	• 13-15 per 1.000 kelahiran
Rata-rata Lama Sekolah ²	• 9,40-9,64 tahun
Angka Harapan Hidup ³	• 73,60 - 70,52

Sumber : RKP 2015 Proyeksi Bappenas (*angka sementara*); BPS; Susenas

Keterangan: angka sangat sementara

¹) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.²) Rata-rata Lama Sekolah: : rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas.³) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

RKPD Tahun 2015

Sasaran utama daerah yang harus dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Prioritas dan Sasaran Tahun 2015

No	Prioritas	Sasaran
1	2	3
1	Sosial Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
		Harapan hidup masyarakat meningkat
2	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek huruf masyarakat meningkat
		Aksesibilitas Pendidikan meningkat
		Daya Saing pendidikan meningkat
3	Ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat
		Kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat
		Kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat
4	Penyediaan sarana dan Prasarana	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun
		Layanan public meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.
5	Pembangunan wilayah dan tata ruang	Ketimpangan wilayah menurun
		Pemanfaatan ruang terkendali.
6	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkat
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Meningkat
7	Lingkungan hidup dan Mitigasi bencana	Kualitas lingkungan hidup meningkat.

Tabel 4.7 Keselarasan Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Isu Strategis	Prioritas	Sasaran
1	2	3	4
1	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	Sosial Budaya	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
			Harapan hidup masyarakat meningkat
		Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek huruf masyarakat meningkat
			Aksesibilitas Pendidikan meningkat

No	Isu Strategis	Prioritas	Sasaran
1	2	3	4
			Daya Saing pendidikan meningkat
2	Peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY	Ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat Kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat Kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan publik	Penyediaan sarana dan Prasarana Hukum dan Aparatur	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun Layanan public meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
4	Pengelolaan resiko Bencana	Pembangunan wilayah dan tata ruang	Ketimpangan wilayah menurun Pemanfaatan ruang terkendali.
5	Peningkatan keekonomian keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan hidup	lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Kualitas lingkungan hidup meningkat.

Target Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut ditunjukkan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.8 Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2015
1	2	3	4
1.	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	50 %
2.	Melek huruf masyarakat meningkat	Angka Melek huruf.	93,25 %
3.	Aksesibilitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah.	10,8 Tahun

RKPD Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2015
1	2	3	4
	meningkat		
4.	Daya Saing pendidikan meningkat	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	10 %
5.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup.	73,97 Tahun
6.	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK).	7,8 Juta
		Pertumbuhan Ekonomi	4,96 - 5,83 %
7.	Ketimpangan wilayah menurun	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	0,4501
8.	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	0,2898
9.	Kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara.	2.337.000 orang
	Kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan mancanegara.	235.190 orang
10.	Kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat	Lama tinggal wisatawan nusantara.	2,30 Hari
	Kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan mancanegara.	2,35 Hari
11.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	B
12.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK.	WTP
13.	Layanan public meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	38,57 %
14.	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	9,43 %
15.	Pemanfaatan ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	70 %

BAB 5

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Penyusunan program dan kegiatan prioritas daerah DIY tahun 2015 memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ Tahun 2015 dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No 18/K/DPRD/2014 sebagai berikut:

1. Diingatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 150 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf d dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun oleh Pemerintah provinsi, Kabupaten-Kota sesuai kewenangannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dengan RKPD, serta antara perencanaan dan penganggaran Tahun 2015 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan provinsi, kabupaten-kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka penyusunan Rancangan awal RKPD Provinsi, Kabupaten-Kota Tahun 2015 agar berpedoman pada Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah dan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang RPJMD.
3. Diharapkan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memperhatikan dan Mempertimbangkan pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan millennium (Millennium Development Goals/MDG's).
- b. Menghadapi tantangan persaingan untuk meraih peluang memasuki bentuk integrasi ekonomi asean yang dikenal dengan Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tahun 2015.
- c. Antisipasi prabencana, penanggulangan bencana dan pascabencana.
- d. Mendukung optimalisasi penerapan kurikulum baru tahun 2013 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, pembangunan, operasional pemeliharaan, rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan alat peraga, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu fasilitas yankes, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penanggulangan masalah gizi masyarakat, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta mendorong Jamkesda
- f. Penyediaan dan layanan air bersih setiap rumah tangga, penataan MCK, lingkungan kumuh, sanitasi, persampahan, polusi dan pencermatan air, udara dan tanah dipedesaan dan perkotaan.
- g. Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, jaringan irigasi, waduk dan situ, pengendalian banjir, penataan bantaran sungai dan kali bersih, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kantong-kantong produksi serta membuka keterisolasian untuk kelancaran arus barang dan orang dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi, pembangunan dan penataan pasar tradisional.
- h. Penataan ruang dan lingkungan hidup dalam upaya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW, Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

- i. Penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ketersediaan rumah layak huni, menetapkan kebijakan dan strategi dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
- j. Pengembangan kepemimpinan pemuda, peningkatan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta menggerakkan pemuda sebagai kekuatan moral, control sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.
- k. Mendorong, melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal, optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang perizinan secara cepat, mudah dan murah.
- l. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran, pemberdayaan koperasi, pemberdayaan UKM dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil, fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan UKM.
- m. Mendorong peningkatan kegiatan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja, serta penerbitan rekomendasi perijinan magang ke luar negeri, pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja.
- n. Penyediaan dan pengendalian ketersediaan pupuk, bibit, obat-obatan pembasmi hama dan sarana produksi pertanian serta peningkatan intensitas tenaga penyuluh pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, pencegahan alih fungsi lahan pertanian, pengembangan keanekaragaman produk pertanian, identifikasi kebutuhan ketersediaan pangan.
- o. Mendorong peningkatan peranan perempuan berpartisipasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya mencapai 30% keterwakilan perempuan, perlindungan terhadap perempuan yang responsive gender berupa pemberdayaan, pelayanan kesehatan, mental spiritual, pendidikan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi dan jual beli anak dan remaja (trafficking) dan kekerasan seksual.

- p. Dukungan operasional jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penyediaan sarana, alat, obat dan cara penggunaan kontrasepsi, penyuluhan keluarga sejahtera, pemberian dukungan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).
- q. Pengendalian pemberian izin trayek angkutan mempertimbangkan aspek kelayakan, daya dukung, kemampuan, sarana prasarana perhubungan, kemudahan akses antar moda transportasi.
- r. Penyebarluasan dan penyuluhan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat serta pengembangan kemitraan media.
- s. Mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban, kerjasama dengan seluruh aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan terorisme dan konflik sosial.
- t. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang usaha ekonomi masyarakat desa, peningkatan teknologi tepat guna (TTG) dalam bidang pertanian dalam arti luas.
- u. Penanganan masalah sosial seperti pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar, PSK, gelandangan dan pengemis, peningkatan penyediaan fasilitas dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, mental dan lanjut usia, serta menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pengangguran dan fasilitasi penempatan pada berbagai bidang usaha sesuai dengan keahlian.
- v. Perlindungan terhadap cagar budaya, perawatan dan pengamanan asset/benda kesenian, perlindungan, pemeliharaan dan pengamanan benda cagar budaya, pengembangan pemanfaatan kesenian tradisional, penyelenggaraan dan pengelolaan museum daerah, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lembaga adat, seni dan budaya daerah.
- w. Mengintegrasikan pencapaian target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan, penanaman modal, kesenian dan ketahanan pangan.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi, penanganan gangguan keamanan dalam negeri, pembangunan perbatasan antar Negara, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi daerah, penataan perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

RKPD Tahun 2015

5.1 Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015 (Dana APBD)

Secara lebih jelasnya rekapitulasi usulan kegiatan dan pendanaan APBD non keistimewaan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015 (Dana APBD)

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	Rp. 2.463.150.000,00
2	1.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Rp. 351.503.595.000,00
3	1.01.17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	79.71 %	Rp. 99.827.377.000,00
4	1.01.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Rp. 4.296.700.000,00
5	1.01.19	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Rp. 15.533.725.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
6	1.01.22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Rp. 45.335.957.000,00
7	1.01.23	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi	58 %	Rp. 4.617.200.000,00
8	1.01.24	PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TERKEMUKA*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	Rp. 4.582.800.000,00
9	1.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B L U D	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik standart	1.904 Peserta didik	Rp. 11.000.000.000,00
10	1.01.27	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	Rp. 8.239.800.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
11	1.01.28	PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	Rp. 5.094.200.000,00
12	1.01.29	PROGRAM SINERGITAS PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	35 %	Rp. 4.370.400.000,00
13	1.02.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %	Rp. 2.614.254.100,00
14	1.02.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT*	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8.7 %	Rp. 1.065.000.000,00
15	1.02.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	100 %	Rp. 871.066.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
16	1.02.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	Rp. 14.062.019.905,00
17	1.02.27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS dan jaringannya	100 %	Rp. 582.434.000,00
18	1.02.33	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN PENGAWASAN MAKANAN	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase keterdeiaan obat esensial generik di fasyankes dasar	96 %	Rp. 564.000.000,00
19	1.02.48	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	Rp. 2.241.035.000,00
20	1.02.49	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELJAMKESOS	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel	69.6 %	Rp. 64.146.657.900,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
21	1.02.50	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN LANSIA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada usila (PSU)	80 %	Rp. 278.499.040,00
22	1.02.51	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN IBU	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan	99 %	Rp. 172.300.000,00
23	1.02.52	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase cakupan penjangkaran kesehatan siswa sekolah	98 %	Rp. 164.500.000,00
24	1.02.53	PROGRAM PELATIHAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU DIKLAT	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	79 %	Rp. 935.685.000,00
25	1.02.54	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase penderita jiwa yang dirawat di RSJ Grhasia	54.87 %	Rp. 16.221.149.000,00
26	1.02.55	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN BAYI DAN BALITA	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	98.5 %	Rp. 121.750.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
27	1.02.56	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	41.5 %	Rp. 421.208.000,00
28	1.02.57	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT*	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	Rp. 3.444.288.170,00
29	1.03.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Pengurangan jumlah titik genangan	45.9 %	Rp. 5.350.000.000,00
30	1.03.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %	Rp. 54.158.013.000,00
31	1.03.20	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	100 %	Rp. 584.224.800,00
32	1.03.24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	79.5 %	Rp. 18.248.000.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
33	1.03.25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Rp. 1.520.000.000,00
34	1.03.26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Rp. 29.260.000.000,00
35	1.03.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	80 titik	Rp. 3.900.000.000,00
36	1.03.32	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	87.5 %	Rp. 3.190.270.000,00
37	1.03.36	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	60 %	Rp. 10.500.000.000,00
38	1.03.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	65 %	Rp. 3.800.000.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
39	1.03.38	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	51 %	Rp. 5.050.000.000,00
40	1.03.39	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	84 %	Rp. 300.000.000,00
41	1.03.40	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %	Rp. 50.362.805.000,00
42	1.03.42	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	80 %	Rp. 1.375.000.000,00
43	1.03.43	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	32.85 %	Rp. 3.100.000.000,00
44	1.03.44	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase penduduk berakses air minum	80.85 %	Rp. 25.000.000.000,00
45	1.03.45	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR	Rp. 10.550.000.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
46	1.03.46	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN, MINAPOLITAN DAN DESA POTENSI	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	46 %	Rp. 4.000.000.000,00
47	1.03.47	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	1 - Wajib	03 - Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82.5 %	Rp. 1.320.000.000,00
48	1.04.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 - Wajib	04 - Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	Rp. 10.800.000.000,00
49	1.04.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	1 - Wajib	04 - Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	54 %	Rp. 2.550.000.000,00
50	1.04.22	PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH	1 - Wajib	04 - Perumahan	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	40 %	Rp. 4.500.000.000,00
51	1.05.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1 - Wajib	05 - Penataan Ruang	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	16 kawasan strategis	Rp. 600.000.000,00
52	1.05.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	1 - Wajib	05 - Penataan Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/kot dan	70 %	Rp. 900.000.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
					RTRW Provinsi		
53	1.05.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	1 - Wajib	05 - Penataan Ruang	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawah	60 %	Rp. 1.165.923.500,00
56	1.06.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	80 %	Rp. 372.486.500,00
57	1.06.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	17.04 %	Rp. 2.080.648.000,00
58	1.06.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	4.06 %	Rp. 1.617.144.500,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
59	1.06.23	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10.55 %	Rp. 1.467.444.700,00
60	1.06.26	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1.62 %	Rp. 1.845.450.000,00
61	1.06.27	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	Rp. 1.722.183.600,00
62	1.06.28	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 - Wajib	06 - Perencanaan Pembangunan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	Rp. 1.981.704.550,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
64	1.07.15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Peningkatan pelayanan transportasi antar moda	40 %	Rp. 2.196.149.000,00
65	1.07.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	Rp. 2.902.530.882,00
66	1.07.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38.57 %	Rp. 70.115.713.770,00
67	1.07.18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi Di DIY	44.17 %	Rp. 4.449.490.000,00
68	1.07.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	84 %	Rp. 3.350.000.000,00
69	1.07.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100 %	Rp. 79.527.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
70	1.07.21	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Penerapan manajemen lalulintas perkotaan berbasis kawasan	25.2 %	Rp. 2.086.816.250,00
71	1.07.22	PROGRAM PENGATURAN SISTEM SIMPANG BERSINYAL	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Pengendalian sistem simpang bersinyal di perkoataan yogyakarta	40 %	Rp. 3.250.000.000,00
72	1.07.23	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	Rp. 1.835.549.200,00
74	1.08.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	380 unit usaha	Rp. 538.797.975,00
75	1.08.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	Rp. 5.636.956.415,00
76	1.08.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	27 Ha	Rp. 4.456.658.100,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
77	1.08.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses informasi sumberdaya air dan lingkungan hidup	25 %	Rp. 495.000.000,00
78	1.08.20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	7 %	Rp. 617.966.710,00
79	1.08.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan	35 %	Rp. 1.000.000.000,00
81	1.09.16	PROGRAM PERBAIKAN PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH*	1 - Wajib	09 - Pertanahan	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	60 %	Rp. 255.291.000,00
82	1.09.17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	1 - Wajib	09 - Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	25 %	Rp. 85.000.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
83	1.09.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH	1 - Wajib	09 - Pertanahan	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Rp. 130.397.000,00
84	1.10.15	PROGRAM PENATAAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1 - Wajib	10 - Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Rp. 1.151.713.500,00
85	1.11.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	Rp. 3.280.000.000,00
86	1.11.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN*	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	3.62 %	Rp. 880.000.000,00
87	1.11.20	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75.14 %	Rp. 2.375.000.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
88	1.11.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	329 kasus	Rp. 2.825.000.000,00
89	1.11.22	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI EKONOMI PEREMPUAN	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	96.66 %	Rp. 1.831.256.000,00
90	1.11.23	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN	1 - Wajib	11 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik	11.06 %	Rp. 1.650.000.000,00
91	1.12.16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	1 - Wajib	12 - Keluarga Berencana	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	0.51 %	Rp. 2.087.340.000,00
92	1.12.26	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA*	1 - Wajib	12 - Keluarga Berencana	Persentase cakupan peserta KB Aktif	71.72 %	Rp. 1.410.360.000,00
93	1.12.27	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	1 - Wajib	12 - Keluarga Berencana	Persentase tahapan keluarga sejahtera	44.1 %	Rp. 2.634.541.240,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
94	1.12.28	PROGRAM PENGEMBANGAN BINA KELUARGA	1 - Wajib	12 - Keluarga Berencana	Persentase lembaga bina keluarga berkategori percontohan	23 %	Rp. 1.410.385.560,00
95	1.13.19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase pelayanan panti asuhan/jompo sesuai standar pelayanan	2.28 %	Rp. 8.432.956.446,00
96	1.13.20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	Rp. 7.572.160.300,00
97	1.13.22	PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3 S)*	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %	Rp. 751.297.300,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
98	1.13.24	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA *	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	10.84 %	Rp. 5.873.864.323,00
99	1.13.25	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	5.51 %	Rp. 379.127.200,00
100	1.13.26	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL*	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	8.34 %	Rp. 3.913.944.150,00
101	1.13.27	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	8.51 %	Rp. 2.476.032.000,00
102	1.13.28	PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	9.34 %	Rp. 820.575.550,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
103	1.13.29	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase keberfungsian sosial bagi korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan	6.34 %	Rp. 580.848.050,00
104	1.13.30	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)*	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Rp. 4.776.443.100,00
105	1.13.31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1 - Wajib	13 - Sosial	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	39.72 %	Rp. 1.450.696.100,00
106	1.14.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1 - Wajib	14 - Ketenagakerjaan	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Rp. 8.899.343.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
107	1.14.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	1 - Wajib	14 - Ketenagakerjaan	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Rp. 13.018.897.000,00
108	1.14.18	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	1 - Wajib	14 - Ketenagakerjaan	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %	Rp. 293.884.000,00
109	1.14.19	PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	1 - Wajib	14 - Ketenagakerjaan	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Rp. 1.323.858.000,00
110	1.14.20	PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	1 - Wajib	14 - Ketenagakerjaan	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesaian hubungan industrial	65 %	Rp. 1.025.519.000,00
111	1.15.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	1 - Wajib	15 - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM	229467 unit usaha	Rp. 525.000.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
112	1.15.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	1 - Wajib	15 - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	180 UMKM Baru	Rp. 74.000.000,00
113	1.15.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	1 - Wajib	15 - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah koperasi aktif	2351 koperasi	Rp. 75.000.000,00
114	1.16.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	1 - Wajib	16 - Penanaman modal	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	Rp. 1.606.316.000,00
115	1.16.18	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA, DAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN INVESTASI	1 - Wajib	16 - Penanaman modal	Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip	354 ijin	Rp. 3.965.831.000,00
116	1.17.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	Rp. 505.810.000,00
121	1.18.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN*	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	13 sentra	Rp. 3.200.000.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
122	1.18.17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan Jumlah kelompok wirausaha muda	365 kelompok	Rp. 550.000.000,00
123	1.18.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA*	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	2200 Orang	Rp. 310.000.000,00
124	1.18.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan fasilitasi layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Rp. 36.800.000.000,00
125	1.18.22	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA*	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	41 Organisasi	Rp. 1.900.000.000,00
126	1.18.23	PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Rp. 8.282.000.000,00
127	1.19.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Rp. 5.209.525.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
128	1.19.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	Rp.567.000.000,00
129	1.19.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Rp. 569.780.000,00
130	1.19.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Penurunan kasus pekat	314 kasus	Rp.160.000.000,00
131	1.19.21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Persentase partisipasi dalam pemilu	73 %	Rp.1.182.000.000,00
132	1.19.23	PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	1 - Wajib	19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota	Rp.1.232.500.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
133	1.20.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH*	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Rp.36.559.214.500,00
134	1.20.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	95 %	Rp.2.705.000.000,00
135	1.20.18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Peningkatan pengelolaan keuangan Kabupaten-Kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar	100 %	Rp.562.550.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
136	1.20.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	30 %	Rp.3.885.713.300,00
137	1.20.21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	100 %	Rp.155.208.750,00
138	1.20.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Rp.690.888.300,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
139	1.20.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Rp.2.262.931.750,00
140	1.20.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Rp.1.483.810.550,00
141	1.20.27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Rp.423.459.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
142	1.20.29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH*	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Rp.3.874.500.000,00
143	1.20.30	PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Rp.4.893.608.000,00
144	1.20.31	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Rp.2.258.037.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
145	1.20.32	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Rp. 9.723.658.000,00
146	1.20.33	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Rp.7.366.785.650,00
147	1.20.34	PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Rp.2.102.518.250,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
148	1.20.35	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase produk hukum yang dibatalkan	0 %	Rp.433.948.500,00
149	1.20.36	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD	100 %	Rp.802.939.625,00
150	1.20.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	100 %	Rp.7.755.315.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
151	1.20.39	PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	11.71 %	Rp.845.578.700,00
152	1.20.40	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	22.95 %	Rp.725.627.000,00
153	1.20.41	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase tindaklanjut pelaksanaan diklat atas kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar daerah.	100 %	Rp.318.000.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
154	1.20.42	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Peningkatan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	2 unit	Rp.580.000.000,00
155	1.20.45	PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Rp.5.097.652.300,00
156	1.20.46	PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Rp.6.004.697.700,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
157	1.21.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN	1 - Wajib	21 - Ketahanan Pangan	Peningkatan kapasitas penyuluh	74 %	Rp. 1.132.000.000,00
158	1.21.17	PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	1 - Wajib	21 - Ketahanan Pangan	Jumlah desa pangan	53 Desa	Rp. 3.120.000.000,00
159	1.21.18	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN	1 - Wajib	21 - Ketahanan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan	360 ton	Rp. 1.231.000.000,00
160	1.21.19	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN*	1 - Wajib	21 - Ketahanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Rp. 1.694.000.000,00
161	1.21.20	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN	1 - Wajib	21 - Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %	Rp. 1.560.000.000,00
162	1.22.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN*	1 - Wajib	22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	Rp. 3.020.000.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
163	1.22.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	1 - Wajib	22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase usaha ekonomi desa	37.7 %	Rp. 3.040.000.000,00
164	1.22.17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1 - Wajib	22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	35 %	Rp. 3.257.315.000,00
165	1.22.22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA	1 - Wajib	22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase profil desa sesuai standar	70 %	Rp. 2.000.000.000,00
166	1.23.16	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	1 - Wajib	23 - Statistik	persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	97 %	Rp. 1.360.000.000,00
167	1.24.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	1 - Wajib	24 - Kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Rp. 3.176.624.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
168	1.24.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH*	1 - Wajib	24 - Kearsipan	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	11 %	Rp. 1.200.000.000,00
169	1.24.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	1 - Wajib	24 - Kearsipan	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Rp. 6.942.000.000,00
170	1.25.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	Rp. 2.891.447.750,00
171	1.25.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100 %	Rp.2.370.160.000,00
172	1.25.19	PROGRAM FASILITASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI DAN FREKUENSI	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	Rp. 1.064.768.500,00
173	1.25.20	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Penguatan jaringan IT di Pemda DIY	80 %	Rp. 7.389.898.100,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
174	1.25.21	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Layanan pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT	100 %	Rp.4.431.399.300,00
175	1.26.15	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN*	1 - Wajib	26 - Perpustakaan	Peningkatan fasilitas perpustakaan	85 %	Rp. 20.000.000.000,00
176	1.26.16	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN*	1 - Wajib	26 - Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Rp. 4.450.000.000,00
177	1.26.17	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	1 - Wajib	26 - Perpustakaan	Peningkatan pemustaka	20 %	Rp. 4.323.000.000,00
178	2.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	2 - Pilihan	01 - Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas	Rp. 1.939.500.000,00
179	2.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN*	2 - Pilihan	01 - Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Rp. 7.583.490.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
180	2.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS S D M DAN KELEMBAGAAN PETANI	2 - Pilihan	01 - Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Rp. 1.528.000.000,00
181	2.01.29	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN*	2 - Pilihan	01 - Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Rp. 5.790.608.050,00
182	2.01.30	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA*	2 - Pilihan	01 - Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Rp. 2.450.485.850,00
183	2.02.15	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	Rp. 4.795.317.075,00
184	2.02.16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Luas lahan kritis	26000 Ha	Rp. 5.430.450.605,00
185	2.02.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN*	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Persentase kerusakan hutan	29.14 %	Rp. 2.232.232.550,00
186	2.02.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang telah dilakukan pembinaan	80 %	Rp. 200.485.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
187	2.02.21	PROGRAM PENATAAN KAWASAN HUTAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Rp. 1.754.469.130,00
188	2.02.26	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	NTP sektor perkebunan	128 %	Rp. 1.481.216.000,00
189	2.02.31	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	2 - Pilihan	02 - Kehutanan	Produksi perkebunan	88000 ton	Rp. 2.022.177.350,00
190	2.03.21	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR	2 - Pilihan	03 - ESDM	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	60 %	Rp. 985.000.000,00
191	2.03.25	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN	2 - Pilihan	03 - ESDM	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117.95 (000 SBM)	Rp. 4.750.000.000,00
192	2.03.26	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN AIR TANAH	2 - Pilihan	03 - ESDM	Rerata penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	Rp. 6.000.000.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
193	2.03.27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI	2 - Pilihan	03 - ESDM	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	9 %	Rp. 1.170.000.000,00
194	2.03.28	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN	2 - Pilihan	03 - ESDM	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	11 %	Rp. 1.040.000.000,00
195	2.03.24	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN	2 - Pilihan	03 - ESDM	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	78,6 %	Rp. 6.050.000.000,00
196	2.04.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA*	2 - Pilihan	04 - Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang	Rp. 5.335.000.000,00
197	2.04.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA*	2 - Pilihan	04 - Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	89 DTW	Rp. 4.735.000.000,00
198	2.04.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN*	2 - Pilihan	04 - Pariwisata	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	Rp. 5.115.000.000,00
199	2.04.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA*	2 - Pilihan	04 - Pariwisata	Jumlah desa wisata	80 Desa wisata	Rp. 2.250.000.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
200	2.05.17	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	300 dokumen	Rp. 546.700.000,00
201	2.05.18	PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	1530 Orang	Rp. 135.729.000,00
202	2.05.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Rp. 9.877.601.000,00
203	2.05.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP*	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	Rp. 6.359.193.500,00
204	2.05.23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Konsumsi ikan per kapita dan angka ketersediaan	15.63 Kg/kapita/Th	Rp. 2.178.200.000,00
205	2.05.24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	14 Ha	Rp. 1.211.250.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
206	2.05.25	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	0.11 .	Rp. 257.741.000,00
207	2.05.26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	NTP sektor perikanan	116.89 %	Rp. 579.300.000,00
208	2.06.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	2 - Pilihan	06 - Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit	Rp. 805.000.000,00
209	2.06.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	2 - Pilihan	06 - Perdagangan	Nilai ekspor	207.59 Juta US\$	Rp. 2.495.000.000,00
210	2.06.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI	2 - Pilihan	06 - Perdagangan	Jumlah SIUP [~]	45106 SIUP	Rp. 20.303.000.000,00
211	2.07.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH*	2 - Pilihan	07 - Industri	Jumlah IKM	81907 IKM	Rp. 1.328.000.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
212	2.07.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	2 - Pilihan	07 - Industri	Nilai produksi IKM	3337453545 Ribu Rupiah	Rp. 955.000.000,00
213	2.07.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF*	2 - Pilihan	07 - Industri	Jumlah IKM Industri Kreatif	34018 IKM kreatif	Rp. 750.000.000,00
214	2.08.15	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	2 - Pilihan	08 - Ketransmigrasian	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Rp. 2.797.745.000,00
215	3.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3 - Umum	00 - -	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Rp.88.770.204.977,00
216	3.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3 - Umum	00 - -	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rp. 146.916.946.957,00
217	3.00.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3 - Umum	00 - -	Prosentase disiplin aparatur	100 %	Rp.7.242.827.000,00
218	3.00.04	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	3 - Umum	00 - -	Prosentase kelancaran pindah dan purna PNS	100 %	Rp.161.135.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
219	3.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	3 - Umum	00 - -	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Rp.8.815.609.450,00
220	3.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3 - Umum	00 - -	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp.5.952.710.750,00

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.01	Pendidikan													
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga													
1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 5.642.943.000,00	Rp. 5.570.425.000,00		
1.01.1.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam hal surat menyurat dikelola dengan baik	3 jenis	Pengiriman surat keluar lancar	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 36.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam hal komunikasi, sumber daya air dan listrik dikelola dengan baik	4 jenis	Kelancaran komunikasi, informasi, penerangan,sumber daya air (48 saluran telepon, 25 saluran internet, 55 saluran listrik, dan 25 saluran air)	4 jenis	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.705.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam hal perizinan kendaraan Dinas/operasional roda dua dikelola dengan baik	31 unit	Kelancaran dan ketertiban dalam pembayaran perizinan kendaraan Dinas	62 unit	Rp. 34.000.000,00	Rp. 38.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam hal perizinan kendaraan Dinas/operasional roda empat dikelola dengan baik	31 unit						
1.01.1.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kelancaran Admin. Penatausahaan Keuangan	12 bulan	Penyelenggaraan Admin, Keuangan dikelola dengan Baik	12 bulan	Rp. 193.600.000,00	Rp. 193.600.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.008	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengelolaan kebersihan lingkungan kantor dan aset	10 unit	Lingkungan dan ruangan kerja yang nyaman dan bersih	10 unit	Rp. 1.072.391.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perbaikan Peralatan Kerja	6 jenis	Peralatan Kerja Siap Pakai	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.010	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyelenggaraan administrasi perkantoran dalam hal penyediaan Alat tulis kantor selalu terpenuhi	62 jenis	Alat Tulis Kantor memenuhi	62 jenis	Rp. 147.453.000,00	Rp. 153.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang cetakan dan fotocopy kebutuhan kantor	18 jenis cetakan	Barang cetakan dan penggandaan memenuhi kebutuhan	18 jenis cetakan	Rp. 299.175.000,00	Rp. 307.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.01.012	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mencukupi	24 jenis	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor memenuhi	24 jenis	Rp. 50.730.000,00	Rp. 52.750.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebutuhan akan peralatan rumah tangga	18 jenis	Penyediaan peralatan rumah tangga memenuhi dan mencukupi	18 jenis	Rp. 61.781.000,00	Rp. 62.575.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebutuhan bahan bacaan	5 jenis	Penyediaan bahan bacaan	5 jenis	Rp. 17.140.000,00	Rp. 19.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	ketersediaan makanan dan minuman rapat dinas	12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	Rp. 134.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar daerah	12 bulan	Rapat-rapat Luar daerah berjalan Lancar	12 bulan	Rp. 250.000.000,00	Rp. 312.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan kantor /gedung/tempat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Keamanan Kantor/gedung /tempat kerja	10 unit	Keamanan kantor terjamin	12 bulan	Rp. 837.673.000,00	Rp. 435.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 9.431.947.000,00	Rp. 3.430.000.000,00		
1.01.1.01.01.02.005	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda	2 unit	Kelancaran transportasi di unit kerja	4 unit kerja	Rp. 761.368.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
						Kendaraan dinas/operasional roda 2	5 unit							
						Kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit							
1.01.1.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kebutuhan perlengkapan gedung kantor	120 jenis	Pengadaan perlengkapan kantor yang memadai	12 jenis	Rp. 818.993.000,00	Rp. 625.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kebutuhan Peralatan gedung kantor	8 jenis	Pengadaan peralatan kantor yang memadai	8 jenis	Rp. 420.853.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kebutuhan mebeleur	4 jenis	Pengadaan Mebeleur yang memadai	4 jenis	Rp. 218.373.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.02.013	Pengadaan tanah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Karangmojo Playen	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	lahan untuk sekolah	8245 m2	Kebutuhan lahan untuk sekolah terpenuhi	8245 m2	Rp. 2.927.650.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.01.1.01.01.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan rumah Dinas	1 unit	Rumah Dinas yang nyaman dan terawat	1 unit	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peningkatan sarana dan prasarana melalui pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 unit	Gedung kantor rapi,nyaman dan indah	4 unit	Rp. 285.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peningkatan sarana dan prasarana melalui pemeliharaan rutin kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Kendaraan Dinas selalu siap digunakan	50 unit	Rp. 409.390.000,00	Rp. 422.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan instalasi air minum, Instalasi listrik, Instalasi telepon,pos&telekomunikasi	4 kegiatan	Perlengkapan gedung kantor yang siap dipergunakan	4 kegiatan	Rp. 198.000.000,00	Rp. 214.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.028	pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan alat-alat berat,Pemeliharaan alat-alat kantor,pemeliharaan alat-alat rumah tangga,alat-alat corak kesenian	4 jenis	Peralatan gedung kantor selalu siap dipergunakan	4 jenis	Rp. 275.000.000,00	Rp. 285.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peningkatan sarana dan prasarana melalui pemeliharaan rutin mebeleur	6 jenis	Mebeleur kontor selalu dalam kondisi layak digunakan	6 jenis	Rp. 97.320.000,00	Rp. 112.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi gedung kantor	2 unit	Rehabilitasi BPKB,Induk tahap II	2 unit	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 575.582.000,00	Rp. 593.280.000,00		
1.01.1.01.01.05.042	Pembinaan dan Pelaksanaan Bimtek Bagi Pengelola Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pemahaman pengelolaan Admin Keu	105 Orang	Peningkatan wawasan Petugas tentang peraturan Admin Penatausahaan Keuangan	105 Orang	Rp. 95.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.05.050	Pengelolaan dan administrasi aset barang milik Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Petugas pencatatan barang habis pakai,inventaris dan aset yang terlatih	30 Orang	Peningkatan kompetensi petugas pencatat barang habis pakai, inventaris dan aset	30 Orang	Rp. 82.582.000,00	Rp. 95.780.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.05.051	Workshop Penyusunan dan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pendidikan,	Terwujudnya peningkatan kapasitas	100 %	Penyusunan dan Penataan Anggaran kegiatan	60 Orang	RKA SKPD Sesuai dengan Rencana (tahun 2016)	60 Orang	Rp. 195.000.000,00	Rp. 195.000.000,00	Dinas Pendidikan,	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penataan Anggaran TI		Pemerintah Daerah Meningkatkan	Pemuda dan Olah Raga	sumberdaya apatur								Pemuda Dan Olahraga	
1.01.1.01.01.05.057	Bimtek Tata Naskah dan kearsipan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Meningkatkan kemampuan dan pemahaman sumber daya aparatur dalam penggunaan tata naskah yang sesuai dengan produk hukum yang berlaku	30 Orang	Peningkatan kompetensi aparatur dalam penggunaan tata naskah yang sesuai dengan produk hukum yang berlaku	30 Orang	Rp. 68.000.000,00	Rp. 72.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.05.058	Bimtek Administrasi Keuangan Bagi Pengelola Administrasi Keuangan Sekolah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pemahaman pengelolaan Admin Keu Sekolah	90 Orang	Peningkatan wawasan petugas tentang peraturan admin penatausahaan keuangan sekolah	90 Orang	Rp. 135.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 222.000.000,00	Rp. 239.600.000,00		
1.01.1.01.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan realisasi kinerja APBD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	3 dokumen	Informasi capaian kinerja urusan pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai wujud pertanggungjawaban instansi	3 dokumen	Rp. 11.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Bulan, Triwulan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun	4 dokumen	Informasi laporan Capaian SKPD Terhadap Pertanggung-jawaban Keuangan SKPD	4 dokumen	Rp. 45.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.06.018	Penyusunan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Sinkronisasi Kegiatan di bidang pendidikan 2. Dokumen program dan kegiatan SKPD	75 orang, 2 dokumen	1. Program dan Kegiatan bidang pendidikan dapat tersusun secara harmonis 2. Dokumen program dan kegiatan SKPD yang sesuai dengan peraturan	75 orang, 2 dokumen	Rp. 146.000.000,00	Rp. 160.600.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	4 dokumen	Informasi evaluatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD	4 dokumen	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI *										Rp. 2.463.150.000,00	Rp. 2.877.500.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.15.062	Pengembangan model, bahan ajar, dan merdia pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	Tersedianya model, bahan ajar dan media pembela ran PAUD sebagai pandu an dalam kegiatan pembe lajaran program PAUD	1 model, 2 bahan ajar	- Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan PAUD - Peningkatan layanan pendidikan pada satuan PAUD	200 eksemplar	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.075	Pembinaan Kreativitas PAUD Nonformal	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	Penyelenggaraan Festival Kreativitas Lembaga PAUD Nonformal	500 Orang	Meningkatnya dukungan dari berbagai pihak	500 Orang	Rp. 213.150.000,00	Rp. 308.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.081	Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga PAUD	200 lembaga	Lembaga PAUD bermutu sesuai standar pelayanan PAUD	200 lembaga	Rp. 245.000.000,00	Rp. 198.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.082	PAUD Percontohan Tingkat DIY	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Banguntapan Kraton	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	Penyediaan Layanan PAUD Percontohan Tk.Daerah	3 lembaga	Peningkatan Kualitas PAUD melalui layanan PAUD Percontohan	3 lembaga	Rp. 200.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.083	Pengembangan Kurikulum PAUD	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Kota Yogyakarta Sleman Bambang lipuro Banguntapan Bantul Dlingo Imogiri Kasihan Kretek Pajangan Pandak Piyungan Pleret Pundong Sanden Sedayu Sewon Srandakan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	1. Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum PAUD holistik integratif 2. Advokasi Kurikulum PAUD	150 orang, 120 Orang	1. Meningkatnya Pemahaman mengenai Kurikulum PAUD holistik integratif 2. Implementasi Kurikulum Berorientasi pada Perkembangan Jiwa Anak	150 orang, 120 Orang	Rp. 350.000.000,00	Rp. 341.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.15.088	Peningkatan Kapasitas Pendidik/Pengelola Keterpaduan PAUD (BKB, SDIDTK, dan Posyandu)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	Orientasi Teknis Pendidik/Pengelola Keterpaduan PAUD	120 Orang	Meningkatnya kualitas Pendidik/Pengelola	120 Orang	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.089	Pengembangan Kompetensi Pendidik PAUD Nonformal	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Banguntapan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	Pelatihan bagi Pengelola & PendidikPAUD Nonformal	200 Orang	Peningkatan MutuPTK melalui Pengembangan Kompetensi PAUD Nonformal	200 Orang	Rp. 350.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.093	Pembinaan PAUD Inklusif	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	Rintisan dan Pengembangan PAUD Inklusif	180 Orang	Meningkatnya layanan PAUD Inklusif	180 Orang	Rp. 475.000.000,00	Rp. 522.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.15.097	Pengembangan dan Pemberdayaan Gugus PAUD	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	Seleksi dan Pembinaan Gugus PAUD	250 Orang	Meningkatnya kualitas Gugus PAUD	250 Orang	Rp. 280.000.000,00	Rp. 308.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										Rp. 351.503.595.000,00	Rp. 17.215.734.110,00		
1.01.1.01.01.16.063	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSDA) Pendidikan Dasar	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	BOS dan BOSDA	2 satuan pendidikan	kelancaran proses belajar mengajar	2 satuan pendidikan	Rp. 334.629.230.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.068	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Banguntapan Cangkringan Gamping Imogiri Jetis Kasihan Lendah Nglipar Paliyan Prambanan Samigaluh Sapto sari Srandakan Tanjungsari Tegalrejo Tepus Umbulharjo	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP dan masyarakat DO SMP serta tidak meneruskan	400 Orang	Masyarakat yang lulus SD tidak meneruskan dan DO SMP mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP	400 Orang	Rp. 345.000.000,00	Rp. 345.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.092	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Galur Kulonprogo	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Galur	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 Sekolah	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 650.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.093	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wates Kulonprogo	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Wates	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 Sekolah	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 700.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.094	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Karangmojo Gunungkidul	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Karangmojo	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 Sekolah	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 650.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.095	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wonosari Gunungkidul	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Wonosari	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 Sekolah	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 850.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.097	Pembinaan OOSN SD	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar Jawa	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Peningkatan Prestasi Kontingen O2SN SD	9 cabang lomba	Peningkatan Prestasi Kontingen O2SN SD	9 cabang lomba	Rp. 770.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.098	Pembinaan OSN SD	Ilmu Pengetahuan dan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar Jawa	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan	84.92 %	Peningkatan Prestasi OSN SD	2 cabang lomba	Peningkatan Prestasi OSN SD	2 cabang lomba	Rp. 250.000.000,00	Rp. 265.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Teknologi			dasar								Dan Olahraga	
1.01.1.01.01.16.100	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Seni TK/SD	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar Jawa	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Peningkatan Prestasi FLS2N SD dan LCSAN SD	9 cabang lomba	Peningkatan Prestasi FLS2N SD dan LCSAN SD	9 cabang lomba	Rp. 250.000.000,00	Rp. 260.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.101	Pembinaan O O S N S M P	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar Jawa	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional th 2015 Tk DIY	7 cabang lomba	Terselenggaranya lomba & pembinaan OOSN	7 cabang lomba	Rp. 550.000.000,00	Rp. 605.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.102	Pembinaan F L S S N S M P	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar Jawa	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Kejuaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP tahun 2015,Kejuaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP tahun 2013, Pembinaan Calon Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP	11 cabang lomba	Terselenggaranya lomba & pembinaan FLSSN	11 cabang lomba	Rp. 495.000.000,00	Rp. 544.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.103	Pembinaan O S N S M P	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	"Kejuaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP "	4 mapel	Terselenggaranya lomba & pembinaan OSN	4 mapel	Rp. 463.000.000,00	Rp. 605.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.107	Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokcil	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan Jakarta	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Terpilihnya Sekolah Sehat dan Dokcil tk. DIY	2 cabang lomba	Wakil DIY dalam lomba Sekolah Sehat dan Dokter Kecil Tingkat Nasional	2 cabang lomba	Rp. 350.000.000,00	Rp. 320.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.108	Pembinaan dan pengembangan Bank Soal SD/MI	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Bank soal SD yang memadai	75 Orang	Terpenuhinya pengembangan soal SD yang bermutu	75 Orang	Rp. 250.000.000,00	Rp. 265.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.110	Pengembangan dan Pembinaan Klub Olahraga SD	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Terbinanya Klub Olahraga SD	20 klub	Peningkatan kualitas Club Olahraga SD	20 klub	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.112	Lomba motivasi belajar mandiri SMP Terbuka	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan Jakarta	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Kejuaraan Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP 2015	3 Sekolah	Terselenggaranya lomba & pembinaan LOMOJARI SMP	3 Sekolah	Rp. 38.500.000,00	Rp. 42.350.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.113	Gladi & pembinaan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja) SMP	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Kejuaraan dan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR), Kejuaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP tahun 2013,Pembinaan Calon Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP	3 bidang	Terselenggaranya Gladi dan Pembinaan LPIR SMP	3 bidang	Rp. 308.000.000,00	Rp. 338.800.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.120	Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat SD	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Mlati	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Peningkatan motivasi belajar & ajang unjuk prestasi siswa SD	15 Sekolah	Peningkatan motivasi belajar & ajang unjuk prestasi siswa	15 Sekolah	Rp. 165.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.16.121	Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat SMP	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Mlati	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Kejuaraan dan Lomba Cerdas Cermat SMP	50 Orang	Terselenggaranya lomba & pembinaan LCC	50 Orang	Rp. 165.000.000,00	Rp. 181.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.122	Pengembangan Bank Soal SMP	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Peningkatan hasil kelulusanUjian Nasional SMP DIY	4 mapel	Terselenggaranya Diklat Pengembangan penulisan Soal UN	125 Orang	Rp. 288.500.000,00	Rp. 332.750.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.123	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Ujian	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Peningkatan hasil kelulusanUjian Nasional SMP DIY	80 Sekolah	Terselenggaranya Bimtek Ujian Nasional	80 Sekolah	Rp. 111.365.000,00	Rp. 122.501.610,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.125	Pembinaan MGMP SMP	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Peningkatan kualitas pembelajaran SMP DIY	75 Sekolah	Terselenggaranya TOT MGMP DIY.	75 Sekolah	Rp. 165.000.000,00	Rp. 181.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.126	Penyelenggaraan Ujian SD/MI	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Ujian Sekolah SD/MI	1 kegiatan	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI yang bermutu	1 kegiatan	Rp. 1.900.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.127	Penyediaan beasiswa Prestasi	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Bantuan pendidikan kepada siswa berprestasi jenjang Dikdas	780 siswa	Tersaluranya bantuan kepada siswa berprestasi	780 siswa	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 1.210.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.128	Pengembangan dan Pembinaan TPK SMP	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Peningkatan kualitas pembelajaran SMP	150 Orang	Terselenggaranya kegiatan Tim Pengembang Kurikulum	150 Orang	Rp. 150.000.000,00	Rp. 181.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.129	Kartu Cerdas Jenjang Dikdas	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Bantuan pendidikan kepada siswa miskin yang berprestasi jenjang Dikdas	2500 siswa	Tersaluranya bantuan kepada siswa miskin	2500 siswa	Rp. 4.750.000.000,00	Rp. 3.924.332.500,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.130	Pembinaan Akreditasi jenjang SD	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY/KAB/KOTA	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Kesiapan SD untuk diakreditasi	75 Sekolah	Peningkatan mutu SD sesuai dengan BAP	75 Sekolah	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.131	Pembinaan Akreditasi Jenjang S M P	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY/KAB/KOTA	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Peningkatan Akreditasi sekolah SMP	20 Sekolah	Terselenggaranya pembinaan Akreditasi sekolah	20 Sekolah	Rp. 110.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.132	Pembinaan Calon Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Terselenggaranya Pembinaan SMP calon SSN untuk terlaksananya standar pelayanan minimal	1 kegiatan	Kualitas SWMP SSN DIY Meningkat	50 Sekolah	Rp. 500.000.000,00	Rp. 605.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.134	Pengembangan Kurikulum TK dan SD	Ilmu Pengetahuan dan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan	84.92 %	Peningkatan mutu dan kinerja guru TK dan SD	100 Orang	Peningkatan mutu dan kinerja guru TK dan SD	100 Orang	Rp. 200.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda	Baru - Mempercepat Capaian

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Teknologi			dasar								Dan Olahraga	Target
1.01.1.01.01.17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH*										Rp. 99.827.377.000,00	Rp. 44.444.431.750,00		
1.01.1.01.01.17.062	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Siswa putus sekolah (DO) dan rawan putus sekolah dapat melanjutkan dan menyelesaikan menyelesaikan pendidikannya (lulus SMA)	9575 siswa	Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan menengah melalui penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	9575 siswa	Rp. 5.815.665.000,00	Rp. 16.202.512.500,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.063	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Banguntapan Depok Dlingo Galur Gamping Gedang sari Godean Gondokusuman Jetis Jetis Kalasan Kalibawang Kotagede Kretek Lendah Mantrijeron Mlati Nanggulan Ngampilan Ngawen Ngemplak Pajangan Paliyan Pandak Panggang Patuk Pengasih Pleret Purwosari Rongkop Sanden Sapto sari Sedayu Semanu Sewon Sleman Srandakan Tanjungsari Temon Umbulharjo Wates Wonosari	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA/MA bagi Masyarakat DO SMA dan SMP tidak meneruskan	400 Orang	Masyarakat yang lulus SMP tidak meneruskan dan DO SMA/MA mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA	1260 Orang	Rp. 464.500.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.077	Pengembangan Kurikulum SMA	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Tim Pengembang Kurikulum mampu menelaah dan mengembangkan kurikulum yang berlaku serta meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun perangkat kurikulum	200 Orang	Peningkatan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan mengintegrasikan dalam bahan ajar	200 Orang	Rp. 350.000.000,00	Rp. 868.120.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.078	Pengembangan Kurikulum SMK	Ilmu Pengetahuan dan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan	79.71 %	1. Guru mendapat sosialisasi tentang kurikulum 2. Guru mampu	220 Guru	1. Informasi Kurikulum 2013 2. Tersusunnya modul bahan ajar/RPP 3. Kisi-kisi	220 Guru	Rp. 300.000.000,00	Rp. 421.986.250,00	Dinas Pendidikan, Pemuda	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Teknologi			menengah (SMA, MA,SMK)		mengembangkan kurikulum 3. Guru mampu mengembangkan bahan ajar 4. Guru mampu menyusun soal"		Soal				Dan Olahraga	
1.01.1.01.01.17.086	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 2 Wates Kulonprogo	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Wates	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 Sekolah	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.087	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Wonosari	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 Sekolah	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 950.000.000,00	Rp. 950.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.088	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Pengasih Kulonprogo	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Pengasih	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 1.225.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.089	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Wonosari Gunungkidul	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Wonosari	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.090	Penerbitan Jurnal Karya Ilmiah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Buletin Karya Ilmiah (Sagasitas)	3000 eksemplar	Masyarakat yang mendapatkan buletin dan jurnal memperoleh informasi penelitian yang dilakukan oleh pelajar SMA	3000 eksemplar	Rp. 200.000.000,00	Rp. 163.621.700,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.092	Pembinaan dan Pengiriman OOSN SMK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	1. Seleksi OOSN SMK tingkat DIY 2. Pembinaan peserta OOSN SMK dan kesiapan wakil DIY maju tingkat Nasional 3. Pengiriman kontingen OOSN SMK Tk.Nasional	10 bidang	1. Juara OOSN SMK Tk. DIY 2. Prestasi siswa di Tk. Nasional dengan memperoleh medali 3. kesiapan siswa maju OOSN SMK Tk. Nasional 4. Juara OOSN SMK Tk. Nasional	10 bidang	Rp. 950.000.000,00	Rp. 1.045.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.094	Pembinaan dan Pengiriman peserta FLSSN SMK Tingkat Nasional	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	1. Pembinaan peserta FLSSN dan kesiapan wakil DIY maju ke Tk. Nasional 2. Pengiriman kontingen FLSSN ke Tk. Nasional	5 Bidang lomba	1. Prestasi siswa di Tk. Nasional 2. Kesiapan siswa maju FLSSN Nasional 3. Juara FLSSN SMK Tk Nasional	5 Bidang lomba	Rp. 297.000.000,00	Rp. 302.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.095	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman OSN SMA Tingkat Nasional	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Peningkatan kompetensi dan kesiapan peserta dalam mengikuti OSN SMA Tingkat Nasional	9 Bidang lomba	Wakil DIY mampu bersaing dalam OSN SMA Tingkat Nasional	9 Bidang lomba	Rp. 1.094.960.000,00	Rp. 1.204.456.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.096	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman OOSN SMA	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Peningkatan kompetensi dan kesiapan peserta dalam mengikuti OOSN SMA Tingkat Nasional	5 cabang lomba	Wakil DIY mampu bersaing dalam OSN SMA Tingkat Nasional	5 cabang lomba	Rp. 580.265.000,00	Rp. 638.291.500,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.097	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman FLSSN SMA	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Peningkatan kompetensi dan kesiapan peserta dalam mengikuti FLSSN SMA Tingkat Nasional	7 bidang seni	Wakil DIY mampu bersaing dalam FLSSN SMA Tingkat Nasional	7 bidang seni	Rp. 498.140.000,00	Rp. 547.954.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.17.098	Penyelenggaraan Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Peningkatan kompetensi dan kesiapan peserta dalam mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Tingkat Nasional	6 siswa	Wakil DIY mampu bersaing dalam Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Tingkat Nasional	6 siswa	Rp. 150.470.000,00	Rp. 165.517.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.099	Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) UUD 1945	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Peningkatan kompetensi dan kesiapan peserta dalam mengikuti LCC UUD 1945 Tingkat Nasional	10 siswa	Wakil DIY mampu bersaing dalam Lomba LCC UUD 1945 Tingkat Nasional	10 siswa	Rp. 294.842.000,00	Rp. 324.326.200,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.100	Gladi PIR dan Wisata Budaya	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Karya Ilmiah siswa siap dan layak dikirimkan untuk mengikuti seleksi di Tingkat Nasional	120 siswa	Karya Ilmiah Siswa lolos seleksi untuk dipersiapkan mengikuti olimpiade Penelitian Siswa di Tingkat Nasional	120 siswa	Rp. 310.110.000,00	Rp. 341.121.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.102	Pembinaan Akreditasi Jenjang SMA	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	SMA siap di akreditasi	40 Sekolah	SMA mampu mengimplementasikan pemenuhan 8 SNP	40 Sekolah	Rp. 100.000.000,00	Rp. 119.472.100,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.104	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	1. Seleksi OSTN SMK Tk DIY 2. Pembinaan peserta OSTN dan kesiapan wakil DIY maju ke Tk Nasional 3. Pengiriman kontingen OSTN SMK ke Tk Nasional	5 Bidang lomba	1. Juara OSTN SMK Tk DIY 2. Prestasi siswa di Tk Nasional dengan memperoleh medali 3. Kesiapan siswa maju OSTN SMK Tk Nasional 4. Juara OSTN Tk Nasional	5 Bidang lomba	Rp. 220.000.000,00	Rp. 242.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.105	Penyelenggaraan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMA	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan Jakarta	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Peningkatan kompetensi dan kesiapan peserta dalam mengikuti OPSI SMA Tingkat Nasional	20 karya	Wakil DIY mampu bersaing dalam OPSI Tingkat Nasional	20 karya	Rp. 333.825.000,00	Rp. 367.207.500,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.106	Seleksi dan Pengiriman Anugerah Konstitusi bagi Guru Sekolah Menengah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan Jakarta	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Juara I, II dan III bagi Peserta Seleksi Anugerah Konstitusi untuk Guru Sekolah Menengah	15 Orang	Kesiapan Guru dalam mengikuti seleksi tingkat nasional	3 Orang	Rp. 53.850.000,00	Rp. 65.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.114	Penyelenggaraan FLSS Tingkat Provinsi	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Kasihan	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Lomba bagi siswa SMK se DIY di bidang kesenian	5 Bidang lomba	Juara FLSS Tk DIY	5 Bidang lomba	Rp. 200.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.117	Lomba Bahasa	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	1. Terseleksinya siswa pada lomba bahasa tingkat DIY 2. Peningkatan kompetensi dan kesiapan wakil DIY dalam mengikuti Lomba Bahasa Tk. Nasional	6 Bidang lomba	1. Juara Lomba Bahasa Tk. DIY 2. Wakil DIY mampu bersaing dalam Lomba Bahasa Tk. Nasional	6 Bidang lomba	Rp. 400.000.000,00	Rp. 465.850.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.118	Penyediaan BOS/BOSDA SM	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	BOSDA jenjang sekolah menengah	2 satuan pendidikan	kelancaran proses belajar mengajar	2 satuan pendidikan	Rp. 65.418.750.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.119	Kartu Cerdas Jenjang SM	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Jumlah siswa cerdas dari keluarga tidak mampu lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah yang difasilitasi dengan Kartu	9104 siswa	Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan menengah melalui penyediaan Kartu Cerdas	9104 siswa	Rp. 13.807.000.000,00	Rp. 12.515.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Cerdas							
1.01.1.01.01.17.120	Pemberdayaan MGMP/MKKS SMA	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Guru dan Kepala Sekolah yang kompeten	90 Orang	Peningkatan mutu PTK melalui Pemberdayaan MGMP dan MKKS SMA	90 Orang	Rp. 150.000.000,00	Rp. 420.112.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.121	Pemberdayaan MGMD/K3S SMK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Kepala SMK yang kompeten	220 Orang	Peningkatan mutu PTK melalui pemberdayaan K3S SMK DIY	220 Orang	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.122	Peningkatan Kompetensi Pengawas SMA	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Pengawas mampu menelaah dan menyusun standar pengawasan sekolah dalam pemenuhan SNP	100 Orang	Peningkatan mutu PTK melalui Pemberdayaan Pengawas Sekolah jenjang SMA	100 Orang	Rp. 125.000.000,00	Rp. 187.330.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.125	Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat SM	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Siaran Lomba Cerdas Cermat SM	8 tayangan	Peningkatan motivasi belajar dan ajang unjuk prestasi siswa dalam lomba cerdas cermat	8 tayangan	Rp. 150.000.000,00	Rp. 175.054.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.127	Pemberdayaan MGMP SMK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Guru mata pelajaran jenjang SMK yang kompeten	150 Guru	Peningkatan mutu PTK melalui pemberdayaan MGMP SMK	150 Guru	Rp. 350.000.000,00	Rp. 407.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.131	Pembinaan Akreditasi Jenjang SMK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Sekolah (Kompetensi Keahlian) siap diakreditasi	50 kompetensi keahlian	Kompetensi keahlian mampu mengimplementasikan 8 SNP	50 kompetensi keahlian	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.17.165	Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Tanjungsari Kemadang	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Terlaksananya pembangunan gedung asrama SMK Tanjungsari	1 unit	Gedung Asrama SMK Kelautan	1 unit	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.17.167	Fasilitasi Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Dunia Kerja	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Workshop Dunia Kerja	217 SMK	Terbukanya peluang untuk terjun ke dunia kerja bagi siswa SMK	217 SMK	Rp. 138.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Pameran Dunia Kerja bagi Siswa SMK	1 pameran						
1.01.1.01.01.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL*										Rp. 4.296.700.000,00	Rp. 5.281.000.000,00		
1.01.1.01.01.18.004	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar	2000 Orang	Penduduk melek aksara	2000 Orang	Rp. 530.000.000,00	Rp. 720.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.006	Penyediaan Sarana dan prasana Pendidikan Nonformal	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Banguntapan Cangkringan Galur Gamping Gedang sari Gondokusuman Jetis	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Pemberian Fasilitas Sarana belajar modul Paket B dan C	800 set	Peserta didik Program Paket B dan Program Paket C dapat mengikuti pembelajaran efektif	800 set	Rp. 185.300.000,00	Rp. 185.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kalibawang Kasihan Lendah Mantrijeron Ngampilan Nglipar Pajangan Paliyan Patuk Prambanan Rongkop Samigaluh Sapto sari Sedayu Srandakan Tanjungsari Tegalrejo Tepus Umbulharjo Wates Wonosari										
1.01.1.01.01.18.007	Pengembangan Data dan Informasi PNF	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Informasi Pendidikan Kesetaraan	1 dokumen	Pemutahiran informasi Pendidikan Kesetaraan	1 dokumen	Rp. 65.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.009	Pengembangan model, bahan ajar, dan media pembelajaran Pendidikan Nonformal	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Banguntapan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Tersedianya bahan ajar PNF sebagai panduan dalam kegiatan pembela jaran program PNF	2 bahan ajar	panduan Peningkatan layanan lembaga PNF	200 eksemplar	Rp. 150.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Tersedianya model pembelajaran PNF sebagai panduan dalam kegiatan pembela jaran program PNF	1 model	Bahan acuan dalam rangka Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan PNF	200 eksemplar				
1.01.1.01.01.18.024	Pengembangan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Peningkatan pemahaman bagi PTK formal dan nonformal dalam memahami dan memasukkan nilai-nilai gender di satuan pendidikannya	250 Orang	perubahan pola pikir/mindset PTK di lembaga pendidikan untuk mengarusutamakan gender dalam segala aktivitas di lembaganya	250 Orang	Rp. 277.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.031	Jambore PTK-PNF	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Banguntapan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	1.Sosialisasi 2.Seleksi Tk.DIY 3.Pembinaan Kontingen 4.Pengiriman Kontingen Tk.Nasional	15 cabang	Prestasi Kontingen DIY Tk.Nasional	15 cabang	Rp. 660.000.000,00	Rp. 725.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.032	Penyelenggaraan MTQ Pelajar Tingkat DIY	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Pengasih	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	MTQ Pelajar Tingkat DIY Tahun 2015	14 cabang	Peningkatan kemampuan siswa dalam hal baca tulis Al Quran dan pendalaman isinya untuk mewujudkan generasi yang beraklak mulia	14 cabang	Rp. 400.000.000,00	Rp. 410.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.042	Pengembangan model, bahan ajar dan media pembelajaran Program Pendidikan Informal	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Banguntapan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Tersedianya bahan ajar pembelajaran Pendidikan Informal sebagai panduan dalam kegiatan pembelajaran Program Pendidikan Informal	2 bahan ajar	Panduan peningkatan kesejahteraan keluarga	200 eksemplar	Rp. 150.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Tersedianya model pembelajaran Pendidikan	1 model	Panduan Pemberdayaan keluarga	200 eksemplar				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Informal sebagai panduan dalam kegiatan pembelajaran Program Pendidikan Informal							
1.01.1.01.01.18.047	Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Pembinaan menejerial Pengelolaan PKBM	50 lembaga	Lembaga PKBM telah memenuhi standar mutu pendidikan Nonformal dan Informal	50 lembaga	Rp. 45.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.049	Lomba Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Penilaian mutu penyelenggaraan Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan	4 jenis	Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Unggul	4 jenis	Rp. 90.000.000,00	Rp. 105.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.050	Pembinaan dan pengiriman Pentas PAI tingkat Nasional	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Seleksi, Pelatihan dan Pengiriman kontingen DIY maju ke Pentas PAI Tingkat Nasional	13 cabang lomba	Kesiapan kontingen DIY Maju tingkat nasional	1 kontingen	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.051	Seleksi, pembinaan dan pengiriman PNF berprestasi tk Nasional	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY, DKI Jakarta	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Seleksi, pembinaan dan persiapan untuk lomba peserta didik kursus tingkat nasional dan lomba LKP Berprestasi Tingkat Nasional	180 Orang	Terkirimnya wakil DIY dalam Lomba Peserta Didik Kursus Tingkat Nasional	2 kontingen	Rp. 199.400.000,00	Rp. 230.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.052	Fasilitasi Akreditasi Program Lembaga Kursus dan Pelatihan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Banguntapan Bantul Berbah Danurejan Depok Gamping Godean Gondokusuman Imogiri Kalasan Karangmojo Kasihan Kotagede Minggir Mlati Moyudan Ngaglik Pajangan Pakualaman Pandak Pengasih Playen Prambanan Rongkop Sanden Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Temon Umbulharjo Wates Wonosari	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Bintek dan Pendampingan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam menyiapkan dokumen akreditasi secara tepat	100 lembaga	LKP dapat memenuhi kelayakan program dan kelembagaanny atas dasar standar nasional pendidikan dan peningkatan mutu program dan satuanLembaga.	100 lembaga	Rp. 125.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.053	Pembinaan PKBM berbasis IT	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Pembelajaran menejemen PKBM berbasis IT di setiap PKBM	50 lembaga	PKBM mampu menggunakan sarana IT dalam setiap Menejerial PKBM sehingga lebih efektif dan efisien	50 lembaga	Rp. 75.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Olahraga	
1.01.1.01.01.18.054	Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Jam Belajar Masyarakat	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Banguntapan Bantul Berbah Danurejan Depok Gamping Godean Gondokusuman Imogiri Kalasan Karangmojo Kasihan Kotagede Minggir Mlati Moyudan Ngaglik Pajangan Pandak Pengasih Playen Prambanan Rongkop Sanden Sentolo Sewon Seyegan Sleman Temon Umbulharjo Wates Wonosari	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Lomba Jam Belajar Masyarakat Tingkat DIY	1 kegiatan	Meningkatnya peran serta elemen masyarakat dalam perwujudan agenda aksi pemberlakuan Jam Belajar Masyarakat	3 Desa	Rp. 130.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.056	Pengembang Kompetensi Pendidik Nonformal &Informal	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Banguntapan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Pelatihan PTK-PNF(Tutor PKBM,LKP,TBM,PKK)	290 Orang	Peningkatan Mutu PTKmelalui PengembanganKompetensi Pendidik Nonformal dan Informal	290 Orang	Rp. 330.000.000,00	Rp. 475.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.057	Pengembangan kurikulum Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Tutor keaksaraan dapat menyusun silabus dan rencana pembelajaran	30 Orang	Peningkatan kualitas tutor keaksaraan dalam menyusun silabus dan rencana pembelajar	30 Orang	Rp. 40.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.058	Penyelenggaraan Ujian PNF	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Evaluasi Penyelenggaraan Ujian PNFdan Latihan Ujian	7000 Orang	Angka kelulusan SMP/MTS dan SMA /MA/SMK	7000 Orang	Rp. 375.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.061	Fasilitasi Akreditasi Program PKBM	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Pembinaan Akreditasi Program PKBM	25 lembaga	Lembaga menenuhi standar mutu	25 lembaga	Rp. 50.000.000,00	Rp. 51.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.062	Pemberdayaan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP) dan Fasilitasi Forum PKBM	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Banguntapan Cangkringan Galur Gamping Gedang sari Gondokusuman Jetis Kalibawang Kasihan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Pembentukan 18 MTMP (Program Paket A,B dan C) dan terfasiliatsi Forum PKBM	18 MTMP	terlembaganya Tutor mata pelajaran Program Paket A,B, dan C serta Forum PKBM yang bermutu	18 MTMP	Rp. 70.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Lendah Mantrijeron Ngampilan Nglipar Pajangan Paliyan Patuk Prambanan Rongkop Samigaluh Sapto sari Sedayu Srandakan Tanjungsari Tegalrejo Tepus Umbulharjo Wates Wonosari										
1.01.1.01.01.18.063	Pelatihan Uji Kompetensi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Banguntapan Bantul Berbah Danurejan Depok Gamping Godean Gondokusuman Imogiri Kalasan Karangmojo Kasihan Kotagede Minggir Mlati Moyudan Ngaglik Pajangan Pakualaman Pandak Pengasih Playen Prambanan Rongkop Sanden Sentolo Sewon Seyegan Tegalrejo Temon Umbulharjo Wates Wonosari	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Pelatihan bagi Pengelola LKP untuk meningkatkan kualitas dan mutu manajemen lembaga dan menghasilkan output yang kompeten	100 Orang	Terwujudnya kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan dan sosial bagi Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan	100 Orang	Rp. 100.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.18.065	Pengkajian Pendidikan Nonformal dan Informal	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Banguntapan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Tersedianya rekomendasi yang tepat sebagai panduan dalam mengembangkan Program Pendidikan Nonformal	2 Kajian	Bahan kajian sebagai panduan dalam mengembangkan model pembelajaran dalam rangka Peningkatan layanan lembaga PNF	400 eksemplar	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.19	PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS										Rp. 15.533.725.000,00	Rp. 15.800.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.19.058	Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pembinaan tentang Anak Berkebutuhan Khusus	950 Orang	Pemahaman dan meningkatnya kepedulian Masyarakat dan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus	950 Orang	Rp. 143.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.060	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Meningkatkan kemampuan dan kreativitas Siswa SLB dalam memberikan bekal kemandirian kepada anak didik.	300 siswa	Terpilainya Juara Lomba Tingkat Provinsi yang meliputi Juara I, II, III.	300 siswa	Rp. 785.325.000,00	Rp. 770.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.061	Bantuan Operasional Sekolah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Bantul Sleman Galur Kalibawang Karangmojo Kokap Kotagede Kraton Mergangsan Nanggulan Ngawen Paliyan Panggang Panjatan Patuk Playen Purwosari Rongkop Semin Sentolo Tepus Umbulharjo Wates Wirobrajan Wonosari	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan SLB Swasta. Biaya Asrama SLB Negeri	3083 siswa	Meningkatnya mutu dan kompetensi lulusan siswa Sekolah Luar Biasa	3083 siswa	Rp. 3.970.000.000,00	Rp. 3.900.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.062	Pengembangan Kurikulum	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY/Sleman	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Meningkatkan mutu dan proses pembelajaran di sekolah	50 Orang	Peningkatan kemampuan penyusunan kurikulum SLB	50 Orang	Rp. 150.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.064	Beasiswa Magang	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Bantul Sleman Galur Kalibawang Karangmojo Kokap Kotagede Kraton Mergangsan Nanggulan Ngawen Paliyan Panggang Panjatan Patuk Playen Purwosari Rongkop Semin Sentolo Tepus Umbulharjo Wates Wirobrajan	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Melatih ketrampilan dan kemandirian siswa SLB dalam dunia usaha	70 siswa	Kemandirian siswa untuk terjun ke masyarakat	70 siswa	Rp. 462.000.000,00	Rp. 480.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Wonosari										
1.01.1.01.01.19.065	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Bantul Sleman Galur Kalibawang Karangmojo Kokap Kotagede Kraton Mergangsan Nanggulan Ngawen Paliyan Panggang Panjatan Patuk Playen Purwosari Rongkop Semin Sentolo Tepus Umbulharjo Wates Wirobrajan Wonosari	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pengadaan makanan tambahan dan pengadaan susu bagi siswa SLB	3853 siswa	Terlaksananya bantuan pengadaan makanan tambahan dan susu bagi siswa SLB.	3853 siswa	Rp. 2.254.500.000,00	Rp. 2.300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.066	Pemberian Layanan Kesehatan Siswa	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Kasihnan Mergangsan Pakem Panjatan Playen Sewon Umbulharjo Wonosari	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pemeliharaan Kesehatan Berkala Siswa SLB dan SPPI asesment SLB swasta	1998 siswa	Pemberian Layanan Kesehatan secara berkala dapat mengurangi kecenderungan siswa sakit bisa berkurang dan jaminan kesehatan bisa tercapai.	1998 siswa	Rp. 475.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.070	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman SOINA	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan luar DIY	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Meningkatnya Bakat Olahraga bagi anak tuna Grahita	260 siswa	Terpilihnya Juara Lomba Tingkat Provinsi yang meliputi Juara I, II, III, dan sekaligus mewakili ke Tingkat Nasional	1 kontingen	Rp. 420.000.000,00	Rp. 430.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.072	Jambore P K - P L K	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY dan Jakarta	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Memberikan bekal ketrampilan dan wawasan bagi pembina pramuka untuk dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah masing-masing.	600 siswa	Ketrampilan dan kemampuan Pembina Pramuka meningkat dan kemandirian anak-anak meningkat serta percaya diri dalam bermasyarakat.	600 siswa	Rp. 350.000.000,00	Rp. 370.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.076	Peningkatan Pengelolaan Assesment guru	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Memberikan bekal ketrampilan pembelajaran bagi guru SLB yang menangani peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah masing-masing.	420 Guru	Guru meningkat kemampuannya dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus dan mahir dalam memahami mendeteksi ketunaan anak berkebutuhan khusus	420 Guru	Rp. 750.000.000,00	Rp. 770.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.082	Pelatihan Pendidikan Kesehatan Reproduksi	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Meningkatkan profesionalisme guru SLB dalam memberikan bekal kemandirian kepada peserta didik.	120 Orang	Memberikan bekal pengetahuan akan kesehatan reproduksi yang menangani peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah masing-masing.	120 Orang	Rp. 220.000.000,00	Rp. 230.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.19.083	Penyusunan dan Penulisan Soal ujian SLB	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan dan penulisan soal ujian bagi guru	60 Orang	Guru dapat menyusun dan menulis soal yang valid dan reliabel.	60 Orang	Rp. 250.000.000,00	Rp. 270.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.086	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Yogyakarta	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Mergansan	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 450.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.087	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Yogyakarta	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 400.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.088	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN Pembina	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 800.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.089	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Bantul	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Kasihan	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 1.160.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.090	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Bantul	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Sewon	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 350.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.091	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Sleman	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Pakem	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 300.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.092	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Gunungkidul	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Wonosari	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 325.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.093	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Kulonprogo	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Panjatan	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 945.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.095	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Gunungkidul	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Playen	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah	1 tahun	Kelancaran operasional dan kegiatan belajar mengajar sekolah	1 Sekolah	Rp. 150.000.000,00	Rp. 325.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.096	Koordinasi dan Pembinaan Guru SLB/SPPI	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Terselenggaranya Program Kegiatan dan Rencana Kerja Kepala SPPI	100 Orang	Tercapainya Program Kegiatan dan Rencana Kerja Kepala SPPI	100 Orang	Rp. 105.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.097	Koordinasi dan Pembinaan Kepala SLB	Ilmu Pengetahuan dan	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Terlaksananya pembinaan kepala SLB	76 Orang	Pembinaan kepala SLB	76 Orang	Rp. 44.450.000,00	Rp. 130.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Teknologi											Dan Olahraga	
1.01.1.01.01.19.098	Pengembangan dan Pembinaan Forum Penyelenggaraan Pendidikan SLB (Yayasan)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Terkoordinasinya Program Kegiatan dan Rencana Kerja Sekolah	70 Orang	Teridentifikasinya berbagai kendala yang muncul dalam penyelenggaraan Pendidikan dan solusi pemecahannya.	70 Orang	Rp. 44.450.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.19.099	Pembinaan Akreditasi SLB	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Terlaksananya Pembinaan Akreditasi SLB	50 Orang	Kesiapan Akreditasi Sekolah Luar Biasa	50 Orang	Rp. 130.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.19.100	Supervisi Pengawas SLB	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Bantul Sleman Galur Kalibawang Karangmojo Kokap Kotagede Kraton Mergangsan Nanggulan Ngawen Paliyan Panggang Panjatan Patuk Playen Purwosari Rongkop Semin Sentolo Tepus Umbulharjo Wates Wirobrajan Wonosari	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	71.22 %	Meningkatkan Program dan Rencana Kerja SLB	76 Sekolah	Meningkatnya manajemen Sekolah serta terpecahkannya permasalahan di sekolah	76 Sekolah	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN										Rp. 45.335.957.000,00	Rp. 48.747.000.000,00		
1.01.1.01.01.22.001	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Laporan pelaksanaan program dan kegiatan, saran dan rekomendasi kinerja, laporan gambaran kinerja Dinas Dikpora DIY, Dokumen pengendalian program dan kegiatan tahun berjalan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.	4 dokumen	Informasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi triwulan dan akhir tahun	4 dokumen	Rp. 40.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.019	Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Apresiasi terhadap SDM yang berprestasi di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	400 Orang	Motivasi dan Peningkatan Prestasi terhadap Pelajar, Pemuda dan masyarakat Pendidikan	400 Orang	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.022	Penyelenggaraan Sajian Pendidikan Berbasis Budaya di Media Elektronik	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Gladhi kawruh Ngudhar Kawruh Tembang Talk show pendidikan	16 tayangan 8 tayangan 10 tayangan	Peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang melalui penyelenggaraan siaran pendidikan di media	34 tayangan	Rp. 550.000.000,00	Rp. 605.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									elektronik					
1.01.1.01.01.22.023	Pengembangan Minat Jurnalistik Siswa	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Majalah Candra, Tabloid Gembira, tabloid Bias, Kalender Pendidikan, Kader Jurnalistik	4 jenis	Peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang melalui pengembangan minat jurnalistik siswa	4 jenis	Rp. 650.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.025	Pendataan Pendidikan Pengembangan Aplikasi Pendataan dan E-Administrasi	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Booklet, Leaflet, Data Profil Pendidikan DIY, Video Profil Pendidikan DIY	4 macam	Peningkatan layanan data informasi pendidikan	4 macam	Rp. 350.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.026	Pemeliharaan Website	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Layanan Informasi Pendidikan	2 macam	Stakeholder Pendidikan semakin mudah mengakses informasi pendidikan	2 macam	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.027	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Madrasah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Pemeringkatan Akreditasi Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta.	450 sekolah/madrasah	Peningkatan mutu sekolah/madrasah melalui akreditasi untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta.	450 sekolah/madrasah	Rp. 1.750.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.028	Penyelenggaraan Ujian	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Bantuan penyelenggaraan ujian disalurkan kepada SD/MI, SLB (SDLB, SMP/MTs, SMA/MA, dan UPT Pendidikan Kecamatan guna mendukung pelaksanaan ujian.	1 kegiatan	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan pemberian bantuan penyelenggaraan ujian	1 kegiatan	Rp. 4.155.000.000,00	Rp. 4.300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.029	pengelolaan website lembaga	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan website lembaga	300 konten berita	Adanya website lembaga yang dikelola secara optimal dan profesional	300 konten berita	Rp. 300.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.031	Gelar Anak Indonesia	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Penyelenggaraan Hari Anak Nasional	2500 Orang	Penanaman Kepribadian Anak	2500 Orang	Rp. 75.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.032	Fasilitasi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) DIY	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Danurejan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	PembinaanP PGRI DIY	1 lembaga	Terselenggaranya PGRI DIY	1 lembaga	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.033	Fasilitasi Dewan Pendidikan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Danurejan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Pembinaan Dewan Pendidikan	1 lembaga	Terselenggaranya Dewan Pendidikan	1 lembaga	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.034	Penjaminan Mutu Sekolah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Penyelenggaraan Forum Pendidikan Untuk Semua	50 Orang	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui penjaminan mutu sekolah	50 Orang	Rp. 150.000.000,00	Rp. 242.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.036	Fasilitasi GOPTK	Ilmu Pengetahuan dan	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Danurejan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Pembinaan GOPTK	1 lembaga	Terselenggaranya GOPTK	1 lembaga	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Teknologi											Dan Olahraga	
1.01.1.01.01.22.037	Fasilitasi Organisasi Olah Raga	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Pembinaan Organisasi Olah Raga	4 lembaga	Terselenggaranya Organisasi Olah Raga	4 lembaga	Rp. 100.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.038	Fasilitasi KONI	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Kraton	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Terpenuhinya operasional KONI	1 lembaga	Terelenggaranya organisasi KONI	1 lembaga	Rp. 7.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.040	Revitalisasi guru Indonesia	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Penyelenggaraan peringatan hari guru	1200 Orang	Motivasi dan Peningkatan Prestasi guru di bidang pendidikan	1200 Orang	Rp. 140.000.000,00	Rp. 140.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.050	Pengendalian Bantuan-Bantuan Bidang Pendidikan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Validasi, Verifikasi, Pengendalian Bantuan	757 lembaga	Terkendalinya usulan bantuan di Bidang DIKPORA	757 lembaga	Rp. 60.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.055	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Pemahaman Kepala sekolah dan Guru dalam mengikuti mekanisme sertifikasi	80 Orang	Peningkatan mutu PTK melalui pelaksanaan sertifikasi	30 Orang	Rp. 64.242.000,00	Rp. 130.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.056	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Peningkatan Kesejahteraan GTT dan PTT	511 Orang	Peningkatan PTK melalui peningkatan kesejahteraan	511 Orang	Rp. 4.398.000.000,00	Rp. 4.500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.057	Penilaian Angka Kredit Guru, Pamong Belajar dan Kinerja Kepala Sekolah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Nilai angka kredit guru dan pamong belajar untuk kenaikan pangkat dan nilai kinerja kepala sekolah selama 1 tahun	65 Sekolah	Kenaikan pangkat guru dan pamong belajar dan peta kinerja kepala sekolah selama 1 tahun	65 Sekolah	Rp. 212.267.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.058	Bimtek Karya Tulis Ilmiah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Peningkatan Kompetensi Guru dalam penulisan karya ilmiah	70 Orang	uru menghasilkan produk karya ilmiah	70 Orang	Rp. 149.800.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.060	Pemilihan Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Berprestasi dan Guru PLB Berdedikasi	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Juara I, II dan III Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi tingkat DIY	54 Juara	Kesiapan Guru dalam mengikuti seleksi tingkat nasional	18 Orang	Rp. 563.895.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.061	Penyediaan Insentif GTT/PTT, GTY/PTY	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT di DIY	15991 Orang	Peningkatan kualitas PTK melalui peningkatan kesejahteraan	15991 Orang	Rp. 18.904.000.000,00	Rp. 30.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.064	Penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Rangkaian Pelaksanaan Hardiknas	3000 Orang	Pameran, Perlombaan, Ajang Seni Budaya Bidang Pendidikan	3000 Orang	Rp. 210.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.22.066	Fasilitasi KNPI DIY	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Kraton	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Pembinaan KNPI DIY	1 lembaga	Terselenggaranya KNPI DIY	1 lembaga	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.067	Penilaian Kinerja Guru	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Kesiapan guru dalam melaksanakan penilaian kinerja guru	35 Orang	Guru siap melaksanakan penilaian kinerja guru	35 Orang	Rp. 87.738.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.068	Penyelenggaraan Forum Ilmiah Guru	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Juara I, II dan III Forum Ilmiah Guru untuk jenjang TK, SD, SMP dan SMA serta Juara 1 OSN Guru	115 Orang	Guru yang siap menjadi duta/wakil DIY dalam forum ilmiah guru tingkat nasional dan OSN	25 Orang	Rp. 146.625.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.070	Penyelenggaraan Hari Aksara	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Hari Aksara Internasional Tk .DIY	1 event	Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional DIY	2000 Orang	Rp. 45.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.072	Penyusunan Baseline Data untuk Perumusan Master Plan Pendidikan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Baseline Data untuk Perumusan Master Plan Pendidikan di DIY 2015-2030	1 dokumen	Informasi sebagai perumusan master plan pendidikan DIY 2015-2030	1 dokumen	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.22.073	Penyusunan Baseline Data untuk Perumusan Master Plan Pemuda dan Olah Raga	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Baseline Data untuk Perumusan Master Plan Pemuda dan Olah Raga di DIY 2015-2030	1 dokumen	Informasi rumusan Master Plan Pemuda dan Olah Raga di DIY 2015-2030	1 dokumen	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.22.076	Pendidikan Kesehatan Remaja Melalui UKS	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Terlaksananya "Pendidikan Kesehatan Remaja" melalui UKS, untuk 200 pelajar SMP dan SMA.	200 pelajar	Meningkatnya pengetahuan, kesadaran pelajar maupun jumlah pelajar untuk berperilaku hidup sehat	200 pelajar	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.077	Young Ladies Leadership Programes di Sekolah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	seminar dan pelatihan "gender mainstreaming"	150 pelajar	Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, dan praktik pelajar tentang kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan	150 pelajar	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.22.078	Pengembangan Kompetensi Guru SLB Non PLB	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Peningkatan mutu PTK yang bukan berasal dari program studi PLB	40 Orang	Kesiapan guru yang bukan berasal dari studi PLB untuk mengajar SLB	40 Orang	Rp. 129.390.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.22.079	Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	74.71 %	Gebyar PAUDNI	1 kegiatan	1. Promosi dan sosialisasi program BPKB 2. meningkatkan pemahaman masyarakat dan pendidik dalam memanfaatkan limbah RT sebagai APE 3. peningkatan pemahamanPTK PNF dalam meningkatkan mutu layanan 4.mengapresiasi prestasi peserta didik dan PTK	1 kegiatan	Rp. 75.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.22.081	Achievement Motivation Training	Ilmu Pengetahuan	Daya Saing Pendidikan	DIY	Persentase kinerja peningkatan mutu	74.71 %	Peningkatan Motivasi Pegawai	150 Orang	Meningkatnya motivasi pegawai dalam	150 Orang	Rp. 50.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Pendidikan,	Baru - Mempercepat

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bidang Pendidikan	dan Teknologi	Meningkat		pendidikan				menjalankan tupoksinya				Pemuda Dan Olahraga	Capaian Target
1.01.1.01.01.23	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI										Rp. 4.617.200.000,00	Rp. 5.294.670.700,00		
1.01.1.01.01.23.001	Promosi PendidikanTinggi DIY	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Jakarta, Sumbang, Kepri, Kalteng, NTT	Persentase peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi	58 %	Peningkatan layanan fasilitasi pendidikan tinggi	5 lokasi	Meningkatnya animo masuk perguruan tinggi DIY	5 lokasi	Rp. 1.578.700.000,00	Rp. 1.774.670.700,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.23.005	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa/ bea-mahasiswa	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi	58 %	Mahasiswa dapat melanjutkan kuliah serta dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi	696 mahasiswa	Peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi di DIY melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan bagi mahasiswa	696 mahasiswa	Rp. 2.122.800.000,00	Rp. 2.475.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.23.006	Pemberdayaan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Provinsi se Indonesia di DIY	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi	58 %	Pengenalan budaya Jogja kepada mahasiswa baru	500 Orang	mahasiswa baru di DIY dapat mengenal budaya Jogjakarta	500 Orang	Rp. 450.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							Kelancaran operasional IKPM se Indonesia di DIY	33 IKPM	IKPM di DIY dapat melaksanakan fungsinya dengan baik	33 IKPM				
1.01.1.01.01.23.015	Penerbitan Data dan Informasi Perguruan Tinggi DIY	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi	58 %	1. Data dan Informasi PT DIY 2. Data potensi pendidikan tinggi DIY	2 kegiatan	Terbantunya Perguruan Tinggi, APTISI dan mahasiswa baru	2 kegiatan	Rp. 215.700.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.23.016	Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Tinggi DIY	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Jakarta, Sumbang, Kepri, Kalteng, NTT	Persentase peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi	58 %	Terbantunya PT dan APTISI DIY	4 lokasi	PT dan APTISI DIY dapat melaksanakan pembinaan dan sosialisasi/ promosi bersama	4 lokasi	Rp. 250.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.24	PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TERKEMUKA*										Rp. 4.582.800.000,00	Rp. 5.820.000.000,00		
1.01.1.01.01.24.022	Penerbitan buletin warta guru dan jurnal ilmiah adi karsa	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	Terselenggaranya kegiatan penerbitan jurnal dan buletin	2 terbitan	Adanya terbitan jurnal dan buletin hasil karya guru dan pelaku pendidikan lainnya	7500 eksemplar jurnal dan buletin	Rp. 234.800.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.24.030	Produksi media pembelajaran	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	Terselenggarakannya produksi media pembelajaran audio, animasi, video,multimedia dan aplikasi berbasis smartphone	5 jenis	Media pembelajaran berbasis audio, animasi, video, multimedia, dan aplikasi berbasis smartphone	20 judul	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.24.032	Peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana IDC dan BTS program ICT EQEP	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Bambang lipuro Galur Girisubo Imogiri Jetis Karangmojo Lendah Minggir	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	Terselenggaranya kegiatan Peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana IDC dan BTS program ICT EQEP	1 kegiatan	Terkelolanya sarana dan prasarana BTS program ICT EQEP	65 BTS	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Mlati Moyudan Nglipar Pandak Panggang Panjatan Patuk Pengasih Piyungan Playen Ponjong Sanden Sapto sari Semanu Sentolo Tanjungsari Tempel Tepus Umbulharjo Wates										
1.01.1.01.01.24.039	Penguatan dan pengembangan program ICT EQEP	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	penguatan program ICT EQEP	500 Sekolah	optimalisasi pemanfaatan perangkat dan konten pembelajaran dari program ICT EQEP	500 Sekolah	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.24.041	Apresiasi karya Inovasi pengembangan media pembelajaran (Penyelenggaraan Kemah Ilmiah TIK)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	terselenggaranya kegiatan inovasi dan kreasi bagi para guru dan siswa dalam penegmbang an dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran	500 Orang	apresiasi bagi guru, siswa dan pelaku pendidikan lainnya dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran	500 Orang	Rp. 500.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.24.043	Gebyar Anugerah Kihajar	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	gebyar Anugerah Kihajar	400 Orang	1. pemahaman peran TIK dalam dunia pendidikan 2. Inovasi pengembangan media pembelajaran oleh guru, 3. pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar oleh siswa 4. sosialisasi dan promosi produk BTKP DIY	400 Orang	Rp. 500.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.24.047	Diseminasi dan koordinasi program BTKP DIY	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	terselenggaranya kegiatan Koordinasi dan diseminasi program BTKP dengan pelaku pendidikan dan mitra	1 kegiatan	Sinkronisasi program BTKP dengan lembaga mitra, pelaku pendidikan dan pemangku kebijakan di kab/kota	500 Orang	Rp. 148.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.24.048	Launching fitur produk bar	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	Terselenggarakannya kegiatan launching fitur produk baru hasil pengembangan media	5 media	Adanya media hasil pengembangan yang disosialisasikan kepada masyarakat	5 media	Rp. 150.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.24.049	Penerbitan profil lembaga	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	video	400 keping	Adanya profil lembaga dalam bentuk non cetak	400 keping	Rp. 150.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
							booklet, leaflet	400 eksemplar	Adanya profil lembaga dalam bentuk cetak	400 eksemplar				
1.01.1.01.01.24.051	Diklat Produksi Media Program TV dan Video	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Mlati Umbulharjo	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 %	Pelajar dapat memproduksi video	30 siswa	Siswa yang terlatih dalam membuat video	30 siswa	Rp. 200.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.24.053	Pengembangan TI bagi Guru dan TU	Ilmu Pengetahuan	Daya Saing Pendidikan	DIY	Persentase satuan pendidikan yang	50 %	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga	250 Orang	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga	240 Orang	Rp. 300.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pendidikan,	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		dan Teknologi	Meningkat		menerapkan pembelajaran berbasis TIK		kependidikan dan peningkatan satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TI		kependidikan dan peningkatan satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TI				Pemuda Dan Olahraga	
1.01.1.01.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B L U D										Rp. 11.000.000.000,00	Rp. 15.000.000.000,00		
1.01.1.01.01.26.001	Pelayanan Pendidikan Pada BLUD	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	BLPT Dinas Dikpora DIY	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik standart	1.904 Peserta didik	Pelayanan Pendidikan yang terstandar	1.904 Peserta didik	Peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik standart	1904 Peserta didik	Rp. 11.000.000.000,00	Rp. 15.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.27	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA*										Rp. 8.239.800.000,00	Rp. 9.815.780.000,00		
1.01.1.01.01.27.001	Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar Se-Jawa Bali dan Lampung	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY dan Jakarta	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	DIY mampu menampilkan kesenian khas dalam DSP se Jawa Bali dan Lampung	1 kontingen	Penambahan wawasan seni budaya bagi pelajar di DIY	60 Orang	Rp. 485.000.000,00	Rp. 533.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.27.002	Pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa dan mahasiswa	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	Siswa, mahasiswa dan pendidik yang memiliki wawasan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS	300 Orang	Terbentuknya kader-kader anti penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS	300 Orang	Rp. 339.600.000,00	Rp. 750.200.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.27.003	Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Budaya Berbasis TIK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Umbulharjo	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	Terselenggarakannya kegiatan pengembangan dan produksi media pembelajaran budaya berbasis TIK	5 Paket	Video pembelajaran budaya berbasis TIK untuk pembelajaran	5 Paket	Rp. 250.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.27.009	Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (AKSENIBUDYO)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	Memberikan pendidikan Formal pada para seniman dan pelaku budaya	120 Orang	Terbentuknya kader kader penerus seni dan budaya	120 Orang	Rp. 6.665.200.000,00	Rp. 7.472.080.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.27.010	Penguatan dan pembinaan Pendidikan Karakter bagi Siswa SMA	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	Peningkatan dan penanaman nilai-nilai karakter pada siswa	200 Orang	Tertanamnya nilai-nilai karakter pada siswa dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat	200 Orang	Rp. 300.000.000,00	Rp. 660.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.27.011	Pengembangan Pendidikan Karakter bagi Siswa SMK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	Peningkatan Pemahaman Pendidikan karakter	100 Orang	Peningkatan Kemampuan Siswa Berkarakter	100 Orang	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.28	PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN										Rp. 5.094.200.000,00	Rp. 6.595.165.000,00		
1.01.1.01.01.28.001	Penyusunan dan pengembangan Model Unggulan Mutu	Ilmu Pengetahuan dan	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan	10 %	Model unggulan mutu pendidikan	50 sekolah model	Panduan dalam penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan	50 sekolah model	Rp. 500.000.000,00	Rp. 665.500.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pendidikan	Teknologi			model unggulan mutu pendidikan				standar mutu				Dan Olahraga	
1.01.1.01.01.28.002	Pengembangan Kreativitas Siswa SMK (Klinik Sains)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	1.Tersosialisasikannya pengembangan kreativitas siswa SMK 2. Terseleksinya karya siswa yang berpotensi di bid sains 3.Terselenggaranya pendampingan dan pameran hasil karya siswa	75 karya	Peningkatan mutu pendidikan menengah melalui pengembangan kreativitas siswa SMK	75 karya	Rp. 425.000.000,00	Rp. 484.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.28.003	Pengembangan Kreativitas Siswa SMA (Klinik Sains)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	Peningkatan Kemampuan dan kompetensi Siswa dibidang Sains dan Penelitian	5 kab/kota	Peningkatan jumlah peserta yang lolos seleksi dalam penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Olimpiade Penelitian siswa di tingkat Daerah, Regional, Nasional dan Internasional	5 kab/kota	Rp. 1.400.000.000,00	Rp. 1.888.029.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.28.005	Pengembangan Kreativitas Siswa SD (Klinik sains SD)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	Peningkatan prestasi Siswa SD di bidang sains	120 siswa	Peningkatan prestasi Siswa SD di bidang sains	120 siswa	Rp. 300.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.28.006	Pengembangan Kreativitas Siswa SMP (Klinik Sains)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	Terselenggaranya Pembinaan kreativitas guru dan siswa untuk mengikuti OSN	5 kab/kota	Terbinanya pembinaan pengembangan kreativitas siswa	5 kab/kota	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.019.636.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.28.007	Pengembangan Jogja Learning Gateway (Portal Jogja Belajar)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	1. Layanan pembelajaran dan konsultasi online 2. Pengembangan konten pembelajaran 3. peningkatan kompetensi narasumber pembelajaran	1 Portal Belajar	Terlayannya kebutuhan belajar masyarakat melalui mobil learning service	500 Sekolah	Rp. 450.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.28.008	Layanan Mobile "Learning Service"	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	layanan pembelajaran dengan Mobil learning service	75 kelompok	Terlayannya kebutuhan belajar masyarakat melalui mobil learning service	75 kelompok	Rp. 350.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.28.009	Anugerah PAUDNI	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	Penyelenggaraan Anugerah Penghargaan Pengabdian di bidang PAUDNI	3 bidang	Anugerah Penghargaan Pengabdian di bidang PAUDNI	3 bidang	Rp. 221.700.000,00	Rp. 132.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.28.010	Rintisan PKBM Unggulan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	PKBM memiliki keunggulan mutu program PNF	10 lembaga	PKBM unggulan bidang PNF	10 lembaga	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.28.011	Pengembangan Lembaga PAUD Unggulan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	Blmtek Pengembangan PAUD Unggulan	25 lembaga	Meningkatnya layanan PAUD Unggulan	25 lembaga	Rp. 192.500.000,00	Rp. 264.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.28.012	Pengembangan Sekolah Sejahtera Jenjang SMA	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	Peningkatan mutu pelayanan Bimbingan Konseling di sekolah	35 Orang	Meningkatnya kemampuan guru BK dalam mengembangk an program pengembangan kesejahteraan sekolah	35 Orang	Rp. 140.000.000,00	Rp. 187.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.28.013	Pengembangan Sekolah Sejahtera Jenjang SMK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	10 %	Peningkatan mutu pelayanan Bimbingan Konseling di sekolah	35 Orang	Meningkatnya kemampuan guru BK dalam mengembangk an program pengembangan kesejahteraan sekolah	35 Orang	Rp. 140.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.29	PROGRAM SINERGITAS PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN										Rp. 4.370.400.000,00	Rp. 5.946.980.000,00		
1.01.1.01.01.29.001	Penelitian dan Pembangunan Pendidikan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	35 %	Penelitian terhadap implementasi pendidikan dalam pembangunan	1 Riset	dokumen penelitian	1 dokumen	Rp. 175.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.29.002	Peningkatan Kualitas LPM Bidang Kewirausahaan dan SIBERTIMAS	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	35 %	pemberian fasilitas kepada kelompok mahasiswa wirausaha	25 kelompok	Peningkatan Mutu layanan pendidikan tinggi melalui peningkatan kualitas LPM bidang kewirausahaan dan sibertimas	25 kelompok	Rp. 170.400.000,00	Rp. 389.180.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.29.003	Pengembangan Kewirausahaan SMK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	35 %	1.Tersosialisasikannya program pengembangan kewirausahaan 2.Terselenggaranya lomba kewirausahaan bagi siswa SMK	15 Bidang lomba	1. Guru dapat mengembangkan program kewirausahaan di sekolah 2. Juara lomba kewirausahaan tk DIY	15 Bidang lomba	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.29.004	Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	35 %	1. Terlaksananya seleksi LKS tk. DIY 2. Terlaksananya pembinaan peserta LKS dan kesiapan wakil DIY maju ke tk. Nasional 3. Terlaksananya pengiriman kontingen LKS ke tk. Nasional	1 kegiatan 50 Orang 15 Bidang lomba	1. Juara LKS Tk. DIY 2. Prestasi siswa di tk. Nasional dengan memperoleh medali	50 Orang 15 Bidang lomba	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 3.125.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.29.005	Penyelenggaraan LITM dan OSAINTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	35 %	Mahasiswa memiliki kompetensi dlm bidang sains dan teknologi	400 mahasiswa	Peningkatan Mutu pelayanan pendidikan tinggi melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas mahasiswa	400 mahasiswa	Rp. 675.000.000,00	Rp. 822.800.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.29.006	Perluasan Layanan dan Promosi Pendidikan melalui Media Elektronik dan pameran	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Berbah Umbulharjo	Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja	35 %	Tersosialisasinya produk-produk BTKP melalui siaran TV on Demand Tersosialisasinya produk-produk BTKP melalui siaran radio streaming Tersosialisasinya produk-produk BTKP melalui pameran Tersosialisasinya produk-produk BTKP melalui siaran TV lokal	1 Paket 1 Paket 1 Kali 5 Kali	Masyarakat pendidikan memanfaatkan produk pembelajaran BTKP DIY	4 jenis	Rp. 500.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga													
1.18.01	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan													

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Olahraga													
1.18.1.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN*										Rp. 3.200.000.000,00	Rp. 3.850.000.000,00		
1.18.1.01.01.16.001	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Mlati	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	13 sentra	Organisasi Kepemudaan DIY mampu meningkatkan kinerjanya	50 OKP	Organisasi kepemudaan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi kemasyarakatan umum	50 OKP	Rp. 500.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.16.003	Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Pengasih Playen	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	13 sentra	Kemah bakti sosial	25 kecamatan	peningkatan fasilitas kecamatan yang menjadi sasaran	2 kecamatan	Rp. 400.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.16.008	Pameran hasil karya pemuda	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Wates	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	13 sentra	Pameran Karya Pemuda Berprestasi	1 pameran	Terpublikasikannya prestasi kepemudaan dan memotivasi masyarakat pemuda untuk berkarya	15 karya pemuda	Rp. 250.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.16.010	Peningkatan Kemandirian dan Kepeloporan pemuda	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	13 sentra	Pemuda Pelopor DIY mampu bersaing dengan daerah lain	5 bidang	Pemuda yang memiliki kepeloporan	5 bidang	Rp. 300.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.16.011	Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Sleman	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	13 sentra	Lembaga yang memberdayakan potensi pemuda agar lebih maju	10 sentra	Lembaga memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan kualitas	10 sentra	Rp. 350.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.16.012	Pemberdayaan Peran serta Pemuda untuk Pembangunan Pedesaan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Pengasih Semin	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	13 sentra	Pemuda Sarjana dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di pedesaan	20 Orang	Pemuda Sarjana yang siap untuk membangun desa	20 Orang	Rp. 950.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.16.015	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Kraton	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	13 sentra	Pemuda DIY menjadi duta daerah dan duta bangsa	12 Orang	Pemuda DIY yang mampu mengemban tugas sebagai duta daerah dan duta bangsa	12 Orang	Rp. 450.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA										Rp. 550.000.000,00	Rp. 650.000.000,00		
1.18.1.01.01.17.002	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	Pengasih Semin	Peningkatan Jumlah kelompok wirusaha muda	365 kelompok	Pemuda DIY tetap survive menjalani kehidupan karena memiliki keterampilan	50 kelompok	50 kelompok yang masing- masing kelompok terdiri dari 3 orang	50 kelompok	Rp. 550.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA*										Rp. 310.000.000,00	Rp. 440.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.01.01.20.007	Pemassalan Olahraga bagi pelajar ,mahasiswa dan masyarakat	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	2200 Orang	Peningkatan Prestasi olahraga Pelajar, mahasiswa dan masyarakat	2000 Orang	Peningkatan layanan dan pembinaan pemasyarakatan olahraga	2000 Orang	Rp. 210.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.20.034	Pelatihan Instruktur Senam	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kraton	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	2200 Orang	Terlaksananya Pelatihan Instruktur Senam	50 Orang	meningkatnya kompetensi instruktur senam di DIY	50 Orang	Rp. 100.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.18.1.01.01.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA										Rp. 36.800.000.000,00	Rp. 6.217.657.000,00		
1.18.1.01.01.21.007	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Banguntapan Umbulharjo	Peningkatan fasilitasi layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komplek Mandala Krida , GOR Amongrogo dan Gelanggang Pemuda Sorowajan	3 unit	Terpeliharanya Komplek Mandala Krida, GOR Amongrogo dan Gelanggang Pemuda Sorowajan	3 unit	Rp. 350.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.21.013	Pembangunan Manda Krida	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Umbulharjo	Peningkatan fasilitasi layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Pembangunan Stadion Manda Krida	1 unit	Stadion Manda Krida yang representatif	1 unit	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.21.017	Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Depok	Peningkatan fasilitasi layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari	1 unit	Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari	1 unit	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 3.726.765.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.21.018	Pembangunan Youth Center	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Mlati	Peningkatan fasilitasi layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Pembangunan Youth Centre	1 unit	Pembangunan Youth Centre	1 unit	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 1.290.892.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.21.019	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Pemuda	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kasihani Umbulharjo	Peningkatan fasilitasi layanan pemuda dan olahraga	58.69 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komplek Graha Wana Bhaktiyasa, Youth Centre dan Pondok Pemuda Ambarbinangun	3 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komplek Graha Wana Bhaktiyasa, Youth Centre dan Pondok Pemuda Ambarbinangun	3 unit	Rp. 450.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.22	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA*										Rp. 1.900.000.000,00	Rp. 1.850.000.000,00		
1.18.1.01.01.22.003	Pembentukan Paskibraka	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kasihani	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	41 Organisasi	DIY mempunyai Paskibraka yang bertugas pada peringatan detik-detik proklamasi RI, dan mengirimkan sepasang pemuda sebagai paskibraka nasional	40 Orang	Penambahan wawasan kebangsaan dan nasionalisme bagi Paskibraka	40 Orang	Rp. 850.000.000,00	Rp. 950.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.22.013	Lomba Baris Berbaris	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Umbulharjo	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	41 Organisasi	DIY mempunyai Peleton Inti yang terampil dan menguasai baris-berbaris	60 peleton inti	Peningkatan dan pemantapan pemahaman tentang baris-berbaris	60 pleton inti	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.18.1.01.01.22.014	Fasilitasi Pramuka	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Gondokusuman	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	41 Organisasi	Pembinaan Kwarda DIY	1 lembaga	Terselenggaranya Kwarda DIY	1 lembaga	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.22.018	Pembinaan Pemuda Kader Anti Narkoba	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	41 Organisasi	Kader anti narkoba	60 Orang	Penyebaran informasi mengenai narkoba di kalangan pemuda	60 Orang	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.22.019	Pelatihan Pembina Pramuka	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Mlati	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	41 Organisasi	Kebutuhan atas Pembina Pramuka terpenuhi	60 Orang	Jumlah Pembina Pramuka	60 Orang	Rp. 100.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.18.1.01.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA										Rp. 8.282.000.000,00	Rp. 8.391.900.000,00		
1.18.1.01.01.23.001	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahrga	27 medali	Pembinaan Atlet Berbakat Usia 10-14 th dan 15-18 th di DIY	15 cabor	Tersedianya Atlet berbakat usia 10-14 th sejumlah 300 orang dan usia 15-18 th sejumlah 250 orang	15 cabor	Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 2.970.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.23.002	Penyelenggaraan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahrga	27 medali	Cabang Olahraga yang dilombakan di POPDA terlaksana	18 cabor	Peningkatan prestasi olahraga Pelajar melalui POPDA	18 cabor	Rp. 900.000.000,00	Rp. 931.700.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.23.003	Penyelenggaraan Tri Lomba Juang	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahrga	27 medali	Terlaksananya Lomba Gerak jalan kelompok 17 km, 8 km, dan 45 km	1000 Orang	Terpilihnya Juara pada masing masing kelompok Lomba, Meningkatnya jiwa patriotisme dan nasionalisme	1000 Orang	Rp. 242.000.000,00	Rp. 266.200.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.23.004	Penyelenggaraan POPCADA (Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahrga	27 medali	Terpilihnya atlet pelajar berkebutuhan khusus sebagai juara pada masing masing klas dan cabor nya	3 cabor	Meningkatnya prestasi olahraga atlet pelajar berkebutuhan khusus di DIY	3 cabor	Rp. 170.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.23.005	Bimbingan Teknis bagi Pelatih dan Wasit	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahrga	27 medali	Terlatihnya tenaga Teknis Keolahragaan di DIY	60 Orang	Meningkatnya kompetensi tenaga Teknis Keolahragaan di DIY	60 Orang	Rp. 150.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.23.006	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahrga	27 medali	Suksesnya penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia	550 Orang	Terpilihnya juara LPI tingkat SLTP, SLTA dan perguruan Tinggi	550 Orang	Rp. 180.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.23.008	Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahrga	27 medali	Terlaksananya POSPEDA tahun 2015	16 cabor	Terpilihnya juara pada masing masing cabor dan seni POSPEDA 2015	16 cabor	Rp. 600.000.000,00	Rp. 726.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.23.009	Penyelenggaraan Pekan Olahraga KORPRI Daerah (PORPRIDA)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahrga	27 medali	Terpilihnya juara pada masing-masing cabor yang diselenggarakan dalam PORPRIDA 2015	7 cabor	Meningkatnya kebugaran kondisi tubuh Pegawai Negeri Sipil di DIY	7 cabor	Rp. 220.000.000,00	Rp. 245.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 623.779.376.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Olahraga	
1.18.1.01.01.23.010	Lomba Senam Kesegaran Jasmani	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Terpilihnya atlet pelajar sebagai wakil DIY dalam lomba SKJ 2015	1 kontingen	Atlet-atlet yang siap mengikuti lomba SKJ 2015	1 kontingen	Rp. 220.000.000,00	Rp. 245.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.23.011	Festival dan Lomba Olahraga Tradisional	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Terpilihnya atlet untuk mewakili DIY dalam Festival Olahraga tradisional 2015	1 kontingen	Meningkatnya kemampuan teknis peserta festival olahraga	1 kontingen	Rp. 500.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.23.012	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POPCANAS (Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Terpilihnya atlet-atlet pelajar berkebutuhan khusus untuk mewakili DIY dalam POPCANAS 2015	3 cabor	Atlet-atlet pelajar berkebutuhan khusus yang siap untuk mengikuti POPCANAS 2015	3 cabor	Rp. 550.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18.1.01.01.23.013	Penyelenggaraan Kejuaraan Catur	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	Kejuaraan Piala Raja	1 cabang	Semakin meluasnya minat masyarakat terhadap olah raga Catur	1 cabang	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.18.1.01.01.23.014	Penyelenggaraan POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	27 medali	1. Terpilihnya Atlet atlet pelajar untuk mewakili DIY dalam POPNAS 2015 2. Study banding dan try out	17 cabor	Atlet atlet pelajar DIY yang siap untuk mengikuti POPNAS	17 cabor	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 1.573.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta																
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00					
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Wajib															
1.02	Kesehatan															
1.02.01	Dinas Kesehatan															
1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 7.316.841.110,00	Rp. 4.386.894.000,00				
1.02.1.02.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Telkirimnya surat-surat, paket pos dan tersedianya buku cek	496 surat dan 10 bdl cek	Terpenuhinya kebutuhan informasi dan administrasi kedinasan	100 %	Rp. 12.875.000,00	Rp. 13.900.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan		
							2. Penyelenggaraan surat menyurat	100 %								
							3. Jumlah materai dan pengiriman surat	430 lembar materai 6000, 600 lembar materai 3000, 31 b								
							4. Jumlah Pengiriman surat, perangko, materai	400 bh.surat, 200 bh.materi								
1.02.1.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya Telepon, Air dan Listrik Dinkes dan UPT	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan telepon,air, listrik.	100 %	Rp. 1.367.100.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan		
1.02.1.02.01.01.004	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS (Labkes)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	General check up pegawai Labkes. (Imunisasi Influnza, Imunisasi Hepatitis, Pemeriksaan Kimia klinik,Hematologi dan Imunologi)	57 orang (2-4 Parameter)	Kesehatan 57 orang PNS Labkes terkontrol	100 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan		
1.02.1.02.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Uji berkala kendaraan (KIR)	16 roda 4, 42 roda 2 dan KIR Pick Up	Kendaraan Dinas siap operasional	100 %	Rp. 22.088.150,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan		
							2. Tersedianya perijinan kendaraan dinas / operasional	4 roda 4, 6 roda 2	Tersedianya perijinan kendaraan dinas / operasional	100 %						
							3. Pembayaran pajak kendaraan	4 roda 4, 6 roda 2	kendaraan dinas dan ambulance siap pakai	100 %						
							4. Perpanjangan STNK	2 STNK Roda 4 dan 3 STNK roda 2								

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya Pelaporan Keuangan dan Barang dalam 1 tahun anggaran	12 bln/1 thn	Laporan Keuangan dan laporan barang tersedia dan terkirim dengan tertib	100 %	Rp. 130.320.000,00	Rp. 130.320.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Administrasi keuangan, kepegawaian dan barang lancar	12 bln/1 thn	Administrasi keuangan, kepegawaian dan barang lancar	100 %				
							Jasa administrasi keuangan, barang dan kepegawaian	12 bulan, 18 orang	Terlaksananya administrasi keuangan, barang dan kepegawaian	100 %				
							Jasa Administrasi Keuangan, Barang dan Kepegawaian	12 Bln 12 Org	Administrasi Keuangan,barang dan Kepegawaian lancar	100 %				
1.02.1.02.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Yogyakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya jasa kebersihan kantor (retribusi sampah, pembersihan (lantai keramik 4868 m2,kaca 760 m2,KM/WC 72 m2,KM/WC ka.skpd phone 68m2,halaman 1100m2,dinding 4456m2,pencucian korden 1300m2))	12 bulan	Terjaganya kebersihan kantor	100 %	Rp. 650.674.000,00	Rp. 650.674.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Kebersihan Kantor Terjamin	12 bln/1 thn	Kebersihan Kantor Terjamin	100 %				
							jasa kebersihan kantor	12 bln/1 thn	kebersihan kantor terjamin	100 %				
							Kebersihan kantor (Taman (3000 m2), Kaca (4548 m2), Halaman (24000 m2), KM/WC (600 m2), Keramik (33060 m2), Karpet (480 m2), Ipal (2016 m2), Pencuci alat kes. (1 Thn))	12 bulan	Tersedianya kebersihan kantor terjamin	100 %				
1.02.1.02.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	33 unit Komputer, 8 Unit Lap Top / Note Book, 32 bh M	Peralatan kerja dapat berfungsi dengan baik	100 %	Rp. 62.940.000,00	Rp. 65.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Peralatan Kerja Siap Pakai	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Jumlah komputer, laptop dan mesin ketik yang diperbaiki	3 komputer, 6 laptop, 9 mesin ketik						
							Jumlah peralatan kerja diperbaiki	26 Unit peralatan ktr.						
1.02.1.02.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	72 jenis	kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi	100 %	Rp. 121.829.200,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Alat Tulis Kantor	50 jenis						
							Alat Tulis Kantor	67 jenis						
							Alat Tulis Kantor	50 jenis						
1.02.1.02.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17 barang cetakan dan 33 macam penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan kantor	100 %	Rp. 163.474.460,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan kantorKegiatan pelayanan dan perkantoran lancar	12 bulan						
							barang cetakan dan penggandaan	12 item, 50.000 lembar						
							Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	28 Jenis blanko, 90000 Lbr. Fotocopy						
1.02.1.02.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16 jenis komponen	Tercukupinya penerangan bangunan kantor	100 %	Rp. 88.679.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							lampu pijar, batery kering	16 jenis komponen						
							Tercukupinya penerangan bangunan kantor	12 bulan						
							Komponen instalasi listrik/penerangan	12 item						
							Penyediaan komponen instalasi listrik	24 Macam alat listrik						
1.02.1.02.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya perlatan rumah tangga	15 jenis alat RT	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	100 %	Rp. 61.314.800,00	Rp. 62.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan	20 item,						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	pembersih				Rp. 32.410.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	20 item,						
							Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	25 Macam alat RT dan Bhn.pembersih						
1.02.1.02.01.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor	3 surat kabar	SKH, 5 lokasi	100 %	Rp. 95.996.500,00	Rp. 96.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Tersedianya bahan bacaan dan buku kepustakaan	1 Paket						
							surat kabar	2 SKH, 5 lokasi						
							Penyediaan surat kabar harian dan buku Iptek	2 SKH, 5 lokasi						
1.02.1.02.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	10 bh APAR	kebutuhan bahan logistik kantor terpenuhi	100 %	Rp. 740.240.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Tercukupinya penerangan bangunan kantor	12 bulan						
							gas elpiji, solar genset, pemadam kebakaran dan oksigen Respira	76 tabung elpiji, 806 liter solar genset, 29 tabung p						
							Penyediaan Bahan logistik kantor Labkes. (Minyak tnh. (480 L), Tab.Gas (26 Bh), Solar (280 L), Isian Damkar (20 Tab.))	12 bulan						
1.02.1.02.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat harian	3360 oh	Tersediannya makanan dan minuman rapat harian pegawai	100 %	Rp. 740.240.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat harian	12 bulan						
							makanan & minuman rapat, petugas jaga rawat inap dan ekstra fooding Respira	8030 OH petugas jaga rawat inap, 1832 OH rapat, 24492 O						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan makanan dan minuman	1836 OS (Makmin Rpt), 205 KI (Makmin lembur), 8954 OH (Rp. 360.710.000,00	Rp. 360.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket						
							rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah	66 OH dalam daerah, 46 OH luar daerah						
							Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bln/1 thn						
							jasa keamanan kantor	12 bulan						
1.02.1.02.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	jasa keamanan kantor	12 bulan	Keamanan kantor terjamin	100 %	Rp. 835.990.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.024	Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa Pelayanan Umum	12 bulan	Layanan kepada masyarakat lancar	100 %	Rp. 2.545.200.000,00	Rp. 2.546.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							tunjangan bahaya radiasi, jasa pelayanan, honor juru masak dan supir	14 TBR, 12 bulan japel, 6 juru masak, 1 sopir						
							Jasa Teknis Pelayanan	1 TBR, 12 bulan japel, 6 juru masak, 1 sopir						
1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.491.381.500,00	Rp. 2.579.384.500,00		
1.02.1.02.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas roda 4 (empat)	1 thn	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 untuk operasional	100 %	Rp. 187.460.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	DIY	Prosentase penyediaan dan	100 %	Perlengkapan gedung kantor:	480 m2 gordin, 40 m2 penutup	Kenyamanan lingkungan kerja	100 %	Rp. 1.066.900.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kantor	Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan		pemeliharaan sarana prasarana aparatur		gordin dan penutup meja rapat	meja rapat						
							Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung dan kanopi dan pengembangan sarpras asrama bapelkes	1 Paket						
							Komputer, AC, Laptop, TV, DVD, tempat tidur, spreng, gordyn	2 Unit (Komputer), 5 Unit (AC 1,5 PK), 2 Unit (Lapto						
1.02.1.02.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Komputer, laptop printer, monitor, CCTV	2 unit komputer, printer 2 unit, monitor LED TV 42 i	Kelancaran tugas/ operasional kantor	100 %	Rp. 99.300.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan rehabilitasi pembangunan	1 thn	Gedung kantor terpelihara dengan baik: aman, nyaman, bersih dan sehat	100 %	Rp. 341.350.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terawatnya kendaraan dinas roda 2, roda 4 dn ambulans	12 bln	Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 berfungsi optimal	100 %	Rp. 464.384.500,00	Rp. 464.384.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.026	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor	52 AC, 2 Sound system, 1 jaringan internal, 3 faximil	Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor, AC dll	100 %	Rp. 315.687.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Perlengkapan gedung kantor terpeliharaan dengan baik	12 bulan	Perlengkapan gedung kantor terpeliharaan dengan baik	100 %				
							Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 unit RSKP Respira, 17 bh x 12 bulan film badge ron	Perlengkapan gedung kantor siap operasional	100 %				
							Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	13 Unit (Perlengkapan Gdg.Ktr), 2 Pkt. (Gordyn)	Perlengkapan gedung kantor siap dioperasikan	100 %				
1.02.1.02.01.02.029	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor	5 enis mebeleur, 10 Bh. (meja), 20 Bh. (Kursi)	Mebelair (Almari, meja/kursi kerja/tamu) dapat berfungsi dengan baik	100 %	Rp. 16.300.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 2.313.581.350,00	Rp. 2.461.500.000,00		
1.02.1.02.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Jumlah pegawai dikirim diklat formal penyusunan profil kesehatan	5 Orang	Kelengkapan tabel profil kesehatan dinkes	100 %	Rp. 257.750.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
				Jumlah pegawai dikirim diklat formal			66 orang,	meningkatnya kualitas SDM Respira	100 %					
				Jumlah pegawai dikirim diklat formal			100 %	2. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi SDM Labkes.	100 %					
1.02.1.02.01.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Dinas Induk)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kantor Dinas Kesehatan DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Jumlah pegawai terpapar peraturan perundang-undangan	35 orang 2 hr	Pegawai meningkat pemahamannya tentang peraturan kepegawaian	100 %	Rp. 12.647.350,00	Rp. 16.500.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu (Dinas Induk)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kantor Dinas Kesehatan DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Dokumen angka kredit jabfung, peningkatan pemahaman tentang jabfung	1 dokumen, 120 org	Tenaga kesehatan mendapat penilaian angka kredit jabfung	100 %	Rp. 37.449.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.05.019	Penyusunan Digital Government Services (DGS)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Provinsi DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Upload website, pengembngan konten RS online dan konten kespro remaja	300 judul, 2 paket	Akses informasi ketersediaan tempat tidur RS dan kespro remaja oleh masyarakat	100 %	Rp. 436.517.500,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
				Pengembangan SIM RS (Respira)			1 Paket	Efektifitas pelayanan pasien	100 %					
				pengembangan konten RS online dan konten kespro remaja			2 PT							
1.02.1.02.01.05.024	Pengembangan Teknologi Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Provinsi DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peningkatan pemahaman petugas sistem informasi puskesmas	35 orang 1 kabupaten	kesepakatan pemahaman tentang sistem informasi puskesmas	35 orang 1 kabupaten	Rp. 59.270.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.05.033	Pengembangan ISO	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kantor Dinkes DIY, Kantor RSKP Respira	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	1. Dokumen ISO	1 dokumen	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	100 %	Rp. 190.070.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Kesepakatan audit surveilans, audit internal dan rapat tinjauan manajemen	10 dokumen	Persentase standarisasi pelayanan pasien	100 %				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.05.035	Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Provinsi DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Kab/ kota mendapat pendampingan pengumpulan data kesehatan dan penyusunan buku analisis kesehatan	5 kab/kota	Penyediaan data kesehatan tepat waktu di 5 kab/ kota	100 %	Rp. 93.280.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.05.059	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Provinsi DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Jumlah peserta mendapat bimtek dan sosialisasi penelitian kesehatan	35 Orang	Hasil penelitian terkompilasi dalam 1 laporan	100 %	Rp. 32.170.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.05.060	Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Dokumen Usulan Pelatihan untuk Kegiatan Tahun N+ 1	1 dokumen	Persentase standarisasi pelayanan pelatihan bapelkes	100 %	Rp. 944.477.500,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Kurikulum dan Modul Pelatihan	5 dokumen	Persentase standarisasi pelayanan pasien	100 %				
							Dokumen pengembangan BLUD Bapelkes	5 dokumen	Pelayanan kesehatan sesuai standar, terpenuhinya pemasaran labkes.	100 %				
							Pengembangan Laboratorium Lapangan	1 lokasi						
							Sertifikat Auidt Eksternal,	1 dokumen						
							Akreditasi institusi dari Pusdiklat	1 dokumen						
							metode pelatihan baru	1 metode						
							Dokumen evaluasi pasca pelatihan untuk tiga pelatihan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	3 dokumen						
							Survei Kepusaan Pelanggan	1 paket,						
							Standar pelayanan RS (Respira)	1 paket,						
							Mutu Manajemen Pelayanan kesehatan	100 %						
1.02.1.02.01.05.066	Survei Kesehatan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Provinsi DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Dokumen penelitian survei kesehatan daerah	1 dokumen	Terpenuhinya data di luar laporan rutin	100 %	Rp. 99.950.000,00	Rp. 105.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.05.067	Pengelolaan Sistem Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Provinsi DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Penambahan peralatan untuk pengembangan sistem	2 set	Persentase peralatan untuk pengembangan sistem	80 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 170.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 170.545.300,00	Rp. 171.000.000,00		
1.02.1.02.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen LAKIP 2014	1 dokumen	Persentase pemenuhan perencanaan berbasis bukti	75 %	Rp. 9.200.000,00	Rp. 10.120.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Draft LAKIP 2015	1 dokumen						
							usulan LPPD	1 dokumen						
							usulan LKPJ	1 dokumen						
1.02.1.02.01.06.010	Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Kulon Progo, Gunungkidul, DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Draft Perjanjian/ Kesepakatan Lintas Batas	2 dokumen	Persentase fasilitasi penyusunan kebijakan/ regulasi kesehatan	100 %	Rp. 60.153.000,00	Rp. 51.040.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Kesepakatan dan Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kesehatan 2016	1 dokumen						
							3. Penyediaan pulsa untuk pelayanan SMS Center UPPK	1 tahun						
1.02.1.02.01.06.013	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Rekomendasi solusi permasalahan program tribulanan	4 dokumen	Persentase ketepatan waktu, prosedur dan substansi pelaporan hasil pembangunan kesehatan	97 %	Rp. 13.500.000,00	Rp. 14.850.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Rekomendasi solusi permasalahan program akhir tahun	1 dokumen						
1.02.1.02.01.06.015	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Renja Dinkes 2016	1 dokumen	Persentase ketepatan waktu, prosedur, substansi dalam perencanaan program kesehatan	90 %	Rp. 70.900.000,00	Rp. 77.990.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. RKA Dinkes 2016	1 dokumen						
							3. Kesepakatan Review Renstra Dinkes 2012 - 2017	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen laporan keuangan semesteran/tahunan Dinas dan UPT	2 dok	Prosentase realisasi keuangan semesteran/tahunan Dinas dan UPT	100 %	Rp. 16.792.300,00	Rp. 17.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*										Rp. 2.614.254.100,00	Rp. 5.097.019.500,00		
1.02.1.02.01.19.001	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Yogyakarta	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %	6) Jumlah buletin yang dicetak (Respira)	450 eksemplar	Meningkatnya Prosentase Rumah Tangga Ber PHBS	44 %	Rp. 1.282.489.500,00	Rp. 1.159.119.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							1) dokumen media promosi kesehatan	1 dok						
							2) dok media yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1 dok						
							3) adanya penyebaran informasi melalui media elektronik	1 paket ILM media elektronik						
							4) Adanya Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak PHBS	1 paket media cetak						
							5) Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media outdoor.	1 paket media outdoor						
1.02.1.02.01.19.002	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Yogyakarta	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %	1) dokumen peningkatan, penguatan dan pengembangan PHBS	1 dok	Meningkatnya Rumah Tangga ber-PHBS	44 %	Rp. 291.631.000,00	Rp. 2.808.900.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2) dok Peningkatan cakupan rumah tangga ber-PHBS melalui penggalangan kemitraan potensial Promkes (LSM, Ormas, PKK, Karangtaruna, Dunia Usaha, Toma, Toga, SBH,)	1 dok						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3) Dok peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga;	1 dok						
							4) Advokasi dan optimalisasi implemementasi Pergub 42 tentang kawasan dilarang merokok ;	1 dok						
							5) Dok Sosialisasi PTM akibat perilaku merokok bagi kader kesehatan dan tokoh masyarakat;	1 dok						
							6) Adanya Pembentukan KTR (Kawasan Tanpa rokok di daerah sasaran) di kab/kota;	20 desa KTR						
							7) Dokumen Kampanye sadar hidup sehat pada kelompok khusus (Remaja, Anak sekolah, tokoh masyarakat, Pemuda).	1 dok						
1.02.1.02.01.19.009	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Yogyakarta	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %	Adanya dokumen kesepakatan integrasi LS/LP dalam Desa Siaga /Kelurahan Siaga	1 dokumen	Persentase cakupan desa/kelurahan desa siaga aktif	94 %	Rp. 307.658.600,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Adanya dokumen rencana operasional Desa Siaga	1 dokumen						
							Adanya dokumen koordinasi pokjanal desi / Kelurahan Siaga	1 dokumen						
							Adanya dokumen penguatan pembinaan Posyandu di Prov	1 dokumen						
							Adanya dokumen penguatan pembinaan Posyandu di kab/kota	5 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Adanya dokumen laporan temu wartawan	1 dokumen						
							dok kesepakatan peningkatan program promkes di RS	1 dokumen						
							Dok kesepakatan peningkatan pemberdayaan masyarakat dlm kestrad melalui TOGA	1 dokumen						
							Dokumen kesepakatan peran mitra dlm kesehatan	1 dokumen						
							Dokumen kesepakatan pembinaan UKS	1 dokumen						
							Dokumen kesepakatan peningkatan penurunan AKI/AKB melalui Desa Siaga /Kelurahan Siaga	1 dokumen						
							Dokumen monitoring evaluasi	1 dokumen						
							Dokumen rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan promkes	1 dokumen						
							1.02.1.02.01.19.010	Penerbitan Majalah Kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat				
1.02.1.02.01.19.011	Pengembangan Media Promosi Kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Yogyakarta	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %	1. Penyiaran Dialog Interaktif di Radio	5 Kali	Meningkatnya Prosentase Rumah Tangga Ber PHBS	44 %	Rp. 427.995.000,00	Rp. 454.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Penyiaran Dialog Interaktif di TV	3 Kali						
							3. Penyiaran Obrolan Angkring di TV	3 Kali						
							4. Publikasi kesehatan melalui media cetak (koran)	10 Kali						
1.02.1.02.01.19.012	Penyusunan Panduan dan Pengadaan Materi Media Penanggulangan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat	Yogyakarta	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %	1. Dokumen kampanye kesehatan tentang eradikasi	1 dokumen	Meningkatnya Prosentase Rumah Tangga Ber PHBS	44 %	Rp. 164.120.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	HIV AIDS		Meningkat				stigmatisasi thd ODHA							
							2. Film dokumeter penanggulangan HIV/AIDS tayang di TTU	1 buah film dokumenter						
							3. Cetakan poster, leaflet publikasi penanggulangan HIV/AIDS;	5000 lbr leaflet, 1000 lbr poster, 2000 lembar sticker						
1.02.1.02.01.19.013	Penyusunan Panduan dan Pengadaan Materi Media Penanggulangan Narkoba	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Yogyakarta	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %	Cetakan poster penanggulangan penyalahgunaan Narkoba	1000 lbr poster	Meningkatnya Rumah Tangga ber-PHBS	44 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							leaflet publikasi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba	15000 lbr leaflet						
							Spanduk publikasi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba	10 buah spanduk						
1.02.1.02.01.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT *										Rp. 1.065.000.000,00	Rp. 1.165.000.000,00		
1.02.1.02.01.20.001	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8.7 %	a. Jumlah orang bersepakat menyusun peta situasi gizi	15 Orang	Data surveilans giz terpenuhi	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.20.003	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kecamatan Mlati Sleman, 5 kab/kota	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8.7 %	3. model pemberdayaan masyarakat dalam percepatan perbaikan gizi	5 lokasi	Gizi buruk di wilayah percontohan dirawat	100 %	Rp. 480.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2.multimikronutrient	1 Paket						
							1. Operasional TFC percontohan di Kabupaten Sleman	1 TFC						
1.02.1.02.01.20.005	Penanggulangan Gizi Lebih	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	5 kab/kota	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8.7 %	3. Jumlah orang tersosialisasi pedoman gizi seimbang pada lintas sektor	150 Orang	Mencegah kegemukan pada balita	14.2 %	Rp. 235.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah siswa dilatih pedoman gizi seimbang	121 Orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							1. Jumlah orang terpapar sosialisasi pekan ASI sedunia	40 Orang						
1.02.1.02.01.20.006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	5 kab/kota	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8.7 %	1. Jumlah sarana termonitor pemberian multimikronutrient	20 sarana	Perbaikan dan peningkatan kualitas data program gizi	80 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah sarana termonitor 10 LMKM	20 sarana						
1.02.1.02.01.20.008	Sosialisasi Penanggulangan Masalah Gizi	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	5 kab/kota	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8.7 %	1. Jumlah peserta teradvokasi pemberian tablet tambah darah	150 Orang	Persentase balita stunting	15.4 %	Rp. 105.000.000,00	Rp. 140.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah orang terpapar hasil evaluasi situasi GAKY	80 Orang						
							3. Jumlah orang terpapar penanganan stunting	30 Orang						
1.02.1.02.01.20.009	Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kota Yogyakarta	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	8.7 %	1. Jumlah tenaga yang dilatih PMBA	16 Orang	1.Jumlah tenaga puskesmas mampu melaksanakan PMBA	20 %	Rp. 185.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2.Jumlah tenaga gizi yang dilatih konseling gizi	60 Orang	2. Jumlah tenaga gizi yang memberikan layanan konseling gizi	100 %				
							3. Jumlah tenaga gizi terlatih perencanaan program gizi	66 Orang	3. Jumlah tenaga gizi puskesmas mampu melakukan perencanaan program gizi	50 %				
1.02.1.02.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT										Rp. 871.066.000,00	Rp. 1.570.872.600,00		
1.02.1.02.01.21.005	Pengembangan Kawasan Sehat	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	5 Kab/kota, Jakarta/Luar Daerah	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	100 %	1. Dokumen hasil verifikasi penilaian KKS Kab/Kota	5 dokumen	Kecamatan melaksanakan kab/kota sehat meningkat	90 %	Rp. 146.415.000,00	Rp. 83.231.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Dokumen usulan penilaian KKS oleh Tim Pusat	5 dokumen						
							3. Verifikasi KKS oleh Tim Pusat	5 dokumen						
							4. Kesepakatan dan rencana tindak lanjut TIM KKS Kab/Kota	5 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.21.008	Pembinaan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Tempat-tempat Umum	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY, Jakarta/Luar Daerah	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	100 %	Jumlah tenaga sanitarian puskesmas mampu tata laksana Penyehtan Lingkungan Puskesmas	25 orang, 1 Dokumen 50 Sampel, 30 orang, 1 Dokumen,	Meningkatnya Cakupan Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat	84 %	Rp. 333.251.000,00	Rp. 992.201.100,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Data hasil monitoring TPM	1 orang, 1 Dokumen 50 Sampel, 30 orang, 1 Dokumen,						
							Jumlah peserta lintas program dan lintas sektor mampu tata laksana HSM	25 orang, 1 Dokumen 50 Sampel, 30 orang, 1 Dokumen,						
							Kesepakatan jejaring Rumah Sakit	1 orang, 1 Dokumen 50 Sampel, 30 orang, 1 Dokumen,						
							Jumlah pesantren yang meningkat fasilitas sanitasi dasar dan air minumnya	2 orang, 1 Dokumen 50 Sampel, 30 orang, 1 Dokumen,						
							Jumlah tenaga sanitarian RS terlatih Penyehtan Lingkungan RS	25 Orang						
1.02.1.02.01.21.024	Penyehatan Air	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY, Jakarta/Luar Daerah	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	100 %	Jumlah sanitarian dan anggota Saka Bakti Husada terlatih TTG (Tehnologi Tepat Guna)	30 Orang	Persentase capaian kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan	75 %	Rp. 133.500.000,00	Rp. 114.950.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Data kualitas air minum	200 Sampel						
							Kesepakatan jejaring air minum	1 dokumen						
							Kesepakatan Dukungan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim terhadap kesehatan	1 dokumen						
							Jumlah peserta memahami Implementasi Strategi dampak Perubahan Iklim	30 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							terhadap Kesehatan							
1.02.1.02.01.21.025	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kab. Sumedang, Jawa Barat, 5 Kab/kota, Jakarta/Luar Daerah,	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	100 %	1. Dokumen evaluasi STBM kab/ kota	5 dokumen	Meningkatnya cakupan Rumah Sehat Memenuhi Syarat kesehatan	75 %	Rp. 84.400.000,00	Rp. 175.340.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Data laporan hasil movev PPSP	1 dokumen						
1.02.1.02.01.21.026	Peningkatan Manajemen Kesehatan Lingkungan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY,	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	100 %	Data Capaian data PL	5 dokumen	Kelengkapan laporan indikator penyehatan lingkungan	85 %	Rp. 173.500.000,00	Rp. 205.150.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Data indikator PL tervalidasi	2 dokumen						
							Peta faktor resiko kesehatan lingkungan	2 dokumen						
							Pelatihan Aplikasi Software Keselink dan movev STBM	1 dokumen						
							Kesepakatan bersama upaya peningkatan penyehatan lingkungan di DIY	1 dokumen						
1.02.1.02.01.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA										Rp. 14.062.019.905,00	Rp. 678.892.062.000,00		
1.02.1.02.01.26.001	Pembangunan Rumah Sakit	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Sentolo	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	Pembangunan Rumah Sakit Kelas D	1 Paket	Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit	100 %	Rp. 2.650.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.26.018	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana Cukai tembakau) (Respira)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	Jumlah peralatan kedokteran dan kesehatan yang diadakan	26 jenis	Dukungan pelayanan pasien lancar	100 %	Rp. 6.100.000.000,00	Rp. 671.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.26.019	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat	Yogyakarta, Kantor RSKP Respira	Terwujudnya pengadaan, peningkatan	100 %	1. Tersedianya obat-obat di rumah sakit	1 Paket	pelayanan pasien lancar	100 %	Rp. 1.675.000.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya									
						2. Obat	1 Paket							
1.02.1.02.01.26.021	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit (Respira)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kantor RSKP Respira	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	Mebeleur	11 item	Dukungan pelayanan pasien lancar	100 %	Rp. 140.000.000,00	Rp. 132.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.26.022	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll) (Respira)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kantor RSKP Respira	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	Jenis perlengkapan rumah tangga RSK Paru respira yang disediakan	10 jenis	Dukungan Pelayanan Pasien Lancar	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.26.023	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit (Dana Cukai Tembakau) (Respira)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kantor RSKP Respira	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	Pembelian makanan dan minuman pasien	11840 oh	Pelayanan rawat inap lancar	100 %	Rp. 266.400.000,00	Rp. 293.062.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.26.024	Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit (Respira)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kantor RSKP Respira	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	format rekam medik	1 Paket	status pasien terekam dengan baik	100 %	Rp. 120.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.26.028	Pengadaan Reagen/Bahan Kimia (Dana Cukai Tembakau)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	bahan kimia dan bahan penunjang	1 Paket	Pelayanan pasien lancar	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 1.867.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.26.032	Pengadaan Reagen/Bahan kimia (Labkes)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Balai Labkes.YK	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	100 %	Reagensia/Bahan kimia	250 Bahan.reagen dan penunjang	Tersedianya reagen/bahan kimia dan bahan penunjang	100 %	Rp. 1.248.084.905,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.26.033	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Yogyakarta	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT,	100 %	1. Tersedianya kebutuhan alat medis dan kelengkapan pelayanan	1 Paket	1. Tersedianya kebutuhan alat medis dan kelengkapan pelayanan	100 %	Rp. 962.535.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					RS, dan jaringannya		2. Tersedianya kebutuhan sarana pendukung klinik	1 Paket	2. Tersedianya kebutuhan sarana pendukung klinik	100 %				
							3. Alat-alat laboratorium kes	6 Unit alat lab.	3. Tersdianya kebutuhan alat lab.kes.	100 %				
1.02.1.02.01.27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA										Rp. 582.434.000,00	Rp. 524.000.000,00		
1.02.1.02.01.27.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasrana di UPT, RS dan jaringannya	100 %	1. Pemeliharaan gedung RSKP Respira dan pemantauankualitas kesehatan lingkungan Rumah Sakit	12 bulan	1. Pelayanan pasien lancar	100 %	Rp. 322.334.000,00	Rp. 322.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Pemeliharaan dan kalibrasi alat lab.	100 %	2. Alat-alat lab.siap pakai dan hasil pengujian lebih akurat	100 %				
1.02.1.02.01.27.016	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS dan jaringannya	100 %	Pemeliharaan IPAL dan Limbah medis padat dan cair	12 bulan	pengolahan limbah memenuhi standar	100 %	Rp. 112.500.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Pengolahan limbah di Labkes.	100 %	Terlaksananya pengolahan limbah I Labkes.	100 %				
1.02.1.02.01.27.017	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS dan jaringannya	100 %	Pemeliharaan alat kesehatan	12 bulan	Pelayanan kepada pasien lancar	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.27.020	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit (Respira)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS dan jaringannya	100 %	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	dukungan pelayanan pasien lancar	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.27.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan Percobaan (Labkes)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS dan jaringannya	100 %	Pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan	100 %	Hewan percobaan siap pakai	100 %	Rp. 27.600.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.33	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN PENGAWASAN MAKANAN										Rp. 564.000.000,00	Rp. 1.256.000.000,00		
1.02.1.02.01.33.001	Peningkatan Pemerataan, Obat dan Perbekalan Kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kantor Dinkes DIY, Dinas Kesehatan Kab/kota dan Dinkes DIY, Instalasi Farmasi Kab/kota dan Prov	Persentase keterdeiaan obat esensial generik di fasyankes dasar	96 %	Daftar Kebutuhan Obat Prov dan Kab/Kota Tahun 2014	1 dokumen	Ketersediaan obat essensiil generik di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah	96 %	Rp. 240.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Obat Bufferstock Prov DIY	1 Paket						
							Data ketersediaan obat di istalasi farmasi provinsi dan kab/kota	1 dokumen						
							Koordinasi Pengelolaan Obat Bencana	1 dokumen						
1.02.1.02.01.33.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kab/Kota di DIY, Dinkes DIY	Persentase keterdeiaan obat esensial generik di fasyankes dasar	96 %	Kajian Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di RS	1 dokumen	Persentase Implementasi standar Pelayanan Kefarmasian di RS dan puskesmas	59 %	Rp. 170.000.000,00	Rp. 305.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Kajian Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas	1 dokumen						
1.02.1.02.01.33.003	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kab/Kota di DIY, Dinkes DIY, Sarana Distribusi Alkes dan PKRT	Persentase keterdeiaan obat esensial generik di fasyankes dasar	96 %	Sarana Distribusi Obat Melaksanakan Distribusi Obat sesuai CDOB	16 sarana	Persentase Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan farmasi, Perbekes dan makanan	55 %	Rp. 154.000.000,00	Rp. 651.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Sarana Produksi dan Distribusi Alkes dan PKRT menerapkan cara produksi dan distribusi sesuai peraturan	16 sarana						
							Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetika menerapkan cara produksi dan distribusi sesuai peraturan	16 sarana						
							Sarana Produksi Obat Tradisional menerapkan CPOTB	16 sarana						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Peningkatan Kerasionalan Penggunaan Obat di Sarana Pelayanan Kesehatan	16 sarana						
							Makanan Anak Sekolah yang aman	260 Sampel						
1.02.1.02.01.48	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN										Rp. 2.241.035.000,00	Rp. 2.749.303.250,00		
1.02.1.02.01.48.001	Rekruiemen Petugas Kesehatan Haji	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	terlaksananya rekrutmen petugas kesehatan haji	40 Org	terpilihnya petugas kesehatan haji yang berkualitas	100 %	Rp. 19.557.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.48.002	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY, RSUP Dr Sardjito	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Jumlah RS yang melaksanakan Pengendalian & Pencegahan Infeksi (PPI)	20 orang x 1 kali	1. Persentase RS dalam pelaksanaan PPI	14 %	Rp. 263.878.000,00	Rp. 280.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah RS yang melaksanakan Pasien Safety	20 orang x 1 kali	2. Persentase RS dalam pelaksanaan Pasien Safety	14 %				
							3. Jumlah Dokter RS yang menangani kegawatdaruratan level 1	26 orang x 1 kali	3. Persentase RS menagai kegawatdaruratan level 1	76 %				
							4. Jumlah Perawat RS yang menangani kegawatdaruratan level 1	25 orang x 1 kali						
1.02.1.02.01.48.003	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Jumlah dokter puskesmas TT mendapat keterampilan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan	40 Orang	Persentase Puskesmas Menerapkan Sistem Manajemen Mutu	30 %	Rp. 370.380.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah perawat puskesmas mendapat keterampilan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan tingkat	25 Orang						
							3. Jumlah awam (polantas dan tim SAR) mendapat keterampilan	25 Orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							pertolongan pertama pada kegawatdaruratan							
							4. Jumlah Puskesmas melaporkan SP2TP	30 Puskesmas						
							5. Jumlah Puskesmas terpapar pedoman pengobatan jiwa	121 Puskesmas						
							6. Pedoman SP2TP	1 dokumen						
							7. Jumlah puskesmas dievaluasi dari aspek mutu pelayanan	20 Puskesmas						
1.02.1.02.01.48.004	Pelayanan PPPK pada Event Penting	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Bantuan Pelayanan Kesehatan dalam Even Penting	30 kegiatan event penting	Keg/even penting mendapatkan pelayanan PPPK	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. kegiatan lebaran, natal, dan tahun baru	4 lokasi						
1.02.1.02.01.48.005	Upaya Kesehatan Rujukan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Jumlah RS yang Komitent dalam Penyusunan Hospital Disaster Plan (HDP)	40 orang x 2 kali	Meningkatnya RS dalam Penyusunan HDP, Akreditasi, Pelayanan darah, RSSIB, Data Valid dan Sistem Rujukan	56 %	Rp. 663.799.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah RS Termonitor Akreditasinya	20 orang x 2 kl						
							3. Jumlah RS yang berkomitmen dalam melayani tranfusi darah	40 orang x 2 kl						
							4. Jumlah RS yang bersepakatan dalam pelaksanaan RSSIB	60 orang x 2 kl						
							5. Jumlah RS yang termonitornng dalam pelaksanaan RSSIB	40 orang x 2 kl						
							6. Jumlah RS mempunyai data valid	72 orang x 3 kl						
							7. Jumlah RS yang berkomitmen dalam permasalahan Sistem Rujukan	72 orang x 3 kl						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.48.006	Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	jumlah puskesmas dipilih menjadi puskesmas berprestasi	5 Puskesmas	persentase Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen mutu	35 %	Rp. 249.391.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah Tenaga Kesehatan dipilih menjadi tenaga kesehatan teladan	20 Org						
1.02.1.02.01.48.007	Peningkatan Kesehatan Haji	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Kesepakatan penanganan kesehatan haji	1 dokumen	Persentase pelayanan kesehatan calon jamaah haji	100 %	Rp. 24.410.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan petugas kesehatan haji	1 dokumen						
							3. Data Kebugaran Jasmani TKHD/TKHI	1 dokumen						
							4. Tersedianya logistik kesehatan haji	1 dokumen						
1.02.1.02.01.48.008	Peningkatan Program Kesehatan Jiwa	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Komitmen Pelaksanaan PerGub Bebas Pasung	1 dokumen,40 orang x 6 kali	1. Pasung tertangani	33 %	Rp. 94.790.000,00	Rp. 180.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Komitmen pelaksanaan rujukan jiwa	1 dokumen,40 orang x 2 kali	2. Cakupan Rujukan Kesehatan Jiwa	100 %				
1.02.1.02.01.48.009	Peningkatan Kesehatan Gigi	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Jumlah dokter gigi yang terupdate pengetahuan dan ketrampilannya	40 Orang	persentase nakes pengelola gigi meningkat kompetensinya	41.32 %	Rp. 177.583.000,00	Rp. 460.550.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya data valid kesehatan gigi	1 dokumen						
							3. Jumlah kasus gigi terskrining	5 x 121 kasus						
							4. Jumlah petugas gigi puskesmas terkait	40 Orang						
1.02.1.02.01.48.010	Peningkatan Program Kesehatan Indera	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Tersedianya data kesehatan indera	1 dokumen, 35 orang x 2 kab	Persentase Data valid kesehatan indera	66 %	Rp. 157.676.000,00	Rp. 383.300.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Kesepakatan Langkah skrining kesehatan Indera	1 dokumen, 35 orang x 2 kab						
							3. Meningkatnya pengetahuan dan ketampilan petugas kesehatan dalam	1 dokumen, 35 orang x 2 kab						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							program Indera							
1.02.1.02.01.48.011	Peningkatan Program Kesehatan Olahraga	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	Data Kebugaran Jasmani	1 dokumen,250 orang x 1 kali	Persentase pola hidup sehat dengan olahraga	100 %	Rp. 15.770.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.48.012	Peningkatan Kesehatan Kerja	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Komitmen Program Laktasi di Perusahaan	40 orang x 2 kl	Jumlah perusahaan yang melakukan program kesehatan kerja	25 %	Rp. 49.610.000,00	Rp. 78.740.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Mutu Pemeriksaan Sarana Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja	40 orang x 2 kl						
							3. Pemetaan kesehatan kerja di LP / LS	40 orang x 2 kl						
1.02.1.02.01.48.013	Peningkatan Mutu Pelatihan Kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	Jumlah pelatihan yang di assessment untuk akreditasi pelatihan	50 Pelatihan	persentase pelatihan terakreditasi	95 %	Rp. 16.713.250,00	Rp. 16.713.250,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah pelatihan terakreditasi yang dimonitoring penyelenggaraannya	18 Pelatihan						
							Evaluasi hasil akreditasi pelatihan	1 dokumen						
1.02.1.02.01.48.014	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	5 kab/ kota	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	57 %	1. Registrasi, lisensi dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan di Dinkes DIY	1 Jenis tenaga	Persentase mutu tenaga kesehatan	75 %	Rp. 89.021.500,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Komitmen dg Organisasi Profesi Bidang Kesehatan di DIY	3 dokumen						
							3. Dokumen evaluasi Program Internsip Dokter Indonesia di DIY	4 dokumen						
							4. Pembekalan Dokter Peserta Program Internsip Dokter Indonesia di DIY	4 dokumen						
							5. Komitmen dengan Institusi Diknakes di DIY	4 dokumen						
1.02.1.02.01.48.015	Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat	5 Kab/ kota	Persentase pelayanan kesehatan yang	57 %	1. Perizinan Sarana Kesehatan yang menjadi	5 Sarana Kesehatan	Persentase peningkatan mutu sarana kesehatan	77.5 %	Rp. 28.456.250,00	Rp. 35.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		bermutu		kewenangan Dinkes DIY							
							2. Komitmen pelaksanaan perizinan tenaga dan sarana kesehatan di DIY	6 dokumen						
1.02.1.02.01.49	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELJAMKESOS										Rp. 64.146.657.900,00	Rp. 66.796.657.900,00		
1.02.1.02.01.49.001	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Gunungkidul	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel	69.6 %	Terselenggaranya Penyusunan Profil Jamkesos	1 dokumen	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Jamkessos	100 %	Rp. 64.146.657.900,00	Rp. 66.796.657.900,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Terselenggaranya pelatihan dokter keluarga yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesos	16 dokel						
							Terselenggaranya verifikasi klaim PPK	210 PPK (8 orang 6 bulan)						
							Terselelenggaranya pertemuan pembuatan paket Jamkesta klas II dan Klas I	25 klas II dan Klas I						
							Terselenggarnya pertemuan Forum Komunikasi Jamkesta	25 orang 9 kali						
							Terselenggaranya Kerjasama Kepesertaan dan pelayanan	61 RS, 16 dokel (35 orang 6 kali)						
							Tertelaksananya pertemuan validasi data pelayanan klaim kepertaan dari masing-masing Kab/Kota	15 orang 4 kali						
							Terselenggaranya Pelatihan teknis Verifikator	7 Orang						
							Terselenggaranya pertemuan Evaluasi RS dalam Kendali mutu dan kendali	50 orang 4 kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							biaya							
							Terselenggaranya kegiatan Promosi Paket manfaat jamkesta	30 orang 20 kali						
							Terselenggaranya Koordinasidan sinkronisasi kepesertaan jamkesta DIY	25 orang 2 kali						
							Terselenggaranya Validasi Data kepesertaan jamkesos DIY	25 orang 4 kali						
							Terselenggaranya Koordinasi Program Jamkesta DIY	25 orang 2 kali						
							Terselenggaranya Koordinasi perhitungan perubahan iuran/premi peserta jamkesta DIY	34 orang 2 kali						
							Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesta DIY	222109 jiwa						
							Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesta DIY	10773 jiwa						
							Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesta DIY	414819 jiwa						
							Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesta DIY	12367 jiwa						
							Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesta DIY	1 Paket						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							peserta Jamkesta DIY							
							Terselenggaranya pengelolaan adminstrasi kantor	1 tahun						
							Terselenggaranya Penyusunan Laporan BLUD	15 org 2 kali						
							Terselenggaranya Pengembangan ISO Bapel Jamkesos	5 kali 1 dokumen						
							Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Program Jamkesos	30 orang 2 kali						
							Terselenggaranya Pertemuan kearsipan Bapel Jamkesos	33 orang 1 kali						
							Pelatihan SDM	5 Org						
							Terselenggaranya Pemeriksaan Pegawai Bapel Jamkesos	62 Paket						
							Terselenggaranya Pelayanan Pengaduan Keluhan	1 tahun						
1.02.1.02.01.50	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN LANSIA										Rp. 278.499.040,00	Rp. 347.600.000,00		
1.02.1.02.01.50.001	Perencanaan Program Kesehatan Lansia	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada usila (PSU)	80 %	Dokumen perencanaan lansia	1 dokumen	Persentase Puskesmas memiliki program lansia	100 %	Rp. 15.500.000,00	Rp. 15.600.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.50.003	Pengembangan Puskesmas Santun Usila	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada usila (PSU)	80 %	Dokumen Optimalisasi implementasi KMS lansia di Yandas dan Klip lansia/ posyandu lansia	3 dokumen	Persentase Puskesmas memiliki program lansia	100 %	Rp. 177.500.000,00	Rp. 180.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Peningkatan kapasitas nakes di PSL	30 org x 2 hr x 2 kl , 30 orgx 4 hr x2 kl						
							Pengadaan KMS Lansia	1 dokumen pengadaan KMS lansia						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.50.004	Bimtek Program Kesehatan Lansia di Puskesmas	Sosial Budaya	Harapan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada usia (PSU)	80 %	Dokumen hasil bimtek program kesehatan lansia	2 dokumen	Persentase Puskesmas memiliki program lansia	100 %	Rp. 39.999.040,00	Rp. 45.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.50.005	Monev Program Kesehatan Lansia di Provinsi	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Dinkes DIY	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada usia (PSU)	80 %	Dokumen Evaluasi dan rakor Program Kesehatan Lansia	2 dokumen	Persentase Puskesmas Santun Lansia Dievaluasi	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.50.006	Orientasi Penanganan Gangguan Kesehatan Lansia	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	puskesmas	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada usia (PSU)	80 %	Jumlah nakes PSU mendapat pemahaman penanganan gangguan kesehatan lansia	27 org x 3 hr x 1 kl	Persentase Puskesmas mendapatkan orientasi gangguan	40 %	Rp. 15.500.000,00	Rp. 17.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.51	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN IBU										Rp. 172.300.000,00	Rp. 129.500.000,00		
1.02.1.02.01.51.002	Sosialisasi Pengenalan Tanda Bahaya Bumil, Bufas, Bulin	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan	99 %	Jumlah nakes mendapat pemahaman ttg tanda bahaya pada bumil, bulin, bufas	120 Orang	Cakupan PKO	82 %	Rp. 28.500.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.51.003	Evaluasi dan Koordinasi Yankes Ibu	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan	99 %	1. Kesepakatan penanganan masalah kesehatan ibu	1 dokumen	Cakupan K4	95 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Jumlah Nakes yang mendapat pemahaman ANC terpadu	150 Orang						
1.02.1.02.01.51.004	Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Mata Rantai Rujukan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan	99 %	Nakes yang tersosialisasi sistem mata rantai rujukan	120 Orang	Cakupan PKO	82 %	Rp. 18.700.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.51.005	Penguatan Pelayanan KB	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan	99 %	Jumlah Nakes yang mendapat pemahaman pelayanan KB terkini	100 Orang	Cakupan KB aktif	79 %	Rp. 25.800.000,00	Rp. 28.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.51.006	Penguatan Task Force KIA	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat	DIY	Persentase cakupan persalinan oleh	99 %	Kesepakatan penguatan Task Force KIA	1 dokumen	Cakupan PKO	82 %	Rp. 21.000.000,00	Rp. 21.500.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan									
1.02.1.02.01.51.007	Evaluasi RS PONEK	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan	99 %	Dokumen hasil evaluasi RS PONEK	1 dokumen	Cakupan PKO	82 %	Rp. 43.300.000,00	Rp. 18.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.52	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA										Rp. 164.500.000,00	Rp. 212.000.000,00		
1.02.1.02.01.52.001	Pertemuan FKPKRR Provinsi	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan penjangran kesehatan siswa sekolah	98 %	Kesepakatan FKPKRR	1 dokumen	Persentase Puskesmas PKPR	57 %	Rp. 14.500.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.52.002	Koordinasi Puskesmas PKPR di Kab/Kota	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	kab/kota se-DIY	Persentase cakupan penjangran kesehatan siswa sekolah	98 %	Kesepakatan puskesmas PKPR	1 dokumen	Persentase Puskesmas PKPR	57.85 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 170.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Brand Sistem Informasi Remaja	1 dokumen						
							sosialisasi website remaja	64 Orang						
							Jumlah Kader kesehatan remaja yang siap mendukung KIE Remaja Gaya Hidup Sehat	100 Orang						
1.02.1.02.01.52.003	Koordinasi Keterpaduan Kespro Remaja di Kab/Kota	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	kab/kota	Persentase cakupan penjangran kesehatan siswa sekolah	98 %	Kesepakatan keterpaduan kespro	1 dokumen	Prosentase Puskesmas PKPR	57 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 27.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.53	PROGRAM PELATIHAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU DIKLAT										Rp. 935.685.000,00	Rp. 43.000.000,00		
1.02.1.02.01.53.001	Pemasaran Diklat	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	79 %			Terlaksananya Pemasaran Diklat	100 %	Rp. 221.250.000,00	Rp. 18.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.53.002	Pengembangan SDM Diklat	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat	DIY	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan	79 %	Terlaksananya pengembangan SDM diklat melalui	100 %	Peningkatan Sumber Daya Manusia Diklat	100 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		institusi diklat kesehatan		pengiriman pendidikan, pelatihan, kursus dan bimtek							
1.02.1.02.01.53.003	Penyelenggaraan Diklat SDM Kesehatan, Nakes dan Masyarakat	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	79 %			Pelaksanaan Pelatihan Jaminan Kesehatan Bagi Petugas Puskesmas Pelaksanaan Pelatihan Kader Kesehatan Ibu dan Anak Pelaksanaan Pelatihan PONED Terlaksannaya Pelatihan Kader Kesehatan untuk Revitalisasi UKBM dengan 30 peserta dalam satu angkatan Pelaksanaan	100 %	Rp. 689.435.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.55	PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN BAYI DAN BALITA										Rp. 121.750.000,00	Rp. 134.000.000,00		
1.02.1.02.01.55.001	Pembinaan Teknis Pasca pelatihan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	98.5 %	Jumlah nakes puskesmas mendapat pembinaan teknis asfiksia/ BBLR	50 Orang	Cakupan PKN	82 %	Rp. 15.750.000,00	Rp. 16.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.55.002	Pengembangan Surveilans KIA	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	98.5 %	Nakes mampu memahami surveilans KIA	40 Orang	Cakukan Pelayanan anak balita	88 %	Rp. 12.000.000,00	Rp. 13.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.55.003	Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Anak	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	98.5 %	Kesepakatan perencanaan dan evaluasi kesehatan anak	1 dokumen	Cakukan Pelayanan anak balita	88 %	Rp. 12.000.000,00	Rp. 13.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.55.004	Pengembangan Keterpaduan SDIDTK Balita	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	98.5 %	Kesepakatan pengembangan keterpaduan SDIDTK	1 dokumen	Cakukan Pelayanan anak balita	88 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 62.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.55.005	Pengembangan MTBS	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	98.5 %	Dokumen kesepakatan penanganan MTBS di Puskesmas	120 dokumen	Cakukan Pelayanan anak balita	88 %	Rp. 27.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.56	PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN										Rp. 421.208.000,00	Rp. 394.221.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta															
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02.1.02.01.56.001	Pengembangan jaminan pelayanan kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	41.5 %	- Kesepakatan penyelenggaraan jamkes	1 dokumen	Persentase Cakupan kepesertaan jamkes bersubsidi	70 %	Rp. 53.260.000,00	Rp. 29.923.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
								- Kesepakatan jejaring jamkes	1 dokumen						
1.02.1.02.01.56.002	Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	41.5 %	Data/Laporan PHA	1 laporan	Terhimpunnya data realisasi anggaran yang mendukung bidang kesehatan di DIY	80 %	Rp. 25.500.000,00	Rp. 25.500.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.02.1.02.01.56.003	Sosialisasi Pelaksanaan Jamkes	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	41.5 %	Peserta mendapat pemahaman mengenai jaminan kesehatan	750 orang,15kali,12 radio,2 TV	Presentase Cakupan kunjungan rawat jalan peserta jamkes ke pelayanan kesehatan	15 %	Rp. 195.355.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.02.1.02.01.56.004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jamkes	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	41.5 %	Penyelenggara Jamkes, lintas program, lintas sektor	2 laporan	Cakupan kepesertaan program Jamkes bersubsidi	50 %	Rp. 37.405.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.02.1.02.01.56.006	Pengelolaan Data Jaminan Kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	41.5 %	Laporan Jamkes, Data kepesertaan jamkes dan Data Jamkes	3 dokumen	presentase Cakupan kunjungan rawat jalan peserta jamkes ke pelayanan kesehatan	15 %	Rp. 109.688.000,00	Rp. 98.798.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
1.02.1.02.01.57	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT*										Rp. 3.444.288.170,00	Rp. 3.746.394.250,00			
1.02.1.02.01.57.001	Peningkatan Imunisasi	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Provinsi DIY	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	1. Jumlah Petugas imunisasi di FPS paham tentang protap imunisasi	300 Orang	Persentase Desa UCI	100 %	Rp. 273.584.550,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan	
								2. Dokumen audit kasus KIPi	2 dokumen						
								3. Jumlah Petugas imunisasi mampu mengoperasikan soft ware simundu	250 Orang						
								4. Jumlah Petugas mampu melakukan penilaian sendiri tentang akurasi data imunisasi	225 Orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							5. Adanya dukungan LS terhadap program imunisasi	5 dokumen						
							6. Jumlah Petugas imunisasi puskesmas paham tentang protap imunisasi	170 Orang						
							7. Data progam imunisasi di provinsi tervalidasi	12 dokumen						
							8. Data program imunisasi di tk.kab/kota tervalidasi	5 dokumen						
							9. Jumlah desa yang mencapai UCI	438 Desa						
							10. Data cakupan imunisasi tervalidasi	1 dokumen						
							11. Jumlah Petugas mengetahui kualitas data yang dilaporkan	44 Orang						
							12. Safety box	1 Paket						
							13. Peralatan coolroom	1 Paket						
							14. Vaksin terdistribusi	12 Kali						
							1.02.1.02.01.57.002	Peningkatan Pelaksanaan BIAS	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat				
2. Kesepakatan dukungan pelaksanaan BIAS di tk.kecamatan	10 dokumen													
1.02.1.02.01.57.003	SKD & Penanggulangan KLB	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Provinsi DIY, kab/kota	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	1. Petugas surveilans dapat melakukan fungsinya dengan optimal	90 Orang	Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada desa/kelurahan yang mengalami KLB <24 jam	100 %	Rp. 190.520.000,00	Rp. 115.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Petugas mampu meningkatkan kelengkapan & ketepatan laporan	125 Orang						
							3. Petugas mampu melakukan respon cepat surveilans ILI	90 Orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.57.004	Surveilans PD3I	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Provinsi DIY	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	4. Unit pelapor surveilans hep c mampu meningkatkan kelengkapan & ketepatan laporan	50 Orang			Rp. 25.510.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							5. Petugas mampu mengoperasikan software EWARS & melaporkan tepat waktu	150 Orang						
							6. Petugas mampu melakukan respon cepat KLB	125 Orang						
1.02.1.02.01.57.005	Pengendalian Penyakit DBD	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	1. RTL Permasalahan Surveilans PD3I	2 dokumen	Angka penemuan kasus AFP non polio per 100.000 anak usia <15 tahun sebanyak ? 3/100000 anak < 15 tahun	100 %	Rp. 306.072.500,00	Rp. 343.355.750,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. petugas terpapar info terbaru surveilans AFP dan PD3I lainnya	55 Orang						
							1. Kesepakatan hasil audit kasus DBD	3 dokumen	Insident Rate	50 per 100.000 penduduk				
							2. Kesepakatan hasil workshop pengendalian penyakit arbovirosis	1 dokumen						
							3. Jumlah lokasi SKD KLB DBD	15 lokasi						
1.02.1.02.01.57.006	Pengendalian Penyakit Malaria	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	4. Jumlah bahan kimia yang tersedianya untuk pengendalian DBD	1 Paket			Rp. 148.840.000,00	Rp. 148.480.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							5. Jumlah alat perlengkapan yang disediakan untuk pengendalian DBD	1 Paket						
							1. Jumlah JMD untuk menemukan penderita Malaria secara dini	20 Orang	Annual Parasite Insident (API)	0.0079 per mil				
							2. Jumlah lokasi pelaksanaan Mass blood survey	4 lks						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.57.007	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV dan AIDS	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Kab Sleman dan Kab Bantul, DIY	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	3. Jumlah perlengkapan lab malaria yang tersedia	1 Paket			Rp. 1.000.905.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							4. Jumlah reagensia malaria yang tersedia	1 Paket						
							5. Jumlah lokasi pelaksanaan spot survey	7 lks						
							6. Jumlah petugas provinsi yang melaksanakan cross notifikasi penderita malaria lintas batas	2 lks						
							1) kesepakatan hasil validasi dan verifikasi data surveilans hiv	2 dokumen	1) proporsi orang berisiko tinggi berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	37 %				
							2). Jumlah lokasi yng dilakukan KTS bergerak	16 lokasi	2) presentase ODHA memenuhi syarat pengobatan dan mendapat pengobatan ARV	100 %				
							3) jumlah reagensia yang tersedia untuk pemeriksaan HIV IMS	1 Paket	3) presentase penduduk 15 tahun atau lebih yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV	95 %				
							4) jumlah orang mengakses paket pemeriksaan CD4	40 Paket						
							5) jumlah orang mengakses paket pemeriksaan viral load	5 Orang						
							6) kesepakatan keberlangsungan jejaring pelayanan HIV di DIY	1 dokumen						
							7) jumlah formulir tersedia untuk program HIV	1 Paket						
							7) jumlah formulir tersedia untuk program HIV	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.57.008	Pencegahan dan penanguilangan Penyakit kegiatan pengendalian penyakit TB	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	Jumlah pelacakan pasien TB dan pemberdayaan masyarakat (Respira)	50 Orang	succes Rate angka kesembuhan TB >85%	100 %	Rp. 455.311.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta Sosilaisasi Program TB	75 Orang						
							Kesepakatan Workshop penanggulangan TB MDR	3 dokumen						
							Jumlah Crosschek Pemeriksaan Slide TB	4000 slide						
							Jumlah Suplemen Pasien TB MDR	120 PT						
							Blangko pelaporan	9 Paket						
							Jumlah reagensi TB	1 Paket						
							Jumlah Alat perlengkapan Laboratorium TB	2 Paket						
							Peningkatan kapasitas Pengelolaan TB MDR (jasa Konsultan Akhmi)	3 orang spesialis/9 bulan						
							Kesepakatan jejaring Internal TB	1 dokumen						
							Kepakatan Komite DOT	1 dokumen						
							Jumlah tenaga yang Desiminasi informasi TB DOTS pada klinik pratama	60 Orang						
							kesepakata data valid	60 Orang						
							kesepakata data Kolaborasi TB HIV	1 dokumen						
							Jumlah Kunjungan ke kab/Kota	1 dokumen						
							Jumlah peserta mengikuti TB day	50 Orang						
							Jumlah peserta Forum penggiat TB	50 Orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.57.009	Penanggulangan Penyakit Zoonosa	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	Jumlah peserta pelatihan DOT Apotik	30 orang ,5 har			Rp. 233.925.000,00	Rp. 253.846.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah peserta pertemuan	30 orang/5 hari						
							Jumlah peserta yang tersoasilaisi	30 orang/3 kali						
							Dokumen Audit Kasus Kematian Zoonosis	2 dokumen	Kejadian penyakit zoonosa kurang dari 5/100.000 penduduk	100 %				
							Tenaga kesehatan dan pemangku kebijakan tersosialisasi Surveilans Pes	50 Orang						
							Peserta terlaksananya Sosialisasi Deteksi Dini Zoonosis	60 Orang						
							Data serologi tikus	1 dokumen						
							Reagensia PES	1 Paket						
							VAR (Vaksin Anti Rabies)	200 Paket						
RDT Leptospira	25 Paket													
Dokumen Bimtek dan Rakontek Zoonosis	2 Paket													
Tenaga kesehatan terlatih pengendalian pes	6 Orang													
1.02.1.02.01.57.010	Penanggulangan Penyakit Kanker	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Dinas Kesehatan DIY,Puskesmas Kab/Kota se DIY	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	1. Petugas kesehatan terlatih deteksi dini kanker leher rahim dengan merode IVA dan kanker payudara dengan meode CBE rahim dan payudara	20 Puskesmas	Prosentasi Puskesmas Sentinel mampu deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	57.85 %	Rp. 269.940.120,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Peserta Deseminasi dapat mengerti Deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	30 Orang						
							3. Peserta mendapatkan Refreshing Deteksi dini kanker leher	30 Orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.57.011	Penanggulangan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY, Kab/kota di DIY	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	rahim dan payudara bagi Puskesmas yang telah Mampu melakukan deteksi dini kanker leher				Rp. 247.450.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							4. Kesepakatan Pengembangan Program Pengendalian Kanker leher rahim dan payudara	1 dokumen						
							5. Jumlah sasaran WUS (usia 18-50 tahun mendapat pemeriksaan CA Servik	1000 wus (500 Passmeaer & 500 IVA)						
1.02.1.02.01.57.012	Penanggulangan Penyakit Metabolik	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Daerah Istimewa Yogyakarta, Kab/kota di DIY	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	64.44 %	a. Tenaga kesehatan terdesiminasi tentang tatalaksana DM dalam rangka knowledge update	150 Org	Persentase Puskesmas Mampu Deteksi Dini penyakit metabolik	8.3 %	Rp. 247.450.000,00	Rp. 260.712.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							b. Kesepakatan hasil Workshop Pengembangan Program Pengendalian Penyakit DM	2 dokumen						
							c. Kesepakatan hasil pertemuan koordinasi deteksi dini Faktor Risiko DM	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 103.977.046.375,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							d. Jumlah kasus terdeteksi dini FR DM pada masyarakat umum	400 sasaran						
							e. Jumlah kasus terdeteksi dini FR DM pada masyarakat khusus	750 sasaran						
							f. Jumlah tenaga kesehatan trampil komunikasi interpersonal dalam pengelolaan kasus DM	60 Orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : RS Grhasia											Jumlah Pagu : Rp. 16.221.149.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.02	Kesehatan													
1.02.02	RS Grhasia													
1.02.1.02.02.54	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA										Rp. 16.221.149.000,00	Rp. 17.032.206.450,00		
1.02.1.02.02.54.001	Pelayanan Kesehatan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Pakem	Persentase penderita jiwa yang dirawat di RSJ Grhasia	54.87 %	Terlaksananya pelayanan BLUD RSJ Grhasia DIY	1 tahun	Kelancaran pelayanan rawat jalan dan rawa inap	100 %	Rp. 16.221.149.000,00	Rp. 17.032.206.450,00	RS Grhasia	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.03	Pekerjaan Umum													
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM													
1.03.1.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.672.000.000,00	Rp. 0,00		
1.03.1.03.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa surat menyurat	2 jenis	Dukungan sebesar0,44% berupa jasa surat menyurat terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 13.500.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	Dukungan sebesar 42,81% berupa pembayaran jasa komunikasi, internet, listrik dan air selama 12 bulan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 1.300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang berizin	116 unit	Dukungan sebesar 1,48% berupa pembayaran jasa komunikasi, internet, listrik dan air selama 12 bulan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.01.007	Penyediaan Jasa Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah pejabat/petugas Pengelola Keuangan	21 Orang	Dukungan sebesar 4,61% berupa pembayaran jasa komunikasi, internet, listrik dan air selama 12 bulan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 140.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Luas kantor yang dibersihkan	14310 m2	Dukungan sebesar 9,88% berupa pembayaran jasa komunikasi, internet, listrik dan air selama 12 bulan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%					
1.03.1.03.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	8 jenis	Dukungan sebesar 7,9% berupa pembayaran jasa komunikasi, internet, listrik dan air selama 12 bulan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 240.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	Dukungan sebesar 4,12% berupa pembayaran jasa komunikasi, internet, listrik dan air selama 12 bulan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang cetakan yang disediakan	27 jenis	Dukungan sebesar 4,61% berupa pembayaran jasa komunikasi, internet, listrik dan air selama 12 bulan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 140.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen listrik/penerangan yang disediakan	18 jenis	Dukungan sebesar 1,65% berupa komonen listrik/penerangan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%*	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bahan bacaan/peraturan perundangan yang disediakan	3 SKH	Dukungan sebesar 0,63 % berupa bahan bacaan/peraturan perundangan terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%*	100 %	Rp. 19.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	Prosentase Pelayanan Administrasi	100 %	Makanan dan minuman yang disediakan	7450 Paket	Dukungan sebesar 2,45% berupa makanan dan minuman terhadap	100 %	Rp. 74.500.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum,	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	Energi Sumberdaya Mineral	Perkantoran				Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%"				Perumahan dan ESDM	
1.03.1.03.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Telaksananya pengamanan gedung kantor	9 gedung	Dukungan sebesar 6,5% berupa pengamanan gedung kantor terhadapterwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 225.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 7.528.000.000,00	Rp. 0,00		
1.03.1.03.01.02.003	Rehabilitasi Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Unit gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit	Dukungan sebesar 11,05% berupa rehabilitasi gedung kantor terhadap Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%"	100 %	Rp. 438.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan gedungan kantor yang diadakan	8 jenis	Dukungan sebesar 9,46% berupa 23 jenis perlengkapan gedung kantor terhadap Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%"	100 %	Rp. 475.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.02.008	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan gedung kantor yang diadakan	11 jenis	Dukungan sebesar 21,45% berupa 20 jenis peralatan gedung kantor terhadap Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%"	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.02.010	Pengadaan Mebellair	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mebeler yang diadakan	6 jenis	Dukungan sebesar 10,75% berupa mebeluler terhadap Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 425.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.02.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 LS	Dukungan sebesar 19,44% berupa Rapat koordinasi dan	100 %	Rp. 590.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum,	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkat	Energi Sumberdaya Mineral	sarana prasarana aparatur				konsultasi ke dalam dan luar daerah terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%				Perumahan dan ESDM	
1.03.1.03.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung kantor yang dipelihara rutin	8 gedung	Dukungan sebesar 12,62% berupa gedung kantor yang dipelihara rutin terhadap Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%"	100 %	Rp. 550.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas yang dipelihara dan dioperasikan	126 unit	Dukungan sebesar 32,62% berupa kendaraan dinas yang dipelihara dan dioperasikan terhadap Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%"	100 %	Rp. 4.200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Meubelair yang dipelihara	5 jenis	Dukungan sebesar 0,76% berupa meubelair yang dipelihara terhadap Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%"	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.02.038	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	-Terpeliharanya tanaman di lingkup SKPD	12 bulan	- Lingkungan bekerja yang kondusif	12 bulan	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.02.046	Pengelolaan Naskah Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pengelolaan naskah dinas	10000 naskah dinas	Dukungan sebesar0,1% berupa penataan naskah dinas terhadap meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00		
1.03.1.03.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100 %	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	2 laporan	Dukungan sebesar 3% berupa 2 laporan kinerja SKPD terhadap	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum,	Baru - Kegiatan belum

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	Energi Sumberdaya Mineral	manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%"				Perumahan dan ESDM	memberikan Keluaran
1.03.1.03.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya laporan keuangan	4 laporan	Dukungan sebesar 18% berupa 4 laporan keuangan terhadap Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%	100 %	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.06.018	Penyusunan Rencana Program/Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data Dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Dokumen Rencana Program/Kegiatan SKPD	5 dokumen	Dukungan sebesar 13% berupa 5 Dokumen Rencana Program/Kegiatan SKPD terhadap Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%"	100 %	Rp. 330.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan	1 laporan	Dukungan sebesar13 % berupa 1 laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan terhadap Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100%"	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG										Rp. 5.350.000.000,00	Rp. 5.800.000.000,00		
1.03.1.03.01.16.001	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Depok Mantrijeron Mergangsari Sedayu Sewon Catur Tunggal Condong Catur Suryodiningratan Brontokusuman Argomulyo	Pengurangan jumlah titik genangan	45.9 %	- Road map penanganan genangan berbasis sub DAS - Tersedianya DED Drainase/Gorong-gorong : 1. Seturan 2. Kentungan 3. Prawirotaman 4. DI Panjaitan 5. Jl Jogja-Wates	6 dokumen	Dukungan sebesar 3.03 % berupa 5 Dokumen Perencanaan Drainase/Gorong-gorong terhadap Pengurangan jumlah titik genangan sebesar 45.90 %	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.16.003	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Danurejan Depok Kotagede Mlati Umbulharjo Bausasran Maguwoharjo	Pengurangan jumlah titik genangan	45.9 %	Terbangunnya Saluran Drainase/gorong-gorong di: 1. kaw. Kotagede 2. kaw. wirosaban 3. kaw. sambilegi 4. kaw. lempuyangan 5. kaw. mlati	5 Paket	Dukungan sebesar 97.56% berupa terbangunnya saluran Drainase/gorong-gorong di 5 kawasan terhadap pengurangan titik genangan sebesar 45.90	100 %	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Prenggan Sinduadi Sorosutan					%					
1.03.1.03.01.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN										Rp. 54.158.013.000,00	Rp. 0,00		
1.03.1.03.01.18.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Jalan provinsi di DIY	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %	Rehabilitasi Jalan Provinsi	27.86 km	Dukungan sebesar 31,87% berupa rehabilitasi 13 ruas jalan provinsi sepanjang 27,86 km terhadap jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 73,24 %	100 %	Rp. 41.150.817.500,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.18.004	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Jembatan di ruas jalan provinsi	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %	Rehabilitasi Jembatan PProvinsi	61.5 m	Dukungan sebesar 3,33% berupa rehabilitasi 2 buah jembatan sepanjang 61,50 M terhadap jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 73,24 %	100 %	Rp. 4.332.819.500,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.18.010	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Jalan provinsi di DIY	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %	Pemeliharaan rutin jalan provinsi	367.73 km	Dukungan sebesar 5,26% berupa Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 379,43 km terhadap jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 73,24 %	100 %	Rp. 6.076.042.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.18.011	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Jembatan di ruas jalan provinsi	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan	3608 m	Dukungan sebesar 2,05% berupa Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 3.609,40 meter terhadap jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 73,24 %	100 %	Rp. 2.598.334.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.20	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN										Rp. 584.224.800,00	Rp. 0,00		
1.03.1.03.01.20.001	Inspeksi Kondisi Jalan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Jalan provinsi di DIY	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	100 %	Terlaksananya inspeksi kondisi jalan pada ruas jalan provinsi	1 Dokumen Laporan Kondisi Jalan	Dukungan sebesar 49,83% berupa Inspeksi Kondisi Jalan / IRMS sepanjang 619,34 km terhadap Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi sebesar 100%	100 %	Rp. 291.108.600,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.20.002	Inspeksi Kondisi Jembatan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Jembatan di ruas jalan provinsi di DIY	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	100 %	Terlaksananya inspeksi kondisi jembatan pada ruas jalan provinsi	1 Dokumen Laporan Kondisi Jembatan	Dukungan sebesar 50,17% berupa Inspeksi kondisi Jembatan / BMS sepanjang 3.757,9 meter terhadap Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi sebesar 100%	100 %	Rp. 293.116.200,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN										Rp. 18.248.000.000,00	Rp. 7.900.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA													
1.03.1.03.01.24.001	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul	Persetase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	79.5 %	Tersedianya Dokumen : - Inventarisasi dan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi; - DED D.I. Pendeman; - Pengelolaan Aset Irigasi Daerah Irigas; - Angka Kebutuhan Nyata Peningkatan Jaringan Irigasi	10 dokumen perencanaan	Dukungan sebesar 5,14% berupa 9 dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi terhadap luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 79,5%	100 %	Rp. 1.648.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.24.010	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta	Persetase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	79.5 %	Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi Pijenan, Tanjung, Gamping, Blawong, dan Madean	5 Daerah Irigasi	Dukungan sebesar 22,92% berupa rehabilitasi jaringan irigasi pada 5 daerah irigasi terhadap luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 79,5%	100 %	Rp. 6.460.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.24.022	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persetase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	79.5 %	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi lintas kab/ota dan irigasi area 1000-3000 Ha	43 Daerah Irigasi	Dukungan sebesar 17,56% berupa Pemeliharaan Rutin dan operasi jaringan Irigasi Lintas Kab/Kota dan Irigasi area 1000-3000 Ha terhadap luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 79,5%	100 %	Rp. 4.950.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.24.024	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persetase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	79.5 %	Terlaksananya pemeliharaan berkala Jaringan Irigasi Lintas kab/Kota dan Jaringan Irigasi Area 1000 - 3000 Ha	24 Daerah Irigasi	Dukungan 9,76% berupa pemeliharaan berkala jaringan irigasi pada 44 DI terhadap luasan Daerah Irigasi yant terlayani air irigasi sebesar 79,5%	100 %	Rp. 2.750.000.000,00	Rp. 2.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.24.025	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunung Kidul	Persetase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	79.5 %	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif dan Wilayah Sungai	2 kegiatan	Dukungan sebesar 6,13% berupa terselenggaranya konstruksi partisipatif jaringan irigasi pada 3 D.I. terhadap luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 79,5%	100 %	Rp. 2.210.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.24.026	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Daerah Istimewa Yogyakarta	Persetase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	79.5 %	Peningkatan kinerja dan lembaga pengelola irigasi partisipatif dan wilayah sungai	2 kegiatan	Dukungan sebesar 0,82% berupa 2 kegiatan swakelola pengelolaan irigasi partisipatif dan wilayah sungai terhadap luasan Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 79,5%	100 %	Rp. 230.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU										Rp. 1.520.000.000,00	Rp. 0,00		
1.03.1.03.01.25.002	Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah	Kabupaten Sleman dan Gunungkidul	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi sistem pompa	2 jaringan irigasi sistem pompa	Dukungan sebesar 3,92% terhadap peningkatan penyediaan	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum,	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Menurun						dan pengelolaan air baku sebesar1200 liter/detik				Perumahan dan ESDM	
1.03.1.03.01.25.009	Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Tersusunnya Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku di DIY	1 dokumen	Dukungan sebesar 0,05% terhadap penambahan penyediaan dan pengelolaan air baku sebesar1200 liter/detik	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI , DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA										Rp. 29.260.000.000,00	Rp. 4.800.000.000,00		
1.03.1.03.01.26.001	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Berbah Imogiri Kokap Pengasih	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Terbangunnya embung di Kecamatan Berbah, Imogiri, Kokap, dan Pengasih	5 embung	Dukungan sebesar 79,94% berupa pembangunan 5 embung terhadap penambahan penyediaan air baku sebesar 1200 liter/detik	100 %	Rp. 23.100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.26.002	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan penampung air lainnya	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Sieman, gunungkidul dan Kulon Progo	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Terlaksananya Pemeliharaan embung, daerah genangan Waduk Sermo, jalan inspeksi Waduk Sermo, Intake Sapon, saluran gendong Waduk Sermo dan identifikasi embung/telaga	10 embung	Dukungan sebesar 6,53% berupa Pemeliharaan embung, Daerah Genangan Waduk Sermo, jalan Inspeksi waduk Sermo, Intake Sapon, Saluran Gendong Waduk Sermo dan Identifikasi Embung/Telaga terhadap penambahan penyediaan air baku sebesar 1200 literdetik	100 %	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.26.008	Pemeliharaan pos dan peralatan hidrologi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan pos dan peralatan hidrologi	65 pos hidrologi	Dukungan sebesar 1,75% berupa operasi dan peliharaan pos hidrologi terhadap penambahan penyediaan air baku sebesar 1200 L/detik	100 %	Rp. 600.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.26.010	Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Dlingo Girisubo Kalibawang Ponjong	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Tersedianya DED embung	4 dokumen perencanaan	Dukungan sebesar 3,06% berupa 6 dokumen detail desain embung terhadap penambahan penyediaan air baku sebesar 1200 lt/detik	100 %	Rp. 1.160.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.26.012	Pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	Terlaksananya pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai Dan Sumber Daya Air	47 Titik pemeliharaan sungai	Dukungan sebesar 3,13% berupa pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai Dan Sumber Daya Air terhadap penannmbahan penyediaan air baku sebsar 1200 L/detik	100 %	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.26.014	Koordinasi Kelembagaan SDA	Pembangunan Wilayah dan	Ketimpangan Antar	DIY	Penambahan penyediaan air baku	1200 L/det	1. Terselenggaranya Kampanye Pengelolaan	1 Kali	Dukungan sebesar 1,79% berupa fasilitasi	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tata Ruang	Wilayah Menurun				Sumber Daya Air 2. Terselenggaranya Sidang Dewan SDA DIY 3. Terselenggaranya Rapat Kerja Komisi Irigasi DIY 4. Tersusunnya Dokumen Naskah Akademis 5. Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Gubernur		kegiatan kelembagaan sumber daya air dan penyusunan peraturan perundangan terhadap penambahan penyediaan air baku sebesar 1200 liter/detik				Umum, Perumahan dan ESDM	
1.03.1.03.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR										Rp. 3.900.000.000,00	Rp. 750.000.000,00		
1.03.1.03.01.28.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Tegalrejo Umbulharjo	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	80 titik	Rehabilitasi tanggul di Sungai Winongo dan Gajah Wong	200 meter	Dukungan sebesar 82,05% berupa rehabilitasi tanggul Sungai Winongo dan Gajahwong sepanjang 200 m terhadap titik banjir yang ditangani sebesar 80 titik	100 %	Rp. 3.200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.28.013	Pengendalian Banjir dan Pemantauan Kekeringan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	80 titik	Terlaksananya Pengadaan bahan banjir dan pemantauan kekeringan	1 paket bahan banjir dan dokumen	Dukungan sebesar 17,95% berupa penyediaan bronjong karung plastik, pelaksanaan pos waspada banjir dan pemantauan kekeringan terhadap titik banjir yang ditangani sebesar 80 titik	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.32	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN										Rp. 3.190.270.000,00	Rp. 285.000.000,00		
1.03.1.03.01.32.001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	87.5 %	Terlaksananya Bimbingan Teknis	90 Orang	Terwujudnya pelaksanaan konstruksi yang memenuhi standar dan terwujudnya kualitas air yang sesuai standar yang dipersyaratkan	100 %	Rp. 72.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.32.002	Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	87.5 %	Terlaksananya pengujian kualitas mutu air dan kualitas mutu bahan bangunan Tersedianya alat-alat laboratorium penunjang	350 LHU, dan 2 paket alat laboratorium	Dukungan berupa Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian terhadap Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian	100 %	Rp. 2.900.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.32.003	Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	87.5 %	Dipertahannya jumlah parameter terakreditasi	35 parameter	Dukungan berupa Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian terhadap Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian	100 %	Rp. 118.270.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.32.005	Penyusunan Business Plan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	87.5 %	dokumen business plan	1 dokumen	dukungan terhadap pelayanan pengujian	1 dokumen	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.1.03.01.36	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										Rp. 10.500.000.000,00	Rp. 5.200.000.000,00		
1.03.1.03.01.36.002	Pembangunan Prasarana dan Sarana Persampahan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Banguntapan Piyungan Wirokerten Sitimulyo	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	60 %	Terbangunnya bangunan TPST di: 1. Piyungan, bantu 2. Wirokerten, Bantul Terfasilitasinya Sarana dan Prasaranan di TPA Piyungan	3 Paket	Dukungan sebesar 15.38% berupa terbangunnya bangunan TPST terhadap penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan sebesar 60%	100 %	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 5.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.36.010	Operasi dan Pemeliharaan TPA Regional	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Piyungan	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	60 %	Terlaksananya OP TPA Piyungan	12 bulan	Penanganan sampah ramah lingkungan	60 %	Rp. 6.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN										Rp. 3.800.000.000,00	Rp. 4.475.000.000,00		
1.03.1.03.01.37.002	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kawasan Sungai Code	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	65 %	1. Tersedianya dokumen re-desain Kawasan Code 2. Pendampingan Program PNPMP/P2KP	1 dokumen; kegiatan	dukungan 11,84% berupa penyediaan dokumen masterplan sungai gadjahwong dan pendampingan program PNPMP/P2KP terhadap peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin sebesar 65%	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 475.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.37.005	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Danurejan Mergangsan Mlati Tegalarjo Umbulharjo Sinduadi	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	65 %	1. Penataan Kawasan Sungai Code (gemawang) 2. Pembangunan RTH kawasan Langensari 3. Pembangunan infrastruktur perkotaan	3 Paket	dukungan 88,16% berupa penataan kawasan sungai code, pembangunan RTH langensari, dan pembangunan infrastruktur perkotaan terhadap peningkatan aksesibilitas yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin sebesar 65%	100 %	Rp. 3.350.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.38	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN										Rp. 5.050.000.000,00	Rp. 8.800.000.000,00		
1.03.1.03.01.38.003	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Bantul Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Sleman	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	51 %	1. Terbangunnya infrastruktur pedesaan 2. Terselenggaranya pendampingan program PPIP	5 paket ; kegiatan	dukungan 100% berupa pembangunan Infrastruktur pedesaan dan pendampingan program PPIP terhadap peningkatan aksesibilitas kawasan pedesaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin sebesar 51%	100 %	Rp. 5.050.000.000,00	Rp. 8.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.39	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN										Rp. 300.000.000,00	Rp. 270.000.000,00		
1.03.1.03.01.39.002	Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara	Pembangunan Wilayah dan	Ketimpangan Antar	bimbingan teknis bangunan	Persentase keandalan	84 %	Terlaksananya bimbingan teknis pembangunan	3 Kali	dukungan 33,33% berupa pembinaan	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tata Ruang	Wilayah Menurun	gedung	bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku		gedung negara		teknis bangunan gedung negara terhadap persentase keandalan bangunan gedung negara sebesar 84%				Umum, Perumahan dan ESDM	
1.03.1.03.01.39.003	Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	inventarisasi dilakukan pada bangunan gedung negara	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	84 %	Terinventarisnya keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 laporan	dukungan 66,67% berupa terinventarisnya keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap persentase keandalan bangunan gedung sebesar 84%	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.40	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN										Rp. 50.362.805.000,00	Rp. 0,00		
1.03.1.03.01.40.001	Perencanaan Peningkatan Jalan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kabupaten Kulon Progo	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %	Tersusunnya Detail Engineering Desain (DED) Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Adikarto	0.8 km	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan	1 dokumen	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.40.002	Peningkatan Jalan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Jalan provinsi di DIY	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %	Peningkatan Jalan	9.5 km	Dukungan sebesar 36,30% berupa Peningkatan 6 ruas jalan provinsi sepanjang 13,80 km terhadap jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 73,24 %	100 %	Rp. 30.526.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.40.004	Peningkatan Jembatan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	73.24 %	Peningkatan Jembatan	2 unit	Dukungan sebesar 15,62% sepanjang 88 M terhadap jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 73,24 %	100 %	Rp. 19.786.805.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.42	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM										Rp. 1.375.000.000,00	Rp. 1.935.000.000,00		
1.03.1.03.01.42.001	Pengkajian Potensi Sumber Daya Alam	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	80 %	Jumlah laporan hasil kajian potensi sumber daya alam untuk bahan bangunan	1 laporan	Dukungan sebesar 100 % terhadap peningkatan kualitas bangunan pada bidang ke-PU-an sebesar 20%	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.42.002	Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	80 %	Pembuatan Animasi Multimedia bidang ke-PU an Pembuatan peraga multimedia bidang sanitasi	2 laporan	Dukungan sebesar 100 % terhadap peningkatan kualitas bangunan pada bidang ke-PU-an sebesar 20%	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.42.003	Survey Bahan Bangunan Ke-Cipta Karya-an	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan	80 %	Laporan hasil survey harga bahan bangunan tingkat Kecamatan	12 laporan	Dukungan sebesar 100 % terhadap peningkatan kualitas bangunan pada bidang	100 %	Rp. 275.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum				ke-PU-an sebesar 20%				dan ESDM	
1.03.1.03.01.42.004	Informasi Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	80 %	Informasi teknologi bidang pekerjaan umum kepada masyarakat Pengadaan alat percontohan peningkatan kapasitas ketahanan permukiman	1 laporan dan 1 alat	Dukungan sebesar 100 % terhadap peningkatan kualitas bangunan pada bidang ke-PU-an sebesar 20%	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.42.006	Fasilitas Klinik Konstruksi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	80 %	Pelayanan penyebaran informasi dan konsultasi bidang ke-PU an	1 laporan	Dukungan sebesar 100 % terhadap peningkatan kualitas bangunan pada bidang ke-PU-an sebesar 20%	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.43	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR										Rp. 3.100.000.000,00	Rp. 0,00		
1.03.1.03.01.43.001	Pengadaan Tanah Untuk Jalan Dan Jembatan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kabupaten Bantul dan Sleman	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	32.85 %	Tersedianya lahan untuk peningkatan/pembangunan jalan: 1. Peningkatan Jalan Yogyakarta - Imogiri 2. Jalan Selokan Mataram	2500 m2	Dukungan sebesar 100% berupa pembebasan Tanah seluas 2.500 M2 terhadap penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru sebesar 32,85%	100 %	Rp. 3.100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.44	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM										Rp. 25.000.000.000,00	Rp. 26.000.000.000,00		
1.03.1.03.01.44.002	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	saluran air minum merupakan sistem	Persentase penduduk berakses air minum	80.85 %	1. Terlaksananya Pengadaan Bahan SPAM Pedesaan untuk pamaskarta 2. Terlaksananya Pengadaan tanah 10.000 m2 3. Tersusunnya Dokumen Amdal SPAM Kartamantul 4. Tersusunnya DED SPAM sistem Kebonagung 5. Terlaksanya pengadaan Pipa Jaringan Distribusi Kartamantu	15 pamaskarta; m2 ; dokumen ; dokumen ; paket	dukungan 98,37% berupa penyediaan bahan SPAM pedesaan, pengadaan tanah terhadap persentase penduduk berakses air minum sebesar 80,85%	100 %	Rp. 24.600.000.000,00	Rp. 26.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.44.003	Perencanaan Pengelolaan SPAM	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase penduduk berakses air minum	80.85 %	Tersedianya dokumen Rencana Induk SPAM DIY	1 dokumen	dukungan 1,63% berupa penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan SPAM	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.45	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH										Rp. 10.550.000.000,00	Rp. 11.605.000.000,00		
1.03.1.03.01.45.001	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Depok Condong Catur	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR	Terbangunya 1. Jaringan Air Limbah Pipa lateral 2. Jaringan Air Limbah Ppa servis 3. IPLT tahap 2	4 km	dukungan 99,17% berupa pembangunan jaringan pipa lateral dan pipa servis terhadap capaian layanan	100 %	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 6.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									jaringan air limbah terpusat sebesar 17300 SR					
1.03.1.03.01.45.002	Pendampingan Kegiatan USRI	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	menyesuaikan lokasi kegiatan USRI	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR	Terlaksananya pendampingan Program USRI	1 kegiatan	dukungan 0,83% berupa pendampingan program USRI terhadap pelayanan jaringan air limbah terpusat sebesar 17300SR	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.45.003	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR	1. Pemel. / Pembersihan Siphon Air Limbah 2. Pemel / Pembersihan Saluran Pembuang (Outlet) 3. Pemel / Pembersihan Jar. Saluran Pipa Induk, Lateral dan Glontor 4. Walk Through Jar. Air Limbah	234 km	Dukungan sebesar 16% berupa Pemel. / Pembers. Siphon Air Limbah, Pemel / Pembers Sal. Pembuang (Outlet), Pemel / Pembers. Jar. Sal Pipa Induk, Lateral, Glontor dan Walk Through Jar. Air Limbah thd Layana jar. air limbah terpusat di KPY sebesar 17300 SR	100 %	Rp. 1.718.170.000,00	Rp. 1.815.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.45.005	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Sewon	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR	1. O&P Lift Pump 2. O&P Grit Chamber 3. O&P Kolam Aerasi Fakultatif & Maturasi 4. O&P Lumpur Kolam Aerasi/Fakultatif 5. O&P Peralatan Instalasi Kelistrikan 6. O&P Instalasi Hydrant 7. Pemel Pintu Air / Sluice Gate dan Gate Valve 8. O&P SAP 9. O&P SDB	68 unit	Dukungan sebesar 14% berupa operasional dan pemeliharaan peralatan dan instalasi IPAL thd Layanan Jar. air Limbah terpusat di KPY sebesar 17.300SR	100 %	Rp. 1.431.830.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.45.006	Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	lingkungan Balai IPAL dan jaringan perpipaan	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR	1.Peman.& Daltas Air Limbah Jaringan 2. Peman& Daltas Air Masuk/Keluar IPAL 3. Peman&Daltas Udara 4. Peman&Daltas Air Tanah di Jaringan 5. Peman&Daltas Biota/Coliform 6. Peman&Daltas Unsur Sludge 7. Peman& Daltas Lump. Truck Tangki Jinja	7466 Kali	Dukungan sebesar 9% berupa Pemantauan&Daltas Air Limbah Jaringan,Air Masuk/Keluar IPAL ,Udara, Air Tanah di Jaringan,Biota/Coliform Unsur Sludge,Truck Tangki Jinja thd Lay. Jar. air limbah terpusat di KPY sebesar 17.300 SR	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.45.007	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Limbah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Sewon	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	17300 SR	AMDAL Balai IPAL	1 laporan	Dukungan sebesar 3% berupa AMDAL Balai IPAL thd Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY sebesar 17.300 SR	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.46	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN, MINAPOLITAN DAN DESA POTENSI										Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.400.000.000,00		
1.03.1.03.01.46.001	Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kalibawang Nanggulan Wijimulyo	Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan	46 %	Terbangunnya infrastruktur penunjang kawasan minapolitan di kecamatan Nanggulan dan kawasan agropolitatan Kalibawang	2 Paket	dukungan 100% terhadap pembangunan infrastruktur agropolitan, minapolitan, dan desa	100 %	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					desa potensi				potensi sebesar46%					
1.03.1.03.01.47	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI										Rp. 1.320.000.000,00	Rp. 2.575.000.000,00		
1.03.1.03.01.47.001	Sosialisasi Dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82.5 %	Tercapainya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yg terkait	180 Orang	Dukungan sebesar 5,30 % berupa Sosialisasi Dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.47.002	Pengelolaan Database Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82.5 %	Terkelolanya Media Informasi Penyelenggaraan Konstruksi	1 Aplikasi	Dukungan sebesar 5,68 % berupa Pengelolaan Database Jasa Konstruksi terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.47.003	Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82.5 %	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi	4 event	Dukungan sebesar 7,58 % berupa Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.47.004	Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82.5 %	Terlaksananya fasilitasi lomba tenaga kerja konstruksi tingkat provinsi dan nasional	1 tema, 2 event	Dukungan sebesar 11,36 % berupa Peningkatan Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.47.005	Peningkatan Kualitas Pengguna Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82.5 %	Terselenggaranya pelatihan/bimbingan teknis bagi pengguna jasa konstruksi	2 Kali	Dukungan sebesar 5,68 % berupa Peningkatan Kualitas Pengguna Jasa Konstruksi terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.47.006	Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82.5 %	Tersusunnya rekomendasi pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi di daerah	1 laporan	Dukungan sebesar 5,68 % berupa Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.47.007	Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	diy	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82.5 %	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1 laporan	Dukungan sebesar 5,68 % berupa Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.47.008	Pengawasan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah	diy	Persentase peningkatan performance/kinerja	82.5 %	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan jasa konstruksi	1 laporan	Dukungan sebesar 7,58 % berupa Pengawasan Pemanfaatan Jasa	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum,	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Menurun		jasa konstruksi				Konstruksi terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %				Perumahan dan ESDM	
1.03.1.03.01.47.009	Pengawasan Perizinan Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82,5 %	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Jasa Konstruksi	1 laporan	Dukungan sebesar 5,68 % berupa Pengawasan Perizinan Jasa Konstruksi terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.47.012	Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82,5 %	a. Tersusunnya Grand Desain Pembinaan Konstruksi secara Berkelanjutan b. Tersusunnya kajian kalembagaan Tim Pengkaji Konstruksi	2 dokumen	Dukungan sebesar 22,73 % berupa Pembinaan Konstruksi Berkelanjutan terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.47.013	Penyusunan Profil Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82,5 %	Tersusunnya dokumen profil sektor jasa konstruksi DIY	1 laporan	Dukungan sebesar 5,68 % berupa Penyusunan Profil Jasa Konstruksi terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.03.1.03.01.47.014	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dengan fasilitas Mobile Training Unit	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa konstruksi	82,5 %	Terselenggaranya pelatihan konstruksi di daerah kantong tenaga kerja	4 Kali	Dukungan sebesar 11,36 % berupa Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dengan fasilitas Mobile Training Unit terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 82,5 %	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.04	Perumahan													
1.04.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM													
1.04.1.03.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										Rp. 10.800.000.000,00	Rp. 9.250.000.000,00		
1.04.1.03.01.15.001	Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Daerah Istimewa Yogyakarta	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	1. Terlaksananya Identifikasi Permukiman di bantaran Sungai Code. 2. Terlaksananya Identifikasi RTLH di Kab. Gunungkidul 3. Terlaksananya Identifikasi luas dan jumlah ruang publik di Kota Yogyakarta 4. Terlaksananya Identifikasi Permukiman Kawasan Rawan	4 dokumen	Dukungan sebesar 1,38 % berupa Identifikasi Permukiman di Bantaran Sungai Code 1 dokumen, Identifikasi Prmkukiman kawasan rawan bencana di Kab. Bantul dan Kab. Gunugkidul 1 dokumen terhadap Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni pertahun sebesar 7 %	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.04.1.03.01.15.002	Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM)	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Daerah Istimewa Yogyakarta	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	Terlaksananya Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dalam keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	1 dokumen	Dukungan sebesar 0,93 % berupa Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dalam keserasian kawasan dan	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									lingkungan hunian berimbang 1 dokumen terhadap Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni pertahun sebesar 7 %					
1.04.1.03.01.15.003	Koordinasi Peyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Daerah Istimewa Yogyakarta	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	1. Kesepakatan data RTLH 2. Kesepakatan data kawasankumuh	2 kegiatan	Dukungan sebesar 0,46 % berupa Kesepakatan data RTLH 1 kegiatan, Kesepakatan data kawasan kumuh 1 kegiatan terhadap Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni pertahun sebesar 7 %	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.04.1.03.01.15.005	Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga / badan usaha	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Daerah Istimewa Yogyakarta	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	1.Terlaksananya Kesepakatan konsep hunia berimbang di DIY 2. Koordinasi FLPP dan perumahan MBR	2 kegiatan	Dukungan sebesar 0,46 % berupa Kesepakatan konsep hunia erimbang di DIY 1 kegiatan, Koordinasi FLPP dan perumahan MBRI 1 kegiatan terhadap Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni pertahun sebesar 7 %	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.04.1.03.01.15.006	Fasilitasi dan Stimulus Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Daerah Istimewa Yogyakarta	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	1.Terlaksananya bantuan stimulan bahan bangunan untuk perbaikan rumah tidak layak huni . 2. Pendampingan bantuan stimulan bahan bangunan	960 rumah	Dukungan sebesar 92,59 % berupa bantuan stimulan bahan bangunan untuk perbaikan rumah tidak layak huni 1.200 rumah , Pendampingan bantuan stimulan bahan bangunanl 5 laporan terhadap Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni pertahun sebesar 7 %	100 %	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 8.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.04.1.03.01.15.007	Perencanaan Kebijakan Strategi dan Pengembangan Perumahan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Daerah Istimewa Yogyakarta	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	1. Terlaksananya draf Raperda RP3KP. 2. Terlaksananya Identifikasi Land Banking DIY	2 dokumen	Dukungan sebesar 3,70 % berupa draf Raperda RP3KP 1 dokumen, Roadmap Land Banking DIY 1 dokumen terhadap Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni pertahun sebesar 7 %	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.04.1.03.01.15.008	Monitoring dan Evaluasi program pusat di daerah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Daerah Istimewa Yogyakarta	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	7 %	1. Terlaksananya laporan semester I hasil Monitoring dan evaluasi prgram pusat di daerah. 2. Terlaksananya laporan semester II hasil Monitoring dan evaluasi prgram pusat di daerah	2 laporan	Dukungan sebesar 0,46 % berupa laporan semester I hasil Monitoring dan evaluasi program psat di daerah 1 laporan, laporan semester II hasil Monitoring dan evaluasi program psat di daerah 1 laporan terhadap Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni perta	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.1.03.01.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN										Rp. 2.550.000.000,00	Rp. 2.550.000.000,00		
1.04.1.03.01.17.003	Fsilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbsis Masyarakat	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	54 %	Terlaksananya Pebangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) pada 25 Komunitas permukiman : 1.Kota Yogyakarta. 2. Kab. Bantul. 3.Kab. Sleman. 4.Kab. Gunungkidl. 5.Kab. Kulonprogo	25 lokasi	Dukungan sebesar 98,03 % berupa Pebangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) pada 25 Komunitas permukiman : 1.Kota Yogyakarta. 2. Kab. Bantul. 3.Kab. Sleman. 4.Kab. Gunungkidl. 5.Kab. Kulonprogo 10 Paket terhadapprogram pemberdayan berbasis komunitas s	100 %	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.04.1.03.01.17.008	Koordnasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Keblakan tentang Pembangunan Perumahan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	54 %	Terlaksananya Penilaian Lingkungan Sehat Perumahan	1 Topik	Dukungan sebesar 1,96 % berupa Penilaian Lingkungan Sehat Perumahan 1 topik, terhadap program pemberdyaan berbasiskomunita sebesar 54 %	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.04.1.03.01.22	PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH										Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 0,00		
1.04.1.03.01.22.001	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kawasan Kumuh di DIY	Peningkatan kualitas lingkungan pemukman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	40 %	terlaksananya penanganan kawasan kumuh	7 kawasan	pengurangan kawasan kumuh	100 %	Rp. 4.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05	Penataan Ruang													
1.05.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM													
1.05.1.03.01.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG										Rp. 600.000.000,00	Rp. 0,00		
1.05.1.03.01.15.019	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kawasan Koridor Tempel - Parangtritis dan Kawasan Ekogeowisata Karst di Kabupaten Gunungkidul	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	16 kawasan strategis	1. Tersedianya NA, Matek dan Draft Raperda RTR Kawasan Koridor Tempel - Parangtritis 2. Tersedianya NA, Matek dan Draft Raperda RTR Kawasan Ekogeowisata Karst di Kabupaten Gunungkidul Terhadap Pengelolaan Wilayah Sesuai Rencana	2 dokumen	Dukungan Sebesar 55,56 % Penyusunan NA, Matek dan Draft Raperda RTR Kawasan Koridor Tempel - Parangtritis dan RTR Kawasan Ekogeowisata Karst di Kabupaten Gunungkidul Terhadap Pengelolaan Wilayah Sesuai Rencana	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.15.020	Penyusunan Road Map Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	16 kawasan strategis	Road Map Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 dokumen	Dukungan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di DIY	1 dokumen	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG										Rp. 900.000.000,00	Rp. 0,00		
1.05.1.03.01.16.000	Penyusunan Materi Teknis, Naskah Akademis, draft Rapergub	Pembangunan Wilayah dan	Pemanfaatan Ruang	DIY	Peningkatan kesesuaian	70 %	1. Rapergub Sempadan Pantai 2. Rapergub NSPK	3 dokumen	Materi Teknis, Naskah Akademik dan Draft	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tata Ruang	Terkendali		pemanfaatan terhadap RTRW kab/kot dan RTRW Provinsi		Permodelan Daya Dukung dan Daya Tampung Keruangan Kawasan Strategis Ekonomi 3. Rapergub Kriteria Penentuan dan Kriteria Perubahan Fungsi Ruang Kawasan Berskala Besar dan Berdampak Besar dan Penting		Rapergub				Umum, Perumahan dan ESDM	
1.05.1.03.01.16.009	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/kot dan RTRW Provinsi	70 %	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi	1 laporan	Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG										Rp. 1.165.923.500,00	Rp. 0,00		
1.05.1.03.01.17.001	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	60 %	1. Draft Rapergub Road Map Pengendalian Pemanfaatan Ruang di DIY. 2. Draft Rapergub Pedoman Pemanfaatan dan Evaluasi KRA	2 dokumen	Dukungan sebesar 11,22 % Draft Rapergub Insentif dan Disinsentif Pemda DIY kepada Kab/Kota di DIY dan Penyusunan Dokumen Matek Insentif dan Disinsentif Pemda DIY kepada Masyarakat terhadap Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung B	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.17.002	Penyusunan Prosedur Dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	60 %	1. Draft Rapergub Insentif dan Disinsentif Pemda DIY Kepada Kabupaten/Kota	1 dokumen	Dukungan sebesar 14,03 % Draft Rapergub Road Map Pengendalian Pemanfaatan Ruang di DIY dan Draft Rapergub Pedoman dan Pemantauan Evaluasi Kawasan resapan Air (KRA) terhadap Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawahan	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.17.004	Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	60 %	Terlatihnya aparat dalam pengendalian tata ruang	5 angkatan	Dukungan sebesar 7,70 % berupa terlatihnya aparat dalam pengendalian tata ruang sejumlah 5 angkatan terhadap Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawahan	100 %	Rp. 68.636.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.17.005	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung	60 %	Tersedianya laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan ruang	1 laporan	Dukungan sebesar 44,90 % berupa tersedianya laporan hasil pengawasan pemanfaatan ruang terhadap Peraturan	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					bawahan				Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawahan					
1.05.1.03.01.17.006	Koordinasi Dan Fasilitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	60 %	Terlaksananya koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/ kota	2 Topik	Dukungan sebesar 28,06 % berupa Terlaksananya koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/ kota terhadap Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawahan	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.17.007	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	60 %	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	5 angkata	Dukungan sebesar 28,06 % berupa sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang 5 angkatan terhadap Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Lindung Bawahan	100 %	Rp. 72.287.500,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2	Pilihan													
2.03	ESDM													
2.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM													
2.03.1.03.01.21	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR										Rp. 985.000.000,00	Rp. 1.083.500.000,00		
2.03.1.03.01.21.008	Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	60 %	1. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi 2. Terlaksananya Workshop Pengawasan dan Pengendalian BBM dan LPG Bersubsidi 3. Terlaksananya Workshop Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BBM dan LPG Bersubsidi	1 laporan, 3 kali, 1 kali	Dukungan sebesar 15,2 % berupa Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi 1 laporan, Workshop Pengawasan dan Pengendalian BBM dan LPG Bersubsidi 3 kali dan Workshop Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BBM dan LPG Bersubsidi 1 kali	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.21.009	Pembinaan dan Pengawasan K2LL Usaha Migas	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY, Kabupaten Gunungkidul	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	60 %	1. Terlaksananya Pengawasan lindungan lingkungan usaha hilir migas 2. Terlaksananya Kajian lindungan lingkungan pengelolaan tabung LPG di sub penyalur Kab.Gunungkidul	1 laporan, 1 dokumen	Dukungan sebesar 6% berupa Pengawasan lindungan lingkungan usaha hilir migas 1 laporan, Kajian lindungan lingkungan pengelolaan tabung LPG di sub penyalur Kab.Gunungkidul 1 dokumen terhadap Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar 60%	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.03.01.21.010	Peningkatan Fasilitas Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Dlingo Imogiri	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	60 %	Terlaksananya Pembangunan Sub Penyalur LPG Bersubsidi	5 unit	Dukungan sebesar 35,5 % berupa Pembangunan Sub Penyalur LPG Bersubsidi 5 unit terhadap Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar sebesar 60%	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.21.011	Pengelolaan Sistem informasi Minyak dan Gas	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	60 %	Terlaksananya Updating Layanan Informasi Infrastruktur dan Fasilitas Distribusi Migas	1 dokumen	Dukungan sebesar 7,6 % terhadap Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar sebesar 60 %	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 82.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.21.012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Penyediaan Bahan Bakar	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	60 %	Tersedianya Data Kebutuhan gas sektor transportasi, industri dan rumah tangga di DIY	1 dokumen	Dukungan sebesar 35,5 % berupa Data Kebutuhan gas sektor transportasi, industri dan rumah tangga di DIY 1 dokumen terhadap Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar sebesar 60%	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Baru - Kebijakan Pemerintah
2.03.1.03.01.24	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN										Rp. 6.050.000.000,00	Rp. 1.162.500.000,00		
2.03.1.03.01.24.001	Perencanaan Ketenagalistrikan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian penyedian energi baru terbarukan	78.6 %	1. Terlaksananya penyusunan DED listrik pedesaan 2. Terlaksananya Updating Data dan Sinkronisasi Pemenuhan RE 3. Tersusunnya Kebutuhan transmisi dan distribusi ketenagalistrikan mendukung pengembangan kawasan strategis Kab. Kulonprogo	3 dok	Dukungan sebesar 12,8% berupa penyusunan DED listrik pedesaan 1 dokumen, updating Data dan Sinkronisasi Pemenuhan RE 1 dokumen, Kebutuhan transmisi dan distribusi ketenagalistrikan mendukung pengembangan kawasan strategis Kab. Kulonprogo 1 dokumen terhad	100 %	Rp. 775.000.000,00	Rp. 852.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.24.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Rayon Wates, Rayon Bantul, Rayon Wonosari; DIY	Pencapaian penyedian energi baru terbarukan	78.6 %	1. Terlaksananya pembangunan jaringan listrik pedesaan 2. Terlaksananya pemasangan instalasi rumah	10 dusun, 1.500 sambungan rumah	Dukungan sebesar 842,6% berupa pembangunan jaringan listrik pedesaan 10 dusun, pemasangan instalasi rumah 1.500 SR terhadap Pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 78,6%	100 %	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.24.003	Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian penyedian energi baru terbarukan	78.6 %	1. Terlaksananya Workshop pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan 2. Terlaksananya Workshop pembentukan forum ketenagalistrikan daerah	2 kali, 1 kali	Dukungan sebesar 1 % berupa Workshop pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan 2 kali, Workshop pembentukan forum ketenagalistrikan daerah 1 kali terhadap Pencapaian rasio elektrifikasi sebesar	100 %	Rp. 62.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									78,6%					
2.03.1.03.01.24.004	Monitoring Dan Evaluasi Penyediaan Dan Pemenuhan Ketenagalistrikan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	78.6 %	1. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penyediaan dan pemenuhan ketenagalistrikan 2. Terlaksananya evaluasi peningkatan akses energi listrik pedesaan	1 laporan, 1 dokumen	Dukungan sebesar 35 % berupa Monitoring dan evaluasi penyediaan dan pemenuhan ketenagalistrikan 1 laporan, evaluasi peningkatan akses energi listrik pedesaan 1 dokumen terhadap Pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 78,6%	100 %	Rp. 213.000.000,00	Rp. 235.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.25	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN										Rp. 4.750.000.000,00	Rp. 495.000.000,00		
2.03.1.03.01.25.001	Perencanaan Energi Baru Terbarukan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY, Kab Kulonprogo	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117.95 (000 SBM)	1. Tersusunnya DED Pembangkit EBT 2. Terlaksananya Kajian akselerasi EBT di kawasan perkotaan	2 dokumen	Dukungan sebesar 6,3 % berupa DED pembangkit EBT 1 dokumen dan kajian akselerasi EBT di kawasan perkotaan 1 dokumen terhadap pencapaian penyediaan energi baru terbarukan sebesar 117,95 (000 SBM)	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.25.002	Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kab. Bantul; Kec.Kokap, Kota Yogyakarta; Kec.Minggir, Kec.Tempel	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117.95 (000 SBM)	1. Terlaksananya Pembangunan PLTMH 2. Terlaksananya Pemasangan PLTS di perkotaan dan pedesaan 3. Terlaksananya Optimalisasi pembangkit energi baru terbarukan (PLTMH, PLTS, Biogas)	1 unit, 150 unit, 14 unit	Dukungan sebesar 53,7 % berupa Pembangunan PLTMH 1 unit, Pemasangan PLTS di perkotaan dan pedesaan 150 unit, Optimalisasi pembangkit energi baru terbarukan 14 unit terhadap pencapaian penyediaan energi baru terbarukan sebesar 117,95 (000 SBM)	100 %	Rp. 2.550.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.25.003	Pengembangan Biogas Berbasis Listrik	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Bambang lipuro Lendah Pleret Seyegan Sleman	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117.95 (000 SBM)	Terlaksananya Pembangunan digester biogas untuk listrik	5 unit	Dukungan sebesar 4,2 % berupa Pembangunan digester biogas untuk listrik 5 unit terhadap Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan sebesar 117,95 (000 SBM)	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.25.004	Pengembangan Biogas Berbasis Bahan Bakar	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Cangkringan Panjatan Sedayu	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117.95 (000 SBM)	Terlaksananya Pembuatan digester biogas untuk bahan bakar	90 unit	Dukungan 16,8 % berupa Pembuatan digester biogas untuk bahan bakar 90 unit terhadap Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan 117,95 (000 SBM)	100 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.25.006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Energi Baru	Pembangunan Wilayah dan	Pemanfaatan Ruang	DIY	Pencapaian penyediaan energi	117.95 (000	1. Terlaksananya Kajian evaluasi pemanfaatan	1 dokumen, 1 kali, 1 kali	Dukungan sebesar 3,2 % berupa Kajian	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terbarukan	Tata Ruang	Terkendali		baru terbarukan	SBM)	energi baru terbarukan 2. Terlaksananya workshop pengelolaan energi baru terbarukan 3. Terlaksananya workshop pembentukan Tim Teknis Energi Daerah		evaluasi pemanfaatan energi baru terbarukan 1 dokumen, workshop pengelolaan energi baru terbarukan 1 kali, workshop pembentukan Tim Teknis Energi Daerah 1 kali terhadap Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan seb				Umum, Perumahan dan ESDM	
2.03.1.03.01.25.007	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117.95 (000 SBM)	1. Terlaksananya Kajian pengembangan desa mandiri energi 2. Terlaksananya updating SI pengembangan dan pemanfaatan EBT 3. Terlaksananya MPU Ketahanan Energi	1 dokumen, 1 dokumen, 1 kali	Dukungan sebesar 7,8 % berupa kajian pengembangan desa mandiri energi 1 dok, updating SI pengembangan dan pemanfaatan EBT 1 dok, MPU Ketahanan Energi 1 kali terhadap Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan sebesar 117.95 (000 SBM)	100 %	Rp. 370.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.25.008	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117.95 (000 SBM)	Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis RaPerda/RaPergub EBT	1 dokumen	Dukungan sebesar 7,4 % berupa Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis RaPerda/RaPergub EBT 1 dokumen terhadap Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan sebesar 117.95 (000 SBM)	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Baru - Kebijakan Pemerintah
2.03.1.03.01.25.009	Monitoring dan Evaluasi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	117.95 (000 SBM)	1. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja PLTS 2. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja Biogas 3. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja PLTMH	3 laporan	Dukungan sebesar 0,6 % berupa Monitoring dan evaluasi kinerja PLTS 1 laporan, Monitoring dan evaluasi kinerja Biogas 1 laporan, Monitoring dan evaluasi kinerja PLTMH 1 laporan terhadap pencapaian penyediaan energi baru terbarukan sebesar 117.95 (000 SBM)	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Baru - Kebijakan Pemerintah
2.03.1.03.01.26	PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN AIR TANAH										Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 5.962.000.000,00		
2.03.1.03.01.26.001	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Air Tanah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Jetis Kalasan Ngaglik Pakualaman Sleman	Rerata penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	1. Terlaksananya pembangunan instalasi sumur pantau air tanah dalam 2. Terlaksananya Perbaikan/pemeliharaan sumur pantau air tanah dalam	2 unit, 3 unit	Dukungan sebesar 10% berupa Pembangunan instalasi sumur pantau air tanah dalam 2 unit dan Perbaikan/pemeliharaan sumur pantau air tanah dalam 3 unit terhadap Rerata penurunan muka air tanah sebesar lebih	100 %	Rp. 600.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									kecil 20%					
2.03.1.03.01.26.002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Godean Imogiri Karangmojo Moyudan Nglipar Pajangan Pengasih Pleret Semin Wonosari	Rerata penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	1. Terlaksananya Pembuatan sumur bor air tanah dalam di daerah sulit air 2. Terlaksananya Optimalisasi pemanfaatan sumur bor air tanah di daerah sulit air	8 unit, 4 unit	Dukungan sebesar 56,7% berupa Pembuatan sumur bor air tanah dalam di daerah sulit air 8 unit dan Optimalisasi pemanfaatan sumur bor air tanah di daerah sulit air 4 unit terhadap Rerata penurunan muka air tanah sebesar lebih kecil 20%	100 %	Rp. 3.400.000.000,00	Rp. 3.740.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.26.003	Pengendalian daya rusak Air Tanah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kec.Nglipar, Kec.Semin, Kec.Pleret, Kec.Moyudan, Kec.Pajangan, Kec.Imogiri, Kec.Karangmojo, Kec.Pakem, Kec.Turi, Kec.Sleman, Kec.Ngemplak: CAT Yk-Sle	Rerata penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	1. Terlaksananya pembuatan sumur resapan 2. Terlaksananya penyusunan Desain/strategi konservasi pada zona imbuhan dan lepasan	300 unit, 1 dokumen	Dukungan sebesar 16,6% berupa Pembuatan sumur resapan 300 unit dan Penyusunan Desain/strategi konservasi 1 dokumen terhadap rerata penurunan muka air tanah sebesar lebih kecil 20%	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.26.004	Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	CAT Yogyakarta-Sleman	Rerata penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	1. Terlaksananya Workshop pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah 2. Terlaksananya Kajian Review penyusunan jaringan sumur pantau	3 kali, 1 dokumen	Dukungan sebesar 3% berupa workshop pembinaan, pengawasan dan Pengendalian pengambilan air tanah 3 kali dan Review penyusunan jaringan sumur pantau 1 dokumen terhadap Rerata penurunan muka air tanah sebesar lebih kecil 20%	100 %	Rp. 180.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.26.005	Monitoring Dan Evaluasi Pengambilan Air Tanah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	CAT Yogyakarta-Sleman	Rerata penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	1. Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah 2. Terlaksananya Pengadaan Alat flow meter	1 laporan, 1 unit	Dukungan sebesar 2% berupa pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah 1 laporan, dan Alat flow meter 1 unit terhadap Rerata penurunan muka air tanah sebesar lebih kecil 20%	100 %	Rp. 120.000.000,00	Rp. 132.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.26.006	Perencanaan Pengelolaan Air Tanah	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Bantul, Gunungkidul, Sleman	Rerata penurunan muka air tanah	20 (kurang dari %)	1. Terlaksananya Survey potensi penyediaan dan pengembangan air tanah di Kec.Ngemplak dan sekitarnya 2. Terlaksananya SID pembangunan sumur bor air tanah dalam 3. Terlaksananya DED peningkatan kapasitas sambungan listrik sumur bor air tanah dalam	3 dokumen	Dukungan sebesar 11,7% berupa survey penyediaan dan pengembangan air tanah di Kec.Ngemplak dan sekitarnya 1 dokumen, SID pembangunan sumur bor air tanah dalam 1 dokumen dan DED peningkatan kapasitas sambungan listrik sumur bor air tanah dalam 1 dokumen te	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 770.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.1.03.01.27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI										Rp. 1.170.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00		
2.03.1.03.01.27.001	Perencanaan Pelaksanaan Konservasi Energi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	9 %	1. Terlaksananya Materi teknis strategi penurunan elastisitas energi DIY 2. Terlaksananya workshop konservasi energi 3. Terlaksananya pembuatan sarana informasi publik hemat energi	1 dok, 8 kali,1 paket	Dukungan sebesar 58 % berupa Penyusunan Materi teknis strategi penurunan elastisitas energi DIY 1 dok, workshop konservasi energi 8 kali, pembuatan sarana informasi publik hemat energi 1 paket terhadap Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi seb	100 %	Rp. 680.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.27.002	Pelaksanaan Audit Energi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	9 %	1. Terlaksananya Audit Energi 2. Terlaksananya Penyusunan standar dan kriteria Lomba Hemat Energi 3. Terlaksananya Lomba Hemat Energi	10 gedung, 1 dokumen, 1 laporan	Dukungan sebesar 42 % berupa Audit Energi 10 gedung, Penyusunan standar dan kriteria Lomba Hemat Energi 1 dokumen, Lomba Hemat Energi 1 laporan terhadap Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi sebesar 9%	100 %	Rp. 490.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.28	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN										Rp. 1.040.000.000,00	Rp. 1.144.000.000,00		
2.03.1.03.01.28.001	Perencanaan Pengelolaan Usaha Pertambangan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kulonprogo, Gunungkidul	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	11 %	1. Terlaksananya Kajian lingkungan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kab.Gunungkidul 2. Terlaksananya Kajian Penyediaan pemanfaatan sumber daya mineral mendukung pengembangan kawasan strategis Kulonprogo	2 dokumen	Dukungan sebesar 48% berupa Kajian lingkungan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kab.Gunungkidul 1 dok,dan Penyediaan pemanfaatan sumber daya mineral mendukung pengembangan kawasan strategis Kulonprogo 1 dokumen terhadap pencapaian kinerja pengelolaa	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.28.002	Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kec.Kokap: DIY	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	11 %	1. Terlaksananya bantuan alat pengolah batu 2. Terlaksananya workshop peningkatan nilai tambah	2 unit, 1 kali	Dukungan sebesar 51% berupa Bantuan alat pengolah batu 2 unit dan workshop peningkatan nilai tambah 1 kali terhadap Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan sebesar 11%	100 %	Rp. 530.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
2.03.1.03.01.28.003	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Usaha Pertambangan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	11 %	Terlaksananya movev penyelenggaraan usaha pertambangan	1 laporan	Dukungan sebesar 1% berupa Terlaksananya movev penyelenggaraan usaha pertambangan 1 lap terhadap Pencapaian	100 %	Rp. 10.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 282.779.236.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									kinerja pengelolaan usaha pertambangan sebesar 11%					

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00							
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1	Wajib																	
1.06	Perencanaan Pembangunan																	
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																	
1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.738.209.600,00	Rp. 1.857.134.560,00						
1.06.1.06.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya pembelian perlengkapan surat- menyurat : 1. Perangko	280 buah	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 10.500.000,00	Rp. 11.550.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan				
							2. Materai	1750 buah										
							3. Paket/Pengiriman	200 Kali										
1.06.1.06.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Terlaksananya pembayaran rekening telepon	1 tahun	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 488.000.000,00	Rp. 536.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan				
							2. Terlaksananya pembayaran rekening listrik	1 tahun										
							3. Terlaksananya pembayaran sewa jaringan internet 4 Mbps	1 tahun										
1.06.1.06.01.01.006	Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpeliharanya surat-surat kendaraan bermotor dinas/operasional : 1. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	13 unit	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung	100 %	Rp. 12.400.000,00	Rp. 13.640.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									kelancaran tugas dan fungsi SKPD					
							2. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	17 unit						
1.06.1.06.01.01.007	Penyediaan Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya penyelenggaraan administrasi keuangan	12 bulan	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 34.200.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 unit	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 67.899.600,00	Rp. 74.689.560,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	101 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 47.700.000,00	Rp. 52.470.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Tersedianya Barang Cetakan	20 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 37.800.000,00	Rp. 41.580.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya Penggandaan Surat-surat/Dokumen Lainnya	70200 lembar						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 9.700.000,00	Rp. 10.670.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	19 jenis	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 12.700.000,00	Rp. 13.970.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar)	6 Surat Kabar Harian	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 11.200.000,00	Rp. 12.320.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya Buku Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket						
1.06.1.06.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi	12 bulan	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 94.950.000,00	Rp. 104.445.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Pusat dan daerah lainnya	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Keikutsertaan/terlaksananya koordinasi/konsolidasi /konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya	12 bulan	Dukungan terhadap terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	100 %	Rp. 911.160.000,00	Rp. 950.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									tugas dan fungsi SKPD					
1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.429.695.000,00	Rp. 1.633.841.000,00		
1.06.1.06.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Roda 4 (empat)	3 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 594.385.000,00	Rp. 650.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 60.870.000,00	Rp. 66.957.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Badan Perencanaan Pembangunan	Prosentase penyediaan dan	100 %	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional : 1. Kendaraan Dinas Roda 4	13 unit	Dukungan terhadap peningkatan	100 %	Rp. 337.000.000,00	Rp. 370.700.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinas/Operasional		Daerah Meningkatkan	Daerah	pemeliharaan sarana prasarana aparatur		(empat)		sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				Daerah	
							2. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	17 unit						
1.06.1.06.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor : 1. AC Split	54 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 39.040.000,00	Rp. 42.944.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. AC Floor Standing	4 unit						
							3. Almari besi	20 buah						
							4. Filling Cabinet	20 buah						
							5. Tabung Pemadam Kebakaran	7 buah						
							6. Sound System	2 unit						
							7. Generator set	1 unit						
1.06.1.06.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor : 1. Jaringan komputer dan internet	1 Paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 48.400.000,00	Rp. 53.240.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Komputer PC	60 unit						
							3. Komputer Notebook	16 unit						
							4. Printer	30 unit						
							5. Mesin Tik Manual	15 buah						
							6. LCD Proyektor	2 buah						
							7. Faksimile	2 buah						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 430.000.000,00	Rp. 479.500.000,00		
1.06.1.06.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Terlaksananya Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1 Paket	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Terlaksananya kegiatan outbond bagi pegawai Bappeda DIY	118 Pegawai	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 95.000.000,00	Rp. 104.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.05.057	Pengelolaan Arsip Dinamis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis	1 Paket	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.06.1.06.01.05.058	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	1. Terlaksananya Rapat Kerja Penilaian Angka Kredit	1 Kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 190.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Terlaksananya Workshop Pejabat Fungsional Tertentu	1 Kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Terlaksananya Ekspose Hasil Kerja Pejabat Fungsional Tertentu	1 Kali						
1.06.1.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 148.736.950,00	Rp. 192.269.000,00		
1.06.1.06.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Tersusunnya dokumen RKT	1 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 8.426.400,00	Rp. 9.269.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Tersusunnya dokumen penetapan kinerja	1 dokumen						
							3.Tersusunnya LAKIP BAPPEDA	1 dokumen						
1.06.1.06.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Tersusunnya laporan keuangan bulanan	12 laporan	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 22.287.850,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Tersusunnya laporan keuangan triwulanan	4 laporan						
							3.Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 laporan						
							4. Tersusunnya laporan prognosis enam bulan berikutnya	1 laporan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	5. Tersusunnya laporan keuangan tahunan	1 laporan			Rp. 93.226.000,00	Rp. 105.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							1. Tersusunnya RKA	1 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %				
							2. Tersusunnya RKA Perubahan	1 dokumen						
							3. Tersusunnya DPA	1 dokumen						
							4. Tersusunnya DPA Perubahan	1 dokumen						
							5. Tersusunnya RENJA	1 dokumen						
6. Tersusunnya ROPK	1 dokumen													
1.06.1.06.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA	1 laporan	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rp. 24.796.700,00	Rp. 28.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI										Rp. 372.486.500,00	Rp. 444.000.000,00		
1.06.1.06.01.15.034	Pengembangan Sistem Jaringan Internet	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	80 %	Optimalisasi Sistem Jaringan Internet	1 sistem	Dukungan terhadap persentase data perencanaan pembangunan yang dapat	100 %	Rp. 87.692.500,00	Rp. 95.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									diakses					
1.06.1.06.01.15.035	Pengelolaan Website	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	80 %	1. Terpenuhinya Pengelolaan Website Bappeda	1 website	Dukungan terhadap persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	100 %	Rp. 169.422.500,00	Rp. 213.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Internal	1 sistem						
1.06.1.06.01.15.036	Pengembangan Sistem Informasi Satu Data Pembangunan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	80 %	Sistem Informasi Satu Data Pembangunan	1 sistem	Dukungan terhadap persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	100 %	Rp. 115.371.500,00	Rp. 136.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.06.1.06.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 2.080.648.000,00	Rp. 2.288.465.300,00		
1.06.1.06.01.21.008	Penyusunan Rancangan RKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	17.04 %	1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016	1 dokumen	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	100 %	Rp. 798.500.000,00	Rp. 878.350.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Musrenbang RKPD Tahun 2016	1 kegiatan						
1.06.1.06.01.21.030	Penyusunan KUA dan PPAS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	17.04 %	1. Dokumen KUA Tahun 2016	1 dokumen	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	100 %	Rp. 195.840.000,00	Rp. 215.424.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Dokumen PPAS Tahun 2016	1 dokumen						
1.06.1.06.01.21.031	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	17.04 %	1. Dokumen KUA Perubahan Tahun 2015	1 dokumen	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	100 %	Rp. 173.455.000,00	Rp. 190.800.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2015	1 dokumen						
1.06.1.06.01.21.033	Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	17.04 %	1.Laporan Hasil Sinkronisasi dan Koordinasi dalam Musrenbang Regional	1 laporan	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	100 %	Rp. 539.453.000,00	Rp. 593.398.300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2.Laporan Hasil Sinkronisasi dan Koordinasi dalam Musrenbang Nasional	1 laporan						
							3. Workshop Perencanaan Urusan Keistimewaan DIY	4 Kali						
							4. Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Keistimewaan	2 Kali						
1.06.1.06.01.21.068	Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	17.04 %	1. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015	1 dokumen	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	100 %	Rp. 178.400.000,00	Rp. 196.762.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Musrenbang RKPD Perubahan Tahun 2015	1 kegiatan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.21.069	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	17.04 %	1. Aplikasi Jogja Plan	1 Paket	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	100 %	Rp. 195.000.000,00	Rp. 213.730.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Pelatihan Aplikasi Jogja Plan	1 Kali						
1.06.1.06.01.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN										Rp. 1.617.144.500,00	Rp. 970.286.900,00		
1.06.1.06.01.22.059	Perencanaan Pembangunan Subid Pertanian & Kelautan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	4.06 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian & Kelautan	1 dokumen	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Perekonomian	100 %	Rp. 859.154.000,00	Rp. 970.286.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2.Kajian Masterplan Perencanaan Wilayah PANSELA	1 dokumen						
1.06.1.06.01.22.060	Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	4.06 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha	1 dokumen	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang	100 %	Rp. 350.582.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Perekonomian					
							2. Kajian Pengembangan Indikator Pembangunan Subbidang Dunia Usaha	1 dokumen						
1.06.1.06.01.22.061	Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	4.06 %	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan	1 laporan	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Perekonomian	100 %	Rp. 202.943.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.22.062	Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	4.06 %	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Subbid Dunia Usaha	1 laporan	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Perekonomian	100 %	Rp. 160.741.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.22.064	Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	4.06 %	Laporan Koordinasi RAD PG DIY	1 laporan	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Perekonomian	100 %	Rp. 43.724.500,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.23	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA										Rp. 1.467.444.700,00	Rp. 0,00		
1.06.1.06.01.23.015	Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10.55 %	Dokumen Laporan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 dokumen	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sosial Budaya	100 %	Rp. 250.691.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.23.041	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10.55 %	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	1 dokumen	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sosial Budaya	100 %	Rp. 386.687.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.23.042	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10.55 %	Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Kesra	1 dokumen	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sosial Budaya	100 %	Rp. 347.828.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.23.043	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10.55 %	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	1 laporan	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sosial Budaya	100 %	Rp. 191.330.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.23.044	Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10.55 %	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra	1 laporan	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sosial Budaya	100 %	Rp. 205.473.700,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.23.046	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	10.55 %	Dokumen Laporan Percepatan Pencapaian MDGs DIY	1 dokumen	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sosial Budaya	100 %	Rp. 85.435.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.26	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN										Rp. 1.845.450.000,00	Rp. 0,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SARANA PRASARANA													
1.06.1.06.01.26.001	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1.62 %	1. Terfasilitasinya kegiatan tim PPSP dan tim pengadaan	1 tim	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sarana dan Prasarana	100 %	Rp. 599.917.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM	1 dokumen						
							3. Kajian nilai tambah pembangunan infrastruktur terhadap PDRB DIY	1 Paket						
1.06.1.06.01.26.002	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1.62 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sarana dan Prasarana	100 %	Rp. 385.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Dokumen Kajian Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen						
1.06.1.06.01.26.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan,	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka	1.62 %	Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM	1 laporan	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan	100 %	Rp. 199.275.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tata Ruang, Permukiman dan ESDM				menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana				Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sarana dan Prasarana					
1.06.1.06.01.26.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1.62 %	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup	1 laporan	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sarana dan Prasarana	100 %	Rp. 113.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.26.007	Pembinaan Penataan Ruang Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1.62 %	1. Terfasilitasinya Kegiatan Tim BKPRD DIY	1 tim	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sarana dan Prasarana	100 %	Rp. 299.620.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang kepada Kabupaten/Kota	1 tahun						
							3.Terselenggaranya Workshop Penataan Ruang	4 Kali						
1.06.1.06.01.26.008	Peningkatan dan Pengelolaan Sumberdaya Air	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian	1.62 %	1. Penyadaran Publik	1 Kali	Dukungan terhadap Pengurangan	100 %	Rp. 128.638.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan		Daerah Meningkatkan		sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana				Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Reaslisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sarpras				Daerah	
							2. Pengadaan TPM/KTPM	5 Orang						
1.06.1.06.01.26.009	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)-APBD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	1.62 %	1. Operasionalisasi PPMU	12 bulan	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sarana dan Prasarana	100 %	Rp. 120.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Laporan Keuangan WISMP	6 dokumen						
1.06.1.06.01.27	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN										Rp. 1.722.183.600,00	Rp. 0,00		
1.06.1.06.01.27.001	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik	1 dokumen	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Pemerintahan	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 dokumen						
1.06.1.06.01.27.002	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	1 dokumen	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Pemerintahan	100 %	Rp. 607.276.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2.Dokumen Roadmap Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	1 dokumen						
1.06.1.06.01.27.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Subbidang Aparatur, Hukum dan Politik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	1.Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik	1 laporan	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Pemerintahan	100 %	Rp. 215.870.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di DIY	1 laporan						
1.06.1.06.01.27.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di	0.81 %	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	1 laporan	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka	100 %	Rp. 174.037.600,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					bidang pemerintahan				Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Pemerintahan					
1.06.1.06.01.27.005	Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) di DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	1. Terlaksananya workshop pengembangan IDI di DIY	1 Kali	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Pemerintahan	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya workshop Pengukuran Ketahanan Nasional di DIY	1 Kali						
							3. Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, keterpaduan perencanaan dalam pengembangan IDI di DIY	1 Kali						
							4. Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, keterpaduan pengukuran ketahanan nasional di DIY	1 Kali						
1.06.1.06.01.27.007	Fasilitasi Pemberantasan Korupsi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	1. Tersusunnya Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di DIY	1 dokumen	Dukungan 6,56% terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Pemerintahan					
							2. Terlaksananya FGD Pesiapan Penyusunan RAD-PK	1 Kali						
							3. Terlaksananya workshop Penyusunan RAD-PK	1 Kali						
							4. Terlaksananya workshop Kampanye dan Konsultasi Publik	1 Kali						
1.06.1.06.01.27.008	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	0.81 %	1. Dokumen Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Pemerintahan	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya workshop Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	1 Kali						
1.06.1.06.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp. 1.981.704.550,00	Rp. 2.151.973.500,00		
1.06.1.06.01.28.001	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	1.Draft Laporan LAKIP	1 dokumen	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Buku Laporan LAKIP	1 dokumen						
1.06.1.06.01.28.002	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan	84 %	1. Buku Pidato Penghantaran	1 dokumen	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian	100 %	Rp. 299.995.000,00	Rp. 329.994.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					terhadap sasaran RPJMD				sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD					
							2.FGD LKPJ	1 kegiatan						
							3. Buku LKPJ	1 dokumen						
							4. Lampiran LKPJ (lampiran program/kegiatan, catatan rekomendasi DPRD)	1 dokumen						
							5. Pidato Paripurna	1 dokumen						
1.06.1.06.01.28.003	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	1. Laporan Monev TW I-4	4 dokumen	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	100 %	Rp. 244.255.900,00	Rp. 268.682.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Buku Raport SKPD	4 dokumen						
							3. Buku Tahunan Monev	1 dokumen						
							4. Laporan Monev Dana Keistimewaan	1 dokumen						
1.06.1.06.01.28.005	Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	Laporan Pelaksanaan Program Strategis/Unggulan	1 laporan	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	100 %	Rp. 164.854.400,00	Rp. 181.340.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.06.1.06.01.28.006	Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan APBD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	Tersedianya Buku Panduan Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	100 %	Rp. 68.855.500,00	Rp. 75.741.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.1.06.01.28.007	Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	1. Buku Penetapan Kinerja Tahun 2014	1 dokumen	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 83.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Buku Laporan Monitoring Penetapan Kinerja	1 laporan						
1.06.1.06.01.28.008	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	Buku Evaluasi EKPD (Rangking Kinerja Kab/Kota)	1 dokumen	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	100 %	Rp. 137.499.900,00	Rp. 151.250.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.28.010	Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Kepada Kabupaten/Kota Dan Masyarakat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	Laporan Monev Bantuan Keuangan (Kemiskinan, Hibah Bansos, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota)	1 laporan	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	100 %	Rp. 189.968.400,00	Rp. 208.965.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.06.1.06.01.28.013	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	1. Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RPJMD DIY	1 laporan	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	100 %	Rp. 525.820.000,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD DIY	1 laporan						
							3. Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renstra SKPD DIY	1 laporan						
							4. Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD DIY	1 laporan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							5. Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kab./Kota	1 laporan						
							6. Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kab./Kota	1 laporan						
1.06.1.06.01.28.014	Pengembangan Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan pembangunan Daerah	1 sistem	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	100 %	Rp. 66.112.000,00	Rp. 72.723.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.28.016	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan dan TEPPA Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	84 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan dan TEPPA Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota	1 laporan	Dukungan terhadap persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	100 %	Rp. 59.343.450,00	Rp. 65.278.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
1.23	Statistik													
1.23.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
1.23.1.06.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH										Rp. 1.360.000.000,00	Rp. 1.518.000.000,00		
1.23.1.06.01.16.001	Pengolahan, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Data Statistik Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	97 %	1. Buku Analisis PDRB DIY	60 buku	Dukungan terhadap persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	100 %	Rp. 930.000.000,00	Rp. 1.023.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Buku Analisis ICOR Sektoral DIY	60 buku						
							3. Buku Analisis Ekonomi Makro DIY	60 buku						
							4. Updating Database Rumah Tangga Sasaran	1 Paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.193.703.400,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.23.1.06.01.16.003	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	97 %	1. Data Perencanaan	60 buku	Dukungan terhadap persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	100 %	Rp. 430.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
							2. Profil Daerah	50 buku						
							3. DDA	100 buku						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.07	Perhubungan													
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika													
1.07.1.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.668.385.165,00	Rp. 11.000.000,00		
1.07.1.07.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Perangko (200 buah) 2. Materai (1.000 buah) 3. Pengiriman Surat (150 kali)	3 item	Dukungan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%	100 %	Rp. 10.555.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Jasa Listrik 2. Air 3. Telepon	12 bulan	Dukungan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%	100 %	Rp. 554.220.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Spanduk (10 buah) 2. Publikasi Media Cetak (1 kali) 3. Publikasi Harhubnas (1 kali) 4. Sewa Meja (50 buah) 5. Sewa Kursi (200 buah) 6. Sewa Tenda (6 buah) 7. Sewa Soundsytem (2 kali)	7 jenis	Dukungan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%	100 %	Rp. 10.875.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Dinas: 1. Kendaraan Roda 2 : 39 unit 2. Kendaraan Roda 4 : 24 unit 3. Kendaraan Roda 6 : 1 unit	3 jenis	Dukungan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%	100 %	Rp. 22.788.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	Dukungan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100 %	100 %	Rp. 107.700.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100 %	100 %	Rp. 233.656.200,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor Dinas : 53 Jenis Trans Jogja :	53 jenis	Dukungan Penyediaan Alat Tulis Kantor terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%	100 %	Rp. 96.499.990,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang Cetakan Dan Penggandaan	12 bulan	Dukungan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100 %	100 %	Rp. 74.999.925,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat listrik dan elektronik	14 jenis	Dukungan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar100 %	100 %	Rp. 9.247.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan Rumah Tangga Dinas	1 Paket	Dukungan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100 %	100 %	Rp. 1.999.050,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat kabar 2. Majalah	12 bulan	Dukungan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%	100 %	Rp. 97.740.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan Mnuman	12 bulan	Dukungan Penyediaan Makanan Dan Minuman terhadap Penyediaan Makanan Dan Minuman sebesar 100 %	100 %	Rp. 84.750.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Rapat Koordinas dan Konsultasi keluar daerah	12 bulan	Dukungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%	100 %	Rp. 863.205.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- jasa keamanan kantor dinas dan palza informasi - tenaga outsourcing ATCS - penjaga palang pintu Kereta Api - Jasa Operor Jembatan Timbang	4 Paket	Dukungan Penyediaan Jasa Keamanan terhadap Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100 %	100 %	Rp. 1.500.149.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.695.501.100,00	Rp. 0,00		
1.07.1.07.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor + belanja modal KIP + KPID	1 Paket	Dukungan terhadap sarana dan prasarana kantor	100 %	Rp. 990.482.800,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	- pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - rehab gedung kantor	2 Paket	Dukungan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terhadap Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur sebesar 100 %	100 %	Rp. 2.068.361.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1 Paket	Dukungan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terhadap Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar 100 %	100 %	Rp. 1.340.275.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1 Paket	Dukungan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor terhadap Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur sebesar 100%	100 %	Rp. 19.900.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1 Paket	Dukungan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor terhadap Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur sebesar 100%	100 %	Rp. 114.800.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.02.032	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pengelolaan Web 2. Pemeliharaan LAN/ Website	2 Paket	Dukungan pemeliharaan jaringan sistem informasi sebesar % terhadap tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 20%	100 %	Rp. 161.682.300,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 174.559.700,00	Rp. 0,00		
1.07.1.07.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2 dokumen	Dukungan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD terhadap Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapalan kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100 %	100 %	Rp. 6.390.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 dokumen	Dukungan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD terhadap Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100 %	100 %	Rp. 35.072.100,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	- Rencana Program dan Kegiatan Dinas - Pengembangan IT Dinas	2 dokumen	Dukungan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi terhadap Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100 %	100 %	Rp. 114.370.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100 %	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas	1 dokumen	Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100 %	Rp. 18.727.600,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SKPD		Daerah Meningkatkan	Informatika	manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				terhadap Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD sebesar 100 %				dan Informatika	
1.07.1.07.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN										Rp. 2.196.149.000,00	Rp. 0,00		
1.07.1.07.01.15.010	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Peningkatan pelayanan transporasi antar moda	40 %	1) Koordinasi ruislagh lanjutan aset di Bandara Adi Sutjipto (1 paket) 2) Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo (1 paket) 3) Rapat Kerja Komite FAL Bandara Adisutjipto (1 paket)	3 Paket	Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara sebesar 19,78 % terhadap persentase peningkatan pelayanan transportasi antar modasi sebesar 40%	100 %	Rp. 196.149.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.15.018	Pembangunan Sarana dan Prasarana bus Trans Jogja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Kota Yogyakarta Banguntapan Berbah Depok Kalasan Mlati Prambanan	Peningkatan pelayanan transporasi antar moda	40 %	1. SMTS On Bus (29 unit) 2. Pengembangan Halte (7 lokasi) 3. Halte Portable (20 unit) 4. Sandaran Sepeda (12 unit)	4 Paket	Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Trans Jogja sebesar 78,2 % terhadap persentase Peningkatan Pelayanan Transportasi Antar Moda sebesar 40 %	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN										Rp. 2.902.530.882,00	Rp. 0,00		
1.07.1.07.01.16.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	1. Pemeliharaan Komputer 2. Servis dan Kalibrasi Jembatan Timbang 3. Servis	4 Paket	Dukungan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang sebesar 18,48% terhadap berfungsinya sarana dan	100 %	Rp. 412.204.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan				Diesel dan Peralatan Pendukung lainnya 4. Fasilitas pendukung Operasional Jembatan Timbang		prasarana perhubungan					
1.07.1.07.01.16.005	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Depok Girisubo Kokap Panggang Rongkop Sanden Srandakan Tanjungsari Temon	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	1. 14 SBNP - 12 bln 2. 3 Speedboat - 12 bln 3. 3 Garasi Apung - 12 bln 4. 1 Dermaga LLASDP - 12 bln 5. 1 Ponton Apung - 12 bln 6. 8 SSB - 12 bln	6 Paket	Dukungan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana laut dan ASDP sebesar 8,07 % terhadap persentase sarana dan prasarana perhubungan sebesar 100 %	100 %	Rp. 254.306.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.16.006	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	DIY	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	1. APILL (48 lokasi) 2. Warning Light (20 lokasi) 3. PJU (34 unit) 4. Rambu LL (200 buah) 5. Rehab Berat APILL (3 lokasi) 6. Pengecatan Tiang APILL (48 lokas) 7. Penjagaan Gangguan APILL (12 bln)	7 Paket	Dukungan rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas sebesar 38,03% terhadap presentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik sebesar 100%	100 %	Rp. 976.986.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.16.007	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Angkutan Umum Buy the Service	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Kota Yogyakarta Banguntapan Depok Kalasan Mlati Prambanan	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	1. Pemeliharaan SMTS Halte (112 unit) dan SMTS on Bus (69 unit) - 12 bln 2. Pemeliharaan Halte 112 lokasi - 12 bln 3. Kebersihan Halte 112 lokasi -bln	3 Paket	Dukungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Angkutan Umum Buy the Service sebesar 41,9 % terhadap prosentase Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan sebesar 100%	100 %	Rp. 1.235.052.882,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.16.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan KA	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Berbah Depok	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	Pemeliharaan Early Warning	1 Paket	Dukungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan kereta api sebesar 0,69% terhadap berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan sebesar 100 %	100 %	Rp. 23.981.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN										Rp. 70.115.713.770,00	Rp. 900.000.000,00		
1.07.1.07.01.17.011	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38.57 %	1) Pengukuran kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi, 2) Pengukuran Kinerja Angkutan AKDP dan Perbatasan	10 Buku Laporan	Dukungan Pengumpulan Dan Analisis Database Pelayanan Angkutan sebesar 0,46 % terhadap capaian load faktor angkutan umum perkotaan sebesar 33 %	100 %	Rp. 284.129.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.17.012	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38.57 %	Rencana Induk Perkeretaapian DIY	1 Paket	Dukungan Perencanaan Pengembangan Pelayanan Angkutan sebesar 0,46 % terhadap capaian load faktor angkutan umum perkotaan sebesar 38.57 %	100 %	Rp. 378.326.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.17.013	Fasilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38.57 %	1. Kendaraan Umum Tertib Ijin (3241 Kendaraan) 2. Publikasi Media Massa Tentang Tertib ijin (10 kali) 3. Sosialisasi di Televisi (1 paket) 4. Pemeliharaan Mesin Anjungan Perijinan Mandiri (1 paket)	4 paket pekerjaan	Dukungan Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan sebesar 0,26% terhadap capaian load faktor angkutan umum perkotaan sebesar 38,57%	100 %	Rp. 157.707.500,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.17.020	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy the Service	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Kota Yogyakarta Banguntapan Berbah Depok Kalasan Mlati Prambanan	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38.57 %	1) Operasional Trans Jogja 2) Promosi	12 %	Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy the Service sebesar 96,1 % terhadap persentase Load Factor Penumpang Angkutan Umum sebesar 38.57 %	100 %	Rp. 69.073.739.900,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.17.021	Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat,	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan	Load factor penumpang angkutan	38.57 %	Sosialisasi Trayek Perkotaan yang terintegrasi	1 Paket	Dukungan informasi tentang trayek Angkutan Perkotaan	100 %	Rp. 54.132.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perkotaan		terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Informatika	umum perkotaan yogyakarta		dengan Angkutan Feeder						dan Informatika	
1.07.1.07.01.17.022	Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum AKDP	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38.57 %	Sosialisasi Trayek AKDP yang terintegrasi dengan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan	1 Paket	Dukungan perencanaan peningkatan pelayanan angkutan AKDP sebesar 0,72% terhadap capaian load factor angkutan umum perkotaan sebesar 38.57%	100 %	Rp. 51.165.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.17.026	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Buy the Service	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	38.57 %	Evaluasi Kinerja Trans Jogja	10 Buku Laporan	Dukungan terhadap capaian load factor 38.57 %	100 %	Rp. 116.513.870,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN										Rp. 4.449.490.000,00	Rp. 0,00		
1.07.1.07.01.18.007	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan Park and Ride	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Banguntapan Kasihan Ngampilan Semin	Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi Di DIY	44.17 %	1) DED Transfer Point dan Park and Ride 2) Penambahan Fasilitas Transfer Point 3) Pembangunan Terminal Semin Kabupaten Gunungkidul	2 %	Dukungan terhadap capaian Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan 44.17 %	100 %	Rp. 4.449.490.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS										Rp. 3.350.000.000,00	Rp. 0,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.19.003	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Samigaluh	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	84 %	terpasangnya pagar pengaman jalan di Puncak Suralaya	1 Paket	Dukungan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan sebesar 13,14% terhadap prosentase peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan sebesar 84%	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.19.004	Pengadaan dan Pemasangan LPJ	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dlingo Galur Godean Imogiri Kalibawang Pakem Piyungan Samigaluh Semanu Tepus	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	84 %	1. Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya (31 unit) 2. Lampu Penerangan Jalan (35 unit)	2 Paket	Dukungan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) sebesar 27,76 % terhadap presentase fasilitas keselamatan lalu lintas sebesar 84 %	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.19.006	Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	84 %	1. Terselenggaranya angkutan lebaran,natal dan tahun baru yang lancar dan aman 2. Dialog interaktif di Televisi	2 Paket	Dukungan pengaturan dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru sebesar 6,21% terhadap prosentase peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan sebesar 84 %	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.19.019	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Godean Karangmojo Pakem Panggang Samigaluh Sanden Sewon	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	84 %	1. Rambu (149 unit) 2 .Warning light TS (7 unit) 3. Traffic cone (30 unit) 4. Deliniator (200 buah) 5. Paku jalan (200 buah) 6. RPPJ (10 unit) 7. Pelican crossing (2 unit) 8. Cermin tikungan (30 unit)	8 Paket	Dukungan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebesar 17,65% terhadap prosentase peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan sebesar 84%	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR										Rp. 79.527.000,00	Rp. 0,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.20.001	Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100 %	1) sertifikat rancang bangun kendaraan; 2) sertifikat penghapusan kendaraan bermotor dinas	2 Paket	Dukungan Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor sebesar 25 % terhadap Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	100 %	Rp. 28.139.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.20.002	Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100 %	Penilaian 5 unit PKB	1 Paket	Dukungan Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 75 % terhadap Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	100 %	Rp. 51.388.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.21	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS										Rp. 2.086.816.250,00	Rp. 0,00		
1.07.1.07.01.21.001	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	ruas jalan Nasional dan Provinsi	Penerapan manajemen lalulintas perkotaan berbasis kawasan	25.2 %	Kinerja ruas jalan dan simpang	10 Buku Laporan	Dukungan terhadap capaian kinerja Penerapan Manajemen Lalulintas Perkotaan berbasis kawasan sebesar 25.2 %	100 %	Rp. 318.941.375,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.21.004	Penetapan dan Pengaturan Manajemen Manajemen Lalulintas	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Godean Jetis	Penerapan manajemen lalulintas perkotaan berbasis kawasan	25.2 %	Penerapan Manajemen lalu Lintas Di Kawasan Simpang Jati Kencana - Simpang Demak Ijo	1 Paket	Dukungan terhadap capaian target kinerja Penerapan Manajemen Lalulintas Perkotaan berbasis kawasan sebesar 25.2 %	100 %	Rp. 1.767.874.875,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.22	PROGRAM PENGATURAN SISTEM SIMPANG BERSINYAL										Rp. 3.250.000.000,00	Rp. 0,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.07.1.07.01.22.001	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS Tenaga Surya Perkotaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Kota Yogyakarta	Pengendalian sistem simpang bersinyal di perkoataan yogyakarta	40 %	- 6 unit APILL ATCS Perkotaan - 4 unit kontrollerr ATCS	2 Paket	Dukungan Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS Tenaga Surya Perkotaan sebesar 100 % terhadap Pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta sebesar 40 %	100 %	Rp. 3.250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.23	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI										Rp. 1.835.549.200,00	Rp. 0,00		
1.07.1.07.01.23.001	Audit Keselamatan Jalan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Daerah Rawan Kecelakaan di jalan povinsi DIY	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	Hasil Audit Keselamatan Jalan di ruas Jalan Provinsi	1 Paket	Dukungan Studi DRK sebesar 1,23% terhadap kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.23.002	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan Tingkat DIY	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	100 peserta	dukungan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan Tingkat DIY terhadap Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	100 %	Rp. 73.280.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.23.003	Pembinaan dan Pemantauan Penyelenggaraan Perhubungan Udara	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	1. Pemantauan Angkutan orang, tarif, dan rute penerbangan (1 paket), 2. Penilikan dan penilaian sarana dan prasarana bandara Adisutjipto (1 paket), 3. Penilikan dan Pendataan Perusahaan EMPU	3 Paket	dukungan Pembinaan dan Pemantauan Penyelenggaraan Perhubungan Udara terhadap Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	100 %	Rp. 14.641.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							(20 perusahaan),							
							4. Data ketinggian bangunan dan terpantaunya bangunan di wilayah KKOP	12 unit bangunan di wilayah KKOP						
1.07.1.07.01.23.004	Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	1) Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan, 2) Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum	2 Paket	Dukungan Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum sebesar 8,16% terhadap kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	Rp. 149.096.200,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.23.005	Pembinaan dan Pemantauan Keselamatan Penerbangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	- Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan personil GSE - Pendataan Sarana dan Prasarana Keselamatan Sisi Darat	2 Paket	Dukungan Pembinaan dan Pemantauan Keselamatan Penerbangan sebesar 1,05 % terhadap presentase Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	100 %	Rp. 11.225.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.23.006	Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan jalan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	ruas jalan di Perkotaan Yogyakarta	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	1. Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang (5 lokasi) 2. Pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan secara mobile (120 kali)	2 Paket	Dukungan Pengendalian Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan sebesar 14,43% terhadap kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	Rp. 233.288.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.23.007	Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat	Berbah Kalasan Wates	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	1. Pengendalian terhadap angkutan barang 2. Penegakan hukum kelebihan muatan barang	2 Paket	Dukungan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang sebesar 68,12% terhadap kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	Rp. 1.015.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			di pedesaan											
1.07.1.07.01.23.008	Pembinaan dan Pemantauan Keselamatan Pelayaran	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Girisubo Srandakan Tanjungsari Temon	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	Kampanye Keselamatan Pelayaran terhadap kelompok nelayan : 10 kel. nelayan/pemilik kapal (120 org) , 10 Pokmawas (40 org) , 10 Kelompok Tim SAR (40 org)	1 Paket	Dukungan Pembinaan dan Pemantauan Keselamatan Pelayaran sebesar 2,43% terhadap kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	100 %	Rp. 39.018.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.25	Komunikasi dan Informatika													
1.25.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika													
1.25.1.07.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA										Rp. 2.891.447.750,00	Rp. 0,00		
1.25.1.07.01.15.003	Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	1) Sosialisasi Plaza melalui website (12 bulan) 2) Leaflet (2000 lembar) 3) Booklet (2000 lembar) 4) Buku (1000 eksemplar) 5) Tersedianya konten layanan dan materi kios informasi (12 bulan)	5 Paket	Dukungan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi terhadap Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan sebesar 12 uusan/bidang	100 %	Rp. 175.252.750,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.25.1.07.01.15.006	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	1. Blueprint DGS Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah (1 dokumen) 2. Pemeliharaan Data Center (12 bulan) 3. Audit TIK dan Pengembangan E-Gov Pemda DIY	3 paket pekerjaan	Dukungan terhadap capaian target Peningkatan Layanan Unggulan DGS per urusan	100 %	Rp. 903.066.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.25.1.07.01.15.016	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Dinas Perhubungan,	Peningkatan layanan	12 urusan/bidang	Bimbingan Teknis Pengadaan	1 Paket	Dukungan terhadap capaian target kinerja	100 %	Rp. 43.033.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan,	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Jasa secara Elektronik	Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan	Komunikasi dan Informatika	unggulan DGS per urusan		Barang dan Jasa Secara Elektronik		Peningkatan Layanan Unggulan DGS per urusan sebesar 12 urusan/bidang				Komunikasi dan Informatika	
1.25.1.07.01.15.017	Kerjasama Pengembangan e-Government	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	1. Forum Koordinasi E-Government se DIY 2. Forum Koordinasi LPSE se DIY	2 paket pekerjaan	Dukungan terhadap capaian target kinerja Peningkatan Layanan Unggulan DGS per urusan sebesar 12 urusan/bidang	100 %	Rp. 70.096.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.25.1.07.01.15.018	Fasilitasi Kelembagaan KIP & KPID	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	- Fasilitasi kegiatan KIP - Fasilitasi kegiatan KPID	2 paket (12 bulan)	dukungan Fasilitasi Kelembagaan KIP & KPID	100 %	Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.25.1.07.01.19	PROGRAM FASILITASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI DAN FREKUENSI										Rp. 1.064.768.500,00	Rp. 200.000.000,00		
1.25.1.07.01.19.001	Pembinaan dan Pendataan Penyelenggaraan Jasa Titipan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	1. Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Jasa Titipan (1 paket) 2. Data dan Laporan Penyelenggaraan Jasa Titipan (1 dokumen) 3. Sosialisasi di Bidang Pos (1 kali, 1 hari, 50 org)	3 Paket	Dukungan Pembinaan Dan Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan sebesar 1,29% terhadap penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat sebesar 70 %	100 %	Rp. 12.672.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.25.1.07.01.19.002	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	1. Data dan Laporan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomuikasi (1 dokumen) 2. Data dan Laporan Radio Siaran dan Televisi Swasta Lokal (1 dokumen) 3. Data dan Laporan IAR dan IKRAP (1 dokumen)	3 Paket	Dukungan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi sebesar 1,14% terhadap penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	100 %	Rp. 8.725.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.25.1.07.01.19.004	Penyebarluasan Informasi Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan	Penyebarluasan informasi pembangunan	70 %	1) Sosialisasi melalui : 1. Tatap Muka (6 kali) 2.	2 Paket	Dukungan Penyebarluasan Informasi Daerah sebesar 27,88%	100 %	Rp. 507.076.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	Informatika	bagi masyarakat		Radio (24 kali) 3. Televisi (8 kali) 4. Media Pertunra (5 kali) 5. MCAP (12 kali) 6. Siaran Keliling (12 kali) 2) Booklet (1000 lembar) dan Leaflet (1000 lembar)		terhadap penyebaran informasi pembangunan bagi masyarakat sebesar 70 %				dan Informatika	
							3) Anggota Komisi Informasi terpilih 2015-2019 (1 paket) 4) Bimtek bagi PPID SKPD se-DIY	2 Paket						
1.25.1.07.01.19.005	Keikutsertaan Dalam Pekan Informasi Nasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	Lomba Perunjukan Rakyat (Pertunra) tingkat DIY 2015 untuk mewakili DIY pada Pekan Informasi Nasional 2016	1 x festival	Dukungan keikutsertaan dalam Pekan Informasi Nasional sebesar % terhadap penyebaran informasi pembangunan bagi masyarakat	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
							Mengikuti festival Pertunra tingkat nasional pada Pekan Informmasi Nasional 2015	1 x pentas						
							Pertunjukan rakyat melalui media DVD untuk seleksi Pekan Informasi Nasional 2015	1 x rekaman						
1.25.1.07.01.19.006	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	Pameran Plaza Informasi di PRJ	1 Paket	Dukungan Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat sebesar 70%	100 %	Rp. 196.901.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.25.1.07.01.19.007	Layanan Informasi Publik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	70 %	1. Layanan Informasi Publik (Warnet, Hot Spot, Call Center)(12 bulan) 2. Layanan Pustaka (12 bulan) 3. Aplikasi Data Base Call	8 Paket	Dukungan Layanan Informasi Publik terhadap Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat sebesar 70%	100 %	Rp. 139.393.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Center Plaza Informasi (1 paket) 4. Koran dan majalah untuk masyarakat (10 koran, 2 majalah)							
1.25.1.07.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 7.389.898.100,00	Rp. 0,00		
1.25.1.07.01.20.001	Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro	Penguatan jaringan IT di Pemda DIY	80 %	1. Langganan Bandwidth Internet (250 Mbps) 2. Pemeliharaan Jaringan Komputer Pemda DIY (12 bulan) 3. Peralatan Jaringan komputer (1 paket) 4. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Fiber Optic (1 paket	4 Paket	Dukungan terhadap capaian Penguatan Jaringan IT di Pemda DIY sebesar 80 %	100 %	Rp. 6.979.222.600,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pamong Praja Sekretariat DPRD										
1.25.1.07.01.20.002	Pemyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan	Penguatan jaringan IT di Pemda DIY	80 %	Layanan LPSE	12 bulan	Dukungan terhadap capaian Penguatan Jaringan IT di Pemda DIY sebesar 80 %	100 %	Rp. 410.675.500,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 110.150.336.417,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.08	Lingkungan Hidup													
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup													
1.08.1.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.057.950.000,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Terlaksananya pembelian meterai Rp. 6.000,-	1000 buah	2. Terlaksananya pembelian meterai Rp. 3.000,-	700 buah	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
									3. Terlaksananya kebutuhan paket / pengiriman	12 bulan				
									Kelancaran Pelaksanaan Tugas SKPB	100 %				
1.08.1.08.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Terpenuhinya kebutuhan jasa internet, telepon, hosting website	12 bulan	Meningkatnya kelancaran kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BLH DIY	100 %	Rp. 220.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Terpenuhinya kebutuhan jasa air	12 bulan						
							3. Terpenuhinya kebutuhan jasa listrik	12 bulan						
1.08.1.08.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan roda 4	9 unit	Meningkatnya kelancaran jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	100 %	Rp. 18.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan roda 2	8 unit						
1.08.1.08.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	Terkelolanya administrasi keuangan dan kepegawaian sesuai aturan	100 %	Rp. 34.550.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Pengelolaan administrasi kepegawain	12 bulan						
1.08.1.08.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Terbayarnya honor pengelolaan sampah	12 bulan	Meningkatnya kenyamanan lingkungan tempat bekerja	100 %	Rp. 180.800.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Terbayarnya biaya cleaning service	1 Paket						
							3. Terbayarnya biaya pengurusan IPAL Kantor BLH DIY	2 Kali						
							4. Terbayarnya honor jasa pengamanan dan pengemudi kantor	12 bulan						
							4. Terbayarnya honor jasa tenaga administrasi kearsipan	12 bulan						
1.08.1.08.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 pkt	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi BLH DIY	100 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Tersedianya barang cetakan	15 jenis	Mendukung kelancaran kegiatan/operasional kantor	100 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya penggandaan surat-surat, buku pedoman/peraturan	120000 lembar						
1.08.1.08.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	15 jenis	Berfungsinya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	24 jenis	Mendukung kelancaran kegiatan/operasional kantor	100 %	Rp. 13.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Tersedianya bahan bacaan	3 SKH dan 2 Majalah	Meningkatnya ilmu pengetahuan pegawai BLH DIY	100 %	Rp. 16.600.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya buku pengetahuan lingkungan hidup	1 Paket						
							3. Tersedianya buku peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	1 pkt						
1.08.1.08.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya jamuan rapat	4000 Orang	Mendukung kelancaran kegiatan/operasional kantor	100 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga di dalam dan luar DIY	1 tahun	Peningkatan kinerja jejaring kerja SKPD BLH DIY	100 %	Rp. 440.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.671.000.000,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.02.006	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Tersedianya kendaraan operasional dinas roda 4 (3 unit)	3 unit	Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD	100 %	Rp. 620.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	25 jenis	Mendukung kelancaran kegiatan/operasional kantor	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.02.010	Pengadaan Meubelair	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	100 %	Tersedianya Meubelair Kantor BLH DIY	5 jenis	Meningkatnya kelancaran kegiatan SKPD	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					aparatur									
1.08.1.08.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Terlaksananya pemeliharaan instalasi air minum	12 bulan	Terpeliharanya kenyamanan kerja pegawai BLH DIY	100 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya pemeliharaan jaringan listrik	12 bulan						
							3. Terlaksananya pengecatan gedung	12 bulan						
							4. Terlaksananya pemeliharaan taman	12 bulan						
							5. Terlaksananya pemeliharaan resapan air hujan	12 bulan						
							6. Terlaksananya perbaikan talang	12 bulan						
							7. Terlaksananya Perbaikan Sekat Ruangan Kantor	12 bulan						
							8. Terlaksananya Perbaikan Pintu Kantor	12 bulan						
							9. Terlaksananya Perbaikan Pintu Kaca	12 bulan						
							10. Terlaksananya Perbaikan Telepon	12 bulan						
							11. Terlaksananya Perbaikan Meja Kerja	12 bulan						
							12. Terlaksananya Perbaikan Kursi	12 bulan						
							13. Terlaksananya Perbaikan Eternit	12 bulan						
							14. Terlaksananya Perbaikan Lantai	12 bulan						
1.08.1.08.01.02.024	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	1. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4	12 bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas pegawai BLH DIY	100 %	Rp. 375.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		sarana prasarana aparatur		2. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan roda 2	12 bulan						
							3. Terpeliharanya genset	12 bulan						
1.08.1.08.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	12 bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas pegawai BLH DIY	100 %	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 pkt	Peningkatan kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 216.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 185.000.000,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	1. Mengikuti Kursus Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	1 Paket	Meningkatnya ilmu pengetahuan pegawai BLH DIY	100 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Mengikuti Pelatihan Mutu Laboratorium	1 Paket						
							3. Mengikuti Pelatihan Manajemen Mutu	1 Paket						
							4. Mengikuti Pelatihan/Bimtek Bidang LH/Sistem Informasi	1 Paket						
1.08.1.08.01.05.003	Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang- undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Mengikuti rapat kerja/seminar /lokakarya/pelatihan	1 pkt	Meningkatnya ilmu pengetahuan pegawai BLH DIY	100 %	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.05.033	Pengembangan ISO	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	1. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1 dokumen	Peingkatan akutabilitas kinerja SKPD BLH DIY	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Workshop Manajemen ISO 9001:2008	2 kali @ 40 orang						
1.08.1.08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 107.000.000,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Laporan LAKIP SKPD BLH Tahun 2014	1 dokumen	Peningkatan akutabilitas kinera SKPD BLH DIY	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Laporan Tahunan Kegiatan BLH DIY Tahun 2014	1 dokumen						
1.08.1.08.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1.Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD BLH DIY	100 %	Rp. 32.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2.Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen						
1.08.1.08.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Renja SKPD BLH Tahun 2016	1 dokumen	Tersedianya dokumen kinerja perencanaan SKDP BLH	100 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. FGD Penyusunan Prog/Keg BLH DIY 2016 : 2 Kali/30 org	2 kali @ 30 orang						
							3. Penyusunan DPA SKPD BLH Tahun 2016	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.06.019	Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Lingkungan Hidup	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Laporan Monev SKPD BLH DIY Tahun 2015	1 dokumen	Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD BLH DIY	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										Rp. 538.797.975,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.15.005	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	380 unit usaha	1. Pembinaan Pengelolaan Sampah	19 Kali/5 kab/kota	Dukungan 59% terhadap tercapainya target RPJMD sumber pencemar yang dibina sebesar 360 unit usaha	100 %	Rp. 219.070.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Pengadaan Peralatan Komposter	300 unit						
							3. Pembinaan Pengelolaan sampah bagi pelaku usaha	8 Kali @ 50 orang						
1.08.1.08.01.15.011	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	380 unit usaha	1. Workshop Pengembangan Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri	5 Kali/@50 oang	Dukungan terhadap tercapainya target RPJMD sumber pencemar yang dibina sebesar 360 unit usaha	100 %	Rp. 319.727.975,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Inventarisi Timbunan Sampah DIY	1 dokumen						
							3. Pembinaan Pengelolaan sampah bagi pelaku usaha	8 Kali @ 50 orang						
1.08.1.08.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 5.636.956.415,00	Rp. 0,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.16.001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Evaluasi Kebersihan dan Keteduhan Lingkungan (K2LH)	1 Kali/5 kab/kota	Dukungan terhadap tercapainya tearget RPJMD peningkatan kualitas lingkungan	100 %	Rp. 82.723.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Pemantauan Adipura	1 kali/5kab/kota						
							3. Workshop Hasil Evaluasi K2LH	1 kali/30 orang						
							4. Workshop Hasil Pemantauan 1 Adipura	1 kali/3 orang						
1.08.1.08.01.16.002	Koordinasi Penilaian Langit Biru	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1.Rapat Kerja(RAKER) Prolabir	3 kali/@30 orang	Tercapainya pemahaman pelaku usaha dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara	100 %	Rp. 293.945.415,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2.Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	1 kali/@ 30 orang						
							3.Rapat(RAKER) Progam Perlindungan Lapisan Ozon	1 kali/@ 30 orang						
							4.Bimbingan Teknis Pemakaian Refrigeran	1 kali/@30 orang						
1.08.1.08.01.16.004	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber bahan perusak ozon .	80 Usaha/Kegiatan	Terwujudnya ketaatan hukum lingkungan bagi pelaksana kegiatan	100 %	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Ekspos hasil pengawasan	1 kali/@40 orang wakil perusahaan						
1.08.1.08.01.16.007	Pengkajian Dampak Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1.Penilaian dokumen Amdal UKL-UPL dan DPL dan Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan /Rekomendasi	5 dokumen	Penilaian dokumen AMDAL	100 %	Rp. 94.500.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan DPL							
1.08.1.08.01.16.010	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunugkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Workshop Penelolaan Prokasih/Superkasih	2 kali/@30 orang	Tewujudnya peningkatan kualitas air sungai sasaran Prokasih/Superkasih	100 %	Rp. 394.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Pembinaan Teknis Prokasih Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	2 kali/@30 orang						
							3. Sarasehan Prokasih Bagi Masyarakat	8 kali/@30 orang						
							4. Festival sungai mendukung kelesatarian LH	1 kal						
							5. Inventarisasi Sumber Pencemaran	5 Kabupaten/Kota						
							6. Pembuatan IPAL UKM Tahu	2 unit						
							7. Pembuatan perangkat lunak aplikasi sistem informa	1 Paket						
							8. Kompilasi dan input data sungai winongo ke dalam sistem informasi sungai	1 Paket						
1.08.1.08.01.16.018	Ekspose Hasil Pengelolaan LH	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Ekspose hasil percontohan pengelolaan Lingkungan Hidup	1 60 orang	Terwujudnya Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Program Pengelolaan LH oleh Berbagai Pihak	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Pembuatan leaflet Pengelolaan Lingkungan Hidup	4 judul/4000 lembar						
							3. FGD Penyusunan Materi Percontohan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat	1 kali/25 orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Publikasi melalui media Televisi	1 Paket						
							5. Profil pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat	1 dokumen						
1.08.1.08.01.16.020	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Data dan Informasi kualitas udara di DIY I	300 Sampel	Terimplementasinya data pemantauan kualitas udara untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	100 %	Rp. 106.615.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.16.021	Pemantapan Program Adiwiyata	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	2. Data dan Informasi kualitas udara dalam ruangan	10 Sampel			Rp. 139.964.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							1. Verifikasi Sekolah Adiwiyata (usulan mandiri)	6 sekolah/ DIY	Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	100 %				
							2. Verifikasi Sekolah Adiwiyata (usulan Nasional)	10 sekolah/ DIY						
							3. Verifikasi Sekolah Adiwiyata Provinsi DIY	5 kab/kota/DIY						
1.08.1.08.01.16.022	Pemantauan Kualitas Air	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	4. Pelatihan Pendidikan Lingkungan Hidup Untuk Guru	1 kali/ 30 org			Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							1. Pemantauan Kualitas Air Sungai	3 periode(150 titik)	Tersedianya data kualitas air sungai, laut dan air sumur	100 %				
							2. Pemantauan Kualitas Air Laut	2 periode(14 titik)						
							3. Pemantauan Kualitas Air Tanah	2 Periode						
1.08.1.08.01.16.023	Pembinaan Teknis Pelaksanaan A M D A L, U K L-U P L, Dan D P L	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	4. Workshop Status Mutu Air	2 kali/@30 orang			Rp. 65.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Dokumen AMDAL,UKL-UPL,dan	3 kali /@ 25 usaha	Meningkatnya pnaatan hukum lingkungan bagi para pelaku usaha/kegiatan	100 %				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Hidup		Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta			DPL							
							2. Sosialisasi AMDAL, UKL-UPL, dan DPL	5 kali /@ 50 usaha						
							3. Bimbingan teknis penyusunan laporan dokumen lingkungan	2 kali /@40 orang						
1.08.1.08.01.16.026	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Penegakan Hukum melalui pengadilan dan di luar pengadilan	8 kasus	Meningkatnya penataan hukum lingkungan bagi para pelaku usaha/kegiatan dan berbagai pihak	100 %	Rp. 89.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Bimbingan Teknis Penegakan Hukum sebanyak	1 kali/@35 orang						
1.08.1.08.01.16.027	Penerapan Eko Efisiensi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Sosialisasi Eko Efisiensi	5 kali/150 orang	Mendukung tercapainya penurunan pencemaran air dan udara BOD < 10 mg/l, COD 50 mg/l, CO < 50 ppm	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Bimbingan Teknis Penerapan Eko Efisiensi	1 kali/30 orang						
							3. Pendampingan Penerapan Eko Efisiensi	3 lokasi						
							4. Pembuatan Tas Percontohan ramah lingkungan	430 buah						
1.08.1.08.01.16.028	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Workshop Pengemb. Kelemb. Pengel. LH kaws. Sungai	10 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Sungai	100 %	Rp. 74.472.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Lomba Lukis Anak 2015	1 Kali						
							3. Cetak Kalender 2016 Lomba Lukis 2015	300 eksp						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.16.029	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1.Pengadaan Bahan Kimia	1 Paket	Terwujudnya Pengujian Laboratorium BLH Provinsi DIY acuan, terjaganya kualitas air dan udara : BOD<10, COD<50, CO<15	100 %	Rp. 320.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2.Tersedia Penunjang Laboratorium	1 Paket						
							3.Kalibrasi Peralatan Air dan Udara : 1 kali	1 Kali						
							4.Pengadaan Peralatan Air : 1 paket	1 Paket						
							5. Inhouse Training :1 kali	1 Kali						
1.08.1.08.01.16.031	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Sarasehan Laboratorium Lingkungan	1 Kali	Terwujudnya Pengujian Laboratorium BLH Provinsi DIY sesuai Acuan, terjaganya Kualitas Air dan UDara : BOD<10, COD<50, CO<15	100 %	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Audit Laboratorium	5 Lab						
							3. Uji Banding antar Laboratorium Penguji	1 Kali						
							4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium Penguji	1 Kali						
							5. Temu Teknis Uji Banding antar Laboratorium Penguji	1 Kali						
							6. Temu teknis Audit Laboratorium	1 Kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.16.038	Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	7. Rakornis laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan	1 Kali			Rp. 64.389.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.16.046	Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Di Lingkungan Pendidikan SMA/SMK Dan PT	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Pembinaan Pengelolaan Laboratorium SMA/SMK	10 Sekolah	Terwujudnya Pengujian Laboratorium BLH Provinsi DIY sesuai Acuan, Terjaganya Kualitas Air dan Udara : BOD<10, COD<50, CO<15	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Evaluasi Pengelolaan Laboratorium SMA/SMK	5 Sekolah						
							3. Workshop Hasil Evaluasi Laboratorium SMA/SMK	1 Kali						
							4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium SMA/SMK	1 Kali						
1.08.1.08.01.16.052	Pengendalian Pencemaran Air	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1.Workshop PPA	2 kali/@30 org	Terwujudnya penurunan pencemaran air sungai	100 %	Rp. 912.908.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2.Evaluasi W2M	5 Kab / Kota						
							3. Pembinaan PPA	3 kali/@30 org						
							4.Sosialisasi Perda Limbah Domestik	5 kali/ @ 30 org						
							5.Workshop PPSP	2 kali/ @ 30 org						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							6. Profil sungai	1 dok						
							7. Kajian Daya Tampung Sungai	1 dok						
							8. IPAL Kom :3 unit	3 unit						
							9. Bantuan IPAL Kegiatan batik	2 unit						
							10. Raperda BM limbah cair industri, kes, par	1 dok						
							11. Sosialisasi DT Beban Pencemaran Sungai	1 kali/@30 org						
							12. Festival sungai	2 Kali						
1.08.1.08.01.16.053	Pengendalian B3 Dan Limbah B3	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Inventarisasi usaha dan atau kegiatan yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3	5 Kab / Kota	Terwujudnya peningkatan pengelolaan B3 dan limbah B3 sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Workshop pengendalian B3 dan Limbah B3	2 kali @30 orang						
							3. Pembinaan bagi pelaku usaha/kegiatan pengguna bahan dan penghasil limbah B3	5 kali @ 30 orang						
1.08.1.08.01.16.056	Penyusunan SPM Bidang Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Bimbingan teknis penyusunan pelaksana SPM Bidang LH	1 kali/ @ 30 org	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan LH	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Pembinaan Pelaksana SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5 Kab / Kota						
							3. FGD Penyusunan laporan SPM Bidang LH DIY	1 kali @ 30 orang						
							4. Penyusunan laporan SPM Bidang	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08.1.08.01.16.058	Pengendalian Pencemaran Tanah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	LH DIY				Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							1. Pemantauan kualitas tanah	30 Sampel	Terkendalinya Pencemaran Tanah	100 %				
							2. Workshop Pengendalian Pencemaran Tanah	1 kali @ 30 orang						
1.08.1.08.01.16.059	Pengembangan Kapasitas Kader lingkungan hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Seleksi Kader LH	78 kec	Kader Lingkungan 78 Kecamatan	78 kecamatan	Rp. 1.594.440.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Penyusunan Pedoman Kerja	1 dok						
							3. Pembekalan Materi LH bagi Kader LH	78 Org						
							4. Fasilitasi kader lingkungan (komposter)	780 unit/78 org						
							5. Monev Kinerja Kader LH	78 Org						
							6. Paparan Hasil Kerja kader LH	5 Kali						
1.08.1.08.01.16.060	Pengendalian Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Kaji Ulang Manajemen	1 Kali	Manajemen Mutu Laboratorium	100 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Audit Laboratorium :	2 Kali						
							3. Assesment	1 Kali						
							4. Bimtek Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	1 Kali						
							5. Pendampingan sistem manajemen mutu laboratorium	1 Kali						
1.08.1.08.01.16.061	Fasilitasi / Pengembangan Teknologi Berwawasan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul,	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Pendampingan operasional IPAL	1 Kali	Peningkatan Teknologi Berwawasan Lingkungan	100 %	Rp. 160.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lingkungan	Lingkungan Hidup		Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta			2. Kajian Design IPAL Batik SMK	1 dokumen						
							3. Demplot IPAL Limbah Batik SMK	2 unit						
							4. Workshop Pengelolaan Laboratorium SMA/SMK	1 Kali						
							5. Workshop teknologi tepat guna	1 Kali						
1.08.1.08.01.16.062	Peningkatan Kepedulian Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan kualitas lingkungan	9.43 %	1. Peringatan Hari Lingkungan Hidup	1 Kali	Meningkatnya Kepedulian Lingkungan	100 %	Rp. 275.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa	1 Kali						
							3. Peringatan Hari Peduli Sampah	1 Kali						
							4. Peringatan Hari Bumi	1 Kali						
1.08.1.08.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM										Rp. 4.456.658.100,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.17.001	Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	27 Ha	1. Terbangunnya telaga desa	1 lokasi	Dokumen	100 %	Rp. 816.750.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya Desain bangunan percontohan panen hujan	1 pkt						
							3. Tersedianya dokumen rencana pembangunan telaga desa	1 pkt						
							4. terselenggaranya ekspose konservasi sumberdaya air	1 Kali						
							5. Ekspos Konservasi SDA	1 Kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							6. Terlaksananya pengawasan pembangunan telaga desa	1 pkt						
							7. Terlaksananya monev kegiatan konservasi SDA	1 pkt						
1.08.1.08.01.17.006	Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	27 Ha	1. Pengambilan sampel tanah untuk dianalisis dan monitoring Produksi Biomassa	45 pkt	Data Kerusakan lahan untuk produksi biomassa dan reklamasi lahan	100 %	Rp. 319.027.675,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Reklamasi Lahan	1 pkt/3 Ha						
							3. Monitoring Perkembangan hasil pengendalian kerusakan hutan dan lahan	6 lokasi						
							4. Ekspose Hasil Monitoring dan Evaluasi pengendalian kerusakan	2 Kali						
1.08.1.08.01.17.007	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	27 Ha	1. Konservasi dengan tanaman di sekitar embung/mata air/telaga	1 pkt	Konservasi daerah tangkapan air	100 %	Rp. 168.722.325,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Ekspose hasil monitoring dan evaluasi konservasi daerah sekitar embung/mata air/telaga	3 Kali						
							3. Monitoring fluktuasi muka air tanah	90 titik						
1.08.1.08.01.17.008	Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan	luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	27 Ha	1. Penanaman tanaman di daerah rawan longsor	1 Paket	Konservasi Daerah Rawan Longsor, Daerah Rawan Longsor Terkelola	100 %	Rp. 241.875.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Ekspose hasil monitoring dan evaluasi daerah	3 Kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kota Yogyakarta			rawan longsor							
1.08.1.08.01.17.010	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	27 Ha	1. Terlaksananya pendampingan dan pelatihan pengelola taman kehati	2 lokasi	Kehati	100 %	Rp. 281.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Teridentifikasinya koleksi taman kehati	1 Paket						
							3. Terselenggaranya workshop forum karst	2 Kali						
							4. Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan taman kehati	1 Paket						
							5. terlaksananya Evaluasi MIH dan Pembinaan MIH	1 Paket						
							6. terlaksananya koordinasi dan konsultasi MIH dan Taman Kehati	1 pkt						
1.08.1.08.01.17.014	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta	luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	27 Ha	1. Terlaksananya seleksi kalpataru	5 Kab / Kota	Seleksi Kalpataru	100 %	Rp. 255.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. terselenggarakannya workshop peningkatan peranserta masyarakat	1 Kali						
							3. tersedianya film profil pemenang kalpataru dan kehati award	1 buah						
							4. terselenggarakannya pembinaan pemenang penghargaan kalpataru dan kehati award	1 Kali						
1.08.1.08.01.17.015	Pembangunan Wonodesa dalam	Pengelolaan Sumber	Kualitas Lingkungan	Kabupaten Sleman,	luas lahan yang	27 Ha	1. Terbangunnya wanadesa	3 Paket	Pengkatan kualitas ingkungan hidup	100 %	Rp. 2.163.069.500,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Daya Alam dan Lingkungan Hidup	hidup meningkat	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	terkonservasi terhadap luasan total lahan		2. Penyusunan Raperda Wanadesa	1 dokumen					Hidup	
							3. Sosialisasi wanadesa	13 Kali						
							4. Workshop pembangunan wanadesa	4 Kali						
1.08.1.08.01.17.025	Pengendalian Kerusakan Pesisir, Pantai dan Laut	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul	luas lahan yang terkonervasi terhadap luasan total lahan	27 Ha	1. Pengendalian kerusakan daerah pesisir dengan vegetasi	1 Paket/ 2 Ha	Konservasi Pesisir	100 %	Rp. 147.375.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Ekspose kepada masyarakat pesisir/pantai untuk menuju Indonesia hijau	3 Kali						
							3. Seleksi Kehati Award	1 Paket						
1.08.1.08.01.17.026	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Konservasi dan Kerusakan Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	luas lahan yang terkonervasi terhadap luasan total lahan	27 Ha	1. Koordinasi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup	5 Kali	Dokumen Monev Konservasi dan Kerusakan Lingkungan	100 %	Rp. 63.838.600,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Ekspose hasil monitoring dan evaluasi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup	5 Kali						
1.08.1.08.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp. 495.000.000,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.19.002	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kualitas Lingkungan hidup	Badan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses informasi	25 %	1.Workshop Validasi Data Lingkungan Hidup	1 kali 40 org	Peningkatan Akses Informasi SDA dan LH	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		dan Lingkungan Hidup	meningkat		sumberdaya air dan lingkungan hidup		2. Data dan Informasi Lingkungan Hidup secara online	8 jenis						
							3.pembuatan sistem aplikasi data Lingkungan Hidup	2 buah						
							4. Publikasi Lingkungan Hidup Melalui Videotron	1 pkt						
1.08.1.08.01.19.004	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses informasi sumberdaya air dan lingkungan hidup	25 %	1.Forum Komunikasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup	1 kali 40 orang	Peningkatan Akses informasi SDA dan LH	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Survei Kepuasan Pelanggan tentang pelayanan Lingkungan Hidup oleh BLH DIY	1 dokumen						
1.08.1.08.01.19.006	Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Badan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses informasi sumberdaya air dan lingkungan hidup	25 %	Tersusunnya Buletin Kalpataru : 2 edisi/@525 ek	2 edisi/@ 525 eks	Peningkatan akses informasi SDA dan LH	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
1.08.1.08.01.19.007	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Persentase peningkatan akses informasi sumberdaya air dan lingkungan hidup	25 %	1.Tercetaknya Laporan SLHD Tahun 2014	35 set	Peningkatan akses informasi SDA dan LH	100 %	Rp. 95.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2.Bimbingan Teknisi Penyusunan Buku Laporan SLHD	1 Kali 30 Orang						
							3. FGD Penyusun laporan SLHD DIY	1 Kali 30 Orang						
							4. Draft Buku lapooran SLHD Tahun 2015	1 dokumen						
							5. Pembinaan Penyusunan Laporan SLHD	5 kab/kota						
1.08.1.08.01.19.019	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten	Persentase peningkatan akses informasi sumberdaya air dan lingkungan	25 %	1.Pentas Kesenian kearifan lingkungan	1 Kali	Peningkan akses informasSDA dan LH	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2 .Publikasi Melalui Televisi Bertema	1 Kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Hidup		Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	hidup		Lingkungan Hidup							
							3. Publikasi Melalui Radio Bertema Lingkungan Hidup	5 Paket						
							4. Publikasi melalui Media Cetak Bertema Lingkungan Hidup	1 Kali						
							5. Pembuatan audiovisualisasi profil Lingkungan Hidup	1 dokumen						
							6. Workshop Partisipasi Lingkungan Hidup	1 kali 50 orang						
1.08.1.08.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI										Rp. 617.966.710,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.20.001	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	7 %	1.Data Hasil Uji Petik Emisi Kendaraan Bermotor	2000 motor	Peningkatan Penaatan Lingkungan	100 %	Rp. 314.290.210,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Pembelian alat uji emisi kendaraan (bahan bakar solar dan premium)	1 pkt						
1.08.1.08.01.20.002	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	7 %	1.Data hasil uji Emisi akibat aktivitas produksi	46 Sampel	data kualitas udara	1 dokumen	Rp. 218.651.500,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Pembuatan telaah UKL UPL berkaitan dengan cerobong	1 dokumen	Peningkatan Penaatan Lingkungan Bagi dunia usaha	100 %				
1.08.1.08.01.20.003	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo,	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	7 %	1.Pengujian Mutu Limbah Padat	20 Sampel	Peningkatan penaatan Lingkungan bagi kegiatan usaha	100 %	Rp. 85.025.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2 .Pengujian Mutu Limbah Cair	60 Sampel						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 15.766.329.200,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta										
							3. Workshop Mutu Limbah Padat	1 Kali 30 Orang						
							4.Workshop Mutu Limbah Cair	2 Kali 30 Orang						
1.08.1.08.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)										Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.24.005	Penataan RTH	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan	35 %	1. Evaluasi Kampung-Hijau	5 Kab / Kota	Penataan RTH	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Forum komunikasi Kampung Hijau	1 Kali 30 Orang						
							3. Pengadaan Bibit Penghijauan dan Penanaman pada RTH	120 titik						
							4. Pengadaan Bibit Tanaman Kampung Hijau	800 batang						
							5. Penanaman RTH	3 lokasi						
							6. Verifikasi Usulan Proklim	9 lokasi						
							7. Sosialisasi kampung hijau	1 kali 50 orang						
							8. Pengadaan taman/pohon perindang	12 lokasi						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.													
1.11.1.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.323.639.200,00	Rp. 1.349.000.000,00		
1.11.1.11.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pengiriman Dokumen	20 Paket	1. Terkirimnya Dokumen 2. Tersedianya Materai	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Listrik	12 bulan	1. Tersedianya Listrik 2. TersedianyaTelepon 3. Tersedianya Jaringan Internet	100 %	Rp. 230.000.000,00	Rp. 230.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Perizinan kendaraan Roda 2	6 unit	1. Tersedianya Perizinan 6 unit kendaraan Roda 2 2. Tersedianya perizinan 7 unit kendaraan roda 4	100 %	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pengelola keuangan	9 Orang	1. Terkelolanya keuangan 2. Terkelolanya Barang 3. Terkelolanya Kepegawaian	100 %	Rp. 38.700.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Pengelola Barang	2 Orang						
							3. Pengelola Kepegawaian	2 Orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Tersedianya jasa Cleaning Service untuk SKPD	2 gedung	1. Terjaganya kebersihan kantor	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 170.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pemeliharaan Jaringan Komputer	12 bulan	1. Terpeliharanya Jaringan Komputer 2. Terpeliharanya Komputer 3. Terpeliharanya LCD 4. Terpeliharanya mesin fax 5. Terpeliharanya mesin ketik	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.500.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Pemeliharaan Komputer	35 unit						
							3. Pemeliharaan LCD	5 unit						
							4. Pemeliharaan mesin fax	2 unit						
							5. Pemeliharaan mesin ketik	8 buah						
1.11.1.11.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan ATK	12 bulan	Tersedianya ATK	100 %	Rp. 43.609.200,00	Rp. 45.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Cetak	12 bulan	1. Terfasilitasinya kebutuhan Cetak 2. Terfasilitasinya kebutuhan Penggandaan	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Penggandaan	12 bulan						
1.11.1.11.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Instalasi listrik/kabel 2. Bolam Lampu 3. stop kontak 4. Saklar, MCB, Travo	12 bulan	1. Tersedianya Instalasi listrik/kabel 2. Tersedianya Bolam Lampu 3. Tersedianya stop kontak 4. Tersedianya Saklar, MCB, Travo	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Langganan Koran	3 jenis	1. Tersedianya Koran 2. Tersedianya Buku Bacaan	100 %	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.500.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Buku Bacaan	20 buku						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman untuk rapat	3000 Orang	Terfasilitasinya Makanan dan minuman untuk rapat	100 %	Rp. 30.330.000,00	Rp. 33.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Fasilitas perjalanan Dinas Dalam daerah	12 bulan	1. Terfasilitasinya perjalanan Dinas Dalam daerah 2. Terfasilitasinya perjalanan Dinas luar Daerah	100 %	Rp. 449.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Fasilitas perjalanan Dinas luar Daerah	12 bulan						
1.11.1.11.01.01.022	Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Tenaga Keamanan kantor	9 Orang	1. Terfasilitasinya Keamanan kantor	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.230.925.000,00	Rp. 1.231.025.000,00		
1.11.1.11.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pembelian kendaraan roda 2	3 unit	1. Penambahan 3 unit kendaraan roda 2 2. Penambahan 3 unit kendaraan roda 4	100 %	Rp. 662.000.000,00	Rp. 662.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Pembelian kendaraan roda 4	3 unit						
1.11.1.11.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. KOMPUTER PC	5 unit	Tersedianya Sarana Prasarana Kerja	100 %	Rp. 165.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. KOMPUTER NOTE BOOK	2 unit						
							3. KURSI KERJA STAF	56 buah						
							4. MESIN TIK MANUAL	2 buah						
							5. AC 1 PK	1 unit						
							6. TV LCD 32 Inchi	4 unit						
							7. LCD	3 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							8. PRINTER	4 unit						
							9. FILLING CABINET	3 unit						
							10. RAK ARSIP	4 unit						
1.11.1.11.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	pemeliharaan gedung kantor	2 gedung	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	Rp. 175.900.000,00	Rp. 176.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pemeliharaan Kendaraan roda 2	6 unit	1. Terpeliharanya 6 Kendaraan roda 2 2. Terpeliharanya 7 Kendaraan roda 4	100 %	Rp. 200.525.000,00	Rp. 200.525.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. pemeliharaan Kendaraan roda 4	7 unit						
1.11.1.11.01.02.026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pemeliharaan AC	35 unit	1. Terpeliharanya 35 unit AC 2. Terpeliharanya 2 unit Mesin pompa	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. pemeliharaan Mesin pompa	2 unit						
1.11.1.11.01.02.029	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pemeliharaan kursi rapat 2. Pemeliharaan meja kerja/kursi kerja 3. Pemeliharaan almari besi 4. Pemeliharaan Filling cabinet 5. Pemeliharaan / perbaikan kursi tamu	1 tahun	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	100 %	Rp. 7.500.000,00	Rp. 7.500.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 96.000.000,00	Rp. 100.000.000,00		
1.11.1.11.01.05.032	Pengembangan Kualitas SDM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	1. Pernyusunan Standart ISO	1 Paket	Tersusunnya Standart ISO	100 %	Rp. 96.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Outdoor Motivation Training	1 Paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Bimtek/Seminar Pegawai	1 Paket						
1.11.1.11.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 345.000.000,00	Rp. 345.000.000,00		
1.11.1.11.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja BPPM DIY	1 laporan	Tersusunnya Laporan Kinerja BPPM DIY	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan BPPM DIY	3 laporan	Tersedianya Laporan Keuangan BPPM DIY	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran	100 %	Laporan movev kegiatan SKPD	1 laporan	Tersedianya Laporan movev kegiatan SKPD	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					tugas dan fungsi SKPD									
1.11.1.11.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN										Rp. 3.280.000.000,00	Rp. 3.375.000.000,00		
1.11.1.11.01.17.002	Pelatihan Bagi Pelatih (T O T) S D M Pelayanan Dan Pendampingan Korban K D R T	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihani Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	1. Pelatihan Penanganan Kasus Responsif gender	1 kl @ 30 org @ 3 hr	1. Terlaksananya Pelatihan Penanganan Kasus Responsif gender 2. Terlaksananya Pelatihan Penanganan KDRT 3. Terlaksananya Pelatihan Antisipasi trafficking	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Pelatihan Penanganan KDRT	2 kl @ 30 org @ 3 hr						
							3. Pelatihan Antisipasi trafficking	2 kl @ 30 org @ 3 hr						
1.11.1.11.01.17.010	Akreditasi Kecamatan Sayang Ibu	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Bambang lipuro Bambang lipuro Banguntapan Banguntapan Bantul Bantul Gamping Gamping Gedang sari Gedang sari Kasihani Kasihani Mlati Mlati Pandak Pandak Pengasih Pengasih Playen Playen Prambanan Prambanan Semin	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	1. Sosialisasi Pokja GSI	10 kl @ 50 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Sosilisasi Pokja GSI 2. Terbinanya Kecamatan Sayang Ibu 3. Terlaksananya Penilaian Kecamatan Sayang Ibu	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu	5 kl @ 30 org @ 1 hr						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta															
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Semin Sentolo Sentolo Sewon Sewon Seyegan Seyegan Sleman Sleman Tegalrejo Tegalrejo Umbulharjo Umbulharjo Wates Wates											
							3. Penilaian Kecamatan Sayang Ibu	1 Pemenang							
1.11.1.11.01.17.019	Pelatihan Kecakapan Hidup bagi Perempuan Pasca Pendampingan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	1.Pelatihan kecakapan Hidup bagi perempuan pasca pendampingan	2 kl @ 30 org @ 6 hr	1. Bertambahnya kecakapan Hidup bagi perempuan pasca pendampingan 2. Terlaksananya FGD penggalian minat	100 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah	
							2. FGD penggalian minat	5 kl @ 20 @ 1 hr							
1.11.1.11.01.17.023	Peningkatan Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	1. Advokasi Perlindungan Perempuan & Anak	5 kl @ 50 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Advokasi Perlindungan Perempuan & Anak 2. Terlaksananya Advokasi Pergub PRT 3. Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Gugus Tugas trafiking 4. Terlaksananya Seminar keluarga Harmonis 5. Terlaksananya Rakor Perlindungan Perempuan dan Anak	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah	

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Umbulharjo Wates										
							2. Advokasi Pergub PRT	10 kl @ 100 org @ 1 hr						
							3. Fasilitasi Pembentukan Gugus Tugas trafiking	1 1 kl @ 50 org @ 2 hr						
							4. Seminar keluarga Harmonis	1 kl @ 100 org @ 1 hr						
							5. Rakor Perlindungan Perempuan dan Anak pada situasi bencana	1 kl @ 50 org @ 1 hr						
							6. Penguatan Kelembagaan PPT	5 Paket						
1.11.1.11.01.17.024	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	Fasilitasi Pelayanan P2TPA	1 Paket	Terfasilitasinya Pelayanan P2TPA	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.11.1.11.01.17.025	Updating Database Perlindungan Perempuan dan Anak	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	1. Pertemuan Pengumpul Data	12 kl @20 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Pertemuan Pengumpul Data 2. Terlaksananya FGD Validasi Data	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. FGD Validasi Data	6 kl @25 org @2 hr						
1.11.1.11.01.17.026	Pelatihan Penyusunan Data Gender dan Anak DIY	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	1. Pelatihan penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Tingkat lanjut)	1 kl @ 30 org @ 6 hr	1. Terlaksananya Pelatihan penyelenggaraan Data Gender dan Anak 2. Terlaksananya Pelatihan penyelenggaraan Data Gender dan Anak 3. Terlaksananya Pelatihan Petugas Pengumpul Data Penanganan Korban Kekerasan	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Pelatihan Penyelenggaraan	1 kl @30 Org @ 2						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Data Gender dan Anak (Tingkat Dasar)	hr						
							3.Pelatihan Petugas Pengumpul Data Penanganan Korban Kekerasan	1 kl @30 Org @ 2 hr						
1.11.1.11.01.17.027	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	1. Update SIGA	1 Paket	1. Terupdatenya SIGA	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.17.028	Updating Data Terpilah Gender dan Anak	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	1. FGD Pengumpulan Data	15 kl @ 30 org @ 1 hr	1. Terlaksananya FGD Pengumpulan Data 2. Terlaksananya Expose Data Pilah 3. Hasil Cetak	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Expose Data Pilah	1 kl @ 40 org @ 1 hr						
							3. Cetak	250 exemplar						
1.11.1.11.01.17.029	Fasilitasi Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	644 kasus	Fasilitasi FPKK DIY	1 Paket	Terfasilitasinya FPKK DIY	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN*										Rp. 880.000.000,00	Rp. 900.000.000,00		
1.11.1.11.01.18.020	Integrasi Gender dalam Bencana	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	3.62 %	1. Sosialisasi Integrasi gender Dalam bencana	4 kl @ 40 org @ 2 hr	1. Terlaksananya Sosialisasi Integrasi gender Dalam bencana 2. Terlaksananya Pelatihan Integrasi Bender dalam Bencana 3. Tercetaknya Panduan Implementasi gender dalam bencana	100 %	Rp. 280.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates			2. Pelatihan Integrasi Bender dalam Bencana	5 kl @ 30 org @ 3 hr						
							3. Cetak Panduan Implementasi gender dalam bencana	150 Exmplar						
1.11.1.11.01.18.021	Pelatihan PPRG	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Bambanglipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	3.62 %	1. TOT PPRG	1 kl @ 30 org @ 3 hr	1. Terlaksananya TOT PPRG 2. Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi perencanaan Kab/Kota 3. Terlaksananya Pelatihan PUG bagi lembaga ombudsman 4. Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi Focal Point Kab/Kota 5. Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi Ormas 6. Terlaksananya P	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. Pelatihan PPRG bagi perencanaan Kab/Kota	1 kl @ 30 org @ 3 hr						
							3. Pelatihan PUG bagi lembaga ombudsman	1 kl @ 30 org @ 3 hr						
							4. Pelatihan PPRG bagi Focal Point Kab/Kota	1 kl @ 30 org @ 3 hr						
							5. Pelatihan PPRG bagi Ormas	2 kl @ 30 org @ 3 hr						
							6. Pendampingan PPRG	10 kl @ 30 org @ 1 hr						
1.11.1.11.01.18.022	Rapat Kerja PPRG	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	3.62 %	1. Raker Fokal point	2 kl @ 30 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Raker Fokal point 2. Terlaksananya Raker Perencana 3. Terlaksananya Raker Pokja PUG 4. Terlaksananya Raker RAD	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Raker Perencana	2 kl @ 30 org @ 1 hr						
							3. Raker Pokja PUG	2 kl @ 30 org @ 1 hr						
							4. Raker RAD	2 kl @ 30 org @ 1 hr						
1.11.1.11.01.18.023	Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	3.62 %	1. Penyusunan Instrumen Evaluasi Anggaran responsif gender	6 kl @ 30 org @ 1 hr	1. Tersusunnya Instrumen evaluasi Anggaran responsif gender 2. Terexpose'nya Hasil penyusunan Instrumen Evaluasi Anggaran responsif gender 3. Terlaksananya Pendampingan Anggaran responsif gender 4. Terfasilitasinya pelaksanaan PP & PA 5. Terexpose'nya pen	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Expose Hasil penyusunan Instrumen Evaluasi Anggaran responsif gender	6 kl @ 40 org @ 2 hr						
							3. Pendampingan Anggaran responsif gender	8 kl @ 30 org @ 1 hr						
							4. Fasilitasi pelaksanaan PP & PA	7 kl @ 30 org @ 1 hr						
							5. Expose penilaian pelaksanaan PP & PA	1 kl @ 40 org @ 1 hr						
1.11.1.11.01.20	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER										Rp. 2.375.000.000,00	Rp. 2.530.000.000,00		
1.11.1.11.01.20.001	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Pada Kesetaraan Gender	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75.14 %	1. Raker Penguatan Lembaga berbasis pada	2 kl @ 50 org @ 2 hr	1. Terlaksananya Raker Penguatan Lembaga berbasis pada kesetaraan	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Masyarakat			kesetaraan gender		gender				Masyarakat.	
1.11.1.11.01.20.002	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75,14 %	1. Fasilitasi Forum PKHP	1 kl @ 50 org @ 1 hr	1. Terfasilitasinya Forum PKHP 2. Terfasilitasinya PUG Agama 3. Terfasilitasinya Penulis PP & PA 4. Terfasilitasinya PPEP	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Fasilitasi PUG Agama	1 kl @ 30 org @ 1 hr						
							3. Fasilitasi Penulis PP & PA	2 kl @ 30 org @ 2 hr						
							4. Fasilitasi PPEP	2 kl @ 35 org @ 2 hr						
1.11.1.11.01.20.003	Penguatan Organisasi Perempuan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75,14 %	1. Fasilitasi Dharma Wanita Persatuan DIY	2 kl @ 50 org @ 2 hr	1. Terfasilitasinya Dharma Wanita Persatuan DY 2. Terfasilitasinya KPP 3. Terfasilitasinya KPPI	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Fasilitasi KPP	7 kl @ 30 org @ 1 hr						
							3. Fasilitasi KPPI	1 Paket						
1.11.1.11.01.20.004	Pembinaan Organisasi Perempuan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75,14 %	1. Pembinaan Manajemen Organisasi Perempuan	7 kl @ 30 org @ 3 hr	1. Terbinanya Manajemen Organisasi Perempuan 2. Tersusunnya profil Organisasi perempuan 3. Terfasilitasinya DWP DIY	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Penyusunan profil Organisasi perempuan	2 kl @ 50 org @ 1 hr						
							3. Fasilitasi DWP DIY	1 Paket						
1.11.1.11.01.20.005	Peringatan Hari Besar Perempuan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75,14 %	1. Fasilitasi Sarasehan Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari	2 kl @ 200 org @ 1 hr	1. Terfasilitasinya Sarasehan Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari Perempuan	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Baru - Kebijakan Pemerintah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Masyarakat			Perempuan Internasional		Internasional 2. Terfasilitasinya Puncak Acara Hari Kartini dan Hari Perempuan Internasional				Masyarakat.	
							2. Fasilitasi Puncak Acara Hari Kartini dan Hari Perempuan Internasional	2 kl @ 350 org @ 1 hr						
1.11.1.11.01.20.006	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75.14 %	1. Kajian nilai-nilai kesetaraan gender	1 Paket	1. Tersedianya kajian nilai-nilai kesetaraan gender 2. Film 3. Leaflet	100 %	Rp. 480.876.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Pembuatan Film	1 Paket						
							3. Pembuatan Leaflet	1 Paket						
1.11.1.11.01.20.007	Pengembangan Materi KIE tentang KB dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75.14 %	1. Sosialisasi Pemanfaatan KIE Urusan PP, PM dan KB	5 kl @ 50 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan KIE Urusan PP, PM dan KB 2. Terusannya Panduan Pelatihan bagi Petugas Layanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Penyusunan Panduan Pelatihan bagi Petugas Layanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	5 Paket						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.20.008	Pembinaan P2WKSS	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase pembinaan organisasi perempuan	75.14 %	Fasilitasi P2WKSS	1 Paket	Terfasilitasinya P2WKSS	100 %	Rp. 319.124.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.11.1.11.01.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN ANAK										Rp. 2.825.000.000,00	Rp. 2.950.000.000,00		
1.11.1.11.01.21.001	Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Bambang Ilipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	329 kasus	1. Penguatan Gugus tugas KLA	7 kl x 6 lok @ 30 org @ 1hr	1. Terlaksananya Penguatan Gugus tugas KLA 2. Terlaksananya Fasilitasi penyusunan RAD KLA 3. Terlaksananya Sosialisasi KHA 4. Terlaksananya Pelatihan KHA 5. Terlaksananya Sosialisasi KLA 6. Terlaksananya Inisiasi kecamatan layak anak	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. Fasilitasi penyusunan RAD KLA	6 kl @ 50 org @ 1 hr	7. Terfasilitasinya pendataan data anak kecamatan 8. Terlaksananya Advokasi bagi keluarga dalam pengasuhan anak 9. Terlaksananya Advokasi Puskesmas ramah anak 10. Terlaksananya Advokasi sekolah ramah anak 11. Terlaksananya Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak	100 %				
							3. Sosialisasi KHA	6 kl @ 50 org @ 1 hr						
							4. Pelatihan KHA	2 kl @ 30 org @ 5 hr						
							5. Sosialisasi KLA	5 kl @ 50 org @ 1 hr						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							6. Inisiasi kecamatan layak anak	15 kl @ 50 org @ 1 hr						
							7. Fasilitasi pendataan data anak kecamatan	1 Paket						
							8. Advokasi bagi keluarga dalam pengasuhan anak	3 kl @ 50 org @ 1 hr						
							9. Advokasi Puskesmas ramah anak	15 kl @ 50 org @ 1 hr						
							10. Advokasi sekolah ramah anak	15 kl @ 50 org @ 1 hr						
							11. Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak ABK, ABH, Hak Sipil Anak	78 kl @ 50 org @ 2 hr						
1.11.1.11.01.21.002	Fasilitasi Sekretariat Forum Anak	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	329 kasus	1. Fasilitasi temu hati	1 kl @ 100 org @ 2 hr	1. Terfasilitasinya temu hati 2. Terlaksananya Latihan kepemimpinan dasar dan lanjutan 3. Terlaksananya Jambore Anak daerah 4. Terfasilitasinya HAN 5. Terlaksananya Pengiriman Duta Anak 6. Terlaksananya penguatan kelembagaan forum anak Kab/kota	100 %	Rp. 675.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. Latihan kepemimpinan dasar dan lanjutan	3 kl @ 30 org @ 3 hr						
							3. Jambore Anak daerah	1 Paket						
							4. fasilitasi HAN	1 Paket						
							5. Pengiriman Duta Anak	1 Paket						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.21.003	Kajian Data Perlindungan Anak	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	329 kasus	1. Kajian Data pemenuhan Hak Sipil Anak	1 Paket	1. Terlaksananya Kajian Data pemenuhan Hak Sipil Anak	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.11.1.11.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI EKONOMI PEREMPUAN										Rp. 1.831.256.000,00	Rp. 1.850.000.000,00		
1.11.1.11.01.22.001	Pengembangan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Banguntapan Cangkringan Gedang sari Imogiri Jetis Jetis Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Kokap Lendah Mergangsan Minggir Mlati Moyudan Nanggulan Ngawen Ngemplak Pakem Panjatan Pengasih Playen Ponjong Prambanan Purwosari Samigaluh Sanden Semanu Semin Sentolo Sewon Seyegan Tanjungsari Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	96.66 %	1. Pembinaan pelaku usaha produktif perempuan	9 kl @ 30 org @ 3 hr	1. Terlaksananya Pembinaan pelaku usaha produktif perempuan 2. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Usaha	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Usaha	1 kl @ 45 Org @ 6 hr						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.11.1.11.01.22.002	Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihani Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	96.66 %	Expose hasil Karya Perempuan	1 kl @ 120 peserta @ 5 hr	Terlaksananya Expose hasil Karya Perempuan	100 %	Rp. 781.256.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.11.1.11.01.22.003	Peningkatan Kapasitas Buruh Perempuan dalam Bidang Ekonomi	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Kretak Lendah Moyudan Pakem Playen Sanden Temon	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	96.66 %	1. fasilitasi Forum Buruh	2 kl @ 25 org @ 1 hr	1. Terfasilitasinya Forum Buruh 2. Terfasilitasinya Buruh Perempuan 3. Terlaksananya pelatihan Fasilitator Buruh Tani Perempuan (BTP)	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. fasilitasi Buruh Perempuan	8 kl x 4 lok @ 25 org @ 1 hr						
							3. Pelatihan Fasilitator Buruh Tani Perempuan (BTP)	1 kl @ 25 org @ 3 hr						
1.11.1.11.01.23	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN										Rp. 1.650.000.000,00	Rp. 1.650.000.000,00		
1.11.1.11.01.23.001	Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender bagi perempuan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Banguntapan Bantul Cangkringan Galur Gamping Girimulyo Girisubo Godean Imogiri Jetis Kalasan Kalibawang	Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik	11.06 %	1. TOT Fasilitator PUG bidang Politik	3 kl @ 30 org @ 3 hr	1. Terlaksananya TOT Fasilitator PUG bidang Politik 2. Terlaksananya Bimtek politik berwawasan gender 3. Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Anggota Kader PKK	100 %	Rp. 650.000.000,00	Rp. 650.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Karangmojo Kasihan Kokap Kretek Lendah Minggir Moyudan Nanggulan Ngampilan Ngawen Ngemplak Panggang Patuk Pengasih Playen Pleret Ponjong Prambanan Samigaluh Sapto sari Sedayu Semin Sentolo Sleman Srandakan Temon Turi Wates				2. Bimtek politik berwawasan gender	32 kl @ 30 org @ 3 hr					
							3. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Anggota Kader PKK	1 kl @ 75 org @ 1 hr						
1.11.1.11.01.23.002	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Banguntapan Bantul Berbah Cangkringan Galur Gamping Gedang sari Girimulyo Girisubo Godean Imogiri Jetis Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Kokap Lendah Moyudan Nanggulan Ngemplak Pandak Panggang Patuk Pengasih Playen	Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik	11.06 %	1. TOT Fasilitator Kepemimpinan	4 kl @ 30 org @ 3 hr	1. Terlaksananya TOT Fasilitator Kepemimpinan 2. Terlaksananya Bimtek Kepemimpinan	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pleret Ponjong Prambanan Samigaluh Sapto sari Sedayu Semin Sentolo Sewon Srandakan Temon Tempel Turi			2. Bimtek Kepemimpinan	35 kl @ 30 org @ 3 hr						
1.11.1.11.01.23.003	Peningkatan Kapasitas Perempuan Anggota Partai Politik	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasih Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik	11.06 %	Pelatihan bagi perempuan anggota partai politik	9 kl @ 30 org @ 3 hr	Terlaksananya Pelatihan bagi perempuan anggota partai politik	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.12	Keluarga Berencana													
1.12.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.													
1.12.1.11.01.16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA										Rp. 2.087.340.000,00	Rp. 2.150.000.000,00		
1.12.1.11.01.16.001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	0.51 %	1. Penyusunan Pedoman Pembinaan KRR	1 Paket	1. Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pembinaan KRR 2. Terlaksananya Advokasi KRR bagi stake holders 3. Tercetaknya Buku panduan 4.	100 %	Rp. 487.340.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Terlaksananya Publikasi					
							2. Advokasi KRR bagi stake holders	6 kl @ 30 org @ 2 hr						
							3. Cetak Buku panduan	1 Paket						
							4. Publikasi	1 Paket						
1.12.1.11.01.16.003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kesehatan Reproduksi	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	0.51 %	1. Sosialisasi PKBR	10 kl @ 30 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Sosialisasi PKBR 2. Meningkatkan Kapasitas Penyuluhan KRR bagi Mitra kerja	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan KRR bagi Mitra kerja	4 kl @ 30 org @ 2 hr						
1.12.1.11.01.16.004	Pendirian dan Pengembangan PIK KRR	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	0.51 %	1. Rakor pembinaan PIK KRR TK DIY/Kab/kota	12 kl @ 30 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Rakor pembinaan PIK KRR TK DIY/Kab/kota 2. Terlaksananya Pelatihan Pendidik Sebaya 3. Terlaksananya Pelatihan Konselor sebaya 4. Terlaksananya Orientasi KRR bagi Kader PIK Desa 5. Terfasilitasinya PIK KRR	100 %	Rp. 965.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Pelatihan Pendidik Sebaya	10 kl @ 30 org @ 3 hr						
							3. Pelatihan Konselor sebaya	10 kl @ 30 org @ 3 hr						
							4. Orientasi KRR bagi Kader PIK Desa	30 kl @ 30 org @ 2 hr						
							5. Fasilitasi PIK KRR	50 Paket						
1.12.1.11.01.16.005	Pembinaan Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Sebaya di Luar sekolah	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah	0.51 %	1. Rakor Forum Kerjasama Program KRR	2 kl @ 40 org @ 2 hr	1. Terlaksananya Rakor Forum Kerjasama Program KRR 2.	100 %	Rp. 485.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					20 tahun				Terlaksananya Pemilihan PIK R/M 3. Terlaksananya Jambore PIK R/M				Masyarakat.	
							2. Pemilihan PIK R/M	1 Paket						
							3. Jambore PIK R/M	1 Paket						
1.12.1.11.01.26	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA*										Rp. 1.410.360.000,00	Rp. 1.415.000.000,00		
1.12.1.11.01.26.001	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (HRI)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihani Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase cakupan peserta KB Aktif	71.72 %	1. Rakor Pembinaan Perlindungan HRI	5 kl @ 30 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Rakor Pembinaan Perlindungan HRI 2. Terlaksananya Raker Penanggulangan masalah Kespro 3. Terlaksananya Seminar HRI	100 %	Rp. 107.800.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Raker Penanggulangan masalah Kespro	3 kl @ 30 org @ 2 hr						
							3. Seminar HRI	1 kl @ 100 org @ 1 hr						
1.12.1.11.01.26.002	Promosi Pelayanan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak)	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihani Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo	Persentase cakupan peserta KB Aktif	71.72 %	1. Rakor Pelayanan KB Pasca Persalinan, Pasca Keguguran di Pemberi Pelayanan kesehatan (PPK)	2 kl @ 30 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Rakor Pelayanan KB Pasca Persalinan, Pasca Keguguran di Pemberi Pelayanan kesehatan (PPK) 2. Terlaksananya Pelatihan Promosi dan Komunikasi Interpersonal KHIBA	100 %	Rp. 69.560.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Pelatihan Promosi dan Komunikasi Interpersonal KHIBA	2 kl @ 30 org @ 3 hr						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.12.1.11.01.26.003	Pembinaan KB	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY Umbulharjo Wates	Persentase cakupan peserta KB Aktif	71.72 %	1. Raker program KB Kespro	4 kl @ 30 org @ 2 hr	1. Terlaksananya Raker program KB Kespro 2. Terlaksananya Rakor KB kes 3. Terlaksananya Rakor Paguyuban KB Pria 4. Terlaksananya Rakor Forum antar umat beragama peduli kependudukan dan KS 5. Tersosialisasikannya pemantapan unmet need 6. Terfasilitasinya k	100 %	Rp. 550.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. Rakor KB kes	6 kl @ 30 org @ 1 hr						
							3. Rakor Paguyuban KB Pria	4 kl @ 30 org @ 1hr						
							4. Rakor Forum antar umat beragama peduli kependudukan dan KS	4 kl @ 30 org @ 1 hr						
							5. Sosialisasi pemantapan unmet need	25 kl @ 50 orang @ 1 hr						
							6. fasilitasi bagi kelompok paguyuban KB pria	10 kelompok						
							7. publikasi KIE KB melalui media cetak	1 Paket						
							8. publikasi KIE KB melalui media audiovisual	1 Paket						
							9. publikasi KIE KB melalui radio	1 Paket						
							1.12.1.11.01.26.004	Pelayanan Konseling KB	Sosial Budaya	Harapan Hidup				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Masyarakat Meningkat	Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	peserta KB Aktif		KB		Pelayanan KB 2. Terlaksananya Orientasi Konseling KB				Perempuan dan Masyarakat.	Capaian Target
							2. Orientasi Konseling KB	5 kl @ 25 org @ 2 hr						
1.12.1.11.01.26.005	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS bagi Remaja	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase cakupan peserta KB Aktif	71.72 %	1. Sosialisasi penanggulangan PMS, HIV, Napza	3 kl @ 50 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Sosialisasi penanggulangan PMS, HIV, Napza 2. Terfasilitasinya LSM peduli HIV dan AIDS 3. Terlaksananya Publikasi HIV & AIDS melalui media cetak untuk remaja	100 %	Rp. 83.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Fasilitasi LSM peduli HIV dan AIDS	3 kl @ 35 org @ 1 hr						
							3. Publikasi HIV & AIDS melalui media cetak untuk remaja	1 Paket						
1.12.1.11.01.26.006	Pemberdayaan Keluarga dalam Penanggulangan HIV dan AIDS	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Pengasih Playen Seyegan Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase cakupan peserta KB Aktif	71.72 %	1. Rakor kelompok peduli HIV dan AIDS	2 kl @ 30 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Rakor kelompok peduli HIV dan AIDS 2. Terfasilitasinya Kelompok Keluarga Sadar HIV/AIDS 3. Terlaksananya Orientasi keluarga sadar HIV /AIDS 4. Terlaksananya Publikasi HIV & AIDS melalui media cetak	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Fasilitasi Kelompok Keluarga Sadar HIV/AIDS	10 kelompok						
							3. Orientasi keluarga sadar HIV /AIDS	10 kl @ 30 org @ 2 hr						
							4. Publikasi HIV & AIDS melalui media cetak	1 Paket						
1.12.1.11.01.27	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA										Rp. 2.634.541.240,00	Rp. 2.650.000.000,00		
1.12.1.11.01.27.001	Peningkatan dan Fasilitasi Ketahanan Keluarga Sejahtera	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase tahapan keluarga sejahtera	44.1 %	1. Rakor Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 kl @ 30 org @ 1 hr	1. Terlaksananya Rakor Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2. Terlaksananya Lokakarya pembentukan jejaring kemitraan 3. Terlaksananya FGD jejaring kemitraan 4. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan 5. Terfasilitasinya kelompok UPPKS 6. Terfasilitasinya pendampi	100 %	Rp. 2.100.000.000,00	Rp. 2.100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Lokakarya pembentukan jejaring kemitraan	2 kl @ 40 org @ 1 hr						
							3. FGD jejaring kemitraan	4 kl @ 20 org @ 1 hr						
							4. Pelatihan Kewirausahaan	1 kl @ 30 org @ 3 hr						
							5. Fasilitasi kelompok UPPKS	30 kelompok UPPKS						
							6. Fasilitasi pendampingan bagi sub Pembantu Petugas KB Desa (PPKBD)	5302 Orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.										Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							7. Rakor TK Kabupaten	2 kl @ 30 org @ 1 hrx5 kn						
							8. Rakor TK Provinsi	2 kl @ 30 org @ 1 hr						
1.12.1.11.01.27.002	Fasilitasi dan Promosi Keluarga Berencana dan Sejahtera	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase tahapan keluarga sejahtera	44.1 %	1. Fasilitasi Hari Keluarga	1 Paket	1. Terfasilitasinya Hari Keluarga 2. Terpublikasikannya Media cetak dan Elektronik 3. Berkembangnya desa SIAGA dalam program KB	100 %	Rp. 534.541.240,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Publikasi Media cetak dan Elektronik	2 Paket						
							3. Pengembangan desa SIAGA dalam program KB	5 desa siaga						
1.12.1.11.01.28	PROGRAM PENGEMBANGAN BINA KELUARGA										Rp. 1.410.385.560,00	Rp. 2.000.000.000,00		
1.12.1.11.01.28.001	Pengembangan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase lembaga bina keluarga berkategori percontohan	23 %	1. Pengembangan Kelompok Keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK di Posyandu	1 Paket (6 kl @ 30 org @ 1 hr, 5 kl @ 30 org @ 2 hr	1. Berkembangnya Kelompok Keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK di Posyandu 2. Berkembangnya keterpaduan BKR, PIK R, di Posyandu 3. Berkembangnya keterpaduan BKL dan Posyandu Lansia 4. Terlatihnya kader Bina Keluarga Sejahtera	100 %	Rp. 1.410.385.560,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Pengembangan keterpaduan BKR, PIK R, di Posyandu	1 paket (3 kl @ 20 @ 1hr, 2 kl @ 30 org @ 1hr, 5 k						
							3. Pengembangan keterpaduan BKL dan Posyandu Lansia	1 paket (2 kl @ 20 @ 1hr, 2 kl @ 30 org @ 1						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								hr, 5 k						
						4. Pelatihan kader Bina Keluarga Sejahtera	5 kl x 3 jenis @ 30 org @ 2 hr							
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
1.22.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.													
1.22.1.11.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN*										Rp. 3.020.000.000,00	Rp. 3.090.000.000,00		
1.22.1.11.01.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	1. Pembinaan LPMD/K	5 kl (@46 org, @ 89 org, @145 org, @87 org, @89 org)	1. Terbinanya LPMD/K 2. Terlaksananya Penilaian LPM berprestasi 3. Terfasilitasinya LPM ke tingkat Nasional	100 %	Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. Penilaian LPM berprestasi	15 Pemenang						
							3. Fasilitasi LPM ke tingkat Nasional	45 Pemenang						
1.22.1.11.01.15.002	Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	1. Pelatihan Penyusunan RPJMDes	5 kl @ 30 org @ 5 hr	1. Terlaksananya Pelatihan Penyusunan RPJMDes	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.22.1.11.01.15.003	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat desa	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	1. Pembinaan Komda Lansia	5 kl @ 45 org @ 1 hr	1. Terbinanya Komda Lansia	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.22.1.11.01.15.004	Fasilitasi Dan Koordinasi P M T - A S Dan Posyandu	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	1. Fasilitasi rakor PMTAS	6 kl @ 30 org @ 1 hr	1. Terfasilitasinya rakor PMTAS 2. Terbinanya Posyandu 3. Terfasilitasinya Jambore Kader Posyandu TK DIY 4 Terfasilitasinya	100 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 850.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									lomba Posyandu ke Tingkat Nasional 5. Terlaksananya Rakor Pokjanal Posyandu					
							2. Pembinaan Posyandu	6 kl @ 50 org @ 1 hr						
							3. fasilitasi Jambore Kader Posyandu TK DIY	1 kl @ 200 org@ 2 hr						
							4 Fasilitasi lomba Posyandu ke Tingkat Nasional	2 Paket						
							5. Rakor Pokjanal Posyandu	2 kl @ 30 org @ 2 hr						
1.22.1.11.01.15.013	Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	Fasilitasi Rakor UPM	1 kl @ 35 @ 2 hr	Terfasilitasinya Rakor UPM	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.22.1.11.01.15.015	Fasilitasi Komite Aksi Daerah	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	Pembinaan TIM KAD	5 kl @ 35 org @ 1 hr	Terbinanya TIM KAD	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.22.1.11.01.15.016	Koordinasi Raskin	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	Rakor Raskin	4 kl @ 30 org @ 1 hr	Terlaksananya Rakor Raskin	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.22.1.11.01.15.017	Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	Rakor TKPK	4 kl @ 30 org @ 1 hr	Terlaksananya Rakor TKPK	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.22.1.11.01.15.018	Fasilitasi dan Pembinaan Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	29.16 %	Fasilitasi TP PKK DIY	1 Paket	Terfasilitasinya TP PKK DIY	100 %	Rp. 730.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.22.1.11.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN										Rp. 3.040.000.000,00	Rp. 3.043.000.000,00		
1.22.1.11.01.16.002	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat	Bambang lipuro	Persentase usaha ekonomi	37.7 %	1. Pelatihan Ketrampilan	4 kl @ 30 org @ 3 hr	Terlaksananya Pelatihan	100 %	Rp. 1.300.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Pemberdayaan	Baru - Kebijakan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Usaha Milik Desa		Meningkat	Berbah Cangkringan Girimulyo Imogiri Jetis Kalasan Kasih Mlati Panjatan Pengasih Playen Ponjong Purwosari Samigaluh Sedayu Sewon Tanjungsari Turi Wates Wonosari	desa		Manajemen Pengelolaan LKM melalui BUMDES		Ketrampilan Manajemen Pengelolaan LKM melalui BUMDES				Perempuan dan Masyarakat.	Pemerintah
							2. Fasilitasi BUMDES	120 BUMDES						
1.22.1.11.01.16.016	Pengembangan Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Pedesaan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Cangkringan Girimulyo Godean Imogiri Jetis Karangmojo Kasih Kokap Lendah Minggir Nanggulan Pakem Panjatan Patuk Pleret Pundong Sapto sari Sedayu Semanu Sentolo Seyegan Tanjungsari Tempel Wonosari	Persentase usaha ekonomi desa	37.7 %	Pelatihan Usaha Mikro Pedesaan	2 kl @ 30 org @ 3 hr	Terlaksananya Pelatihan Usaha Mikro Pedesaan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.22.1.11.01.16.017	Koordinasi Lumbung Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Cangkringan Girimulyo Kalibawang Minggir Nanggulan Pakem Paliyan Pandak Piyungan	Persentase usaha ekonomi desa	37.7 %	1. Pelatihan bagi pengelola Lumbung pangan	1 kl @ 30 org @ 3hr	1. Terlaksananya Pelatihan bagi pengelola Lumbung pangan 2. Terfasilitasinya lumbung pangan	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Ponjong Pundong Rongkop Sapto sari Sedayu Temon Tempel Wonosari										
							2. Fasilitas lumbung pangan	8 lumbung pangan						
1.22.1.11.01.16.018	Koordinasi Pengembangan Pasar Desa	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Banguntapan Dlingo Galur Girisubo Kalasan Kokap Lendah Ngaglik Ngawen Ngemplak Pajangan Ponjong Sedayu Tanjungsari Turi	Persentase usaha ekonomi desa	37.7 %	1. Pelatihan bagi pengelola pasar desa	1 kl @ 50 org @ 3 hr	1. Terlaksananya Pelatihan bagi pengelola pasar desa	100 %	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 1.050.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.22.1.11.01.16.019	Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan BUMDES	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Bambang lipuro Banguntapan Berbah Imogiri Kalasan Kalibawang Kretek Paliyan Panggang Pengasih Playen Ponjong Samigaluh Sanden Sapto sari Sentolo Temon Wates Wonosari	Persentase usaha ekonomi desa	37.7 %	1. Fasilitas pembentukan BUMDES	1 kl @ 40 org @ 1hr	1. Terfasilitasinya pembentukan BUMDES 2. Terlaksananya Pelatihan bagi pengelola BUMDES	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.22.1.11.01.16.020	Koordinasi Badan Kredit Desa	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Banguntapan Gamping Gedang sari Jetis Kalibawang Kokap Lendah Moyudan Ngaglik Ngemplak	Persentase usaha ekonomi desa	37.7 %	Rakornis BKD	1 kl @60 org @ 1 hr	Terlaksananya Rakornis BKD	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pandak Panjatan Pundong Rongkop Sedayu Semanu Semin Sewon Seyegan Sleman Temon Tepus Wates										
1.22.1.11.01.16.021	Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (UED-SP)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Banguntapan Bantul Cangkringan Gamping Gedang sari Girimulyo Girisubo Imogiri Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Ngemplak Patuk Pengasih Pleret Ponjong Prambanan Semin Sentolo Srandakan Temon Turi Wates	Persentase usaha ekonomi desa	37.7 %	1. Pelatihan bagi pengelola UED-SP	1 kl @ 30 org @ 3hr	1. Terlaksananya Pelatihan bagi pengelola UED-SP 2. Terfasilitasinya untuk 8 UED-SP	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. fasilitasi untuk UED-SP	8 UED-SP						
1.22.1.11.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA										Rp. 3.257.315.000,00	Rp. 3.260.000.000,00		
1.22.1.11.01.17.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Imogiri Kalibawang Ngawen	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	35 %	Fasilitasi pengembangan SDM berbasis kemandiri desa	3 kl @ 30 org @ 1 hr	Terfasilitasinya pengembangan SDM berbasis kemandiri desa	100 %	Rp. 97.315.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.22.1.11.01.17.006	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan	35 %	1. Fasilitasi Pencanangan BBGRM	1 Paket	1. Terfasilitasinya Pencanangan BBGRM 2. Terfasilitasinya	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Baru - Kebijakan Pemerintah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Masyarakat	masyarakat				Penyelenggaraan Puncak Acara BBGRM				Masyarakat.	
							2. Fasilitas Penyelenggaraan Puncak Acara BBGRM	1 Paket						
1.22.1.11.01.17.007	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Bambang lipuro Banguntapan Bantul Gamping Gedang sari Kasihan Mlati Pandak Pengasih Playen Prambanan Semin Sentolo Sewon Seyegan Sleman Tegalrejo Umbulharjo Wates	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	35 %	Pelatihan KPM	1 Paket	Terlaksananya Pelatihan KPM	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.22.1.11.01.17.008	Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Perdesaan Melalui TMMD	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Bambang lipuro Girimulyo Godean Kotagede Minggir Nglipar Patuk Pleret Sentolo Umbulharjo	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	35 %	1. Fasilitasi TMMD	1 Paket	1. Terfasilitasinya TMMD	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.22.1.11.01.17.009	Fasilitasi Pemanfaatan dan Koordinasi Gelar Teknologi Tepat Guna	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	35 %	1. Seleksi Tingkat Provinsi	1 Paket	1. Terlaksananya Seleksi Tingkat Provinsi 2. Terfasilitasinya pemenang Ke Tingkat Nasional dalam rangka Gelar TTG Nasional ke XVI	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. Fasilitas Ke Tingkat Nasional dalam rangka Gelar TTG Nasional ke XVI	1 Paket						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.22.1.11.01.17.010	Fasilitasi dan Koordinasi PNPMM Mandiri Perdesaan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	35 %	1. Bimtek Pelaku Usaha PNPMM-MP	2 kl @ 30 org @ 5 hr	1. Terlaksananya Bimtek Pelaku Usaha PNPMM-MP 2. Terlaksananya Bimtek Capacity Building pelaku program PNPMM-MP 3. Terlaksananya Labsite Kewirausahaan bagi pelaku PNPMM-MP	100 %	Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. Bimtek Capacity Building pelaku program PNPMM-MP	2 kl @ 30 org @ 5 hr						
							3. Labsite Kewirausahaan bagi pelaku PNPMM-MP	2 kl @ 30 org @ 5 hr						
1.22.1.11.01.22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA										Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.250.000.000,00		
1.22.1.11.01.22.001	Perlombaan Desa/Kelurahan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Persentase profil desa sesuai standar	70 %	1. Lomba Desa Seleksi Tingkat Provinsi	4 Desa, 2 Kel	1. Terlaksananya Seleksi Lomba Desa Tingkat Provinsi (4 Desa, 2 Kel) 2. Terfasilitasinya pemenang Tk.Provinsi ke Tingkat Nasional (1 Desa & 1 Kelurahan)	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Kebijakan Pemerintah
							2. Fasilitasi ke Tingkat Nasional	1 paket (1 pemenang desa, 1 pemenang kelurahan)						
1.22.1.11.01.22.002	Pembinaan Perangkat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase profil desa sesuai standar	70 %	1. Bimtek peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan potensi ekonomi desa	5 kl @ 30 org @ 3 hr	1. Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan potensi ekonomi desa	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.22.1.11.01.22.003	Fasilitasi Pokja Profil Desa	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Bantul Gedang sari Girisubo Karangmojo	Persentase profil desa sesuai standar	70 %	Koordinasi & Monitoring Profil Desa/ Kelurahan	1 Paket	Terkoordinasi & termonitoringnya Profil Desa/ Kelurahan	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Baru - Kebijakan Pemerintah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.											Jumlah Pagu : Rp. 34.696.762.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Ngawen Nglipar Paliyan Panggang Patuk Playen Ponjong Purwosari Rongkop Sapto sari Semanu Semin Tanjungsari									Masyarakat.	

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.13	Sosial													
1.13.01	Dinas Sosial													
1.13.1.13.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 12.464.754.427,00	Rp. 13.986.000.000,00		
1.13.1.13.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya belanja perangko dan materai	1 Paket	Dokumen dapat diselesaikan dan surat terkirim ke Instansi Terkait	100 %	Rp. 7.365.500,00	Rp. 10.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya pembiayaan telepon, air dan listrik	12 bulan	Kebutuhan biaya telepon, air, listrik terpenuhi	100 %	Rp. 1.058.730.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya KIR dan Perpanjangan STNK serta Balik Nama	12 bulan	Jasa perijinan kendaraan dinas dapat dilaksanakan	100 %	Rp. 65.657.500,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.007	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya tertib administrasi keuangan, barang dan kepegawaian	12 bulan	Pengelolaan keuangan, barang dan kepegawaian berjalan lancar	100 %	Rp. 168.360.000,00	Rp. 170.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa Kebersihan, Cleaning Servis	12 bulan	Kebersihan kantor terjaga	100 %	Rp. 1.278.822.129,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Administrasi kegiatan berjalan lancar	100 %	Rp. 92.772.950,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk tugas kedinasan terpenuhi	100 %	Rp. 137.583.350,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi	100 %	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronika	12 bulan	Kebutuhan alat listrik/ penerangan dan	100 %	Rp. 122.137.950,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bangunan Kantor		Daerah Meningkat		Perkantoran				elektronika terpenuhi					
1.13.1.13.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bacaan berupa Tabloid, Majalah dan Surat Kabar	12 bulan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi	100 %	Rp. 27.936.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya logistik kantor dan logistik untuk klien UPTD	12 bulan	Kebutuhan logistik terpenuhi	100 %	Rp. 7.459.890.378,00	Rp. 8.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	Kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi	100 %	Rp. 138.432.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya kegiatan rakor, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	Adanya keterpaduan dan kesepahaman program kegiatan	100 %	Rp. 234.760.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan	Keamanan kantor terjaga	100 %	Rp. 1.025.884.670,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.023	Penyediaan Jasa Paramedis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa Paramedis/ Pramurukti	12 bln	Pelayanan Klien bejalan lancar	10 %	Rp. 644.400.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya retribusi sampah	12 bulan	Kantor bersih dan rapi	100 %	Rp. 2.022.000,00	Rp. 3.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.280.112.300,00	Rp. 3.949.697.130,00		
1.13.1.13.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana	100 %	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	1 Paket	Pembangunan gedung kantor	100 %	Rp. 61.400.000,00	Rp. 67.540.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		prasarana aparatur									
1.13.1.13.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pengadaan prlengkapan gedung kantor	1 Paket	Kebutuhan perlengkapan gedung kantor terpenuhi	100 %	Rp. 1.341.184.000,00	Rp. 1.475.302.400,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.02.009	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	Kebutuhan peralatan gedung kantor terpenuhi	100 %	Rp. 462.787.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.02.010	Pengadaan Mebeluer	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pengadaan mebeleur	1 Paket	Kebutuhan mebeleur kantor terpenuhi	100 %	Rp. 452.110.000,00	Rp. 497.321.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan rutin gedung kantor	1 Paket	Gedung kantor dan lingkungan bersih, rapi dan sehat	100 %	Rp. 756.930.000,00	Rp. 83.262.300,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Kendaraan dinas siap pakai	100 %	Rp. 955.497.300,00	Rp. 1.051.047.030,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100 %	Rp. 74.465.000,00	Rp. 81.911.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 tahun	Pemeliharaan peralatan gedung kantor terlaksananya dengan baik	100 %	Rp. 144.660.000,00	Rp. 159.126.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	100 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1 Paket	Pemeliharaan mebelur terlaksana dengan baik	100 %	Rp. 21.300.000,00	Rp. 23.430.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					aparatur									
1.13.1.13.01.02.038	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala tanaman	1 Paket	Pemeliharaan rutin/berkala tanaman berjalan dengan baik	100 %	Rp. 9.779.000,00	Rp. 10.756.900,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 154.413.700,00	Rp. 167.500.000,00		
1.13.1.13.01.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu	40 Orang	Kenaikan pangkat dan penyesuaian jabatan sesuai dengan angka kredit dapat terlaksana	100 %	Rp. 11.254.000,00	Rp. 12.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	100 Orang	Meningkatnya motivasi dan kerjasama pegawai	100 %	Rp. 25.554.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.05.018	Forum Optimalisasi Pengembangan Kinerja Aparatur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Forum Optimalisasi Pengembangan Kinerja Aparatur	50 Orang	Meningkatnya Koordinasi dan Komunikasi bagi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	100 %	Rp. 13.413.000,00	Rp. 15.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.05.061	Pemantapan Pengaplikasian Pengelolaan Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pemantapan Pengaplikasian Pengelolaan Keuangan	30 Orang	Meningkatnya pengaplikasian dan pengoptimalan pengelolaan keuangan	100 %	Rp. 10.846.000,00	Rp. 12.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.05.062	Penanganan Arsip Tekstual	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Tertanganinya arsip tekstual	5000 arsip	Arsip tekstual tertangani dengan baik	100 %	Rp. 26.436.700,00	Rp. 28.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.05.063	Diklat Manajemen Pelayanan Sosial	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Diklat manajemen pelayanan sosial bagi pejabat fungsional tertentu	30 Orang	Meningkatnya kemampuan dalam manajemen pelayanan sosial	100 %	Rp. 66.910.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM										Rp. 91.831.000,00	Rp. 102.500.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN													
1.13.1.13.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1 keg	Tersedianya laporan kinerja SKPD sebagai bahan penilaian kinerja	100 %	Rp. 5.500.000,00	Rp. 6.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	1 keg	Kinerja pengelolaan keuangan terpenuhi	100 %	Rp. 14.213.500,00	Rp. 16.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	1 keg	Tersusunnya rencana program/kegiatan tahun yang akan datang dan Anggaran Perubahan	100 %	Rp. 57.117.500,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	5 Kab Kota	Diketahui perkembangan bantuan yang dirikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ organisasi sosial	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO										Rp. 8.432.956.446,00	Rp. 10.000.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.13.1.13.01.19.004	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	BRTPD, PSKW, PSBK, PSBR, PSAA, PSTW, PSPP	Persentase pelayanan panti asuhan/jompo sesuai standar pelayanan	2.28 %	Terlaksananya pelayanan dalam panti	1 tahun	Klien dalam panti mendapatkan pelayanan, perlindungan dan pelatihan ketrampilan	100 %	Rp. 8.432.956.446,00	Rp. 10.000.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.20	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)										Rp. 7.572.160.300,00	Rp. 8.052.299.050,00		
1.13.1.13.01.20.006	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Tuna Susila	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Gedongtengen Kalasan Prambanan Srandakan Umbulharjo	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	Jumlah tuna susila yang mendapat bimbingan Jumlah tuna susila yang mendapat bantuan usaha pengembangan	42 Orang	WTS menguasai materi bimbingan mental sosial dan memiliki alternatif pendapatan	100 %	Rp. 317.921.000,00	Rp. 349.713.100,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.20.007	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Korban Napza	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Ngampilan Playen Semanu Sentolo Umbulharjo	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	Pelayanan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza luar panti	60 Orang	Korban napza menguasai materi bimbingan mental, sosial dan memiliki bekal ketrampilan	100 %	Rp. 432.593.000,00	Rp. 475.852.300,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.20.008	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Warga Binaan Pemasyarakatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Bantul, Sleman	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	Bimbingan mental, sosial dan ketrampilan bekas warga binaan pemasyarakatan (eks napi)	30 Orang	Bekas warga binaan pemasyarakatan (eks napi) menguasai bimbingan mental, sosial dan memiliki bekal ketrampilan	100 %	Rp. 226.931.000,00	Rp. 249.624.100,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.20.010	Fasilitasi Bagi ODHA	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	Terlaksananya Fasiliasi bagi ODHA	15 Orang	ODHA bisa memperoleh pendapatan tammelalui UEP	100 %	Rp. 274.364.200,00	Rp. 301.800.600,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.20.013	Penanganan Permasalahan Sosial Kelompok Minoritas	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	Jumlah Waria yang mendapat bimbingan mental,sosial ketrampilan	12 Orang	Waria menguasai materi bimbinganmental sosial dan memiliki alternatiffindapatan	100 %	Rp. 112.086.500,00	Rp. 125.995.650,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.20.014	ShelterODHA	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	Tersedianya tempat tinggal sementara bagi ODHA yang mengalami	5 Orang	ODHA mendapatkan tempat tinggal sementara dan	100 %	Rp. 123.070.300,00	Rp. 135.377.300,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							diskriminasi dan stigma		mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan stigma					
1.13.1.13.01.20.015	Advokasi Sosial tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA dan BantuanOperasional lainnya	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Ngampilan Playen Semanu Sentolo Umbulharjo	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	1. Korban Penyalahgunaan NAPZA dma dilingkungannya 2. Lembaga yang melaksanakan Rehabi Krbn Pealahgunaan NAPZA mendapat Bantuan Opeasional	1 kegiatan	Semakin luasnya ligkungan menerima Korban Penyalahgunaan NAPZA	100 %	Rp. 29.090.000,00	Rp. 31.999.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.20.016	Pelatihan Pendamping Korban Penyalaguna NAPZA	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	Terlaksananya pelatihan pendamping Korban Penyalahgunaan NAPZA	15 Orang	Penda memiliki pngetahuan tentang pendampingan Korban Penyalahgunaan NAPZA	100 %	Rp. 16.789.500,00	Rp. 18.468.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.20.017	Pelatihan Pendaping Tuna Sosial	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	Terlaksananya pelatihan pendamping Tuna Sosial	15 Orang	Pendamping memiliki pengetahuan tentang pendampingan Tuna Sosial	100 %	Rp. 16.789.500,00	Rp. 18.468.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.20.019	Penanganan dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Melalui Camp Assesment	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Camp Assesment, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	- Penampungan Gelandangan Pengemis - Rehab fisik camp (1 pkt)	250 Orang	Gepeng mendapatkan assesment berkelanjutan dan pembinaan awal	100 %	Rp. 5.982.028.100,00	Rp. 6.300.000.000,00	Dinas Sosial	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.13.1.13.01.20.020	Pemulangan PMKS Ke Daerah Asal	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY dan Luar DIY	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	4.57 %	Pemulangan PMKS ke daerah asal	25 Orang	PMKS yang sudah dibina Dinas Sosial atau Panti Sosial/ LKS dapat kembali ke daerah asal	100 %	Rp. 40.497.200,00	Rp. 45.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.22	PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3 S) *										Rp. 751.297.300,00	Rp. 667.334.250,00		
1.13.1.13.01.22.003	Forum Komunikasi Petugas Pengelola TMP, MPP dan MPN	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat	Umbulharjo	Persentase PSKS terbina dalam hal	55 %	Forum Komunikasi Petugas Pengelola TMP dan MPN	50 Org	Meningkatnya Pelayanan dan Pemeliharaan TMP	100 %	Rp. 20.500.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			dalam pengembangan sosial budaya		pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial				dan MPN					
1.13.1.13.01.22.004	Ziarah Wisata Pengenalan Nilai-nilai Kepahlawanan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Umbulharjo	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %	Ziarah Wisata Pengenalan Nilaii-nilai Kepahlawanan	300 Org	Generasi Muda Mewarisi Nilai Kepahlawanan	100 %	Rp. 23.500.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.22.005	Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Depok Godean Sewon	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %	Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga Pahlawan	10 Org	Kesejahteraan Keluarga Pahlawan meningkat serta tumbuhnya rasa bangga dan dihargai bagi keluarga pahlawan	100 %	Rp. 93.000.000,00	Rp. 96.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.22.006	Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial Bagi Pelajar Antar Sekolah	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Pakem	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %	Gerakan Nilai Kebangsaan dan Kesetiakawanan Sosial bagi pelajar	100 Org	Tumbuhnya Nilai Kebangsaan dan Sikap Kesetiakawanan Sosial Generasi Mda	100 %	Rp. 50.480.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.22.007	Fasilitasi Usulan Pemberian Gelar Pahlawan dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian sosial	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Banguntapan Umbulharjo	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %	Seminar dalam rangka Fasilitasi Usulan Pemberian Gelar Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Penghargaan Satyalencana Kebhaktian sosial	100 Org	Usulan Pemberian Gelar Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Penghargaan Satyalencana Kebhaktian sosial	100 %	Rp. 52.443.000,00	Rp. 62.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.22.008	Fasilitasi Upacara Ziarah Rombongan di TMP	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam	Mlati Umbulharjo	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian	55 %	Fasilitasi Upacara Ziarah Rombongan di Taman Makam Pahlawan	30 Rombongan	Mengenalkan Komonen Fisik TMP di Masyarakat serta	100 %	Rp. 11.828.500,00	Rp. 13.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			pengembangan sosial budaya		nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial				menarik minat masyarakat untuk berziarah di TMP					
1.13.1.13.01.22.010	Peringatan Hari Besar Nasional	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %	-Terlaksananya Fasilitas Peringatan Hari Besar Nasional (Hardiknas, Harkitnas, HUT RI, Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan) -Terlaksananya Fasilitas Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	5 keg	Tertanamnya semangat cinta Tanah Air serta kesetiakawanan sosial	5000 Org	Rp. 210.334.250,00	Rp. 230.334.250,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.22.011	Fasilitasi Tempat-tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Banguntapan Umbulharjo	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %	Kunjungan ke Tempat Bersejarah dan Pemeliharaan Tetenger/Monumen	100 org/tetenger	Genrasi Muda Mengetahui Peristiwa Bersejarah yang terjadi di tempat bersejarah dan tempat sejarah/tetenger terpelihara	100 %	Rp. 61.888.250,00	Rp. 12.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.22.012	Fasilitasi Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Ngaglik	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %	Fasilitasi Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100 Org	Tumbuhnya Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100 %	Rp. 10.059.000,00	Rp. 9.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.22.014	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Jetis Umbulharjo Wates Wonosari	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	55 %	Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN	5 TMP/MPN	Terpeliharanya TMPN/TMP, MPP, MPN	100 %	Rp. 217.264.300,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.24	PROGRAM PEMBERDAYAAN										Rp. 5.873.864.323,00	Rp. 6.608.207.344,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA *													
1.13.1.13.01.24.001	Penumbuhan USEP keluarga miskin (KM)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Gamping Gedang sari Kalasan Kalibawang Nanggulan Panjatan Patuk Playen Pleret Semanu Tempel	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	10.84 %	Penumbuhan USEP Keluarga Miskin (KM)	20 kelompok	Meningkatnya pendapatan keluarga miskin melalui pekelolaan UEP	100 %	Rp. 824.260.000,00	Rp. 906.686.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.24.002	Pelatihan Ketrampilan dan bantuan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Gamping Gedang sari Kalasan Kalibawang Semanu Tempel	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	10.84 %	Pelatihan ketrampilan dan bantuan pemberdayaan bagi WRSE	400 Orang	Meningkatnya pendapatan WRSE melalui pengelolaan UEP	100 %	Rp. 723.680.000,00	Rp. 796.048.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.24.003	Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Berbah Galur Girisubo Imogiri Kalibawang Karangmojo Moyudan Pleret Rongkop Sedayu Sewon Srandakan Tempel Turi	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	10.84 %	Terlaksananya bimbingan pemantapan dan pengembangan KUBE FM	140 kelompok	Kemampuan manajemen dan pengelolaan usaha meningkat	100 %	Rp. 2.942.469.860,00	Rp. 3.258.716.800,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.24.006	Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan USEP	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Kab/kota DIY	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	10.84 %	Bimbingan pemantapan dan Pengembangan USEP	20 kelompok	Meningkatnya Kemampuan Manajemen dan Pengelolaan usaha bagi kelompok USEP	100 %	Rp. 655.169.250,00	Rp. 720.686.200,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.24.007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan PKH oleh tim	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Kab/Kota se DIY	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	10.84 %	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan PKH oleh tim	100 Orang	Pelaksanaan PKH berjalan lancar	100 %	Rp. 71.190.000,00	Rp. 78.309.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.24.008	Fasilitasi Modal Usaha Bagi RTSM PKH	Penyediaan Sarana dan	Kesenjangan Pendapatan	Kab/Kota se DIY	Persentase pemberdayaan	10.84 %	Terlindungi RTSM PKH dan mampu	100 Orang	RTSM PKH berfungsi sosial	100 %	Rp. 332.510.313,00	Rp. 497.761.344,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Prasarana	Masyarakat Menurun		sosial keluarga miskin dan fakir miskin		melaksanakan fungsi sosial		dengan baik dengan kemandirian ekonominya					
1.13.1.13.01.24.009	Perlindungan dan Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal dan Relawan Sosial Termasuk TKSK	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Kab/Kota se-DIY	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	10.84 %	Pekerja Mandiri Sektor Informal dan Relawan Sosial Termasuk TKSK	200 Orang	Pekerja Mandiri Sektor Informal dan Relawan Sosial Termasuk TKSK terlindungi penghasilannya	100 %	Rp. 324.584.900,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.25	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA										Rp. 379.127.200,00	Rp. 417.040.000,00		
1.13.1.13.01.25.001	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Pengasih Pengasih	Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	5.51 %	Bimbingan sosial dan ketrampilan bagi eks penderita saikit jiwa	15 Orang	Eks penderita sakit jiwa memiliki ketrampilan dan dapat beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mampu mengurus dirinya	100 %	Rp. 115.500.000,00	Rp. 127.050.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.25.002	Pengembangan Usaha Mandiri Penyandang Disabilitas	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Bambang lipuro Bantul Berbah Kasihan Mergansan Moyudan Patuk Pleret Sanden Sewon Sidomulyo Sumbermulyo Jogo Tirtto Tirttonirmolo Keparakan Sumberarum Nglanggeran Gadingsari Bangunharjo Timbulharjo	Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	5.51 %	Bimbingan pengembangan usaha mandiri penyandang disabilitas Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	30 Orang	Usaha penyandang disabilitas berkembang	100 %	Rp. 95.000.000,00	Rp. 104.500.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.25.004	Family Gathering untuk Penyandang Disabilitas	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Bambang lipuro Galur Kalasan Moyudan Nanggulan Ngaglik	Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan	5.51 %	Family Gathering	900 Orang	Penyandang disabilitas percaya diri dan mampu berusaha Keluarga mampu menerima dan	100 %	Rp. 72.000.000,00	Rp. 79.200.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pajangan Pakem Panjatan Patuk Piyungan Pleret Purwosari Sentolo Tanjungsari Tegalrejo Wirobrajan Wonosari Mulyodadi Kranggan Tirto Martani Sumbersari Kembang Minomartani Sendangsari Harjo Binangun Depok Putat Srimulyo Wonokromo Giripurwo Kaliagung Hargosari Bener Wirobrajan Kepek	sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma				mendampingi penyandang disabilitas					
1.13.1.13.01.25.005	Asistensi Keluarga Penyandang Disabilitas	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Imogiri Karangmojo Playen Prambanan Seyegan Umbulharjo Sriharjo Gedang Rejo Ngawis Dengok Madu Rejo Margoagung Giwangan	Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	5.51 %	Asistensi keluarga penyandang cacat	58 Orang	Menigkatnya pendapatan keluarga penyandang cacat	100 %	Rp. 96.627.200,00	Rp. 106.290.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.26	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSIAL*										Rp. 3.913.944.150,00	Rp. 4.302.638.000,00		
1.13.1.13.01.26.001	Rekomendai Adopsi Bagi Anak Terlantar	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam	Kabupaten/Kota se DIY	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak	8.34 %	Rekomendasi adopsi bagi anak terlantar	30 Orang	Anak balita terlantar mendapat orang tua pengganti dan	100 %	Rp. 110.243.000,00	Rp. 121.267.300,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			pengembangan sosial budaya		yang mengalami permasalahan sosial				terpenuhi hak-haknya					
1.13.1.13.01.26.002	Bimbingan Sosial Anjal Hasil Penjangkauan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	8.34 %	Bimbingan sosial anjal hasil penjangkauan	25 anak	Anak jalanan hasil penjangkauan dapat berusaha dan reunifikasi dengan keuarga Anak yang bermasalah mendapatkan pelayanan referral/rujukan Orang tua anjal yang lebih berdaya dan mampu bersaha mandiri	100 %	Rp. 470.911.200,00	Rp. 518.002.300,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.26.003	Bimbingan Sosial dan Pendampingan ABH	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	8.34 %	Bimbingan sosial dan pendampingan ABH	15 anak	ABH medapat perlindungan dan dapat mengakses kebutuhan dasar	100 %	Rp. 75.149.000,00	Rp. 82.663.900,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.26.004	Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar Luar Panti	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	8.34 %	Pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar luar panti	1300 anak	Anak terlantar luar panti dapat mengakses kebutuhan dasarnya	100 %	Rp. 1.609.000.000,00	Rp. 1.769.900.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.26.005	Rumah Perlindungan Sosial bagi Anak Jalanan dan Orang Terlantar	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	PA Tunas Harapan, PA Putri Islam, PA Ibadah Bunda, PA Amanah, PA Bina Putra, PA An Nur, PA Muh Nanggulan, PA Muh Tuksono, PA Darul Umul, PA An Nur Srimpi, PA Putri Islam Playen, PA Al Hikmah, PA Hamba, PSAA Bimomartani, Yayasan	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	8.34 %	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan (Anak jalanan dan orang yang terlantar)	20 anak	Anak jalanan dan orang yang terlantar dapat dilayani, dilindungi, direhabilitasi, advokasi dan reunifikasi	100 %	Rp. 381.362.650,00	Rp. 419.498.900,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Domore										
1.13.1.13.01.26.008	Pengasramaan Murid SLB	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Pengasih Playen Pengasih Playen	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	8.34 %	Pengasramaan murid SLB	50 Orang	Siswa SLB mendapat kemudahan dalam proses belajarnya	100 %	Rp. 588.585.000,00	Rp. 647.443.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.26.009	Pemberian jamina hidup pada Anak Dengan HIV/AIDS (ADHA)	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	8.34 %	Pemberian bantuan jaminan hidup (kebutuhan dasar) pada anak dengan HIV/AIDS (ADHA)	20 anak	Kebutuhan dasar ADHA terpenuhi selama 8 bulan	100 %	Rp. 58.289.000,00	Rp. 61.417.400,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.26.011	Perlindungan Bagi Anak Cacat Berbasis Keluarga	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	8.34 %	Perlindungan bagi anak cacat berbasis keluarga	200 anak	Anak cacat terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Rp. 620.404.300,00	Rp. 682.444.700,00	Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.13.1.13.01.27	PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR										Rp. 2.476.032.000,00	Rp. 2.723.635.200,00		
1.13.1.13.01.27.001	Bantuan permakanan bagi lanjut usia terlanter	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Banguntapan Berbah Kokap Ngampilan Ngemplak Panjatan Ponjong Pundong Semin Tegalrejo Jagalan Sendang Tirto Hargorejo Ngampilan Wedomartani Pleret Umbul Rejo Panjangrejo Bulurejo Kricak	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlanter	8.51 %	Pemberian bantuan permakanan bagi lanjut usia terlanter	400 Orang	Kebutuhan gizi dan kesehatan lanjut usia terlanter terpenuhi	100 %	Rp. 497.828.500,00	Rp. 547.611.350,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.13.1.13.01.27.002	Bimbingan Sosial UEP Lanjut Usia Terlantar	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Gondokusuman Kasihan Nglipar Sleman Wates Klitren Tamantirto Nglipar Pandowo Harjo Giri Peni	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	8.51 %	Bimbingan dan bantuan UEP Lanjut Usia Terlantar	200 Orang	Bantuan UEP bagi Lanjut Usia Terlantar	100 %	Rp. 351.903.500,00	Rp. 387.093.850,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.27.003	Fasilitasi pelayanan Lanjut Usia Melalui Home Care	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Bambang lipuro Banguntapan Kalasan Kotagede Kraton Mlati Paliyan Pengasih Purwosari Sapto sari Temon Wonosari Sidomulyo Banguntapan Selo Martani Purbayan Panembahan Sumberadi Mulusan Sidomulyo Giripurwo Giritirto Kebonrejo Kepek Wareng	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	8.51 %	Pendampingan Home Care Lanjut Usia	600 Orang	Terbantuannya dan terawatnya Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar	100 %	Rp. 346.679.000,00	Rp. 381.346.900,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.27.004	Jaminan Sosial Lanjut Usia	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Bambang lipuro Banguntapan Galur Gamping Girimulyo Gondomanan Imogiri Jetis Kalasan Karangmojo Kokap Kotagede Kraton Lendah Mergangsan Mlati Ngaglik Nglipar	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	8.51 %	1. Pelaksanaan kegiatan jaminan sosial lanjut usia (JSLU) 2. Koordinasi pertemuan pendamping JSLU dan ASLUT	1000 Orang	Pemenuhan kebutuhan Lanjut Usia Terlantar	100 %	Rp. 1.008.784.000,00	Rp. 1.109.662.400,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial										Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pajangan Pandak Panjatan Playen Ponjong Purwosari Semanu Semin Srandakan Temon Wirobrajan Wonosari Sidomulyo Banguntapan Wirokerten Tirta Rahayu Banyuraden Pendoworejo Wukirsari Gowongan Taman Martani Gedang Rejo Karangmojo Hargorejo Purbayan Rejowinangun Panembahan Sidorejo Keparakan Sendangadi Tlogoadi Suko Harjo Kedungpoh Triwidadi Caturharjo Bugel Krembangan Dengok Ponjong Sawahan Giripurwo Ngeposari Semin Trimurti Kebonrejo Pakuncen Wareng										
1.13.1.13.01.27.005	Forum Komunikasi Orsos Lanjut Usia	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlanter	8.51 %	Forum komunikasi orsos lanjut usia	50 Orang	Koordinasi, kerja sama orsos lanjut usia	100 %	Rp. 232.592.000,00	Rp. 255.851.200,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.13.1.13.01.27.006	Pelaksanaan KIE dan Kampanye sosial dalam rangka HALUN	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlanter	8.51 %	Konsultasi, informasi, edukasi, sarasehan LU dan gelar senam	1500 Orang	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam UKS Lanjut Usia	100 %	Rp. 38.245.000,00	Rp. 42.069.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.28	PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA										Rp. 820.575.550,00	Rp. 905.754.520,00		
1.13.1.13.01.28.001	Kampung Siaga Bencana	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Patuk Turi Ngoro Oro Giri Kerto	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	9.34 %	Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (4 lok)	440 Orang	Masyarakat rawan bencana lebih siap dalam penanggulangan bencana	100 %	Rp. 287.966.000,00	Rp. 316.762.600,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.28.002	Sarasehan Keserasian Sosial	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Gedang sari Kretek Sleman Umbulharjo Wates	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	9.34 %	Kesadaran warga masyarakat untuk menjaga keserasian sosial	300 Orang	Masyarakat sadar pentingnya menjaga keserasian sosial	100 %	Rp. 31.029.700,00	Rp. 34.132.670,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.28.003	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	9.34 %	Penanganan masalah-masalah sosial yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa (Air dan BBR)	2 keg	1.Kebutuhan air bersih korban kekeringan terpenuhi (500 tangki) 2. Kebutuhan bahan bangunan rumah untuk korban bencana terpenuhi (95 unit)	100 %	Rp. 405.737.350,00	Rp. 446.311.250,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.28.004	Pemulangan/ Meneruskan Perjalanan Orang Terlanter (OT)	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY dan Luar DIY	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	9.34 %	Memfasilitasi orang terlanter yang kehabisan bekal	12 bulan	Orang terlanter yang kehabisan bekal dapat melanjutkan perjalanannya	100 %	Rp. 71.408.000,00	Rp. 78.548.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.28.005	Pemulangan dan Pemakaman Jenazah Terlanter	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/ Kota se-DIY	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	9.34 %	Terawatnya jenazah terlanter / Gelandangan (OT)	20 Orang	Jenasah terlanter/ Gelandangan diamankan dengan layak	100 %	Rp. 24.434.500,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.29	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN										Rp. 580.848.050,00	Rp. 638.932.855,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	TINDAK KEKERASAN, PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL													
1.13.1.13.01.29.001	Fasilitasi Modal Usaha Pekerja Migran Bermasalah	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase keberfungsian sosial bagi korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan	6.34 %	Terlindungi Pekerja Migran Bermasalah dan mampu melaksanakan fungsi sosial	10 Orang	Pekerja Migran bermasalah berfungsi sosial dengan baik dengan kemandirian ekonominya.	100 %	Rp. 49.845.250,00	Rp. 54.829.775,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.29.002	Fasilitasi Modal Usaha Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase keberfungsian sosial bagi korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan	6.34 %	Terlindungi KTK dan mampu melaksanakan fungsi sosial	140 Orang	KTK berfungsi sosial dengan baik dengan kemandirian ekonominya	100 %	Rp. 531.002.800,00	Rp. 584.103.080,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)*										Rp. 4.776.443.100,00	Rp. 4.460.031.920,00		
1.13.1.13.01.30.001	PeningkatanPeran Aktif Masyarakat serta staeholder dunia usaha	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Pembinaan PUB dan UGB terhadap Masyarakat	5 kab/kota	Penyelenggaraan PUB dan UGB yang sesuai Prosedur	100 %	Rp. 92.275.000,00	Rp. 101.502.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.002	Pelatihan dan Penataran PSM	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kabupaten/Kota se DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Terselenggaranya Pelatihan dan Penataran PSM dan Rapat Kerja IPSM se DIY	178 Org	Meningkatnya Kapasitas Kinerja PSM	100 %	Rp. 345.930.000,00	Rp. 38.052.300,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.003	Bimbingan Manajemen Karangtaruna	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Terlaksananya Bimbingan Manajemen Karang Taruna	55 KT	Meningkatnya Kemampuan Manajemen Pengurus Karangtaruna	100 %	Rp. 750.200.000,00	Rp. 825.220.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.004	Bimbingan UEP Karang Taruna	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam	Kab/Kota se DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan	67.5 %	Terlaksananya Bimbingan UEP Karang Taruna	55 KT	Meningkatnya Kemampuan Pengurus Karang Taruna dalam	100 %	Rp. 819.745.000,00	Rp. 918.637.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			pengembangan sosial budaya		sosial				mengelola UEP					
1.13.1.13.01.30.005	Fasilitasi Binjut bagi orsos	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Yayasan Lembaga Berita Kitab Wahyu International, SPM Realino, PAY Muh Nitikan, PW Budhi Dharma, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Mardi Wuto, Panti Sosial Taabah, PA Tunas Harapan, PA Rekso Putro, PA Yatim Putra Islam, PA Yatim Putra Islam, PA Yatim	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Lanjut Organisasi Sosial	30 Orsos	Operasional Organisasi Sosial menjadi termotivasi	100 %	Rp. 29.206.000,00	Rp. 32.126.600,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.006	Bimbingan Konsultasi Timbal Balik Orsos	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Yayasan Sahabat Ibu, Orsos Sekarningyas, Orsos Lestari Mulyo, Orsos Damkar, LKM Kube Sejahtera Kronggahan, Lembaga Sabda, Orsos Sedyo Rukun, Orsos Ngudi Barokah, Orsos Duta Siaga, LKS Kembang	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Bimbingan Pengurus Orsos tentang manajemen	10 Orsos	Meningkatnya kemampuan / kinerja pengurus orsos	100 %	Rp. 256.554.000,00	Rp. 144.709.400,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.007	Bimbingan Penumbuhan UEP Embrional Orsos Desa	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	SPM Realino, Yayasan Putra Kauman, LPPM Bina Insan Mandiri, PA An Nuur, PA Santa Maria Boro, Orsos Sumber Mas, Orsos Rukun, Orsos Sedyo Makmur, Yayasan Mitra Sejahtera, Yayasan Arohman, Orsos	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Bimbingan Penumbuhan UEP Embrional Orsos terlaksana	14 Orsos	- Meningkatkan kemampuan Organisasi Sosial dalam pengetahuan UEP - Meningkatkan kemampuan orsos dalm pengelolaan UEP Orsos	100 %	Rp. 303.317.000,00	Rp. 315.891.400,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Langgeng, Lembaga Bhakti Kencana, Orsos Rukun, Orsos Sekaringtyas,										
1.13.1.13.01.30.008	Fasilitasi Kelembagaan WKSBM	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan WKSBM	25 lembaga	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Kelembagaan WKSBM	100 %	Rp. 268.605.000,00	Rp. 295.465.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.009	Pengembangan Kapasitas Diri dan Pendamping Kegiatan Rekonsiliasi	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Pengembangan kapasitas diri pendamping kegiatan dan rekonsiliasi	158 Orang	Pelaksanaan program jaminan sosial, diketahuinya tingkat keberhasilan pelaksanaan dan kendala yang dihadapi serta diperoleh pendamping yang berkuallitas.	100 %	Rp. 14.315.800,00	Rp. 15.747.380,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.010	Pelatihan dan Penataran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Terselengganya Pelatihan dan Penataran TKSK	78 Orang	Meningkatnya kapasitas kinerja TKSK	100 %	Rp. 744.808.000,00	Rp. 819.288.800,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.011	Temu Karya Daerah Karang Taruna	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Terlaksananya Temu Karya Karang Taruna dan Kemah Bhakti	400 Orang	Terpilih Pengurus mKT dan tumbuhnya rasa kebangsaan, kesetiakawanan dan gotong royong Karang Taruna	100 %	Rp. 282.806.000,00	Rp. 110,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.012	Penyegaran TAGANA dalam rangka kesiap siagaan penanggulangan bencana	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Dlingo Kalibawang Ngampilan Pakem Patuk Muntuk Banjaroyo Ngampilan Candi Binangun Terbah	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Kesiapsiagaan TAGANA dalam rangka penanggulangan bencana	150 Orang	TAGANA lebih siap dalam penanggulangan bencana	100 %	Rp. 440.925.000,00	Rp. 485.017.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.013	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat	Kab/Kota se DIY	Persentase PSKS dalam usaha	67.5 %	Pembinaan LK3	1 lembaga	Terciptanya hubungan harmoni antara	100 %	Rp. 41.717.000,00	Rp. 45.888.700,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Keluarga (LK3)		dalam pengembangan sosial budaya		kesejahteraan sosial				keluarga bermasalah sosial					
1.13.1.13.01.30.014	Peningkatan kapasitas TAGANA melalui pendidikan dan pelatihan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Peningkatan Kapasitas TAGANA melalui pendidikan dan pelatihan	50 Orang	Kesiapsiagaan TAGANA dalam rangka penanggulangan bencana khususnya menangani korban bencana berkebutuhan khusus.	100 %	Rp. 47.336.800,00	Rp. 52.070.480,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.015	Bimbingan Jurnalistik bagi PSKS	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/Kota se DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Terlaksananya Bimbingan Jurnalistik bagi PSKS	30 PSKS	Meningkatnya Kemampuan PSKS dalam penulisan berita	100 %	Rp. 76.980.000,00	Rp. 84.678.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.016	Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah	30 Osos	Terkoordinasinya program antara pemerntah dengan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah	100 %	Rp. 29.100.000,00	Rp. 32.010.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.30.017	Bimbingan Teknologi dasar pekerjaan sosia bagi penguru panti sosial	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Yaketunis, PA Al Islam, PA Reksa Putri, PA Tunas Harapan, Hellen Keller, YPPAG, PW Hanna, PW Prandan Padudan, PA Yapitu, PAYP Al Furqon, PA Nur Fadillah, PA Nurul HAQ, PA Bina Putra, PA Yapitu Al Huda, PA Alamiyah, PA Santa Maria Boro, PA Mambaul Hisna, PA Muh Nanggulan, PA Al Azhar, PA Muh PAdokan, PA Alamiyah, PA Gembala, PA Noor, PA Dharma Putra, PA Krido Mulyo,	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Bimbingan teknis dasar pekerjaan sosial bagi pengurus panti sosial	30 Orsos	Meningkatnya sumber daya manusia bagi pengurus panti	100 %	Rp. 88.340.000,00	Rp. 97.174.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				PA Suto Wijaya, PA Al Hikmah, PA Wiyata Dharma I dan II, PA Sulaimaniyah, PA Griya KAsih Victori, PA Bina Insani, PA BAKti Luhur.										
1.13.1.13.01.30.018	Lomba Orsos berprestasi	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Lomba orsos berprestasi	10 Orsos	Meningkatnya pemberdayaan dan penghargaan terhadap LKS yang berprestasi	100 %	Rp. 37.242.500,00	Rp. 40.966.750,00	Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.13.1.13.01.30.019	Workshop CSR kesos DIY dalam rangka kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan stakeholder	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Kesepakatan kersama CSR Kesos DIY dengan Pemerintah, Dunia usaha, perguruan tinggi dan stakeholder	1 keg	Tersusunnya dokumen program/kegiatan ng dikerjakamakan antara CSR Kesos DIY dengan Pmerintah, Dunia usaha, perguruan tingi dan stakeholder	100 %	Rp. 32.350.000,00	Rp. 35.585.000,00	Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.13.1.13.01.30.020	Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh Sosial Masyarakat	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	67.5 %	Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh Sosial Masyarakat	40 Orang	- Masyarakat memahami program pembangunan bidang kessos - Masyarakat berpartisipasi dalam penyebarluasan informasi program pembangunan bidang kessos	100 %	Rp. 74.690.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.13.1.13.01.31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL										Rp. 1.450.696.100,00	Rp. 1.180.477.800,00		
1.13.1.13.01.31.001	Peaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan	39.72 %	Kampanye Sosial Penyandang Disabilitas	430 Orang	Aspirasi para penyadang disabilitas tertampung	100 %	Rp. 72.000.000,00	Rp. 79.200.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kesejahteraan Sosial (PMKS)				sosial									
1.13.1.13.01.31.002	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Dinas Sosial	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	39.72 %	Updating data	438 Desa	Tersedianya data PMKS dan PSKS	100 %	Rp. 280.261.700,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.31.004	Sosialisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Banguntapan Berbah Galur Gamping Gedongtengen Imogiri Jetis Kalibawang Kokap Kotagede Lendah Mergangsan Minggir Mlati Moyudan Ngampilan Paliyan Panggang Panjatan Plyungan Playen Prambanan Pundong Purwosari Semanu Semin Tegalrejo Temon Umbulharjo	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	39.72 %	Sosialisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1260 Orang	Masyarakat mengetahui program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Rp. 91.830.000,00	Rp. 101.013.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.31.005	- Penyuluhan Sosial Desa	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/kota DIY	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	39.72 %	- Penyuluhan Sosial Tingkat Desa (25 lok) - Penyuluhan melalui media kesenian tradisional (20 lok)	2 keg	- Masyarakat memahami program pembangunan bidang kesos - Masyarakat peduli dan berpartisipasi dalam program pembangunan bidang kesos	100 %	Rp. 535.879.000,00	Rp. 182.466.900,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.31.006	Penyuluhan Sosial melalui Media Cetak	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam	Depok Prambanan Wates Wonosari	Persentase desa yang mendapatkan informasi	39.72 %	Penyuluhan Sosial melalui Media Cetak	4 Paket	Informasi pembangunan bidang kessos diketahui oleh	100 %	Rp. 32.135.000,00	Rp. 35.348.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Sosial											Jumlah Pagu : Rp. 54.019.055.946,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			pengembangan sosial budaya		pelayanan kesejahteraan sosial				masyarakat					
1.13.1.13.01.31.007	Penyuluhan Sosial Melalui Media Elektronika	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kab/kota DIY	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	39.72 %	Penyuluhan Sosial melalui Media Elektronik	1 kegiatan	Informasi Pembangunan Bidang Kessos diketahui oleh Masyarakat	100 %	Rp. 55.983.000,00	Rp. 61.581.300,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.13.1.13.01.31.010	Sosialisasi Program Penanganan PMKS	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	39.72 %	Sosialisasi Program Penanganan PMKS	130 lokasi	Program dan kegiatan penanganan penanganan PMKS diketahui oleh Masyarakat	100 %	Rp. 382.607.400,00	Rp. 420.868.100,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.14	Ketenagakerjaan													
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.													
1.14.1.14.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.719.524.000,00	Rp. 2.408.378.000,00		
1.14.1.14.01.01.001	Penyediaan Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perangko, meterai, paket pengiriman	12 bulan	Terpenuhinya surat menyurat	100 %	Rp. 16.960.000,00	Rp. 17.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Telepon, Air, Listrik, Internet	12 bulan	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, air, listrik dan internet	100 %	Rp. 745.095.000,00	Rp. 786.309.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa KIR, STNK Roda 4 , STNK roda 2	12 bulan	Terpenuhinya jasa KIR dan STNK kendaraan dinas	100 %	Rp. 28.135.000,00	Rp. 28.135.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.007	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan yang efektif dan tepat waktu selama 1 tahun	100 %	Rp. 84.660.000,00	Rp. 84.660.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Kebersihan Kantor	100 %	Rp. 437.300.000,00	Rp. 388.910.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan barang pakai habis	100 %	Rp. 77.500.000,00	Rp. 80.468.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Cetakan , Foto copy , Penjilidan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan serta penggandaan	100 %	Rp. 58.248.000,00	Rp. 58.248.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat listrik dan elektronika	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Rp. 29.313.000,00	Rp. 29.313.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.14.1.14.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100 %	Rp. 46.328.000,00	Rp. 44.327.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Surat kabar	12 bulan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Rp. 16.750.000,00	Rp. 16.750.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan logistik kantor	12 bulan	Terlaksananya dan tersedianya logistik kantor	100 %	Rp. 24.434.000,00	Rp. 23.234.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan jamuan makanan dan minuman	12 bulan	Tersediaanya makanan dan minuman	100 %	Rp. 28.940.000,00	Rp. 28.976.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.018	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Rapat rapat koordinasi	12 bulan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	100 %	Rp. 311.769.000,00	Rp. 303.455.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Petugas keamanan PTT , Petugas keamanan (pihak ketiga)	12 bulan	Keamanan kantor yang terjaga	100 %	Rp. 814.092.000,00	Rp. 518.592.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.820.612.000,00	Rp. 5.171.303.000,00		
1.14.1.14.01.02.005	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	4 unit	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	100 %	Rp. 401.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	100 %	Rp. 436.570.000,00	Rp. 385.280.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.14.1.14.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	100 %	Rp. 844.482.000,00	Rp. 804.482.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Mebeleur	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur	100 %	Rp. 330.540.000,00	Rp. 330.540.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	Terpeliharanya bangunan gedung	100 %	Rp. 553.345.000,00	Rp. 428.345.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Terpeliharanya kualitas kendaraan dinas/operasional	100 %	Rp. 549.181.000,00	Rp. 549.181.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100 %	Rp. 81.900.000,00	Rp. 81.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Geudng Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Geudng Kantor	12 bulan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 %	Rp. 97.400.000,00	Rp. 96.400.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12 bulan	Terpeliharanya mebeleur	100 %	Rp. 48.500.000,00	Rp. 48.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.02.036	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Dinas Tenaga Kerja dan	Prosentase penyediaan dan	100 %	Terpeliharanya pustaka	12 bulan	Terpeliharanya sarana dan prasarana pustaka	100 %	Rp. 7.694.000,00	Rp. 7.694.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkat	Transmigrasi	pemeliharaan sarana prasarana aparatur								Transmigrasi.	
1.14.1.14.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Paket	Terpenuhinya rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100 %	Rp. 1.395.000.000,00	Rp. 2.075.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.02.046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Naskah Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya naskah dinas	12 bulan	Terpeliharanya arsip dan naskah dinas	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 14.881.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 61.544.000,00	Rp. 41.559.000,00		
1.14.1.14.01.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	73 Orang	Dapat diketahuinya angka kredit jabatan fungsional instruktur, dapat diketahuinya penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas, dapat diketahuinya penilaian angka kredit jabatan fungsional litkayasa	100 %	Rp. 12.544.000,00	Rp. 12.544.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.05.032	Pengembangan Kualitas SDM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peningkatan kualitas pegawai	140 Orang	Peningkatan kualitas mental pegawai	100 %	Rp. 49.000.000,00	Rp. 29.015.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 580.422.000,00	Rp. 370.245.000,00		
1.14.1.14.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung	100 %	Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 dokumen	Terinformasikannya laporan capaian kinerja	100 %	Rp. 11.800.000,00	Rp. 11.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
1.14.1.14.01.06.017	penyusunan laporan keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Laporan Keuangan semesteran an prognosis realisasi anggaran 2. Laporan Keuangan akhir tahun	2 dokumen	Tersusunnya laporan keuangan semesteran & prognosis Realisasi anggaran dan laporan akhir tahun yang akuntabel dan informatif	100 %	Rp. 22.401.000,00	Rp. 22.401.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen perencanaan Program dan kegiatan	2 dokumen	termanfaatkanya dokumen perencanaan program dan kegiatan	100 %	Rp. 302.221.000,00	Rp. 116.812.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Monev program kegiatan dan pelaporan	13 laporan	Terinformasikanya laporan realisasi anggaran dan fisik	100 %	Rp. 244.000.000,00	Rp. 219.232.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										Rp. 8.899.343.000,00	Rp. 9.857.196.340,00		
1.14.1.14.01.15.012	Bimtek Manajemen Competency Based Training	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terlaksananya bimtek manajemen competency based training	20 Orang	Meningkatnya kinerja tenaga kepelatihan dan instruktur	100 %	Rp. 62.015.000,00	Rp. 68.216.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.015	Pembinaan Peserta Pemagangan ke Perusahaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Yogyakarta	Persentase besaran tenaga kerja yang	25 %	Peserta magang ke perusahaan	300 Orang	penempatan di perusahaan dan atau usaha mandiri	100 %	Rp. 865.622.000,00	Rp. 952.185.163,00	Dinas Tenaga Kerja dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Menurun		mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat								Transmigrasi.	
1.14.1.14.01.15.024	Pelatihan Keterampilan Institusional Bagi Pencari Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Institusional menjaring masyarakat umum penganggur pencari kerja agar dapat menguasai keahlian untuk modal nantinya dapat bersaing dalam dunia industri dengan bidangnya dan dapat membuka usaha sendiri/lapangan pekerjaan	400 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pencari kerja di bidang Komputer, Bahasa Asing, Menjahit, bordir, Las Listrik, HP, Otomotif, dan Perhotelan	100 %	Rp. 778.800.000,00	Rp. 856.679.890,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.026	Pelatihan Ketrampilan Swadana	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan untuk Para Pencari Kerja Kejuruan : Komputer, Bahasa Asing, Otomotif, Tekmek, dan Menjahit	280 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pencari Kerja di Bidang Komputer, Bahasa Asing, Otomotif, Tekmek dan Aneka Kerajinan	100 %	Rp. 335.262.000,00	Rp. 335.262.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.027	Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna Utk Usaha Mandiri	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Teknologi Tepat Guna untuk Usaha Mandiri pada kejuruan Teknologi Mekanik	80 Orang	Pencari Kerja dapat menghasilkan barang teknologi Tepat Guna	100 %	Rp. 450.782.000,00	Rp. 474.828.200,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.033	Forum Kerjasama Lembaga Pelaksana Program magang Dalam negeri	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Forum Komunikasi Pemagangan Dalam Negeri	100 Orang	Kesepahaman antara LPK dan Perusahaan	100 %	Rp. 33.022.000,00	Rp. 36.324.172,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.036	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis	25 %	Terlaksananya Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kerja	90 Orang	Sertifikasi Uji KOMPetensi Tenaga Kerja	100 %	Rp. 125.961.000,00	Rp. 126.959.250,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kompetensi dan berbasis masyarakat									
1.14.1.14.01.15.038	Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Sosialisasi Program Pemagangan ke Jepang	1000 Orang	Pemahaman tentang program magang ke Jepang	100 %	Rp. 154.530.000,00	Rp. 169.983.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.042	Pembinaan Peserta Pasca Pemagangan ke Perusahaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Pembinaan Peserta Pasca magang ke Perusahaan	40 Orang	Kemampuan manajemen usaha	100 %	Rp. 224.743.000,00	Rp. 247.217.025,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.044	Pembinaan Peserta Pasca Pemagangan ke Jepang	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Pembinaan Peserta Pasca magang Jepang	40 Orang	Kemampuan manajemen usaha	100 %	Rp. 233.322.000,00	Rp. 131.474.090,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.047	Sertifikasi Uji Kompetensi Instruktur	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terlaksananya uji kompetensi bagi instruktur	20 Orang	sertifikasi kompetensi instruktur	100 %	Rp. 35.632.000,00	Rp. 40.367.250,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.052	Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta Pemagangan ke Jepang	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terekrutnya peserta magang ke Jepang	100 Orang	peserta magang ke Jepang	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 1.452.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.054	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	25 %	Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	380 Orang	Tenaga Kerja yang Produktif dan Kompetitif	100 %	Rp. 439.000.000,00	Rp. 482.900.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat									
1.14.1.14.01.15.061	Sertifikasi Uji Kompetensi Pencari Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	60 Orang	Sertifikasi Kompetensi Perhotelan, Otomotif dan Listrik	100 %	Rp. 65.027.000,00	Rp. 71.529.700,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.063	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Dokter Perusahaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terselenggaranya pelatihan Hiperkes dan KK bagi dokter perusahaan	330 Orang	Sertifikasi dokter perusahaan	100 %	Rp. 382.882.000,00	Rp. 409.310.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.064	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Guru SMK, SLTA Berlaboratorium dan LPK	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terselenggaranya pelatihan Hiperkes dan KK bagi guru SMK, SLTA berlaboratorium dan LPK	30 Orang	Sertifikasi guru SMK,SLTA, berlaboratorium dan LPK	100 %	Rp. 35.371.000,00	Rp. 49.646.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.065	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Teknisi Perusahaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terselenggaranya pelatihan Hiperkes dan KK bagi teknisi perusahaan	60 Orang	Sertifikasi teknisi perusahaan	100 %	Rp. 51.050.000,00	Rp. 59.926.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.066	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Pencaker	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terselenggaranya pelatihan Hiperkes dan KK bagi pencari kerja	90 Orang	Sertifikasi bagi pencari kerja	100 %	Rp. 52.666.000,00	Rp. 64.989.100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.15.067	Penyusunan Database LPK	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan	25 %	Pendataan lembaga	20 LPK	Tersusunnya data lembaga pelatihan kerja	100 %	Rp. 21.259.000,00	Rp. 23.384.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Baru - Kegiatan belum memberikan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat									Keluaran
1.14.1.14.01.15.068	Pelatihan Keterampilan Aneka Kerajinan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Pelatihan Keterampilan Aneka Kerajinan	180 Orang	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemandirian pencari kerja dalam bidang menjahit	100 %	Rp. 1.277.896.000,00	Rp. 1.277.896.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.14.1.14.01.15.069	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Makanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Pelatihan Keterampilan Pengolahan Makanan	180 Orang	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemandirian pencari kerja/penganggur dalam mengolah hasil pertanian di desa / kelurahan	100 %	Rp. 1.301.504.000,00	Rp. 1.301.504.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.14.1.14.01.15.070	Pelatihan Perbengkelan bagi Pencari Kerja di Desa/Kelurahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Pelatihan Keterampilan bidang perbengkelan	160 Orang	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian pencari kerja bidang otomotif, las listrik, dan bangunan	100 %	Rp. 1.188.614.000,00	Rp. 1.188.614.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.14.1.14.01.15.071	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Paramedis	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	25 %	Terselenggaranya pelatihan Hiperkes dan KK bagi paramedis	30 Orang	Sertifikasi paramedis	100 %	Rp. 34.383.000,00	Rp. 36.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA										Rp. 13.018.897.000,00	Rp. 15.524.105.000,00		
1.14.1.14.01.16.013	Pemberdayaan masyarakat setengah penganggur melalui fasilitasi kelompok kerja produktif (KKPBI)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Terbentuknya kelompok usaha bersama	100 Orang	terbentuknya kelompok wirausaha baru	100 Orang	Rp. 149.325.000,00	Rp. 164.257.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.014	Pembinaan dan Penempatan tanaga	Penyediaan Sarana dan	Kesenjangan Pendapatan	Yogyakarta	Persentase besaran	9.5 %	Pembekalan tenaga kerja melalui	600 Orang	penempatan tenaga kerja AKAD	100 %	Rp. 466.398.000,00	Rp. 513.038.000,00	Dinas Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kerja AKAD	Prasarana	Masyarakat Menurun		kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja		mekanisme AKAD						dan Transmigrasi.	
1.14.1.14.01.16.015	Facilitasi purna tenaga kerja Indonesia (TKI), AKAD dan AKL Usaha Mandiri	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	para purna TKI, AKAD dan AKL Usaha Mandiri	75 Orang	Meningkatnya jiwa wirausaha baru bagi purna TKI, AKAD dan AKLO usaha mandiri	100 %	Rp. 349.422.000,00	Rp. 384.364.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.016	pembinaan angkatan kerja khusus (AKSUS)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	pembinaan angkatan kerja khusus	100 Orang	peserta pembinaan mampu membentuk kelompok wirausaha	100 %	Rp. 426.032.000,00	Rp. 468.635.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.018	Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Rumusan perencanaan pengurangan pengangguran	1 rumusan	Terimplementasikannya perencanaan menjadi kebijakan pengurangan pengangguran	100 %	Rp. 219.278.000,00	Rp. 214.278.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.020	Pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian Berbasis TI	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Layanan Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian berbasis TI	1 layanan	Masyarakat mendapat informasi ketenagakerjaan dan ketramigrasian	100 %	Rp. 56.175.000,00	Rp. 151.250.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.022	Pengurangan pengangguran mellaui padat karya infrastruktur	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	terlaksananya kegiatan pembuatan/perbaikan sarana infrastruktur masyarakat melalui sistem padat karya 30 lokasi	3600 oang	Penyerapan tenaga kerja padat karya	100 %	Rp. 5.458.445.000,00	Rp. 6.604.400.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.024	Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	terbentuknya kelompok usaha bersama 27 lokasi	540 Orang	Terciptanya kesempatan kerja melalui sistem padat karya	100 %	Rp. 2.251.503.000,00	Rp. 2.695.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.025	Pembentukan Wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri terdidik	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Terbentuknya kelompok wirausaha baru mellaui kegiatan TKMT	300 Orang	Terciptanya perluasan kesempatan kerja	500 Orang	Rp. 980.531.000,00	Rp. 1.694.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.027	Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat PHK	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap	9.5 %	terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja akibat PHK	200 Orang	terbentuknya kelompok usaha bersama bagi tenaga kerja ter PHK	100 %	Rp. 434.300.000,00	Rp. 375.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					jumlah pencari kerja									
1.14.1.14.01.16.029	Pembinaan dan Pengembangan tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Terfasilitasinya tenaga kerja mandiri sektor informal	125 Orang	Perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri sektor informal	100 %	Rp. 389.545.000,00	Rp. 428.499.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.033	Penyebaran Informasi Pasar Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Tersedianya Informasi Pasar Kerja	15 jenis buku	Tersebar nya Informasi Pasar Kerja	100 %	Rp. 22.345.000,00	Rp. 24.579.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.034	Pameran bursa kerja terbuka	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Terlaksananya pameran bursa kerja terbuka	7000 pengunjung	Terpenuhinya peserta dan pengunjung pameran bursa kerja	100 %	Rp. 328.630.000,00	Rp. 361.493.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.035	Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja daerah	1 dokumen	Termanfakaatkanya Dokumen sebagai pedoman Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	100 %	Rp. 102.387.000,00	Rp. 96.987.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.046	Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja Perusahaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Peserta Pengembangan Produktivitas bagi Tenaga Kerja Perusahaan	120 Orang	Tenaga Kerja Perusahaan yang Produktif	100 %	Rp. 176.000.000,00	Rp. 176.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.052	Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Pemantauan Penempatan TKA	50 perusahaan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan pengguna TKA dan TKA nya	100 %	Rp. 28.969.000,00	Rp. 31.866.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.058	Pembekalan Petugas Bursa Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Terlaksananya Pembekalan Petugas Bursa Kerja	30 Orang	Peningkatan Kinerja Petugas Bursa Kerja	100 %	Rp. 50.345.000,00	Rp. 55.379.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.059	Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui Media Elektronik	1 Paket	Masyarakat mendapatkan informasi mengenai program ketenagakerjaan	100 %	Rp. 257.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.14.1.14.01.16.060	Pemantauan Perusahaan Pengguna Penyandang cacat (penca)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Perusahaan Pengguna penca	75 perusahaan	Meningkatnya perusahaan dan pelaksanaan undang-undang penca di perusahaan	100 %	Rp. 31.655.000,00	Rp. 40.405.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.061	Pengurangan Pengangguran Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Terbentuknya kelompok usaha bersama	300 Orang	pembentukan wirausaha baru	100 %	Rp. 825.000.000,00	Rp. 907.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.16.065	Pembinaan pengantar kerja dan petugas antar kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	9.5 %	Para Pengantar kerja dan Petugas Antar Kerja	35 Orang	Meningkatnya wawasan kerja	100 %	Rp. 15.612.000,00	Rp. 17.173.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.18	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN										Rp. 293.884.000,00	Rp. 267.913.000,00		
1.14.1.14.01.18.001	Bimtek Instruktur LPK	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %	Peserta yang mendapatkan Bimtek Instruktur	20 Orang	Peningkatan Kualitas Instruktur	100 %	Rp. 34.628.000,00	Rp. 34.628.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.18.002	Pemantauan Lembaga Penempatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %	Pemantauan Lembaga Penempatan	40 lembaga	Peningkatan Kinerja Lembaga Penempatan	100 %	Rp. 19.145.000,00	Rp. 21.059.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.18.003	Surveilen Laboratorium Terakreditasi Sesuai ISO	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %	Surveilen dalam mempertahankan laboratorium terakreditasi sesuai ISO 17025 tahun 2005	9 parameter	Surveilen 9 parameter uji laboratorium sesuai ISO 17025 tahun 2005	100 %	Rp. 52.088.000,00	Rp. 50.325.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.18.004	Surveilen Manajemen Sistem Mutu Sesuai Standar ISO (BLKPP dan Bala Hiperkes dan KK)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %	Surveilen dalam mempertahankan sistem manajemen mutu terakreditasi sesuai ISO 9001 tahun 2008	2 dokumen	Terwujudnya sertifikasi akreditasi manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008	100 %	Rp. 88.588.000,00	Rp. 52.844.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.14.1.14.01.18.006	Bimtek Akreditasi LPK	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %	Peserta yang mendapatkan Bimtek Akreditasi LPK	20 Orang	Penerapan Tata Cara Akreditasi LPK	100 %	Rp. 34.628.000,00	Rp. 38.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.18.007	Penyuluhan Pembinaan dan Perlindungan CTKI/TKI	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %	CTKI/TKI memahami Hak dan Kewajibannya	150 Orang	Peningkatan Pemahaman CTKI/TKI tentang Hak dan Kewajibannya	100 %	Rp. 46.415.000,00	Rp. 51.056.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.18.008	Pembinaan Asosiasi Profesi Bidang Pelatihan Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	50 %	Peserta Pembinaan Asosiasi Profesi Bidang Pelatihan Kerja	50 Orang	Rekomendasi Peningkatan Pelaksanaan Pelatihan Kerja	100 %	Rp. 18.392.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19	PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN										Rp. 1.323.858.000,00	Rp. 1.986.977.400,00		
1.14.1.14.01.19.012	Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Terselenggaranya pemeriksaan kerja pada perusahaan besar menengah dan UMKM	610 Orang dan 40 umkm	Terwujudnya perlindungan tenaga kerja terhadap penyakit akibat kerja pada perusahaan besar, menengah dan UMKM	100 %	Rp. 66.550.000,00	Rp. 66.550.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19.013	Bimtek Struktur dan Skala Upah Dalam Rangka Perlindungan Upah Tenaga Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Bimtek struktur dan skala upah	50 Orang	Peningkatan kualitas pengupahan bagi pekerja di perusahaan	100 %	Rp. 48.538.000,00	Rp. 534.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19.036	Pengujian Lingkungan Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan	15.6 %	Terselenggaranya Pengujian Lingkungan Kerja pada Perusahaan Besar dan Menengah dan UMKM	90 perusahaan	Terwujudnya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya lingkungan kerjaterhadap bahaya lingkungan kerja pada perusahaan besar,	100 %	Rp. 250.922.000,00	Rp. 332.750.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					di bidang norma kerja dan K3				menengah dan UMKM					
1.14.1.14.01.19.037	Peningkatan Pengawasan Norma kerja dan K3	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Terlaksananya pengawasan norma kerja K3	120 perusahaan	Berkurangnya tingkat pelanggaran Norma Kerja dan K3 melalui pembinaan dan penyuluhan	100 %	Rp. 83.219.000,00	Rp. 91.540.900,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19.056	Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Terlaksananya Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja	100 perusahaan	Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja meningkat	100 %	Rp. 32.478.000,00	Rp. 35.725.800,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19.061	Pemeriksaan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Terlaksananya Pemeriksaan Alat-alat K3	200 perusahaan	Meningkatnya pemahaman dan Penerapan K3 di Perusahaan	100 %	Rp. 191.576.000,00	Rp. 210.733.600,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19.067	Fasilitasi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Terlaksananya Fasilitasi PBPTA dan Penyuluhan Tentang PBPTA	20 Orang	Terumuskannya Program Aksi PBPTA	1 rumusan	Rp. 82.500.000,00	Rp. 90.750.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19.072	Rapat Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Ketenagakerjaan se-DIY	30 Orang	Meningkatnya koordinasi antar pegawai pengawas se-DIY	100 %	Rp. 15.393.000,00	Rp. 16.932.300,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.14.1.14.01.19.090	Perlindungan Tenaga Kerja Wanita	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Terlaksananya Perlindungan Tenaga Kerja Wanita	120 perusahaan	Berkurangnya tingkat pelanggaran Norma Perlindungan Tenaga Kerja Wanita	100 %	Rp. 89.819.000,00	Rp. 98.800.900,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19.101	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja	100 Orang	Berkurangnya kasus HIV/AIDS, Tuberkulosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja	100 %	Rp. 79.222.000,00	Rp. 87.144.200,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19.103	Peningkatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja di Wilayah Perairan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Penerapan budaya K3 di bidang nelayan dan perikanan	120 Orang	Berkurangnya tingkat pelanggaran Norma K3 melalui pembinaan dan penyuluhan	100 %	Rp. 128.227.000,00	Rp. 141.049.700,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19.104	Perlindungan TKLHK	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Sosialisasi perlindungan Tenaga kerja Luar Hubungan Kerja	75 Orang	Peningkatan kesejahteraan TKLHK melalui jamsos TKLHK	100 %	Rp. 45.414.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.19.105	Pelatihan Ahli Keselamatan & Kesehatan kerja Umum di perusahaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	15.6 %	Penerapan K3 di Perusahaan	30 Orang	Berkurangnya tingkat pelanggaran Norma K3	100 %	Rp. 210.000.000,00	Rp. 231.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20	PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN										Rp. 1.025.519.000,00	Rp. 968.859.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	INDUSTRIAL													
1.14.1.14.01.20.001	Pemantauan Perusahaan rawan Perselisihan Hubungan Industrial	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesihan hubungan industrial	65 %	terlaksananya Kegiatan Pemantauan Pembinaan Perusahaan Rawan Perselisihan HI	92 perusahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Pengusaha dan Pekerja Tentang syarat-syarat kerja dan norma Hubungan Industrial di perusahaan	100 %	Rp. 34.035.000,00	Rp. 31.196.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.002	Koordinasi dewan Pengupahan Provinsi DIY	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesihan hubungan industrial	65 %	Keputusan Gubernur tentang UMP dan UMK tahun 2016	1 Paket	terlaksananya penetapan UMP dan UMK 2016 dan regulasi pengupahan	100 persen	Rp. 381.000.000,00	Rp. 381.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.004	Sidang LKS Tripartit Tingkat Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesihan hubungan industrial	65 %	Terlaksananya Sidang LKS Tripartit Tingkat Provinsi	6 sidang	Meningkatnya jumlah pokok pikiran Badan Pekerja dan Kesepakatan Bersama LKS Tripartit Tingkat Provinsi dalam bidang Hubungan Industrial	100 %	Rp. 40.440.000,00	Rp. 46.420.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.005	Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesihan hubungan industrial	65 %	Terlaksananya Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Provinsi	60 Orang	Terlaksananya Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Rp. 16.825.000,00	Rp. 24.414.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.009	Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial bagi Mediator	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesihan hubungan industrial	65 %	Peningkatan pemahaman penyelesaian kasus Hubungan Industrial bagi Mediator	90 Orang	Meningkatnya Pemahaman Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial bagi Mediator	100 %	Rp. 24.500.000,00	Rp. 28.204.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.010	Sosialisasi Syarat-syarat kerja dalam Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesihan hubungan industrial	65 %	Terlaksananya Sosialisasi Syarat-syarat kerja dalam Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja	60 Orang	Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Pengusaha, Pekerja, dan Serikat Pekerja tentang syarat-syarat kerja dan norma kerja	100 %	Rp. 16.985.000,00	Rp. 21.026.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.011	Sosialisasi peningkatan manajemen organisasi SP/SB	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesihan hubungan industrial	65 %	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Organisasi SP/SB	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang tugas dan fungsi dari Organisasi Pekerja	100 %	Rp. 17.395.000,00	Rp. 20.234.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.14.1.14.01.20.012	Sosialisasi Hubungan Industrial bagi Guru Bimbingan Konseling SMK	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesaian hubungan industrial	65 %	Terlaksananya Sosialisasi Hubungan Industrial bagi Guru BK SMK	60 Orang	Pemahaman yang baik dan benar terhadap guru BK SMK se DIY tentang Hubungan Industrial	100 %	Rp. 16.685.000,00	Rp. 19.013.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.013	Identifikasi penangguhan upah minimum di DIY	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesaian hubungan industrial	65 %	Identifikasi penangguhan UM di DIY	30 perusahaan	Terlindunginya hak pekerja	100 %	Rp. 38.500.000,00	Rp. 42.350.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.030	Sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesaian hubungan industrial	65 %	sosialisasi jamsos ketenagakerjaan	75 perusahaan	Peningkatan sosialisasi dan kepesertaan jamsos TK	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.14.1.14.01.20.042	Sosialisasi Upah Minimum di DIY	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesaian hubungan industrial	65 %	Sosialisasi penerapan upah minimum	75 perusahaan	Peningkatan sosialisasi dan informasi tentang UMP dan UMK	100 %	Rp. 58.366.000,00	Rp. 64.250.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.075	Identifikasi dan Pemantauan THR	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesaian hubungan industrial	65 %	Identifikasi dan pemantuan THR	30 perusahaan	Terindunginya hak pekerja dalam pembayaran THR	100 %	Rp. 23.980.000,00	Rp. 26.250.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.077	Bimtek Penetapan Nilai KHL	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesaian hubungan industrial	65 %	bimtek tata cara penetapan nilai KHL	50 Orang	Peningkatan kualitas penetapan nilai KHL	100 %	Rp. 44.146.000,00	Rp. 48.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.084	Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesaian hubungan industrial	65 %	Pembinaan penghuni rusunawa	180 Orang	Peningkatan kepatuhan pelaksanaan pergub ttg penghuni rusunawa	100 %	Rp. 152.662.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
1.14.1.14.01.20.085	Peringatan Hari Buruh	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	DIY	Persentase besaran penyelesaian	65 %	Peringatan Hari Buruh	1 Paket	Peringatan Hari Buruh	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Tenaga Kerja dan	Baru - Kegiatan belum

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Menurun		kasus perselesaian hubungan industrial								Transmigrasi.	memberikan Keluaran
2	Pilihan													
2.08	Ketransmigrasian													
2.08.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.													
2.08.1.14.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI										Rp. 2.797.745.000,00	Rp. 2.704.761.100,00		
2.08.1.14.01.15.002	Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor alam rangka pengembangan wilayah transmigrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Kerjasama daerah bidang ketransmigrasian	1 Paket	Naskah kerjasama	1 Paket	Rp. 165.413.000,00	Rp. 181.954.300,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
2.08.1.14.01.15.007	Seleksi Calon Transmigrasi Tingkat Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Seleksi Catrans Tingkat Provinsi	100 KK	Transmigran yang memenuhi kreteria persyaratan dan kualitas yang dibutuhkan	100 %	Rp. 182.507.000,00	Rp. 182.507.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
2.08.1.14.01.15.008	Fasilitasi, Koordinasi Sinkronisasi dan Sosialisasi Program Transmigrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	KIE bidang ketransmigrasian	1 Paket	Informasi potensi	1 Paket	Rp. 172.084.000,00	Rp. 189.292.400,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
2.08.1.14.01.15.010	Penampungan,Angkutan dan Pengawasan Transmigran	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Penampungan, Angkutan dan Pengawasan Transmigrasi	100 KK	Pelayanan Transmigran sesuai standart/juklak	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
2.08.1.14.01.15.011	Pemeriksaan Kesehatan Calon Transmigran	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Pemeriksaan Kesehatan Calon Transmigran	100 KK	Transmigran yang memenuhi syarat kesehatan	100 %	Rp. 86.039.000,00	Rp. 86.039.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
2.08.1.14.01.15.013	Perbekalan Calon Transmigran	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Perbekalan Bagi Calon Transmigran	100 KK	Perbekalan Calon transmigran	100 %	Rp. 813.357.000,00	Rp. 828.357.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan
2.08.1.14.01.15.015	Pelatihan Transmigrasi Regional	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Pelatihan Transmigransi Regional	100 KK	Calon Transmigran yang trampil di bidang pertanian terpadu	100 %	Rp. 395.681.000,00	Rp. 395.681.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.											Jumlah Pagu : Rp. 35.541.348.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.1.14.01.15.017	Penyelesaian prmasalahan transmigrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Penyelesaian Permasalahan Transmigrasi	1 Paket	Penyelesaian Permasalahan Transmigrasi	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.08.1.14.01.15.103	Pemberdayaan Transmigrasi Lokal	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Yogyakarta	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	20 %	Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal Lokasi Ring I	1 Paket	Usaha Ekonomi	1 Paket	Rp. 82.664.000,00	Rp. 90.930.400,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM													
1.15.1.15.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.079.078.000,00	Rp. 2.455.573.700,00		
1.15.1.15.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat	4 jenis	Terfasilitasinya Administrasi Prkantoran	100 %	Rp. 7.000.000,00	Rp. 9.020.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.002	Penyediaan Jasa Kebutuhan Air, Telepon, Listrik, dan Internet	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Listrik, dan Internet	12 bulan	Terfailitasinya administrasi Perkantoran	100 %	Rp. 579.391.578,00	Rp. 96.800.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional	2 jenis	Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional	100 %	Rp. 19.660.000,00	Rp. 21.626.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium pengelola keuangan, pengelola pegawai, pengelola barang	12 bulan	Jasa Adminstrasi Keuangan	100 %	Rp. 92.900.000,00	Rp. 102.190.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 bulan	Kebersihan kantor terjaga	100 %	Rp. 210.000.000,00	Rp. 357.772.800,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	70 jenis	Terfasilitasinya administrasi perkantoran	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 133.650.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	Terfasilitasiya dministrasi perkantoran	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 123.750.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi listrik	27 jenis	Tersedianya penerangan dalam kantor	100 %	Rp. 35.750.000,00	Rp. 39.325.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	Rp. 6.770.000,00	Rp. 7.447.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	23 jenis	Kebutuhan Logistik Kantor Terpenuhi	100 %	Rp. 19.250.000,00	Rp. 21.750.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Koran KR, Kompas,Buku bacaan	3 jenis	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	Rp. 16.000.000,00	Rp. 23.584.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman rapat	12 bulan	Rapat-rapat intern berjalan lancar	100 %	Rp. 115.000.000,00	Rp. 130.438.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsitasi ke luar daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah	12 bulan	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	100 %	Rp. 526.580.000,00	Rp. 849.207.700,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Honorarium dan uang makan jaga malam, Tenaga dan uang makan operator, Honorarium tenaga outsourcing.	12 bulan	Terjaganya keamanan kantor	100 %	Rp. 243.096.422,00	Rp. 530.565.200,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Retribusi Sampah	12 bulan	Terfasilitasinya administrasi kantor	100 %	Rp. 7.680.000,00	Rp. 8.448.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 7.449.000.000,00	Rp. 13.377.520.935,00		
1.15.1.15.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembangunan Gedung kantor	1 Gedung BPTTG (Lantai 1)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	Rp. 5.600.000.000,00	Rp. 7.377.453.985,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.02.004	Pengadaan kendaraan dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	tersedianya Mobil operasional	1 unit	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	Rp. 225.000.000,00	Rp. 1.320.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Tersedianya perlengkapan kerja	3 jenis	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 401.378.340,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan kerja kantor (komputer dll)	2 jenis	Terpenuhinya sarana dan prasarana kebutuhan kantor	100 %	Rp. 375.000.000,00	Rp. 1.849.569.700,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	tersedianya Mebeleur bagi kantor	19 jenis	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 940.530.910,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.02.022	Pemeliharaaa rutin/Berkala Gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perbaikan gedung dan kegunaannya	13 jenis	Gedung kantor dan kelengkapannya yang berdaya guna dan berhasil guna	100 %	Rp. 207.000.000,00	Rp. 803.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	Kendaraan dinas yang dikelola Disperindagkop DIY berdaya guna	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 429.198.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.02.026	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor disperindagkop	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan kantor	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 66.440.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya peralatan gedung kantor disperindag	19 tahun	Peralatan gedung kantor yang berdaya guna dan berhasil guna	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 169.950.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.02.029	Pengelolaan Arsip Dinamis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengelolaan arsip dinamis	12 bulan	lebih tertibnya Arsip Dinas	10 %	Rp. 17.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.15.1.15.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 28.600.000,00	Rp. 97.460.000,00		
1.15.1.15.01.05.001	Pendidikan danPelatihan Formal	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Kursus singkat pelatihan	52 OD	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan	100 %	Rp. 28.600.000,00	Rp. 97.460.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.15.1.15.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 207.750.000,00	Rp. 254.887.318,00		
1.15.1.15.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Kinerja SKPD	4 dokumen	Tersusunnya laporan kinerja Dispeindagkop DIY	100 %	Rp. 7.000.000,00	Rp. 8.022.377,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan keuangan Disperindag DIY	2 dokumen	Laporan keuangan semesteran, prognosis dan laporan akhir tahun	100 %	Rp. 15.250.000,00	Rp. 17.191.983,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Program Disperindagkop DIY TA 2016	1 dokumen	Tersusunnya Prgram Kegiatan TA 2016 dan Tersedianya data Disperindagkop DIY	100 %	Rp. 155.000.000,00	Rp. 194.677.365,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
							Pengelolaan Data TI	1 tahun						
							Pengelolaan Website Dinas	1 tahun						
1.15.1.15.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Disperindagkop DIY TA 2015	1 tahun	Termonitoringnya Pelaksanaan Kegiatan Disperindagkop tahun 2015	100 %	Rp. 30.500.000,00	Rp. 34.995.593,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF										Rp. 525.000.000,00	Rp. 88.000.000,00		
1.15.1.15.01.15.033	Fasilitasi pengembangan koperasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Jumlah UKM	229467 unit usaha	1. Pengembangan Kopsis dan Kopma 2. Penilaian Pemeringkatan dan pembinaa Koperasi 3. Pengawasan dan	6 kegiatan	Fasilitasi pengembangan koperasi	10 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pembinaan KSP dan KJKS/UJKS Koperasi 4. Lokakarya peran DPS dalam pengawasan KJKS 5. Diklat Pengembangan Perkoperasian 6. Diklat Akutansi koperasi Penerima							
1.15.1.15.01.15.041	Kemitraan dalam rangka Optimalisasi akses permodalan bagi KUMKM melalui program KUR dan PKBL-BUMN	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Jumlah UKM	229467 unit usaha	Kemitraan dalam rangka optimalisasi akses permodalan bagi KUMKM melalui program KUR dan PKBL-BUMN	1 akt	Percepatan realisasi program KUR dan PKBL-BUMN	30 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 38.500.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.15.047	Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Jumlah UKM	229467 unit usaha	Pendampingan koperasi penerima dana bergulir di DIY	442 koperasi	Peningkatan volume usaha dan berkurangnya resiko kemacetan	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 49.500.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
							Monev bagi Koperasi penerima dana bergulir	400 koperasi	Termonitornya Koperasi penerima dana bergulir	100 %				
1.15.1.15.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH										Rp. 74.000.000,00	Rp. 143.000.000,00		
1.15.1.15.01.16.016	Fasilitasi Kemitraan Usaha bagi UKM	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	180 UMKM Baru	Fasilitasi Kemitraan bagi UKM	1 akt	Kemitraan bisnis antara UMKM dan Pengusaha Besar	30 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.16.018	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan UMKM	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	180 UMKM Baru	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan UMKM	50 Orang	Peningkatan kualitas SDM dan Kelembagaan UMKM	25 %	Rp. 44.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
1.15.1.15.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI										Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00		
1.15.1.15.01.18.019	Pengembangan Kewirausahaan baru bagi UMKM	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	DIY	Jumlah koperasi aktif	2351 koperasi	Pelatihan kewirausahaan bagi siswa SMU/SMK	75 Orang	Meningkatnya wawasan kwirausahaan pada siswa dan mahasiswa	30 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2	Pilihan													
2.06	Perdagangan													
2.06.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM													
2.06.1.15.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN										Rp. 805.000.000,00	Rp. 249.500.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN													
2.06.1.15.01.15.004	Pengembangan UPT Kemtrologian Daerah	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit	Tera dan Peneraan	234000 UTTP	Pengelolaan Standar	40 Standar	Rp. 320.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
							Pengelolaan Standar	40 Standar	UTTP bertanda tera sah Kalibrasi Verifikasi Alat-alat Standar	234000 UTTP,				
2.06.1.15.01.15.005	Koordinasi Peningkatan Kinerja Distributor Komoditi Pokok Penting Dan Strategis	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit	Meningkatnya koordinasi antara Instansi Pemerintah yang terkait selaku Pembina dengan pelaku usaha/pedagang besar	30 Stakeholder	Peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pembentukan harga yang stabil dan ketersediaan stok	25 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.15.007	Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit	Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar, Uji laboratorium dan Pengawasan Bahan Berbahaya	10 bulan	Meningkatnya Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 139.500.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.15.014	Operasi Pasar Murni Beras	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit	Operasi pasar murni beras	12 bulan	Harga yang relatif stabil dan terkendali	100 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.15.019	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit	Peningkatan Perlindungan Konsumen	1 kegiatan	Perdagangan Kondusif dan Konsumen merasa aman, nyaman dan tenang	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.15.021	Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit	Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian	5 Kab / Kota di DIY	UTTP bertanda tera sah , kuantita barang sesuai beratnya	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.15.022	Pemantauan Pengadaan Penyaluran Stok dan Harga Kebutuhan Pokok	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	234 unit	Pelayanan data dan informasi perkembangan kebutuhan, harga dan ketersediaan barang pokok, barang penting dan strategis melalui media massa	10 bulan	Perkembangan harga dan stok kebutuhan bahan pokok penting terpantau dan terkendali	25 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
							Pemantauan terpadu harga dan keterediaan bahan pokok pada saat menjelang peringatan HKBN	3 Periode						
							Penyusunan Prognosa Kebutuhan pokok, barang penting dan strategis	1 kegiatan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							1. Pemantauan Pengadaan Penyaluran Stok Dan Harga Kebutuhan Pokok di Tingkat Pedagang, Pemantauan Pengadaan Penyaluran Stok Dan Harga Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor	12 bln						
2.06.1.15.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR										Rp. 2.495.000.000,00	Rp. 4.680.000.000,00		
2.06.1.15.01.17.027	Pameran Dalam Negeri Berskala Ekspor	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai ekspor	207.59 Juta US\$	5. Primaniyarta	1 kegiatan	Peningkatan Volume Penjualan UKM	10 %	Rp. 630.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
							1. Pameran Inacraft	1 kegiatan						
							2. Pameran IFAX	1 Kgiatan						
							3. Pameran TEI	1 kegiatan						
							4. Pameran PPED	1 kegiatan						
2.06.1.15.01.17.034	Temu Bisnis Dalam dan Luar Negeri	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai ekspor	207.59 Juta US\$	Temu Bisnis dalam dan luar negeri (Jakarta, Thailand, Cina)	100 UKM	Peningkatan Kerjasama bisnis antar pelaku usaha dalam maupun luar negeri	7 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.17.035	Penyebarluasan Informasi Kerjasama Perdagangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai ekspor	207.59 Juta US\$	Penyebarluasan Informasi Kerjasama	50 peserta	Tersebar nya Informasi Kerjasama Perdagangan	35 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.17.036	Fasilitasi Kadin	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai ekspor	207.59 Juta US\$	Fasilitasi Kadin	1 tahun	Peningkatan Kinerja Kadin	15 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.17.046	Promosi Perdagangan Luar Negeri	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai ekspor	207.59 Juta US\$	Promosi Perdagangan Luar Negeri (Thailand dan Jerman)	16 UKM	Peningkatan Pasar Produk UKM DIY Ke Luar Negeri	5 %	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 3.300.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.17.047	Pngembangan Ekspor DIY	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai ekspor	207.59 Juta US\$	Penyusunan Pofil Komoditas Ekspor	1 Master, 100 Copy	Meningkatnya Ekspor Daerah	3 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
							Kemitraan Dalam Rangka Pembiayaan kspor	30 peserta						
							Pengelolaan SKA	1 tahun						
							Bimtek Aplikasi SKA	30 UKM						
2.06.1.15.01.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI										Rp. 20.303.000.000,00	Rp. 22.663.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.06.1.15.01.18.017	Pelayanan Bimbingan Bisnis	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah SIUP*	45106 SIUP	Konsultasi Pendampingan dan Advokasi	150 UMKM	Adanya solusi terhadap permasalahan bisnis yang dihadapi UMKM yang berkonsultasi	5 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.18.021	Pengelolaan JBSC	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah SIUP*	45106 SIUP	Terlaksananya Pengelolaan JBSC	415 UMKM	Meningkatnya 5 layanan bagi pelaku bisnis	10 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.18.023	Pengembangan Promosi Perdagangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah SIUP*	45106 SIUP	Pameran tetap di balemangu	70 UKM	Peningkatan volume penjualan produk UKM	25 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.18.039	Fasilitasi pengelolaan pasar tradisional	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah SIUP*	45106 SIUP	fasilitasi rehab pasar	5 Kabupaten/Kota	rehab pasar	5 Kabupaten/Kota	Rp. 18.135.000.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.06.1.15.01.18.040	Promosi Perdagangan Produk UKM DIY di Dalam negeri	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Yogyakarta, Medan, Bandung, Jakarta	Jumlah SIUP*	45106 SIUP	Pameran UKM Pemula	1 pameran	Meningkatnya volume penjualan UKM dg bertransaksi langsung dan terjadi kontak dagang	20 %	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
							Pameran Forum Sekda	1 pameran						
							Pameran Dekranasda	2 pameran						
							Pameran PKK	1 pameran						
							Pameran UKM binaan bidang	4 pameran						
2.06.1.15.01.18.044	Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan UMKM	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah SIUP*	45106 SIUP	Bantuan Peralatan	10 kelompok	Peningkatan kinerja pedagang pasar tradisional	25 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 675.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
							pelatihan manajemen usaha bagi PKL	1 akt@25 or						
2.06.1.15.01.18.046	Fasilitasi Dekranasda	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah SIUP*	45106 SIUP	Fasilitasi Dekranasda	12 bln	Peningkatan kinerja Dekranasda DIY	10 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.06.1.15.01.18.049	Fasilitasi pengelolaan dan pelayanan haki	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah SIUP*	45106 SIUP	Publikasi, Edukasi, Promosi, Penyusunan Pedoman, Advokasi, Pendaftaran HKI, Optimalisasi Pemanfaatan Informasi HAKI	12 bulan	Meningkatnya Penerapan HKI di Masyarakat dan Pemerintah	20 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.06.1.15.01.18.052	Optimalisasi Layanan Pasar Online Jogja Plasa	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah SIUP*	45106 SIUP	Pelatihan Aplikasi Jogjaplaza	30 IKM	Meningkatnya Pemasaran UMKM	25 %	Rp. 23.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07	Industri													
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM													
2.07.1.15.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH*										Rp. 1.328.000.000,00	Rp. 592.000.000,00		
2.07.1.15.01.16.022	Penumbuhan WUB Industri Industri Kimia dan Bahan Bangunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	Penumbuhan WUB Ind, Kimia dan Bahan bangunan	25 Org	Terciptanya Wira Usaha Baru IKM Briket	25 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.07.1.15.01.16.101	Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Perhiasan Logam dan Perak	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Perhiasan Logam dan Perak	20 IKM	Peningkatan Desain IKM Kerajinan Perhiasan Logam dan Perak	25 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 82.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.07.1.15.01.16.107	Promosi Gelar Sepatu dan Kulit	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	Pameran sepatu dan kulit	20 IKM	Meningkatnya pemasaran IKM sepatu kulit	20 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.07.1.15.01.16.114	Penumbuhan WUB ILSA	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	Pelatihan Kewirausahaan IKM Pakaian Jadi	40 IKM	Tumbuhnya wirausaha baru IKM ILSA	25 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.07.1.15.01.16.122	Penumbuhan WUB Industri Makanan dan Minuman	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	Penumbuhan WUB Industri Makanan dan Minuman	20 Org	Meningkatnya Jmlah WUB Makanan dan Minuman	20 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.1.15.01.16.127	Peningkatan kualitas produk IKM Olahan kayu	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	1. Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Produksi IKM Mebel	1 keg	meningkatnya kualitas produksi ikm olahan kayu	20 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan IKM Kayu	1 keg						
							3. Pengembangan Teknologi IKM Bambu	1 keg						
2.07.1.15.01.16.128	Peningkatan kualitas Produksi IKM Logam dan Non Logam (Animasi)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	1. Pelatihan bagi IKM Logam Kuningan	1 kegiatan	Meningkatn kualitas Produksi IKM Olahan Logam dan Non Logam	1 kegiatan	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Pelatihan Uji Produk IKM Otomotif	1 kegiatan						
							3. Pelatihan IKM Ragam Metal	1 Kegiatan						
							4. Pengembangan Animasi dan Game	1 kegiatan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.1.15.01.16.129	Peningkatan kualitas produksi ikm olahan pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Diy	Jumlah IKM	81907 IKM	1. Promosi IKM Pangan	30 IKM	Meningkatnya kualitas produksi IKM olahan Pangan	20 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Baru - Mempercepat Capaian Target
								2. Pengembangan Sentra Pengolahan Umbi-umbian	1 kegiatan					
2.07.1.15.01.16.130	Pelatihan Ketrampilan Usaha bagi Masyarakat Lingkungan Industri Hasil Tembakau (cukai)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	Pelatihan Ketrampilan Usaha bagi Masyarakat Lingkungan Industri Hasil Tembakau (cukai)	20 IKM	Peningkatan Ketrampilan Usaha bagi Masyarakat Lingkungan Industri Hasil Tembakau (cukai)	25 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.1.15.01.16.142	Pengembangan Usaha IKM Biofrmaka	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	Pelatihan IKM Biofarmaka (herbal,spa) dan temu kemitraan	20 IKM	Meningkatnya Pengetahuan IKM Biofarmaka	25 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.07.1.15.01.16.145	Diversifikasi Produk IKM Pasir Semen dan Tanah Liat	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	Pelatihan IKM Pasir Semen dan Tanah Liat	20 IKM	Meningkatnya keterampilan IKM Semen dan Tanah Liat	20 IKM	Rp. 65.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.07.1.15.01.16.146	Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Batu Mulia	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Batu Mulia	20 IKM	Peningkatan Desain Kerajinan Batu Mulia	25 %	Rp. 53.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.07.1.15.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI										Rp. 955.000.000,00	Rp. 320.000.000,00		
2.07.1.15.01.17.013	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai produksi IKM	3337453545 Ribu Rupiah	1. Pengembangan dan Pelayanan ATG	7 ATG	1. Terciptanya prototype dan produksi ATG	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
								2. Lomba ATG	6 ATG Juara	2. Terpilihnya Juara				
2.07.1.15.01.17.079	Pengelolaan Bengkel Rekrayasa dan Produksi	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai produksi IKM	3337453545 Ribu Rupiah	Pengelolaan bengkel Produksi dan rekrayasa	6 Jasa	Terlayannya IKM dalam pemanfaatan ATG dan meningkatnya kemampuan	40 %	Rp. 85.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
								Peningkatan kemampuan rekrayasa	1 kegiatan					
2.07.1.15.01.17.087	Pemasaran Produk Alat Tepat Guna	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai produksi IKM	3337453545 Ribu Rupiah	Terpromosikannya ATG	10 ATG	Dikenalnya alat tepat guna di DIY dan tingkat nasional	70 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
								Penyuluhan /Sosialisasi	1 keg					
2.07.1.15.01.17.093	Pengembangan IKM Sandang dan Kulit	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai produksi IKM	3337453545 Ribu Rupiah	Pengembangan Desain Tenun dan Kulit	40 IKM	Meningkatnya nilai produksi IKM Tenun dan Kulit	20 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 37.074.428.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													UKM	
2.07.1.15.01.17.100	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Nilai produksi IKM	3337453545 Ribu Rupiah	Terselenggaranya kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi kemasan	6 Jasa	Layanan CFSMI Kemasan bagi IKM DIY	100 %	Rp. 195.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
2.07.1.15.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF*										Rp. 750.000.000,00	Rp. 412.500.000,00		
2.07.1.15.01.20.021	Pengembangan Industri Kreatif	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM Industri Kreatif	34018 IKM kreatif	Jogja Fashion Week	4 kegiatan	Berkembangnya industri kreatif	25 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 412.500.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
							Terlaksananya pameran dan lomba pengembangan IKM Industri Kreatif di DIY	30 IKM						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.16	Penanaman modal													
1.16.01	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.													
1.16.1.16.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.857.199.850,00	Rp. 3.156.714.235,00		
1.16.1.16.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Perangko	200 lembar	Terpenuhinya jasa Surat Menyurat	100 %	Rp. 16.575.000,00	Rp. 18.232.500,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Materai 3000-an	500 lembar						
							3. Materai 6000an	50 lembar						
							4. Paket pengiriman biasa	475 Paket						
							5. Paket pengiriman Khusus	215 Paket						
1.16.1.16.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Biaya telpon	1 tahun	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik	100 %	Rp. 413.000.000,00	Rp. 460.900.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Biaya Internet	1 tahun						
							3. Biaya listrik	1 tahun						
							4. Sewa hosting	1 tahun						
							5. Sewa domain	1 tahun						
							6. Langganan TV kabel	1 tahun						
1.16.1.16.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. STNK kendaraan dinas roda 4	12 unit	Terpenuhinya tertib administrasi kendaraan dinas	100 %	Rp. 11.640.000,00	Rp. 12.804.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. STNK kendaraan dinas roda 2	9 unit						
1.16.1.16.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Honorarium pengelola keuangan	12 bulan	Terkelolanya keuangan dan barang	100 %	Rp. 55.800.000,00	Rp. 61.380.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Honorarium pengelola barang	12 bulan						
							3. Honorarium Pengelola Pegawai	12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa Kebersihan	12 bulan	Terpeliharanya kebersihan kantor untuk kelancaran tugas	100 %	Rp. 366.716.000,00	Rp. 403.387.600,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	125 jenis	Terpenuhinya ATK untuk Kelancaran Tugas	100 %	Rp. 81.267.250,00	Rp. 8.939.375,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. barang cetakan	25 jenis	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas	100 %	Rp. 106.663.300,00	Rp. 117.329.630,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. penggandaan	320000 lembar						
							3. penjilidan	280 buah						
1.16.1.16.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat listrik dan elektronik	45 jenis	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor	100 %	Rp. 32.192.300,00	Rp. 35.411.530,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.01.014	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	85 jenis	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk elancaran tugas	100 %	Rp. 111.010.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. pengisian tabung pemadam kebakaran	12 tabung						
							3. pengisian tabung gas	80 Kali						
							4. handuk	50 buah						
							5. sarung kursi	200 buah						
1.16.1.16.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat kabar	6 jenis	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai	100 %	Rp. 18.296.000,00	Rp. 20.125.600,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. buku	13 buku						
							3. majalah	3 jenis						
1.16.1.16.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. makan dan minum rapat	3600 os	Terpenuhinya hidangan makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat koordinasi	100 %	Rp. 119.540.000,00	Rp. 131.494.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. makan dan minum kecil tamu	2480 os						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Jamuan makan dan minum tamu	198 os						
1.16.1.16.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun	Terfasilitasinya rapat koordinasi dan perjalanan dinas aparat	100 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 969.760.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Perjalanan Dinas Luar daerah	1 tahun						
1.16.1.16.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Jasa keamanan kantor	16 Orang	Terciptanya Keamanan kantor untuk kelancaran tugas	100 %	Rp. 724.500.000,00	Rp. 796.950.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Pegawai tidak tetap	5 Orang						
							3. pengemudi	3 Orang						
1.16.1.16.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.833.512.000,00	Rp. 1.255.139.400,00		
1.16.1.16.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan roda 4	2 unit	Tersedianya Kendaraaan Dinas untuk kelancaran tugas	100 %	Rp. 445.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Filling Cabinet	8 buah	Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk kelancaran tugas	100 %	Rp. 221.166.500,00	Rp. 257.629.350,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. AC	12 unit						
							3.Tangga Alunium	1 buah						
							4. Mesin penghisap Debu	1 buah						
							5. LCD	2 buah						
							6. TV 42 in	6 buah						
							7. Pompa air	1 buah						
							8. kipas angin air	4 buah						
1.16.1.16.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. laptop	3 buah	Tersedianya peralatan gedung kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 119.500.000,00	Rp. 105.930.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. printer	3 buah						
							3. komputer	2 buah						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.										Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %					Rp. 156.400.000,00	Rp. 139.040.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							4. tablet	3 buah						
							5. kamera	1 buah						
							6. player	1 buah						
							7. CCTV	1 set						
							8. mesin antrian	1 unit						
							9.software komputer	2 jenis						
							10. antena HT	1 set						
							11. Handy talkie	2 unit						
							1. kursi	10 buah	Tersedianya mebeleur untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100 %				
							2. kursi tunggu	2 buah						
3. meja tamu	2 buah													
4. kursi fo	14 buah													
5. Rak arsip	12 buah													
6. kursi eselon	1 buah													
7. kursi susun	200 buah													
8. kasur	20 buah													
9. kitchen set	1 set													
10. lemari perkakas	1 buah													
11. bantal	20 buah													
1.16.1.16.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. pengecatan kantor gerai P2T	1070 m2	Terpeliharanya bangunan gedung kantor Gerai P2T dan kantor kaperda jakarta	100 %	Rp. 99.075.500,00	Rp. 108.983.050,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Jasa tukang	270 oh						
							3. jasasedot WC	3 Paket						
							4. material bahan pemeliharaan	39 jenis						
1.16.1.16.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Jasa service kendaraan roda 4	12 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk kelancaran tugas	100 %	Rp. 475.860.000,00	Rp. 528.946.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Jasa service kendaraan roda 2	9 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.										Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.16.1.16.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	3. Penggantian suku roda 4	12 unit			Rp. 60.510.000,00	Rp. 66.561.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							4. Penggantian suku cadang roda 2	9 unit						
							5. Bahan bakar minyak	1 tahun						
							6. belanja jasa tol	12 bulan						
							7. Pengecatan kendaraan Dinas Roda 4	1 unit						
							1. perbaikan lemari besi	2 buah	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor untuk kelancaran tugas	100 %				
							2. perbaikan filling	16 buah						
1.16.1.16.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	D.I. Yogyakarta Dan DKI Jakarta	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	3. servis AC	121 buah			Rp. 18.450.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							4. Servis almari besi	5 buah						
							5. bibit tanaman	5 Paket						
							6. servis kulkas	3 unit						
							7. servis kompor gas	4 unit						
							8. servis pompa air	5 unit						
							1. Servis komputer	44 unit	Terpeliharanya peralatan gedung kantor BKPM, Gerai Dan Kaperda jakarta	100 %				
1.16.1.16.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	D.I. Yogyakarta	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	2. servis laptop	15 unit			Rp. 17.550.000,00	Rp. 28.050.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							3. servis mesin ketik	9 unit						
							4. servis LCD	1 unit						
							5. servis kamera	1 unit						
1.16.1.16.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja	D.I. Yogyakarta	Prosentase penyediaan dan	100 %	1. perbaikan kursi	15 buah	Terpeliharanya mebeleur kantor	100 %	Rp. 220.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama	Sedang Berjalan
							2. perbaikan meja	15 buah						
							3. perbaikan papan display	1 Paket						
1.16.1.16.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja	D.I. Yogyakarta	Prosentase penyediaan dan	100 %	Rehabilitas kantor Gerai P2T	400 m2, 4 unit , 500	Rehabilitasi dan pengembangan	100 %	Rp. 220.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kantor		Pemerintah Daerah Meningkatkan		pemeliharaan sarana prasarana aparatur		(Penataan interior lantai I dan lantai II, Penambahan toilet tamu,)	m2	bangunan gedung kantor Gerai P2T				dan Penanaman Modal.	
1.16.1.16.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 123.016.000,00	Rp. 132.000.000,00		
1.16.1.16.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY, Jakarta, Jawa barat, Bali dan Jawa Tengah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	1. Diklat PTSP	60 Orang	Pegawai yang bersertifikat dan peningkatan Pelayanan PTSP	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. On Job Training	20 Orang						
							3. Customer service Exelence	20 Orang						
							4. Pendapangan ISO 9001-2008	1 serifikat ISO						
1.16.1.16.01.05.029	Peningkatan Kualitas S D M Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	D.I. Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Bimbingan Teknis	30 orang, 2 kali	Tercapainya nilai investasi melalui Peningkatan Kualitas S D M Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	100 %	Rp. 37.368.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.05.032	Pengelolaan Arsip Dinamis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	BKPM DIY dan KAPERDA JAKARTA	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Jumlah arsip tekstual yang ditangani (BKPM DIY dan Kaperda Jakarta)	4500 Berkas	Kemudahan penelusuran arsip tekstual meningkat	100 %	Rp. 10.648.000,00	Rp. 12.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 127.732.400,00	Rp. 134.000.000,00		
1.16.1.16.01.06.016	Penyusunan laporan kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	D.I Yogyakarta	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. LAKIP BKPM DIY	1 laporan	Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKPM DIY bisa terukur	100 %	Rp. 5.500.000,00	Rp. 5.500.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. LKPJ BKPM DIY	1 laporan						
							3. LPPD BKPM DIY	1 laporan						
1.16.1.16.01.06.017	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Badan Kerjasama dan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100 %	1. Laporan bulanan	12 dokumen	Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKPM DIY bisa terukur	100 %	Rp. 32.232.400,00	Rp. 33.000.000,00	Badan Kerjasama dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkat	Penanaman Modal	manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		2. Laporan Triwulanan	2 dokumen					Penanaman Modal.	
							3. Laporan Semester dan Prognosis	1 dokumen						
							4. Laporan akhir tahun	1 dokumen						
1.16.1.16.01.06.018	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan Data informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Renja BKPM	1 dokumen	Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKPM DIY bisa terukur	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. RKA BKPM DIY	1 dokumen						
							3. PK BKPM DIY	1 dokumen						
							4. ROPK BKPM DIY	1 dokumen						
1.16.1.16.01.06.019	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1 Monev program dan kegiatan BKPM DIY 2015	12 bulan	Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKPM DIY bisa terukur	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.500.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Ekspose hasil monev tahun 2015	1 kali;30 orang						
1.16.1.16.01.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI										Rp. 1.606.316.000,00	Rp. 1.920.000.000,00		
1.16.1.16.01.16.016	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuPTSP	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	600 izin dan non izin	Tercapainya Nilai Investasi melalui Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Pengelolaan informai, aplikasi sistem perizinn dan pengaduan On Line	1 aplikasi Perizinan						
							3. Penanganan pengaduan	12 pengaduan						
							4. Revisi standar pelayanan (SP) dan SOP	1 dok SP; 1 SOP						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							5. Sosialisasi Perizinan	4 kali; 60 orang						
							6. Pengelohan Data Perizinan	1 Dok Data Perijinan						
							7. Survey IKM	1 Dok IKM						
1.16.1.16.01.16.019	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kab/kota se-DIY	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	1. Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan	70 perusahaan	Tercapainya Nilai Investasi melalui Penyusunan Kajian Investasi Strategis di DIY dalam rangka peningktn iklim investasi	7 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	8 perusahaan						
1.16.1.16.01.16.025	Penyusunan kajian investasi strategis di provinsi DIY dalam rangka peningkatan iklim investasi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kab/Kota se-DIY	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	1. Kajian Study Kelayakan (FS) Kawasan Industri Sedayu Kabupaten Bantul	1 dokumen	Tercapainya Nilai Investasi melalu Penyusunan Kajian Investasi Strategis di DIY dalam rangka peningkatan investasi	4 %	Rp. 510.000.000,00	Rp. 600.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Kajian Masterplan Pengembangan Resort Kabupan Gunungkidul	1 dokumen						
1.16.1.16.01.16.026	Koordinasi perncanaan pengembangan penanaman modal	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	D.I. Yogyakarta	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	1. Forum Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	3 kali forum	Tercapainya Nilai Investasi melalui koordinasi perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	4 %	Rp. 111.308.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Rapat kerja Road Map Quick Win RUPM	3 kali Raker Quick Win						
1.16.1.16.01.16.027	Bimbingan dan pelatihan dibidang penanaman modal	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kab/kota se-DIY	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	Bimbingan Teknis Peraturan di Bidang Penanaman Modal	4 kali bimtek; 35 orang	Tercapainya nilai investasi melalui bimbingan dan pelatihan di bidang penanaman modal	4 %	Rp. 92.915.000,00	Rp. 95.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.16.028	Koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan non perizinan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kab/kota DIY	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	Rapat kerja pemanfaatan perizinan dan non perizinan	2 kali ; 50 orang	Tercapainya nilai investasi melalui koordinasi dan Pembinaan pemanfaatan perizinan dan non perizinan	4 %	Rp. 42.900.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.16.029	Koordinasi percepatan dan pemerataan realisasi investasi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kabupaten Bantul, kulonprogo,	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	Koordinasi percepatan dan pemerataan	4 Kali	Tercapainya nilai investasi melalui koordinasi percepatan	4 %	Rp. 89.376.500,00	Rp. 90.000.000,00	Badan Kerjasama dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Gunungkidul dan DIY			realisasi investasi di 3 kab yaitu bantul, kulonprogo , gunung kidul dan D.I Yogyakarta		dan pemerataan realisasi investasi				Penanaman Modal.	
1.16.1.16.01.16.030	Koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kab/Kota se-DIY	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	Rapat Koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi.	4 kali; 20 perusahaan	Terciptanya Nilai Investasi melalui koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi	4 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.16.032	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dan Realisasi Investasi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kab/Kota se DIY	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	FGD Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dan Realisasi Investasi	2 kali FGD ;40 orang	Terciptanya Nilai Investasi melalui koordinasi Penciptaan Stabilitas Iklim Investasi	7 %	Rp. 36.042.500,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.16.033	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Kab/Kota se-DIY	Nilai Investasi	10467183000 Rupiah	1). Pemantauan Lapangan Pelaksanaan PM	50 perusahaan	Tercapainya Nilai Investasi melalui Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 %	Rp. 73.774.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2). Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).	2 kali;35 orang						
1.16.1.16.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA, DAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN INVESTASI										Rp. 3.965.831.000,00	Rp. 400.000.000,00		
1.16.1.16.01.18.001	Penyelenggaraan Pameran Investasi unggulan dan strategis	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Jawa, Luar Jawa dan Luar Negeri	Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip	354 ijin	1. Pameran Investasi di Jawa	1 kali ; 5 hari	Tercapainya Nilai Investasi melalui Penyelenggaraan Pameran Investasi Unggulan dan Strategis di Jawa, Luar Jawa dan Luar Negeri	5 %	Rp. 520.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. pameran investasi, Luar Jawa	2 kali; 5 hari						
							3. pameran GPID(dalam Jawa dan luar Jawa)	2 kali ; 4 hari						
							4. pameran investasi di Luar Negeri	2 kali; 5 hari						
1.16.1.16.01.18.002	Penyelenggaraan Pameran Potensi	Pembangunan Wilayah dan	Ketimpangan Antar Wilayah	D. I. Yogyakarta	Jumlah surat persetujuan/ijin	354 ijin	1. Pameran Potensi Unggulan	1 kali ; 41 hari	Tercapainya Nilai Investasi melalui	5 %	Rp. 2.915.476.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Unggulan Daerah	Tata Ruang	Menurun	dan DKI JAKARTA	prinsip		Daerah Sekaten		Penyelenggaraan Pameran Potensi Unggulan daerah				dan Penanaman Modal.	
							2. pameran Pembangunan	1 kali; 5 hari						
							3. pameran Pekan Raya Jakarta	1 kali ; 32 hari						
							4. pameran Invesda Expo	1 kali ; 4 hari						
1.16.1.16.01.18.003	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	D.I Yogyakarta	Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip	354 ijin	Pengembangan dan Pengelolaan Website "Jogja Invest"	1 dokumen laporan	Tercapainya Nilai Investasi melalui Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	7 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.18.004	Temu Bisnis Peluang Investasi Dengan Investor Potensial	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	DIY dan Luar DIY	Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip	354 ijin	Temu Bisnis Peluang Investasi dengan Investor Potensial di DIY dan Luar DIY	3 Kali	Tercapainya Nilai Investasi melalui Temu Bisnis dengan Calon Investor Potensial (di DIY dan luar DIY)	6 %	Rp. 120.430.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.18.005	Koordinasi Penjajagan Peluang Investasi dengan Caolon investor Potensial	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	D.I Yogyakarta	Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip	354 ijin	Penjajagan Peluang Investasi dengan Calon Investor Potensial	3 Kali	Tercapainya Nilai Investasi melalui Koordinasi Penjajagan Peluang Investasi dengan Calon investor Potensial	6 %	Rp. 59.925.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.16.1.16.01.18.006	Penyusunan Data Potensi Investasi	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	D.I Yogyakarta	Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip	354 ijin	Peta Potensi peluang Investasi Fokus RUPM DIY	1 dokumen	Tercapainya Nilai Investasi melalui Penyusunan Data Potensi Investasi	5 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.17	Kebudayaan													
1.17.02	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.													
1.17.1.16.02.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA*										Rp. 505.810.000,00	Rp. 600.000.000,00		
1.17.1.16.02.15.001	Pengembangan Seni, Adat dan Tradisi Daerah	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DKI Jakarta	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	1. Pesona Budaya Nusantara	1 Kali	Tumbuhnya apreiasi masyarakat terhadap kesenian khas Yogyakarta	100 %	Rp. 249.310.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Gelar Citra Budaya Tradisi Nusantara	1 Kali						
							3. Diklat Karawitan	1 Kali						
							4. Diklat Tari	1 Kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							5. Diklat Ketoprak	1 Kali						
1.17.1.16.02.15.040	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	anjungan TMII	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	Gelar Seni Budaya (GSB)	1 Kali	Tumbuhnya apresiasi masyarakat dan Investor terhadap budaya Yogyakarta	100 %	Rp. 256.500.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.13	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.													
1.20.1.16.13.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH										Rp. 1.722.413.750,00	Rp. 196.655.000.000,00		
1.20.1.16.13.25.001	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DKI JAKARTA	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	1. Temu wicara dengan masyarakat DIY di Jakarta	1 Kali	Tercapainya persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama melalui Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	20 %	Rp. 143.500.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2.Rapat koordinasi Mitra Praja Utama	2 Kali						
1.20.1.16.13.25.005	Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY, Daerah lain mitra kerjasama	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	1. Rapat Kerja teknis kerjasama dalam negeri	4 Kali	Tercapainya persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama melalui fasilitasidan koordinasi penanganan kerjasama dalam negeri	25 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Kajian Perencanaan Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri, Luar	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.16.13.25.006	Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY, Korea Selatan, Jepang, Hongaria, Italia	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Negeri dan Pihak 3				Rp. 947.661.250,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							1. Hospitality Mitra KSLN	5 Mitra KSLN	Tercapainya persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama melalui Fasilitasi dan koordinasi penananan kerjasama luar negeri	30 %				
							2. Reafirmasi Kerjasama Sister Province	2 kerjasama						
							3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait kerjasama	40 peserta						
							4. Penjajakan dan tindak lanjut kerjasama ke luar negeri	4 Negara						
							5. Interdap pembentukan kerjasama	1 draft naskah kerjasama						
							6. Joint Working Group Mitra Kerjasama Luar Negeri	2 Mitra Kerjasama						
1.20.1.16.13.25.034	Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	1. Monitoring dan Evaluasi kerjasama DN	4 kab; 1 kota	Tercapainya persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama melalui evaluasi kerjasama dalam negeri	5 %	Rp. 117.968.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Bimbingan dan pengawasan	1 Kali						
1.20.1.16.13.25.035	Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	1. Monitoring dan Evaluasi kerjasama Luar Negeri yang sedang berajalan	4 kab; 1 kota	Tercapainya persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama melalui Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	5 %	Rp. 74.045.500,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 12.741.831.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							2. Sosialisasi hasil monev	1 Kali						
1.20.1.16.13.25.036	Koordsinasi Kerjasama Pemerintah Swasta	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	terlaksananya koordinasi kerjasama pemerintah swasta	3 Kali	Tercapainya persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama melalui koordinasi kerjasama pemerintah swasta	15 %	Rp. 189.239.000,00	Rp. 195.000.000.000,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 8.200.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.17	Kebudayaan													
1.17.01	Dinas Kebudayaan													
1.17.1.17.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.137.300.000,00	Rp. 3.476.000.000,00		
1.17.1.17.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya persediaan perangko biasa, kilat dan kilat biasa	12 bulan	Terkirimnya surat-surat Dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah	100 persen	Rp. 4.775.000,00	Rp. 5.252.500,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	Tersedianya jasa telepon, listrik, internet, hosting, dan air untuk dinas dan UPT	100 persen	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.179.200.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/opersional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhinya administrasi dan izin kendaraan dinas roda 4 dan 2	10 kendaraan	Terwujudnya kelancaran pendukung pelaksanaan program kegiatan dinas dan UPT	100 persen	Rp. 13.200.000,00	Rp. 14.520.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan barang daerah	19 Orang	Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan dan barang daerah	100 persen	Rp. 158.460.000,00	Rp. 98.076.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Paket	Terwujudnya kebersihan kantor Dinas dan UPTD	100 persen	Rp. 445.000.000,00	Rp. 489.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.010	penyediaan alat tulis kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan tulis menulis perkantoran	100 persen	Rp. 57.500.000,00	Rp. 63.250.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tergandakannya bahan-bahan dan barang cetakan	62 jenis	Terpenuhinya kebutuhan bahan referensi, cetakan	100 persen	Rp. 190.000.000,00	Rp. 231.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 8.200.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat											
1.17.1.17.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	60 jenis	Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan kantor	100 persen	Rp. 96.500.000,00	Rp. 106.150.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di kantor	6 jenis	Terpenuhinya kebutuhan referensi aparatur kantor	100 persen	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya bahan-bahan logistik kantor	20 jenis	Kelancaran kegiatan kerumahtanggaan kantor	100 persen	Rp. 57.365.000,00	Rp. 63.101.500,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya bahan makanan dan minuman	6000 Kali	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	100 persen	Rp. 74.500.000,00	Rp. 81.950.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Partisipasi rapat, koordinasi, konsultasi di luar kota, daerah, negara	41 Kali	Koordinasi, sinergitas	100 persen	Rp. 265.000.000,00	Rp. 291.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.01.022	Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung /tempat kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya penjaga keamanan kantor	35 Orang	Terjaminnya keamanan kantor	100 persen	Rp. 760.000.000,00	Rp. 836.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.802.000.000,00	Rp. 2.244.000.000,00		
1.17.1.17.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	Lancarnya kegiatan bekerja di kantor	100 persen	Rp. 900.000.000,00	Rp. 1.251.800.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.02.022	Pemeliharaan rutin berkala gedung	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Dinas Kebudayaan	Prosentase penyediaan	100 %	Terpeliharanya peralatan gedung	11 jenis	Kelancaran kegiatan bekerja	100 persen	Rp. 92.000.000,00	Rp. 101.200.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 8.200.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kantor	Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan		dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur		kantor		di kantor					
1.17.1.17.01.02.024	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kebudayaan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100 persen	Kelancaran kegiatan bekerja di kantor	100 pesen	Rp. 428.000.000,00	Rp. 470.800.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kebudayaan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	9 jenis	Kelancaran kegiatan bekerja di kantor	100 persen	Rp. 67.000.000,00	Rp. 73.700.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kebudayaan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 persen	Kelancaran kegiatan bekerja di kantor	100 persen	Rp. 315.000.000,00	Rp. 346.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 200.000.000,00	Rp. 110.000.000,00		
1.17.1.17.01.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Terdidik dan terlatihnya sumber daya aparatur	80 Orang	Profesionalisme dan etos kerja aparatur meningkat	100 persen	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.05.042	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Meningkatkan Ketrampilan SDM dibidang Keuangan	20 SKPD	Terdidiknya Tenaga Pengelola Keuangan	60 Orang	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.17.1.17.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA										Rp. 560.700.000,00	Rp. 440.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 8.200.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DAN KEUANGAN													
1.17.1.17.01.06.016	Penyusunan laporan kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Terlengkapinya laporan capaian kinerja	100 persen	LAKIP, RKT, PK	100 persen	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.06.017	penyusunan laporan keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Terlaporkannya realisasi keuangan SKPD	100 persen	Prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun	100 persen	Rp. 70.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.06.018	penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya perencanaan kerja SKPD	100 persen	Renstra, renja, jaringan, data	100 persen	Rp. 250.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.06.019	monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Kebudayaan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Terkendalnya dan terevaluasinya program kegiatan SKPD	100 persen	Laporan Monitoring, LKPJ	100 persen	Rp. 220.700.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA*										Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.750.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 8.200.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.16.090	Pembinaan Lembaga Pelestari Warisan Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Dinas Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	50.29 %	Pembinaan Lembaga Pelestari Warisan Budaya	2 Lembaga Pelestari Warisan Budaya	Terfasilitasinya Lembaga Pelestari Warisan Budaya	100 %	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.750.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas											Jumlah Pagu : Rp. 9.811.550.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas													
1.19.1.19.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 712.561.000,00	Rp. 856.000.000,00		
1.19.1.19.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Perangko	250 lembar	Pelaksanaan surat menyurat lancar	100 %	Rp. 3.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Meterai	600 lembar						
1.19.1.19.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikas Sumber Daya Airdan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Telepon	3 line	Terselenggaranya kegiatan kelistrikan dan tugas	100 %	Rp. 140.000.000,00	Rp. 168.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Listrik	1 gedung						
							3. Web Hosting	1 Paket						
							4. Jaringan Interet Gedung	1 Paket						
							5. Jaringan Internet Modem	1 Paket						
							6. Jaringan TV Kabel	1 Paket						
1.19.1.19.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	STNK dan Jasa KIR Kendaraan Dinas Badan Kesbanginmas	12 kendaraan roda 4, 17 roda 2	Kendaraan operasional siap digunakan	100 %	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	13 Orang, 12 Bulan	Kelancaran administrasi keuangan, barang dan kepegawaian	100 %	Rp. 25.500.000,00	Rp. 27.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa kebersihan kantor pihak ketiga	12 bulan	Ruang kerja lebih bersih, sehat dan nyaman	100 %	Rp. 80.000.000,00	Rp. 88.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat-Alat kantor siap pakai	38 jenis	Kantor lebih nyaman dan mendukung aktivitas kerja	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	76 jenis	Mendukung kelancaran kerja	100 %	Rp. 33.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas											Jumlah Pagu : Rp. 9.811.550.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.01.01.011	PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Barang Cetakan	21 jenis	Mendukung kelancaran kerja	100 %	Rp. 20.461.000,00	Rp. 23.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Penggandaan Dokumen	61200 lembar						
1.19.1.19.01.01.012	Pnyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat listrik dan elektrnik	34 jenis	Mendukung kelancara kerja	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat Kabar (KR, Kompas dan Suara Merdeka)	3 jenis	Wawasan aparat Badan Kesbanglinmas meningkat	100 %	Rp. 5.600.000,00	Rp. 6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Buku Perundang-undangan	5 buku						
							3. Majalah	2 jenis						
1.19.1.19.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Makanan dan minuman lembur	498 orang lembur	Mendukung kelancaran lembur dan rapat	100 %	Rp. 23.000.000,00	Rp. 26.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Makanan dan minuman rapat	2000 Orang						
1.19.1.19.01.01.018	Penyediaan Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Materi Kesbanglinmas : 2 Bidang dan 1 Sekretariat Perjalanan dalam Provinsi	400 op	Bahan penyusunan kebijakan	100 %	Rp. 227.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Perjalanan Keluar Daerah	76 op						
							3. Tiket Pesawat	76 pp						
							4. Tiket kereta	14 pp						
1.19.1.19.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Honorarium Penjaga Repiter dan Penjaga Malam	3 orang 12 bulan	Pengamanan kantor dan terawatnya menara petir	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Premi asuransi bagi penjaga repiter	1 orang 12 bulan						
1.19.1.19.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.225.000.000,00	Rp. 1.280.000.000,00		
1.19.1.19.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan	1 unit kendaraan roda 4	Mendukung kelancaraan tugas operasional Staf	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.02.007	PengadaanPerlengkapanGedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	1. AC	7 unit	Kantor lebih nyaman dan mendukung aktivitas kerja	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas											Jumlah Pagu : Rp. 9.811.550.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		sarana prasarana aparatur								Linmas	
1.19.1.19.01.02.008	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Komputer	4 unit	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi pelayanan	100 %	Rp. 85.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Laptop	2 unit						
							3. Printer	6 buah						
							4. Pesawat Telepon	5 buah						
							5. UPS	6 unit						
							6. LCD	1 unit						
1.19.1.19.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Meja rapat	50 buah	Mendukung kelancaran tugas dan pelayanan publik	100 %	Rp. 140.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Kursi rapat	100 buah						
							3. Mimbar/Podium	1 buah						
1.19.1.19.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung Kantor dalam kondisi baik	1 unit	Kenyamanan dan kelancaran kerja	100 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.02.024	Pemeliharaan Rutin / Bekala Kendaraan Dinas/ Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Kendaraan dinas berfungsi baik	12 kendaraan roda 4, 17 roda 2	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 340.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. BBM	10 perahu dan Mesin Genset						
1.19.1.19.01.02.026	Pemeharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan gedung kantor	1 unit	Kenyamanan dan kelancaran kerja	100 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.02.028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan gedung kantor	20 jenis	Kenyamanan dan kelancaran kerja	0 100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.02.032	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan	Prosentase penyediaan dan	100 %	1. Jaringan Internet	1 unit	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi pelayanan	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas											Jumlah Pagu : Rp. 9.811.550.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	Masyarakat	pemeliharaan sarana prasarana aparatur									
							2. Jringan Hosting	1 unit					dan Linmas	
							3. Sofware Hosting	1 server						
1.19.1.19.01.02.042	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Rangka atap baja Gedung Kantor	1 unit	Kenyamanan dan kelancaran kerja	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Genteng berglasur	3 unit						
1.19.1.19.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 365.400.000,00	Rp. 405.000.000,00		
1.19.1.19.01.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Aparat dan mitranya Badan Kesbanglinmas memahami peraturan per-UU-an	30 Orang; 4 angkatan	Memperlancar pelaksanaan Tupoksi	100 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.05.011	Pembinaan Korps Musik Pemda DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Terlaksananya Pelatihan Petugas/Anggota Korsik Pemda DIY di Badan Kesbanglinmas DIY	35 orang x 18 hari	Terbinanya Petugas/Anggota Korsik Pemda DIY memahami dalam mengiringi upacara sehingga berjalan dengan khidmad	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.05.012	Publikasi Media Cetak dan Elektronik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	1.Liputan Televisi & Dialoq Interaktif di TV	23 kali, 1 kali	Tersebarkannya informasi Badan Kesbanglinmas melalui media cetak dan elektronik	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2.Spanduk	10 buah						
							3. Banner	5 buah						
							4. Tiang Banner 5 buah;	5 buah						
							5. Cetak Buku/Leaflet	2.5 lembar						
1.19.1.19.01.05.024	Pengembangan Teknologi Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	1. Update/penyempurnaan tampilan website;	1 tahun	Meningkatnya sistem informasi	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Pengelolaan Website Badan Kesbanglinmas	1 tahun						
1.19.1.19.01.05.062	Updating Data Terpilah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Data Terpilah Bidang Kesbanglinmas	1 dokumen	Bahan kebijakan	100 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.05.063	Penyusunan Data Hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Buku Data Hasil Pemilu Legislatif dan Pilpres	1 dokumen	Bahan kebijakan	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas											Jumlah Pagu : Rp. 9.811.550.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.01.05.065	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pegawai Eselon III/IV , Staf memahami PPRG di aplikasikan dalam kegiatan (Tindak Lanjut SE Gubernur)	25 orang 3 hari	Program kegiatan yang responsif Gender	100 %	Rp. 30.400.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.19.1.19.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 158.284.000,00	Rp. 186.000.000,00		
1.19.1.19.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD	3 jenis	Bahan Penyusunan Program/Kegiatan Tahun berikutnya	100 %	Rp. 9.374.000,00	Rp. 10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 dokumen	Terpantaunya realisasi anggaran	100 %	Rp. 12.500.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatla SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya dokumen perencanaan Tahun 2016	1 dokumen	Keberlangsungan dan kesinambungan SKPD	100 %	Rp. 96.410.000,00	Rp. 111.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.06.019	Monitoring Evauasi Pelasanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Kabupaten/Kota se DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan 9 program	9 Program	Bahan perencanaan program dan kegiatan	100 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN										Rp. 4.366.025.000,00	Rp. 884.600.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas											Jumlah Pagu : Rp. 9.811.550.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KENYAMANAN LINGKUNGAN													
1.19.1.19.01.15.013	Pelatihan SAR Linmas Provinsi DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Pakem	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Meningkatnya kemampuan anggota SAR Linmas DIY	1 angk (30 org x 4 hari)	Kesiapsiagaan anggota SAR Linmas dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 81.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.15.016	Pengadaan Peralatan Perlengkapan dan Posko SAR Linmas DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kabupaten Gunungkidul	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	1. Scop strecher	12 buah	Memperlancar ketugasan dan koordinasi	100 %	Rp. 261.423.000,00	Rp. 433.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Tali carmantel	200 meter						
							3. Bangket	1 Paket						
							4. Pagar	1 Paket						
							5. Posko SAR;	1 unit						
							6. Pompa Air	1 unit						
							7. Water Torn	1 buah						
							8. Sofa	1 buah						
							9. Almari	1 buah						
							10. Filling Cabinet	1 buah						
1.19.1.19.01.15.029	Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gedongtengen	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Bintek Pembekalan Anggota Satlinmas	50 angk(@50 org,@1 hr)	Anggota Satuan Linmas Tahu Tugas dan Fungsunya	50 angk(@50 org,@1 hr)	Rp. 55.000.000,00	Rp. 61.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.15.031	Pemberdayaan Potensi SAR Linmas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Potensi SAR Linmas siap siaga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat	100 %	Kesiapsiagaan anggota SAR Linmas dalam tugas pencarian dan penyelamatan	100 %	Rp. 3.190.550.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.15.034	Pengadaan Sarpras Operasional SAR Linmas DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kota Yogyakarta	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	1. LCR/Perahu Karet	1 unit	Kesiapsiagaan anggota SAR Linmas DIY dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat	100 %	Rp. 305.855.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Motor tempel	3 unit						
							3. SRT	2 set						
							4. Tali Lempar	22 buah						
1.19.1.19.01.15.036	Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gedongtengen	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Raker Rencana Aksi Daerah HAM	50 angk(@50 org,@1 hr)	Terselenggaranya Rencana Aksi Daerah HAM	50 Angkatan 50 Peserta	Rp. 40.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.15.037	Peningkatan Ketrampilan Selam anggota SAR Linmas DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	DIY dan Luar daerah	Penurunan kasus pelanggaran	250 kasus	Tersedianya anggota SAR Linmas yang mahir selam	1 angk(20 orgx 8 hari)	Kesiapsiagaan SAR Linmas dalam penanganan korban	100 %	Rp. 92.500.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas											Jumlah Pagu : Rp. 9.811.550.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkat		perda				kecelakaan di laut				dan Linmas	
1.19.1.19.01.15.038	Pembinaan Perlindungan Hak Hak Sipil bagi Anggota Satlinmas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gedongtengen	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Pembinaan Perlindungan Hak Hak Sipil bagi Anggota Satlinmas	50 angk(@50 org,@1 hr)	Anggota Satlinmas memahami Perlindungan Hak Hak Sipil	50 angk(@50 org,@1 hr)	Rp. 35.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.15.039	Pemeliharaan Posko dan peralatan SAR Linmas Prov DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	1. Terbayarnya BBM mobil operasional	3 wilayah	Terpeliharanya peralatan SAR Linmas	100 %	Rp. 74.977.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							2. Terbayarnya biaya PDAM	4 wilayah						
							3.Terbayarnya biaya listrik	6 wilayah						
							4. Terpeliharanya Motor tempel	3 unit						
							5. Terpeliharanya Compresor selam	1 unit						
							6. Terpeliharanya Tabung selam	4 buah						
							7. Terpeliharanya Pelampung	20 buah						
							8. Terbayarnya biaya jasa service/perawatan mobil operasional	3 wilayah						
1.19.1.19.01.15.040	Fasilitasi Dan Koordinasi Satlinmas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	1. Pemerintah Kota Yogyakarta, 2. Kabupaten Bantul 3. Kabupaten GunungKidul 4.Kabupaten Kulon progo 5. Kabupaten Sleman	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Raker Satlinmas	50 angk(@50 org,@1 hr)	Koordinasi dan Menambah Wawasan Antar Anggota Satlinmas Kabupaten/Kota Se DIY	50 angk(@50 org,@1 hr)	Rp. 71.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.15.041	Pemeliharaan Rutin Kapal Motor SAR Linmas DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Kapal Motor SAR Linmas siap pakai untuk mendukung kegiatan operasional	1 unit	Kesiagaan anggota SAR Linmas dalam memberikan pertolongan korban kecelakaan di laut	100 %	Rp. 19.720.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.15.042	Operasional SAR dalam pencarian/pertolongan korban di laut	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Pendayagunaan sumber daya anggota SAR secara optimal guna memberikan pertolongan terhadap korban kecelakaan/musibah	100 %	Menurunnya jumlah korban kecelakaan di laut	100 %	Rp. 160.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.17	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										Rp. 569.780.000,00	Rp. 740.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas											Jumlah Pagu : Rp. 9.811.550.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.01.17.001	Forum Komunikasi Antar Partai Politik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Forum komunikasi Antar Partai Politik	1 ang@50 or@ 1 kali	Menciptakan situasi dan kondisi pemilu 2014	100 %	Rp. 24.780.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.17.004	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Rapat kerja Forum Pembauran Kebangsaan	30 or@6 kali raker	Meningkatkaa keharmonisan antar etnis di DIY	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.17.010	Koordinasi Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Rapat Kerja Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)	30 or@6 kali raker	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama di DIY	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.17.014	Fasilitasi Kerjasama dengan Satuan Menwa, Ormas, lembaga Nirlaba Lainnya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Universitas di DIY	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Pembinaan Satmenwa	4 menwa	Terciptanya Satmenwa yang tangguh dan berwawasan kebangsaan	100 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.17.016	Kemah Bhakti Pemuda Pembauran Kebangsaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kasihani Ngestiharjo	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Kemah Pemuda Pembauran Kebangsaan	1 angk@100 or@ 2 hr, 1malam	Terciptanya kerjasama/kebersamaan antar pelajar/mahasiswa dari berbagai etnis	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.17.018	Pentas Seni Sabang Merauke antar IKPM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gondomanan Ngupasan	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Pentas ragam budaya	8 or@12 IKPM@1 hr	Meningkatnya pemahaman dan kecintaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia guna menciptakan kondisi kamtramtibmas di kalangan pelajar dan mahasiswa	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.17.019	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Bantul Danurejan Sleman Wates Wonosari Bantul Bausasran Catur Harjo Wates Wonosari	Penurunan kasus konflik sosial	22 kasus	Lomba Paduan Surat Lagu-lagu Wajib Bagi PKK	5 angk@50 or	Terciptanya serta terpeliharanya situasi dan kondisi yang kondusif, hubungan antar pelajar, masyarakat dan terciptanya pemahaman ttg wawasan kebangsaan diikkalangan kader PKK	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							Sarasehan Pendidikan Wasbang bagi Guru SMA	5 angk@50 or						
							Sarasehan Pendidikan Wasbang bagi Guru SMP	5 angk@50 or						
							Saraehan pendidikan wasbang bagi guru SD	5 angk@50 or						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas											Jumlah Pagu : Rp. 9.811.550.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.01.21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										Rp. 1.182.000.000,00	Rp. 144.000.000,00		
1.19.1.19.01.21.010	Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara ormas, orpol dan pemerintah Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Persentase partisipasi dalam pemilu	73 %	Rapat Kerja Antara ormas, orpol dan pemerintah Daerah	50 angk@1kali	Meningkatnya hubungan yang harmonis dengan pemerintah	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.21.011	Fasilitasi Rekomendasi Perijinan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Persentase partisipasi dalam pemilu	73 %	1.Rekomendasi Perijinan	2500 rekomendasi perijinan	Dukungan kelancaran kegiatan penelitian dan penerbitan SKT	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							02. Jumlah Penerbitan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) bagi orkemas	40 buah SKT						
1.19.1.19.01.21.012	Penyusunan Peta Politik Pemilu 2014	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Persentase partisipasi dalam pemilu	73 %	Peta Politik Pemilu 2014	50 buku	Tersedianya hasil data laporan Peta Politik Pemilu 2014	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.19.1.19.01.21.013	Validasi data Base ormas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Persentase partisipasi dalam pemilu	73 %	Data base ormas dan LSM di DIY	1 dok	Tersusunnya data-data ormas	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.19.1.19.01.21.021	Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan peran Ormas, LSM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Persentase partisipasi dalam pemilu	73 %	Pembinaan dan Optimalisasi fungsi dan Peran Ormas, LSM	50 or @2kl	Meningkatkannya hubungan yang harmonis dengan pemerintah	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.21.024	Pemberdayaan Partai Politik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Persentase partisipasi dalam pemilu	73 %	Penyaluran Bantuan Partai Politik di DIY	1 Paket	Dukungan sarana dan prasarana serta kelancaran kegiatan/program partai politik	100 %	Rp. 1.082.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.23	PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT										Rp. 1.232.500.000,00	Rp. 1.760.000.000,00		
1.19.1.19.01.23.001	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota	Raker Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	30 or@6 kali raker	Bahan kebijakan Gubernur di Bidang Kewaspadaan Dini Masyarakat	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.23.002	Fasilitasi Komunitas Intejen Daerah (KOMINDA)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota	Raker KOMINDA	35 or@6 kl raker	Tugas dan fungsi KOMINDA berjalan lancar.	100 %	Rp. 132.500.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.23.003	Pengawasan Orang Asing (POA)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota	Tugas dan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing berjalan lancar	1 tahun anggaran	Terpantaunya keberadaan dan aktifitas orang asing di DIY.	100 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas											Jumlah Pagu : Rp. 9.811.550.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.01.23.004	Peingkatan Bela Negara Bagi ORMAS/LSM/ORPOL	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota	Dialog peningkatan kewaspadaan Nasional bagi Ormas, LSM dan Orpol	2 angk@50 or	Meningkatnya pemahaman serta kewaspadaan nasional bagi Ormas,LSM, Orpol	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.23.005	Forum Dialog Umat Beriman.	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota	Dialog antar umat beragama/Forum umat beriman dengan generasi muda lintas agama	1 ang@50 or	Bahan kebijakan dalam memelihara kerukunan antar umat beriman.	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
							Dialog antar umat beragama/Forum umat beriman dengan tokoh agama	1 angk@50 or						
1.19.1.19.01.23.007	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jetis Cokrodiningratan	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota	Raker PGKDN (Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri)	50 @ 4 raker	Bahan kebijakan Gubernur di Bidang Kewaspadaan Dini Masyarakat	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Sedang Berjalan
1.19.1.19.01.23.016	Fasilitasi COP	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota	Terbentuknya COP di masyarakat DIY	1 tahun anggaran	Meningkatkan kesadaran bela negara kepada masyarakat sehingga terwujud kantrantibmas di DIY	100 %	Rp. 740.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.19.1.19.01.23.022	Fasilitasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat-obat Terlarang)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota	Rapat Kerja P4GN	35 Or @ 3 Kali Raker	Meningkatkan Koordinasi dalam Pelaksanaan P4GN Memberikan Pemahaman dan Kewaspadaan Masyarakat akan pentingnya penanganan ganngguan gelap peredaran narkotika	100 100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Baru - Kebijakan Pemerintah
							Pembentukan Pokja P4GN	1 tahun anggaran						
1.19.1.19.01.23.023	Fasilitasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	3 kab/kota	Pembentukan FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di DIY) dan Raker FKPT	35 or x 3 kali raer	Pemahaman dan Kewaspadaan Masyarakat terhadap aksi terorisme serta memonitoring ancaman terorisme untuk pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas	Baru - Kebijakan Pemerintah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
1.20.1.20.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.377.500.000,00	Rp. 1.016.000.000,00		
1.20.1.20.15.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Perangko, Materai dan Jasa Pengiriman Paket	5 jenis	Pelaksanaan surat menyurat berjalan lancar	100 %	Rp. 7.700.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya biaya telepon, Terbayarnya biaya air, Terbayarnya biaya listrik, Terbayarnya biaya internet, Terbayarnya biaya TV berlangganan	5 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 410.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya pajak, jasa KIR dan biaya mutasi kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 6, dan roda 2 dengan rician : 17 kendaraan roda 4, 7 kendaraan roda 6, 17 kendaraan roda 2	41 unit	Terpenuhinya surat kelengkapan kendaraan	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.007	Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan, Barang dan Kepegawaian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	13 Orang, 12 Bulan	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi keuangan, barang dan kepegawaian	100 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	4 gedung, 12 bulan	Kebersihan gedung kantor terjaga	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpeliharanya peralatan kerja	30 jenis	Peralatan kerja berfungsi dengan baik dan mendukung aktivitas kerja	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.15.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor sekretariat dan PUSDALOPS-PB	73 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 58.300.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya barang penggandaan	75600 lembar	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 33.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Tersedianya barang cetakan	20 jenis						
1.20.1.20.15.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan bangunan kantor sekretariat dan PUSDALOPS-PB	35 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga	20 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 11.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya surat kabar harian, buku pengetahuan pendukung tugas fungsi dan buku peraturan perundangan	2 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 13.200.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya konsumsi rapat, pertemuan koordinasi, dll	6600 os	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 66.000.000,00	Rp. 72.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya dukungan penugasan pegawai untuk koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	Meningkatnya koordinasi dan informasi dalam rangka pengumpulan bahan kebijakan	100 %	Rp. 275.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.022	Penyediaan Tenaga Keamanan Gedung/Kantor /Gudang	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya honor tenaga keamanan kantor, penjaga repeater, dan premi asuransi	12 bulan	Keamanan gedung kantor, gudang dan aset terjaga	100 %	Rp. 230.000.000,00	Rp. 240.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.01.026	Penyediaan Retribusi Kebersihan/Sampah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya retribusi kebersihan/sampah	12 bulan	Kebersihan lingkungan terjaga	100 %	Rp. 3.300.000,00	Rp. 4.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.763.500.000,00	Rp. 510.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.15.02.005	Pengadaan Kendaraan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana kerja/serta mendukung kelancaran tugas	1 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Tersedianya sarana untuk Mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	8 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana kerja/serta mendukung kelancaran tugas	5 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terselenggaranya Perawatan kendaraan Dinas kendaraan roda empat, roda enam dan roda Dua	7 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 850.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terselenggaranya Perawatan kendaraan dinas kendaraan roda empat, roda enam dan roda dua	41 unit	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor terawat	12 bulan	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 38.500.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor terawat ; tersedianya bahan kebersihan kantor ; Terbayarnya sewa lahan untuk repeater ; Terpeliharanya genset, alat-alat IT dan jaringan komputer Pusdalops, Tersedianya BBM genset	12 bulan	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 225.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.15.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor terawat	12 bulan	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 138.500.000,00	Rp. 170.000.000,00		
1.20.1.20.15.05.012	Publikasi Media Cetak dan Elektronik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Publikasi Media cetak dan elektronik	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Liputan media, Publikasi Media cetak dan elektronik	5 Kali	Tersebarluaskannya informasi kebencanaan melalui media cetak dan elektronik	100 %	Rp. 82.500.000,00	Rp. 90.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.05.024	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pelatihan aplikasi sistem informasi kebencanaan,	40 or 3 hr	Kelancaran Sistim Informasi sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan dalam Penyelenggaraan PB	100 %	Rp. 56.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Ekspose sistem informasi kebencanaan,	40 or 1 kali						
1.20.1.20.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 118.150.000,00	Rp. 134.700.000,00		
1.20.1.20.15.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Terselenggaranya kegiatan penyusunan LPPD, LKPJ dan LAKIP	3 dokumen	Terpenuhinya ketentuan perencanaan dan evaluasi berbasis bukti	100 %	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.700.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya laporan keuangan dan prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	Terpantaunya realisasi anggaran	100 %	Rp. 18.150.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.15.06.018	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tercapainya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan program kegiatan	5 dokumen	Tersusunnya program/kegiatan yang sinergis dan berkelanjutan	100 %	Rp. 77.000.000,00	Rp. 87.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Diketahuinya permasalahan pelaksanaan program di BPBD DIY dan rekomendasi tindak lanjut	12 dokumen	Terpenuhinya ketepatan waktu, prosedur dan substansi pelaporan	100 %	Rp. 16.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45	PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA										Rp. 5.097.652.300,00	Rp. 5.987.000.000,00		
1.20.1.20.15.45.001	Fasilitasi PUSDALOPS - PB DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terlaksananya Rakernis Operasional PUSDalops PB DIY	6 Kali	Terwujudnya Pusat Pengendalian Data dan Pusat Komando Operasional Penanggulangan Bencana yang handal dalam rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.	100 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Terbayarnya honor petugas piket TI PUSDalops PB DIY	16 or						
							Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas SDM	35 or						
							Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PUSDALOPS-PB	4 Paket						
1.20.1.20.15.45.002	Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Pakem	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Sertifikasi aparat pemadam kebakaran	70 Orang	Terwujudnya Kesiapsiagaan Aparat dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.003	Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terselenggaranya Pelatihan Kesiapsiagaan bagi aparat dan masyarakat	35 or, 4 kali	Meningkatnya kemampuan aparat dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mampu menangani bencana sesuai	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 152.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									prosedur dan standar					
1.20.1.20.15.45.004	Fasilitasi Koordinasi Komponen Penanggulangan Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Depok Gedongtengen Gondokusuman Sewon	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terselenggaranya fasilitasi bagi Komponen Penanggulangan Bencana (Rakor)	35 or, 4 kali	"Terfasilitasinya Komponen PB sehingga aparat dan masyarakat tanggap menghadapi bencana"	100 %	Rp. 106.769.300,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.005	Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sleman, Gunungkidul, Kota Jogjakarta	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terbentuknya desa/kelurahan tangguh di wilayah rawan bencana	8 Desa/Kelurahan	Meningkatnya ketangguhan masyarakat menghadapi bencana Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan desa/ kelurahan tangguh bencana	100 %	Rp. 600.000.000,00	Rp. 660.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan desa/ kelurahan tangguh	8 Kali						
1.20.1.20.15.45.006	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	1. SD Islam Terpadu Arraihan Trirenggo, Bantul, 2. SDN Bangun Rejo 2 Kota Yogyakarta, 3. SMKN Ngawen Gunung Kidul, 4. SDN Kepuh Harjo, Cangkringan, 5. SMPN 1 Cangkringan, 6. SMA N Rongkop, di Semugih Gunung Kidul	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan sekolah siaga bencana	3 Sekolah	Tumbuhnya sikap dan tindakan, kebijakan sekolah, perencanaan kesiapsiagaan, dan mobilisasi sumberdaya lingkungan sekolah dalam menghadapi ancaman bencana. Adanya kesepahaman dan komitmen bersama antar anggota warga sekolah maupun dengan pemangku kepentingan	100 %	Rp. 675.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Terbentuknya sekolah siaga bencana di wilayah rawan bencana	3 Sekolah						
1.20.1.20.15.45.007	Sarasehan Kesiapsiagaan Peringatan Dini Dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Bantul Gunungkidul Kota Yogyakarta Sleman	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terselenggaranya Sarasehan Kesiapsiagaan Peringatan Dini Dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat	2 angkatan	Meningkatnya kemampuan dan kesadaran aparat dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.008	Review Peta Risiko Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terlaksananya kegiatan review peta risiko bencana kekeringan	1 dok	Semakin lengkapnya data dan informasi wilayah- wilayah yang memiliki risiko bencana kekeringan di DIY	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.009	Pelatihan Diklat Relawan PB	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kokap Pakem Wonosari Hargowilis Hargo Binangun	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terlaksananya pendidikan bagi relawan PB	3 angkatan	Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan relawan PB	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.15.45.010	Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kota Yogyakarta	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terselenggaranya koordinasi Forum Pengurangan Risiko Bencana	50 or 4 kali	Terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana Sehingga Aparat dan Masyarakat Tanggap Menghadapi Bencana	100 %	Rp. 54.697.500,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.011	Pengembangan Budaya Sadar Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terselenggaranya kegiatan sepeda sadar bencana , lomba melukis dan mendongeng dengan tema Pengurangan Risiko Bencana (Sepeda sadar bencana : 1 kali, lomba lukis : 1 kali, lomba mendongeng : 1 kali)	1 Kali	Tumbuhnya kesadaran terhadap upaya Pengurangan Risiko Bencana	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.012	Sosialisasi Pengenalan dan Pemantauan Risiko Bencana Alam, Non Alam dan Sosial	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terselenggaranya Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Risiko Bencana berupa 5 kali x 2 hari kegiatan lokakarya x 500 orang	5 Kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana diwilayahnya	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.013	Pemantauan Early Warning System	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Pengadaan EWS	300 titik	Berfungsinya EWS pada saat bencana sehingga masyarakat terhindar dari bencana	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Terselenggaranya pemantauan EWS	12 bulan						
1.20.1.20.15.45.015	Penelitian dan Pengkajian Kawasan Pascabencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Diketuainya perkembangan lokasi kawasan pascabencana	1 dok	Tersedianya referensi untuki Pengurangan Resiko Bencana di Masyarakat	100 %	Rp. 60.155.700,00	Rp. 66.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.020	Pelatihan Sistem Pendataan Penilaian Kerusakan Kerugian dan Kebutuhan Pascabencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Cangkringan Ngemplak Pakem Tempel Turi	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terselenggaranya Pelatihan Sistem Pendataan Penilaian Kerusakan Kerugian dan Kebutuhan Pascabencana	30 or	1. Dapat memperkirakan dampak bencana terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kemudian dituangkan lebih lanjut ke dalam dampak kerugian langsung dan tidak langsung terhadap kondisi makroekonomi wilayah yang terkena bencana, 2. Menginka	100 %	Rp. 84.477.800,00	Rp. 90.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.15.45.021	Sosialisasi Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik Pascabencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Cangkringan Minggir Pakem Patuk Turi Argo Mulyo Glagah Harjo Sendangagung Candi Binangun Semoyo	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terselenggaranya Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik Pascabencana Dana APBD	40 or	Terwujudnya Kesepakatan Masyarakat Korban Bencana dan Aparat Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Pascabencana	100 %	Rp. 85.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Donokerto										
1.20.1.20.15.45.022	Kajian Kawasan Pascabencana/ Rawan bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Diketauhinya kondisi riil/eksisting masyarakat daerah rawan longsor, permasalahan dan solusinya.	1 dok	Adanya konsep kebijakan penanganan masyarakat daerah rawan longsor	100 %	Rp. 211.552.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.025	Pembuatan Poster Leaflet Educatif Kebencanaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Tersedianya : • 2000 kalender • 1500 brosur • 2500 leaflet • 500 buku saku • 2 baliho	5 jenis	Meningkatnya kemampuan aparat dan masyarakat dalam memahami proses terjadinya bencana dan upaya penanggulangannya	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.026	Fasilitasi SAR DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas Tim SAR DIY.	6 bulan	Meningkatnya keterampilan Tim SAR DIY dalam bidang Organisasi Search and Rescue, Komunikasi SAR, Urban SAR, Evakuasi Medan Sulit, Water Rescue, Pertolongan Darurat	100 %	Rp. 180.000.000,00	Rp. 195.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.027	Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Pakem	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana	1 angkatan	Meningkatnya kapasitas relawan penanggulangan bencana dalam bidang Penanggulangan Bencana (pengorganisasian, operasi kedaruratan, pertolongan darurat, komunikasi bencana)	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.45.029	Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tingkat DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Bantul Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Tersusunnya dokumen Rencana kontinjensi bencana gempa bumi dan tanah longsor	1 dok	Acuan kesiapsiagaan penanggulangan bencana gempa bumi dan Tsunami	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.15.45.030	Partisipasi Dalam Bulan Pengurangan Risiko bencana Tingkat Nasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	lokasi penyelenggaraan Bulan PRB Nasional belum ditentukan	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Keikutsertaan dalam Bulan PRB Nasional berupa pameran, kampanye dll	1 Kali	Terwujudnya partisipasi dalam bulan PRB tingkat Nasional	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.15.45.031	Sarasehan Kearifan Lokal Penyelenggaraan Perbaikan Lingkungan Pascabencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Imogiri Minggir Ngemplak Nglipar Patuk Pleret Samigaluh Srandakan Temon Turi Wukirsari Sendangagung Sindumartani Kedung Keris Semoyo Wonolelo	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	1. Kearifan Lokal teridentifikasi	10 lokasi	Perbaikan lingkungan di daerah pasca bencana	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Hibah perbaikan lingkungan	10 lokasi						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Purwoharjo Poncosari Jangkaran Wono Kerto										
1.20.1.20.15.45.032	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Pengungsian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Penyelenggaraan pelatihan penyusunan Database penungsi (Masyarakat umum, kelompok rentan, anak-anak dan penyandang cacat) di Daerah Rawan Bencana	1 angkatan	Peningkatan kapasitas masyarakat mengenai pengelolaan pengungsi	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.15.45.033	Fasilitasi Penanggulangan Zoonosis DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kota Yogyakarta	Peningkatan jumlah desa tangguh	40 Desa	Terlaksananya koordinasi tim penanggulangan zoonosis	40 orang ,4 kl	Terfasilitasinya upaya pemberantasan zoonosis di DIY	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.15.46	PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA										Rp. 6.004.697.700,00	Rp. 6.090.000.000,00		
1.20.1.20.15.46.001	Pengelolaan dan Penataan Peralatan dan Logistik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Tersedianya stok logistik	8 jenis	gudang logistik terkelola dengan baik	100 %	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Tersedianya dukungan pendanaan untuk pengelolaan dan penataan gudang	12 bulan						
1.20.1.20.15.46.002	Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum untuk Penanggulangan Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Galur Kalibawang Karang Sewu Banjarharjo Purwo Binangun	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam mengelola dapur umum	5 angkatan	Kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana melalui peningkatan kemampuan masyarakat mengelola dapur umum	100 %	Rp. 170.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.003	Up-dating Data Peralatan dan Logistik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terlaksananya laporan up date data peralatan dan logistik	1 dok, 1 lap	Data peralatan dan logistik ter up Date	100 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 27.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.004	Koordinasi Pengelolaan Peralatan dan Logistik dalam Penanggulangan Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terselenggaranya koordinasi lembaga bidang PB terkait pengelolaan peralatan dan logistik	30 or	Meningkatnya kualitas koordinasi pengelolaan peralatan dan logistik dalam PB	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.005	Pelatihan Manajemen Logistik Bagi Masyarakat Relawan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam menejemen logistik	4 Kali	Meningkatnya kualitas pengetahuan,pemahaman, wawasan dan ketrampilan tentang menejemen logistik	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 140.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.006	Fasilitasi Pemasangan Jalur dan Rambu-Rambu Evakuasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Tersedia dan terpasangnya Rambu-rambu Jalur Evakuasi di lokasi yang berpotensi terjadi	7 Paket	Meningkatnya keamanan dan keselamatan bagi petugas, relawan penanggulangan bencana di lokasi rawan bencana.	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							bencana		Menurunnya risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana					
1.20.1.20.15.46.007	Koordinasi dan Assesment Data di Lokasi Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terfasilitasinya koordinasi dan assesment data kejadian bencana.	11 bulan	Terkoordinir dan terkonsolidasikannya pendataan kejadian bencana di DIY.	100 %	Rp. 33.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
							Terdokumentasikannya data kejadian bencana	1 dok						
1.20.1.20.15.46.008	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terfasilitasi dan terkondisikannya penanganan awal kejadian bencana. Terkoordinasikannya pelaku penanganan darurat bencana pada fase awal kejadian bencana.	12 %	Meningkatnya respon komponen penanggulangan bencana. Berkurangnya risiko bagi petugas dan masyarakat serta menurunnya jumlah korban.	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.009	Penggerakan potensi relawan dan SAR dalam rangka pemulihan awal sarana dan prasarana vital di lokasi bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terfasilitasinya penggerakan relawan dalam rangka pemulihan awal sarana dan prasarana vital di lokasi bencana DIY.	11 bulan	Meningkatnya penanganan pemulihan awal sarana dan prasarana vital di lokasi bencana oleh relawan PB.	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.010	Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terselenggaranya latihan penanggulangan bencana melalui Gladi Posko secara serentak 5 Kabupaten/ Kota dan 1 kali Gladi Lapang	2 jenis	Meningkatnya keterampilan petugas, relawandan komponen PB dalam Kedaruratan Bencana. Masyarakat lebih siaga dalam menanggulangi bencana.	100 %	Rp. 800.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.011	Fasilitasi Tim Reaksi Cepat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terselenggaranya Piket Tim Reaksi Cepat PB, Terfasilitasinya perlengkapan tim dan pribadi Tim Reaksi Cepat	12 bulan	Meningkatnya kemampuan Tim Reaksi Cepat dalam penanggulanga bencana melalui penyelenggaraan piket TRC PB.	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.012	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kab. Sleman, DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) PB.	1 akt	Meningkatnya kemampuan anggota TRC PB dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana.	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.014	Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan Sosial dan Ekonomi Pascabencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Cangkringan	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terfasilitasinya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascabencana	5 kelompok	Meningkatnya kegiatan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana	100 %	Rp. 122.145.000,00	Rp. 140.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.015	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	1. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dana Hibah dan dana	12 bulan	Terwujudnya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya	100 %	Rp. 62.950.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							bantuan sosial APBD se-DIY,		pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan angga					
							2. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi merapi di Kabupaten Sleman	12 bulan						
1.20.1.20.15.46.016	Fasilitasi dan Koordinasi Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat pascabencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Pleret	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terfasilitasinya pembangkitan kelompok kesenian	2 kelompok	Pulihnya kegiatan berkesnian/budaya masyarakat pascabencana	100 %	Rp. 116.990.000,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.017	Peningkatan fungsi pelayanan publik pascabencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Bantul Cangkringan	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terfasilitasinya perbaikan sarana pelayanan publik	2 lokasi	Meningkatnya fungsi pelayanan publik bagi asyarakat pascabencana	100 %	Rp. 331.080.000,00	Rp. 350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.018	Pendampingan RR pascabencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY	5 kab/kota	Lancarnya kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	100 %	Rp. 54.466.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.019	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana pascabencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kabupaten Kulon Progo Semin	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terfasilitasinya perbaikan sarana prasara pascabencana	2 kab/kota	Terfsilitasinya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasana Pascabencana	100 %	Rp. 482.480.000,00	Rp. 520.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.15.46.020	Fasilitasi Sekretariat Bersama Relawan PB DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	1. Terkoordinasinya komunitas relawan PB di DIY	100 %	Terwujudnya Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan di DIY yang siap dalam rangka kesiapsiagaan PB.	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Tersedianya SDM komunitas relawan yang memiliki kemampuan PB	12 bulan						
1.20.1.20.15.46.021	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kota Yogyakarta	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas kedaruratan dalam Sistim Komando Tanggap Darurat Bencana	1 Paket	Meningkatnya kemampuan petugas kedaruratan dalam perencanaan Operasi Darurat Bencana	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Tersedianya perangkat untuk Penyusunan Rencana Operasi	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 16.500.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Darurat apabila terjadi bencana di DIY							
1.20.1.20.15.46.022	Fasilitasi Pos Pemantuan Ancaman Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terselenggaranya piket pemantauan bencana di wilayah rawan bencana di DIY	12 bulan	Menurunnya Risiko bencana melalui Pemantuan Ancaman dan Potensi Bencana di DIY	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Terpantaunya ancaman dan potensi bencana di wilayah kab/kota DIY	12 bulan						
1.20.1.20.15.46.023	Updating Data di Lokasi Rawan Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terkoordinasinya pendataan di kawasan rawan bencana	12 bulan	Tersedianya data dan dokumen lokasi rawan bencana yang akurat di DIY.	100 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Terlaksananya pendataan secara akurat di lokasi rawan bencana di DIY	12 bulan						
1.20.1.20.15.46.024	Bantuan Stimulan untuk dukungan perbaikan rumah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Terbangunnya perbaikan rumah rusak akibat bencana	5 lokasi	Terwujudnya perbaikan sarana prasarana umum dan lingkungan	100 %	Rp. 856.586.700,00	Rp. 0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.15.46.025	Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	tingkat waktu tanggap (response time rate)	72 %	Tersusunnya Regulasi Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta: Pergub Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY, Pergub tentang Pedoman Pemberian Bantuan Korban Tidak Langsung, & Pergub Bantuan Komp	3 dokumen	Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja													
1.19.1.19.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 688.400.000,00	Rp. 690.670.000,00		
1.19.1.19.02.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Perangko	150 lembar	Menunjang Kelancaran Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran	100 %	Rp. 4.950.000,00	Rp. 5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. Meterai	850 lembar						
1.19.1.19.02.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Jasa Telepon, Listrik, Internet	12 bulan	Menunjang Kelancaran Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran	100 %	Rp. 56.000.000,00	Rp. 55.530.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. Sewa Tanah Repiter Terbayar	2 tahun						
1.19.1.19.02.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Penelitian Ulang STNK	14 unit kendaraan	Kendaraan Dinas Siap Dioperasikan	100 %	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. KIR Kendaraan	4 unit kendaraan						
1.19.1.19.02.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian Terbayar	13 Orang	Menunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100 %	Rp. 22.500.000,00	Rp. 22.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	17.39 m2	Menunjang Kenyamanan Kerja	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	49 jenis	Menunjang Kelancaran Tugas	100 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Satuan Polisi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan		Administrasi Perkantoran								Pamong Praja	
1.19.1.19.02.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Barang Cetakan	15 jenis	Menunjang Kelancaran Tugas	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. Penggandaan	129.3 lembar						
1.19.1.19.02.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Listrik	15 jenis	Menunjang Kelancaran Tugas Kantor	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat Kabar/ Majalah	5 jenis	Menambah Referensi	100 %	Rp. 5.250.000,00	Rp. 5.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. Referensi Kedinasan	2 Paket						
							3. Buku Kepustakaan	7 Paket						
1.19.1.19.02.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Makan dan Minum Harian Pegawai	2514 Orang	Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100 %	Rp. 52.200.000,00	Rp. 52.140.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. Makan dan Minum Rapat/ Koordinasi	1800 Orang						
1.19.1.19.02.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60 Kali	Bahan Referensi Penyusunan Kebijakan	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 Kali						
1.19.1.19.02.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor /Gedung/Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium Penjaga Banpol PP, Pengendali dan Penjaga Repeater Terbayar	15 Orang	Terjaganya Keamanan Tempat Kerja/ Kantor	100 %	Rp. 237.500.000,00	Rp. 237.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 719.275.000,00	Rp. 734.700.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.02.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4	2 unit	Menunjang Kelancaran Ketugasan Kantor	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan Gedung Kantor	6 jenis	Lancarnya Tugas dan Pelayanan Kantor	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor	4 jenis	Menunjang Kelancaran Tugas	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.02.024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	14 unit kendaraan	Menunjang Kelancaran Tugas	100 %	Rp. 189.575.000,00	Rp. 200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.02.026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	13 jenis	Menunjang Kelancaran Tugas	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.02.028	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	13 jenis	Menunjang Kelancaran Tugas	100 %	Rp. 34.700.000,00	Rp. 34.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										Rp. 185.000.000,00	Rp. 0,00		
1.19.1.19.02.03.005	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Prosentase disiplin aparatur	100 %	1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL 1) dan Atributnya	130 stel	Menunjang Kelancaran Tugas	100 %	Rp. 185.000.000,00	Rp. 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
							2. Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Atributnya	130 stel						
							3. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6 stel						
1.19.1.19.02.05	PROGRAM PENINGKATAN										Rp. 13.000.000,00	Rp. 13.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR													
1.19.1.19.02.05.041	Asuransi Jiwa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Tersedianya Jaminan Asuransi Jiwa Bagi Anggota Satpol PP DIY	130 Orang	Menunjang Kelancaran Tugas	100 %	Rp. 13.000.000,00	Rp. 13.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 69.000.000,00	Rp. 69.200.000,00		
1.19.1.19.02.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD (LAKIP), Konsep LKPJ, Konsep LPPD	3 laporan	Tersedianya Bahan Evaluasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan	100 %	Rp. 2.800.000,00	Rp. 3.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (Semesteran, Prognosis, Akhir Tahun)	3 laporan	Laporan Keuangan SKPD dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu	100 %	Rp. 6.500.000,00	Rp. 6.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program Kerja SKPD (RKPD, RENJA, RKT, PK, DPA, ROPK)	7 dokumen	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan	1 laporan	Tersedianya Data/ Informasi untuk Perencanaan Berikutnya	100 %	Rp. 4.700.000,00	Rp. 4.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
1.19.1.19.02.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										Rp. 843.500.000,00	Rp. 865.500.000,00		
1.19.1.19.02.15.008	Koordinasi Penanganan Gepeng dan Anjal	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Operasi Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan	15 Kali Operasi	Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan	100 %	Rp. 84.000.000,00	Rp. 91.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.15.009	Pengamanan Asset Dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan Dan Pengawasan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	1. Pengamanan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan	Terkondisikannya Keamanan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kantor Pemerintah Daerah DIY	100 %	Rp. 170.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. Pengamananan Kegiatan Pemerintah Daerah Pada Hari Besar dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	3 Even						
1.19.1.19.02.15.010	Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah (S A T K O R P U L S I D A)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Deteksi Dini dan Pengumpulan Informasi Dalam Menciptakan Kondisi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	13 laporan	Deteksi Dini dan Tersedianya Informasi Situasi dan Kondisi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Sebagai Masukan Bagi Pimpinan Dalam Mengambil Langkah-langkah Tindak Lanjut Maupun Arah Kebijakan yang Akan Datang	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.15.018	Pengamanan dan Pengendalian Huru-hara/Unjuk Rasa/Kerusuhan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Yogyakarta	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Pengamanan Unjuk Rasa/ Kerusuhan yang Terjadi di Lingkungan Pemerintah	140 kali unjuk rasa	Terkendalikannya Massa Unjuk Rasa dari Perbuatan Anarkis dan Keamanan Secara Umum Terkondisi	100 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 115.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Daerah DIY		Dengan Baik					
1.19.1.19.02.15.019	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol PP se DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Yogyakarta	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Forum Koordinasi Pol PP se DIY	2 Kali	Terkordinaisaikannya Tugas Maupun Program Kegiatan Dalam Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja se DIY	100 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.15.020	Penyelenggaraan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	1. Patroli Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	12 bulan	Terpantau dan Terkendalikannya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Wilayah DIY	100 %	Rp. 140.000.000,00	Rp. 140.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. Posko Kesiapsiagaan Trantibumas	120 Hari						
							3. Patroli Wilayah Kabupaten/ Perbatasan	120 Kali						
							4. Rapat Kerja Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2 Kali						
1.19.1.19.02.15.026	Peningkatan Motivasi Kerja Pol P P	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Peningkatan Motivasi Kerja Pol PP	3 Angkatan (@45 Orang)	Meningkatkan Wawasan, Kemampuan dan Motivasi Kerja Anggota Pol PP Dalam Melaksanakan Tugas	100 %	Rp. 29.500.000,00	Rp. 29.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.15.027	Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Bantul Berbah Cangkringan Danurejan Depok Galur Gamping Gedang sari Gedongtengen Girimulyo Girisubo Godean Gondokusuman Gondomanan Jetis	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	78 Kali	1. Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Perundang-undangan oleh Aparat Pemerintah Daerah	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja										Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Kalasan Kalibawang Karangmojo Kokap Kotagede Kraton Lendah Mantrijeron Mergangsan Minggir Mlati Moyudan Nanggulan Ngaglik Ngampilan Ngawen Ngemplak Nglipar Pakem Pakualaman Paliyan Panggang Panjatan Patuk Pengasih Playen Ponjong Prambanan Purwosari Rongkop Samigaluh Sapto sari Semanu Semin Sentolo Seyegan Sleman Tanjungsari Tegalrejo Temon Tempel Tepus Turi Turi Umbulharjo Umbulharjo Wates Wates Wirobrajan Wirobrajan Wonosari Wonosari					2. Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku	100 %				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.02.15.044	Pemantauan dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	1. Pemantauan dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah DIY	12 bulan	Aset Milik Pemerintah Daerah DIY Dalam Kondisi Aman dan Tidak Dimanfaatkan oleh Pihak-pihak yang Tidak Bertanggung Jawab (Penghuni Liar)	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. Pemantauan Aset Milik Pemerintah Daerah DIY ke Daerah Kabupaten	96 Kali						
							3. Pemantauan Aset Milik Pemerintah Daerah DIY ke Daerah Kota	48 Kali						
							4. Pengamanan Penertiban Aset Milik Pemerintah Daerah DIY	10 Kali						
1.19.1.19.02.15.045	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Upacara HUT Pol PP	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Upacara HUT Pol PP	1 Kali	Meningkatnya Kedisiplinan dan Nasionalisme Anggota Satpol PP se DIY	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.15.046	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Petugas Pengamanan Aset Pemerintah Daerah DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Yogyakarta	Penurunan kasus pelanggaran perda	250 kasus	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Petugas Pengamanan Aset Pemerintah Daerah DIY	1 Hari (3 Angkatan)	1. Terkoordinasikannya Ketugasan Pengamanan Aset Pemerintah Daerah DIY 2. Meningkatnya Kemampuan Petugas Pengamanan Aset Pemerintah Daerah DIY	100 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL										Rp. 567.000.000,00	Rp. 611.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.02.16.009	Operasi Non Yustisi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	Operasi Non Yustisi	50 Kali Operasi	Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Penegakan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.16.010	Operasi Yustisi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	Operasi Yustisi	14 Kali Operasi	Terlaksananya Proses Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.16.011	Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	12 Kali (@30 orang)	Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 56.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.16.013	Pembinaan Fisik Bagi Pol PP	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Danurejan	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	1. Kesamaptaan	12 Kali	Tersedianya Anggota Satpol PP yang Siap Fisiknya Dalam Pengendalian Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
							2. Beladiri	12 Kali						
							3. Lintas Medan	1 Kali						
1.19.1.19.02.16.018	Bimtek PPNS D I Y	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Yogyakarta	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	Bimbingan Teknis Operasional PPNS	2 Hari (@35 orang)	Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Teknis Operasional PPNS	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.16.020	Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Pedoman Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	Rancangan Pergub Tentang Pakaian dan Atribut PPNS	1 draft pergub	Kepastian Hukum Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.16.022	Pembinaan dan Pengendalian Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Yogyakarta	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengendalian Penegakan	5 kali pembinaan (@40 orang)	Meningkatnya Kinerja PPNS dan Koordinasi PPNS dalam Menegakkan	100 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	oleh PPNS		Meningkat				Peraturan Perundang-undangan oleh PPNS		Peraturan Perundang-undangan					
1.19.1.19.02.16.024	Fasilitasi Kesekretariatan PPNS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	Fasilitasi Kesekretariatan PPNS	10 bulan (180 orang PPNS)	Meningkatnya Kinerja PPNS dan Koordinasi PPNS	100 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.16.026	Penanganan Penegakan Peraturan Daerah serta Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Wilayah Perbatasan DIY-JATENG	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Wilayah Perbatasan DIY-JATENG	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	Operasi Penegakan Peraturan Daerah di Wilayah Perbatasan JATENG-DIY	40 Kali Operasi	Meningkatnya Ketaatan Masyarakat di Wilayah Perbatasan JATENG-DIY terhadap Peraturan Daerah yang Berlaku	100 %	Rp. 62.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.16.029	Pembuatan Database Satpol PP	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Satuan Polisi Pamong Praja	Penurunan kasus tindak kriminal	948 kasus	1. Peta Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 peta	Tersedianya data yang akurat sebagai referensi bahan kebijakan maupun tindak lanjut berikutnya	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 155.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2. Peta Potensi Pelanggaran Perda	1 peta						
							3. Peta Potensi Penyimpangan Pemanfaatan Aset PEMDA DIY	1 peta						
1.19.1.19.02.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)										Rp. 160.000.000,00	Rp. 161.000.000,00		
1.19.1.19.02.20.001	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P4GN)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pekat	314 kasus	Penyuluhan P4GN	12 Kali (@30 orang)	Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan NAPZA dalam Masyarakat	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja											Jumlah Pagu : Rp. 3.300.175.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.19.1.19.02.20.011	Operasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (P4GN)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pekat	314 kasus	Operasi P4GN	50 Kali Operasi	Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA dalam Masyarakat	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.19.1.19.02.20.013	Fasilitasi dan Koordinasi Penertiban Kos-kosan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Penurunan kasus pekat	314 kasus	Fasilitasi dan Koordinasi Penertiban Kos-kosan di Kabupaten/ Kota se DIY	30 Kali Operasi	Menurunnya Tindak Kriminal dan Penyakit Masyarakat	100 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 46.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.14	Satuan Polisi Pamong Praja													
1.20.1.19.14.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH										Rp. 55.000.000,00	Rp. 55.000.000,00		
1.20.1.19.14.16.008	Pengamanan Dan Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur Dan Tamu Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	95 %	Pengamanan dan Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah (Pengawasan ke Daerah Kabupaten dan Dalam Kota)	12 bulan (132 Kali)	Terciptanya Kondisi Keamanan Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.09	Pertanahan													
1.09.01	Biro Tata Pemerintahan													
1.09.1.20.01.16	PROGRAM PERBAIKAN PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH*										Rp. 255.291.000,00	Rp. 275.000.000,00		
1.09.1.20.01.16.005	Fasilitasi Izin Pengelolaan Tanah Kas Desa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Bantul Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Sleman	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	60 %	Terbit/keluarnya izin pengelolaan dan Pemanfaatan tanah kas desa	70 ijin	Adanya Kepastian Hukum dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa	100 %	Rp. 74.990.000,00	Rp. 80.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.09.1.20.01.16.006	Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Gubernur D I Y Di Bidang Pertanahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	60 %	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian kebijakan Gubernur DIY di bidang pertanahan	30 ijin	Terciptanya Tertib administrasi pelaksanaan kebijakan Gubernur DIY tentang Perizinan Tanah Kas Desa	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.09.1.20.01.16.015	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	60 %	Penetapan Lokasi bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	12 penetapan lokasi	Kepastian Hukum terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	100 %	Rp. 80.301.000,00	Rp. 95.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.09.1.20.01.16.018	Fasilitasi Pengawasan Izin Pelepasan Tanah Kas Desa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Bantul Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Sleman	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	60 %	Terlaksananya pengawasan pelepasan tanah kas desa di DIY	10 ijin	Terciptanya Tertib administrasi pelaksanaan pelepasan Tanah Kas Desa	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.09.1.20.01.17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN										Rp. 85.000.000,00	Rp. 90.000.000,00		
1.09.1.20.01.17.001	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	25 %	Penanganan permasalahan Pertanahan	40 permasalahan	Terfasilitasinya Penyelesaian aduan masalah/konflik-konflik Pertanahan	100 %	Rp. 85.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.09.1.20.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH										Rp. 130.397.000,00	Rp. 145.000.000,00		
1.09.1.20.01.18.003	Pembaharuan Data Tanah Kas Desa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Bantul Sleman	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pembaruan Data Tanah Kas Desa	10 Desa	Terbaharuinya data tanah kas desa	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.09.1.20.01.18.008	Koordinasi Penataan Pemanfaatan Tanah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Fasilitasi Rekomendasi Pemanfaatan Tanah dan Kejelasan Status Tanah	10 rekomendasi	Kepastian Pemanfaatan Tanah dan Kejelasan Status Tanah	100 %	Rp. 65.397.000,00	Rp. 75.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil													
1.10.01	Biro Tata Pemerintahan													
1.10.1.20.01.15	PROGRAM PENATAAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										Rp. 1.151.713.500,00	Rp. 1.330.000.000,00		
1.10.1.20.01.15.001	Pembangunan Dan Pengoperasian S I A K Secara Terpadu	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Konsolidasi database kependudukan dengan Kabupaten/ Kota se-DIY serta Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka Sistem informasi Administrai Kependudukan (SIK)Pengadaan hardware jaringan komunikasi database (ext HD)	1 sistem	Terbentuk Database Kependudukan tingkat DIY yang andal dan mutakhir	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Pengadaan hardware jaringan komunikasi database (server, CPU dan laptop)	1 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengadaan hardware jaringan komunikasi database (ext HD)	2 unit						
1.10.1.20.01.15.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating Dan Pemeliharaan)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Terselenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SIAK bagi Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan Desa/ Kelurahan se DIY	338 Orang	Revitalisasi pelayanan administrasi kependudukan di desa/ kelurahan berbasis teknologi informasi	100 %	Rp. 153.975.250,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.10.1.20.01.15.005	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Rekomendasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan	1 rekomendasi	Tertib administrasi kependudukan	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.10.1.20.01.15.009	Pengembangan Database Kependudukan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Pengembangan jaringan dan sistem konsolidasi database provinsi-kab/kota dan provinsi-Pusat	1 sistem	Kebutuhan instansi terhadap akses data penduduk dapat terpenuhi dan Pemda DIY memiliki database kependudukan yang selalu mutakhir dan akurat	100 %	Rp. 115.385.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Aplikasi akses data penduduk berbasis web services	1 sistem						
1.10.1.20.01.15.014	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Laporan monitoring, evaluasi bidang kependudukan dan kesepakatan penyelesaian permasalahan bidang kependudukan	1 laporan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dapat dilaksanakan secara optimal	100 %	Rp. 37.000.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.10.1.20.01.15.018	Koordinasi Data Kependudukan Orang Asing	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Data Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP di DIY	1 laporan	Tertib dokumen kependudukan bagi orang asing di DIY	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.10.1.20.01.15.028	Fasilitasi dan koordinasi Penanganan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Rekomendasi penanganan penduduk rentan administrasi kependudukan di DIY	1 rekomendasi	Terpetakannya penduduk rentan administrasi kependudukan di DIY	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.10.1.20.01.15.035	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Sipil	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Rekomendasi penanganan permasalahan pelaksanaan pencatatan sipil	1 rekomendasi	Tertib administrasi pencatatan sipil	100 %	Rp. 72.698.000,00	Rp. 85.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.10.1.20.01.15.036	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Kelahiran	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Terfasilitasinya kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk miskin yang pelaporan kelahirannya melampaui batas waktu 60 hari	500 akta kelahiran	Terciptanya kepastian hukum pencatatan kelahiran bagi penduduk miskin	100 %	Rp. 54.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.10.1.20.01.15.037	Fasilitasi dan Koordinasi Permasalahan Pencatatan Perkawinan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Terfasilitasinya kepemilikan akta nikah bagi penduduk miskin	50 surat nikah	Terciptanya kepastian hukum pencatatan perkawinan bagi penduduk miskin	100 %	Rp. 54.200.000,00	Rp. 55.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.10.1.20.01.15.038	Koordinasi Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Tersajinya analisis profil perkembangan kependudukan DIY	1 laporan	SKPD dan masyarakat mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai karakteristik kependudukan di DIY	100 %	Rp. 60.445.000,00	Rp. 80.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Penerbitan buku profil kependudukan berstandar nasional sesuai Permendagri No. 65 Tahun 2010	150 buku						
1.10.1.20.01.15.039	Koordinasi Pemberdayaan Kader PKK dalam Mendukung Tertib Administrasi Kependudukan 2015	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Meningkatnya pemahaman Tim Penggerak PKK di bidang Administrasi Kependudukan	105 Orang	Peran aktif PKK dalam mendukung tertib Administrasi Kependudukan	100 %	Rp. 43.836.250,00	Rp. 55.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.10.1.20.01.15.040	Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Kependudukan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Rekomendasi penanganan permasalahan kependudukan TKI	1 rekomendasi	Tertib administrasi kependudukan TKI	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.10.1.20.01.15.044	Sosialisasi Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No.13	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Terlaksananya sosialisasi UU No. 24 Tahun 2013	105 Orang	Masyarakat memahami UU No. 24 tahun 2013	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Kebijakan Pemerintah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		Meningkat											
1.10.1.20.01.15.045	Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Tersusunnya rancangan kebijakan terkait pemanfaatan data kependudukan bagi instansi terkait	1 rekomendasi	Instansi terkait dapat memanfaatkan akses data kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	100 %	Rp. 40.174.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.10.1.20.01.15.046	Fasilitasi dan Koordinasi Permasalahan Pencatatan Kematian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Rekomendasi penanganan permasalahan pencatatan kematian	1 rekomendasi	Tertib administrasi pencatatan kematian	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.10.1.20.01.15.047	Koordinasi Pemberdayaan Bidan / Penolong Persalinan dalam Mendukung Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	89 %	Meningkatnya pemahaman bidan/penolong persalinan di bidang Administrasi Pencatatan Sipil	90 Orang	Peran aktif Bidan/penolong persalinan dalam mendukung tertib Administrasi Pencatatan Sipil	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Tata Pemerintahan													
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 517.984.000,00	Rp. 543.000.000,00		
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perangko	300 lembar	Terdistribusikannya surat (dokumen) dan kelancaran administrasi perkantoran	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Materai	675 lembar						
							Jasa Pengiriman	25 Paket						
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya administrasi perpanjangan kendaraan	18 STNK	Mendukung kelancaran tugas-tugas di luar kantor	100 %	Rp. 10.200.000,00	Rp. 12.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat				bermotor biro							
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Petugas pengelola keuangan dan kepegawaian menerima honor	13 Orang	Kelancaran tugas-tugas administrasi keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian	100 %	Rp. 20.400.000,00	Rp. 26.500.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	100 %	Rp. 27.500.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan	13 jenis	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	100 %	Rp. 20.500.000,00	Rp. 21.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Tersedianya penggandaan	73000 lembar						
							Tersedianya penjilidan buku	100 Jilid						
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan	23 jenis	Menunjang penerangan dan tugas kedinasan	100 %	Rp. 11.500.000,00	Rp. 12.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.013	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terlaksananya pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung	Menunjang keamanan gedung tempat kerja	100 %	Rp. 2.332.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8 jenis	Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan kantor	100 %	Rp. 3.702.000,00	Rp. 3.500.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Surat Kabar	2 jenis	Menunjang kelancaran tugas kedinasan	100 %	Rp. 16.850.000,00	Rp. 17.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Tersedianya buku/kepuustakaan	15 buku						
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman rapat	5000 os	Menunjang kelancaran tugas-tugas koordinasi di Biro Tata Pemerintahan	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	Menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan dan koordinasi	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 380.850.000,00	Rp. 398.000.000,00		
1.20.1.20.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Air Conditioner (AC) Split	4 unit	Menunjang kenyamanan lingkungan kerja	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan PC Branded	10 unit	Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	100 %	Rp. 135.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Pengadaan laptop	4 unit						
							Pengadaan printer	10 unit						
1.20.1.20.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpenuhinya goryden jendela kantor	120 m	Kenyamanan Tempat Kerja	100 %	Rp. 18.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor dan tersedianya bahan bakar minyak/gas dan pelumas	2 jenis	Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	100 %	Rp. 170.200.000,00	Rp. 185.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga Biro	7 jenis	Alat-alat kantor dan rumah tangga berfungsi dengan baik	100 %	Rp. 27.650.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 101.460.000,00	Rp. 65.000.000,00		
1.20.1.20.01.05.043	Penyusunan Website atau Sistem Informasi SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Terwujudnya website Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 sistem	Kemudahan akses dan terinformasikannya Biro Tata Pemerintahan kepada masyarakat	100 %	Rp. 42.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									luas					
1.20.1.20.01.05.063	Bimtek Organisasi dan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peningkatan pemahaman organisasi dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan	56 Orang	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Biro Tata Pemerintahan	100 %	Rp. 59.460.000,00	Rp. 65.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 50.937.500,00	Rp. 53.000.000,00		
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya laporan kinerja SKPD (LAKIP)	1 dokumen	Terukurnya akuntabilitas kinerja Biro selama satu tahun anggaran	100 %	Rp. 4.025.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya laporan keuangan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 laporan	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	100 %	Rp. 7.237.500,00	Rp. 8.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	1 laporan						
							Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan						
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD	1 dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan dan program	100 %	Rp. 29.675.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD	1 dokumen						
							Tersusunnya dokumen analisis standard belanja	1 dokumen						
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Biro Tata Pemerintahan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100 %	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi SKPD	1 dokumen	Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi atas	100 %	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SKPD		Daerah Meningkat		manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				program dan kegiatan Biro					
1.20.1.20.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH										Rp. 540.518.000,00	Rp. 644.770.000,00		
1.20.1.20.01.25.015	Pemeliharaan Dan Penggantian Pilar Batas Antara D I Y Dan Jateng	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kalibawang Samigaluh	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Penambahan Pilar Batas DIY - Jateng (Perapatan Pilar batas)	15 pilar	Tertib administrasi batas antara DIY-Jawa Tengah	100 %	Rp. 88.932.000,00	Rp. 105.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.25.020	Penyusunan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Laporan Kode dan data wilayah administrasi kab/Kota se Provinsi DIY	100 buku	Informasi data wilayah administrasi di Provinsi DIY	100 %	Rp. 38.619.500,00	Rp. 43.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.25.026	Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Rekomendasi penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	2 rekomendasi	Keterpaduan program kegiatan penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	100 %	Rp. 60.077.000,00	Rp. 81.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.25.027	Fasilitasi dan Koordinasi Mitra Praja Utama	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan Provinsi Anggota MPU	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Kesepakatan anggota mitra praja utama	2 kesepakatan	Sinergitas kerjasama antar anggota mitra praja utama	100 %	Rp. 112.588.000,00	Rp. 120.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.25.028	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan APPSI	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan Provinsi Anggota APPSI	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Rekomendasi APPSI kepada Pemerintah	1 rekomendasi	Penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang optimal	100 %	Rp. 81.790.000,00	Rp. 95.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.25.037	Penyusunan Database Wilayah Perbatasan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kalibawang Samigaluh	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Data base pilar batas untuk Kabupaten perbatasan DIY-Jateng (perbatasan Kab. Kulonprogo-Purworejo)	1 Paket	Tersedianya data pilar diperbatasan DIY-Jateng (Perbatasan Ka. Kulonprogo-Purworejo) dan data wilayah perbatasan antar desa secara detail	100 %	Rp. 79.703.500,00	Rp. 97.770.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penggabungan Peta Desa yang berbatasan skala 1:5.000 (Desa Perbatasan antara Kab. Kulonprogo-Purworejo)	6 peta						
1.20.1.20.01.25.039	Sosialisasi Permendagri No.83/2013. Batas Kab. Bantul - Sleman dan Permendagri 19/2006. Batas DIY-Jateng	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Bantul Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Sleman	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Tersosialisasinya Permendagri No 83 Tahun 2013	160 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas wilayah	100 %	Rp. 30.208.500,00	Rp. 49.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.25.040	Penyusunan Draf Pergub tentang Penamaan Rupa Bumi Unsur Buatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	65 %	Pedoman penamaan rupa bumi unsur buatan	1 draft	Tertib administrasi penamaan rupa bumi unsur buatan di DIY	100 %	Rp. 48.599.500,00	Rp. 54.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU										Rp. 423.459.000,00	Rp. 525.000.000,00		
1.20.1.20.01.27.005	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah	4 urusan	Bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan urusan otonomi daerah dan peningkatan pemahaman makna otonomi daerah	100 %	Rp. 120.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Peringatan Hari Otonomi Daerah	1 kegiatan						
1.20.1.20.01.27.006	Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan Urusan Pemerintahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Pemda dan Kabupaten / Kota	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Kejelasan dan ketegasan Penerapan urusan Pemerintahan antara Prov. Dan Kab/Kota	5 rekomendasi	Bahan rumusan kebijakan penerapan urusan pemerintahan antara Provinsi dan Kab/Kota	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.27.007	Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P 3 D	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Berita acara pengalihan personel dan aset bidang PU	1 bidang	Kepastian status personil dan aset bidang PU	100 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.27.010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Pemda dan Kabupaten / Kota	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan	100 %	Draft kesepakatan /pedoman penerapan urusan pemerintahan	1 draft	Bahan rumusan kebijakan penerapan urusan pemerintahan di Pemda DIY	100 %	Rp. 26.787.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kriteria)									
1.20.1.20.01.27.012	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi dan Kab/Kota	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 laporan	Bahan atau input penyelenggaraan Otda di DIY dan Kabupaten/Kota	100 %	Rp. 85.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.27.016	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Tertingkatnya pemahaman penerapan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	50 Orang	Kejelasan dan Keselarasan Penerapan Urusan Pemerintahan di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota	100 %	Rp. 18.738.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.27.017	Penyusunan Pedoman Monev	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	100 %	Instrumen Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Otonomi daerah	1 dokumen	Terukurnya Penyelenggaraan otonomi daerah Pemda DIY	100 %	Rp. 67.934.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.28	PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN										Rp. 10.566.272.875,00	Rp. 4.055.000.000,00		
1.20.1.20.01.28.002	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antarwaktu	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW anggota DPRD dan pelantikan Gubernur/Wagub	100 %	Terfasilitasi pemberhentian dan penggantian anggota DPRD antarwaktu	1 SK	Penetapan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD dan Pedoman Pemberhentian dan Penggantian antarwaktu anggota DPRDTerlaksananya Raker Apresiasi ketugasan legislatif anggota DPRD Kab/Kota	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
							Tersusunnya Pedoman Mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD	1 draf						
1.20.1.20.01.28.013	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW anggota DPRD	100 %	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun	1 laporan	Materi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di	100 %	Rp. 230.674.875,00	Rp. 270.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		dan pelantikan Gubernur/Wagub		2014		DIY					
1.20.1.20.01.28.014	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Bantul Gunungkidul Sleman	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW anggota DPRD dan pelantikan Gubernur/Wagub	100 %	Terfasilitasinya Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah	3 kabupaten	Terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah yang aman dan lancar	100 %	Rp. 10.086.463.000,00	Rp. 3.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.20.1.20.01.28.015	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW anggota DPRD dan pelantikan Gubernur/Wagub	100 %	Rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan	1 rekomendasi	Penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan optimal	100 %	Rp. 55.875.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.28.020	Kajian Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW anggota DPRD dan pelantikan Gubernur/Wagub	100 %	Kajian Hari Jadi DIY	1 dokumen kajian	Penetapan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta	100 %	Rp. 138.260.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
1.22.02	Biro Tata Pemerintahan													
1.22.1.20.02.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA										Rp. 2.206.627.125,00	Rp. 1.980.000.000,00		
1.22.1.20.02.18.006	Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	100 %	Rekomendasi terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 rekomendasi	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan optimal	100 %	Rp. 34.930.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.22.1.20.02.18.013	Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	100 %	Meningkatnya pemahaman tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	150 Orang	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	100 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.22.1.20.02.18.015	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan	100 %	Rekomendasi terhadap kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan	1 rekomendasi	Kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan optimal	100 %	Rp. 34.962.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 16.410.510.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kesepakatan penyelesaian		pemerintahan desa							
1.22.1.20.02.18.019	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	100 %	Tertingkatnya pengetahuan, pemahaman, wawasan dan kemampuan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan tertingkatnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa	175 Orang	Meningkatnya kinerja aparat pemerintah desa	100 %	Rp. 259.672.500,00	Rp. 210.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.22.1.20.02.18.020	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Bantul Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Sleman	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	100 %	Terbantunya rehabilitasi gedung kantor pemerintah desa	15 Desa	Kantor desa, kelurahan dan balai warga berfungsi dengan baik	100 %	Rp. 1.797.102.625,00	Rp. 1.600.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.22.1.20.02.18.021	Forum Komunikasi BPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	100 %	Meningkatnya pemahaman tugas fungsi BPD	100 Orang	Kinerja BPD yang meningkat	100 %	Rp. 34.960.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.579.907.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Hukum													
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 367.194.375,00	Rp. 355.184.500,00		
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengiriman Surat / Paket	1 Paket	Mendukung Kelancaran tugas-tugas di luar kantor	100 %	Rp. 2.916.000,00	Rp. 3.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Buku Cek	5 buku						
							Materai	576 lembar						
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	STNK yang telah diteliti	7 unit kendaraan	Mendukung Kelancaran tugas-tugas di luar kantor	100 %	Rp. 4.324.500,00	Rp. 4.324.500,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Petugas Pengelola Keuangan dan Kepegawaian Menerima Honorarium	12 Orang	Kelancaran Tugas- Tugas Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	100 %	Rp. 20.400.000,00	Rp. 20.400.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Printer Berfungsi Baik	20 buah	Menunjang Kelancaran Tugas-tugas Kedinasan	100 %	Rp. 23.800.000,00	Rp. 25.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Notebook Berfungsi Baik	8 buah						
							Komputer Berfungsi Baik	25 buah						
							Mesin Ketik	3 buah						
							AC Berfungsi Baik	20 buah						
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	38 jenis	mendukung Kelancaran tugas-tugas di luar kantor	100 %	Rp. 27.500.000,00	Rp. 16.500.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Biro Hukum	Prosentase Pelayanan	100 %	Barang Cetakan	14 jenis	Menunjang Kelancaran	100 %	Rp. 36.137.500,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.579.907.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan		Administrasi Perkantoran				Tugas-Tugas Kedinasan					
							Penggandaan/ Foto Copy	20000 lembar						
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Hukum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	10 jenis	Menunjang Kelancaran Tugas-Tugas Kedinasan	100 %	Rp. 2.595.000,00	Rp. 3.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Hukum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Buku Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket	Menunjang Kelancaran Tugas-Tugas Kedinasan	100 %	Rp. 15.100.000,00	Rp. 12.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Warta Perundang-Undangan	12 bulan						
							Harian Kedaulatan Rakyat	12 bulan						
							Jawa Pos/ Radar Jogja	12 bulan						
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Hukum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Extraafooding	1 tahun	Menunjang Kelancaran Tugas-Tugas Koordinasi Bidang Hukum dengan Instansi Terkait	100 %	Rp. 15.960.000,00	Rp. 15.960.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Hidangan Rapat Koordinasi	1 tahun						
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Hukum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun	Menunjang Kelancaran Tugas-Tugas Koordinasi Bidang Hukum dengan Instansi Terkait	100 %	Rp. 218.461.375,00	Rp. 225.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 tahun						
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 182.033.625,00	Rp. 208.100.000,00		
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Hukum	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Notebook	1 unit	Mendukung Kelancaran tugas-tugas kantor	100 %	Rp. 24.550.200,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							PC Branded	2 unit						
							Scanner	1 unit						
1.20.1.20.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Biro Hukum	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana	100 %	Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 jenis	Mendukung Kenyamanan Tempat Kerja	100 %	Rp. 3.250.000,00	Rp. 3.500.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.579.907.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		aparatur									
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	8 unit	Menunjang Kelancaran Tugas Kedinasan	100 %	Rp. 114.633.425,00	Rp. 115.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.036	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Arsip Dokumen menjadi terawat (2 kali x 360m3)	720 m3	Menunjang Kelancaran Tugas Kedinasan	100 %	Rp. 39.600.000,00	Rp. 39.600.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 37.961.000,00	Rp. 40.900.000,00		
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Hukum	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Capaian Kinerja SKPD : 3 Dokumen LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD	3 dokumen	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	100 %	Rp. 1.800.000,00	Rp. 2.400.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Hukum	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan SKPD : 3 Dokumen Semesteran,Prognosis,Akhir Tahun	3 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	100 %	Rp. 3.800.000,00	Rp. 4.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Hukum	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen Perencanaan SKPD : RKT,PK,DPA,ROPK, Draft Renstra Instansi	5 dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program SKPD	100 %	Rp. 30.061.000,00	Rp. 32.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Hukum	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program	100 %	Laporan Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD 1. Triwulanan 2. Akhir Tahun	2 laporan	Ketepatan Entri Data Monev Program Kegiatan SKPD	100 %	Rp. 2.300.000,00	Rp. 2.500.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.579.907.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
1.20.1.20.01.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp. 1.456.251.750,00	Rp. 1.658.000.000,00		
1.20.1.20.01.26.002	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Surat Gubernur tentang Usulan Prolegda 2016	1 dokumen	Acuan prioritas penyusunan peraturan Daerah 2015	1 dokumen	Rp. 48.208.500,00	Rp. 55.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.26.003	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Pembahasan Raperda di DPRD	12 Raperda	12 (dua belas) Buah Raperda ditetapkan menjadi Perda	100 %	Rp. 581.596.000,00	Rp. 725.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.26.005	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Pencetakan lembaran daerah dan berita daerah	2800 buku	Terdistribusinya peraturan perundang-undangan Daerah ke Pusat, Propinsi Luar DIY, Kab/Kota, Kecamatan, Desa	100 %	Rp. 158.434.500,00	Rp. 165.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Penyusunan buku informasi peraturan perundang-undangan	2800 buku						
1.20.1.20.01.26.006	Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Laporan Hasil Kajian dan Rekomendasi Hasil Kajian	5 buah	Adanya dasar dan kepastian hukum dalam penyusunan Program Legislasi Daerah	100 %	Rp. 60.411.000,00	Rp. 61.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.26.010	Pengelolaan Dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5 Kabupaten/Kota	Tertatanya dan terinformasikannya dokumen hukum	100 %	Rp. 106.489.750,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.26.013	Koordinasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (J D I) Hukum	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Rapat Kerja JDI Hukum	1 kali 50 orang	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaksanaan pengelolaan JDI Hukum	100 %	Rp. 28.260.000,00	Rp. 32.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.26.016	Monitoring Dan Evaluasi Produk Hukum	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Biro Hukum	Persentase rancangan produk hukum	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi	20 laporan	Bahan Penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	Rp. 27.286.000,00	Rp. 32.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.579.907.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkat		yang terselesaikan									
1.20.1.20.01.26.018	Rencana Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (R A P E R G U B)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Draft SK Gubernur tentang Penetapan Rapergub 2016	1 buah	Jadwal Penyusunan Rapergub 2015	100 %	Rp. 28.000.000,00	Rp. 62.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.26.020	Legalisasi Rapergub Dan Produk Hukum Lainnya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur	60 buah	Terselesaikannya semua produk hukum	100 %	Rp. 284.530.500,00	Rp. 325.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Tersusunnya Rancangan SK Gubernur	200 buah						
							Tersusunnya Rancangan Instruksi Gubernur	3 buah						
							Tersusunnya Rancangan SE Gubernur	5 buah						
							Tersusunnya Rancangan SK Sekda	20 buah						
							Tersusunnya Rancangan Perjanjian Gubernur	10 buah						
							Tersusunnya Rancangan Perjanjian Sekda	10 buah						
1.20.1.20.01.26.023	Penyusunan Informasi Terhadap Layanan Publik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Upgrading Website	1 Paket	Terinformasikannya Produk Hukum	100 %	Rp. 54.153.000,00	Rp. 41.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.26.027	Pameran Legal Expo	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Lokasi kegiatan menyesuaikan undangan dari Kementerian Hukum dan HAM	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Pameran Legal Expo	1 Kali	Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Hukum kepada Masyarakat	100 %	Rp. 30.300.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.26.028	Penyusunan Peraturan Gubernur Perencanaan Peraturan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Peraturan Daerah Tindak Lanjut RPJMD 2012-2017	1 Draf Peraturan Gubenur	Adanya pedoman dalam menyusun Perda	100 %	Rp. 48.582.500,00	Rp. 0,00	Biro Hukum	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.34	PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM										Rp. 2.102.518.250,00	Rp. 2.189.000.000,00		
1.20.1.20.01.34.003	Fasilitasi Dan Koordinasi Forum Pengadilan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Biro Hukum	Persentase pemberian layanan hukum	100 %	Rekomendasi Penyelesaian Masalah Hukum	1 rekomendasi	Meningkatnya Kemampuan Pejabat Pemerintah	100 %	Rp. 42.711.000,00	Rp. 48.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.579.907.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kehakiman Kejaksaan Dan Kepolisian (Forum D I L K E H J A P O L)		Daerah Meningkatkan		terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima				dalam Pelaksanaan DILKEHJAPOL					
1.20.1.20.01.34.005	Koordinasi Peningkatan Supremasi Hukum	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Rekomendasi Penyelesaian Masalahn Hukum Bidang Pemerintahan	3 rekomendasi	Konsep Kebijakan Peningkatan Supremasi Hukum	100 %	Rp. 47.973.500,00	Rp. 54.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.34.007	Penyelesaian Permasalahan Hukum	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum	2 kasus	Adanya Kepastian Hukum	100 %	Rp. 262.622.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.34.009	Fasilitasi Layanan Hukum Masyarakat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Rekomendasi untuk Perbaikan Tata Kelola Usaha Beretika di DIY	30 rekomendasi	Terwujudnya Layanan Hukum	100 %	Rp. 1.541.555.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik di DIY	70 rekomendasi						
							Rekomendasi Layanan Hukum	30 rekomendasi						
1.20.1.20.01.34.013	Fasilitasi Penegakan H A K I	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Fasilitasi Penegakan HAKI	2 rekomendasi	Bahan Kebijakan tentang HAKI	100 %	Rp. 40.077.250,00	Rp. 46.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.34.016	Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Laporan Ranham (Tahunan dan Semesteran)	2 laporan	Data Implementasi Penegakan HAM di DIY Tahun 2015	100 %	Rp. 24.018.000,00	Rp. 0,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.34.018	Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Perda dengan HAM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan	100 %	Hasil Evaluasi Raperda/ Perda	1 dokumen	Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan nilai-nilai HAM	100 %	Rp. 47.111.000,00	Rp. 53.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 4.579.907.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					hukum yang diterima									
1.20.1.20.01.34.020	Monitoring dan Evaluasi Kinerja LOD dan LOS DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Laporan Kinerja LOD dan LOS DIY	1 laporan	Peningkatan Kinerja LOD dan LOS DIY	100 %	Rp. 37.793.500,00	Rp. 43.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.34.021	Fasilitasi Tanah Kas Desa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa	40 buah	Adanya kepastian Hukum	100 %	Rp. 39.907.000,00	Rp. 45.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Keputusan Gubernur tentang Ijin Gubernur Mengenai Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	40 buah						
1.20.1.20.01.34.024	Pengukuhan Anggota LOD dan LOS DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100 %	Pengukuhan Anggota LOD dan LOS terpilih periode 2015-2018	1 Kali	Anggota LOD dan LOS Terpilih dapat menjalankan tugas sesuai dengan arahan Gubernur	100 %	Rp. 18.750.000,00	Rp. 0,00	Biro Hukum	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.20.1.20.01.35	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM										Rp. 433.948.500,00	Rp. 432.000.000,00		
1.20.1.20.01.35.004	Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase produk hukum yang dibatalkan	0 %	Surat Sekda perihal Hasil Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota	40 Perda Kab/Kota	Pedoman Pemerintah Kab/Kota dalam menyusun Produk Hukum Kab/Kota	100 %	Rp. 228.848.500,00	Rp. 215.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.35.011	Konsultasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase produk hukum yang dibatalkan	0 %	Surat Pemerintah DIY perihal Hasil Konsultasi Raperda Kab/Kota	30 buah	Rekomendasi Penyusunan Produk Hukum Kab/Kota	100 %	Rp. 189.444.500,00	Rp. 210.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.35.012	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Hukum	Persentase produk hukum yang dibatalkan	0 %	Surat Menkeu tentang hasil Evaluasi Raperda Pajak Retribusi Kab/Kota	1 buah	Rekomendasi Penyusunan Produk Hukum Kab/Kota	100 %	Rp. 15.655.500,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan
							Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda Kab/Kota	1 buah						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan											Jumlah Pagu : Rp. 10.031.270.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan													
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 326.785.000,00	Rp. 361.113.745,00		
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Materai 6000	451 lembar	Penatausahaan Keuangan dan Surat Menyurat	100 %	Rp. 4.327.000,00	Rp. 5.392.500,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Materai 3000	540 lembar						
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2	2 unit	Kendaraan Dinas/Operasional Siap Pakai	100 %	Rp. 6.820.000,00	Rp. 7.502.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4	7 unit						
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium Pengelola Kepegawaian	2 Orang	Pengelolaan Keuangan, Barang dan Kepegawalan Berjalan Lancar	100 %	Rp. 25.806.000,00	Rp. 29.403.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	11 Orang						
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	54 jenis	Admiistrasi Kegiatan Berjalan Lancar	100 %	Rp. 23.276.000,00	Rp. 25.603.600,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang Penggandaan	1 unit	Administrasi dan Dokumentasi Kedinasan Berjalan Lancar	100 %	Rp. 21.835.000,00	Rp. 24.018.500,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Barang Cetakan	9 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan											Jumlah Pagu : Rp. 10.031.270.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi Listrik	14 jenis	Pelaksanaan Tugas Kedinasan Berjalan Lancar	100 %	Rp. 7.848.000,00	Rp. 8.633.350,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Majalah Mingguan	1 majalah mingguan	Kebutuhan Bahan Bacaan Terpenuhi	100 %	Rp. 4.718.000,00	Rp. 5.190.295,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Surat Kabar Harian	2 SKH dan Majalah						
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Hidangan Rapat dan Konsumsi Rapat Dinas	139 Kali	Rapat dan Lembur Berjalan Lancar	100 %	Rp. 43.505.000,00	Rp. 47.855.500,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Hidangan Rapat dan Konsumsi Lembur	40 Kali						
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Rakor/Konsultasi ke Luar Daerah	1 tahun	Rakor dan Konsultasi dalam/luar Daerah berjalan Lancar	100 %	Rp. 188.650.000,00	Rp. 207.515.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Rakor/Konsultasi Dalam Daerah	1 tahun						
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 278.596.000,00	Rp. 309.052.002,00		
1.20.1.20.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Sekat Ruang Kepala Bagian	1 Paket	Perlengkapan Kantor Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100 %	Rp. 125.078.000,00	Rp. 138.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Pintu dan Akses Kamar Mandi Kepala Biro	1 Paket						
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	LCD dan Instalasi	1 Paket	Peralatan Kantor mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 47.500.000,00	Rp. 54.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Printer	3 unit						
							Komputer PC	2 unit						
							UPS Stabilizer	20 unit						
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala - Kendaraan Roda 2	2 unit	Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara dengan baik	100 %	Rp. 87.598.000,00	Rp. 96.450.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan											Jumlah Pagu : Rp. 10.031.270.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		sarana prasarana aparatur		Pemeliharaan Rutin/Berkala - Kendaraan Roda 4	5 unit					kemasyarakatan	
1.20.1.20.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	- LCD Proyektor	1 unit	Peralatan Gedung Kantor Terpelihara dengan baik	100 %	Rp. 13.420.000,00	Rp. 14.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							- AC	10 unit						
							- Laptop	4 unit						
							- Printer	20 unit						
							- CPU	9 unit						
							- Monitor	9 unit						
1.20.1.20.01.02.029	Pemeliharaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Meja Kursi Tamu	2 set	Mebeleur terpelihara dengan baik	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.602.002,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Filling Kabinet	3 buah						
							Pemeliharaan Alemari	4 buah						
							Pemeliharaan Kursi	10 buah						
							Pemeliharaan Meja	10 buah						
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 64.752.000,00	Rp. 70.822.000,00		
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Draft LPPD, Draft LKPJ)	3 dokumen	Akuntabilitas Kinerja Instansi	100 %	Rp. 5.873.000,00	Rp. 6.375.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja	100 %	Laporan Keuangan Semesteran/Prognosis dan Akhir Tahun	2 dokumen	Akuntabilitas Anggaran Instansi	100 %	Rp. 7.700.000,00	Rp. 8.477.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan											Jumlah Pagu : Rp. 10.031.270.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2015	1 dokumen	Perencanaan Instansi	100 %	Rp. 43.479.000,00	Rp. 47.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2016	1 dokumen						
							Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2016	1 dokumen						
							Rencana Kerja (renja)2016	1 dokumen						
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen LAporan Movev Pelaksanaan Program/Kegiatan Bulanan Dokumen LAporan Movev Pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulanan	16 dokumen	Akuntabilitas Kinerja Instansi	100 %	Rp. 7.700.000,00	Rp. 8.470.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30	PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN										Rp. 1.605.822.000,00	Rp. 1.936.000.000,00		
1.20.1.20.01.30.145	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Anailisis Kebijakan Gerakan Pramuka	1 dokumen	Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Pemuda, dan Olah Raga	100 %	Rp. 116.875.000,00	Rp. 126.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Dokumen Hasil Anailisis Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Dalam Rangka Meningkatkan Angka Lama Sekolah	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.146	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan	36.45 %	Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Olahraga	1 dokumen	Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan											Jumlah Pagu : Rp. 10.031.270.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					bahan kebijakan		Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemuda	1 dokumen						
							Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.147	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Olahraga	1 dokumen	Bahan Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemuda	1 dokumen						
							Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.148	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kesehatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Analisis Kebijakan Strategi Pengurangan Narkoba	1 dokumen	Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kesehatan	100 %	Rp. 115.000.000,00	Rp. 126.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Dokumen Hasil Analisis Kebijakan Kematian Ibu Melahirkan	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.149	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan Strategi Zoonosis di DIY	1 dokumen	Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan Tentang Action Plan Narkoba di DIY	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan											Jumlah Pagu : Rp. 10.031.270.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan Tentang Eliminasi Malaria	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.150	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan Strategi Zoonosis di DIY	1 dokumen	Bahan Bahan Evaluasi Kebijakan Bidang KesehatanKebijakan Bidang Kesehatan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan Tentang Action Plan Narkoba di DIY	1 dokumen						
							Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan Tentang Eliminasi Malaria di DIY	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.151	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Analisis Kebijakan Penggalian Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat dalam perlindungan dan pelayanan kelompok marginal	1 dokumen	Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban	100 %	Rp. 115.000.000,00	Rp. 126.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.152	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	1 dokumen	Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan										Jumlah Pagu : Rp. 10.031.270.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana	1 dokumen						
							Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesbanglinmas	1 dokumen						
							Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 dokumen						
							Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.153	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban	1 dokumen	Bahan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana	1 dokumen						
							Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesbanglinmas	1 dokumen						
							Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Tenaga Kerja dan	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan											Jumlah Pagu : Rp. 10.031.270.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Transmigrasi							
							Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.154	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang KB dan Keluarga Sejahtera	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Analisis Kebijakan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi bagi Keluarga Miskin	1 dokumen	Bahan Perumusan Kebijakan Bidang KB dan Keluarga Sejahtera	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 126.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.155	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan KB dan Keluarga Sejahtera	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan KS	1 dokumen	Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan KB dan Keluarga Sejahtera	100 %	Rp. 51.950.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan KB	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.156	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan Keluarga Sejahtera	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB	1 dokumen	Bahan Evaluasi Kebijakan Bidang KB dan Keluarga Sejahtera	100 %	Rp. 52.073.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.157	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Analisis Kebijakan Jaminan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Korban Kekerasan	1 dokumen	Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	100 %	Rp. 64.930.000,00	Rp. 126.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.158	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan Anak	1 dokumen	Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	100 %	Rp. 51.950.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan											Jumlah Pagu : Rp. 10.031.270.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.30.159	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan Anak	1 dokumen	Bahan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan	100 %	Rp. 52.079.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.160	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Analisis Kebijakan Alih Kelola Aset PNPB Mandiri	1 dokumen	Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Rp. 113.870.000,00	Rp. 126.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.161	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.162	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	Bahan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.163	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan dan Rekayasa Sosial	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Kebijakan Budi Pekerti (Pedoman Panduan Budi Pekerti)	1 dokumen	Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan dan Rekayasa Sosial	100 %	Rp. 114.900.000,00	Rp. 126.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.164	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial	3 dokumen	Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial	100 %	Rp. 59.860.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.165	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan	Persentase dokumen hasil analisis	36.45 %	Dokumen Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan	2 dokumen	Bahan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengembangan	100 %	Rp. 37.335.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan											Jumlah Pagu : Rp. 10.031.270.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial		Daerah Meningkatkan	Kemasyarakatan	kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan		Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial		Budi Pekerti, Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial				Rakyat dan kemasyarakatan	
1.20.1.20.01.30.166	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kehidupan Beragama	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Analisis Kebijakan Kemanfaatan Hibah Keagamaan Daerah DIY	1 dokumen	Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kehidupan Beragama	100 %	Rp. 115.000.000,00	Rp. 126.500.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.37	PROGRAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA										Rp. 7.755.315.000,00	Rp. 6.578.650.000,00		
1.20.1.20.01.37.003	Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tk. Provinsi dan Pengiriman Kafilah STQ Tk. Nasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY dan Provinsi Papua	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	100 %	Pengiriman Kafilah Ke Tingkat Nasional	34 Orang	Kontingen MTQProvinsi DIY yang berkualitas	60 Orang	Rp. 985.785.000,00	Rp. 0,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Peyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi DIY	250 Orang						
1.20.1.20.01.37.010	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan, Kab/Kota	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	100 %	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan di DIY	18 kegiatan	Peningkatan Nilai Keagamaan	100 %	Rp. 71.500.000,00	Rp. 78.650.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.37.016	Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan, Kab/Kota, Embarkasi Surakarta	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	100 %	Bantuan Hibah Keagamaan	303 objek	Peningkatan Kualitas Mental dan Rohani Agama	100 %	Rp. 5.353.030.000,00	Rp. 6.500.000.000,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi DIY,	19 Orang						
							Pembinaan Mental Rohani PNS/TNI /POLRI 5 Agama,	1700 Orang						
1.20.1.20.01.37.023	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesparawi Tk. Provinsi dan Pengiriman Kontingen Pesparawi Tk. Nasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY dan Provinsi Maluku	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	100 %	Pengiriman Kontingen Pesparawi Provinsi DIY ke Tk.Nasional	120 Orang	Kontingen Pesparawi Provinsi DIY yang berkualitas	120 Orang	Rp. 1.345.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Sedang Berjalan
							Peyelenggaraan Pesparawi Tingkat Provinsi DIY	300 Orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.130.783.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan, dan Persandia													
1.20.01	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam													
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 366.600.000,00	Rp. 444.900.000,00		
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kilat khusus	30 Kali	Penatausahaan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 4.250.000,00	Rp. 5.500.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Perangko	100 buah						
							Meterai Rp 6.000-	500 buah						
							Meterai Rp 3.000,-	300 buah						
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda dua	2 unit	Kendaraan dinas/operasional siap pakai	100 %	Rp. 2.200.000,00	Rp. 2.500.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Kendaraan dinas/operasional roda empat	4 unit						
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengadministrasi kepegawaian	2 Orang	Pengelolaan keuangan biro lancar	100 %	Rp. 20.400.000,00	Rp. 20.400.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Penatausahaan administrasi keuangan biro	11 Orang						
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis kantor pendukung operasional biro	18 jenis	Operasional biro berjalan lancar	100 %	Rp. 16.500.000,00	Rp. 35.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.130.783.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penggandaan	58000 lembar	Operasional biro berjalan lancar	100 %	Rp. 12.500.000,00	Rp. 25.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Barang cetakan	18 jenis						
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat-alat listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	Operasional biro berjalan lancar	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.01.013	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan kebersihan kantor	17 jenis	Operasional biro berjalan lancar	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.500.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Buku umum	10 buku	Peningkatan pengetahuan aparatur	100 %	Rp. 3.750.000,00	Rp. 15.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Buku peraturan perundangan	10 buku						
							Langganan majalah/surat kabar	29 set						
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman rapat	3000 o.s	Operasional biro berjalan lancar	100 %	Rp. 27.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perjalanan dinas luar daerah	1 tahun	Bahan rumusan kebijakan	100 %	Rp. 270.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun						
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 332.787.000,00	Rp. 150.000.000,00		
1.20.1.20.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Biro Administrasi Perekonomian	Prosentase penyediaan dan	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda empat	1 unit	Dukungan kelancaran opsional tugas	100 %	Rp. 194.762.000,00	Rp. 0,00	Biro Administrasi Perekonomian	Baru - Mempercepat Capaian

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.130.783.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	dan Sumber Daya Alam	pemeliharaan sarana prasarana aparatur				dan fungsi biro				dan Sumberdaya Alam	Target
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan webhosting	1 tahun	Dukungan kelancaran operasional tugas dan fungsi biro	100 %	Rp. 32.100.000,00	Rp. 40.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							LCD Viewer	1 unit						
							Mesin faximile	1 unit						
							Printer multifungsi	2 unit						
							Laptop	2 unit						
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional roda dua	2 unit	Dukungan kelancaran operasional tugas dan fungsi biro	100 %	Rp. 88.925.000,00	Rp. 90.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Kendaraan dinas/operasional roda empat	4 unit						
1.20.1.20.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Lokasi Kegiatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mesin ketik	3 unit	Dukungan kelancaran operasional tugas dan fungsi biro	100 %	Rp. 17.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Meja-kursi tamu	1 unit						
							Almari	6 unit						
							Filling cabinet	4 unit						
							Meja dan kursi	54 unit						
							LCD Projector	2 unit						
							Komputer PC	8 unit						
							AC split	8 unit						
1.20.1.20.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 75.000.000,00	Rp. 90.000.000,00		
1.20.1.20.01.05.063	Bimtek Organisasi dan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peningkatan pemahaman terhadap organisasi dan manajemen	47 Orang	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur dalam mendukung	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.130.783.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							penyelenggaraan pemerintahan		pelaksanaan kegiatan biro				Alam	
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 30.486.000,00	Rp. 33.074.000,00		
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	1 dokumen	Bahan evaluasi/pengendali pelaksanaan program/kegiatan	100 %	Rp. 2.709.000,00	Rp. 3.500.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan keuangan dan prognosis	1 dokumen	Bahan evaluasi/pengendali pelaksanaan program/kegiatan	100 %	Rp. 4.389.000,00	Rp. 5.500.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rencana program dan kegiatan	1 dokumen	Rencana program dan kegiatan	100 %	Rp. 21.074.000,00	Rp. 21.074.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung	100 %	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sebanyak 12 dokumen	12 bulan	Bahan evaluasi/pengendali pelaksanaan program/kegiatan	100 %	Rp. 2.314.000,00	Rp. 3.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.130.783.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
1.20.1.20.01.30	PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN										Rp. 2.325.910.000,00	Rp. 2.085.000.000,00		
1.20.1.20.01.30.128	Fasilitasi Pusat Perbenihan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Forum Komunikasi Pemulia Tanaman	1 kegiatan	Fasilitasi Sekretariat Bersama Pusat Perbenihan Yogyakarta	100 %	Rp. 462.500.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
				Promosi Perbenihan			1 kegiatan							
				Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Produk Benih			1 dokumen							
				Strategi Pemasaran Perbenihan			1 dokumen							
				Penguatan Data Perbenihan			1 dokumen							
				Fasilitasi pusat perbenihan			1 dokumen							
1.20.1.20.01.30.167	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kerjasama, Penanaman Modal, Perijinan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen rumusan kebijakan penanaman modal	1 dokumen	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal	100 %	Rp. 115.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.168	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kerjasama, Penanaman Modal, Perijinan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Kebijakan Bidang Kerjasama, Penanaman Modal, Perijinan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang Kerjasama, Penanaman Modal, Perijinan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.169	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	DIY	Persentase dokumen hasil analisis	36.45 %	Dokumen pemantauan dan evaluasi kebijakan	2 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian	Baru - Mempercepat Capaian

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.130.783.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kerjasama, Penanaman Modal, Perijinan dan Pengelolaan Keuangan Daerah		Daerah Meningkatkan		kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan		bidang penanaman modal, Perijinan dan Pengelolaan Keuangan Daerah		sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang kerjasama, penanaman modal, perijinan, dan pengelolaan keuangan daerah				dan Sumberdaya Alam	Target
1.20.1.20.01.30.170	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen rumusan kebijakan bidang Badan Usaha Daerah	1 dokumen	Rancangan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan BUKP	100 %	Rp. 115.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.171	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang Badan Usaha Daerah	1 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang Badan Usaha Daerah	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.172	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Badan Usaha Daerah	1 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang Badan Usaha Daerah	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.173	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Kajian Upaya Strategis mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan di DIY	1 dokumen	Bahan rumusan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan	100 %	Rp. 115.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.174	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang ketahanan pangan	1 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang pertanian dan ketahanan pangan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Dokumen koordinasi dan	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.130.783.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							fasilitasi kebijakan bidang pertanian							
1.20.1.20.01.30.175	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan	1 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang pertanian dan ketahanan pangan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.176	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Kajian Integrated Farming di Kawasan Hutan di DIY	1 dokumen	Bahan rumusan kebijakan bidang kehutanan, perkebunan, perikanan, dan kelautan	100 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.177	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang perikanan, dan kelautan	1 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang kehutanan, perkebunan, perikanan, dan kelautan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Dokumen koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang kehutanan dan perkebunan	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.178	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan kelautan	1 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang kehutanan, perkebunan, perikanan, dan kelautan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.130.783.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kehutanan dan perkebunan	1 dokumen						
1.20.1.20.01.30.179	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen kajian Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis	1 dokumen	Bahan rumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	100 %	Rp. 115.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.180	Koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup	1 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang lingkungan hidup	100 %	Rp. 45.050.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.181	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	1 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang lingkungan hidup	100 %	Rp. 45.050.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.182	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen rumusan kebijakan tentang Transformasi Kelembagaan Koperasi di DIY	1 dokumen	Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Transformasi Kelembagaan Koperasi di DIY	100 %	Rp. 115.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.183	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang koperasi dan UKM	2 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang koperasi dan UKM	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.184	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang	36.45 %	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	2 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam											Jumlah Pagu : Rp. 3.130.783.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		dijadikan bahan kebijakan		Kebijakan Koperasi dan UKM		pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang koperasi dan UKM				Sumberdaya Alam	
1.20.1.20.01.30.185	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen kebijakan atas peningkatan kualitas dan kuantitas produksi lokal DIY	1 dokumen	Bahan rumusan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan	100 %	Rp. 71.810.000,00	Rp. 125.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.186	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen koordinasi dan fasilitasi bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang ekonomi	100 %	Rp. 64.500.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.187	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan	1 dokumen	Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi peraturan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bidang perindustrian dan perdagangan	100 %	Rp. 64.500.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.188	Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen	Bahan rumusan Pengendalian Inflasi Daerah	100 %	Rp. 187.500.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.30.189	Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) Daerah Istimewa Yogyakarta	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	1 dokumen	Bahan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Daerah	1 dokumen	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 7.833.436.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Administrasi Pembangunan													
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 361.865.000,00	Rp. 493.500.000,00		
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengiriman	32 Paket	Pengiriman	60 Paket	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
							Materai Rp.6000,-	215 lembar	kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	100 %				
							Materai Rp.3.000,-	390 lembar						
							perangko	900 lembar						
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Perpaanjanjian ijin operasional kendaraan dinas operasional rod 2	2 kendaraan roda dua	Kelancaran operasional kendaraan dinas	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
							2. Perpaanjanjian ijin operasional kendaraan dinas operasional roda 4	4 kendaraan						
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penatausahaan keuangan, barang dan kepegawaian	14 or	Kelancaran penatausahaan keuangan brang dan kepegawaian	100 %	Rp. 22.260.000,00	Rp. 26.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis kantor	83 jenis	Pendukungpelaksanaan kegiatan Biro	100 %	Rp. 40.551.000,00	Rp. 61.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang cetakan dan penggunaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	foto copy	75000 lembar	Pendukung pelaksanaan kegiatan Biro	100 %	Rp. 30.550.000,00	Rp. 62.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
							Barang Cetakan	19 jenis						
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan komponen instalsi	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Biro Administrasi	Prosentase Pelayanan	100 %	Komponen instalasi	10 jenis	Berfugsinya penerangan kantor,	100 jenis	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Administrasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 7.833.436.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	listrik/penerangan bangan kantor	Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkat	Pembangunan	Administarsi Perkantoran		listrik/penerangan		penunjang keancaran operasional kegiatan Biro				Pembangunan	
1.20.1.20.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan rumah tangga keperluan kantor	22 jenis	Pendukung pelaksanaan kegiatan Biro Adpem	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Buku Bacaan/peraturan perundangan	1 Paket	Terpenuhinya bahan bacaan	100 %	Rp. 4.560.000,00	Rp. 8.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
							Majalah	1 jenis Majalah						
							Surat kabar	3 Surat Kabar Harian						
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Belanja makanan dan minuman rapat	5235 os	Mendukung penyelenggaraa rapat-rapat dinas	100 %	Rp. 52.350.000,00	Rp. 55.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konnsumsi ke luar daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Mendukung penelenggaraan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	Rp. 150.500.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.019	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinamis Inaktif Tidak Teratur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kelestarian Arsip Inaktif	1 tahun	Kelancaran Penyajian dan pelayanan arsip dinamis inaktif	100 %	Rp. 36.094.000,00	Rp. 0,00	Biro Administrasi Pembangunan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 401.405.000,00	Rp. 255.000.000,00		
1.20.1.20.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan roda 4	1 unit	Terpenuhinya kendaraan operasional	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan gedung kantor	3 unit	Terpenuhiny perlengkapan/sarana dan prasarana gedung kator	100 %	Rp. 29.410.000,00	Rp. 33.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Biro Administrasi	Prosentase penyediaan dan	100 %	Laptop, LCD, printer Flasdisk,	7 jenis	terpenuhinya perlengkapan sarana	100 %	Rp. 49.895.000,00	Rp. 88.000.000,00	Biro Administrasi	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 7.833.436.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan	Pembangunan	pemeliharaan sarana prasarana aparatur		presenter		pasarana gedung kantor				Pembangunan	
1.20.1.20.01.02.024	Pemliharaan rutin berkala kendaraan dinas oprasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	2 unit	Kendaraan dinas operasional berfungsi dengan baik	100 %	Rp. 85.000.000,00	Rp. 88.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4	4 unit						
1.20.1.20.01.02.026	Pemeliharaan rutin berkala pelengkapan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	8 jenis	Perlengkapan gedung kantor berfungsi dengan baik	100 %	Rp. 14.600.000,00	Rp. 18.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.028	Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan Gedung gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 jenis	Peralatan gedung kantor berungsi dengan baik	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 18.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.029	Pemeliharaan rutin/Berkala mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Pembangunan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan mebelaur gedung kantor	5 jenis	Mebelaur kantor terawat dengan baik	100 %	Rp. 7.500.000,00	Rp. 10.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 29.970.400,00	Rp. 48.000.000,00		
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP,RKT,PK)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Pembangunan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Lakip, RKT, PK	2 dokumen	Bahan evaluasi/pengendalian pelaksanaan program/kegiatan	100 %	Rp. 4.467.000,00	Rp. 5.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Biro Administrasi Pembangunan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian	100 %	Dokumen laporan keuangan	3 dokumen	tersusunnya laporan keuangan	100 %	Rp. 5.543.400,00	Rp. 8.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 7.833.436.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan rencana program/kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Renja Biro Renstra Biro, DPA, ROPK	3 dokumen	Dokumen Perencanaan Progm SKPD	100 %	Rp. 9.960.000,00	Rp. 20.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dn evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Capaian kinerja, Calk, triwulan, pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	Bahan pengendalian pelaksanaaa kegiatan/pogram	100 %	Rp. 10.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 64.143.300,00	Rp. 121.500.000,00		
1.20.1.20.01.23.006	Pengelolaan SIM Layanan Ijin Penelitian Online	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kab/Kota	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Pengelolaan SIM Ijin Penelitian Online dan Tersedianya database Hasil Penelittian	1 tahun	Penerbitan dan pendataan surat ijin/rekomendasi penelitian	100 %	Rp. 64.143.300,00	Rp. 121.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30	PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN										Rp. 961.876.000,00	Rp. 1.737.408.750,00		
1.20.1.20.01.30.001	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Perumusan Bahan Kebijakan Infrastruktur Dalam Mewujudkan Among Tani Dagang Layar	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang PUP dan ESDM	100 %	Rp. 53.432.000,00	Rp. 146.300.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 7.833.436.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.30.002	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU-ESDM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	1. Dokumen Hasil Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU-ESM	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang PUP dan ESDM	100 %	Rp. 48.196.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.003	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU-ESDM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang PUP dan ESDM	100 %	Rp. 47.104.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.004	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Kliripan	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100 %	Rp. 54.825.000,00	Rp. 330.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.005	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Budaya	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100 %	Rp. 63.758.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.006	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100 %	Rp. 44.796.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.007	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gabungan 5 Kabupaten/Kota dan Provinsi	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen hasil Pelestarian Tata Nilai Budaya Jawa dalam era komunikasi digital	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang Perhubungan	100 %	Rp. 62.454.000,00	Rp. 131.408.750,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.008	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gabungan Kota/Kab dan Provinsi	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang Perhubungan	100 %	Rp. 123.740.000,00	Rp. 150.700.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.009	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gabungan Kota/Kabupaten dan Provinsi	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang Perhubungan	100 %	Rp. 42.469.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 7.833.436.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.30.010	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Dekonsentrasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kab/Kota	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Kajian Program Dekonsentrasi Bidang Sosial	1 dokumen	Bahan Kebijakan Dekonsentrasi bidang Sosial	100 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.011	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gabungan Kota/Kabupaten dan Provinsi	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Penyempurnaan aplikasi mapping dana dekon, TP, KD, KP dan UB	1 Aplikasi	terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi, Penyerahan DIPA APBN	100 %	Rp. 96.750.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
							Penyerahan DIPA APBN	60 lembaga/instansi						
							Bahan Rumusan hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi	1 Kajian						
1.20.1.20.01.30.012	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Gabungan Kota/Kabupaten dan Provinsi	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	1. Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	1 dokumen	Bahan Kebijakan Program Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	100 %	Rp. 80.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.013	Fasilitasi Program Nasional Penghematan Sumber Daya Energi dan Air	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kab/Kota	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Pelaksanaan Program Penghematan Sumber Daya Energi dan Airl	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang UP dan ESDM	100 %	Rp. 56.070.000,00	Rp. 104.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.30.014	Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kab/Kota	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen Laporan Pelaksanaan Program PPSP	1 dokumen	Bahan Kebijakan Bidang Pembangunan Sanitasi Permukiman	100 %	Rp. 123.282.000,00	Rp. 192.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.31	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										Rp. 1.526.330.000,00	Rp. 2.172.000.000,00		
1.20.1.20.01.31.002	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	SKPD, Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	1. Dokumen Hasil Fasilitasi Dewan Riset Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan IPTEKS di DIY	1 dokumen	Tersusunnya rekomendasi/masukan kepada Pemda DIY di bidang Ipteks	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 7.833.436.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.31.003	Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY, 5 Kab/Kota	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	1 Dokumen Inventarisasi hasil-hasil penelitian tahun 2013	1 dokumen	Bahan kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pemda DIY	100 %	Rp. 84.112.000,00	Rp. 165.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
							2. Dokumen Inventarisasi hasil-hasil penelitian terapan/tepat guna	1 dokumen						
1.20.1.20.01.31.005	Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kab/Kota	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	Bahan Kebijakan penelitian dan pengembangan Pemda DIY	100 %	Rp. 27.810.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.31.006	Pelaksanaan Penelitian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kab/Kota	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Hasil Penelitian Tematik Bidang Strategis Daerah	1 Kajian	Rekomendasi Hasil Penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan	100 %	Rp. 145.000.000,00	Rp. 302.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.31.007	Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY, 5 Kab/Kota	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah DIY	2 terbitan	Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pemda DIY dapat dipahami masyarakat	100 %	Rp. 99.978.000,00	Rp. 121.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.31.016	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kab/Kota	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Data/Informasi Sumberdaya kelitbangan	1 dokumen	Bahan rumusan kebijakan bidang riset dan Ipteks	100 %	Rp. 82.900.000,00	Rp. 66.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.31.017	Layanan pemberian ijin/rekomendasi penelitian dan pengembangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kab/Kota	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Penelitian dan pendataan surat/ijin rekomendasi penelitian	12 bulan	Penyelenggaraan layanan masyarakat bidang litbang	100 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 71.500.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.31.018	Sosialisasi Kebijakan Nasional Bidang Penelitian dan Pengembangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kab/Kota	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Sosialisasi penyebaran data/informasi kebijakan bidang litbang	2 Kali	Pemasyarakatan pedoman/kebijakan untuk peningkatan pengetahuan dan komitmen terhadap pembangunan litbang/ristek	100 Kali	Rp. 87.600.000,00	Rp. 110.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.31.019	Fasilitasi Hari Kebangkitan Nasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	1. Workshop/seminar Iptek	1 kegiatan	Terwujudnya wahana pemasyarakatan teknologi dan pembangunan ipteks	1 kegiatan	Rp. 340.888.000,00	Rp. 440.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
							2. Pemberian Anugerah Iptek	1 kegiatan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan										Jumlah Pagu : Rp. 7.833.436.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							3. Pameran Hakteknas	1 Paket						
							4. Upacara Peringatan Harteknas	1 kegiatan						
1.20.1.20.01.31.020	Penguatan SIDA	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY dan 5 Kab/Kota	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Penyusunan Roadmap SIDA	1 dokumen	Rumusan bahan kebijakan bidang ristek dan SIDA	100 %	Rp. 163.042.000,00	Rp. 330.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.33	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR										Rp. 56.447.000,00	Rp. 70.000.000,00		
1.20.1.20.01.33.001	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Jumlah aparatur yang termotifasi	44 Orang	Meningkatnya Kualitas Aparatur	100 %	Rp. 56.447.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Sosialisasi peraturan perundangan tentan kelitbangan	12 bulan						
							Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang kelitbangan	13 or						
1.25	Komunikasi dan Informatika													
1.25.02	Biro Administrasi Pembangunan													
1.25.1.20.02.21	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										Rp. 4.431.399.300,00	Rp. 6.000.000.000,00		
1.25.1.20.02.21.001	Fasilitasi pengadaan barang dan jasa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan	Layanan pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT	100 %	Terlaksananya seminar pembinaan POKJA	1 Paket	Terpenuhinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan proposional	100 %	Rp. 4.431.399.300,00	Rp. 6.000.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 7.833.436.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD			Buku evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jaa	1 dokumen						
							Buku Iventarisasi pegadaan 20151	1 dokumen						
							Penysunan telaah dan jawaban sanggah banding	1 tim						
							Tersedianya tim teknis pendamping ULP	1 tim						
							Standarisasi harga satuan	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 5.109.460.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Organisasi													
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 398.960.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Paket Kirim	1 tahun	Terkirimnya Surat dan Laporan	100 %	Rp. 1.500.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Meterai	175 lembar						
							Perangko	50 lembar						
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penelitian ulang STNK Kendaraan Dinas/Operasional	2 kendaraan roda dua	Tercapainya Tertib Administrasi Kendaraan Dinas/ Operasional	100 %	Rp. 3.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Penelitian ulang STNK Kendaraan Dinas/Operasional	4 kendaraan roda empat						
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Barang dan Pengelola Kepegawaian	13 Orang, 12 Bulan	Terselesaikannya Jasa Administrasi Keuangan Instansi	100 %	Rp. 23.460.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat-alat kebersihan Kantor	19 jenis	Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor	100 %	Rp. 7.100.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	56 jenis	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Biro	100 %	Rp. 19.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 5.109.460.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang cetak dan penggandaan	13 jenis cetakan dan 45.000 lembar	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat-alat listrik dan Elektronik	13 jenis	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Biro Organisasi	100 %	Rp. 5.800.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kedaulatan Rakyat	1 expl. 12 Bln	Meningkatnya wawasan serta pengetahuan pegawai dalam mendukung tugas	100 %	Rp. 8.200.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Kompas	1 expl. 12 Bln						
							Jawa Pos	1 expl.12 Bln						
							Buku Perpustakaan	1 Paket						
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman untuk rapat/koordinasi	4590 os	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas/rapat/koordinasi dan rapat intern	100 %	Rp. 45.900.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penugasan pegawai untuk rapat/koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah	1 tahun	Meningkatkan koordinasi antar instansi dan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Organisasi	100 %	Rp. 270.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 193.000.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2	2 unit	Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 37.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 5.109.460.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Komputer PC	2 unit	Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 17.600.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 & 2	1 tahun	Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 105.400.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Berfungsinya peralatan gedung kantor	7 jenis	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 33.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 63.000.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.06.006	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro	1 laporan	Terevaluasinya hasil kerja biro yang dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kemampuannya dan penyebaran informasi realisasi program/kegiatan	100 %	Rp. 4.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro	1 dokumen						
							Penetapan Kinerja (PK) Biro	1 dokumen						
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Keuangan	Biro Organisasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100 %	Laporan Petanggungjawaban Bendahara	12 laporan	Terevaluasinya hasil kerja biro yang dapat	100 %	Rp. 15.500.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 5.109.460.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkat		manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja Fungsional		memotivasi pegawai untuk meningkatkan kemampuannya dan penyebaran informasi realisasi program/ kegiatan					
							Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 laporan						
							Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja Administrasi	12 laporan						
							Laporan Realisasi Semesteran	2 laporan						
							Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan						
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Rencana Kerja (Renja)	1 dokumen	Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan	100 %	Rp. 36.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1 dokumen						
							Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 dokumen						
							Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)	1 dokumen						
1.20.1.20.01.06.028	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang	100 %	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	4 laporan	Terevaluasinya hasil kerja biro yang dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kemampuannya	100 %	Rp. 7.500.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 5.109.460.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				dan penyebaran informasi realisasi program/kegiatan					
							Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	1 laporan						
1.20.1.20.01.29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH*										Rp. 3.874.500.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.29.001	Asistensi Penyusunan LAKIP	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Terdidiknya Penyusun LAKIP dan Penyusun Program/ Kegiatan	68 orang, 34 SKPD	Peningkatan Kemampuan penyusunan RENSTRA/LAKIP /RKT/PK Instansi pada SKPD	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.29.017	Penyusunan Standar Belanja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Tersusunnya Rapergub tentang Standar Belanja	1 Rapergub	Pedoman belanja barang / jasa dalam penyusunan RKA - SKPD	100 %	Rp. 232.100.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Tersosialisasinya Rapergub dan Pergub tentang Standar Belanja	100 Orang						
1.20.1.20.01.29.019	Penyusunan SHBJ	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Tersusunnya Rapergub tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 Rapergub	Pedoman belanja barang / jasa dalam penyusunan RKA - SKPD	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Tersosialisasinya Rapergub dan Pergub tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	100 Orang						
1.20.1.20.01.29.049	Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Tersusunnya rumusan hasil Rakerpanda	1 rekomendasi	Terwujudnya keserasian implementasi kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara	100 %	Rp. 47.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 5.109.460.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.29.051	Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Nilai nilai Budaya Pemerintahan	1 dokumen	Peningkatan implementasi nilai nilai budaya pemerintahan	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.29.052	Internalisasi Nilai - Nilai Budaya Pemerintahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan	68 PNS	Peningkatan pemahaman dan implementasi nilai nilai Budaya Pemerintahan pada PNS	100 %	Rp. 90.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							PIN SATRYA	8000 PIN						
1.20.1.20.01.29.058	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas DIY	1 laporan	Pedoman dalam penempatan pejabat struktural di lingkungan Dinas DIY	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.29.070	Penataan UPTD dan UPTLTD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Dokumen Evaluasi UPTD dan UPTLTD	1 dokumen	Evaluasi UPTD dan UPTLTD	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.29.071	Review Rincian Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Dokumen Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1 dokumen	Review rincian tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.29.077	Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Rancangan Perubahan Pergub Tambahan Penghasilan Pegawai	1 Rapergub	Hasil kajian untuk review Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.078	Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemda DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Tersusunnya laporan Analisis Beban Kerja	34 SKPD	Laporan Analisis Beban Kerja	100 %	Rp. 320.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.081	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Penilaian dan Rekomendasi atas Usulan Perubahan Kelembagaan	5 Kabupaten/Kota	Tertatanya Kelembagaan Kabupaten/Kota	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 5.109.460.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat				Kabupaten/Kota							
1.20.1.20.01.29.082	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Rekomendasi Pemantapan Kinerja Kelembagaan Kabupaten/Kota yang telah ada	5 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Kabupaten/Kota	100 %	Rp. 38.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.29.083	Penilaian UKPP Bidang Pertanian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Pertanian	12 UKPP	Pengiriman 1 UKPP bidang pertanian ke tingkat nasional	100 %	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.100	Pengelolaan Website	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Tersajinya Data dan Informasi Aspek Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Manajemen Aparatur secara Online	3 jenis	Kemudahan akses data dan informasi kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Manajemen Aparatur	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.29.106	Fasilitasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Laporan koordinasi dan monitoring penyelenggaraan reformasi birokrasi Pemda DIY	1 laporan	Tertatanya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY	100 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setda DIY	1 laporan						
1.20.1.20.01.29.119	Penyusunan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu	1 Rapergub	Pedoman rekrutmen dan penataan pegawai	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.120	Penyusunan Sistem Informasi Analisis Jabatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan	1 Aplikasi	Tersedianya dukungan data dan informasi tentang Analisis jabatan yang terintegrasi	100 %	Rp. 187.400.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.131	Penyelenggaraan Munas Forsesdasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Dokumen hasil Munas Forsesdasi	1 dokumen	Terciptanya sinergitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah	100 %	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Kebijakan Pemerintah

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 5.109.460.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Dokumen hasil rakernas Sekda seluruh Indonesia	1 dokumen						
1.20.1.20.01.29.141	Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Rapergub Tata Naskah Dinas Elektronik	1 Rapergub	Tersedianya pedoman tata cara penggunaan tata naskah dinas elektronik	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.142	Pedoman Penomoran Kendaraan Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Rapergub Tanda Nomor Kendaraan Dinas	1 Rapergub	Kepastia protokol melalui nomor kendaraan dinas bagi pejabat tertentu	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.143	Pedoman Penulisan Papan Nama Perangkat Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Rapergub Pedoman Penulisan Papan Nama Perangkat Daerah	1 Rapergub	Adanya kepastian penyebutan nomenklatur instansi dan keseragaman bentuk dan dimensi papan nama SKPD	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.144	Penyusunan Rapergub SOP Pengadministrasian Barang Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Rapergub SOP Pengadministrasian Barang Daerah	1 Rapergub	Pedoman dalam Pengadministrasian barang daerah	100 %	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.42	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK										Rp. 580.000.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.42.002	Penilaian Kinerja Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik (IKM)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Peningkatan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	2 unit	Ternilainya Kinerja Instansi/ Unit Pelayanan Publik	30 unit pelayanan	Penilaian Kinerja Pelayanan pada Unit Kerja yang melaksanakan Pelayanan Langsung pada Masyarakat	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.42.003	Monitoring dan Evaluasi SPM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Peningkatan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	2 unit	Laporan Hasil Monev Pencapaian Targer SPM urusan wajib Pemerintah	1 laporan	Bahan pengambil kebijakan pelayanan	100 %	Rp. 80.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 5.109.460.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.42.007	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Peningkatan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	2 unit	Profil Pelayanan Publik Pemda DIY	1 Aplikasi	Tersedianya data lengkap atas pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pemda DIY	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.42.008	Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Peningkatan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	2 unit	Pembinaan unit pelayanan dalam menciptakan inovasi pelayanan kepada masyarakat	48 UPT	Tumbuhnya sistim pembelajaran dan knowledge sharing dalam mendorong perbaikan pelayanan publik	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.42.009	Fasilitasi Penerapan ISO pada Unit Pelayanan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Peningkatan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	2 unit	Kesiapan unit pelayanan untuk penerapan ISO	2 unit pelayanan	Peningkatan pelayanan publik	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Umum, Humas dan Protokol													
1.20.1.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 8.832.111.000,00	Rp. 10.093.242.000,00		
1.20.1.20.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- surat tercatat	1 tahun	Kelancaran tugas administrasi perkantoran dan kegiatan surat menyurat	100 %	Rp. 7.000.000,00	Rp. 8.500.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							- perangko	1 tahun						
							- Materai Rp. 6000	625 lembar						
							- Materai Rp. 3000	400 lembar						
1.20.1.20.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Jasa Listrik	1 tahun	Kelancaran komunikasi, kebutuhan sumber daya air dan listrik	100 %	Rp. 2.300.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							- Jasa Air	1 tahun						
							- Jasa komunikasi	1 tahun						
1.20.1.20.01.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Sewa kursi	13 buah	Kelancaran pelasaan acara/kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							- Sewa tenda	125 unit						
							- Sewa panggung	525 m2						
1.20.1.20.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Biro Umum, Hubungan	Prosentase Pelayanan Administrasi	100 %	- KIR Roda 4	1 unit	Terlaksananya perizinan STNK dan KIR kendaraan dinas	100 %	Rp. 49.465.000,00	Rp. 65.000.000,00	Biro Umum, Humas	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dinas/Operasional		Daerah Meningkat	Masyarakat dan Protokol	Perkantoran				Biro UHP Setda DIY				dan Protokol	
							- KIR Roda 6	2 unit						
							- STNK Roda 2	29 unit						
							- STNK Roda 3	1 unit						
							- STNK Roda 4	43 unit						
							- STNK Roda 6	2 unit						
1.20.1.20.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	- Pengelola keuangan	22 Orang	Kelancaran tugas administrasi perkantoran	100 %	Rp. 240.000.000,00	Rp. 375.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							- Pengelola kepegawaian	3 Orang						
							- Pengelola barang	3 Orang						
							- Penyelenggara keg	7 Orang						
							- Non PNS	4 Orang						
1.20.1.20.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Lantai keramik	247560 m2	Kenyamanan kantor Kompleks Kepatihan	100 %	Rp. 950.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Lantai abu-abu	29280 m2						
							Kaca	200820 m2						
							Dinding/Langit- langit	128568 m2						
							KM/WC	13896 m2						
							KM/WC VIP	1008 m2						
							Karpet	34068 m2						
							Halaman Lingkungan Kompleks Kepatihan	180720 m2						
							Aquarium air laut dan air tawar	24 Kali						
							Taman Kompleks Kepatihan	53208 m2						
1.20.1.20.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Biro Umum, Hubungan	Prosentase Pelayanan Administrasi	100 %	Monitor	45 unit	Menunjang kelancaran tugas dinas	100 %	Rp. 420.646.000,00	Rp. 596.742.000,00	Biro Umum, Humas	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	Masyarakat dan Protokol	Perkantoran		CPU	105 unit					dan Protokol	
							Printer	54 unit						
							Mesin ketik	15 unit						
							Mesin fotocopy	2 unit						
							LCD	5 unit						
							Jaringan PABX	5.916 port						
							Sentral PABX	2.676 port						
							Operator Console	300 Kali						
							Pesawat telepon digital	1.164 Kali						
							Pesawat telepon analog	6.42 Kali						
							Aplikasi System Informasi Telepon	24 Kali						
							Aplikasi System Faxcimile	36 Kali						
							Faxcimile	144 Kali						
1.20.1.20.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis kantor	171 jenis	Kelancaran tugas dinas	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang cetakan dan penggandaan	48 jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan biro	100 %	Rp. 325.000.000,00	Rp. 325.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	30 jenis	Tersedianya komponen instalasi listik / penerangan bangunan kantor dan lingkungan di Komplek Kepatihan	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Biro Umum, Hubungan	Prosentase Pelayanan Administrasi	100 %	Batik sutera	50 buah	Terpenuhinya kegiatan pelayanan pimpinan kepada	100 %	Rp. 950.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Biro Umum, Humas	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkat	Masyarakat dan Protokol	Perkantoran				tamu dan masyarakat				dan Protokol	
							Kerajinan perak	42 buah						
							Kerajinan lainnya	40 buah						
							Plakat Pemda DIY	400 buah						
							Trophy	230 buah						
							Piagam Penghargaan	11 buah						
							Dos Souvenir	145 buah						
							Tas Souvenir	145 buah						
							Karangan bunga	122 kran						
						Pita hiasan	4 roll							
1.20.1.20.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan rumah tangga	33 jenis	Terdukungnya kebersihan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan lingkungan kerja	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pengisian tabung damkar	29 buah						
							Pengisian tabung gas	144 Kali						
1.20.1.20.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Surat kabar harian	7 SKH	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Buku Kepustakaan	5 buku						
1.20.1.20.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman jamuan tamu, hidangan rapat, hidangan lembur	27.948 orang/tamu	Terlayaninya tamu pimpinan dan kelancaran tugas pegawai Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	100 %	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.750.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.01.019	Penyediaan jasa Pelayanan Kantor/ Gedung/Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jasa pelayanan kantor/gedung /tempat kerja	12 Orang	Mendukung kenyamanan kerja pegawai	100 %	Rp. 195.000.000,00	Rp. 328.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 5.511.847.000,00	Rp. 5.740.000.000,00		
1.20.1.20.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan roda 4	1 unit	trpenuhinya kebutuhan kendraan donal dan pelayana	100 %	Rp. 470.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Lift/elevator	1 unit	terdukungnya iktivitas kinerja pimpinan dan pegawai	100 %	Rp. 1.425.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							AC Standing 5 PK	3 unit						
							Hand Dryer	3 unit						
1.20.1.20.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Komputer PC	11 unit	Menunjang kelancaran tugas dinas kantor	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Monitor	5 buah						
							Tablet	4 buah						
							Printer Laserjet	4 unit						
							Penghancur kertas	1 buah						
							Repiter	2 unit						
1.20.1.20.01.02.010	Pengadaan Mebeler	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Meja resepsionis	2 unit	Menunjang kelancaran tugas dinas kantor	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Meja Knap	20 buah						
							Mimbar	2 buahMeja						
							Meja makan buffet	10 buah						
							Kursi susun	270 buah						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Almari Pakaian	3 buah						
1.20.1.20.01.02.011	DED Pembangunan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Redesain masterplan kompleks kepatihan	1 Paket	Redesain masterplan kompleks kepatihan	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung kantor di Komplek Kepatihan yang terawat	12 unit	Meningkatnya kenyamanan dan keamanan gedung kantor	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas/operasional jabatan roda 4	4 unit	kelancaran dan kenyamanan kendaraan dinas/operasional jabatan gubernur dan wakil gubernur	100 %	Rp. 244.387.000,00	Rp. 290.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Roda 2	29 unit	Kelancaran dan kenyamanan kendaraan dinas untuk tamu dan pimpinan	100 %	Rp. 1.447.460.000,00	Rp. 1.800.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Roda 3	1 unit						
							Roda 4	39 unit						
							Roda 6	2 unit						
1.20.1.20.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Instalasi air minum/bersih	1 tahun	meningkatnya fungsi dan keamanan gedung kantor	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Instalasi aiar limbah/kotor	1 tahun						
							Jaringan listrik	1 tahun						
							Gordyn	1 tahun						
1.20.1.20.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Solar genset	1 tahun	Meningkatnya fungsi, kenyamanan ruang dan peralatan kerja	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pemel genset listrik	12 Kali						
							Pemel genset hidran	2 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.02.029	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemel pompa air	60 Kali			Rp. 125.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pemel AC sentral	2 unit						
							Pemel AC casete	17 unit						
							Pemel AC split	87 unit						
							Pemel AC standing	6 unit						
							Pemel sound system	6 unit						
							Meja, kursi tamu sice	6 set	Menunjang kenyamanan kerja	100 %				
							almari	30 buah						
							meja	125 buah						
							kursi	150 buah						
							filling cabinet	15 buah						
							pengecatan filling cabinet	15 buah						
							ganti spon kain & melamin kursi VIP	78 buah						
melamin meja VIP	20 buah													
melamin knap	18 buah													
melamin mimbar	2 buah													
nglaras/stem gamelan	1 set													
meja kursi tamu ruang asisten I, II, dan III	3 set													
meja makan tamu	8 buah													
1.20.1.20.01.02.065	Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	penataan kawasan kompleks Kepatihan	1 kegiatan	Kelancaran proses penataan kawasan kompleks Kepatihan	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										Rp. 195.000.000,00	Rp. 275.000.000,00		
1.20.1.20.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase displin aparatur	100 %	PSL KDH dan WKDH	4 stel	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan performance pimpinan	100 %	Rp. 195.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							PDH KDH dan WKDH	4 stel						
							Batik tradisional KDH dan WKDH	10 stel						
							Sepatu ptgs protokol	20 pasang						
							Parfume	21 botol						
							Pin Petugas Protokol	20 buah						
							PSL petugas protokol	20 stel						
							PKL petugas protokol	20 stel						
							PKL kehumasan	16 stel						
							PKL kendaraan	20 stel						
							Batik petugas protokol	20 buah						
1.20.1.20.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 1.378.000.000,00	Rp. 1.905.000.000,00		
1.20.1.20.01.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja aparatur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peserta	157 Orang	Meningkatnya motivasi dan kinerja aparatur pemerintah daerah	100 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.05.013	Upacara Peringatan Hari Besar Nasional Dan Upacara lainnya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	upacara PHBN Tk. Provinsi	8 upacara/ kegiatan	Kelancaran pelaksanaan upacara PHBN Pemda DIY dan PHBN Setda DIY dan acara/kegiatan	100 %	Rp. 1.098.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Protokol					lainnya					
							upacara PHBN Tk. Setda	4 upacara/ kegiatan						
							Upacara/kegiatan lainnya	40 upacara/ kegiatan						
1.20.1.20.01.05.022	Pengiriman Petugas / Utusan / duta Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Studi komparasi keuangan, kepegawaian, kearsipan, perencanaan dan protokol	45 Orang	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur PNS di bidang Keuangan, kepegawaian dan perencanaan serta petugas protokoler yang profesional	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 250.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.05.063	Sosialisasi Persandian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peserta 25 orang	25 Orang	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan petugas persandian	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.05.064	Sosialisasi Keprotokolan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peserta 35 orang	35 Orang	Meningatnya kemampuan dan pengetahuan petugas keprotokolan	100 %	Rp. 20.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.05.065	Bimbingan Teknis Persandian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peserta 25 orang	25 Orang	Meningkatnya kemampuan teknis petugas persandian	100 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 92.000.000,00	Rp. 122.000.000,00		
1.20.1.20.01.06.016	Penyusunan laporan kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung	100 %	Laporan LAKIP, LKPJ,LPPD	3 laporan	Terinformasikannya kinerja Biro Umm, Humas dan Protokol Setd	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
1.20.1.20.01.06.017	Penyusunan laporan keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 laporan	Tersusunnya laporan keuangan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY dan Sekretariat DIY	100 %	Rp. 19.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Laporan Keuangan Semesteran	2 laporan						
							Laporan Akhir Tahun	2 laporan						
1.20.1.20.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	RKT	1 dokumen	Tersusunnya rencana pogram kegiatan Biro UHP Setda DIY dan Sekretariat DIY	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Renja	1 dokumen						
							RKA	2 dokumen						
							DPA	2 dokumen						
							ROPK	2 dokumen						
1.20.1.20.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Triwulanan	2 laporan	Tersusunnya laporan monev pelaksanaan program dan kegiatan Biro UHP Setda DIY dan Sekretariat Daerah	100 %	Rp. 18.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Laporan Akhir Tahun	2 laporan						
1.20.1.20.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH										Rp. 2.650.000.000,00	Rp. 2.650.000.000,00		
1.20.1.20.01.16.002	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen /Lembaga Pemerintah Non	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	95 %	VIP Room Bandara	2500 Orang	Meningkatnya pelayanan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur	100 %	Rp. 1.150.000.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pengamanan Tertutup	150 keg						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2) Departemen/Luar Negeri	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengawasan Jalan Raya	150 keg						
							Guide/ Penerjemah	60 Orang						
							Petugas Dimas/ Diajeng	35 pasang						
							Biaya Entertainment	1 tahun						
							Bunga Meja	300 buah						
1.20.1.20.01.16.006	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	95 %	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 tahun	Tercapainya koordinasi ke luar daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan undangan lainnya	100 %	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.16.007	Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	95 %	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	2 Orang	Meningkatnya kelancaran tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.20.1.20.01.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 330.000.000,00	Rp. 550.000.000,00		
1.20.1.20.01.23.001	Pengelolaan Website Instansi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Upgrading Website	1 Paket	Tersedianya Data/Informasi SKPD Biro Umum, Humas dan Protokol pada Website	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Penyusunan Naskah	250 naskah						
1.20.1.20.01.23.025	Pengelolaan Naskah Dinas Berbasis TI	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Ketertiban administrasi naskah dinas TI Pemda DIY	25000 naskah dinas	Aksesibilitas data dan naskah dinas berbasis TI	100 %	Rp. 80.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Petugas kearsipan aktif dan operator TI Terampil	7 petugas biro						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.01.23.027	Peningkatan Jaringan Pelaksanaan Tata Kearsipan Berbasis TI	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Pemeliharaan server	3 unit			Rp. 200.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan PC	22 PC						
							Printer	6 unit						
							Software	2 Paket						
1.24	Kearsipan													
1.24.02	Biro Umum, Humas dan Protokol													
1.24.1.20.02.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN										Rp. 100.000.000,00	Rp. 150.000.000,00		
1.24.1.20.02.15.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Dinamis Inaktif Tidak Teratur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Arsip dinamis inaktif	750 m3	Kelestarian arsip dinamis inaktif di lingkungan Setda DIY	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Berkas tidak teratur arsip dinamis inaktif Setda	4000 Berkas						
							Penilaian arsip inaktif	3000 Berkas						
							Check kesehatan	45 Orang						
1.25	Komunikasi dan Informatika													
1.25.02	Biro Umum, Humas dan Protokol													
1.25.1.20.02.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA										Rp. 2.370.160.000,00	Rp. 2.838.114.800,00		
1.25.1.20.02.18.002	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Biro Umum, Hubungan	Persentase aktivitas Pemda yang	100 %	Liputan TV	120 liputan	Terpublikasikannya kegiatan dan kebijakan Pemda	100 %	Rp. 615.820.000,00	Rp. 764.000.000,00	Biro Umum, Humas	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintah Daerah		Daerah Meningkatkan	Masyarakat dan Protokol	tersebarluaskan melalui media massa		LPPD	3 SKH					dan Protokol	
							Spanduk	100 buah						
							Publikasi SKH	3 SKH						
							Publikasi Bangsal Kepatihan	12 Kali						
							Merchandise	200 buah						
							Publikasi running text TV	5 Kali						
							ILM	7 Kali						
1.25.1.20.02.18.004	Dokumentasi Kegiatan dan Kebijakan Pemda	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100 %	Video paket dokumen	13 Paket	Tersedianya dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	100 %	Rp. 170.000.000,00	Rp. 165.919.600,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Paket dokumen foto	13 Paket						
							Cetak foto 10R	150 lembar						
							Cetak foto 12R	27 lembar						
							Transfer CD foto	132 CD						
							Transfer VCD	70 VCD						
							Transfer DVD	70 DVD						
							Penggandaan VCD/ DVD	100 keping						
1.25.1.20.02.18.005	Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100 %	Buletin SPD edisi bulanan	10000 eksemplar	Terdistribusikannya buletin SPD bulanan, edisi khusus dan buku kerja 2016	100 %	Rp. 410.000.000,00	Rp. 428.195.200,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Buletin SPD Edisi Khusus	1200 eksemplar						
							Buku Kerja Tahun 2016	1000 eksemplar						
1.25.1.20.02.18.006	Pengembangan Kemitraan Kehumasan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100 %	Workshop kehumasan	6 Kali	Terselenggaranya peran humas dalam penyebarluasan informasi	100 %	Rp. 105.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
1.25.1.20.02.18.007	Penyelenggaraan Kemitraan dengan	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Biro Umum,	Persentase aktivitas Pemda	100 %	Pers Tour dalam daerah	6 Kali	Kemitraan dg pers berjalan dg baik	100 %	Rp. 274.340.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Umum,	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 21.459.118.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pers	Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan	Hubungan Masyarakat dan Protokol	yang tersebarluaskan melalui media massa		Pers Tour luar daerah	1 Kali					Humas dan Protokol	
							Jumpa pers	5 Kali						
							Kegiatan kemitraan	4 Kali						
							Kegiatan dengan Pemda Tk. II	5 keg						
1.25.1.20.02.18.008	Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100 %	publikasi TV	20 Paket	Terkomunikasinya kegiatan dan kebijakan pemda yg responsif thd isu aktual	100 %	Rp. 520.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							ILM	4 Kali						
							Takshow TV	7 Kali						
							Siaran Radio Nasional	5 Kali						
							Radio Lokal	5 Kali						
							Siaran Langsung RRI	5 Kali						
							Saresehan	192 Kali						
1.25.1.20.02.18.009	Penyusunan Sambutan Gubernur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100 %	Naskah sambutan	900 naskah	naskah sambutan dan buku	100 %	Rp. 85.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan
							Buku himpunan sambutan	250 buku						
1.25.1.20.02.18.014	Pawai Pembangunan dalam rangka Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100 %	Kegiatan pawai selama 1 hari	1 Kali	Pelaksanaan Pawai berjalan dengan baik dan lancar	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.25.1.20.02.18.015	Sarasehan Kehumasan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100 %	Sarasehan kehumasan	3 Kali	Terselenggaranya peran humas dalam penyebaran informasi	100 %	Rp. 90.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.08	Sekretariat DPRD													
1.20.1.20.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.653.830.200,00	Rp. 2.769.078.641,00		
1.20.1.20.08.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Materai	1350 lembar	Kelancaran surat menyurat dan administrasi perkantoran	2000 dokumen surat	Rp. 6.599.000,00	Rp. 6.599.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. Paket Pengiriman	1 Paket						
1.20.1.20.08.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Rekening Telephon	12 bulan	Terpenuhinya Layanan jasa komunikasi (telepon dan internet) air dan listrik	12 bulan	Rp. 688.951.000,00	Rp. 688.951.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. Rekening Air	12 bulan						
							3. Rekening Listrik	12 bulan						
							4. Langganan SMS gateway	12 bulan						
1.20.1.20.08.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjijinan kendaraan dinas/operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penelitian Ulang Surat-Surat Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional meliputi : STNK	40 STNK	Terpenuhinya kelengkapan Surat-Surat Kendaraan Dinas / Operasional	40 buah	Rp. 32.753.750,00	Rp. 32.753.750,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							KIR	4 Kali						
1.20.1.20.08.01.007	penyediaan jasa administrasi keuangan.	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honor Pengelola Keuangan	9 org x12 bulan	Terpenuhinya administrasi keuangan dan asset barang milik daerah	100 %	Rp. 37.500.000,00	Rp. 37.500.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Honor Pengelola Barang	2 org x 12 bulan						
1.20.1.20.08.01.008	Penyediaan Jas Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perawatan Kebersihan dan kerapian kantor oleh Penyedia Jasa Cleaning Service	146.496 M2 x 12 bulan	Kantor DPRD DIY terawat kebersihannya dan tertata rapi	100 %	Rp. 223.404.150,00	Rp. 223.404.150,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat											
1.20.1.20.08.01.010	Penyediaan alat tulis kantor.	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat TulisKantor	1 Paket	Terpenuhinya butuha alat tulis kanor	100 %	Rp. 206.181.800,00	Rp. 220.614.526,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang Cetakan	23 macam	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	Rp. 134.713.500,00	Rp. 144.143.445,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Penggandaan	221000 lembar penggandaan,						
1.20.1.20.08.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	15 macam	Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor	100 %	Rp. 25.085.000,00	Rp. 26.840.950,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Surat Kabar Harian	9 SKH x 11 eksemplar	Terpenuhya Referensi informasi bahan kebijakan1	100 %	Rp. 158.020.000,00	Rp. 169.081.400,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Majalah	5 terbitan						
							Buku Perpustakaan	6 paket jenis buku						
1.20.1.20.08.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengadaan/pembelian Makanan dan Minuman : 1. Rakor sekretariat Dewan	3960 os	Menunjang Kelancaran Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD	100 %	Rp. 87.600.000,00	Rp. 93.732.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. Tamu Sekretariat Dewan	600 os						
							3. Petugas Pengamanan Unjuk Rasa	1200 os						
1.20.1.20.08.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Ibu Kota Provinsi lainnya	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Referensi / bahan kebijakan sesuai bidang tugas hasil koordinasi dan konsultasi : 1. Dalam Daerah	80 oh	Referensi informasi bahan /acuan pengambilan kebijakan/keputusan	100 %	Rp. 394.115.000,00	Rp. 421.703.050,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. Dalam Jawa	34 OK						
							3. Luar Jawa	25 OK						
1.20.1.20.08.01.021	Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi	100 %	Honor Pengelola Kepegawaian	2 org x12 bln	Terpenuhinya administrasi kepegawaian SKPD	100 %	Rp. 16.776.000,00	Rp. 16.776.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan		Perkantoran									
1.20.1.20.08.01.022	Penyediaan jasa keamanan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan Jasa pengamanan (Outsourcing)	1 pkt (12 bn)	terkendalinya keamana gedung kantor	100 %	Rp. 640.691.000,00	Rp. 685.539.370,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.01.026	Penyediaan retribusi sampah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Retribusi sampah	12 bln	Menunjang kebersihan lingkungan kantor	100 %	Rp. 1.440.000,00	Rp. 1.440.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 5.664.673.800,00	Rp. 1.729.345.557,00		
1.20.1.20.08.02.004	Pengadaan Mobil Jabatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mobil jabatan Pimpinan DPRD	4 unit	menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 2.331.800.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Mobil Jabatan Sekretaris DPRD	1 unit						
1.20.1.20.08.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mobil Operasional DPRD	4 unit	menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 1.716.663.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan AC Splite 2,5 PK	6 Paket	menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 101.840.000,00	Rp. 108.968.800,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Belanja Modal Notebook	3 unit	menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 96.283.000,00	Rp. 103.022.810,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Belanja Modal Pengadaan Alat Rekam	6 unit						
							Belanja Modal Camera	6 unit						
							Belanja Modal Handycam	1 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.08.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Ruang Transit Gubernur	1 Paket	Gedung kantor yang representatif	100 %	Rp. 209.459.850,00	Rp. 224.122.040,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Ruang Parkir Selatan	1 Paket						
							Pemeliharaan Ruang Arsip Lantai III	1 Paket						
1.20.1.20.08.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional : 1. Kendaraan Dinas Roda 6	1 unit	menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 942.254.950,00	Rp. 1.008.212.797,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. Kendaraan Dinas Roda 4	32 unit						
							3. Kendaraan Dinas Roda 2	7 unit						
1.20.1.20.08.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	22 tabung	menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 167.573.000,00	Rp. 179.303.110,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1 tahun						
							Belanja Pmeliharaan Alat-Alat Kantor	1 tahun						
							Belanja Alat-alat perlengkapan	3 macam						
1.20.1.20.08.02.028	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Alat-Alat Studio	5 macam	menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp. 98.800.000,00	Rp. 105.716.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Alat-Alat Kantor	7 macam;						
1.20.1.20.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										Rp. 397.116.000,00	Rp. 424.914.120,00		
1.20.1.20.08.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Prosentase displin aparatur	100 %	1. Pakaian Sipil Harian untuk DPRD	165 stel	Menunjang kelancaran tugas	100 %	Rp. 383.141.500,00	Rp. 409.961.405,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. Pakaian Sipil Lengka untuk Setwan	30 Sel						
							3. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang untuk DPRD	55 stel						
1.20.1.20.08.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat DPRD	Prosentase displin aparatur	100 %	1. Jaket untuk Caraka	4 potong	Menunjang kelancaran tugas	100 %	Rp. 13.974.500,00	Rp. 14.952.715,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan				2. Pakaian Pramuladi	10 stel;						
							3. Jas Hujan	85 unit						
1.20.1.20.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 258.750.000,00	Rp. 276.862.500,00		
1.20.1.20.08.05.005	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	1. Pengiriman Peserta Pelatihan Kesekretariatan	30 OK;	Menunjang kelancaran tugas	100 %	Rp. 258.750.000,00	Rp. 276.862.500,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM	50 OK						
1.20.1.20.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 181.415.500,00	Rp. 174.854.585,00		
1.20.1.20.08.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	RKT SKPD dan PK	1 dokumen	Mendukung Manajemen keuangan	100 %	Rp. 8.025.000,00	Rp. 8.586.750,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							LAKIP Instansi	1 dokumen						
							konsep LKPJ dan LPPD	1 dokumen;						
1.20.1.20.08.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Triwulanan	4 dokumen	Menunjang kelancaran tugas	100 %	Rp. 66.772.500,00	Rp. 71.446.575,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Laporan Akhir Tahun	1 dokumen						
							Laporan Semesteran dan Prognosis	1 dokumen						
							Laporan barang / aset daerah	1 dokumen						
1.20.1.20.08.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja	100 %	Bahan Forum Musrenbang	1 dokumen	Mendukung Manajemen keuangan	100 %	Rp. 93.473.000,00	Rp. 80.756.110,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							PRA-RKA dan RKA - SKPD (TAPD, KOMISI,	6 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD										Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		PANGGAR) Murni dan Perubahan							
							DPA SKPD murni dan DPA SKPD perubahan	2 dokumen						
							Review Renstra Instansi	1 dokumen						
							Renja SKPD	1 dokumen						
							ROPK	1 dokumen						
1.20.1.20.08.06.019	Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Penyusunan bahan evaluasi program kegiatan	1 dokumen	Menunjang manajemen keuangan dan perencanaan	100 %	Rp. 13.145.000,00	Rp. 14.065.150,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH*										Rp. 36.559.214.500,00	Rp. 45.615.825.037,00		
1.20.1.20.08.15.001	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Perda/Perwan /Kepwan hasil kerja Pansus DPRD DIY	14 Perda/ Perwan/ Kepwan	Dasar pelaksanaan dan kepastian hukum	100 %	Rp. 6.531.252.100,00	Rp. 13.526.485.200,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15.002	Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/unjukrasa, tamu dan sarasehan	147 laporan	Bahan pertimbangan pengambilan kebijakan/keputusan	100 %	Rp. 372.260.000,00	Rp. 398.318.200,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15.004	Rapat-Rapat Paripurna	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Rsalah Rapat Pariprna Biasa	3 risalah	Bahan / referensi pengambilan kebijakan/keputusan	100 %	Rp. 168.500.000,00	Rp. 180.295.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Risalah rapat paripurna istimewa DPRD DIY	7 risalah						
1.20.1.20.08.15.005	Kegiatan Reses	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	4 kabupaten dan 1 kota di DIY	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat	495 lapoan reses	Bahan / referensi pengambilan kebijakan/keputusan	100 %	Rp. 3.135.850.000,00	Rp. 3.355.359.500,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.08.15.007	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Jakarta, Ibu Kota Provinsi Lainnya	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Peningkatan pengetahuan dan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis	4 kali 55 org	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD DIY	100 %	Rp. 2.570.000.000,00	Rp. 2.749.900.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15.010	Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Terlaksananya PAW Anggota DPRD DIY	3 Kali	Teresmikannya Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD DIY	100 %	Rp. 37.925.000,00	Rp. 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15.013	Layanan Informasi Pendukung Kegiatan D P R D Melalui Website	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1. layanan Website DPRD DIY	1 tahun	menunjang kelancaran komunikasi, sosialisasi kegiatan dan kebijakan DPRD kepada masyarakat	100 %	Rp. 555.533.300,00	Rp. 594.420.600,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. Sewa Bandwith	12 bulan						
							3. Aplikasi Kesekretariatan	1 Paket						
							4. Pemeliharaan alat penunjang TI	1 Paket						
1.20.1.20.08.15.014	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	referensi kajian untuk pengambilan keputusan berupa : 1. hasil penelitian/kajian,	100 buah	Acuan pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan	100 %	Rp. 206.790.000,00	Rp. 221.265.300,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. makalah seminar/workshop	6 bh						
							3. hasil Forum Diskusi	12 bh						
							4. kajian kebijakan	1 Paket						
1.20.1.20.08.15.016	Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets DPRD DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1. Booklets	750 buku,	Sosialisasi kegiatan DPRD DIY	100 %	Rp. 141.616.500,00	Rp. 151.529.600,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							2. Majalah Mimbar Legislatif	4 eks						
1.20.1.20.08.15.017	Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Informasi kegiatan DPRD melalui: Blocking Time	3 Kali	Sosialisasi kegiatan DPRD DIY	100 %	Rp. 1.400.000.000,00	Rp. 1.498.000.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Audio Visual Kegiatan DPRD	1 Paket						
							Suplemen	5 Kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Media Cetak/advertorial,	8 Kali						
							dialog interaktif radio,	3 Kali						
							siaran langsung radio,	8 Kali						
							dialog interaktif TV,	8 Kali						
							siaran langsung TV,	6 Kali						
							Pementasan Seni Budaya,	1 Kali						
							Konferensi Pers,	3 Kali						
							Forum diskusi Wartawan,	5 Kali						
							Press Tour,	1 Kali						
							Olah raga,	1 Kali						
1.20.1.20.08.15.018	Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Dan Kebijakan DPRD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Dokumentasi Bahan Acara	21 Bahan Acara	Bahan Referensi Pengambilan Kebijakan	100 %	Rp. 160.000.000,00	Rp. 171.200.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15.020	Penyusunan Info Kajian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Research Brief	20 Judul	Dukungan Referensi Hasil Kajian/Penelitian Bagi Anggota DPRD	24 Judu RB	Rp. 157.802.000,00	Rp. 168.848.100,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
							Info Kajian	2 penerbitan						
1.20.1.20.08.15.027	Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Tersedianya Bahan Pra Raperda dan Raperda Inisiatif/ Rancangan Nota Kesepakatan/ Rakepwan DPRD DIY	4 draf	Draft Raperda Inisiatif / Rancangan Nota Kesepakatan/ Rakepwan DPRD DIY	4 draft	Rp. 630.000.000,00	Rp. 674.100.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15.028	Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Penyediaan jasa asuransi kesehatan bagi Pimp dan anggota DPRD DIY beserta keluarganya	220 jiwa selama 12 bulan	Pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD DIY beserta keluarganya	100 %	Rp. 2.103.723.000,00	Rp. 2.250.983.600,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15.034	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Tersedianya draf produk Hukum DPRD (Perwan, Kepwan dan Kepim)	150 draf	Bahan Acuan Pembahasan / Pembicaraan DPRD DIY	100 %	Rp. 193.127.500,00	Rp. 206.646.400,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15.035	Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	kebijakan pembangunan urusan perempuan di DIY	1 rekomendasi	Acuan pembuatan kebijakan atau pengambilan	100 %	Rp. 319.356.000,00	Rp. 341.710.900,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DIY		Daerah Meningkatkan						keputusan					
1.20.1.20.08.15.036	Penyusunan Laporan Kegiatan DPRD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Laporan hasil kerja DPRD Tahunan 2015	1 Paket	Acuan pengambilan kebijakan/keputusan	100 %	Rp. 53.650.000,00	Rp. 57.405.500,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15.037	Fasilitasi Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	Keputusan DPRD tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD thd RKPD Pemda DIY	1 Keputusan Dewan	Acuan pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan	100 %	Rp. 131.410.000,00	Rp. 140.608.700,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
1.20.1.20.08.15.038	Fasilitasi dan Dukungan Kegiatan Pimpinan DPRD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1) melaksanakan tugas dinas /menghadiri Undangan	10 Kali	Bahan / referensi pengambilan kebijakan/keputusan	100 %	Rp. 2.701.912.100,00	Rp. 2.891.045.947,00	Sekretariat DPRD	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2) Risalah Rapat Konsultasi,Rapat Kerja, Risalah Rapat Koordinasi	36 risalah						
							3) Bahan Kajian hasil Forum Komunikasi Pimpinan dan Sekwan DPRD seluruh Indonesia;	9 Kajian						
1.20.1.20.08.15.039	Fasilitasi dan Dukungan Kegiatan Badan Musyawarah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1) Review Jadwal Kegiatan DPRD	12 bulan	Bahan / referensi pengambilan kebijakan/keputusan	100 %	Rp. 1.121.342.500,00	Rp. 1.199.836.475,00	Sekretariat DPRD	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2) Bahan Kajian Kebijakan hasil Kunjungan kerja	5 Kajian						
							3) RKT DPRD	2 Keputusan						
							4) Risalah Rapat & atau Rekomendasi	50 buah						
1.20.1.20.08.15.040	Fasilitasi dan Dukungan Kegiatan Badan Anggaran	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1) Risalah Rapat & atau Rekomendasi	150 buah	Bahan / referensi pengambilan kebijakan/keputusan	100 %	Rp. 1.502.932.500,00	Rp. 1.608.137.775,00	Sekretariat DPRD	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2) RAPBD 2016	1 Raperda						
							3) RAPBD P 2015	1 Raperda						
							4) KUA-PPAS 2016	2 Nota Ksepakatan						
							5) KUA-PPAS P 2015	2 Nota Kesepakatan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Sekretariat DPRD										Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.08.15.041	Fasilitasi dan Dukungan Kegiatan Komisi-Komisi DPRD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	6) Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2014	1 Raperda			Rp. 10.337.655.000,00	Rp. 11.061.290.850,00	Sekretariat DPRD	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Bahan Kajian Hasil Delegasi DPRD ke Pemerintah Pusat	6 Delegasi	Bahan Referensi / Bahan Pertimbangan Pengambilan Keputusan/Kebijakan	100 %				
							Bahan Kajian Kebijakan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Tugas ke Luar Daerah	2 kali 4 Komisi						
							Bahan Kajian Kebijakan Hasil Pendampingan Mitra Kerja Komisi	4 kali 4 Komisi						
							Bahan Kajian Kebijakan Hasil Kunjungan Kerja Komisi	4 kali 4 Komisi						
							Risalah Rapat	444 Rsalah						
							Laporan Pembahasan : RAPBD 2016; RAPBD P 2015; KUA-PPAS 2016; KUA-PPAS P 2015 & Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014	5 laporan						
							Evaluasi / Prognosis APBD 2015	1 rekomendasi x 4 komisi						
							Rekomendasi hasil Pengawasan Pelaksanaan APBD/Kebijakan Daerah (hasil Peninjauan)	36 kali 4 Komisi						
1.20.1.20.08.15.042	Fasilitasi dan Dukungan Kegiatan Badan Legislati Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1) Risalah Rapat & atau Rekomendasi	55 buah	Referensi/Bahan Pertimbanga Pengambilan Keputusan/Keijakan	100 %	Rp. 997.552.000,00	Rp. 1.067.380.640,00	Sekretariat DPRD	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD											Jumlah Pagu : Rp. 45.715.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat				2) Bahan Kajian Kebijakan hasil kunjungan kerja	7 bahan kajian						
							3) Kajian thd Raperda	13 Raperda						
							4) Prolegda DIY Tahun 2016	1 dokumen						
1.20.1.20.08.15.043	Fasilitasi dan Dukungan Kegiatan Badan Kehormatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1) Risalah Rapat	12 risalah	Referensi Bahan Pertimbangan Pengambilan Keputusan/Kebijakan	100 %	Rp. 354.315.000,00	Rp. 379.117.050,00	Sekretariat DPRD	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2) Bahan Kajian Kebijakan Hasil Kunjungan Kerja	6 bahan kajian						
							3) Laporan Evaluasi disiplin Anggota DPRD	1 laporan x 3 masa sidang						
							4) laporan dugaan pelanggaran Anggota DPRD	0 %						
1.20.1.20.08.15.044	Fasilitasi dan Dukungan pelaksanaan tugas Fraksi-fraksi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Sekretariat DPRD	Persentase prolegda yang terselesaikan	95 %	1) Pemandangan Umum Fraksi	18 x 7 Fraksi	Bahan Referensi Pengambilan Keputusan/Kebijakan	100 %	Rp. 674.710.000,00	Rp. 721.939.700,00	Sekretariat DPRD	Baru - Mempercepat Capaian Target
							2) Pendapat Akhir Fraksi	18 x 7 Fraksi						
							3) Klasifikasi Tenaga Ahli	7 Orangx 12 bulan						
							4) usulan anggota Pansus, Tim kepada Pimpinan DPRD	14 usulan						
							5) Risliah Rapat	48 Risalah x7 fraksi						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.09	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset													
1.20.1.20.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 6.913.930.400,00	Rp. 6.963.368.550,00		
1.20.1.20.09.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pemakaian materai 6000,	1250 lembar	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 24.920.500,00	Rp. 24.920.500,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. Pemakain materai 3000 dan	1300 lembar						
							3. pengiriman paket dokumen	25 Paket						
1.20.1.20.09.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pemakaian telepon, air, listrik, langganan internet, web hosting dan VPN IP	12 bulan	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 1.699.707.800,00	Rp. 1.698.503.250,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.01.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Polis Asuransi	4 polis	Terjaminnya aset Pemda DIY	100 %	Rp. 900.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjinaan kendaraan dinas/operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. STNK kendaraan roda 2	16 buah	Terjaminnya pemakaian kendaraan dinas untuk kelancaran administrasi perkantoran	100 %	Rp. 30.552.500,00	Rp. 30.711.600,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. STNK kendaraan roda 4	19 buah						
							3. STNK kendaraan roda 6	1 buah						
1.20.1.20.09.01.007	Penyediaan Jasa Admistrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang	58 orang, 12 bln, 14 rang 12 bulan	Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 220.360.000,00	Rp. 224.110.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.09.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan dan keindahan kantor	12 bulan	Kenyamanan kantor selama 1 tahun	100 %	Rp. 915.621.800,00	Rp. 935.621.800,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis kantor	12 bulan, 65 jenis	Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun	100 %	Rp. 301.389.000,00	Rp. 302.005.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang cetakan, penjiilidan dan penggandaan	12 bulan	Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun	100 %	Rp. 348.800.000,00	Rp. 348.800.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.01.012	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan, 15 jenis	Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun	100 %	Rp. 84.494.000,00	Rp. 98.747.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Isi tabung pemadam kebakaran ukuran 2,3 kg dan 3,2 kg	14 buah	Kelancaran kegiatan administrasi perkantoran selama 1 tahun	100 %	Rp. 73.490.000,00	Rp. 64.040.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Surat kabar/majalah dan buku kepustakaan	12 bulan	Kelancaran pelayanan admiistrasi perkantoran	100 %	Rp. 62.670.000,00	Rp. 69.696.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Hidangan rapat umum dan jamuan makan (prasmanan) tamu lainnya	12 bulan, 2500 OS. 900 OM	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun	100 %	Rp. 137.285.000,00	Rp. 141.485.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pemenuhan undangan, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran selama 1 tahun	100 %	Rp. 1.157.230.000,00	Rp. 1.157.333.400,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.01.021	Peyediaan jasa administasi kepegawaian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Hnoraryum pengelola kepegawaian di 5 KPPD se DIY	5 Orang, 12 Bulan	Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 9.900.000,00	Rp. 9.900.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Pembayaran honorarium pegelola kepegawaian di DPPKA Induk	3 Orang, 12 Bulan						
1.20.1.20.09.01.022	Penyediaan jasa keamanan	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pendapatan,	Prosentase Pelayanan	100 %	Penjaga keamanan di KPPD Kota	2 Orang, 12 Bulan	Kantor, gudang, gedung dan rumah	100 %	Rp. 936.469.800,00	Rp. 946.911.000,00	Dinas Pendapatan,	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kantor/gedung /tempat kerja	Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan	Pengelolaan Keuangan dan Aset	Administrasi Perkantoran		Yogyakarta		dinas terjamin aman selama 1 tahun				Pengelolaan Keuangan dan Aset	
							Penjaga keamanan di KPPD Gunungkidul	2 Orang, 12 bulan						
							Penjaga keamanan di KPPD Kulonprogo	2 Orang, 12 Bulan						
							Penjaga keamanan di KPPD Bantul	2 Orang, 12 Bulan						
							Penjaga keamanan di KPPD Sleman	10 orang, 12 bln						
							Penjaga keamanan kantor DPPKA Induk	12 bulan, 5 orang						
1.20.1.20.09.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Bantul Depok Gedongtengen Sewon Sleman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Retribusi Sampah	12 bulan	Peningkatan kebersihan dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 11.040.000,00	Rp. 10.584.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 44.729.694.175,00	Rp. 36.818.315.550,00		
1.20.1.20.09.02.003	Pembangunan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Bantul Sleman	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Bangunan gedung kantor KPPD Bantul	1 unit	Bangunan Gedung KPPD Bantul	1 unit	Rp. 36.000.000.000,00	Rp. 29.000.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Bangunan gedung kantor KPPD Sleman	1 unit	Bangunan gedung kantor KPPD Sleman	1 unit				
									Bangunan gedung kantor berfungsi dan menambah aset untuk kelancaran tugas pelayanan	100 %				
1.20.1.20.09.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas operasional roda 2	2 unit	Kendaraan dinas berfungsi dan bertambahnya aset untuk kelancaran tugas aparatur	100 %	Rp. 32.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Berfungsinya perlengkapan gedung kantor dan menambah aset untuk kelancaran tugas aparatur	100 %	Rp. 1.496.012.450,00	Rp. 1.061.849.300,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana	100 %	Peralatan gedung kantor	5 jenis	Berfungsinya peralatan gedung kantor dan menambah aset	100 %	Rp. 1.510.934.000,00	Rp. 1.286.144.250,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat	Aset	prasarana aparatur				untuk kelancaran tugas aparatur				dan Aset	
1.20.1.20.09.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DPPKA dan 5 KPPD se DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mebeleur	7 jenis	Berfungsinya mebeleur untuk kelancaraan tugas aparatur	100 %	Rp. 417.150.000,00	Rp. 417.150.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.02.021	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Depok Gondokusuman Kalasan Kotagede Umbulharjo Wirobrajan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	15 PBB, 1 tahun	Meningkatnya fungsi rumah dinas/rumah jabatan dan bangunan milik Pemda	100 %	Rp. 154.500.000,00	Rp. 154.500.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.02.022	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gudang	2 unit	Kenyamanan dan kelancaran tugas aparatur	100 %	Rp. 1.049.570.800,00	Rp. 979.375.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Gedung kantor	11 unit						
							kebersihan dan berfungsinya gedung kantor	12 bulan						
1.20.1.20.09.02.024	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan roda 6	1 unit	Kelancaran tugas aparatur DPPKA terjamin	100 %	Rp. 688.719.000,00	Rp. 781.222.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Kendaraan roda 4	19 unit						
							Kendaraan roda 2	16 unit						
							pemeliharaan rutin	12 bulan						
1.20.1.20.09.02.026	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Generator Set	7 unit	Kelancaran tugas aparatur DPPKA selama 1 tahun	100 %	Rp. 948.050.000,00	Rp. 906.300.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. AC Split	25 unit						
							3. Air Conditioning Central	15 unit						
							4. Jaringan listrik jaringan komputer	12 bulan						
1.20.1.20.09.02.028	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Komputer	87 unit	Kelancaran tugas aparatur DPPKA selama 1 tahun	100 %	Rp. 184.269.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. Mesin ketik	21 unit						
1.20.1.20.09.02.031	PEMELIHARAAN ARSIP KEUANGAN	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	1. penataan arsip keuangan	15.5 Berkas	Arsip terpelihara, mudah dan cepat dicari	100 %	Rp. 259.400.000,00	Rp. 186.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset										Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	Keuangan dan Aset	sarana prasarana aparatur		2. Ekspose data,	1 Kali					Keuangan dan Aset	
1.20.1.20.09.02.032	Pemeliharaan Jaringan / Sistem Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Bandwith	12 bulan	Berfungsinya jaringan dan sistem informasi untuk kelancaran tugas aparatur DPPKA DIY	100 %	Rp. 85.000.000,00	Rp. 93.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Jaringan, aplikasi dan sistem informasi terpelihara	12 bulan						
1.20.1.20.09.02.040	Rehabitasi sedang berat rumah jabatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Depok Mergansan Sewon	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehabilitasi rumah jabatan/ dinas milik Pemda DIY	3 unit	Rumah dinas / rumah jabatan milik Pemda DIY layak dan siap digunakan	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.02.049	Perubahan status hukum barang milik daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkapan kant	Efisiensi anggaran pemeliharaan	100 %	Rp. 160.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.02.060	Monitoring dan investigasi pengelolaan barang milik daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Bimtek pengelolaan barang milik daerah	165 Orang, 2 hari	Data hasil pengadaan dan hibh hasil pengadaan untuk tertib administrasi	34 SKPD&UPTD	Rp. 173.343.125,00	Rp. 195.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian										
				dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial			Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan pada SKPD	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD										
1.20.1.20.09.02.061	Pemeliharaan arsip pajak kendaraan bermotor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	KPPD se DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Aplikasi arsip digital	5 alikasi	Arsip yang mudah dan cepat dicari	100 %	Rp. 1.370.745.800,00	Rp. 1.392.775.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Arsip pajak KBM terpelihara	69.5 Berkas						
1.20.1.20.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 982.134.900,00	Rp. 731.000.000,00		
1.20.1.20.09.05.002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Soialisasi dan publikasi peraturan perudang-undangan tentang pajak daerah	675 Orang	Pemahaman peraturan perundang-undangan dan informasi kepada wajib pajak dan PNS	100 %	Rp. 320.130.500,00	Rp. 290.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.05.004	Bimbingan Teknis Kesamsatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	5 KPPD se DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Bimbingan teknis kesamsatan	200 Orang	Pemahaman peraturan aparatur danwajib pajak meningkat	100 %	Rp. 131.622.500,00	Rp. 180.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.05.042	Pembinaan dan pelaksanaan bimbingan teknis bagi pengelola keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Bimbingan teknis bagi bendhara pengeluaran, bendaharapenerima unsur PP dan Sudi orientasi	186 oang, 3 akt	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola kuangan daerah	100 %	Rp. 355.606.900,00	Rp. 231.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.05.046	Bimbingan Teknis PenyusunanA PBD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kota Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Bimbingan teknis penyusunan APBD	40 Orang	Sura Edaran Penyusunan APBD	100 %	Rp. 174.775.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 152.290.500,00	Rp. 145.000.000,00		
1.20.1.20.09.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100 %	LAKIP, RKT dan Penetapan Kinerja	3 dokumen	Tersedianya informasi capaian kinerja dan ihktisar	100 %	Rp. 6.500.000,00	Rp. 7.500.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	Keuangan dan Aset	manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				realiasi kinerja SKPD				Keuangan dan Aset	
1.20.1.20.09.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Laporan keuangan smesteran dan prognosis realisasi anggaran,	1 laporan	Laporan realisasi keuangan semesteran dan prognosis, laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas dan CALK serta laporan relisasi keuangan akhir taun	100 %	Rp. 18.673.500,00	Rp. 22.500.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan						
1.20.1.20.09.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD erta Pengembanga Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. FGD Penyusunan program kegiatan 2016	50 Orang	Sinergitas program kegiatan SKPD dan UPTD (KPPD se DIY)	100 %	Rp. 105.647.000,00	Rp. 115.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. FGD Penyusunan program kegiatan perubahan APBD 2015	50 Orang						
1.20.1.20.09.06.019	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pogram kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Ekspose hasil monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan 2015	30 Orang	Laporan hasil monitoring evaluasi realisasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD	100 %	Rp. 21.470.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										Rp. 14.527.780.150,00	Rp. 16.455.745.332,00		
1.20.1.20.09.17.004	Penyusunnn Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Danurejan	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Sosialisasi Sisdur	1 kali, 200 orang	Pengelolaan keuangan drah yang tertib dan akurat	100 %	Rp. 80.000.000,00	Rp. 88.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Pergub Sisdur PKD	1 Pergub						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.09.17.006	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danurejan	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Raperda APBD TA. 2016	1 Raperda, 750 buku	Perda tentang APBD TA.2015 dan Raperda TA.2016	100 %	Rp. 737.496.750,00	Rp. 760.500.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Perda tentang APBD 2015	1 Perda, 750 buku						
1.20.1.20.09.17.007	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danurejan	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Pergub tentang Penjabaran APBD TA.2016	1 Pergub, 750 buku	Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA.2015 dan TA.2016	100 %	Rp. 710.960.500,00	Rp. 815.500.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD TA.2016	1 Rapergub, 750 buku						
1.20.1.20.09.17.008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danurejan Suryatmajan	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Perda Perubahan APBD TA.2015	1 Perda, 250 buku	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA.2015	100 %	Rp. 660.693.000,00	Rp. 705.500.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA.2015	1 Raperda, 20 buku						
1.20.1.20.09.17.009	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danurejan Suryatmajan	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Pergub tentang penjabaran perubahan APBD 2015	1 Pergub, 750 buku	Peraturan Gubernur tentang penjabaran Perubahan APBD TA.2015	100 %	Rp. 1.017.699.000,00	Rp. 1.150.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Rapergub tentang penjabaran perubahan APBD TA.2015	1 Rapergub, 750 buku						
1.20.1.20.09.17.010	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Pemda DIY	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014	1 Perda, 175 buku	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014	100 %	Rp. 495.000.000,00	Rp. 498.850.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014	1 Raperda,125 buku						
1.20.1.20.09.17.011	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Pemda DIY	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014	1 Pergub, 330 buku	Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014	100 %	Rp. 357.312.500,00	Rp. 393.250.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Rapergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014	1 Rapergub, 330 buku						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.09.17.015	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Bimtek tentang pengelolaan keuangan daerah	3 akt, 132 orang	Pemahaman pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berbasis accrual di seluruh SKPD	100 %	Rp. 203.992.000,00	Rp. 254.100.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Proses intensifikasi dan ekstensifikasi sumber2 pendapatan	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Spanduk dan Baliho	80 m2	Terealisasinya penerimaan DBH CHT, DBH BP- PBB, DBH PPh Psl.21, DBH PPh Psl 29/29 (WP OPDN), DAK/DAU dan WISMP-2.	100 %	Rp. 512.866.000,00	Rp. 591.468.500,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Publikasi media cetak dan elektronik	19 Kali						
							Sosialisas PPh WP OPDN dan Psl.21	120 Org						
1.20.1.20.09.17.020	Penatausahaan dan pengendalian gaji pegawai daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Pemda DIY	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Laporan realisasi gaji pegawai Pemda DIY	1 laporan	Buku laporan realisasi gaji	100 %	Rp. 354.213.000,00	Rp. 395.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.021	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Bantul	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Bantul	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Super PKB	10 lembar	Peningkatan pendapatan daerah	100 %	Rp. 718.328.500,00	Rp. 720.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Surat Ketetapan Pajak Daerah	330 lembar						
							Pemungutan pajak, retribusi dan lain -lain pendapatan daerah yang syah	194.999 Rupiah						
1.20.1.20.09.17.022	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan di KPPD Gunungkidul	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Gunungkidul	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	SKPD	300 set	Peningkatan pendapatan asli daerah	100 %	Rp. 424.399.000,00	Rp. 481.126.758,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Pemungutan PKB, BBNKB, Retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang syah	62.575 Rupiah						
1.20.1.20.09.17.023	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Kota Yogyakarta	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Surat ketetapan pajak daerah	396 set	Peningkatan pendapatan asli daerah	100 %	Rp. 1.120.000.000,00	Rp. 1.213.370.904,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang syah	219.933 Rupiah						
1.20.1.20.09.17.024	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-	Hukum dan	Akuntabilitas Pengelolaan	Kabupaten Kulon Progo	Persentase peningkatan	11.51 %	Surat ketetapan pajak daerah	390 set	Peningkatan pendapatan daerah	100 %	Rp. 610.000.000,00	Rp. 726.000.000,00	Dinas Pendapatan,	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sumber pendapatan di KPPD Kulonprogo	Aparatur	Keuangan Daerah Meningkat		PAD		Pemungutan pajak daerah, retribusi dan lain-lain Pendapatan yang syah	55.144 Rupiah					Pengelolaan Keuangan dan Aset	
1.20.1.20.09.17.025	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Sleman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Sleman	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Surat Ketetapan Pajak Daerah	250 set	Peningkatan pelayanan dan penerimaan pendapatan asli daerah	100 %	Rp. 1.208.875.900,00	Rp. 1.377.524.600,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Pemungutan pajak daerah	416.316 Rupiah						
1.20.1.20.09.17.026	Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	proses penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pemda DIY	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan pihak ketiga	5 bank	Meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan pengelola keuangan	100 %	Rp. 163.175.000,00	Rp. 183.920.990,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Sosialisasi Kebijakan PKD	68 PA/KPA, 100 orang						
							Draft pedoman kebijakan PKD	1 Pergub						
							Ketetapan Pengangkatan PA/KPA dan bendahara APBD dan Danais	4 SK						
1.20.1.20.09.17.028	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Kab Sleman, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	1. Pedoman pengelolaan keuangan PPK BLUD	1 Pergub, 1 SK Gub, 3 SKPD/Unit kerja	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelola BLUD	100 %	Rp. 92.780.000,00	Rp. 99.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. Bimtek Keuangan bagi PPK dan bendahara BLUD	30 Orang						
1.20.1.20.09.17.031	Pelayanan Kesamsatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Bantul Kraton Sleman Wates Wonosari	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Software aplikasi	1 aplikasi PKB	Realisasi penerimaan pendapatan dari pajak daerah	100 %	Rp. 762.580.000,00	Rp. 900.031.590,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Spanduk dan baliho	15 buah						
							Publikasi media cetak dan elektronik	5 SKH, 10 kali radio						
							Pameran Pelayanan wajib pajak	64 pameran						
1.20.1.20.09.17.038	Penyusunan perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Peraturan Gubernur, Sosialisasi media cetak dan elektronik, publikasi , aplikasi	1 Pergub	Pemahaman masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor atas peraturan tentang pajak daerah meningkat	100 %	Rp. 184.657.000,00	Rp. 203.122.700,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.09.17.046	Perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Proses perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	1. Dokumen perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah,	1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen	Prosentase PAD terhadap APBD	40 %	Rp. 749.656.000,00	Rp. 824.621.600,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. FGD	2 Kali						
1.20.1.20.09.17.049	Penyusunan laporan keuangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danurejan Suryatmajan	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	1.Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan,	2 laporan	Informasi dan kelancaran pengelolaan dana dekonsentrasi dan TP yang ada di DIY.	100 %	Rp. 155.160.000,00	Rp. 216.611.780,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. Rakor pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan	100 Orang						
1.20.1.20.09.17.060	Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danurejan Suryatmajan	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	1.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA.2015	34 SKPD+UPTD	Acuan pelaksanaan kegiatan SKPD TA.2015 Acuan rencana penerimaan dan pengeluaran kas tahun 2015 SPD SKPD TA.2015	100 %	Rp. 349.220.500,00	Rp. 363.550.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. SPD SKPD TA.2015	4 triwulan						
1.20.1.20.09.17.061	Pengesahan dan Penetapan Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Danurejan Suryatmajan	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD SPD SKPD TA.2015	34 SKPD	Acuan pelaksanaan kegiatan pad SKPD TA.2015 Acuan rencana penerimaan dan pengeluaran kas pada tahun 2015 SPD SKPD TA.2015	100 %	Rp. 538.365.750,00	Rp. 575.500.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.064	Penggalan sumber-sumber potensi pendapatan daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Kab/kota se DIY	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Dokumen sumber-sumber potensi pendapatan daerah, profil retribusi daerah	1 dokumen	Prosentase PAD terhadap APBD	40.02 %	Rp. 95.000.000,00	Rp. 114.950.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.066	Peningkatan kualitas pemungutan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Jetis	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Renual Sertifikat ISO 9001-2008	1 sertifikat renual	Peningkatan pelayanan pemungutan pajak daerah	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.067	Peningkatan kualitas pemungutan pajak daerah di KPPD Sleman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Depok Sleman	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Sertifikat ISO 9001-2008	1 sertifikat ISO	Peningkatan mutu pelayanan sesuai standar ISO	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.068	Pembinaan dan pengembangan program gaji pegawai daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Pengembangan program gaji pegawai daerah sesuai peraturan yang berlaku	10 bulan	Pelayanan pembayaran gaji pegawai daerah tepat waktu	100 %	Rp. 170.506.250,00	Rp. 394.431.950,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.09.17.069	Peningkatan pelayanan sistem penerbitan SP2D	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Penerbitan SP2D belanja langsung dan belanja tidak langsung terselenggara	12 bulan	Pelayanan pencetakan dan penerbitn SP2D tepat waktu	100 %	Rp. 92.758.500,00	Rp. 114.820.750,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.070	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Kompilasi laporan keuangan semesteran dan akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah	2 laporan	Laporan realisasi semester dan prognosis, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan CALK	100 %	Rp. 308.685.000,00	Rp. 339.553.890,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.072	Pembinaan dan pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	DPPKA DIY	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Pendampingan entry data	195 Orang	Penyelenggaraan inventarisasi barang milik daerah yang efektif	100 %	Rp. 137.500.000,00	Rp. 184.263.640,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Aplikasi SIMA	1 Aplikasi						
							Aplikasi SIPKD Modul Aset	1 Aplikasi						
							Aplikasi barang persediaan	1 Aplikasi						
1.20.1.20.09.17.074	Peningkatan kualitas pemungutan pajak daerah di KPPD Bantul	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Bantul Sewon	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Sertifikat ISO 9001-2008	1 sertifikat ISO	Peningkatan mutu pelayanan sesuai standar	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.075	Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Gunungkidul	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Wonosari	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Pengakuan ISO 9001:2008	1 sertifikat ISO	Peningkatan mutu pelayanan sesuai standar	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.076	Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Kulonprogo	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Wates	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Pengakuan ISO 9001-2008	1 sertifikat ISO	Pengakuan mutu pelayanan sesuai standar	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.17.077	Pengembangan Program Sistem Pengelolaan Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Program Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir	1 Aplikasi	Aplikasi Dana Bergulir	1 Aplikasi	Rp. 150.492.000,00	Rp. 150.492.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Baru - Tidak Bisa Ditunda
							Aplikasi Dana Hibah dan Bansos,	1 Aplikasi	aplikasi Dana Hibah dan Bansos	1 Aplikasi				
									Pengelaan keuangan tepat waktu	100 %				
1.20.1.20.09.17.078	Pembinaan pengelolaan pajak daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	1.Bimtek Kesamsatan.	35 Orang	Koordinasi antar instansi (DPPKA, POLRI, Jasa Raharja)	100 %	Rp. 400.390.000,00	Rp. 484.471.900,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2.Pemeliharaan alat kantor (server)	1 Paket						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.09.17.079	Pembinaan pengelolaan retribusi daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	1.Bimtek Retribusi daerah	2 Kali	Persentase PAD terhadap APBD	40.02 %	Rp. 179.018.000,00	Rp. 216.611.780,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. Pemeliharaan aplikasi retribusi	1 Aplikasi						
1.20.1.20.09.17.080	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Accrual	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan PAD	11.51 %	Penerapan ujicoba penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Accrual ke seluruh SKPD (PA/KPA)	1 laporan	Pelaporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	100 %	Rp. 286.000.000,00	Rp. 314.600.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA										Rp. 562.550.000,00	Rp. 514.221.280,00		
1.20.1.20.09.18.001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Peningkatan pengelolaan keuangan Kabupaten-Kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar	100 %	Evaluasi dan pencermatan hasil Raperda Kabupaten/Kota	15 Raperda, 5 Kab/Kota, 3 dokumen	Raperda tentang APBD Kab/Kota	100 %	Rp. 466.080.000,00	Rp. 514.221.280,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.18.002	Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Peningkatan pengelolaan keuangan Kabupaten-Kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar	100 %	1. Evaluasi Raperbup	15 raperbup	Pergub tentang Evaluasi Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kab/Kota	100 %	Rp. 96.470.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
								2. Rakor pengelolaan keuangan Kab/Kota	2 Kali					
1.20.1.20.09.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH										Rp. 242.184.550,00	Rp. 292.778.810,00		
1.20.1.20.09.20.003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %	Monitoring dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	34 SKPD	Kelancaran pengelolaan keuangan pada SKPD	100 %	Rp. 90.010.000,00	Rp. 125.386.805,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.20.006	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Badan Kepegawaian	Persentase penyimpangan	30 %	Laporan tindak lanjut hasil temuan	1 laporan	Informasi tindak lanjut hasil temuan	100 %	Rp. 69.674.550,00	Rp. 76.642.005,00	Dinas Pendapatan,	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan	Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan	pada obyek pemeriksaan		pengawasan		pengawasan				Pengelolaan Keuangan dan Aset	

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD										
1.20.1.20.09.20.013	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Luar DIY	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	25 Orang	Setoran ganti rugi hasil TGR (pengembalian angsuran atas kerugian daerah)	100 %	Rp. 82.500.000,00	Rp. 90.750.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 92.290.000,00	Rp. 101.519.000,00		
1.20.1.20.09.23.005	Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Bahan pendukung untuk pengembangan teknologi informasi	5 jenis, 1100 buah	Company profile, booklet, tas kertas, CD blank berlogo dapat berfungsi dengan baik	100 %	Rp. 92.290.000,00	Rp. 101.519.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.09.36	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH										Rp. 802.939.625,00	Rp. 798.000.000,00		
1.20.1.20.09.36.011	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum,	Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD	100 %	Rakor dan evaluasi	12 bulan	Implementasi SIPKD dapat berjalan dengan baik	100 %	Rp. 802.939.625,00	Rp. 798.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Pendampingan implementasi aplikasi SIPKD	68 PA/KPA, 12 bulan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD										
1.20.1.20.09.39	PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH										Rp. 845.578.700,00	Rp. 929.318.170,00		
1.20.1.20.09.39.001	Peningkatan Status Hak Atas Tanah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemda DIY	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	11.71 %	Penyelesaian Legalitas aset tanah dan warkah sertifikat tanah	7 bidang, 125 warkah	Legalitas status tanah yang dimanfaatkan oleh Pemda DIY	100 %	Rp. 113.549.700,00	Rp. 124.904.670,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset											Jumlah Pagu : Rp. 70.577.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat										dan Aset	
1.20.1.20.09.39.002	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	11.71 %	1. Optimalisasi dengan cara Sewa	34 unit	Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah	10 % dari tahun sebelumnya	Rp. 308.435.600,00	Rp. 339.279.160,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							2. Optimalisasi dengan cara Pinjam pakai	30 unit						
1.20.1.20.09.39.003	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	DIY dan Luar DIY	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	11.71 %	Laporan mutasi barang daerah tahun 2014	1 Buku Laporan	Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100 %	Rp. 299.149.400,00	Rp. 329.064.340,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
1.20.1.20.09.39.004	Identifikasi Barang Milik Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	34 SKPD + UPT se DIY	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	11.71 %	Data barang mik daerah yang dioptimalkan da dimanfaatkan oleh pngguna	34 SKPD + UPTD	Optimalisasi barang milik daerah yang idle dan legalitas kerjasama dalam rangka pemanfaatan oleh pengguna	100 %	Rp. 76.374.000,00	Rp. 88.000.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.09.39.005	Pengembanga Aplikasi SIPKD Modul Aset	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	11.71 %	Aplikasi SIPKD Modul Aset	1 Aplikasi	Inventarisasi pengelolaan barang milik daerah / aset di DIY yan efektif dan akurat	100 %	Rp. 48.070.000,00	Rp. 48.070.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Pendampingan SIPKD Modul Aset	480 Orang						
1.20.1.20.09.40	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO										Rp. 725.627.000,00	Rp. 1.122.942.040,00		
1.20.1.20.09.40.001	Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	22.95 %	FGD Pengembangan BUMD dan BUKP	50 Orang	Manajemen BUMD dan BUKP optimal	100 %	Rp. 334.439.000,00	Rp. 391.506.390,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Studi orientasi	1 Kali						
1.20.1.20.09.40.002	Pembinaan BUKP	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	DIY	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	22.95 %	Keputusan Gubernur tentang Laporan Keuangan BUKP	2 Keputusan Gubernur	Terkelolanya manajemen BUKP secara optimal	100 %	Rp. 391.188.000,00	Rp. 731.435.650,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Sedang Berjalan
							Laporan Perkembangan BUKP	1 laporan						
							Rapat Kerja BUKP	90 Orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.10	Badan Pendidikan dan Pelatihan													
1.20.1.20.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.542.898.000,00	Rp. 1.633.000.000,00		
1.20.1.20.10.01.001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengiriman paket	1 tahun	Kelancaran administrasi penatausahaan keuangan dan surat-menyurat perkantoran	1 tahun	Rp. 8.500.000,00	Rp. 10.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Materai	1750 lembar						
1.20.1.20.10.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Langganan Telepon, Listrik, Internet, TV dan Air	12 bulan	Kelancaran dan kenyamanan tugas kantor	1 tahun	Rp. 650.000.000,00	Rp. 700.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kir Kendaraan roda 4	1 unit	Lancarnya kegiatan operasional kantor	1 tahun	Rp. 9.900.000,00	Rp. 10.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Penelitian ulang STNK Kendaraan roda 2	3 unit						
							Penelitian ulang STNK Kendaraan roda 4	7 unit						
1.20.1.20.10.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium penyelenggara administrasi keuangan dan kepegawaian	15 Orang,12 bulan	Tertib administrasi keuangan dan kepegawaian	1 tahun	Rp. 39.600.000,00	Rp. 40.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perawatan Kamar Mandi	5052 m2	Kebersihan gedung kantor dan asrama peserta diklat	1 tahun	Rp. 192.603.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Perawatan Kaca	26820 m2						
							Perawatan Lantai	105744 m2						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.10.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	45 jenis	Kelancaran operasional kantor	1 tahun	Rp. 27.500.000,00	Rp. 27.500.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Fotocopy	70000 lembar	Kelancaran operasional kantor	1 tahun	Rp. 20.500.000,00	Rp. 20.500.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Belanja Cetak	12 jenis						
1.20.1.20.10.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat-alat listrik dan elektronik	23 jenis	Kelancaran operasional kantor	1 tahun	Rp. 30.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.01.013	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat-alat perlengkapan	8 jenis	Kelancaran operasional kantor	1 tahun	Rp. 13.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengisian tabung pemadam kebakaran	10 buah	Kelancaran operasional kantor	1 tahun	Rp. 8.250.000,00	Rp. 10.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Peralatan rumah tangga	10 jenis						
1.20.1.20.10.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bahan Bacaan Majalah	5 jenis,12 bulan	Terpenuhinya informasi poleksosbud hankam yang aktual	1 tahun	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Bahan Bacaan Koran	4 jenis,12 bulan						
1.20.1.20.10.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Hidangan rapat	3500 os	Kelancaran tugas kantor	1 tahun	Rp. 35.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun	Terpenuhinya informasi dan acuan untuk pengambilan keputusan bidang kediklatan	1 tahun	Rp. 225.000.000,00	Rp. 230.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 tahun						
1.20.1.20.10.01.020	Pengelolaan Arsip Dinamis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Sarana pengelolaan arsip aktif dan inaktif	7 jenis	Terjaganya ketersediaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan arsip aktif dan	100 %	Rp. 13.045.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									inaktif					
1.20.1.20.10.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honor Pegawai Tidak Tetap	2 Orang,12 bulan	Terjaminnya keamanan Badan Diklat	1 tahun	Rp. 260.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Outsourcing tenaga keamanan	12 bulan						
1.20.1.20.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 2.112.280.000,00	Rp. 1.082.100.000,00		
1.20.1.20.10.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan roda empat	1 unit	Terpenuhinya sarana kendaraan dinas untuk menunjang kinerja aparatur	100 %	Rp. 265.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.20.1.20.10.02.006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Cover kursi	120 buah	Kenyamanan peserta diklat didukung kelengkapan sarana prasarana asrama	1 tahun	Rp. 394.890.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							AC	46 unit						
1.20.1.20.10.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Meja	40 buah	Kelancaran dan kenyamanan PNS dalam melaksanakan tugas kantor	100 %	Rp. 577.590.000,00	Rp. 135.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Kursi	113 buah						
							Whiteboard	3 buah						
							TV	5 unit						
1.20.1.20.10.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Printer Multifungsi	5 unit	Terwujudnya kelancaran operasional kantor	100 %	Rp. 283.250.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Komputer PC	45 unit						
1.20.1.20.10.02.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Laundry sprei, gordyn, taplak meja	20500 kg	Terpeliharanya asrama untuk kenyamanan peserta diklat	100 %	Rp. 218.500.000,00	Rp. 240.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan sumur dalam	1 unit						
							Pengecatan asrama	3000 m2						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan										Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Perawatan taman lingkungan asrama	19698 m2						
							Perbaikan atap dan lantai	60 m2						
							Perbaikan pintu, kamar mandi, saluran pipa ledeng	20 unit						
1.20.1.20.10.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perawatan kebun lingkungan	16340 m2	Terpeliharanya gedung kantor untuk kenyamanan peserta diklat dan pegawai	100 %	Rp. 84.150.000,00	Rp. 125.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Perbaikan lantai	100 m2						
							Perbaikan atap	30 m2						
							Perbaikan pintu, kamar mandi/wc, saluran pipa air ledeng	36 unit						
1.20.1.20.10.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar kendaraan roda dua	3 unit	Kelancaran Operasional kantor	1 tahun	Rp. 148.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar kendaraan roda empat	7 unit						
1.20.1.20.10.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan TV	10 unit	Kelancaran Operasional Kantor	1 tahun	Rp. 51.000.000,00	Rp. 51.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan AC	35 unit						
							Pemeliharaan Jaringan Komputer	40 unit						
							Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 tahun						
1.20.1.20.10.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Faksimili dan HT	7 unit	Kelancaran Operasional Kantor	1 tahun	Rp. 51.100.000,00	Rp. 51.100.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan Sound system dan wireless	8 unit						
							Pemeliharaan Kamera, Handycam, CCTV	10 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan										Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemeliharaan LCD Proyektor	10 unit						
							Pemeliharaan Mesin Ketik	10 unit						
							Pemeliharaan Printer	35 unit						
							Pemeliharaan Komputer dan Laptop	85 unit						
1.20.1.20.10.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan kursi	70 buah	kelancaran Operasional kantor	1 tahun	Rp. 3.800.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan almari	2 buah						
1.20.1.20.10.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehabilitasi atap gedung kantor	1 Paket	Efektifitas penyelenggaraan diklat	1 tahun	Rp. 35.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 75.000.000,00	Rp. 15.000.000,00		
1.20.1.20.10.05.001	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Outward bound pegawai	86 Orang	Meningkatnya motivasi kerja aparatur	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.20.1.20.10.05.002	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Laporan Penilaian Angka Kredit	1 laporan	Penilaian angka kredit Widyaiswara	9 Widyaiswara	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 120.490.000,00	Rp. 131.000.000,00		
1.20.1.20.10.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program	100 %	LAKIP	1 laporan	Penilaian capaian kinerja program / kegiatan tahun 2014	8 Program	Rp. 5.450.000,00	Rp. 6.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
1.20.1.20.10.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	Pengendalian administrasi keuangan	8 Program	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Laporan Semesteran dan Prognosis	1 laporan						
1.20.1.20.10.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	ROPK	1 dokumen	Pedoman perencanaan program dan kegiatan	9 Program	Rp. 80.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Renja	1 dokumen						
							DPA	1 dokumen						
1.20.1.20.10.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Tahunan	1 dokumen	Pengendalian program dan kegiatan	9 Program	Rp. 20.040.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Laporan Monev	1 dokumen						
1.20.1.20.10.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 40.000.000,00	Rp. 44.000.000,00		
1.20.1.20.10.23.007	Pengelolaan Sistem Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Jumlah pengelolaan diklat yang menggunakan aplikasi teknologi informasi	16 diklat	Data peserta yang dikelola melalui aplikasi teknologi informasi	450 Orang	Rp. 40.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.10.31	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										Rp. 731.707.000,00	Rp. 711.377.150,00		
1.20.1.20.10.31.006	Pelaksanaan Penelitian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	3 penelitian	Laporan penelitian yang tersusun	3 laporan	Rp. 45.000.000,00	Rp. 49.500.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.31.010	Pengembangan Kurikulum Dan Silabus Diklat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Penyusunan kurikulum dan silabus	4 jenis diklat	Tersusunnya kurikulum dan silabus	4 jenis diklat	Rp. 40.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.31.012	Pengembangan Evaluasi Pasca Diklat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Jumlah diklat yang ditindaklanjuti dengan evaluasi pasca diklat	17 jenis diklat	Jumlah buku laporan evaluasi pasca diklat	17 laporan	Rp. 155.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.31.013	Pengelolaan Dan Pengembangan Perpustakaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Alih Media Bahan Pustaka	56000 lembar	Jumlah pengunjung perpustakaan setahun	500 Orang	Rp. 381.707.000,00	Rp. 419.877.150,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Terpeliharanya bahan pustaka	10381 buku						
							Pengadaan bahan pustaka	800 buku						
1.20.1.20.10.31.015	Penerbitan Buletin Diklat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Penerbitan Buletin Diklat	4 edisi	Informasi sumberdaya aparatur DIY	200 Orang dan 40 instansi per edisi	Rp. 70.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.31.020	Akreditasi Diklat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	100 %	Akreditasi Penyelenggara Diklat	1 Sertifikat	Terakreditasinya diklat prajabatan dan kepemimpinan	2 tahun	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.20.1.20.10.32	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN										Rp. 9.723.658.000,00	Rp. 10.932.058.000,00		
1.20.1.20.10.32.010	Workshop Pengembangan Aparatur Berwawasan Budaya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta workshop Pengembangan Aparatur Berwawasan Budaya	40 Orang	Jumlah peserta yang lulus	40 Orang	Rp. 56.000.000,00	Rp. 61.600.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.011	Diklat Prajabatan Golongan I dan II	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat prajabatan golongan I dan II	40 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 720.000.000,00	Rp. 792.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat											
1.20.1.20.10.32.012	Diklat Prajabatan Golongan III	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat prajabatan golongan III	60 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 900.000.000,00	Rp. 990.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.20.1.20.10.32.013	Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat III)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat PIM III	150 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 2.700.000.000,00	Rp. 2.970.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.014	Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat IV)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat PIM IV	150 Orang	Peserta yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.750.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.016	Diklat Fungsional (diklat pranata komputer)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat pranata komputer	50 Orang	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 68.000.000,00	Rp. 74.800.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.017	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat AKIP)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	lama diklat	11 Hari	jumlah angkatan	2 angkatan	Rp. 245.890.000,00	Rp. 345.890.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							jumlah peserta	60 Orang	aparatur berinerja baik	100 %				
1.20.1.20.10.32.018	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Perencanaan Daerah)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	jumlah peserta	60 Orang	bertambahnya kinerja aparat	100 %	Rp. 247.078.000,00	Rp. 347.078.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							lama diklat	11 Hari						
1.20.1.20.10.32.020	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengadaan Barang dan Jasa)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat Pengadaan Barang/Jasa	90 Orang	Jumlah peserta yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 121.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.021	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Bendahara Daerah)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat bendahara daerah	30 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 145.500.000,00	Rp. 160.050.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.026	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Pengelolaan Aset)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	jumlah peserta	60 Orang	bertambahnya kinerja aparat	100 %	Rp. 292.835.000,00	Rp. 292.835.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							lama diklat	11 Hari						
1.20.1.20.10.32.037	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Badan Pendidikan	Persentase PNS yang mengikuti	25 %	Jumlat peserta diklat pengelolaan	60 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan	7 %	Rp. 269.540.000,00	Rp. 369.540.000,00	Badan Pendidikan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(diklat Pengelolaan Keuangan Daerah)	Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan	dan Latihan	diklat		keuangan daerah		predikat memuaskan				dan Pelatihan	
1.20.1.20.10.32.039	Diklat Administrasi Pemerintahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta Diklat Administrasi Pemerintahan	120 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 584.315.000,00	Rp. 684.315.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.040	Diklat Penilaian Aset Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta Diklat Penilaian Aset Daerah	30 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 130.000.000,00	Rp. 143.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.042	Diklat Manajemen Perpustakaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta Diklat Manajemen Perpustakaan	30 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 77.000.000,00	Rp. 84.700.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.10.32.043	Diklat Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan bagi PPTK	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta Diklat Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan bagi PPTK	60 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 77.000.000,00	Rp. 84.700.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.044	Diklat Bahasa Jawa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat bahasa Jawa	60 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 78.000.000,00	Rp. 85.800.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.045	Diklat Pengelolaan Kearsipan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat kearsipan	30 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 77.000.000,00	Rp. 84.700.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.32.050	Diklat Management of Training (MOT)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat MOT	40 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 145.000.000,00	Rp. 159.500.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.20.1.20.10.32.051	Diklat Training of Course (TOC)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat TOC	40 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 126.500.000,00	Rp. 139.150.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.20.1.20.10.32.052	Diklat Teknis Pariwisata	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta Diklat Teknis Pariwisata	40 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 117.000.000,00	Rp. 128.700.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.10.32.053	Diklat Administrasi Kepegawaian	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Jumlah peserta diklat administrasi kepegawaian	30 Orang	Peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan	7 %	Rp. 57.000.000,00	Rp. 62.700.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.10.33	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR										Rp. 216.000.000,00	Rp. 240.100.000,00		
1.20.1.20.10.33.017	Ujian Sertifikasi Keahlian P B J	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Jumlah peserta ujian PBJ	100 Orang	Peserta yang lulus ujian PBJ	20 %	Rp. 16.000.000,00	Rp. 17.600.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.33.024	Peningkatan Ketrampilan Dan Profesionalisme	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Peningkatan SDM Widyaiswara	9 Orang	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 140.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Peningkatan SDM pejabat struktural/fungsional umum	6 Orang						
1.20.1.20.10.33.043	Pengembangan ISO Diklat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Pembaruan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1 Sertifikat	Laporan audit survellance ISO 9001:2008	1 laporan	Rp. 75.000.000,00	Rp. 82.500.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
1.20.1.20.10.41	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH										Rp. 318.000.000,00	Rp. 379.800.000,00		
1.20.1.20.10.41.001	Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase tindaklanjut pelaksanaan diklat atas kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar daerah.	100 %	Koordinasi penyelenggaraan diklat kemitraan	1 rekomendasi penyelenggaraan diklat	Rumusan kesepakatan penyelenggaraan diklat kemitraan	100 %	Rp. 58.000.000,00	Rp. 63.800.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi	4 laporan monitoring						
1.20.1.20.10.41.002	Promosi dan Rekrutment Kemitraan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Badan Pendidikan dan	Persentase tindaklanjut pelaksanaan	100 %	Pengiriman surat penawaran diklat kemitraan	120 kab/kota	Rekrutmen instansi / lembaga calon pengirim diklat	100 %	Rp. 170.000.000,00	Rp. 207.000.000,00	Badan Pendidikan dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 14.880.033.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	Latihan	diklat atas kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar daerah.				kemitraan				Pelatihan	
							Koordinasi dan promosi diklat kemitraan	12 lokasi						
1.20.1.20.10.41.007	Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Diklat Satu Pintu	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase tindaklanjut pelaksanaan diklat atas kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar daerah.	100 %	Jumlat peserta sosialisasi pergub diklat satu pintu	80 Orang	Tersosialisasikannya pergub diklat satu pintu	100 %	Rp. 40.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.10.41.008	Sosialisasi Diklat Penjenjangan Pola Baru	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase tindaklanjut pelaksanaan diklat atas kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar daerah.	100 %	Jumlah peserta sosialisasi diklat penjenjangan pola baru	300 Orang	Tersosialisasikannya pelaksanaan diklat penjenjangan pola baru	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Baru - Tidak Bisa Ditunda

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 6.094.525.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.11	Inspektorat													
1.20.1.20.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.280.415.000,00	Rp. 1.654.000.000,00		
1.20.1.20.11.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya meterai	300 meterai	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 4.200.000,00	Rp. 4.500.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Terkirimnya surat	300 surat						
							Terkirimnya paket	12 bulan						
1.20.1.20.11.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 160.080.000,00	Rp. 185.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kota Yogyakarta	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya jasa pemeiharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda 4	16 STNK	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 13.615.000,00	Rp. 17.500.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Terbayarnya jasa pemeiharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional roda 2	6 STNK						
1.20.1.20.11.01.007	Penyeiaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya jasa honorarium petugas administrasi keuangan 12 bulan	13 or	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 26.400.000,00	Rp. 55.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 6.094.525.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.11.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya jasa kebersihan kantor	12 bulan	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 83.097.000,00	Rp. 95.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	28 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 27.327.500,00	Rp. 35.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan	12 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 20.500.000,00	Rp. 30.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Penggandaan	97500 lembar						
1.20.1.20.11.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik/ penerangan bangunan kantor	12 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 4.911.000,00	Rp. 7.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya perlatan rumah dan pengisian tabung kebakaran	7 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 3.242.000,00	Rp. 5.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya surat kabar harian	4 jenis	Meningkatnya wawasan aparat Inspektorat	100 %	Rp. 22.640.000,00	Rp. 25.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Terbelinya buku pengetahuan dan peraturan perundang	5 Paket						
1.20.1.20.11.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minuman sidang	2880 os	Mendukung kelancaran palaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 28.800.000,00	Rp. 35.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya dukungan untuk pengasan pegawai dalam rangka rapat/koordinasi pemeriksaan dan konsultasi	49 dok	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 777.602.500,00	Rp. 1.000.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 6.094.525.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.11.01.022	Penyediaan Jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terbayarnya jasa keamanan kantor	6 or	Menunjang keamanan kantor	100 %	Rp. 108.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 580.932.000,00	Rp. 925.000.000,00		
1.20.1.20.11.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terbelinya kelengkapan komputer	6 jenis	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp. 15.287.000,00	Rp. 100.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Terbelinya AC	2 unit						
1.20.1.20.11.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengecatan dinding kantor	600 m2	Menunjang keamanan dan estetika gedung kantor	100 %	Rp. 57.730.000,00	Rp. 140.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Penggantian keramik	150 m2						
							Pengantian sekat	50 m2						
1.20.1.20.11.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan dinas roda 4 siap operasional	16 unit	Menunjang kelancaran tugas operasional pengawasan	100 %	Rp. 385.065.000,00	Rp. 475.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas roda 2 siap operasional	6 unit						
1.20.1.20.11.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Perlengkapan kantor berfungsi dengan baik	4 jenis	Menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor	100 %	Rp. 5.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan berfungsi dengan baik	4 jenis	Menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor	100 %	Rp. 21.750.000,00	Rp. 30.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.02.042	Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Inspektorat	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	Trbangunnya rehabilitasi gudang	1 unit	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 96.100.000,00	Rp. 150.000.000,00	Inspektorat	Baru - Tidak Bisa Ditunda

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 6.094.525.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkat		sarana prasarana aparatur									
1.20.1.20.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 229.314.000,00	Rp. 295.000.000,00		
1.20.1.20.11.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peningkatan pemahaman Auditor/PNS tentang teknis pengawasan	8 or	Menunjang peningkatan kualitas pengawasan	100 %	Rp. 94.360.000,00	Rp. 120.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peningkatan pemahaman Auditor/PNS tentang peraturan perundang- undangan	60 or (3 angkatan)	Menunjang peningkatan kualitas pengawasan	100 %	Rp. 58.907.000,00	Rp. 75.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Peningkatan pemahaman Auditor/PNS tentang teknis pengawasan	60 or (4 angkatan)	Menunjang peningkatan kualitas pengawasan	100 %	Rp. 76.047.000,00	Rp. 100.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 67.671.500,00	Rp. 112.500.000,00		
1.20.1.20.11.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya dokumen laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)	3 laporan	Menunjang peningkatan akuntabilitas	100 %	Rp. 6.459.500,00	Rp. 7.500.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Inspektorat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen	100 %	Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan keuangan SKPD	2 laporan	Menunjang peningkatan akuntabilitas	100 %	Rp. 13.699.000,00	Rp. 15.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 6.094.525.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	semesteran dan akhir tahun)		Meningkat		pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
1.20.1.20.11.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi (Renstra, ROPK, Renja, RKA/DPA)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	4 laporan	Menunjang peningkatan akuntabilitas	100 %	Rp. 38.248.000,00	Rp. 75.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD (triwulanan dan akhir tahun)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Inspektorat	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersusunnya dokumen movev pelaksanaan progra dan kegiatan SKPD	12 laporan	Menunjang peningkatan akuntabilitas	100 %	Rp. 9.265.000,00	Rp. 15.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH										Rp. 3.643.528.750,00	Rp. 4.710.000.000,00		
1.20.1.20.11.20.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %	Pemeriksaan Reguler	132 LHP	Terarahnya pelaksanaan pengawasan	100 %	Rp. 2.596.477.500,00	Rp. 2.900.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
							Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY	1 laporan						
							Pecermatan DPA	34 laporan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 6.094.525.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Evaluasi LAKIP Tahun 2014	34 LHE						
							Monev SPIP SKPD	34 laporan						
							Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD	34 laporan						
							Cash Opname dan Stok Opname	34 laporan						
							Consulting dan quality assurance pengawasan	6 laporan						
1.20.1.20.11.20.003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %	Laporan monitoring dan evaluasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 laporan	Terpantaunya implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	100 %	Rp. 59.446.000,00	Rp. 140.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 6.094.525.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian										

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 6.094.525.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD										
1.20.1.20.11.20.007	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Depok	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %	Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2015	1 SK Gub	Pedoman Pengawasan 2015	100 %	Rp. 99.542.500,00	Rp. 175.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.20.009	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	5 laporan	Alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab/Kota	100 %	Rp. 121.437.750,00	Rp. 225.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.20.010	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Depok	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %	Informasi dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	4 Kali	Kontrol Temuan Hasil Pengawasan	100 %	Rp. 169.788.500,00	Rp. 175.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.20.011	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %	Informasi dan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	550 temuan	Peningkatan kualitas pengawasan	100 %	Rp. 189.164.000,00	Rp. 450.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.20.012	Pengendalian Manajemen Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %	Laporan Pajak-Pajak Pribadi	5500 PNS Gol III dan IV	Terpantaunya jumlah PNS Gol IV dan III wajib lapor LP2P	100 %	Rp. 30.957.500,00	Rp. 45.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.20.014	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Umbulharjo	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksanaan	30 %	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	40 LHP	Pedoman/Dasar Pengambilan Keputusan atas permasalahan tertentu	100 %	Rp. 376.715.000,00	Rp. 600.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR										Rp. 155.208.750,00	Rp. 240.000.000,00		

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat											Jumlah Pagu : Rp. 6.094.525.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PENGAWASAN													
1.20.1.20.11.21.001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Depok	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	100 %	Penigkatan kapasitas aparat pemeriksa	60 2 Angk	Peningkatan kemampuan aparat pemeriksa	100 %	Rp. 39.322.250,00	Rp. 90.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.21.003	Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis Jabatan Fungsional Auditor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Umbulharjo	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	100 %	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis	50 or	Kenaikan pangkat pemeriksa lancar	100 %	Rp. 42.536.500,00	Rp. 50.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
1.20.1.20.11.21.004	Penggerakan Interitas Mnuju Wilayah Bebas Korupsi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Depok	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	100 %	PNS paham tentang gerakan menuju wilayah bebas korupsi	100 or	Akuntabilitas meningkat	100 %	Rp. 73.350.000,00	Rp. 100.000.000,00	Inspektorat	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.20.1.20.11.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 137.455.000,00	Rp. 160.000.000,00		
1.20.1.20.11.23.001	Penyusunan sistem dan prosedur pengawasan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Pedoman pemeriksaan	200 buku	Terarahnya pelaksanaan pengawasan	100 %	Rp. 37.475.000,00	Rp. 50.000.000,00	Inspektorat	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.11.23.002	Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Inspektorat	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Sistem informasi hasil pengawasan	1 unit	Kemudahan akses informasi hasil pengawasan	100 %	Rp. 99.980.000,00	Rp. 110.000.000,00	Inspektorat	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.12	Badan Kepegawaian Daerah													
1.20.1.20.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 4.246.037.100,00	Rp. 2.411.145.500,00		
1.20.1.20.12.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	paket pengiriman	40 Paket	Mendukung kelancaran surat dinas instansi	100 %	Rp. 5.988.000,00	Rp. 6.450.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							buku cek giro	20 buku						
							materai	50 lembar						
							Perangko	956 lembar						
1.20.1.20.12.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tagihan Telepon, Listrik Air dan Internet Terbayar	12 bulan	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 454.800.000,00	Rp. 500.280.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan dan perlengkapan kantor berfungsi dengan baik	24 jenis	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 104.745.000,00	Rp. 115.219.500,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.01.004	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Biaya general check up untuk eselon II dan III	2267 PNS	PNS/PTT dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, Rekomendasi hasil uji kesehatan bagi PNS yg sakit, Deteksi dini kesehatan PNS	100 %	Rp. 619.690.500,00	Rp. 620.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Biaya uji kesehatan bagi PNS sakit	18 PNS						
							Bantuan biaya perawatan bagi PNS dan PTT yang sakit/kecelakaan karena dinas	8 PNS/PTT						
1.20.1.20.12.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kendaraan roda dua	5 STNK	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 8.510.000,00	Rp. 9.360.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	8 STNK						
1.20.1.20.12.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium tenaga magang, Uang transport tenaga magang dan Premi Asuransi tenaga magang	137 Orang	Terpenuhinya kebutuhan jasa adm. keuangan	100 %	Rp. 2.026.043.200,00	Rp. 41.700.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat				Honorarium PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Penyimpan dan Pengurus Barang, Pengelola Adm. Kepegawaian dan Penyiap Fasilitas Pengembangan Pegawai	16 Orang						
1.20.1.20.12.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Telepon	30 unit	Mendukung kenyamanan kerja pegawai	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Karpet	1.8 m2						
							Halaman dan taman	73.512 m2						
							kaca	20.796 m2						
							Kamar mandi	29 unit						
							lantai keramik	22.86 m2						
							Lantai abu-abu	41.969 m2						
							Kebersihan kantor dan bangunan gedung tempat bekerja terpelihara : Gedung	5 unit						
1.20.1.20.12.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis kantor	94 jenis	Mendukung kelancaran tugas instansi	100 %	Rp. 37.607.000,00	Rp. 38.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penjilidan	70 Jilid	Mendukung kelancaran tugas instansi	100 %	Rp. 79.068.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Penggandaan	38.898 lb						
							Cetakan	20 jenis						
1.20.1.20.12.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia setiap saat	25 jenis	Komponen instalasi listrik mendukung kelengkapan bangunan kantor	100 %	Rp. 9.715.000,00	Rp. 10.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat, bahan kebersihan dan alat rumah tangga	17 jenis	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 8.230.000,00	Rp. 8.800.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Buku perpustakaan	6 jenis	Meningatkan pengetahuan dan wawasan pegawai	100 %	Rp. 10.810.000,00	Rp. 11.890.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Penyampulan buku	300 buku						
							Majalah	1 jenis						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan, langganan surat kabar	2 jenis						
1.20.1.20.12.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan minuman rapat	5190 Orang	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi	100 %	Rp. 51.900.000,00	Rp. 57.090.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Bidang Layanan	6 bidang	Bahan pedoman kebijakan kepegawaian	100 %	Rp. 364.010.000,00	Rp. 395.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.01.020	Pelayanan Taperum PNS Pemerintah DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Sosialisasi Taperum	130 PNS	Terlaksananya pelayanan pengurusan Taperum	100 %	Rp. 37.324.000,00	Rp. 42.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Tersedianya informasi dalam pengurusan Taperum	500 PNS						
1.20.1.20.12.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penjagaan keamanan kantor	9 Orang	Mendukung kenyamanan kerja pegawai	100 %	Rp. 177.596.400,00	Rp. 195.356.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 4.038.384.200,00	Rp. 1.257.862.000,00		
1.20.1.20.12.02.001	Master plan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Masterplan gedung kantor	1 buah	Dukungan peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana kantor	100 %	Rp. 393.244.000,00	Rp. 0,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.02.005	Pegadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 589.834.000,00	Rp. 0,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.02.007	Pegadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Alat pemadam kebakaran	1 set	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 2.069.642.900,00	Rp. 420.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Bendera	4 buah						
1.20.1.20.12.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Mesin ketik	4 unit	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 149.000.000,00	Rp. 163.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Kamera & alat penyimpannya	1 unit						
							LCD	1 unit						
							Laset Jet	4 buah						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Notebook	4 unit						
							PC	6 unit						
1.20.1.20.12.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kursi kerja, kursi rapat, almari	13 buah	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 212.300.000,00	Rp. 250.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan bangunan gedung	3 jenis	Gedung kantor tempat bekerja memadai	100 %	Rp. 341.200.300,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan jaringan air bersih, listrik, telepon	3 jenis						
1.20.1.20.12.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	kendaraan dinas operasional roda 2	5 unit	Kendaraan dinas operasional yang layak dan siap pakai	100 %	Rp. 208.645.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Kendaraan dinas operasional terpelihara roda 4	8 unit						
1.20.1.20.12.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Appar dan CO2	15 Unit (5 Appar, 10 CO2)	Perlengkapan gedung kantor tempat bekerja yang memadai	100 %	Rp. 4.656.000,00	Rp. 5.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Peralatan Gedung Kantor	12 jenis	Mendukung Kelancaran Tugas Kantr	100 %	Rp. 5.620.000,00	Rp. 5.620.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya mebeleur kantor	4 jenis	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 6.200.000,00	Rp. 6.200.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.02.033	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Aktif Dan Arsip In-Aktif/Statis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Termite kontrol ruang arsip kepegawaian	2 ruang	Ruangan dan Dokumen Arsip Kepegawaian Bebas dari Serangan Jamur , Serangga dan Rayap	100 %	Rp. 58.042.000,00	Rp. 58.042.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Fumigasi Ruang Arsip Kepegawaian	2 ruang						
1.20.1.20.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										Rp. 6.465.711.000,00	Rp. 535.600.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.12.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase disiplin aparatur	100 %	Terwujudnya identitas diri PNS dan PTT di Lingkungan Pem.Prov.DIY	7500 Pegawai	Tercapainya rasa kebersamaan, kesatuan dan identitas bagi Pegawai Pemerintah Propinsi DIY	100 %	Rp. 5.903.888.200,00	Rp. 0,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.03.006	Pengembangan Sistem Aplikasi Presensi Online Pemerintah DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase disiplin aparatur	100 %	Pelatihan Sistem Aplikasi Preseni Online	160 Orang	Terolahnya data presensi kehadiran ke dalam suatu sistem informasi	100 %	Rp. 276.766.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Notebook	1 unit						
							Mesin presensi	25 unit						
							Aplikasi sistem informas data kehadiran pegawai	1 Software						
1.20.1.20.12.03.007	Penyelesaian Pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu Bagi PNS DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase disiplin aparatur	100 %	Kartu Identitas PNS	250 Kartu Identitas	Kelengkapan Administrasi Kepegawaian bagi PNS Daerah Istimewa Yogyakarta	100 %	Rp. 24.168.500,00	Rp. 26.600.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.03.008	Pembuatan Kartu Identitas (I D C A R D) PNS dan PTT	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase disiplin aparatur	100 %	Tersedianya Kartu Identitas Diri Sebagai Tanda Pengenal Dalam Melaksanakan Tugas Sehari - Hari Sebagai Abdi Negara dan Pemerintahan	500 Kartu Identitas	Kartu Identitas Diri Sebagai Sarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Sehari - Hari Baik Didalam Koordinasi Intern Maupun Ekstern	100 %	Rp. 169.549.300,00	Rp. 65.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.03.009	Pemeliharaan Mesin Presensi Elektronik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase disiplin aparatur	100 %	Mesin Presensi Elektronik (MPE) dapat berfungsi dengan baik	85 unit	Kelancaran jaringan sistem presensi on line	100 %	Rp. 64.999.000,00	Rp. 115.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.03.010	Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase disiplin aparatur	100 %	Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik oleh BKN	250 kartu	kelancaran pelayanan kepegawaian yang terkait dengan data perorangan pegawai untuk keperluan penggajian, asuransi pensiun, asuransi kesehatan, dan penyediaan perumahan bagi PNS Pemerintah Daerah DIY	100 %	Rp. 26.340.000,00	Rp. 29.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.04	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS										Rp. 161.135.000,00	Rp. 168.160.000,00		
1.20.1.20.12.04.001	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase kelancaran pindah dan purna PNS	100 %	SK Pensiun PNS	40 SK	Kepastian Hukum bagi PNS Pensiun	100 %	Rp. 95.540.000,00	Rp. 96.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.04.003	Pemindahan Tugas PNS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Prosentase kelancaran pindah dan purna PNS	100 %	Keputusan tentang Pindah Tugas PNS Antar Daerah/Lembaga	200 Orang	Tertib Administrasi Kepegawaian dan Kepastian Hukum Perpindahan Tugas PNS	100 %	Rp. 65.595.000,00	Rp. 72.160.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 437.313.500,00	Rp. 468.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.12.05.003	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pemahaman peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian	120 Orang	Peningkatan Pembinaan dan Disiplin PNS	100 %	Rp. 21.312.000,00	Rp. 23.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.05.008	Fasilitasi Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	PNS/Pejabat yang telah mengikuti diklat sesuai jenjang jabatannya	50 Orang	PNS/Pejabat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai jenjang jabatannya	100 %	Rp. 276.001.500,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.05.033	Pengembangan ISO	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Laporan hasil audit mutu eksternal	1 laporan	Meningkatkan mutu layanan	100 %	Rp. 140.000.000,00	Rp. 145.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Dokumen manajemen layanan mutu	1 dokumen						
1.20.1.20.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 113.325.000,00	Rp. 127.400.000,00		
1.20.1.20.12.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Konsep LPPD	1 dokumen	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 7.185.000,00	Rp. 7.400.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Konsep LKPJ	1 dokumen						
							Laporan LAKIP Tahun Anggaran 2014	1 laporan						
							Laporan Tahunan Instansi Tahun 2014 4. Konsep LPPD	1 laporan						
1.20.1.20.12.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	Mendukung Tercapainya Akuntabilitas Keuangan Instansi	100 %	Rp. 27.680.000,00	Rp. 30.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Prognosis	1 laporan						
							Laporan Keuangan Triwulanan	4 laporan						
							Laporan Keuangan Bulanan	12 laporan						
1.20.1.20.12.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Renstra	1 dokumen	Mendukung kelancaran tugas kantor	100 %	Rp. 59.860.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							RKT dan PK	2 dokumen						
							Rencana Kerja SKPD	1 dokumen						
							ROPK	1 dokumen						
							RKA	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							DPA	1 dokumen						
1.20.1.20.12.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Program dan Kegiatan Bulanan	12 bulan	Mendukung kelancaran tugas instansi	100 %	Rp. 18.600.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI										Rp. 27.000.000,00	Rp. 27.000.000,00		
1.20.1.20.12.23.018	Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	50 %	Publikasi data dan informasi SKPD	1 website	Ketersediaan data dan informasi	100 %	Rp. 27.000.000,00	Rp. 27.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp. 27.558.800,00	Rp. 28.000.000,00		
1.20.1.20.12.26.002	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Rancangan peraturan Gubernur di bidang Kepegawaian	1 rancangan pergub	Tersedianya regulasi di bidang Kepegawaian	100 %	Rp. 27.558.800,00	Rp. 28.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.33	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR										Rp. 7.094.338.650,00	Rp. 7.073.991.400,00		
1.20.1.20.12.33.001	Bimbingan Psikologi Bagi PNS Yang Bermasalah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Rekomendasi hasil konseling psikologi,	30 PNS	PNS terbantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi	100 %	Rp. 36.635.000,00	Rp. 40.298.500,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Penyuluhan bimbingan psikologi	100 PNS						
1.20.1.20.12.33.002	Fasilitasi Implementasi Jabatan Fungsional Tertentu	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Sosialisasi, konsinyering, onitoring jabatan fungsional tertentu	3 jenis	Terfasilitasinya pembinaan dan terevaluasinya jabatan fungsional tertentu	100 %	Rp. 74.211.000,00	Rp. 75.320.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.33.007	Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan	83 %	Pengelolaan akses jaringan intranet VPN-IP sebagai penghubung antar server pusat BKN pusat dengan BKD,	3 Jaringan	Kemudahan pelayanan di bidang kepegawaian untuk proses penetapan NIP PNS, kenaikan pangkat dan pensiun	100 %	Rp. 44.273.900,00	Rp. 48.700.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian				PNS secara online					
							Software aplikasi,	1 Software						
							Casing anjungan,	1 buah						
							Komputer	1 unit						
1.20.1.20.12.33.008	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Back up data 7.100 PNS melalui aplikasi transfer data secara realtime antar server utama dan server backup, Laporan Kepegawaian	36 buku	Database kepegawaian yang terjaga keakuratannya melalui akses replikasi antar server yang berjalan realtime dan baik (running well)	100 %	Rp. 311.370.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Statistik PNS Pemda DIY	40 buku						
							Daftar nominatif PNS struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum PEMDA DI	8 buku						
1.20.1.20.12.33.009	Pembekalan PNS Calon Pensiun	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Pembekalan PNS yang memasuki batas usia pensiun (BUP) 1 tahun ke depan	40 Orang	PNS calon pensiun siap mental dan berwirausaha	100 %	Rp. 120.260.000,00	Rp. 130.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Pembekalan PNS yang memasuki batas usia pensiun (BUP) 2 tahun ke depan	36 Orang						
1.20.1.20.12.33.010	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Terwujudnya bantuan tugas belajar,	50 Orang	Terlaksananya seleksi mahasiswa ikatan dinas di IPDN, Terlaksananya tugas belajar/ikatan dinas sesuai jenjang pendidikannya	100 %	Rp. 701.324.000,00	Rp. 750.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Terfasilitasinya seleksi mahasiswa ikatan dinas IPDN dan S2 Spesialis paru-paru	2 seleksi						
1.20.1.20.12.33.011	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Usulan Satyalancana Karya Satya	500 Orang	Penghargaan atas pengabdian PNS	100 %	Rp. 71.053.500,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Penyerahan Satyalancana Karya Satya	400 Orang						
1.20.1.20.12.33.012	Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin Belajar	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Surat Ijin ke Luar Negeri	25 ijin	Kepastian Hukum PNS/Pejabat yang Tugas ke Luar Negeri dan PNS yang menempuh pendidikan dengan biaya sendiri	100 %	Rp. 28.912.500,00	Rp. 31.800.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Surat Ijin/Keterangan Belajar	50 ijin						
1.20.1.20.12.33.013	Penanganan Pegawai Tidak Tetap	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian	83 %	FGD kebutuhan PTT	2 Kali	Kepastian hukum tentang pengangkatan/pemberhentian PTT	100 %	Rp. 33.750.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta															
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			Daerah Meningkatkan		yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian		SK Gubernur tentang pengangkatan/pemberhentian PTT	105 Orang							
1.20.1.20.12.33.014	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Rapat koordinasi (rakor) terpadu kenaikan pangkat	2 Periode	SK kenaikan pangkat benar dan tepat waktu	100 %	Rp. 191.129.000,00	Rp. 195.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							SK Kenaikan pangkat	2000 SK							
1.20.1.20.12.33.015	Penempatan PNS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Keputusan Gubernur ttg pengangkatan pemindahan pemberhentian dan pembebasan sementara dari/ke jabatan struktural, fungsiona tertentu fungsional umum	600 SK	Tertib administrasi kepegawaian dan kepastian hukum bagi PNS dalam jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	100 %	Rp. 392.899.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.12.33.016	Test Psikologi Bagi PNS DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Rekomendasi hasil test psikologi	350 Orang	Bahan pertimbangan pembinaan karier PNS	100 %	Rp. 266.605.000,00	Rp. 275.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.12.33.019	Pengembangan SDM Pengelola Pengukuran dan Assessor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Sertifikat pelatihan calon assessor	7 Orang	Tersedianya tenaga kader assessor dan peningkatan assessor Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	100 %	Rp. 217.610.300,00	Rp. 225.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
							Sertifikat magang calon assessor	2 Orang							
							Sertifikat kursus	8 Orang							
1.20.1.20.12.33.020	Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	100 Orang	Terpantaunya harta kekayaan penyelenggara negara	100 %	Rp. 57.644.100,00	Rp. 63.400.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target	
1.20.1.20.12.33.021	Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Pemerintah Daerah DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Profil Kompetensi Pejabat	144 Orang	Tersedianya Bahan Pertimbangan Pembinaan Karier PNS	100 %	Rp. 653.299.800,00	Rp. 694.214.700,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan	
1.20.1.20.12.33.022	Penilaian Kinerja Aparatur Daerah	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Badan Kepegawaian	Persentase informasi	83 %	Pemahaman penilaian kinerja, penghitungan TPP dan	600 PNS	Penilaian kinerja PNS	100 %	Rp. 228.866.400,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Kepegawaian	Sedang Berjalan	

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan	Daerah	kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian		penilaian prestasi kerja						Daerah	
							Peningkatan kinerja instansi dan aparatur	15 Kali						
1.20.1.20.12.33.023	Peningkatan Kesejahteraan Jasmani	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Pertandingan olah raga futsal, tenis meja, bulutangkis dan catur beregu putra dan beregu putri	4 jenis	Terjaganya kesehatan jasmani dan rohani bagi PNS	100 %	Rp. 261.646.100,00	Rp. 265.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.33.025	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	PNS yang mengikuti seleksi Diklatpim III	100 Orang	PNS/Pejabat memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	100 %	Rp. 273.522.200,00	Rp. 301.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Peserta Diklatpim II	4 Orang						
1.20.1.20.12.33.026	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah	2 surat	Terpenuhinya salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat/golongan dan dan Penyesuaian Ijazah bagi PNS Pemda DIY/Kabupaten/Kota	100 %	Rp. 63.121.400,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.33.027	Penyelesaian Penetapan Hukum Pegawai dan Pejabat Negara	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Surat ijin/Surat keterangan/Dokumen	15 surat	Kelengkapan administrasi izin perkawinan/perceraian, izin mencalonkan Kepala Desa/Perangkat Desa, Pejabat Negara dan Pemberian Cuti PNS	100 %	Rp. 46.712.100,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.33.028	Penyusunan Formasi CPNS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Keputusan Gubernur tentang formasi CPNS/PNS	1 Keputusan	Pengisian formasi yang kosong	100 %	Rp. 74.911.000,00	Rp. 76.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.33.029	Penyusunan Laporan Hasil Analisis Kebutuhan Diklat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Laporan hasil AKD pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY	1 laporan	Pengembangan Kompetensi Melalui Pengikutsertaan PNS pada Diklat	100 %	Rp. 31.984.450,00	Rp. 32.100.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.12.33.031	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin PNS	15 Keputusan	Kepastian hukum bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin	100 %	Rp. 101.847.500,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.33.032	Seleksi Penerimaan CPNS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Pengadaan CPNS	1 rangkaian	Kebutuhan Pegawai Terpenuhi	100 %	Rp. 1.445.866.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
1.20.1.20.12.33.035	Pengangkatan CPNS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Pengangkatan honorer menjadi CPNS	221 Orang	Kebutuhan pegawai terpenuhi	100 %	Rp. 130.978.100,00	Rp. 132.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Pengujian kesehatan CPNS	221 Orang						
							Pengangkatan CPNS menjadi PNS beserta Pengambilan Sumpah/Janji PNS dari CPNS Tenaga Honoror	221 Orang						
1.20.1.20.12.33.052	Promosi Kerjasama Pengukuran Kompetensi Pegawai	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Leaflet	500 lbr leaflet	Terpromosikannya layanan pengukuran Balai Kompetensi Pegawai	100 %	Rp. 161.229.000,00	Rp. 175.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							Promosi Kerjasama Pengukuran Kompetensi Pegawai	1 lokasi						
1.20.1.20.12.33.111	Grand Desain Manajemen Sumber Daya Aparatur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Dokumen	1 dokumen	Kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemda DIY	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kepegawaian Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.12.33.222	Seleksi Penerimaan Tenaga Magang	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Pengadaan Tenaga Magang	1 rangkaian	Kebutuhan Pegawai Terpenuhi	100 %	Rp. 148.886.500,00	Rp. 179.258.200,00	Badan Kepegawaian Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.12.33.333	Penyusunan Pola Karir PNS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Hasil Kajian tentang Pola Karier Pegawai	1 laporan	Tersusunnya pola karier pegawai	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kepegawaian Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
							FGD	2 Kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.20.1.20.12.33.444	Kajian Pengisian Jabatan Secara Terbuka	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Hasil kajian pengisian jabatan secara terbuka di Pemerintah Daerah DIY	1 dokumen	Tersedianya konsep instrumen/pedoman pengisian jabatan secara terbuka	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kepegawaian Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.12.33.555	Pengembangan Alat Ukur Assessment Center	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Alat Ukur Assessment Center (simulasi in basket/in tray)	1 dokumen	Pengembangan alat ukur pada Assessment Center yang valid dan reliable	100 %	Rp. 180.510.000,00	Rp. 183.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.12.33.666	Forum Komunikasi Kepegawaian se-DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Terlaksananya forum kepegawaian se-DIY	1 Kegitatan	Terakomodasinya berbagai masalah kepegawaian se-DIY	100 %	Rp. 91.575.000,00	Rp. 95.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.12.33.777	Bimtek Karakter bagi CPNS Pemda DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Bimtek karakter CPNS	3 angkatan	Terpenuhinya CPNS yang berwawasan budaya lokal	100 %	Rp. 269.190.000,00	Rp. 280.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.12.33.888	Penyusunan Proyeksi Kebutuhan Pegawai	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Laporan proyeksi kebutuhan pegawai dan peta jabatan	2 laporan	Tersedianya perkiraan perubahan komposisi pegawai yang akan pensiun dan rencana promosi serta mutasi untuk mengetahui kemungkinan perubahan posisi pegawai dalam jabatan	100 %	Rp. 67.114.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
							FGD	2 Kali						
1.20.1.20.12.33.999	Monitoring Implementasi Hasil Pengukuran Kompetensi Pegawai	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	83 %	Evaluasi Implementasi Hasil Pengukuran Kompetensi Pegawai	1 dokumen	Tersedianya data implementasi hasil pengukuran kompetensi pegawai	100 %	Rp. 15.401.800,00	Rp. 16.900.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.24	Kearsipan													
1.24.03	Badan Kepegawaian Daerah													
1.24.1.20.03.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN										Rp. 459.624.000,00	Rp. 115.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 23.070.427.250,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.24.1.20.03.15.001	Pembangunan Database Informasi Kearsipan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Scanner	2 unit	Dokumen Arsip Kepegawaian dikelola dengan baik	100 %	Rp. 459.624.000,00	Rp. 115.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah	Sedang Berjalan
							compact rolling serving	2 unit						
							arsip file perorangan	3000 arsip						
							SK kolektif	400 arsip						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.21	Ketahanan Pangan													
1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan													
1.21.1.21.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 585.790.000,00	Rp. 644.550.000,00		
1.21.1.21.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Paket/Pengiriman	1 tahun	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.100.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Pembayaran Belanja Telepon	4 Line telephone	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 193.200.000,00	Rp. 212.500.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Pembayaran Belanja Listrik	4 KWH Meter						
							3. Pembayaran Belanja Internet	2 Saluran						
							4. Pembayaran Belanja Hosting Website	1 tahun						
1.21.1.21.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Biaya STNK Kendaraan Roda 2	14 unit	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 6.140.000,00	Rp. 6.750.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Biaya STNK Kendaraan Roda 4	5 unit						
1.21.1.21.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Honorarium Pengelola Keuangan	5 Orang, 12 Bulan	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 22.500.000,00	Rp. 24.750.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Honorarium Pengguna Barang	2 Orang, 12 Bulan						
							3. Honorarium Pengelola Kepegawaian	2 Orang, 12 Bulan						
							4. Honorarium Pengelola Website	4 Orang, 12 Bulan						
1.21.1.21.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Kebersihan Lantai Teraso	1064 m2	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 74.950.000,00	Rp. 82.450.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Kebersihan Lantai Abu-Abu	5000 m2						
							3. Kebersihan Lantai Keramik	12215 m2						
							4. Kebersihan Kaca	20400 m2						
							5. Kebersihan Kamar Mandi/WC Ka SKPD	48 m2						
							6. Kebersihan Kamar Mandi/WC Biasa	445.2 m2						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							7. Kebersihan Telepon	228 m2						
							8. Kebersihan Taman	2910 m2						
							9. Kebersihan Halaman	17780 m2						
1.21.1.21.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembelian Alat Tulis Kantor	50 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 49.500.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Barang Cetakan	10 macam blanko cetakan	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Barang Penggandaan	92000 lembar						
1.21.1.21.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembelian Alat-Alat Listrik/Penerangan	15 Macam alat listrik	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.500.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Langganan Surat Kabar	7 Eksemplar (12 bulan)	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 14.000.000,00	Rp. 15.500.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Langganan Majalah Penyuluhan	4 Eksemplar (12 bulan)						
							3. Langganan Majalah Trubus	4 Eksemplar (12 bulan)						
							4. Buku Mengenai Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	1 Paket						
1.21.1.21.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan Dan Minuman Jamuan Rapat	2300 os	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 25.000.000,00	Rp. 27.500.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	1 tahun	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 tahun						
1.21.1.21.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Honor Petugas Pembuang Sampah	2 orang (12 bulan)	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 9.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Retribusi Sampah	1 tahun						
1.21.1.21.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.871.062.300,00	Rp. 1.174.500.000,00		
1.21.1.21.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Badan Ketahanan Pangan dan	Prosentase penyediaan dan	100 %	1. Pembelian Kendaraan Pembelian Kendaraan Roda 4 (Operasional)	2 unit	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 496.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkat	Penyuluhan	pemeliharaan sarana prasarana aparatur		2.Pembelian Kendaraan Pembelian Kendaraan Roda 2 (Operasional)	6 unit					dan Penyuluhan	
1.21.1.21.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pembelian Filling Kabinet 4 Laci	5 unit	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 675.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Pembelian Teralis	200 m2						
							3. Pembelian Tabung Pemadam Kebakaran	4 tabung						
							4. Pembelian Gordyn/Vitrage/Rell Alluminium	325 m						
							5. Pengembangan Instalasi Jaringan Internet	1 Paket						
							6. Pembelian Genset	1 unit						
							7. Pembelian AC	2 unit						
1.21.1.21.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pembelian OHP/LCD Projector	1 unit	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 252.562.300,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Pembelian Faximile	1 unit						
							3. Pembelian Komputer/PC	3 unit						
							4. Pembelian Komputer Server	1 unit						
							5. Pembelian Komputer Note Book/Laptop	1 unit						
							6. Pembelian Printer	3 unit						
							7. Pembelian Monitor LCD 19"	3 unit						
							8. Pembelian UPS	3 unit						
							9. Pembelian Kelengkapan Komputer	9 jenis						
							10. Pembelian Speaker Aktif	1 set						
							11. Pembelian Mic Wireless	2 unit						
1.21.1.21.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembelian Mebeleur Ruang Rapat	1 set	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	Penggantian/Pemeliharaan Konblok	73 m2	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		sarana prasarana aparatur								Penyuluhan	
1.21.1.21.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Service Kendaraan Dinas Roda 2	14 unit	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Service Kendaraan Dinas Roda 4	5 unit						
							3. Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2	14 unit						
							4. Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4	5 unit						
							5. BBM Kendaraan Dinas/Pertamax Roda 2	14 unit						
							6. BBM Kendaraan Dinas/Pertamax Roda 4	5 unit						
1.21.1.21.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Penggantian Serbuk Tabung TBK	2 unit	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 4.500.000,00	Rp. 5.500.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Service AC Split	16 unit						
							3. Isi Freon AC Split	3 unit						
1.21.1.21.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	87 unit	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 18.000.000,00	Rp. 19.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 42.000.000,00	Rp. 46.000.000,00		
1.21.1.21.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK	20 Orang, 1 hari, 1 dokumen	Meningkatnya Pemahaman Jabatan Fungsional Tertentu Dalam Penyusunan DUPAK	100 %	Rp. 18.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.05.005	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	DUPAK	6 dokumen	Hasil Penilaian DUPAK Berupa HAPAK Atau PAK	6 dokumen	Rp. 24.000.000,00	Rp. 26.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 202.000.000,00	Rp. 186.000.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.21.1.21.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. LAKIP	1 laporan	Tersedianya laporan kinerja SKPD (LAKIP, RKT, PK)	100 %	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. RKT	1 laporan						
							3. PK	1 laporan						
1.21.1.21.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Prognosis realisasi anggaran	1 laporan	Tersedianya laporan keuangan	100 %	Rp. 8.000.000,00	Rp. 9.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Keuangan semesteran	1 laporan						
							3. Keuangan akhir tahun	1 laporan						
1.21.1.21.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data Dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Workshop Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	80 Orang, 1 hari	Tersedianya RKA DPA-SKPD tahun 2016, tersosialisasinya program & kegiatan sebagai acuan pembangunan ketahanan pangan & penyuluhan, tersusunnya buku database, terkelolanya website BKPP	100 %	Rp. 165.000.000,00	Rp. 146.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Sosialisasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan	80 Orang, 1 hari						
							3. Penyusunan Database Ketahanan Pangan & Penyuluhan	30 Buku Database						
							4. Pengelolaan website	2 Orang, 20 hari, 10 bulan						
1.21.1.21.01.06.019	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Workshop hasil monitoring, evaluasi, & pelaporan	70 Orang, 1 hari	Meningkatnya pengawasan & pengendalian pelaksanaan kegiatan	100 %	Rp. 23.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Evaluasi bulanan	12 laporan						
							3. Evaluasi triwulan	4 laporan						
							4. Evaluasi tahunan	1 laporan						
1.21.1.21.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN										Rp. 1.132.000.000,00	Rp. 900.000.000,00		
1.21.1.21.01.15.006	Peningkatan Kompetensi Dan Keprofesian Tenaga	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat	Badan Ketahanan	Peningkatan kapasitas	74 %	1. Penilaian penyuluh teladan	3 Orang	Mendukung peningkatan kualitas penyuluh dan	18 %	Rp. 600.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Badan Ketahanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyuluh		Meningkat	Pangan dan Penyuluhan	penyuluh				terpilihnya penyuluh, petani, penyuluh swadaya, gapoktan, lembaga ekonomi petani, THL-TBPP dan BP3K berprestasi serta penyuluh perikanan teladan				Pangan dan Penyuluhan	
							2. Penilaian petani berprestasi	30 Orang						
							3. Penilaian Penyuluh Swadaya berprestasi	30 Orang						
							4. Penilaian gapoktan berprestasi	30 Gapoktan						
							5. Penilaian Lembaga Ekonomi Petani berprestasi	30 lembaga						
							6. Penilaian THL TBPP berprestasi	30 Orang						
							7. Penilaian BPP	56 BPP						
							8. Penilaian penyuluh perikanan teladan	30 Orang						
							9. Temu Tugas Penyuluh	1 Paket						
							10. Pembuatan profil BPP	56 BPP						
							11. Penilaian kelas BPP	1 Paket						
							12. Lomba Lantip Trengginas	1 Paket						
							13. Pelatihan penyuluh swadaya	30 Orang,1 hari						
1.21.1.21.01.15.010	Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	74 %	1. Updating data penyuluh swadaya	1 dokumen	Mendukung peningkatan kualitas penyuluh	3 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Pembinaan penyuluh swadaya	5 Kab / Kota di DIY						
							3. Temu teknis penyuluh swadaya	50 Orang, 1 hari						
1.21.1.21.01.15.011	Penyusunan Program Penyuluhan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Peningkatan kapasitas penyuluh	74 %	1.Workshop Penyusunan Programa Penyuluhan	50 Orang, 1 hari, 1 dokumen	Dokumen programa penyuluhan th. 2015 sebagai acuan penyelenggaraan penyuluhan th 2016	3 %	Rp. 37.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Sosialisasi Programa Penyuluhan	60 Orang, 1 hari						
							3. Evaluasi Programa Penyuluhan	30 Orang, 1 hari						
1.21.1.21.01.15.014	Pengembangan Dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan	Peningkatan kapasitas penyuluh	74 %	1. Apresiasi Kelembagaan Penyuluhan	60 Orang,1 hari	Menguatnya kelembagaan penyuluhan dan peningkatan kualitas	75 %	Rp. 425.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Penyuluhan					kelembagaan pelaku utama/usaha				dan Penyuluhan	
							2. Workshop Problem Solving Kelembagaan Penyuluhan	40 Orang,1 hari						
							3. Penilaian Klas Kelompok	30 kelompok						
							4. Lomba Lantip Trengginas	1 Paket						
							5. Kajian Peran Penyuluh dim Ketahanan Pangan	1 Paket						
							6. GEMPITA	1 Paket						
							7. Pembinaan Poktan/Pokdakan & Gapoktan/Gapokdakan	50 kelompok						
							8. Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan	56 BPP						
							9. Monitoring & Evaluasi Kelembagaan Penyuluhan	56 BPP						
							10. Temu Teknis Kelembagaan Penyuluhan	60 Orang, 1 hari						
1.21.1.21.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN										Rp. 3.120.000.000,00	Rp. 3.420.000.000,00		
1.21.1.21.01.17.001	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Jumlah desa pangan	53 Desa	1. Rakerda DKP	80 Orang, 1 hari, 1 laporan	Dokumen rumusan kebijakan/rekomendasi	2 %	Rp. 230.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Supervisi/kunker DKP	5 Kab / Kota di DIY						
							3. Workshop evaluasi kinerja DKP	60 lembaga, 1 hari, 1 laporan						
							4. Workshop evaluasi program 8 desa percontohan	80 Orang, 1 hari, 1 laporan						
							5. Kajian Ketahanan Pangan sebagai suatu Sistem	1 dokumen						
							6. Pelaksanaan APN	1 Paket						
1.21.1.21.01.17.002	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Banguntapan Kasihan Kokap Prambanan Samigaluh Semanu Semin Seyegan	Jumlah desa pangan	53 Desa	1. Pemberian motivasi pengentasan kemiskinan	80 Orang, 1 hari, 1 laporan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Percontohan dan Meningkatnya Penanganan di Daerah Rawan Pangan	5 %	Rp. 2.740.000.000,00	Rp. 3.200.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Pelatihan olahan pangan bergizi tinggi hasil penelitian	30 Orang, 1 hari, 1 laporan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan										Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Jagalan Tamantirto Hargorejo Wukir Harjo Pagerharjo Dadapayu Pundung Sari Margoagung										
							3. FGD tentang penanganan 8 Desa Percontohan	80 Orang, 1 hari, 1 dokumen						
							4. Gerakan optimalisasi potensi desa di Desa Percontohan	7 Desa						
							5. Pembinaan demapan di Desa Percontohan	5 kelompok						
							6. Gerakan kemandirian penyediaan & konsumsi protein hewani di Desa Percontohan	1 Desa						
							7. Pembinaan desa mandiri protein hewani di Desa Percontohan	1 kelompok						
							8. Pemberdayaan kelompok Lumbung Pangan di Desa Percontohan	2 kelompok						
							9. Pembangunan fisik Lumbung Pangan di Desa Percontohan	2 kelompok						
							10. Pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Mandiri Pangan	30 kelompok						
							11. Koordinasi & sinkronisasi penguatan ketahanan pangan di sekitar kawasan hutan ml kegiatan pertanian & perikanan	1 tahun						
							12. Pendampingan pengembangan dana dari AgFund	1 tahun						
							13. Lomba Demapan	1 Paket						
							14. Bimtek & Magang kelompok afinitas ke Jatim	1 Paket						
1.21.1.21.01.17.003	Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerawanana Pangan Berbasis FSVA	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Jumlah desa pangan	53 Desa	1. Bimtek penyusunan buku peta FSVA	30 Orang, 1 hari, 1 laporan	Tersedianya data ketahanan & ketentanan pangan	2 %	Rp. 80.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Workshop hasil penyusunan FSVA	30 Orang, 1 hari, 1 laporan						
							3. Pengumpulan & analisis data FSVA	1 laporan						
							4. Penyusunan peta FSVA Tk. Provinsi	45 Buku peta FSVA						
							5. Apresiasi penyusunan peta FSVA Tk. Kabupaten	40 Orang, 1 hari						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							6. Penyusunan peta FSVA Tk. Kabupaten	4 Kabupaten di DIY						
1.21.1.21.01.17.004	PenyusunanSKPG	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Jumlah desa pangan	53 Desa	1. Terlaksananya sosialisasi Pedum/Juklak SKPG	30 Orang, 1 hari	Tersedianya data analisis rawan pangan per triwulan serta data penyusunan peta daerah rawan pangan	2 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya diseminasi hasil analisis & pengolahan data SKPG per triwulan	30 Orang, 4 kali						
							3. Terlaksananya diseminasi hasil analisis & pengolahan data penyusunan peta SKPG	30 Orang, 1 hari						
1.21.1.21.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN										Rp. 1.231.000.000,00	Rp. 1.140.000.000,00		
1.21.1.21.01.18.001	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Ketersediaan dan cadangan pangan	360 ton	1. Buku NBM 2014 sementara	70 buku	Perencanaan pangan lebih efektif dan efisien berdasarkan data NBM	2 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Buku NBM 2014 tetap	70 buku						
1.21.1.21.01.18.002	Penguatan Cadangan Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Ketersediaan dan cadangan pangan	360 ton	1. Pemberdayaan KWT & kelompok lumbung pangan	8 kelompok	Peningkatan pemahaman & informasi tentang penguatan cadangan pangan serta lumbung pangan & penguatan kelembagaan lumbung pangan	100 %	Rp. 956.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya informasi cadangan pangan	6 buku laporan cadangan pangan						
							3. Peningkatan cadangan pangan pemerintah	50750 kg beras						
1.21.1.21.01.18.003	Analisis Ketersediaan Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Ketersediaan dan cadangan pangan	360 ton	1. Buku analisis ketersediaan pangan berdasarkan angka ramalan komoditas jagung & ubi kayu	3 buku	Acuan kebijakan penyediaan pakan ternak & perbaikan perhitungan NBM	5 %	Rp. 155.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Buku data ketersediaan pangan HBKN	3 buku						
							3. Buku kajian kebutuhan pemanfaatan pakan	1 buku						
1.21.1.21.01.18.004	Penyusunan Ketersediaan Dan Kebutuhan Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Ketersediaan dan cadangan pangan	360 ton	Peningkatan pengetahuan & kemampuan petugas	35 Orang	Petugas Kab/Kota dpt menyusun buku NBM, analisis pola panen bulanan & HBKN	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.21.1.21.01.19	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN*										Rp. 1.694.000.000,00	Rp. 1.570.000.000,00		
1.21.1.21.01.19.001	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Berimbang Dan Aman	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Terlaksananya Gerakan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman	5 Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pola pangan yg beragam, bergizi, berimbang, & aman	4 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 155.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.19.002	Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	1.Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal melalui Pameran HPS	1 Kali	Peningkatan promosi & publikasi produk pangan lokal DIY	19 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Lomba Cipta Menu Pangan Lokal	1 Kali						
							3. Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal melalui Gera! Pusat Informasi Pangan Lokal	1 tahun						
1.21.1.21.01.19.003	Pengembangan Diversifikasi Produk Antara	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Terlaksananya Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul	2 UKM	Peningkatan pengetahuan & keterampilan masyarakat dalam mengembangkan produk antara menjadi produk pangan pokok lokal	5 %	Rp. 119.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.19.004	Penanganan Keamanan Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	1. Workshop SKPT	50 Orang, 1 hari, 1 laporan	Menurunnya penggunaan BTP berbahaya (pd produk olahan), cemaran residu pestisida, logam berat, mikroba (pd produk segar), tersedianya data analisis keamanan pangan segar & olahan, tersosialisasikannya Perda Penjaminan Mutu	4 %	Rp. 375.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Workshop Hasil Analisis Pemantauan Keamanan Pangan	50 Orang, 1 hari, 1 laporan						
							3. Sosialisasi Perda Penjaminan Mutu Keamanan Pangan (dalam daerah)	50 Orang, 1 hari, 5 kab/kota						
							4. Sosialisasi Perda Penjaminan Mutu Keamanan Pangan (luar daerah)	5 provinsi						
							5. Sosialisasi pasar sehat, kantin sehat, dan desa sehat	5 Kab / Kota di DIY						
							6. Pengawasan PSAT yang beredar	5 Kab / Kota di DIY						
							7. Pengadaan Rapid Test Kit	1 Paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.21.1.21.01.19.005	Pengembangan Kelembagaan OKKPD	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	1. Workshop audit internal lembaga OKKPD DIY	30 Orang, 1 hari, 1 laporan	Mengetahui perkembangan manajemen OKKPD, menyesuaikan pelaksanaan sertifikasi pangan segar dgn pedoman doksistu, peningkatan kinerja manajemen OKKPD DIY secara berkesinambungan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Workshop kaji ulang manajemen lembaga OKKPD DIY	30 Orang, 1 hari, 1 laporan						
							3. Diseminasi doksistu OKKPD DIY	30 Orang, 1 hari, 1 laporan						
1.21.1.21.01.19.006	Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	1. Terlaksananya sosialisasi dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan	5 Kabupaten/Kota di DIY	Pemanfaatan pekarangan di Kelompok Wanita Tani	5 %	Rp. 130.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Pembinaan kegiatan Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan	2 Kabupaten di DIY						
1.21.1.21.01.19.007	Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	1. Diseminasi Sertifikasi Prima, Registrasi PSAT/PD, & Survailen	40 Orang, 1 hari, 1 laporan	Tersertifikasi/teregistrasinya produk pertanian segar asal tumbuhan (15 Prima, 10 PSAT/PD, 10 Survailen)	100 %	Rp. 405.000.000,00	Rp. 305.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Diseminasi Keputusan Survailen	30 Orang, 3 hari, 1 laporan						
							3. Diseminasi Keputusan Sertifikasi Prima & Registrasi PSAT	30 Orang, 3 hari, 1 laporan						
							4. Sertifikasi Prima, Registrasi PSAT, & Survailen	35 Sertifikat Prima dan atau Nomor PSAT/PD						
							5. Fasilitasi MEA	1 Paket						
1.21.1.21.01.19.008	Fasilitasi Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	1. Diseminasi produk bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal	40 Orang, 8 hari, 1 kali	Menurunnya penggunaan BTP berbahaya pd produk pangan olahan di pelaku usaha bersertifikat P-IRT berbasis pangan lokal	5 %	Rp. 225.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Workshop hasil pengembangan produk bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal	40 Orang, 1 hari, 1 kali						
							3. Pengembangan kelompok bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal	10 kelompok pangan olahan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.21.1.21.01.19.009	Penyusunan PPH	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	Terlaksananya penyusunan skor PPH	1 Kali setahun	Tersusunnya skor PPH DIY 2014	7 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
1.21.1.21.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN										Rp. 1.560.000.000,00	Rp. 1.620.000.000,00		
1.21.1.21.01.20.001	Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %	1. Sosialisasi kelembagaan akses pangan	240 Orang	Peningkatan kemampuan gapoktan akses pangan di daerah rawan pangan	25 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Workshop akses pangan (penumbuhan, pengembangan, kemandirian)	120 Orang						
							3. Peningkatan kapasitas kelembagaan akses pangan	60 Orang						
							4. Pengembangan kelembagaan akses pangan	9 kelompok						
1.21.1.21.01.20.002	Analisis Distribusi Dan Harga Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %	1. Sosialisasi harga pangan	30 Orang, 1 hari	Informasi perkembangan data distribusi & harga pangan selalu terpantau	0 %	Rp. 110.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Informasi media elektronik	2 Kali						
1.21.1.21.01.20.003	Pemberdayaan Dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %	1. Sosialisasi LDPM	140 Orang	Peningkatan pengelolaan LDPM dengan baik dan produktif	2 %	Rp. 415.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Apresiasi peningkatan kapasitas LDPM	140 Orang						
							3. Pengembangan Gapoktan pra penumbuhan	8 Gapoktan						
1.21.1.21.01.20.004	Analisis Pasokan Dan Akses Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100 %	1. Sosialisasi pasokan dan akses pangan	25 Orang, 1 hari	Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan di daerah	5 %	Rp. 135.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Sedang Berjalan
							2. Apresiasi pasokan dan akses pangan	25 Orang, 1 hari						
							3. Data hasil pemantauan pasokan dan akses pangan	2 Macam data pasokan & akses pangan						
1.21.1.21.01.20.005	Pengembangan/Pengadaan Software Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga	100 %	1. FGD pengembangan software simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan	1 Paket	Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan di daerah	5 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	Badan Ketahanan Pangan dan	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan											Jumlah Pagu : Rp. 11.437.852.300,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					dan akses pangan		2. Software simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan	1 Paket					Penyuluhan	

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.24	Kearsipan													
1.24.01	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah													
1.24.1.26.01.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN										Rp. 2.617.000.000,00	Rp. 2.986.588.000,00		
1.24.1.26.01.15.012	Pengkajian dan Pengembangan Bidang Kearsipan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	1. Kajian kesiapan penyusutan SKPD 2. Kajian Perda Kearsipan DIY	4 dokumen	Kesiapan penyusutan SKPD dan tingkat kebutuhan adanya Perda Kearsipan DIY dapat diketahui.	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.15.015	Penyusunan Pedoman Kearsipan Dinamis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	1. Pedoman Penilaian Arsip 2. Pedoman Tata Kearsipan di lingkungan DIY	2 pedoman	DIY memiliki pedoman-pedoman teknis kearsipan	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.15.029	Pengelolaan Arsip Statis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Pengelolaan arsip tekstual dan arsip foto	2 Berkas	Meningkatnya layanan arsip	100 %	Rp. 212.000.000,00	Rp. 233.200.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.15.030	Penilaian dan Penyusutan Arsip	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Pelaksanaa Penilaian dan Penyusutan Arsip Pemda DIY	15000 nomor berkas	Arsip bernilai guna teridentifikasi	100 %	Rp. 210.000.000,00	Rp. 231.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.15.031	Sosialisasi Pedoman Kearsipan Dinamis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Pelaksanaan sosialisasi 2 pedoman, 3 kali	35 Orang	SKPD mengetahui adanya pedoman-pedoman kearsipan dinamis	100 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 38.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.15.032	Pengelolaan Arsip Dinamis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	1. arsip tekstual 2. arsip foto 3. arsip kartografi	7000 berkas, 1000 berkas, 2000 berkas	Arsip inaktif teridentifikasi dan mudah dalam penelusurannya	100 %	Rp. 120.000.000,00	Rp. 132.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.15.033	Pengembangan Program Arsip Vital	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Arsip Vital SKPD DIY terlindungi dengan baik	5 Instansi	Terwujudnya 5 desain perlindungan	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.15.034	Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Dinamis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	1. Raker Bidang Kearsipan Dinamis 2. Pembinaan dan Monitoring SKPD DIY 3.	80 instansi, 5 LKD, 85 orang	Program-program kearsipan semakin baik, kualitas sdm kearsipan semakin	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 425.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat				Pembinaan dan Monitoring LKD Kab./Kota 4. Bimtek Kearsipan SKPD dan LKD Kab./Kota		meningkat					
1.24.1.26.01.15.035	Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Statis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Bimbingan teknis pengolahan	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan teknis dalam mengolah arsip media baru	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.15.036	Penyusunan Pedoman Kearsipan Statis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang pedoman pengelolaan arsip statis	1 Pergub	Dokumen pedoman pengelolaan arsip statis	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.15.037	Penyusunan Profil Kearsipan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Profil Kearsipan DIY	1 dokumen	DIY memiliki profil di bidang kearsipan	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.24.1.26.01.15.038	Penyusunan Profil BPAD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Profil Lembaga BPAD	1 dokumen	BPAD memiliki profil kelembagaan	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.24.1.26.01.15.039	Pengembanga Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	20 SOPD	Terwujudnya SIKD DIY Tahap I	1 Paket	layanan arsip dinamis meningkat	100 %	Rp. 1.100.000.000,00	Rp. 1.288.888.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.24.1.26.01.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH*										Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.320.000.000,00		
1.24.1.26.01.16.001	Perawatan dan Pemeliharaan Arsip Statis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya khsanah arsip sebagai warisan budaya	11 %	1. Restorasi arsip 2. Laminasi arsip 3. Kamperisasi arsip 4. Fumigasi arsip 5. Pembersihan arsip 6. Recleaning arsip video 7. Termit control	7 Paket	Terselamatkannya fisik dan informasi arsip	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 192.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.16.006	Alih Media Arsip Statis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya khsanah arsip sebagai warisan budaya	11 %	Terdokumentasikannya arsip tekstual dan arsip foto ke dalah CD	7500 lembar	Tersedianya back up arsip tekstual dan arsip foto ke dalam CD sehingga usia simpan arsip lebih panjang	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 770.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.16.021	Pelestarian Arsip Seni Budaya Masyarakat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Badan Perpustakaan dan Arsip	Bertambahnya khsanah arsip sebagai	11 %	Dokumen arsip seni budaya desa se DIY	1 Paket	Terdokumentasikannya arsip seni budaya desa DIY	100 %	Rp. 325.000.000,00	Rp. 357.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	Daerah	warisan budaya								Daerah	
1.24.1.26.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI										Rp. 6.942.000.000,00	Rp. 42.119.850.000,00		
1.24.1.26.01.18.001	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	1. Buku naskah sumber 2. FGD penyusunan buku 2 kali 3. Peluncuran buku naskah sumber arsip 2 kali	2 judul, 50 orang, 100 orang	Jumlah pengguna arsip meningkat	100 %	Rp. 135.000.000,00	Rp. 148.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.005	Lomba Bidang Kearsipan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	1. Lomba Arsiparis berprestasi tingkat DIY 2. Lomba Petugas Arsip terbaik di lingkungan Pemda DIY 3. Lomba Tata Kearsipan SKPD di lingkungan Pemda DIY	3 Paket	1. Arsiparis berprestasi DIY 2. Petugas Arsip terbaik di lingkungan Pemda DIY 3. SKPD pengelola arsip terbaik di lingkungan Pemda DIY	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 84.150.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.012	Pengembangan Khasanah Arsip Digital	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Bertambahnya khasanah arsip digital statis untuk peningkatan kualitas layanan informasi	75 lembar	Tersedianya khasanah arsip statis digital	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.013	Promosi dan Sosialisasi Kearsipan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	1. pameran arsip 2. penyebaran informasi melalui media massa	2 kali pameran, 4 kali tayang radio, 2 kali tayang t	jumlah pengguna arsip meningkat	100 %	Rp. 260.000.000,00	Rp. 286.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.014	Alih Tulisan Arsip Beraksara Jawa dan Alih Bahasa Arsip Berbahasa Jawa/Asing	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Tersusunnya : 1. alih tulisan arsip berhuruf latin 2. alih bahasa arsip berbahasa Jawa ke Indonesia 3. alih bahasa arsip bernahasa Belanda ke Indonesia	750 lembar, 475 lembar, 250 lembar	tersusunnya : 1 buku alih tulisan 1 buku alih bahasa	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.019	Peningkatan Layanan Arsip Statis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	1. Layanan arsip statis 2. Pemasarakatan arsip statis 3. Verifikasi data layanan arsip 4. Entry data layanan arsip statis	150 pengguna	Meningkatnya layanan arsip statis	100 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 137.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.020	Penyusunan Inventaris Arsip Statis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Daftar Inventaris Arsip Statis	1 Daftar Inventaris	DIY memiliki Daftar Inventaris Arsip Statis yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan arsip	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.024	Pengembangan Mitra Kerja Bidang Kearsipan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Badan Perpustakaan dan Arsip	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai	20 %	Forum Masyarakat Kearsipan	1 Kali	Kompetensi Arsiparis meningkat	100 %	Rp. 35.000.000,00	Rp. 38.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Daerah Meningkatkan	Daerah	sumber informasi								Daerah	
1.24.1.26.01.18.025	Perekaman Sejarah Lisan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Tersusunnya video rekaman hasil wawancara tokoh pelaku sejarah untuk mengisi kekurangan informasi yang tidak terungkap	1 wawancara	Tersusunnya satu vidio sejarah lisan	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.026	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	1. penilaian angka kredit arsiparis 2. sosialisasi Permenpan kepada Tim	2 Kali	kenaikan pangkat dan jabatan arsiparis lancar, revisi Permenpan tersosialisasi	100 %	Rp. 42.000.000,00	Rp. 46.200.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.028	Pembangunan Depo/Gedung Arsip	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Pembangunan Tahap I (Struktur)	1 Paket	Struktur bangunan Depo Arsip terwujud	15 %	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 40.000.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.029	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	1. Pengembangan aplikasi jaringan koneksi dengan kabupaten/kota 2. Aktivasi dan lisensi Kab/Kota untuk Kantor Arsip 3. Integrasi database untuk arsip Kabupaten/ Kota 4. Input data 5. Pembangunan infrastruktur jaringan	5 Paket	Meningkatnya layanan informasi	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 770.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.044	Pemasangan Jaringan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	pemasangan jaringan di TRM 1 dan TRM 4	2 Paket	kebutuhan daya listrik terpenuhi	100 %	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18.045	Rehab sedang berat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	pembangunan tempat parkir	1 Paket	kendaraan pegawai aman	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26	Perpustakaan													
1.26.01	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah													
1.26.1.26.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 3.411.400.000,00	Rp. 2.997.770.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.26.1.26.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2 jenis materi 2 jenis perangkat 1 tahun paket pengiriman	1 Paket	Administrasi dan surat-menysurat lancar	100 %	Rp. 7.500.000,00	Rp. 8.250.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.01.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Perizinan kendaraan dinas/operasional roda 2	8 unit	Kendaraan dinas/operasional siap untuk dipergunakan	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Perizinan kendaraan dinas/operasional 4	15 unit						
1.26.1.26.01.01.003	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Koran/Harian Umum Peraturan dan Perundang-undangan baru	5 Koran/Harian Umum, peraturan perundangan	perkembangan informasi dan peraturan perundangan diketahui oleh para pegawai	100 %	Rp. 6.750.000,00	Rp. 4.400.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium Pengelola Kepagawaian	3 Orang	Administrasi keuangan berjalan lancar	100 %	Rp. 44.400.000,00	Rp. 46.200.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Honorarium Pengelola Barang/Aset	3 Orang						
							Honor Pengelola Keuangan	10 Orang						
1.26.1.26.01.01.005	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	Kebutuhan ATK terpenuhi, pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	100 %	Rp. 44.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.01.006	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pengadaan peralatan kerumah tanggaan	20 jenis	urusan kerumahtanggan berjalan lancar	100 %	Rp. 5.250.000,00	Rp. 14.300.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	fotocopi	1 Paket	Tersedianya barang cetakan dan terpuhinya kebutuhan penggandaan	100 %	Rp. 30.500.000,00	Rp. 37.400.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Pengadaan barang cetakan	8 jenis						
1.26.1.26.01.01.008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan komponen instalasi listrik	35 macam	Tersedianya komponen instalasi listrik	100 %	Rp. 55.000.000,00	Rp. 60.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.01.009	Pemeliharaan Jaminan Kesehatan PNS	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pemeriksaan kesehatan pegawai dengan tingkat resiko gangguan kesehatan tinggi (pengelola arsip dan bahan pustaka)	90 Orang	Resiko gangguan kesehatan terdeteksi sejak dini	100 %	Rp. 32.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.26.1.26.01.01.010	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan ekstra fooding bagi pns	90 Orang	Stamina pns lebih terjamin	100 %	Rp. 225.000.000,00	Rp. 247.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.01.011	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Fasilitasi kegiatan rapat dan koordinasi ke luar daerah	1 tahun	Rapat dan Koordinasi ke luar daerah dapat berjalan lancar	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.01.012	Penyediaan Jasa Keamanan/Gedung Kantor/Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Petugas Keamanan Kantor di 6 Unit (lokasi)	21 Orang	Keamanan kantor terjamin	100 %	Rp. 510.000.000,00	Rp. 562.320.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.01.013	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Petugas kebersihan di 6 Unit (lokasi)	1 tahun	Kebersihan kantor terjaga dengan baik	100 %	Rp. 686.000.000,00	Rp. 75.400.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.01.014	Penyediaan Jasa KOMunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan Jasa Air	2 titik	Ketersediaan kebutuhan komunikasi, air, dan listrik terjamin	100 %	Rp. 1.450.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Penyediaan Jasa Listrik	8 titik						
							Penyediaan Jasa internet	6 titik						
							Penyediaan Jasa Komunikasi telpon	9 titik						
1.26.1.26.01.01.015	Penanganan Arsip Dinamis SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penanganan arsip dinamis BPAD	1 Daftar Arsip Inaktif	Arsip terkelola dengan baik dan mudah ditemukan	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.450.450.000,00	Rp. 1.628.495.000,00		
1.26.1.26.01.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan mebelair kantor	10 jenis	Mebelair kantor berfungsi maksimal	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.02.002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	Standing AC	2 unit	Peralatan gedung kantor siap digunakan setiap saat	100 %	Rp. 75.450.000,00	Rp. 82.995.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Exhaust fan	15 unit						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		sarana prasarana aparatur									
							AC split	60 unit						
							Pemeliharaan tabung pemadam kebakaran	25 unit						
1.26.1.26.01.02.003	Pemeliharaan Jaringan Telpn dan Air	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan jaringan air	2 titik	Jaringa telpon dan air terpelihara dengan baik	100 %	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan jaringan telpon	9 titik						
1.26.1.26.01.02.004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	23 jenis	Peralatan gedung kator siap digunakan setiap saat	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.02.005	Pengembangan Teknologi Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengelolaan WEB BPAD DIY	1 tahun	Kelancaran Informasi bagi masyarakat	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 143.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.02.006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan / pearwatan kendaraan dinas/operasional roda 2	8 unit	Kendaraan dinas/operasional siap digunakan setiap saat	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Pemeliharaan / pearwatan kendaraan dinas/operasional roda 4	15 unit						
1.26.1.26.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	1 Paket	Kebutuhan perlengkapan dan pearalatan kantor terpenuhi	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.02.008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan gedung kantor	5 unit/lokasi	Gedung kantor terpelihara dengan baik	100 %	Rp. 600.000.000,00	Rp. 660.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA										Rp. 405.000.000,00	Rp. 445.500.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	APARATUR													
1.26.1.26.01.05.001	Inventarisasi, Integrasi dan Pengelolaan Barang	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Daftar inventaris barang/aset	1 dokumen	Barang inventaris/aset terdata dengan baik	100 %	Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.05.002	Bimtek Penatausahaan Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	PPTK dan Staf mampu mengelola keuangan kegiatan dengan baik	40 Orang	Pengelolaan Keuangan BPAD semakin baik	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.05.003	Bimtek Penyusunan KAK dan Anggaran Kegiatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	PPTK dan staf mampu menyusun KAK dan Anggaran Kegiatan dengan baik	40 Orang	Kualitas perencanaan kegiatan lebih baik	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.05.004	Bimtek Kearsipan dan Perpustakaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pejabat Struktural dan staf pengelola arsip dan bahan dapat mengelola arsip dan bahan pustaka dengan baik	80 Orang	Arsip dan bahan pustaka terkelola dengan baik	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.05.005	Pengembangan Kualitas SDM	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Kursus-kursus dan kegiatan pengembangan kapasitas dan potensi diri bagi pegawai	140 Orang	Kualitas sdm meningkat	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 192.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 201.150.000,00	Rp. 223.100.000,00		
1.26.1.26.01.06.001	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Tahunan	1 tahun	Laporan keuangan bisa didapatkan sewaktu-waktu dibutuhkan	100 %	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Laporan Semester/Prognosi	1 tahun						
							Laporan Fungsional	1 tahun						
1.26.1.26.01.06.002	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian	100 %	Konsep LPPD	1 dokemen	Peningkatan capaian kinerja kegiatan	100 %	Rp. 11.000.000,00	Rp. 12.100.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Konsep LKPJ	1 dokumen						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
							Laporan Tahunan Tahunan 2014	1 dokumen						
							LAKIP Tahun 2014	1 dokumen						
1.26.1.26.01.06.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Exsose Hasil Monitoring 2 kali	30 Orang	Kelancaran pelaksanaan kegiatan	100 %	Rp. 30.150.000,00	Rp. 35.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan BPAD	1 tahun						
1.26.1.26.01.06.004	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data Teknologi Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Pengembangan Data dan Informasi	1 Paket	Kelancaran pelaksanaan kegiatan	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Dokumen perencanaan	4 dokumen						
1.26.1.26.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN*										Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 0,00		
1.26.1.26.01.15.001	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan fasilitas perpustakaan	85 %	Penataan Kawasan/landscape Pengadaan interior	100 %	Gedung perpustakaan siap operasional/ dimanfaatkan	100 %	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.16	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN*										Rp. 4.450.000.000,00	Rp. 4.595.444.000,00		
1.26.1.26.01.16.002	Pengelolaan Bahan Pustaka	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	1. Bahan pustaka yang sudah terolah 2. Sarana pendukung	10 tahun, 1 paket	Bahan pustaka siap layan	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.16.004	Penerbitan Bibliografi Daerah DIY, KID DIY dan Accession List	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	1. Bibliografi daerah 2. KID DIY 3. Acession list 4. Abstraksi koleksi jogjasiana	4 kali terbit, 2 kali terbit, 1 kali terbit, 1 k	Bertambahnya alat penelusuran bahan pustaka dan publikasi	100 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.16.005	Pemantau, Pencarian dan Penggunaan	Ilmu Pengetahuan	Melek Huruf Masyarakat	Badan Perpustakaan	Persentase peningkatan	80 %	1. Pemantauan penerbit 2. Rak buku	11 penerbit, 5 buah	Meningkatnya pemahaman terhadap	100 %	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Badan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Karya Cetak dan Karya Rekam	dan Teknologi	Meningkat	dan Arsip Daerah	jumlah perpustakaan Desa		besi muka 2		Perda DIY No 12 tahun 2005 serta meningkatnya koleksi dan layanan deposit				dan Arsip Daerah	
1.26.1.26.01.16.010	Pengembangan dan Fasilitas Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Bimtek, bantuan sarana, dan bantuan buku untuk perpustakaan desa	50 perpustakaan desa	Kualitas sarana dan ketrampilan petugas perpustakaan desa/kelurahan meningkat	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.16.031	Pengembangan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Data Perpustakaan	500 data	Penambahan data profil perpustakaan dan update data	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.16.033	Pengembangan Program Perpustakaan dan Kearsipan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Konsolidasi pengembangan perpustakaan dan kearsipan	6 Kali	Pengembangan program perpustakaan dan kearsipan	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 93.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Rakor pengembangan perpustakaan dan kearsipan	1 Kali						
1.26.1.26.01.16.034	Akreditasi Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Assesment perpustakaan	5 perpustakaan	Peningkatan jumlah layanan perpustakaan terakreditasi	100 %	Rp. 52.000.000,00	Rp. 57.200.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.16.035	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Pustakawan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	- Penilaian angka kredit - Konsultasi Pustakawan - Forum Tim Penilai Angka Kredit	2 kali, 2 kali, 50 peserta	Peningkatan kualitas pustakawan	100 %	Rp. 93.000.000,00	Rp. 102.300.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.16.037	Pengembangan Layanan Bersertifikasi ISO	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Fasilitas Perlengkapan ISO	1 Paket	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Surveyance ISO tahun ke-5	1 Kali						
1.26.1.26.01.16.038	Kerjasama Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	1. Sosialisasi kerjasama perpustakaan 2. Workshop kerjasama perpustakaan 3. MOU kerjasama perpustakaan	50 Orang	Terwujudnya kerjasama perpustakaan	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.16.039	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah dan Masyarakat	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	- Bimtek Pengelolaan Perpustakaan - Bimtek Pustakawan - Pendampingan Pustakawan	120 peserta, 25 peserta, 20 lembaga	Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan, Pustakawan dan layanan perpustakaan	100 %	Rp. 175.000.000,00	Rp. 194.444.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.16.040	Pengembangan Mitra Kerja Bidang Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan dan	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip	Persentase peningkatan jumlah	80 %	1. Rakor Dewan perpustakaan 2. Rakor GPMB 3. Forkom	200 peserta	Fasilitasi pengembangan minat dan budaya	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 220.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Teknologi		Daerah	perpustakaan Desa		Perpustakaan 4. rakor IPI DIY		masyarakat				Daerah	
1.26.1.26.01.16.042	Pengembangan Bahan Pustaka Jogjasiana, Pustaka Nusantara dan Umum	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	80 %	Web Jogjasiana	1 web	Meningkatnya layanan bahan pustaka	100 %	Rp. 1.250.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Pengadaan buku dan non buku	1 tahun						
							Data informasi koleksi Center of Excelent	100 judul						
							Data informasi koleksi Pustaka Nusantara	100 judul						
							Data informasi koleksi Jogjasiana	100 judul						
1.26.1.26.01.17	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA										Rp. 4.323.000.000,00	Rp. 4.794.188.000,00		
1.26.1.26.01.17.001	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	- Penghargaan Bhakti Tama - Bedah Buku - Lokakarya	5 penghargaan, 750 peserta, 50 peserta	Fasilitasi pengembangan minat dan budaya baca masyarakat	100 %	Rp. 154.000.000,00	Rp. 169.400.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.002	Pengkajian dan Pengembangan Bidang Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	Kajian bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi	2 sub tema	Kajian Bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi	100 %	Rp. 53.000.000,00	Rp. 58.300.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.004	Pengembangan Layanan Perpustakaan Keliling	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	- Pelayanan perpustakaan keliling di kab./kota - Pelayanan paket buku di kab./kota - Pelayanan pendidikan pemakai di kab./kota - Pelayanan mendongen di kab./koya	4 paket layanan	Kebutuhan masyarakat akan bahan pustakan terlani dengan baik	100 %	Rp. 385.000.000,00	Rp. 423.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.010	Pengembangan Karya Tulis	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	- Workshop - Lomba Menulis - Penerbitan karya tulis	100 peserta, 2 kali lomba, 5 penerbitan	Peningkatan minat menulis publikasi hasil penulisan	100 %	Rp. 156.000.000,00	Rp. 171.600.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.018	forum Pemustaka	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	Forum Pemustaka	1 Pertemuan	Pelayanan makin meningkat	100 %	Rp. 75.000.000,00	Rp. 82.500.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.020	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	- Pameran buku dan pameran di hari-hari besar kepustakaan - Penerbitan buletin - Publikasi media massa	5 pameran, 2 terbitan, 4 paket publikasi	Masyarakat mengetahui perkembangan dunia kepustakaan	100 %	Rp. 330.000.000,00	Rp. 363.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.021	Pengembangan Center of Exellent	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	Pengembangan portal Center of Excelent	1 Paket	kepuasan layanan masyarakat	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
							Rakor Center of Excelent	1 Kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah										Jumlah Pagu : Rp. 45.000.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pemasyarakatan budaya jawa	1 Paket						
1.26.1.26.01.17.022	Pengembangan Pojok Baca	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	- Layanan paket Pojok Baca - Pengadaan Buku Pojok Baca - Rakor Pengembangan Pojok Baca	5 paket, 1 paket, 1 kali	Layanan pojok baca masyarakat berjalan lancar	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.041	Rakor Perpustakaan Sekolah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	Pelaksanaan Rakor Perpustakaan Sekolah	1 kali, 100 peserta	Komunikasi dan koordinasi antar perpustakaan sekolah terjalin baik	100 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.042	Penyiangan Bahan Pustaka	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	Penyiangan Bahan Pustaka	30 buku	Koleksi bahan pustaka tertata dengan baik	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.043	Layanan Perpustakaan	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	- Layanan menetap - Bedah Buku Koleksi - Layanan Pendidikan Pemustaka - Layanan film edukasi	1 tahun, 6 kali, 6 kali, 10 kali	Layanan perpustakaan menetap berjalan baik	100 %	Rp. 270.000.000,00	Rp. 297.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.044	Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	- Sosialisasi JLA - Rakor JLA - Katalog jaringan - Pengembangan Digital Library	1 kali, 1 kali, 1 paket	Layanan perpustakaan berbasi TI berjalan baik	100 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 388.888.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.045	Pengembangan Layanan Rumah Belajar Modern	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	- Layanan sirkulasi RBM - Layanan wisata pustaka - Pendidikan pemakai - Peningkatan kreatifitas anak - Layanan kidsmart	1 tahun, 1000 orang, 1000	Layanan RBM optimal	100 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.046	Pelestarian Fisik Bahan Pustaka	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	1. Penjilidan buku rusak 2. Penjilidan koran 3. Penyampulan cover buku 4. Fumigasi bahan pustaka 5. Perawatan bahan pustaka	1 eks, bendel,eks,m3,eks	Menambah lama/umur bahan pustaka	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.17.047	Pelestarian Informasi Bahan Pustaka	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan pemustaka	20 %	1. Alih huruf naskah kuno 2. Alih bahasa naskah kuno 3. Alih media koran lama 4. Alih media buku langka	2.5 lembar	Peningkatan layanan perpustakaan	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.01	Pertanian													
2.01.01	Dinas Pertanian													
2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.091.400.000,00	Rp. 1.372.500.000,00		
2.01.2.01.01.01.001	Penyediaan Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan perangko dan materai	230 buah	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 1.800.000,00	Rp. 2.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan jasa pembayaran telepon, listrik dan internet	12 bulan	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 700.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 dan roda 4	1 tahun	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 26.100.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pemberian honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian	1 tahun	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 110.500.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.008	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 332.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan ATK	45 jenis	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 188.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.011	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	3 macam	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 119.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan komponen istalasi listrik	17 macam	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 34.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat											
2.01.2.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran	11 macam	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan surat kabar, buletin dan majalah	6 macam	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 27.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan makan minum keperluan rapat	4550 os	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 60.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan biaya perjalanan dinas dalam dam luar kota dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi	125 op	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 350.000.000,00	Rp. 375.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan jasa keamanan kantor	1 tahun	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 98.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan anggaran pembayaran retribusi sampah	1 tahun	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1 tahun	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.500.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 10.875.025.075,00	Rp. 2.665.000.000,00		
2.01.2.01.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembangunan gedung kantor induk tahap II, pembangunan gedung perpustakaan BPSDMP, pagar dan gudang gesikan, dan garasi induk serta rumah jaga sapi dan kambing, pagar kantor unit Gading, pagar kantor unit	1 tahun	Terwujudnya pembangunan gedung kantor induk tahap II, pembangunan gedung perpustakaan BPSDMP, pagar dan gudang gesikan, dan garasi induk serta rumah jaga sapi dan kambing	1 tahun	Rp. 7.045.215.075,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Berbah, pagar kantor unit Tambak dan pagar tanaman							
2.01.2.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembelian peralatan penunjang kegiatan kantor	1 Paket	Terwujudnya peralatan penunjang kegiatan kantor	1 Paket	Rp. 505.810.000,00	Rp. 420.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan berkala gedung perkantoran	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung perkantoran	1 Paket	Rp. 182.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas	1 tahun	Terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas	1 tahun	Rp. 761.000.000,00	Rp. 850.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.02.026	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran	1 Paket	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan berkala peralatan (komputer, LCD, faximile, mesin tik, dll	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan (komputer, LCD, faximile, mesin tik, dll	1 Paket	Rp. 45.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.02.042	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehab gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor	1 Paket	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.02.046	Pengelolaan Naskah Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan	100 %	Pengelolaan Naskah Dinas	1 Paket	Terlaksana pengelolaan naskah dinas dan arsip	1 Paket	Rp. 56.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		sarana prasarana aparatur									
2.01.2.01.01.02.047	Pembangunan / rehabilitasi renovasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan an sarana pndukungnya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehab gedung kantor BPPTPH	323 m2	tercukupi sarana dan prasarana UPTD BPPTPH	1 UPTD	Rp. 1.565.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
							Talut jalan usaha tani di Ngipiksari	466 m3						
							Saluran air/ rigasi di unit Gading	403 m						
							Saluran air/ irigi di unit Berbah	145 m						
							Konblok lan usaha tani di unit Ngipiksari	300 m2						
2.01.2.01.01.02.048	Pembanguna/rehabilitasi UPTD Proteksi Tanaman dan Sarana Pendukungnya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Sepeda Motor	15 unit	Tersedianya Sepeda Motor	15 unit	Rp. 225.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.02.049	Pembangunan/reabilitasi /renovasi UPTD perbibitan dan laboratorium hewan dan sarana pendukungnya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan peralatan Laboratorium Dianostik Kesehatan	1 Paket	Tersedianya peralatan Laboratorium Dianostik Kesehatan	1 Paket	Rp. 190.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 22.000.000,00	Rp. 17.500.000,00		
2.01.2.01.01.05.007	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional	5 Kali	Meningkatnya kedisiplinan dan pengetahuan PNS	100 %	Rp. 22.000.000,00	Rp. 17.500.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 279.500.000,00	Rp. 248.000.000,00		
2.01.2.01.01.06.016	Penyusunan Lapor Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian	100 %	Tersusnya Lakip 2014	100 %	Terevaluasinya kinerja Distan tahun 2014	1 dokumen	Rp. 5.500.000,00	Rp. 8.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
2.01.2.01.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan Prognosis, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan	100 %	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi keuangan	3 jenis	Rp. 9.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Road Map Pengembangan Pertanian Organik	1 Paket	Terlaksanan Pembangunan pertanian Tahun 2015	2 jenis	Rp. 220.000.000,00	Rp. 180.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
							Dokumen Perencanaan Anggaran 2015 dan Dokumen Statik	100 %						
2.01.2.01.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Pertanian	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Laporan evaluasi kegaitan ahun 2015	100 %	Pelaksanaan kegiatan tahun 2015 berjalan sesuai Renstra Distan DIY	1 dokumen	Rp. 45.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN										Rp. 1.939.500.000,00	Rp. 1.980.000.000,00		
2.01.2.01.01.17.007	Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas	Mengikuti pameran di dalam dan luar provinsi DIY untuk promosi produk unggulan DIY	6 event	Terpromosinya produk-produk unggulan DIY	3 klp komoditas	Rp. 575.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.17.021	Penyebarluasan Informasi Perbenihan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat	Dinas Pertanian	Komoditas olahan	3 Komoditas	Menginformasikan kegiatan	5 Paket	Meningkatnya pengetahuan	5 Paket	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		memenuhi jaminan mutu		Pengawasan dan Sertifikasi Benih melalui siaran di TV, Radio, Media Cetak, cetak buku peraturan perbenihan, leaflet		masyarakat mengenai peran pengawasan dan sertifikasi benih					
2.01.2.01.01.17.022	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil pertanian	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas	Melaksanakan apresiasi, bimtek, sosialisasi dan diversifikasi penanganan pasca panen dan penolahan hasil tanaman pangan	120 Orang	Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan pelaku usaha tentang penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanamanpangan	120 Orang	Rp. 42.000.000,00	Rp. 155.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.17.023	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kalibawang Kokap Nanggulan	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas	Penguatan kelembagaan kelompok pengolahan biofarmaka	1 unit	Peningkatan kualitas produk biofarmaka	1 tahun	Rp. 230.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.17.024	Penanganan Pascapanen dan Pengolahn Hasil Peternakan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas	Melaksanakan apresiasi, bimtek dan soialisasi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	2 unit	Meningkatkanya pemahaman dan ketrampilan pelaku usaha tentang penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	2 unit	Rp. 80.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.17.025	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas	Melaksanakan pengambilan sampel dan pengujian sampel pangan asal hewan untuk uji fisik, uji kimia, cemaran mikroba, dan residu	1 tahun	Hasil pengujian sebagai dasar rekomendasi teknis dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH	1 tahun	Rp. 457.500.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.17.026	Peningkatan Mutu dan keamanan pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas	Melaksanakan bimtek pemotongan ternak hewan kurban, bimtek keurmaster dan pembekalan pengawasan pemotongan serta zoonosa	1 Paket	Tersedianya pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	1 Paket	Rp. 80.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.17.028	Peningkatan Mutu Hasil Pertanian Standard Nasional Indonesia (TP, Hortikultura, Peternakan)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas	Sosialisasi dan penyusunan dokumen sistem mutu produk olahan dan produk segar organik	150 PU	Dokumen sistem mutu produk olahan dan produk segar organik	6 dokumen	Rp. 250.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.17.029	Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pangan Olahan Hasil Pertanian	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas	Melaksanakan bimtek penerapan jaminan mutu menuju SNI	30 PU	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang komoditas pangan organik untuk pangan segar	30 PU	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.17.030	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	3 Komoditas	Informasi harga eceran komoditas hasil pertanian di kab/Kota se DIY dan harga produsen di sentra produksi	1 tahun	Informasi pasar komoditas hasil pertanian diketahui masyarakat luas	1 tahun	Rp. 75.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN*										Rp. 7.553.490.000,00	Rp. 6.585.000.000,00		
2.01.2.01.01.22.012	Pengembangan Ternak Kambing/Domba	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Melaksanakan bimtek pengembangan ternak dan pemberian bantuan ternak kambing PE dan Bligon	10 kelompok	Peningkatan populasi kambing/domba	10 kelompok	Rp. 430.000.000,00	Rp. 510.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.22.013	Pengembangan Ternak Sapi Perah	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Melaksanakan bimtek pengembangan ternak dan pemantapan uji zuriat	10 kelompok	Peningkatan kualitas produk ternak sapi perah	10 kelompok	Rp. 84.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.22.014	Pengembangan Ternak Sapi Potong	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kab Gunungkidul	Populasi peternakan	700516 AU	Peningkatan jumlah ternak sapi sapi potong PO	1 Komoditas	Peningkatan jumlah ternak sapi	1 Komoditas	Rp. 1.025.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.22.019	Pengembangan Semen Beku	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Penyadapan semen beku sapi	40000 dosis	Tercukupinya sebagian kebutuhan semen beku sapi di DIY	30000 dosis	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.22.023	Pengembangan Pembibitan Ternak	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Pemeliharaan indukan sapi perah, sapi potong dan	1 tahun	Bibit sapi perah, bibit sapi potong, bibit kambing/domba	1 tahun	Rp. 2.700.000.000,00	Rp. 2.110.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							kambing/domba							
2.01.2.01.01.22.025	Pengembangan HPT di lahan marginal	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Melaksanakan bimtek pemeliharaan HMT dan fasilitasi sarpras	5 kelompok	Tercukupinya ketersediaan HMT	5 kelompok	Rp. 150.000.000,00	Rp. 155.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.22.026	Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Rapat Kerja Penyusunan SOP Rumah Potong Hewan anggota Mitra Praja Utama	1 Kali	Pencegahan penyakit AI, ND, Antrax, Rabies, gangguan reproduksi dan penyakit parasiter	1 tahun	Rp. 365.000.000,00	Rp. 325.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
							Melaksanakan sosialisasi penanggulangan penyakit ternak serta Penyediaan peralatan, obat-obatan, vaksin ternak	1 tahun						
2.01.2.01.01.22.027	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Strategis (Pengujian Laboratoris)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Pengujian specimen penyakit hewan seperti Pullorum pada ayam, Toxoplasmosis, Helmintiasis, IBR pada sapi, ParaTB pada sapi, Tubercullin dan Brucellosis pada sapi perah dan akreditasi laboratorium	1 tahun	Rekomendasi kesehatan hewan ternak	1 tahun	Rp. 555.750.000,00	Rp. 285.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.22.028	Kaji Terap Teknologi Peternakan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Penerapan teknologi penanaman HMT	1 tahun	Terpenuhi kebutuhan HMT yang berkualitas	1 tahun	Rp. 100.000.000,00	Rp. 155.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.22.029	Pengawasan Lalu Lintas Ternak	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Melaksanakan pengawasan pos lalu lintas ternak	1 tahun	Laporan pengawasan ternak yang masuk dan keluar wilayah DIY	1 tahun	Rp. 236.400.000,00	Rp. 210.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.22.030	Pengembangan Bibit HMT di UPTD BPBPTDK	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Penyediaan bibit hijauan pakan ternak	1 tahun	Terpenuhi kebutuhan bibit hijauan pakan ternak di DIY	1 tahun	Rp. 187.340.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.22.033	Pengembangan Ternak Unggas	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Populasi peternakan	700516 AU	Melaksanakan bimtek pengembangan ternak dan pemberian bantuan ternak itik	10 kelompok	Peningkatan populasi itik	10 kelompok	Rp. 220.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS S D M DAN KELEMBAGAAN PETANI										Rp. 1.528.000.000,00	Rp. 1.368.500.000,00		
2.01.2.01.01.25.007	Diklat Agribisnis Peternakan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi petani dan petugas di bidang agribisnis peternakan	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas	60 Orang	Rp. 65.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.015	Pengkajian Diklat	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan pengkajian kediklatan oleh widyaiswara	8 Orang	Meningkatnya kualitas mengajar bagi widyaiswara	8 Orang	Rp. 30.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.016	Temu Teknis Teknologi Pertanian	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan sosialisasi teknologi pertanian dan gelar karya pertanian	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang hasil diklat yang telah dilaksanakan	60 Orang	Rp. 40.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.018	Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi petani dan petugas di bidang pengolahan hasil peternakan	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas dalam pengolahan hasil peternakan	60 Orang	Rp. 73.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.020	Diklat Organik Farming	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi petugas pendamping pengembangan organik farming	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas dalam pengembangan pertanian organik	60 Orang	Rp. 70.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.25.021	Diklat Pemandu SLPHT dan SL Iklim	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi petani calon pemandu SLPHT dan SLI	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kependudukan petani calon pemandu SLPHT dan SLI	30 Orang	Rp. 35.000.000,00	Rp. 45.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.024	Evaluasi Pasca Latihan dan Bimbingan Lanjut	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan workshop evaluasi pasca latihan dan bimbingan lanjutan	240 Orang	Memperoleh masukan untuk perbaikan pelaksanaan kediklatan di tahun berikutnya	240 Orang	Rp. 40.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.028	Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara dan Staf Teknis	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan magang bagi widyaiswara dan staf ke sumber teknologi	15 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM widyaiswara dan staf di UPTD BPSDMP	15 Orang	Rp. 80.000.000,00	Rp. 85.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.029	Diklat Penangkaran Benih Padi, Bawang Merah, dan Buah-buahan bagi Petani/Penangkar	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi penangkar di tingkat kabupaten	90 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penangkar benih tanaman pangan dan buah-buahan	90 Orang	Rp. 105.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.031	Fasilitasi Praktek Lapangan dan Pengolahan Laboratorium	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Pemeliharaan laboratorium kultur jaringan dan laboratorium pengolahan	2 Paket	Laboratorium dan lahan praktek bermanfaat mendukung kegiatan diklat	2 Paket	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.033	Diklat Integrated Farming	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi petani dan petugas tentang pertanian terintegrasi	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas dalam menerapkan pertanian terintegrasi	60 Orang	Rp. 70.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.034	Diklat Pemanfaatan Limbah Peternakan sebagai Energi	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi petani	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan	60 Orang	Rp. 70.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Alternatif		Meningkat		NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)		dan petugas tentang pemanfaatan limbah peternakan sebagai sumber energi alternatif		ketrampilan petani dan petugas tentang manfaat limbah peternakan sebagai sumber energi alternatif					
2.01.2.01.01.25.035	Diklat Kewirausahaan bagi Generasi Muda	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi generasi musda dalam bidang kewirausahaan pertanian	180 Orang	Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan ketrampilan generasi muda dalam bidang kewirausahaan	180 Orang	Rp. 210.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.036	Apresiasi perencanaan diklat	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan apresiasi perencanaan diklat tahun 2015 dan usulan diklat tahun 2016	50 Orang	Meningkatnya kualitas materi, bahan ajar dan peserta diklat serta masukan usulan diklat tahun 2016	50 Orang	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.037	Diklat Budidaya dan Pengelolaan HMT	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi peternak dan petugas dalam budidaya dan pengelolaan HMT	60 oang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas dalam budidaya dan pengelolaan HMT	60 Orang	Rp. 70.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.038	Diklat Inseminasi Buatan Kambing	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi peternak dan petugas untuk inseminasi buatan ternak kambing	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan peternak dan petugas dalam inseminasi buatan ternak kambing	60 Orang	Rp. 80.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.039	Diklat Mitigasi dan Perubahan Iklim	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi petani dan petugas dalam mitigasi dan perubahan iklim	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan petani dan petugas dalam mitigasi dan perubahan iklim	60 Orang	Rp. 70.000.000,00	Rp. 71.500.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.040	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor	1.7 %	Melaksanakan workshop dan sosialisasi	10 Gapoktan	Meningkatnya pengetahuan petani untuk	10 Gapoktan	Rp. 65.000.000,00	Rp. 71.500.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)		pembiayaan pertanian untuk kelompok tani		dapat mengakses permodalan bagi pertanian					
2.01.2.01.01.25.041	Penguatan kelembagaan tingkat usaha	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan pembinaan kelembagaan bagi kelompok masyarakat (P4S, PUAP, LM3, Pramuka)	120 Orang	Meningkatnya penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (P4S, PUAP, LM3, Pramuka)	120 Orang	Rp. 140.000.000,00	Rp. 93.500.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.25.043	Diklat Zoonosis	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	1.7 %	Melaksanakan diklat bagi petugas dan petani dalam pengendalian penyakit zoonosis dan PHMS	90 Orang	Meningkatnya pengetahuan dalam pengendalian penyakit zoonosis dan PHMS	90 Orang	Rp. 105.000.000,00	Rp. 77.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN*										Rp. 5.790.608.050,00	Rp. 6.620.925.000,00		
2.01.2.01.01.29.001	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendampingan WISM)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Peningkatan Kapasitas SDM Petugas/P3A/GP3A	50 Orang	Terlatihnya SDM Petugas /P3A/GP3A dalam pengelolaan teknis irigasi dan pertanian	50 Orang	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.002	Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan Sawah	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan sekolah lapang dan rehabilitasi lahan sawah dengan pupuk organik	100 Ha	Kesuburan tanah meningkat	100 Ha	Rp. 246.875.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.003	Pemberdayaan P3A dan Peningkatan Jalan Tersier	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan peningkatan jaringan irigasi dan pendataan jaringan irigasi tersier	4 kabupaten	Tercukupinya kebutuhan air irigasi bagi pertanian	4 kabupaten	Rp. 470.000.000,00	Rp. 440.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.004	Penanganan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	4 Kab	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Pengendalian konservasi lahan pertanian produktif	400 bidang tanah	Pengendalian konservasi lahan pertanian produktif	400 bidang tanah	Rp. 320.000.000,00	Rp. 800.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Tanaman Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan kegiatan workshop verifikasi RDKK, workshop	1 provinsi	Tersusunnya rencana kebutuhan pupuk dan benih tahun	1 provinsi	Rp. 300.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							rekapitulasi RDKK dan evaluasi penggunaan saprodi tahun (n) dan FGD penyusunan rencana kebutuhan pupuk dan benih untuk tahun 2016		2016 yang sesuai kebutuhan dan tepat sasaran					
2.01.2.01.01.29.007	Pengembangan Padi Terpadu	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Moyudan Nanggulan Sedayu Sumberarum Kembang Argorejo	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan bimtek dan pemberian bantuan saprodi	300 Ha	Meningkatnya produksi padi	300 Ha	Rp. 542.411.500,00	Rp. 803.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.008	Pengembangan Alsin Tanaman Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Pembinaan dan fasilitasi alat mesin pertanian	10 unit	Efisiensi budidaya melalui penggunaan alsin dalam rangka peningkatan produksi	10 unit	Rp. 548.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.010	Identifikasi Padi Hitam	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Pundong Srihardono	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan pemurnian padi hitam tahap ke 3	1 unit	Benih padi hitam hasil pemurnian tahap ke 3	1 unit	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.011	Pelayanan Sertifikasi Padi dan Palawija	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan pengambilan sampel benih, pengawasan label benih, pemeriksaan sertifikat benih dan pemeriksaan dokumen persyaratan sertifikasi benih	100 Sampel	Data keterangan mutu benih untuk sertifikasi benih BD, BP dan BR	100 Sampel	Rp. 80.000.000,00	Rp. 88.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.015	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Penanaman benih sumber padi 34 ha, benih sumber jagung 2 ha, benih sumber kedelai 8,5 ha, benih sumber kacang tanah 1 ha, benih sumber kacang hijau 1 ha	46 Ha	Benih padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau	46 Ha	Rp. 904.164.500,00	Rp. 880.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.016	Perbanyak Benih Sumber di Tingkat Petani	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Calon benih padi hasil penangkaran	10 Ha	Benih padi hasil penangkaran	14 ton	Rp. 143.171.950,00	Rp. 132.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.29.017	Penyediaan Benih dan Pengembangan jabal Kedelai	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan penangkaran kedelai	4 kabupaten	Benih kedelai	4 kabupaten	Rp. 186.584.600,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.018	Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Ubi Kayu	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Imogiri Kalibawang Selopamioro Banjararum	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Dem perbaikan teknologi budidaya ubi kayu di lokasi percontohan	50 Ha	Meningkatnya produksi ubi kayu di lokasi percontohan	20 ton	Rp. 115.556.500,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.020	Pengembangan dan Pembinaan Budidaya Garut	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Lendah Pajangan Prambanan Ngentakrejo Triwidadi Gayam Harjo	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Dem pengembangan budidaya garut	20 Ha	Meningkatnya produksi garut di lokasi percontohan	20 Ha	Rp. 93.833.000,00	Rp. 124.300.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.022	Pengembangan Tanaman Kacang Hijau	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dlingo Pengasih Mangunan Tawangarsi	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Dem perbaikan teknologi budidaya kacang hijau di lokasi percontohan	10 Ha	Meningkatnya produksi kacang hijau di lokasi percontohan	10 Ha	Rp. 40.411.000,00	Rp. 59.125.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.023	Uji Ketahanan varietas	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Dokumen data varietas padi yang tahan serangan OPT	2 unit	Rekomendasi varietas padi tahan serangan OPT tertentu	2 unit	Rp. 30.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.024	Bimbingan dan Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	4 Kab	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Pengendalian serangan hama penyakit pada tanaman pangan	4 Kab	Terkendalinya OPT tanaman pangan	4 Kab	Rp. 878.000.000,00	Rp. 900.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.025	Pemberdayaan Petani Pemandu SLPHT	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Sekolah lapang oleh petani pemandu SL	4 unit	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani pemandu SL	4 unit	Rp. 130.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.026	SLPHT Berkelanjutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan SLPHT selama 3 MT	1 unit	Terkendalinya OPT tanaman pangan	1 unit	Rp. 175.000.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.027	SLPHT Tanaman Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan SLPHT tanaman pangan	2 unit	Terkendalinya OPT tanaman pangan	2 unit	Rp. 142.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.029	Analisa standar dan Pengawasan Mutu Benih	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan pengawasan dan pengujian benih, kadar air dan daya tumbuh sampel benih	1 Paket	Terjaminnya mutu benih yang akan diedarkan	1 Paket	Rp. 90.000.000,00	Rp. 95.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.29.032	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (HIBAH LOAN WISMP)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	1. Lokakarya sinergitas P3A/GP3A dengan Poktan/Gapoktan 2. Melaksanakan Pelatihan teknis Optimalisasi Lahan dan Air untuk Pengembangan Agribisnis	50 peserta	1. Terjadinya sinergitas P3A/GP3A dengan Poktan/Gapoktan 2. Terlatihnya SDM Petugas P3A/GP3A dalam pengelolaan teknis irigan pertanian	50 peserta	Rp. 89.600.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.033	Observasi dan Identifikasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan identifikasi galur yang akan dilepas dan deskripsi sementara	2 unit	Diperoleh varietas unggul lokal yang diharapkan dapat dilepas sebagai varietas unggul nasional	2 unit	Rp. 50.000.000,00	Rp. 5.500.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.034	Pengembangan Tanaman Pangan Terpadu	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Pembinaan dan pengawalan pengembangan pertanian terintegrasi	2 unit	Berjalannya pertanian terintegrasi tanaman pangan dan ternak	2 unit	Rp. 70.000.000,00	Rp. 205.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.29.035	Pengamatan dan Analisa Kehilangan Hasil Karena OPT Tanaman Pangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian tanaman pangan	2356600 ton	Melaksanakan pengamatan OPT di lapangan	4 kabupaten	Dokumen data kehilangan hasil karena OPT	1 dokumen	Rp. 25.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA*										Rp. 2.450.485.850,00	Rp. 2.450.000.000,00		
2.01.2.01.01.30.001	Pengembangan GAP Hortikultura	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kalibawang Kokap Nanggulan	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Dem penerapan GAP sayuran dan bimtek budidaya hortikultura	12 kelompok	Peningkatan pengetahuan petani tentang GAP hortikultura	12 kelompok	Rp. 130.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.002	Pengembangan Hortikultura Terpadu	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dlingo Imogiri Prambanan	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Pembinaan dan pengawalan pengembangan pertanian terintegrasi	3 kabupaten	Berjalannya pertanian terintegrasi tanaman dan ternak	3 kabupaten	Rp. 70.000.000,00	Rp. 210.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.003	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kalibawang Kokap Nanggulan	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Penanaman biofarmaka di bawah tegakan	8 kelompok	Peningkatan produksi hortikultura	8 kelompok	Rp. 294.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.004	Peningkatan Budidaya Hortikultura di Lahan Pekarangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Melaksanakan sekolah lapang, temu teknologi dan demplot budidaya sayuran	4 kelompok	Meningkatnya produksi hortikultura	4 kelompok	Rp. 110.000.000,00	Rp. 115.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.01.2.01.01.30.006	Fasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air untuk Pengembangan Buah Sayur dan Tan Obat	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Melaksanakan SL tata guna air dan pengembangan prasarana irigasi dan saprodi	5 kelompok	Tersedianya kebutuhan air untuk budidaya hortikultura	5 kelompok	Rp. 300.000.000,00	Rp. 590.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.007	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Penanaman benih tomat kalilurang, cabe lokal pakem, cabe branang, cabe gantari, durian, manggis, jambu kristal, jambu dalhari, sirsak, pisang, tanaman hias dan jamur	1 tahun	Benih tomat kalilurang, cabe lokal pakem, cabe branang, cabe gantari, durian, manggis, jambu kristal, jambu dalhari, sirsak, pisang, tanaman hias dan jamur	1 tahun	Rp. 370.509.250,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.008	Pengembangan Benih Sayuran di Tingkat Petani	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Perbanyakan benih tomat, cabe dan kacang panjang	2 kabupaten	Benih sebar tomat, cabe dan kacang panjang	2 kabupaten	Rp. 60.976.600,00	Rp. 65.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.009	Sosialisasi Pengelolaan Lahan Pekarangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Melaksanakan sosialisasi pengelolaan lahan pekarangan anggota PKK	5 kab/kota	Meningkatnya aktivitas anggota PKK	5 kab/kota	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.010	Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Pembangunan jaringan irigasi (trilateral), bibit durian dan kunjungan ke Korea Selatan tindak lanjut kunjungan Gubernur	1 Paket	Pengembangan kebun buah di Banjar Oyo, Kulon Progo	1 Paket	Rp. 500.000.000,00	Rp. 505.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.012	SLPHT Tanaman Hortikultura	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Melaksanakan SLPHT tanaman sayuran	2 unit	Terkendalinya OPT tanaman sayuran	2 unit	Rp. 75.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.013	Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi Tanaman Hortikultura	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Fasilitasi alat dan bahan pengendalian hama penyakit tanaman hortikultura	1 Paket	Terkendalinya OPT tanaman hortikultura	1 Paket	Rp. 150.000.000,00	Rp. 155.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.014	Pengembangan Tanaman Hias	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Melaksanakan bimtek Krisan dan fasilitasi sarpras	1 kelompok	Meningkatnya pengetahuan petani dalam budidaya krisan	1 kelompok	Rp. 140.000.000,00	Rp. 155.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan
2.01.2.01.01.30.016	Observasi dan Identifikasi Penyebaran Varietas Hortikultura	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dinas Pertanian	Produksi pertanian hortikultura	387000 ton	Melaksanakan observasi galur yang akan dilepas dan deskripsi	2 unit	Diperoleh varietas unggul lokal yang diharapkan dapat	2 unit	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pertanian	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pertanian											Jumlah Pagu : Rp. 32.530.008.975,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							sementara		dilepas sebagai varietas unggul nasional					

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.02	Kehutanan													
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan													
2.02.2.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.843.754.550,00	Rp. 2.270.344.413,00		
2.02.2.02.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Prangko Biasa Materai Rp. 6.000,- Materai Rp. 3.000,- Kilat Khusus	4 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 15.666.000,00	Rp. 19.582.500,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Biaya Telepon Biaya Air Biaya Listrik Biaya Internet Biaya Hosting dan Update Web	5 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 391.120.000,00	Rp. 488.900.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	KIR Kendaraan Dinas Roda 4 KIR Kendaraan Dinas Roda 6 STNK Kendaraan Dinas Roda 2 STNK Kendaraan Dinas Roda 3 STNK Kendaraan Dinas Roda 4 STNK Kendaraan Dinas Roda 6	6 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 31.531.500,00	Rp. 39.414.875,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Honorarium Pengelola Barang Daerah Honorarium Penyiap Fasilitas Pengembangan Kinerja Pegawai Honorarium Pengelola Kepegawaian	4 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 105.840.000,00	Rp. 132.300.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan Lantai Keramik Kebersihan Kaca Kebersihan Dinding Kebersihan Kamar Mandi/WC Kebersihan Halaman Kebersihan dan	7 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 337.454.600,00	Rp. 418.568.250,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Tertata Taman Kebersihan Karpet							
2.02.2.02.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat Tulis Kantor	161 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 125.662.700,00	Rp. 148.403.375,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Barang Cetakan Penggandaan Dokumen Kedinasan Penjilidan Dokumen	3 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 116.511.300,00	Rp. 148.984.125,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 33.687.000,00	Rp. 42.108.750,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	24 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 34.561.450,00	Rp. 43.201.813,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 31.680.000,00	Rp. 39.600.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Makanan dan Minuman Rapat-rapat dan Koordinasi Dinas	4660 os	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 64.140.000,00	Rp. 80.175.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dengan Instansi Terkait di Dalam dan Di Luar Daerah	1 tahun	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 392.700.000,00	Rp. 447.600.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honorarium PTT Sebagai Petugas Keamanan Kantor	9 Orang	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 162.000.000,00	Rp. 220.005.725,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Retribusi Sampah	12 bulan	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran	100 %	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 3.269.031.882,00	Rp. 4.532.165.488,00		
2.02.2.02.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembuatan Area parkir, Kios Jangkau dan gardu pandang Tahura (4000 m2) Pengadaan Jaringan Listrik-Air	2 Paket	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100 %	Rp. 81.045.544,00	Rp. 101.306.930,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Penyediaan Perlengkapan Kantor	5 jenis	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100 %	Rp. 342.652.100,00	Rp. 428.315.125,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Penyediaan peralatan kantor	4 jenis	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100 %	Rp. 163.820.000,00	Rp. 204.775.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.016	Pemeliharaan Arsip Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Arsip Dinas	1 Paket	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100 %	Rp. 134.996.700,00	Rp. 148.496.370,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	13 Paket	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100 %	Rp. 308.665.000,00	Rp. 462.126.563,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan dan bahan bakar/pelumas Kendaraan Dinas	12 bulan	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100 %	Rp. 875.000.000,00	Rp. 974.900.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Dishutbun DIY	Prosentase penyediaan dan	100 %	Perbaikan Instalasi Jaringan Listrik Dishutbun DIY.	4 Paket	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan	100 %	Rp. 45.000.000,00	Rp. 71.250.000,00	Dinas Kehutanan dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kantor		Daerah Meningkat		pemeliharaan sarana prasarana aparatur		Pemeliharaan Instalasi Telepon Pemeliharaan Jaringan Komputer Pemeliharaan Mesin Presensi Biometrik		Tugas Kantor				Perkebunan	
2.02.2.02.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	10 Paket	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100 %	Rp. 99.000.000,00	Rp. 123.750.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Mebel Kantor	3 Paket	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100 %	Rp. 16.300.000,00	Rp. 35.750.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.034	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Pabrik Minyak Kayu Putih	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih	4 pabrik	Peningkatan Kelancaran Proses Pengolahan Minyak Kayu Putih	100 %	Rp. 292.091.450,00	Rp. 321.300.500,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehabilitasi Gedung Kantor	2 Paket	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100 %	Rp. 667.429.838,00	Rp. 1.409.695.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.02.050	Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kawasan Hutan Produksi	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan Jalan Produksi Daun Kayu Putih	1 km	Lancarnya Pengolahan Daun Kayu Putih	100 %	Rp. 243.031.250,00	Rp. 250.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 15.000.000,00	Rp. 25.000.000,00		
2.02.2.02.01.05.007	Peningkatan Kinerja Bagi Pegawai dan Pejabat Fungsional Kehutanan dan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Dishutbun DIY	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya	100 %	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kehutanan dan	2 kegiatan	Peningkatan Kenyamanan Kerja dan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor	100 %	Rp. 15.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perkebunan		Meningkat		apatur		Perkebunan FGD Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian							
2.02.2.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 305.550.000,00	Rp. 389.000.000,00		
2.02.2.02.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dishutbun DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen LAKIP, RKT, dan PK	3 dokumen	Peningkatan Kinerja Kegiatan	100 %	Rp. 7.850.000,00	Rp. 12.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosa Realisasi APBD Penyusunan Laporan Bulanan, Tahunan	2 dokumen	Peningkatan Kinerja Kegiatan	100 %	Rp. 21.700.000,00	Rp. 23.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Dokumen Renja 2015 Dokumen RKA - DPA 2015 dan RKPA - DPPA 2014 Dokumen ROPK, PK, SPIP Dokumen Statistik Kehutanan dan Perkebunan 2014	4 dokumen	Peningkatan Kinerja Kegiatan	100 %	Rp. 240.000.000,00	Rp. 305.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung	100 %	Laporan capaian kinerja & ikhtiar realisasi kinerja SKPD Laporan kegiatan bulanan- triwulan-semester Laporan Tahunan Kegiatan	3 dokumen	Peningkatan Kinerja Kegiatan	100 %	Rp. 36.000.000,00	Rp. 48.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					kelancaran tugas dan fungsi SKPD									
2.02.2.02.01.15	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN										Rp. 4.795.317.075,00	Rp. 6.143.764.992,00		
2.02.2.02.01.15.006	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dlingo	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	1. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani sekitar hutan lindung 2. Pelatihan pemanfaatan HHBK 3. Pendampingan SVLK untuk HTR	4 KTH	Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan petani sekitar hutan	0.03 %	Rp. 52.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.15.007	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Jakarta, Yogyakarta	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	1. Pameran Indogreen Forestry expo dan indocraft expo 2. Fasilitasi uji laboratorium HHBK	2 Even	Peningkatan Pemasaran Produk Kehutanan	0.07 %	Rp. 179.490.000,00	Rp. 82.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.15.012	Optimalisasi Tegakan Kayu Putih	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	BDH Playen, BDH Paliyan , BDH Karangmojo, BDH Panggang, BDH Kulon Progo Bantul	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	1. Intensifikasi Tanaman Kayu Putih 2. Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih	2 kegiatan	Pengutuhan Tanaman Kayu Putih	0.1 %	Rp. 1.871.788.000,00	Rp. 2.461.791.430,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.15.016	Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Kehutanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Playen	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	Pemeliharaan sumber benih tanaman kehutanan	3 jenis	Tersedianya Benih Tanaman Jati dan Kayu Putih Yang Berkualitas	0.02 %	Rp. 38.351.500,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.15.019	Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	3 Pabrik Minyak Kayu Putih	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	Pengolahan / Penyulingan Daun Kayu Putih Penjualan Produksi Minyak Kayu Putih	5200 ton daun	Pemanfaatan Potensi Hutan Kayu Putih Mendukung Pendapatan Asli Daerah	0.42 %	Rp. 2.375.270.075,00	Rp. 3.245.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.15.022	Pengelolaan Hutan Terpadu	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	BDH Karngmojo, BDH Panggan, BDH Playen, BDH Paliyan, BDH Kulonprogo-Bantul	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	Tebang Pilih Tegakan Tinggal pada Pohon Jati	100 pohon	Pemanfaatan Potensi Hutan Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah	0.22 %	Rp. 56.378.750,00	Rp. 64.835.562,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.15.028	Inventarisasi Tanaman Kehutanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Karangmojo Nglipar	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	Inventarisasi Potensi Tegakan Kayu Putih, Jati dan Rimba	600 hektar	Tersedianya Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Tegakan Kayu	0.1 %	Rp. 125.262.000,00	Rp. 82.788.000,00	Dinas Kehutanan dan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									Putih ; Jati dan Rimba				Perkebunan	
2.02.2.02.01.15.029	Pemeliharaan Kebun Pangkas	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Playen	Peningkatan produksi hasil hutan	5.59 %	Pemeliharaan kebun pangkas jati dan pule Pemeliharaan blok kaji terap tanaman kehutanan	2 kegiatan	Tersedianya bibit tanaman kehutanan unggul untuk pembangunan kehutanan	1.18 %	Rp. 96.776.750,00	Rp. 102.350.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										Rp. 5.430.450.605,00	Rp. 7.004.700.604,00		
2.02.2.02.01.16.005	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	BDH Paliyan BDH Playen BDH Karangmojo BDH Panggang BDH Kulon Progo-Bantul	Luas lahan kritis	26000 Ha	Pembinaan kelompok tani RHL dalam kawasan Pelatihan Pengembangan Tanaman Bawah Tegakan Supervisi Hsl Keg RHL	20 KTH, angkatan, RPH	Peningkatan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 %	Rp. 132.000.000,00	Rp. 135.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.16.011	Optimalisasi Peran Pesanggem dalam Pengelolaan Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	5 BDH 5 BDH BDH Playen	Luas lahan kritis	26000 Ha	Pelatihan Petani dalam Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pesanggem Evaluasi Kinerja KTH Tumpangsari	10 kelompok	Peningkatan peran Serta Masyarakat/Pesanggem dalam upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0.02 %	Rp. 168.614.500,00	Rp. 244.200.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.16.020	Optimalisasi Pembangunan dan Pengelolaan Tahura	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Playen Banaran	Luas lahan kritis	26000 Ha	1.Optimalisasi sarpras Tahura 2.Penyediaan sarpras penunjang 3.Pembentukan kelembagaan dan penyusunan regulasi	3 kegiatan	Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder	0.6 %	Rp. 5.029.836.105,00	Rp. 6.479.500.604,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.16.098	Rehabilitasi Lahan Pantai	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Panjatan Sanden	Luas lahan kritis	26000 Ha	Pelaksanaan penanaman cemara udang Pemeliharaan I tanaman cemara udang Pemeliharaan II tanaman cemara udang	3 kegiatan	Rehabilitasi Lahan Pantai	0.03 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 146.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.02.2.02.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN*										Rp. 2.232.232.550,00	Rp. 2.069.873.400,00		
2.02.2.02.01.17.001	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	1. BDH Playen 2. BDH Paliyan 3. BDH	Persentase kerusakan hutan	29.14 %	1. Pembuatan Ilaran Api 2. Pemeliharaan Ilaran Api	40 m2 , m2	Perlindungan Hutan Dari Bahaya Kebakaran	0 %	Rp. 37.000.000,00	Rp. 40.700.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Karangmojo 4. BDH Panggang 5. BDH Kulonprogo Bantul										
2.02.2.02.01.17.005	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Semanu	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Sosialisasi dampak perusakan hutan bagi masyarakat sekitar hutan Pendataan dan pembinaan kelompok tani hutan binaan	2 kegiatan	Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan	0 %	Rp. 70.000.000,00	Rp. 30.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.17.007	Perlindungan Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	BDH Playen, BDH Paliyan, BDH Karangmojo, BDH Panggang, BDH Kulonprogo Bantul	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Pelatihan Pengamanan Hutan Swakarsa Fasilitasi Petugas Perlindungan Hutan Fasilitasi Perlengkapan Operasional Polhut	3 kegiatan	Fungsi Perlindungan Hutan Tercapai	1,33 %	Rp. 1.246.568.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.17.008	Pengamanan Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Karangmojo Kokap Paliyan Panggang Playen	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	1. Sosialisasi Peraturan Kemanan Hutan 2. Operasi Pengamanan Hutan 3. Koordinasi, Fasilitasi dan Pengawasan Pengamanan Hutan 4. Fasilitasi sarana dan prasarana pengamanan hutan	4 kegiatan	Fungsi Keamanan Hutan Terjamin	0,46 %	Rp. 358.664.550,00	Rp. 117.300.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.17.009	Peningkatan SDM Pengamanan Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dishutbun DIY	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Peningkatan Pengetahuan Ketrampilan dan Sikap Petugas Pengamanan Hutan	30 Orang	Meningkatnya Keamanan Hutan dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Hutan	0 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 67.873.400,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.17.010	Konservasi Sumber Mata Air	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Semanu	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Penanaman tanaman konservasi sumber mata air	12500 batang	Sumber Mata Air Terjaga	0,21 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 163.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.17.011	Pengembangan Konservasi Alam Wana Lestari	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Persentase kerusakan hutan	29,14 %	Penyuluhan konservasi alam bagi generasi muda Gerakan Cinta Hutan dan Gerakan Tanam Cinta Hutan Lomba Wana Lestari	3 kegiatan	Masyarakat Mendukung Kelestarian Konservasi Hutan	0,43 %	Rp. 270.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN										Rp. 200.485.000,00	Rp. 223.500.000,00		
2.02.2.02.01.19.006	Penatausahaan Dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	1. 4 kabupaten dan kota 2. Provinsi Jateng dan Jatim 3. "5 kab perbatasan (Kab Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Purworejo dan Wonogiri)" 4. Kota Yogyakarta 5. Kab. Bantul, Kulonprogo Bantul dan Gunungkidul 6. DIY 7. Dishutbun DIY	Persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang telah dilakukan pembinaan	80 %	1. Pengendalian dan Rekapitulasi Dokumen Peredaran Hasil Hutan 2. Koordinasi dan kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 3. Pengendalian Peredaran Hasil hutan Illegal 4. Pembekalan bagi calon Penerbit SKAU 5. Sosialisasi Peraturan Pena	5 kegiatan	Peningkatan Ketertiban Dokumen Produksi dan Peredaran Hasil Hutan	2 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 170.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.19.007	Audit Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Berbah Dlingo Gamping Kalibawang Kasihan Mlati Nglipar Paliyan Pengasih Sewon Wates	Persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang telah dilakukan pembinaan	80 %	Pembinaan dan penilaian Kinerja Industri Hasil Hutan Sinkronisasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Primer Hasil Hutan Pendampingan SVLK untuk Industri Primer	3 kegiatan	Ketertiban Administrasi dan Teknis Pengelolaan IPHHK	2.54 %	Rp. 50.485.000,00	Rp. 53.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.21	PROGRAM PENATAAN KAWASAN HUTAN										Rp. 1.754.469.130,00	Rp. 1.513.107.000,00		
2.02.2.02.01.21.001	Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Balai KPH	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Penyusunan Booklet/Leaflet tentang Balai KPH Yogyakarta Penyusunan Dokumen Detail Forest Plan BDH Panggang dan BDH	5 kegiatan	Pengelolaan Kawasan Hutan Negara	0.01 %	Rp. 427.826.000,00	Rp. 93.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Kulonprogo-Bantul Workshop Detail Forest Plan BDH Panggang dan BDH Kulonprogo-Bantul Pelatihan Inventarisasi Hutan Penyusunan Grand Design W							
2.02.2.02.01.21.002	Pengembangan Hutan Tanaman	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dlingo	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Penanaman Tanaman Pinus Pemeliharaan Tanaman Pinus I Pemeliharaan Tanaman Pinus II Pendampingan Petani Penyadap Getah Pinus Penyadapan Getah Pinus Penjualan Getah Pinus	6 kegiatan	Pengelolaan Kawasan Hutan Negara	0.03 %	Rp. 510.000.000,00	Rp. 605.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.21.003	Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Karangmojo	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Inventarisasi pal batas kawasan hutan identifikasi dan inventarisasi batas kawasan hutan	2 kegiatan	Pengelolaan Kawasan Hutan Negara	0.01 %	Rp. 102.366.380,00	Rp. 57.603.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.21.004	Penyusunan Rencana Teknik Tahunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	BDH Panggang, BDG Karangmojo, BDH Kulon Progo - Bantul	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Dokumen RTT Pungutan Daun Kayu Putih Dokumen RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih Dokumen Taksasi Produksi Daun Kayu Putih Dokumen RTT Penebangan Dokumen RTT Jalan Produksi Dokumen Taksasi Tebangan Jati Dokumen Taksasi Sadapan Getah Pinus	7 dokumen	Pengelolaan Kawasan Hutan Negara	0.02 %	Rp. 125.000.000,00	Rp. 137.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.21.005	Inventarisasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Sapto sari Tepus	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Inventarisasi tegakan tinggal di kawasan hutan AB	109.15 Ha	Pengelolaan Kawasan Hutan AB	0.03 %	Rp. 57.276.750,00	Rp. 35.504.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.21.006	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat	BDH Panggang,	Persentase luas hutan	27.63 Ha	peningkatan pelatihan teknis	2 kegiatan	Peningkatan Pengetahuan	0.02 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kemasyarakatan		Meningkat	BDG Karangmojo, BDH Kulon Progo - Bantul			pembuatan hutan cadangan pangan Terbinanya pemegang IUPHKm		Masyarakat dalam Pembuatan Hutan Cadangan Pangan dan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan				dan Perkebunan	
2.02.2.02.01.21.007	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Playen Banaran	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Bibit tanaman kehutanan	600000 batang	Tersedianya Bibit /Benih Tanaman Kehutanan dalam rangka Peningkatan Penanaman Hutan	0.01 %	Rp. 420.000.000,00	Rp. 462.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.21.008	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Lahan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Girisubo Purwosari Semanu Wonosari	Persentase luas hutan	27.63 Ha	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pengelola HTR	6 kelompok	Peningkatan engetahuan dan Ketrampilan Masyarakat dalam Pengelolaan HTR	0.03 %	Rp. 47.000.000,00	Rp. 52.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.26	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN										Rp. 1.481.216.000,00	Rp. 1.569.918.000,00		
2.02.2.02.01.26.002	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Imogiri Kalibawang Panjatan	NTP sektor perkebunan	128 %	1.Pelatihan Manajemen Usaha Tani Kelapa dan Kakao 2. Pertemuan Kemitraan Usaha Perkebunan Komoditas Kakao dan Kelapa 3. Pendampingan Kelompok Tani/KUB (2 Jambumete, 4 Kakao dan 4 Kelapa)	3 kegiatan	Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga Petani Perkebunan Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perkebunan	0 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 97.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.26.012	Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (cukai)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Gedang sari Ngawen Ngemplak	NTP sektor perkebunan	128 %	Pelatihan pengolahan dan pemasaran tembakau dengan sistem sekolah lapang	3 angkatan	Peningkatan Mutu dan Penghasilan Petani Komoditas Tembakau	0.02 %	Rp. 280.000.000,00	Rp. 310.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.26.017	Promosi Atas Hasil Perkebunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	1. Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Jawa Tengah 3. Jawa Timur	NTP sektor perkebunan	128 %	Promosi dan Informasi Produk Kehutanan dan Perkebunan pada Event HKP, HPS, Soropadan Expo, SAMEX dan Hari Perkebunan	5 event	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Unggulan Komoditas Hutbun	0 %	Rp. 180.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.26.027	Pengembangan Kelembagaan Petani Tembakau	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Imogiri Semin Seyegan	NTP sektor perkebunan	128 %	1. Pelatihan Pengelolaan Penguatan Modal Gapoktan/KUB	2 kegiatan	Lembaga Petani Perkebunan Menjadi Mampu dan Mandiri Dalam Pengembangan	0 %	Rp. 225.000.000,00	Rp. 177.653.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Komoditas Tembakau 2. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau		Usaha Agribisnis Perkebunan					
2.02.2.02.01.26.028	Pengembangan dan Pemantapan SDM Perkebunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kalibawang Patuk	NTP sektor perkebunan	128 %	1. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas dalam mendampingi komoditas perkebunan 2. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Komoditas perkebunan 3. Pendampingan Kelompok Tani di Wilayah Sentra Pengembangan Kakao	3 kegiatan	Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Lembaga Petani Kakao Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perkebunan	0 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 336.765.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.26.029	Pengembangan Komoditas Perkebunan Berkas Kawasan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Imogiri Kalibawang Patuk Samigaluh	NTP sektor perkebunan	128 %	1. Pengkayaan tanaman kelapa 2. Pengkayaan tanaman cengkeh	2 kegiatan	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman untuk mewujudkan sentra kawasan agribisnis perkebunan	0 %	Rp. 246.216.000,00	Rp. 262.500.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.26.030	Pembinaan Pasca Panen Pengolahan Produk Perkebunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kalibawang Patuk	NTP sektor perkebunan	128 %	Pelatihan Penanganan Panen dan Pasca Panen komoditas kakao dalam mendukung pengembangan model desa kakao	1 kegiatan	Peningkatan Mutu dan Penghasilan Petani Komoditas Perkebunan dalam pengembangan model desa kakao	0.01 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 186.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN										Rp. 2.022.177.350,00	Rp. 2.264.003.313,00		
2.02.2.02.01.31.001	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (cukai)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Paliyan Piyungan Prambanan	Produksi perkebunan	88000 ton	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Tembakau	3 angkatan (@ 30 perwakilan, 16 kali)	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau Perkebunan	0 %	Rp. 172.627.650,00	Rp. 198.521.798,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Komoditas Perkebunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Karangmojo Kokap Samigaluh	Produksi perkebunan	88000 ton	Bimtek fasilitasi penyediaan sarpras dan optimalisasi lahan	4 angkatan	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	0.42 %	Rp. 124.200.000,00	Rp. 71.016.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.003	Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat	Kalibawang Samigaluh	Produksi perkebunan	88000 ton	1. Rehabilitasi tanaman kakao	2 kegiatan	Peningkatan Produksi dan Produktifitas	0.05 %	Rp. 224.895.500,00	Rp. 212.500.000,00	Dinas Kehutanan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat				dalam rangka pengembangan model desa kakao 2. Gerakan Pemeliharaan Tanaman Cengkeh		Komoditas Kakao dan Cengkeh				dan Perkebunan	
2.02.2.02.01.31.004	Pengembangan Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Karangmojo Playen	Produksi perkebunan	88000 ton	Pengembangan Tebu	2 Ha	Peningkatan Produksi Tebu dan Gula Dalam Rangka Pengembangan Agribisnis Perkebunan	0 %	Rp. 36.688.300,00	Rp. 40.357.500,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.005	Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Daerah Istimewa Yogyakarta	Produksi perkebunan	88000 ton	Terpantaunya serangan OPT dan rekomendasi pengendalian OPT komoditas perkebunan	2000 Ha	Terpantaunya Serangan OPT dan Rekomendasi Pengendalian OPT Untuk 11 Komoditas Perkebunan Dalam Upaya Peningkatan Produksi Perkebunan	0 %	Rp. 49.400.000,00	Rp. 54.340.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.006	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Wates	Produksi perkebunan	88000 ton	Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan.	3 jenis	Penyediaan Bibit Unggul Perkebunan Yang Sehat	0 %	Rp. 82.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.007	Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Daerah Istimewa Yogyakarta	Produksi perkebunan	88000 ton	1. Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan 2. Pengawasan Peredaran Bibit/Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan pada penangkar/pengada /pengear dan kebun sumber benih 3. Pendampingan dalam rangka ISO 9001-2008 4. Surveylance ISO 9001-2008	4 kegiatan	Peningkatan Manajemen Mutu dan Peningkatan Produksi Maupun Kualitas Tanaman Perkebunan	0.01 %	Rp. 194.281.000,00	Rp. 213.709.100,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.008	Pemeliharaan Kebun Dinas	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Imogiri Pakem Pundong Wates	Produksi perkebunan	88000 ton	Pemeliharaan Kebun Dinas	4 Kebun	Peningkatan Produksi Kebun Dinas	0 %	Rp. 68.000.000,00	Rp. 280.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.009	Pengembangan Agens Hayati dan Pestisida Nabati	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Daerah Istimewa Yogyakarta	Produksi perkebunan	88000 ton	Penyediaan agens hayati dan pestisida nabati	92 jenis	Meningkatkan Ketersediaan Agens Hayati dan Pestisida Nabati Dalam Rangka Peningkatan Produksi Perkebunan	0 %	Rp. 87.120.000,00	Rp. 95.832.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan											Jumlah Pagu : Rp. 23.349.684.142,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.02.2.02.01.31.010	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (cukai)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dlingo Gedang sari Ngawen Semin Seyegan Tempel	Produksi perkebunan	88000 ton	Bimtek pengembangan sumber air pada komoditas tembakau	4 kelompok	Peningkatan Produksi Komoditas Tembakau	0.41 %	Rp. 198.733.000,00	Rp. 77.806.300,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.011	Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul Lokal (cukai)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	1. Kabupaten Bantul 2. Kabupaten Sleman 3. Kabupaten Kulon Progo 4. Kabupaten Gunung Kidul	Produksi perkebunan	88000 ton	Pelatihan Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul Lokal	4 angkatan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau Unggul Lokal	0 %	Rp. 125.136.300,00	Rp. 143.906.700,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.012	Pengawasan dan Pengawalan Pupuk dan Pestisida	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Daerah Isitimewa Yogyakarta	Produksi perkebunan	88000 ton	Fasilitasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi sub sektor perkebunan Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	2 kegiatan	Tersedianya Pupuk Bersubsidi sesuai kebutuhan serta Tereadarnya pupuk bersubsidi sesuai 6 tepat (Jumlah, Dosis, Mutu, Harga, Tempat, Waktu).	0 %	Rp. 41.525.000,00	Rp. 46.400.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.013	Pelatihan Teknis Budidaya Perkebunan sesuai GAP	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Gedang sari Semin	Produksi perkebunan	88000 ton	Pelatihan teknis budidaya tembakau sesuai GAP	4 kelompok	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tembakau	0.01 %	Rp. 225.948.500,00	Rp. 160.543.500,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.014	Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Daerah Istimewa Yogyakarta	Produksi perkebunan	88000 ton	Pengendalian Hama terpadu Komoditas Kelapa dan Kakao	3 kegiatan	Meningkatnya Produksi Kelapa dan Kakao Dengan Adanya Pengendalian Hama Terpadu	0 %	Rp. 65.300.000,00	Rp. 71.800.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.015	Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kalibawang Ponjong	Produksi perkebunan	88000 ton	Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan	2 Angkatan @ 30 orang; 16 kali	Peningkatan Produksi Perkebunan	0 %	Rp. 106.322.100,00	Rp. 122.270.415,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan
2.02.2.02.01.31.016	Intensifikasi Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Girimulyo Samigaluh	Produksi perkebunan	88000 ton	Pendampingan teknis intensifikasi tanaman teh	100 hektar	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Teh	0.21 %	Rp. 220.000.000,00	Rp. 275.000.000,00	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 20.730.441.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.04	Pariwisata													
2.04.01	Dinas Pariwisata													
2.04.2.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 1.204.000.000,00	Rp. 1.324.400.000,00		
2.04.2.04.01.01.001	Penyediaan Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.Tersedianya perangko	1750 lembar perangko	Kelancaran administrasi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata DIY, serta tersebarnya bahan-bahan promosi	0 100%	Rp. 25.000.000,00	Rp. 27.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya meterai	377 Materai Rp. 6.000, 196 meterai Rp. 3.000						
							3. Terkirimnya paket ke Luar Provinsi dan Luar Negeri	26 Paket (TIC Bali 3 Paket, Anggota MPU 10 Paket, Lua						
2.04.2.04.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Tersedianya Jasa Telekomunikasi (Telepon)	6 saluran Telepon @ 12 bulan	Kelancaran komunikasi pendukung tugas & fungsi serta kelancaran bidang pariwisata	0 100%	Rp. 275.000.000,00	Rp. 302.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya Layanan Listrik	3 saluran listrik @ 12 bulan						
							3. Tersedianya Air PDAM	12 Bulan langganan Air PDAM						
2.04.2.04.01.01.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Jasa KIR	1 kendaraan roda empat	Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas	0 100%	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.700.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Perpanjangan ijin operasional kendaraan dinas roda dua	2 kendaan roda dua						
							3. Perpanjangan ijin operasional kendaraan dinas roda empat	7 kendaraan roda empat						
2.04.2.04.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Laporan Keuangan (Fungsional dan administratif)	12 bulan	Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan	0 100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan	Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan	100 %	1.Lantai Keramik	16.334 m2	Kenyamanan Kantor	0 100%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2.Kaca	3.866 m2						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 20.730.441.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Aparatur	Pemerintah Daerah Meningkatkan		Administrasi Perkantoran									
							3.Dinding	10.168 m2						
							4.Kamar Mandi Kepala Dinas	168 m2						
							5.Kamar Mandi Biasa	580 m2						
							6.Karpet	160 m2						
							7.Halaman	2.546 m2						
							8.Telepon	52 Kali						
							9.Lantai Keramik TIC	1.11 m2						
							10.Kaca TIC	495 m2						
							11.Kamar Mandi TIC	144 m2						
							12.Dinding TIC	1.294 m2						
							13. Halaman TIC	80 m2						
2.04.2.04.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembelian Alat Tulis Kantor	79 jenis	Tersedianya alat tulis kantor kebutuhan operasional Dinas Pariwisata DIY	0 100%	Rp. 40.000.000,00	Rp. 44.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Tersedianya Barang cetakan	9 jenis	Kelancaran operasional kegiatan kantor	0 100%	Rp. 30.000.000,00	Rp. 33.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Tersedianya barang pengadaan surat-surat,buku pedomn,peraturan dll	133000 lembar						
2.04.2.04.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	18 jenis komponen instalasi listrik	Berfungsinya listrik/penerangan	0 100%	Rp. 20.000.000,00	Rp. 22.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pembelian sarana kebersihan kantor	27 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	kebersihan dan kenyamanan tempat kerja	0 100%	Rp. 12.000.000,00	Rp. 13.200.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Surat kabar	4 jenis surat kabar	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan wawasan kepariwisataan dan pengetahuan umum	0 100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Majalah	2 jenis Majalah						
							3. Peraturan Perundang-undangan	1 Set peraturan perundang-undangan						
							4.Buku-buku yang terkait dengan kepariwisataan.	0 Referensi dan buku buku						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 20.730.441.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								kepariwisataan						
2.04.2.04.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya hidangan rapat	12 bulan	Hidangan penyelenggaraan rapat terpenuhi	0 100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	8 Provinsi, SPPD luar daerah : 90 OP	Koordinasi program kegiatan lintas sektor dan lintas instansi	0 100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	4 Kabupaten, SPPD dalam daerah : 204 OP						
2.04.2.04.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terjaganya keamanan gedung kantor Dinas Pariwisata DIY & TIC Malioboro	12 bulan	Terciptanya keamanan kantor & TIC Malioboro	0 100%	Rp. 310.000.000,00	Rp. 341.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 1.836.441.000,00	Rp. 2.020.085.100,00		
2.04.2.04.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1.AC Split 1 Pk	8 unit	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	0 100%	Rp. 386.441.000,00	Rp. 425.085.100,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Filling cabinet	2 unit						
							3. Genset	1 unit						
2.04.2.04.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Komputer PC	10 unit	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	0 100%	Rp. 390.000.000,00	Rp. 429.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Laptop	5 buah						
							3. White Board	1 buah						
2.04.2.04.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembelian meubeler untuk gedung kantor dan TIC/TIS	0 Meja, Kursi, Sofa	Terpenuhinya meubeler gedung kantor	0 100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 82.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Terlaksanyanya pemeliharaan rutin gedung kantor	0 Gedung Dinas Pariwisata DIY	Tersediannya gedung kantor yang nyaman, bersih dan rapi	0 100%	Rp. 210.000.000,00	Rp. 231.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 20.730.441.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.2.04.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Jasa service roda dua	2 unit @3 kali	Kendaraan Dinas Operasional siap pakai	0 100%	Rp. 210.000.000,00	Rp. 231.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Jasa service roda empat	5 unit, @3 kali						
							3. pergantian suku cadang roda empat	5 unit, & 1 unit (AB 52 UA)						
							4. BBM roda dua	2 unit @1 tahun						
							5. BBM roda empat	7 unit, @1 tahun						
2.04.2.04.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pemeliharaan AC Split	15 unit @3 kali	Perlengkapan gedung kantor berfungsi dengan baik	0 100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Pemeliharaan Pompa Air	2 unit @ 4 kali						
							3. Pemeliharaan Kipas Angin	4 unit,@ 2 kali						
							4. Pengecatan Filling Cabinet	10 unit						
							5. Pengecatan Almari Besi	8 unit						
							6. Pemeliharaan Televisi LCD	2 unit x @2 kali						
2.04.2.04.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pemeliharaan CPU, Pemeliharaan monitor, Pemeliharaan keyboard, Pemeliharaan printer	11 unit @ 4 kali 11 unit @ 4 kali 11 unit @ 4 kali 9	Peralatan gedung kantor Dinas Pariwisata berfungsi dengan baik	0 100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Pemeliharaan Laptop	4 unit @ 2 kali						
							3. Pemeliharaan mesin tik	2 unit @ 3 kali						
							4. Pemeliharaan LCD Proyekto	2 unit @ 2 kali						
							5. Pemeliharaan Camera	2 unit x 4 kali						
							6. Pemeliharaan mixer, Pemeliharaan speaker, Pemeliharaan wireless, Pemeliharaan mic wireless	1 unit @ 2 kali 2 unit @ 2 kali 2 unit @ 2 kali 1 un						
							7. Pemeliharaan faximile	1 unit @ 4 kali						
2.04.2.04.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Pariwisata	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1.Pemeliharaan meja kantor	32 buah	Peralatan gedung kantor Dinas Pariwisata berfungsi dengan baik	0 100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2.Pemeliharaan kursi rapat dan kursi kerja	32 buah						
							3.Pemeliharaan kursi Eselon III	4 unit						
							4.Pemeliharaan meja - kursi tamu/sice	2 set						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 20.730.441.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.2.04.01.02.063	Pemeliharaan Taman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1.Terawatnya taman dinas	750 m2	Terciptanya kesejukan dan keindahan lingkungan kantor	0 100%	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
								2.Pembelian tanaman hias	1 Paket					
2.04.2.04.01.02.064	Pengadaan Kendaraan Dinas	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Kendaraan Dinas	2 unit	Tercukupinya Kendaraan Operasional Kantor	0 100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										Rp. 110.000.000,00	Rp. 121.000.000,00		
2.04.2.04.01.05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Jumlah aparatur terdidik dan terlatih di bidang kepariwisataan	10 Orang	Meningkatkanya kualitas aparatur	0 100%	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.05.010	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparatur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	100 %	Jumlah aparatur yang termotivasi (outbond)	90 Orang	Meningkatnya kualitas aparatur	0 100%	Rp. 60.000.000,00	Rp. 66.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 145.000.000,00	Rp. 159.500.000,00		
2.04.2.04.01.06.016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Buku Laporan Kinerja SKPD	3 Jenis Dokumen (LAKIP,RKT,PK)	Tersusunnya laporan Kinerja Dinas Pariwisata	0 100%	Rp. 10.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.06.017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran	100 %	Buku Laporan Keuangan semesteran (2) dan prognosis 6 bulan berikutnya (2) serta Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun	4 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Pariwisata	0 100%	Rp. 15.000.000,00	Rp. 16.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta																			
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 20.730.441.000,00								
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan						
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3	1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
					tugas dan fungsi SKPD														
2.04.2.04.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Dokumen Program/kegiatan (RKA, DPA, ROPK)	3 dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang kepariwisataan	0 100%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 82.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan					
							2. Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan (RKA, ASB)	2 dokumen											
							3.Data dan Informasi Perencanaan	1 dokumen											
2.04.2.04.01.06.019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi DIY dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pariwisata.	2 dokumen	Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata	0 100%	Rp. 45.000.000,00	Rp. 49.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan					
2.04.2.04.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA*										Rp. 5.335.000.000,00	Rp. 5.868.500.000,00							
2.04.2.04.01.15.001	Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek Pariwisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkatkan	Dinas Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang	1. Travel Dialog	2 provinsi	- Meningkatkan jumlah wisatawan termasuk lama tinggal - Rekomendasi hasil studi dalam rangka pengembangan pariwisata DIY	0 100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan					
															2. Analisis Daya Saing Produk Wisata di DIY	1 dokumen			
2.04.2.04.01.15.002	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang	1. Optimalisasi jaringan internet kantor	1 kegiatan	Penyebaran informasi pariwisata Yogyakarta	0 100%	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan					
															2. Pengembangan website visitingjogja.com	1 kegiatan			
															3. Pengelolaan kios informasi	1 kegiatan			
															4. Updating website	1 kegiatan			
															5. Sewa Collocation server	1 kegiatan			
															6. Promosi melalui Media Masa	1 kegiatan			
															7. Pembuatan Aplikasi promosi untuk telepon seluler	1 kegiatan			
															8. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Event	1 kegiatan			

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 20.730.441.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.04.2.04.01.15.003	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang	1.Terseleenggaranya table top pariwisata DIY di Bali, serta Table Top khusus untuk PCO	150 peserta	Terjadinya kontrak bisnis antar pelaku usaha jasa pariwisata	0 100%	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2.Terlaksannya Promosi Pariwisata DIY dalam Negeri dan Luar Negeri melalui Fam Tour	1 kegiatan						
2.04.2.04.01.15.005	Promosi Pariwisata Di Dalam Dan Luar Negeri	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang	1. Terlaksananya promosi pariwisata melalui pameran pariwisata.	1 kegiatan	Terpromosikannya dan terinformasikannya pariwisata DIY melalui pameran pariwisata	0 100%	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Penyelenggaraan Standing Committee	1 kegiatan						
2.04.2.04.01.15.007	Penyusunan Statistik Kepariwisataaan	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang	1.Buku statistik kepariwisataan DIY	200 buku	Tersediannya data statistik kepariwisataan yang akurat dan akuntabel	400 pengguna Infomasi statistik	Rp. 35.000.000,00	Rp. 38.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. CD Statistik Kepariwisataaan DIY	200 buah						
2.04.2.04.01.15.008	Pengembangan SDM pelaku wisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang	1.Terlaksananya pelatihan SDM pelaku wisata di kawasan Malioboro	60 Orang	Meningkatnya kualitas SDM pelaku wisata di DIY	0 100%	Rp. 300.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Pelatihan dan uji kompetensi SDM pelaku wisata di DIY	60 Orang						
							3. Peningkatan Kualitas SDM pengelola homestay	60 Orang						
2.04.2.04.01.15.009	Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Kepariwisataaan	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang	1. Bahan percontohan (cinderamata)	1 kegiatan	Dikenal luasnya pariwisata DIY di dalam dan luar negeri	0 100%	Rp. 600.000.000,00	Rp. 660.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Bahan promosi cetak	1 kegiatan						
							3. Publikasi cetak dan elektronik	1 kegiatan						
							4. Penggandaan CD Pariwisata	1 kegiatan						
							5. Neon text di TIC Malioboro, TIS Bandara dan TIS Stasiun Tugu.	1 kegiatan						
							6. Penyusunan Tabloid Pariwisata	1 kegiatan						
2.04.2.04.01.15.011	Pengelolaan Pelayanan Informasi Pariwisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	16785128 Orang	1. Pelayanan Informasi Pariwisata kepada wisatawan	1 kegiatan	Meningkatnya pemakaian pelayanan informasi pariwisata di TIC dan TIS	100000 Orang	Rp. 550.000.000,00	Rp. 605.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Optimalisasi TIC dan TIS	1 kegiatan						
2.04.2.04.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI										Rp. 4.735.000.000,00	Rp. 5.208.500.000,00		

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 20.730.441.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PARIWISATA*													
2.04.2.04.01.16.002	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul	Jumlah daya tarik wisata	89 DTW	1. Pembangunan Pagar dan Drainase Obyek Wisata Kiskendo	1 kegiatan	Terwujudnya pembangunan sarana & prasarana	0 100%	Rp. 3.510.000.000,00	Rp. 3.861.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Revitalisasi Jalan Lingkungan dan Talud Obyek Wisata Suroloyo	1 kegiatan						
							3. Pembangunan Parkir dan Pos Terpadu di Obyek Wisata Baron	1 kegiatan						
							4. Pembangunan Parkir dan Pos Terpadu di Obyek Wisata Krakal	1 kegiatan						
							5. Pembangunan Parkir Kawasan Wisata Sundak Gunung Kidul	1 kegiatan						
							6. Pembangunan Wisata di Tancep, Ngawen Gunung Kidul	1 kegiatan						
2.04.2.04.01.16.003	Pengembangan Obyek Pariwisata Strategis Prioritas	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon progo	Jumlah daya tarik wisata	89 DTW	1. Masterplan dan DED Tahap I Kawasan Wisata Samas - Pandansimo	1 dokumen	Tersusunnya Masterplan, DED dan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	0 100%	Rp. 1.075.000.000,00	Rp. 1.182.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Masterplan dan DED Tahap I Kawasan Desa Wisata Kawasan Lereng Merapi	1 dokumen						
							3. Masterplan dan DED Tahap I Kawasan Wisata Gunung Gentong, Gendangsari, Gunung Kidul	1 dokumen						
							4. Masterplan dan DED Tahap I Kawasan Wisata Arung Jeram Kulon Progo	1 dokumen						
							5. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	1 dokumen						
2.04.2.04.01.16.007	Pengembangan, Sosialisasi Dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah daya tarik wisata	89 DTW	1.Prakuallikasi/reklasifikasi,Monitoring dan Klasifikasi/Reklasifikasi Standarisasi Hotel bintang dan Melati DIY	60 hotel (Melati dan Bintang)	Diperolehnya data kelaikan hotel sesuai standart yang berlaku	0 100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Sosialisasi Tata Cara Standarisasi Hotel	65 peserta						
2.04.2.04.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN*										Rp. 5.115.000.000,00	Rp. 5.629.500.000,00		
2.04.2.04.01.17.002	Pengembangan Dan Penguatan Litbang Pariwisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	DIY dan Kulon Pogo	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	1. Penyusunan Kajian Peranan Home Stay Di DIY	1 kegiatan	tersusunnya database homestay di DIY	0 100%	Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Home Stay Di DIY	1 kegiatan						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 20.730.441.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat											
							3. Penyusunan DED Kawasan Banjaroyo	1 kegiatan						
2.04.2.04.01.17.008	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	1. Terlaksananya peningkatan kemitraan IKM dengan pelaku pariwisata	50 Orang	1. Meningkatnya kemitraan IKM dengan pelaku pariwisata	4 angkatan	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Terlaksananya peningkatan pengetahuan kepariwisataan masyarakat di sekitar ODTW	40 Orang	2. Meningkatnya pengetahuan kepariwisataan masyarakat disekitar ODTW	4 angkatan				
2.04.2.04.01.17.011	Pengembangan SDM Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	1.Pembekalan Dimas Diajeng DIY	1 kegiatan	Terbekalinya Dimas Diajeng Provinsi DIY dan termantfaatkannya SDM Dimas Diajeng DIY	0 100%	Rp. 350.000.000,00	Rp. 385.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Pemberdayaan pemenang Dimas Diajeng di DIY sebagai pemandu/utusan penyebaran informasi pariwisata	1 kegiatan						
2.04.2.04.01.17.013	Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataan	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Meningkat	4 Kabupaten dan 1Kota	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	1. Java Summer Camp	1 kegiatan	Terlaksananya fasilitasi event pariwisata	0 100%	Rp. 1.790.000.000,00	Rp. 1.969.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Double Gardan Gathering	1 kegiatan						
							3. Jogja Bike Rendezvous	1 kegiatan						
							4. Off Road Challenge	1 kegiatan						
							5. Jogja Fashion Week	1 kegiatan						
							6. Lomba seni suara burung berkicau Nasional piala Raja HB dan Pakualaman Cup	1 kegiatan						
							7. Lomba Seni Burung Perkutut Nasional	1 kegiatan						
							8. Lomba Seni Burung Derkuku Nasional Piala Raja	1 kegiatan						
							9. Sumpah Pemuda Bikers Gathering	1 kegiatan						
							10. Lomba Pacuan Kuda Piala Raja HB CUP	1 kegiatan						
							11. Lomba Pacuan Kuda Piala Adipati PA CUP	1 kegiatan						
							12. Pekan Budaya Tionghua	1 kegiatan						
							13. Festival Pencak Silat	1 kegiatan						
							14. Tour De Jogja	1 kegiatan						
2.04.2.04.01.17.015	Penyelenggaraan Event Kepariwisataan	Ekonomi	Kunjungan dan Lama	4 Kabupaten	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	1.Jogja Air Show	1 kegiatan	Jumlah Kunjungan wisatawan ke DIY	7 penyelenggaraan	Rp. 2.275.000.000,00	Rp. 2.505.500.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 20.730.441.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Tinggal Wisatawan Nusantara Meningkat	dan 1 kota					meningkat					
							2.Festival Panjat Tebing	1 kegiatan						
							3. Festival Layang-layang	1 kegiatan						
							4.pawai pembangunan	1 kegiatan						
							5. Penyelenggaraan International Choir Competition	1 kegiatan						
							6.Festival Nasyid	1 kegiatan						
							7. Lomba Foto Pariwisata	1 kegiatan						
2.04.2.04.01.17.016	Sosialisasi Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	Terlaksanakannya Sosialisasi Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona	1 kegiatan	Tersosialisasikannya Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona	0 100%	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
2.04.2.04.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA*										Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 2.475.000.000,00		
2.04.2.04.01.18.001	Fasilitasi Penyelenggaraan Event di Desa Wisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah desa wisata	80 Desa wisata	1. Festival Memedi Sawah	1 kegiatan	Kuantitas dan kualitas event pariwisata di DIY meningkat	0 100%	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Nglanggeran Mountain Bike	1 kegiatan						
							3. Festival Kuliner Banjaroyo	1 kegiatan						
							4. Penyelenggaraan Event di Desa Wisata	1 kegiatan						
2.04.2.04.01.18.003	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Wisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah desa wisata	80 Desa wisata	1. Terselenggaranya lomba pokdarwis tingkat DIY	1 kegiatan	Meningkatnya SDM Desa Wisata dan Kelembagaan Desa Wisata-	0 100%	Rp. 750.000.000,00	Rp. 825.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Terselenggaranya fasilitasi pengembangan desa/kampung wisata	1 kegiatan						
							3.Penguatan Kelembagaan Pokdarwis di Desa Wisata	1 kegiatan						
							4. Forum temu desa wisata anggota MPU	1 kegiatan						
							5. Lomba desa wisata tingkat DIY	1 kegiatan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.05	Kelautan dan Perikanan													
2.05.01	Dinas Kelautan dan perikanan.													
2.05.2.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp. 2.368.965.000,00	Rp. 2.437.600.000,00		
2.05.2.05.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Perangko Kilat	580 buah	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 17.525.000,00	Rp. 19.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Perangko biasa	50 buah						
							3. Materai 3000	1700 buah						
							4. Materai 6000	1700 buah						
							5.Biaya Pengiriman	12 bulan						
2.05.2.05.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi,SD Air dan Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1. Rekening Telepon	12 bulan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 1.166.400.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Rekening Listrik	12 bulan						
							3. Jasa Internet	12 bulan						
							4. Rekening PDAM	12 bulan						
2.05.2.05.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	a. KIR	4 unit	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	0 %	Rp. 26.014.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							b. STNK Roda 4	18 unit						
							c. STNK Roda 2	20 unit						
							d. STNK roda 3	6 unit						
2.05.2.05.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	a. Honor Pengelola Keuangan Daerah	12 bulan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 77.930.000,00	Rp. 80.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat				b. Honor Pengelola Barang Daerah	12 bulan						
							c. Honor Pengelola Kepegawaian	12 bulan						
2.05.2.05.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	a. Lantai Keramik	12 bulan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 124.880.000,00	Rp. 125.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							b. Kaca	12 bulan						
							c. Kamar Mandi dan WC	12 bulan						
							d. Halaman	12 bulan						
							e. Dinding	12 bulan						
2.05.2.05.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Alat tulis perkantoran	39 jenis	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 83.732.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	a. Barang Cetakan	13 jenis	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 66.946.000,00	Rp. 67.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							b. Fotocopy	117000 lembar						
							c. Jilid	305 eksp						
2.05.2.05.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Lampu penerangan dan alat listrik	18 jenis	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 54.465.000,00	Rp. 55.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Peralatan dan Bahan Kebutuhan Rumah Tangga	16 jenis	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 26.793.000,00	Rp. 25.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan perundang- undangan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	a. Surat Kabar	12 bulan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 27.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat				b. Majalah	12 bulan						
							c. Buku IPTEK	1 Paket						
							d. Buku Per-UU	1 Paket						
2.05.2.05.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Hidangan rapat koordinasi unit kerja dan pembinaan kepegawaian	7665 os	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 70.750.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah12	12 bulan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 300.170.000,00	Rp. 315.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							b. Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan						
2.05.2.05.01.01.022	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Honor Penjaga Keamanan kantor/Gedung	12 bulan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 324.800.000,00	Rp. 350.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.01.026	Penyediaan Retribusi Sampah	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kebersihan Lingkungan kantor	12 bulan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp. 1.560.000,00	Rp. 1.600.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 8.836.993.000,00	Rp. 2.830.000.000,00		
2.05.2.05.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Gedung asrama BAT Bejiharjo	80 m2	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 5.473.511.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							Gudang Pakan BAP Congot	30 m2						
							Gedung Kantor BAP Congot	80 m2						
							Gedung Kantor UPTD BPTKP (2 Lantai)	1 Paket						
							Pembangunan rumah dinas	1 Paket						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							kepala pelabuhan sadeng							
							Pembuatan taman Pelabuhan sadeng	1 Paket						
2.05.2.05.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Kendaraan Fungsional Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1 unit	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	a. Almari Arsip	17 buah	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 414.673.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							b. Rak Besi	6 unit						
							c. Filling Cabinet	14 unit						
							d. AC	12 unit						
							e. Vertical Blinds	20 unit						
							f. Kursi Besi	2 buah						
							g. Teralis	65 m2						
							h. Sekat Ruangan	3 unit						
							i. Kasur	10 unit						
							j. Almari Laboratorium	1 unit						
k. Gordyn	100 m													
2.05.2.05.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Note Book	8 unit	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 354.335.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Komputer PC	8 unit						
							3. Printer	9 unit						
							4. Handycam	2 unit						
							5. Kamera Digital	4 unit						
							6. Amplifier	5 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							7. Microphone	10 buah						
							8. Box Speaker	5 unit						
							9. Wireless Sound	3 unit						
							10. Proyektor	1 unit						
							11. Layar/Proyektor	1 unit						
							12. CCTV	1 Paket						
							13. TV LCD/ LED	8 unit						
							14. Printer Dotmatrix	1 unit						
							15. Mesin Tik	3 unit						
							16. Megaphone	1 unit						
2.05.2.05.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Meja Kursi Tamu	8 Paket	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 247.595.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Meja Komputer	5 unit						
							3. Kursi Komputer	5 unit						
							4. Meja Rapat	40 unit						
							5. Kursi rapat	80 unit						
							6. Meja kerja	18 unit						
							7. Kursi kerja	18 unit						
							8. Lemari pakaian	4 unit						
							9. Tempat tidur	4 unit						
2.05.2.05.01.02.017	Penyusunan Laporan keuangan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1 Laporan prognosis dan semesteran APBD 2015	1 dokumen	Sebagai bahan indikator penentu keberhasilan, acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	100 %	Rp. 29.500.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.02.019	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	2. Laporan akhir tahun	1 dokumen			Rp. 40.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							1. FGD monev	30 orang x 4 kali	Sebagai bahan indikator penentu keberhasilan, acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	100 %				
							2. Laporan monev bulanan	1 dokumen						
							3. Laporan monev triwulan	1 dokumen						
							4. Laporan monev semesteran	1 dokumen						
							5. Laporan tahunan	1 dokumen						
2.05.2.05.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	-Pengecatan Dinding	1750 m2	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 192.425.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							-Pemeliharaan pintu	25 unit						
							-Pemeliharaan jendela	25 unit						
							-Pemeliharaan pintu gerbang dan pagar besi	5 unit						
							-Pengecatan dinding pagar dan pembatas taman	500 m2						
							-Pemeliharaan taman	4800 m2						
							-Perbaikan dan saluran air	1 Paket						
							-Pemeliharaan kolam dan aquarium	5 unit						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							-Pemasangan lantai keramik	1 Paket						
							-Penambahan jaringan internet	1 Paket						
2.05.2.05.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	a. Jasa Service, Suku Cadang, BBM Operasional Roda 4	12 bulan	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 588.205.000,00	Rp. 600.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							b. Jasa Service, Suku Cadang, BBM Operasional Roda 3	12 bulan						
							c. Jasa Service, Suku Cadang, BBM Operasional Roda 2"	12 bulan						
2.05.2.05.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pemeliharaan AC	47 unit	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 30.200.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	1. Pemeliharaan Mesin Ketik	10 unit	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 28.970.000,00	Rp. 30.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Pemeliharaan Facimili	2 unit						
							3. Pemeliharaan Sound System	2 unit						
							4. Pemeliharaan Telepon	15 unit						
							5. Pemeliharaan Komputer	25 unit						
							6. Pemeliharaan Laptop	26 unit						
							7. Pengisian Tabung pemadam kebakaran	4 Kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluir	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	a. Pemeliharaan meja	25 unit	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 6.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							b. Pemeliharaan kursi	20 unit						
							c. Pemeliharaan almari	5 unit						
							d. Pemeliharaan Filling Cabinet	10 unit						
2.05.2.05.01.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rehab Ruang Rapat Sidat	1 unit	Kelancaran dan kenyamanan kerja	100 %	Rp. 1.231.579.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							Rehab Tempat Parkir Dinas	1 unit						
							Rehab Garasi Dinas	1 unit						
							Rehab Musola Dinas	1 unit						
							Rehab Gudang Dinas	1 unit						
							Rehab Rumah Jaga BAT Sendangsari	54 m2						
							Rehab Konblok Dempon BAP Samas	300 m2						
							Rehab Aspal Jalan Masuk BAP Samas	300 m2						
							Rehab Asrama BAP Samas	30 m2						
							Rehab bak Fitoplankton BAL Sundak	50 m2						
							Rehab Pagar BAL Sundak	300 m						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Rehab Rumah Dinas BAT Cangkringan	54 m2						
							Rehab Pagar Keliling BAT Wonocatur	300 m						
							Rehab Pagar Keliling BAT Bejiharjo	400 m2						
2.05.2.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp. 233.500.000,00	Rp. 228.500.000,00		
2.05.2.05.01.06.016	Penyusunan laporan kinerja SKPD	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Dokumen Lakip	1 dokumen	Sebagai bahan indikator penentu keberhasilan, acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	100 %	Rp. 3.500.000,00	Rp. 3.500.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Dokumen PK	1 dokumen						
							3. Dokumen RKT	1 dokumen						
2.05.2.05.01.06.018	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	1. Penyusunan perencanaan pengembangan kelautan dan perikanan	1 tahun	Sebagai bahan indikator penentu keberhasilan, acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	100 %	Rp. 230.000.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Dokumen Renja	1 dokumen						
							3. Dokumen RKA	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Dokumen DPA	1 dokumen						
							5. Dokumen DPPA	1 dokumen						
							6. Buku data pokok perikanan dan kelautan	100 buku						
							7. Buku analisis data produksi perikanan dan kelautan	100 buku						
2.05.2.05.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT										Rp. 546.700.000,00	Rp. 570.000.000,00		
2.05.2.05.01.17.002	Fasilitasi Perijinan Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	300 dokumen	1. Sosialisasi Perijinan tangkap dan budidaya.	40 Orang x 4 lok x 2 A	Berkurangnya tingkat pelanggaran	10 %	Rp. 90.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Fasilitasi perijinan tangkap dan budidaya	40 Orang x 4 lok x 2 A						
2.05.2.05.01.17.008	Peningkatan wasdal SDI di PU dan Laut	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	300 dokumen	1. Operasi terpadu pengawasan	20 Kali	Berkurangnya tingkat pelanggaran	10 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Operasional speedboat	1 tahun						
2.05.2.05.01.17.011	Optimalisasi dan Pengembangan siswasmas	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kulonprogo, Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kota Yogya	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	300 dokumen	1. Pembentukan pokmaswas	150 Orang	Berkurangnya tingkat pelanggaran	10 %	Rp. 106.200.000,00	Rp. 95.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Sosialisasi siswasmas	150 Orang						
2.05.2.05.01.17.016	Pengelolaan SDI (Sumber Daya Ikan)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	300 dokumen	Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan	30 orang x 5 lokasi	Berkurangnya tingkat pelanggaran	10 %	Rp. 200.500.000,00	Rp. 225.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.18	PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM										Rp. 135.729.000,00	Rp. 150.000.000,00		
2.05.2.05.01.18.004	Peningkatan Mitigasi Bencana Alam dan Prakiraan Iklim Laut	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kretek Purwosari Tanjungsari Temon Tepus Wates	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	1530 Orang	1. Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim	30 orang x 3 kab x 2 lok	Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri	10 %	Rp. 135.729.000,00	Rp. 150.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
				2. Pelatihan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim			30 orang x 3 kab x 2 lok x 2 hr							
				3. Sosialisasi Rehabilitasi Tanaman Pantai			30 Orang x 3 kab							
2.05.2.05.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN										Rp. 9.877.601.000,00	Rp. 7.495.000.000,00		
2.05.2.05.01.20.003	Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Bimtek / magang perikanan budidaya	360 Orang	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	5 %	Rp. 5.619.601.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20.004	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	1. Sampel HPI (Hama Penyakit Ikan)	90 Sampel	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	5 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 175.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
				2. Bimtek CBIB			200 Orang							
				3. Sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)			10 Sertifikat							
2.05.2.05.01.20.009	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Tepus	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Produksi Benih Ikan Bandeng	1600000 ekor	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	5 %	Rp. 435.000.000,00	Rp. 450.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20.010	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Srandakan dan congnot	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Produksi udang	5000 kg	meningkatnya produksi perikanan budidaya	5 %	Rp. 1.425.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Produksi Larva dan benur udang galah	12000000 ekor						
2.05.2.05.01.20.015	Pembinaan Mutu Benih dan Induk Perikanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Bimtek CPIB dan Perbenihan	90 Orang	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	5 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20.018	Pelayanan dan Pengendalian Hama Penyakit	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Pengujian Hama dan Penyakit Ikan	250 Sampel	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	5 %	Rp. 168.000.000,00	Rp. 170.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.20.019	Peningkatan Induk, bibit Unggul BAT	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	4 Unit kerja BAT	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	1.Benih Ikan (Nila merah, Lele, Mas, Gurami)	16000000 ekor	meningkatnya produksi perikanan budidaya	5 %	Rp. 1.590.000.000,00	Rp. 1.700.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2.Calon Induk (Nila merah, Lele, Mas, Gurami)	7000 kg						
2.05.2.05.01.20.021	Kaji Teknologi Pengolahan Pakan Ikan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	4 Unit kerja BAT	Produksi Perikanan budidaya	70500 ton	Rekomendasi Teknologi Pengolahan Pakan Ikan : 1. Rekomendasi pengembagnan bioflok untuk budidaya lele; 2. Rekomendasi pengembangan bioflok untuk pakan alternatif budidaya nila; 3. Pemanfaa	4 laporan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	5 %	Rp. 240.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP*										Rp. 6.359.193.500,00	Rp. 4.135.000.000,00		
2.05.2.05.01.21.009	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Pelabuhan Tanjung Adikarta Kulonprogo	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	1.Pembuatan jalan masuk	1120 m	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	38 %	Rp. 4.213.500.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2.Pembuatan Gapura	1 unit						
							3.Pembangunan Pagar samping jalan masuk	400 m						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4.Penerangan Jalan masuk	1 Paket						
							5.Pembangunan Rumah Jaga	108 m2						
							6.Drainase samping jalan masuk	600 m						
							7.Landscape Jalan Masuk	800 m2						
							8. SOP pelabuhan	1 dokumen						
2.05.2.05.01.21.014	Uji coba pengembangan teknologi alat pengkapan ikan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Girisubo	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	Uji coba pengembangan teknologi pengkapan ikan (Pembuatan umpan palsu)	1 dokumen	meningkatnya produksi perikanan tangkap	1 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.21.017	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Gunungkidul, Bantul, Kuonprogo	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	1. Bimtek ATKAPIN III (Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan)	30 Orang	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	38 %	Rp. 1.237.770.500,00	Rp. 1.300.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Bimtek BST (Basic Safety Training)	30 Orang						
							3. Pelatihan Awak Kapal 30 GT	75 Orang						
							4. Bimtek Navigasi Kapal Perikanan bagi Perwira Kapal Perikanan	30 Orang						
							5. Magang Pengelolaan Kapal > 30 GT	16 Orang						
							6. Magang Pengelolaan Perbengkelan dan Docking	10 Orang						
							7. Bimtek Perawatan dan	30 Orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.21.018	Pengembangan Usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	Perbaikan Mesin Kapal				Rp. 721.673.000,00	Rp. 700.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							Pelatihan Kader Nelayan	30 Orang	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	38 %				
							Asuransi Nelayan	900 Orang						
							Bimtek Penangkapan Ikan dg Gill Net	30 Orang						
							Bimtek Diversifikasi Penangkapan Ikan berdasar musim dan jenis ikan	30 Orang						
							Bimtek Penanganan Ikan diatas kapal	30 Orang						
							Penyusunan Profil Perikanan Tangkap	1 dok						
							Study Banding Pengelolaan Kelembagaan Kelompok Nelayan	20 Orang						
2.05.2.05.01.21.097	Peningkatan Pelayanan Pelabuhan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Girisubo	Produksi perikanan tangkap	6900 ton	Koodinasi dan sinkronisasi ketetiban / keamanan pelabuhan	30 Orang	meningkatnya produksi perikanan tangkap	38 %	Rp. 56.250.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
							Koordinasi dan sinkronisasi kesyahbandaran	30 Orang						
2.05.2.05.01.21.099	Uji Coba Pengembangan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat	Girisubo	Produksi perikanan	6900 ton	Uji pembuatan garam	1 dokumen	meningkatnya produksi	1 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Teknologi Kelautan		Meningkat		tangkap				perikanan tangkap				dan perikanan.	
2.05.2.05.01.23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										Rp. 2.178.200.000,00	Rp. 2.060.000.000,00		
2.05.2.05.01.23.003	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Kulonprogo, Bantul, Sleman, gunungkidul dan Kota Yogya	Angka ketersediaan dan Konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	1. Kampanye makan Ikan	250 Paket	Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat	10 %	Rp. 350.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Sosialisasi Alih Teknologi Informasi (ATI)	1000 Orang						
2.05.2.05.01.23.005	Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Angka ketersediaan dan Konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	Bimtek Pengolahan produk perikanan bagi masyarakat	30 Orang x 3 hari x 3 angkatan	Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat	5 %	Rp. 187.200.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.23.007	Pengawasan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dislautkan DIY	Angka ketersediaan dan Konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	1). Pengujian sampel produk hasil perikanan	400 Sampel	Ketersediaan Hasil kelautan dan perikanan meningkat	10 %	Rp. 650.000.000,00	Rp. 400.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2). Ekspose hasil pengujian mutu	120 Orang						
							3). Sosialisasi Larangan Penggunaan BTB	150 Orang						
							4). Sosialisasi pembinaan pra SKP	600 Orang						
							5). Sosialiai pembinaan mutu produk perikanan,	600 Orang						
							6). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Perikanan (SNI)	400 Sampel						
2.05.2.05.01.23.008	Pengembangan Pola Kemitraan Antar	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat	DIY	Angka ketersediaan	28.55 Kg/kapita/Th	Kemitraan antara UKM	30 orang x 2	Ketersediaan hasil kelautan	5 %	Rp. 220.000.000,00	Rp. 230.000.000,00	Dinas Kelautan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		Meningkat		dan Konsumsi ikan per kapita		pengolah dengan UKM pengolah lainnya	angkatan	dan perikanan meningkat				dan perikanan.	
							Kemitraan antara UKM pengolah dengan pedagang ikan	30 orang x 2 angkatan						
							Kemitraan antara UKM pengolah dengan pembudidaya ikan	30 orang x 2 angkatan						
							Kemitraan antara UKM pengolah dengan Nelayan	30 orang x 2 angkatan						
							Kemitraan antara UKM pengolah dengan Poklahsar	30 orang x 2 angkatan						
							Kemitraan antara pembudidaya dengan Poklahsar	30 orang x 2 angkatan						
							Sosialisasi poklahsar penerima PUMP P2HP	30 orang x 2 angkatan						
							Kemitraan antara UPR dengan pembudidaya	30 orang x 2 angkatan						
							Kemitraan antara Poklahsar dengan Toko oleh oleh/ supermarket	50 orang x 2 angkatan						
							Kemitraan antara UPTD Budidaya Air Tawar dengan UPR	30 orang x 2 angkatan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.23.010	Promosi Perikanan Dan Kelautan/ Pameran	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY dan luar DIY	Angka ketersediaan dan Konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	1. Pameran	5 orang x 2 angkatan			Rp. 492.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Majalah Swamitramina	4 penerbitan						
							3.Branding produk"	1 produk						
2.05.2.05.01.23.016	Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Dislautkan DIY	Angka ketersediaan dan Konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	Sosialisasi akses permodalan bagi pemasar hasil perikanan	30 orang x 2 angkatan	meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan	10 %	Rp. 120.000.000,00	Rp. 130.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							Sosialisasi akses permodalan bagi pemasar hasil perikanan	30 orang x 2 angkatan						
							Sosialisasi akses permodalan bagi pembudidaya ikan	30 orang x 2 angkatan						
							Sosialisasi akses permodalan bagi nelayan	30 orang x 2 angkatan						
							Sosialisasi asuransi bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, dan pengolah)	30 orang x 2 angkatan						
							Workshop/ Temu koordinasi KKMB dengan UKM dan perbankan	50 Orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Workshop/ Temu koordinasi investasi dan permodalan perikanan budidaya	50 Orang						
							Workshop/ Temu koordinasi investasi dan permodalan perikanan tangkap	50 Orang						
2.05.2.05.01.23.017	Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	diy	Angka ketersediaan dan Konsumsi ikan per kapita	28.55 Kg/kapita/Th	Pengembangan jaringan pemasaran	2 jenis	Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat	5 %	Rp. 159.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR										Rp. 1.211.250.000,00	Rp. 1.400.000.000,00		
2.05.2.05.01.24.004	Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Laut Sundak	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Tepus	Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	14 Ha	Rekomendasi : a. Uji coba Pembesaran Lobster b. Budidaya Ikan Hias Air Laut	2 laporan	Acuan dalam pengembangan Kawasan	10 %	Rp. 174.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.24.005	Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	4 unit kerja BAT	Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	14 Ha	1. Seleksi individu untuk produksi dan galur harapan varietas ikan nila 2. Seleksi pertumbuhan dan tahan KHV ikan mas cangkringan 3. Hibridasi ikan gurami untuk pengembangan varietas 4. Hibridisasi ikan lele untuk pengembangan varietas 5. Domesti	5 laporan	Acuan dalam pengembangan Kawasan	10 %	Rp. 850.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.24.006	Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Payau	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	- Srandakan - Congot	Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	14 Ha	a. Uji Pembuatan Tokolan dengan Sistem Happa b. Pembesaran Bawal Bintang	2 laporan	Acuan dalam pengembangan Kawasan	10 %	Rp. 187.250.000,00	Rp. 200.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.25	PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM										Rp. 257.741.000,00	Rp. 275.000.000,00		
2.05.2.05.01.25.002	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Secara Berkelanjutan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	0.11 .	1. Sosialisasi dalam pengelolaan konservasi mangrove	35 orang x 3 angkatan	Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat	10 %	Rp. 51.200.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Sarasehan Kawasan Konservasi Perairan Wediombo	30 orang x 2 angkatan						
2.05.2.05.01.25.005	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo,	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	0.11 .	1. Sosialisasi Permen 19/MEN/2012 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat dari Wilayah RI	30 orang x 3 angkatan	Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat	10 %	Rp. 57.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Bimtek Identifikasi dan Pemilahan Sidat yang Beruaya di DIY	30 Orang						
2.05.2.05.01.25.007	Peningkatan Stok Sumberdaya Perikanan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	0.11 .	1.Sosialisasi/ pembekalan pelesarian ikan dan laut	30 Orang	Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat	5 %	Rp. 52.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.25.009	Pengembangan Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan	0.11 .	1. Sosialisasi Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir	30 orang (3 angkatan)	Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan	10 %	Rp. 97.541.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					total				meningkat					
							2. Bimtek Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir	30 orang (3 angkatan)						
2.05.2.05.01.26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN										Rp. 579.300.000,00	Rp. 580.000.000,00		
2.05.2.05.01.26.001	Pengembangan Kelembagaan Penyuluh Swadaya	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	NTP sektor perikanan	116.89 %	Koodinasi penyuluh swadaya	50 Orang x 2 angkatan	Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera	10 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.26.003	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penyuluh	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	NTP sektor perikanan	116.89 %	Pelatihan kewirausahaan penyuluh	30 orang x 3 hari	Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera	10 %	Rp. 62.000.000,00	Rp. 70.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.26.004	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Gunung Kidul kec.Girisubo , Bantul kec.Sanden, Kulon Progo kec. Bugel Gunung Kidul kec. Tepus, Bantul Kec.Sanden , Kulon Progo Kec.Galur Gunung Kidul Kec.Tanjungsari, Kec.Tepus "	NTP sektor perikanan	116.89 %	1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	30 Orang x 3 kab	Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera	10 %	Rp. 90.200.000,00	Rp. 100.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Fasilitasi Jejaring Usaha	30 Orang x 3 kab						
							4. Sosialisasi Pesisir Berseri	30 Orang x 3 kab						
2.05.2.05.01.26.005	Pengembangan Penyuluhan Budaya Kelautan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	"Gunungkidul, kec. Girisubo, Ponjong, Karangmojo Bantul,Kulon Progo,	NTP sektor perikanan	116.89 %	Sosialisasi budaya Kelautan	35 Orang x 6 angkatan	Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera	10 %	Rp. 50.000.000,00	Rp. 60.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Non Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 32.585.172.500,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05.2.05.01.26.006	Pengembangan Jiwa Kebaharian Pada Generasi Muda	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DKP DIY dan Pantai Drini / Ngandong	NTP sektor perikanan	116.89 %	1. Sosialisasi Tumbuhkan Kesadaran Generasi Muda sebagai Bangsa Bahari	30 orang x 3 angkatan	Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera	10 %	Rp. 82.000.000,00	Rp. 90.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Kemah Bahari	40 orang x 2 hari						
							3. Cerdas Cermat	40 Orang						
							4. Karya Tulis " Tumbuhkan Kesadaran Generasi Muda sebagai Bangsa Bahari "	40 Orang						
							5. Workshop	40 Orang						
2.05.2.05.01.26.007	Penyelenggaraan Hari Nusantara	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	"DKP DIY, Bantul"	NTP sektor perikanan	116.89 %	1. Sarasehan Persamaan Persepsi Tentang Kemaritiman	40 Orang	Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera	10 %	Rp. 130.100.000,00	Rp. 140.000.000,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan
							2. Seminar Persamaan Persepsi Tentang Kemaritiman	60 Orang						
							3. Bersih Pantai untuk Menanamkan Jiwa Cinta Bahari	1000 Orang						
2.05.2.05.01.26.008	Penguatan Kelembagaan Pembenih Ikan	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	diy	NTP sektor perikanan	116.89 %	Penguatan sistem Kelembagaan Pembenih Ikan	30 Orang x 2 hari x 2 angkatan	Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang mandiri dan sejahtera	10 %	Rp. 65.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Sedang Berjalan

5.2 Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015 (Dana Keistimewaan)

Secara lebih jelasnya rekapitulasi usulan kegiatan dan pendanaan keistimewaan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Rekapitulasi usulan kegiatan dan pendanaan Keistimewaan Tahun 2015

No	Dana Keistimewaan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Pengisian Kepala Daerah	0	0	Rp 0.00	0,00 %
2	Kelembagaan Pemda	1	5	Rp 2,250,000,000.00	0,22 %
3	Kebudayaan	23	64	Rp 707,148,000,000.00	69,11 %
4	Pertanahan	1	6	Rp 23,775,000,000.00	2,32 %
5	Tata Ruang	4	32	Rp 290,100,000,000.00	28,35 %
Total		29	107	Rp 1,023,273,000,000.00	100 %

Tabel 5.3 Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2015 (Dana Keistimewaan)

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	Rp. 825.038.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	Rp. 2.463.100.000
3	1.01.17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA,SMK)	79.71 %	Rp. 5.634.785.000,00
4	1.01.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	Rp. 533.080.000,00
5	1.01.27	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA*	1 - Wajib	01 - Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	Rp. 4.876.000.000,00
6	1.02.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	1 - Wajib	02 - Kesehatan	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %	Rp. 330.000.000,00
7	1.05.18	PROGRAM PENATAAN RUANG KEISTIMEWAAN DIY*	1 - Wajib	05 - Penataan Ruang	Persentase pengaturan dan pengembangan	60 %	Rp. 3.400.000.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
					kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya		
8	1.05.19	PROGRAM PENATAAN KAWASAN BUDAYA PENDUKUNG KEISTIMEWAAN*	1 - Wajib	05 - Penataan Ruang	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Rp. 149.100.000.000,00
9	1.07.24	PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN*	1 - Wajib	07 - Perhubungan	Persentase dukungan Sarpras Transortasi pada kawasan budaya	27 %	Rp. 21.600.000.000,00
10	1.08.25	PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA*	1 - Wajib	08 - Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis budaya dalam rangka mendukung keistimewaan	6.5 %	Rp. 12.500.000.000,00
11	1.09.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH	1 - Wajib	09 - Pertanahan	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Rp.23.775.000.000,00
12	1.17.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	Rp. 167,051,677,000 ,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.17.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	50.29 %	Rp. 340.225.947.000,00
14	1.17.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	15 %	Rp. 55.000.000.000,00
15	1.17.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase implementasi hasil kesepakatan	15 %	Rp. 18.920.000.000,00
16	1.17.19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN*	1 - Wajib	17 - Kebudayaan	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	40 %	Rp. 56.750.000.000,00
17	1.18.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA*	1 - Wajib	18 - Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	2200 Orang	Rp. 985.410.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
18	1.20.29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH*	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Rp. 2.250.000.000,00
19	1.20.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Rp. 750.000.000,00

RKPD Tahun 2015

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
20	1.20.30	PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Rp. 300.000.000,00
21	1.20.32	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	1 - Wajib	20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Rp. 752.963.000,00
22	1.24.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH*	1 - Wajib	24 - Kearsipan	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	11 %	Rp. 1.700.000.000,00
23	1.24.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	1 - Wajib	24 - Kearsipan	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Rp. 450.000.000,00

No	Kode	Nama Program	Urusan	Bidang Urusan	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
24	1.25.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1 - Wajib	25 - Komunikasi dan Informatika	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	Rp. 15.000.000.000,00
25	1.26.15	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN*	1 - Wajib	26 - Perpustakaan	Peningkatan fasilitas perpustakaan	85 %	Rp. 850.000.000,00
26	2.04.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN*	2 - Pilihan	04 - Pariwisata	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	Rp. 15.000.000.000,00
27	2.05.26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	2 - Pilihan	05 - Kelautan dan Perikanan	NTP sektor perikanan	116.89 %	Rp. 250.000.000,00
28	3.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3 - Umum	00 - -	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Rp. 116.000.000.000,00

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 15.317.413.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.01	Pendidikan													
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga													
1.01.1.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI *										Rp. 825.038.000,00	Rp. 0,00		
1.01.1.01.01.15.098	Peningkatan Kapasitas Pendidikan PAUD dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	a. Pengembangan APE tradisional b. Workshop Model Pembelajaran PAUD berbahasa Jawa Bagi Pendidik PAUD c. pengembangan kemampuan berbahasa jawa dan budi pekerti bagi pendidik paud	3 kegiatan	peningkatan kompetensi pendidikan anak usia dini dalam penerapan pembelajaran berbasis budaya	3 kegiatan	Rp. 525.038.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.15.099	Pengembangan model Pengasuhan Anak Tradisi Jawa	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	84 %	a. buku model pengasuhan tradisi Jawa b. sosialisasi	200 buku, 6 orang	Pengembangan model pengasuhan anak dengan tradisi Jawa	200 buku, 6 orang	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										Rp. 2.463.100.000,00	Rp. 0,00		
1.01.1.01.01.16.135	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	84.92 %	a. Penguatan Pembelajaran Sejarah, Seni dan Budaya Yogyakarta b. Penguatan Ketrampilan Berbahasa Jawa bagi Kepala dan	4 kegiatan	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar dalam penerapan pembelajaran pendidikan berbasis budaya	4 kegiatan	Rp. 2.463.100.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 15.317.413.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Guru SLB dan CIBI c. Pelatihan Batik Bagi Guru SLB, SD dan SMP d. Ajang kreasi Seni dan Budaya Jenjang Pendidikan dasar							
1.01.1.01.01.17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH*										Rp. 5.634.785.000,00	Rp. 0,00		
1.01.1.01.01.17.166	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Menengah dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	79.71 %	a. Penguatan Pembelajaran Sejarah, Seni dan Budaya Yogyakarta bagi Guru SMA dan SMK b. Penelitian Sejarah, Seni dan Budaya Yogyakarta c. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Guru dan Siswa SMK dalam pengembangan dan pelestarian budaya Daerah d. Pelatihan K	6 kegiatan	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah dalam pembelajaran pendidikan berbasis budaya	6 kegiatan	Rp. 5.634.785.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL*										Rp. 533.080.000,00	Rp. 0,00		
1.01.1.01.01.18.064	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	DIY	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	8000 Orang	1. Wokshop Penyusunan Acuan Pendidikan Keaksaran Usaha Mandiri Tematik Batik 2. Bintek Pendidikan Keaksaran usaha Mandiri	3 Jenis Kegiatan	1. Acuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Tematik Batik 2. Peningkatan Kompetensi pendidikan keaksaraan usaha mandiri tematik batik 3. Peningkatan kompetensi membuat tradisional	3 Jenis Kegiatan	Rp. 533.080.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga											Jumlah Pagu : Rp. 15.317.413.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Tematik Batik 3. Pelatihan Membatik Tradisonal bagi Pendidik PNF (PKBM,LKP)		bagi pendidik PNF					
1.01.1.01.01.27	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA*										Rp. 4.876.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00		
1.01.1.01.01.27.007	Pengembangan sekolah model pendidikan berbasis budaya	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	sekolah model pendidikan berbasis budaya	100 Sekolah	Pengimplementasian pendidikan berbasis budaya di sekolah	100 Sekolah	Rp. 2.880.000.000,00	Rp. 3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.27.014	Pengembangan pedoman, bahan ajar dan media pembelajaran pendidikan karakter	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Daya Saing Pendidikan Meningkat	DIY	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	10 %	a. Bahan Ajar Pendidikan Karakter b. Digitalisasi media pembelajaran c. Aplikasi media pembelajaran d. Produksi video pembelajaran pendidikan karakter	4 kegiatan	Tersedianya bahan ajar pembelajaran pendidikan karakter	4 kegiatan	Rp. 1.996.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Sedang Berjalan
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga													
1.18.01	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga													
1.18.1.01.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAAHRAGA*										Rp. 985.410.000,00	Rp. 0,00		
1.18.1.01.01.20.036	Peningkatan Mutu dan Pemasyarakatan Olahraga Tradisional	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat	DIY	Jumlah masyarakat yang	2200 Orang	a. Pengembangan Senam Jogja	1 jenis	1. Berkembangnya Senam Jogja Istimewa	1 jenis	Rp. 985.410.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda	Baru - Mempercepat Capaian

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga										Jumlah Pagu : Rp. 15.317.413.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Meningkat		mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga		Istimewa						Dan Olahraga	Target
							b. Peningkatan Kompetensi Pelatih Senam Jogja Istimewa	60 Orang	2. Meningkatnya Kompetensi Pelatih Senam Jogja Istimewa	60 Orang				
							c. Workshop Olahraga Tradisional	5 cabang	3. Terselenggaranyya Olahraga Tradisional	5 cabang				
							d. Invitasi Olahraga Tradisional	3 jenjang	4. Berkembangnya Olahraga Tradisional	3 jenjang				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan											Jumlah Pagu : Rp. 330.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.02	Kesehatan													
1.02.01	Dinas Kesehatan													
1.02.1.02.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*										Rp. 330.000.000,00	Rp. 1.099.400.000,00		
1.02.1.02.01.19.015	Pengembangan dan Pemanfaatan Obat Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Yogyakarta	Persentase rumah tangga ber PHBS	48 %	1. Dokumen kajian awal informasi dan dokumentasi yankestradkom di DIY	1 dok materi media promkes	Meningkatnya Prosentase Rumah Tangga Ber PHBS	44 %	Rp. 330.000.000,00	Rp. 1.099.400.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							2. Dok kampanye hidup sehat melalui minum jamu	1 dok media promkes						
							3. Dok monitoring dan pemantauan dalam rangka mapping pengobatan tradisional di wilayah	1 paket media promkes (leaflet, poster, kalender, bu						
							4. Media cetak (buku saku dan buku pedoman toga	2 pt pemasangan baliho @ 3 bln						
							5. Dok sosialisasi pengembangan yankestradkom	32 kl pemasangan spanduk						
							6. Dok sosialisasi hygiene sanitasi dalam	200 kl tayang spot radio						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kesehatan										Jumlah Pagu : Rp. 330.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							pembuatan jamu gendong dan jamu racikan							
							7. Dok rancangan organisasi profesi pengobat komplementer alternatif	1 pt ILM DBD						
							8. Dok implementasi yankestradkom di Fasyankes	1 media promosi PJPD						
							9. Dok rapat persiapan dan evaluasi	1 dokumen						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : RS Grhasia

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 152.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.05	Penataan Ruang													
1.05.01	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM													
1.05.1.03.01.18	PROGRAM PENATAAN RUANG KEISTIMEWAAN DIY*										Rp. 3.400.000.000,00	Rp. 0,00		
1.05.1.03.01.18.006	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	1. Tersusunnya laporan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY 2. Workshop pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY	1 laporan	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.18.011	Fasilitasi Penyebaran Informasi Penataan Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	1. Sosialisasi penataan ruang kawasan Kasultanan dan Kadipaten 2. Iklan layanan masyarakat audio visual 3. Iklan layanan masyarakat audio	5 angkatan	Dukungan 8,11% Fasilitasi Penyebaran Informasi Penataan Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten terhadap pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.18.012	Pelatihan Pengelolaan dan Pengendalian Penataan Ruang di Satuan-Satuan Ruang Keistimewaan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Pelatihan Pengendalian dan Pengelolaan Penataan Ruang di satuan-satuan ruang keistimewaan	5 angkatan	Dukungan 5,41% peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan di wilayah tanah kasultanan &kadipaten	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 152.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									terkait penataan ruang terhadap pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya					
1.05.1.03.01.18.013	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Budaya Candi Kalasan	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	RDTR Kawasan Budaya Candi Kalasan	1 dokumen	Dukungan penataan ruang kawasan keistimewaan	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.18.021	Penyusunan NA, Raperda PZ Kraton Yogyakarta	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kraton Yogyakarta	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Tersusunnya NA, Raperda PZ Kraton Yk	1 laporan	Dukungan 6,67 % Penyusunan NA, Raperda PZ Kraton Yk terhadap prosentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.18.022	Penyusunan NA, Raperda PZ Pakualaman	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Pakualaman Yogyakarta	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Tersusunnya NA, Raperda PZ Pakualaman	1 laporan	Dukungan sebesar 6,67 % Penyusunan NA, Raperda PZ Pakualaman terhadap prosentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.18.023	Penyusunan PZ Kawasan Budaya Kotabaru	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kotabaru Yogyakarta	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan	60 %	Tersusunnya PZ Kawasan budaya kotabaru	1 laporan	Dukungan sebesar 13,33 % Penyusunan PZ Kawasan budaya	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 152.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya				kotabaru terhadap prosentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya					
1.05.1.03.01.18.024	Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Budaya Kotagede	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kotagede Yogyakarta	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Tersusunnya laporan dan tindak lanjut Pengawasan pemanfaatan kawasan budaya Kotagede	1 laporan	Dukungan sebesar 3,33 % Penyusunan laporan dan tindak lanjut Pengawasan pemanfaatan kawasan budaya Kotagede terhadap prosentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.18.025	Penyusunan NA, Raperda Kawasan Imogiri	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Imogori Yogyakarta	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Tersusunnya NA, Raperda Kawasan Imogiri	1 laporan	Dukungan sebesar 6,67 % Penyusunan NA, Raperda Kawasan Imogiri terhadap prosentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.18.026	Penyusunan RDTR Kws Budaya Pleret	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Pleret Yogyakarta	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi	60 %	Penyusunan RDTR Kws Budaya Pleret	1 laporan	Dukungan sebesar 16,67 % Penyusunan RDTR Kws Budaya Pleret terhadap prosentase pengaturan dan	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 152.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					budaya				pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya					
1.05.1.03.01.18.027	Penyusunan PZ Kawasan Budaya Sokoliman	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Sukoliman Yogyakarta	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Tersusunnya PZ Kawasan budaya Sokoliman	1 laporan	Dukungan sebesar 13,33 % Penyusunan PZ Kawasan budaya Sokoliman terhadap prosentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.18.028	Fasilitasi Raperda RTRW DIY	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	DIY	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	60 %	Terlaksananya Fasilitasi Raperda RTRW DIY	1 laporan	Dukungan sebesar 6,67 % Fasilitasi Raperda RTRW DIY terhadap prosentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.19	PROGRAM PENATAAN KAWASAN BUDAYA PENDUKUNG KEISTIMEWAAN*										Rp. 149.100.000.000,00	Rp. 8.580.000.000,00		
1.05.1.03.01.19.001	Penyusunan DED Penataan Kawasan pada Jalur / Akses Masuk Wilayah DIY	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	jalan akses masuk DIY	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Tersedianya dokumen DED Penataan Kawasan pada Jalur / Akses Masuk Wilayah DIY	1 dokumen	dukungan 2,7% berupa penyediaan dokumen DED jalur akses masuk wilayah DIY terhadap persentase penataan kawasan budaya sebesar	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 152.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									55,1%					
1.05.1.03.01.19.002	Penyusunan DED Koridor Kawasan Kraton- Krapyak	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kraton Panembahan	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Tersedianya dokumen DED Koridor Kawasan Kraton- Krapyak	1 dokumen	dukungan 0,81% berupa penyusunan DED kawasan kraton-krapyak terhadap penataan kawasan budaya sebesar 55,1%	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.19.003	Penataan/revitalisasi Kawasan cagar budaya Kraton yogyakarta	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kraton Panembahan	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Terlaksananya Penataan/revitalisasi Kawasan cagar budaya Kraton yogyakarta	1 Paket	dukungan 5,41% berupa penataan kawasan budaya kraton terhadap penataan kawasan budaya sebesar 55,1%	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.19.004	Penataan kawasan perkotan (sumbu filosofi)	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kawasan Sumbu Filosofi	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Tertatanya kawasan sumbu filosofi	1 Paket	dukungan 5,41% berupa penataan kawasansumbu filosofi terhadap persentase penataan kawasan budaya sebesar 55,1%	100 %	Rp. 21.400.000.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.03.01.19.005	Penyediaan Lahan untuk mendukung Kawasan Budaya	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Jalur Pantai Selatan Jawa Kawasan Code	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Tersedianya lahan di jalur pantai selatan Jawa dan Kawasan Code	50 Ha	Aksesibilitas di Jalur Pansela dan penataan kawasan Code	60 %	Rp. 107.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.19.006	Penataan/revitalisasi Kawasan cagar budaya Puro Pakualaman	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Pakualaman Purwo Kinanti	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Tertatanya kawasan cagar budaya Puro Pakualaman	1 Paket	dukungan sebesar 15.31% berupa penataan kawasan budaya puro pakualaman terhadap persentase penataan kawasan budaya sebesar 55.1%	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.650.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 152.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.03.01.19.007	Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Budaya Kotabaru	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Gondokusuman Kotabaru	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Tersedianya dokumen Masterplan dan DED kawasan Budaya Kotabaru	1 dokumen	dukungan 4.04% berupa penyediaan dokumen masterplan dan DED kawasan kotabaru terhadap persentase penataan kawasan budaya sebesar 55.1%	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.19.008	Penataan/Revitalisasi Kawasan Budaya Kotagede	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kotagede Prenggan Purbayan	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Tertatanya kawasan budaya kotagede	1 Paket	dukungan 20,20% berupa penataan kawasan budaya kotagede terhadap persentase penataan kawasan budaya sebesar 55.1%	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.03.01.19.009	Fasilitasi Rapergub RTBL Kawasan Puro Pakualaman	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Pakualaman	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Terfasilitasinya Rapergub RTBL kawasan Puro Pakualaman	1 kegiatan	dukungan sebesar 1,01% berupa fasilitasi rapergub terhadap persentase penataan kawasan budaya sebesar 55.1%	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.03.01.19.010	Penyusunan DED Koridor Pasar Legi - Watugilang , Kawasan Budaya Kotagede	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kotagede Purbayan	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunya DED Koridor Pasar Legi - Watugilang , Kawasan Budaya Kotagede	1 dokumen	dukungan 3.03% berupa penyusunan DED Koridor Pasar Legi - Watugilang , Kawasan Budaya Kotagede terhadap persentase penataan kawasan budaya sebesar 55.1%	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM											Jumlah Pagu : Rp. 152.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.1.03.01.19.011	Fasilitasi Rapergub RTBL Kawasan Kotabaru	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Gondokusuman	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Fasilitasi Rapergub RTBL Kawasan Kotabaru	1 kegiatan	dukungan 1.01% berupa fasilitasi rapergub RTBL kawasan budaya imogiri	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.19.012	Penyusunan masterplan dan DED Kompleks Pasareyan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat , Pajimatan, Imogiri	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Imogiri Imogiri	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	tersusunya masterplan dan DED Kompleks Pasareyan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat , Pajimatan, Imogiri	1 dokumen	dukungan 3.96% berupa masterplan dan DED Kompleks Pasareyan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat , Pajimatan, Imogiri terhadap persentase penataan kawasan budaya sebesar 55.1&	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.03.01.19.013	Fasilitasi Rapergub RTBL Kawasan Kraton	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kraton	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	terfasilitasinya rapergub RTBL Kraton	1 kegiatan	Dukungan 0,99% berupa terfasilitasinya RTBL kraton terhadap penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan DIY sebesar 49,5%	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan
1.05.1.03.01.19.015	Peningkatan jalan pada kawasan Malioboro dan sekitarnya	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Terkendali	Jalan pada kawasan Malioboro dan sekitarnya	Persentase penataan kawasan budaya	55.1 %	Peningkatan jalan di kawasan Malioboro	2 ruas jalan	Jalan pada kondisi mantap	2 ruas jalan	Rp. 12.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 36.600.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.07	Perhubungan													
1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika													
1.07.1.07.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN*										Rp. 21.600.000.000,00	Rp. 0,00		
1.07.1.07.01.24.001	Penyusunan MasterPlan Jalur/Zone Angkutan Tradisional yang mendukung Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Persentase dukungan Sarpras Transortasi pada kawasan budaya	27 %	Master Plan Jalur/Zone Angkutan Tradisional	10 dokumen	dukungan Penyusunan MasterPlan Jalur/Zone Angkutan Tradisional yang mendukung Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta terhadap Prosentase Dukungan Sarpras Transportasi pada Kawasan Budaya	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.24.002	Fasilitasi Penyusunan Perda Moda Transportasi Tradisional	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Persentase dukungan Sarpras Transortasi pada kawasan budaya	27 %	RAPERDA Moda Transportasi Tradisional	1 rancangan perda	dukungan Fasilitasi Penyusunan Perda Moda Transportasi Tradisional terhadap Persentase dukungan Sarpras Transortasi pada kawasan budaya sebesar 27 %	100 %	Rp. 200.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.24.003	Penyusunan Kajian Asal Tujuan Perjalanan di	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat,	Dinas Perhubungan, Komunikasi	Persentase dukungan Sarpras	27 %	Kajian Asal Tujuan Perjalanan	30 dokumen	dukungan Penyusunan Kajian Asal	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 36.600.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta		terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	dan Informatika	Transortasi pada kawasan budaya		di Perkotaan Yogyakarta		Tujuan Perjalanan di Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta terhadap Persentase dukungan Sarpras Transportasi pada kawasan budaya sebesar 27 %				dan Informatika	
1.07.1.07.01.24.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi pengguna kendaraan tidak bermotor di Kawasan Budaya Yogyakarta	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Danurejan Gondokusuman Jetis Kraton	Persentase dukungan Sarpras Transortasi pada kawasan budaya	27 %	- rambu lalu lintas - jalur sepeda - sandaran sepeda	3 Paket	dukungan Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi penggunasepeda di Kawasan Sumbu Filosofis dan Kawasan Budaya Kotabaru terhadap Persentase dukungan Sarpras Transportasi pada kawasan budaya sebesar 27 %	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.07.1.07.01.24.005	Penataan Transportasi Perkotaan Yogyakarta (Heritage City)	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Kota Yogyakarta	Persentase dukungan Sarpras Transortasi pada kawasan budaya	27 %	Penataan Transportasi Perkotaan Yogyakarta	1 Paket	dukungan Penataan Transportasi Perkotaan Yogyakarta (Heritage City) terhadap Persentase dukungan Sarpras Transportasi pada kawasan budaya sebesar 27 %	100 %	Rp. 17.500.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
1.25	Komunikasi dan Informatika													

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											Jumlah Pagu : Rp. 36.600.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.25.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika													
1.25.1.07.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA										Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 0,00		
1.25.1.07.01.15.019	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	12 urusan/bidang	1. Media Informasi Digital 2. Materi Tayangan Informasi Digital 3. Perangkat Pendukung Sistem Informasi 4. CCTV	4 Paket	dukungan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY berbasis Digital terhadap Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	100 %	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup											Jumlah Pagu : Rp. 12.500.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.08	Lingkungan Hidup													
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup													
1.08.1.08.01.25	PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA*										Rp. 12.500.000.000,00	Rp. 0,00		
1.08.1.08.01.25.001	Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta	Persentase pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis budaya dalam rangka mendukung keistimewaan	6.5 %	1. Penyusunan Materi Teknis Kearifan Lokal Lingkungan Hidup	1 dokumen	Peningkatan budaya lokal ramah lingkungan	100 %	Rp. 12.500.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Lingkungan Hidup	Sedang Berjalan
							2. Gerakan Bersih Sungai	3 Sungai						
							3. Gerakan Bersih Desa	5 kecamatan						
							4. Inisiasi Desa Wisata Ramah Lingkungan	1 Paket						
							5. Pegadaaan kendaraan/truk pembersih jalan	2 unit						
							6. Pembangunan Telaga Desa	2 lokasi						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.07	Industri													
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM													
2.07.1.15.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH*										Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 0,00		
2.07.1.15.01.16.140	Pembinaan dan Pengembangan produk budaya khas Jogja	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	Jumlah IKM	81907 IKM	Pengembangan IKM Gamelan	1 kegiatan	Brkembangnya produk budaya khas Jogja	10 %	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sedang Berjalan
							Pengembangan IKM Andong	1 kegiatan						
							Pengembangan IKM Blangkon	1 kegiatan						
							Pengembangan IKM Keris	1 kegiatan						
							Pengembangan IKM Wayang Kulit	1 kegiatan						
							Pengembangan IKM Olahan Pangan Tradisional	1 kegiatan						
							Pengembangan IKM Mebel Ukiran Motif Jogja	1 kegiatan						
							Gelar Produk khas Jogja	1 kegiatan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM											Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Pengembangan IKM Batik dan Pakaian Tradisional	1 kegiatan						
							Pengembangan IKM Topeng Kayu	1 kegiatan						
							Pengembangan IKM Herbal	1 kegiatan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 765.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.17	Kebudayaan													
1.17.02	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.													
1.17.1.16.02.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA*										Rp. 765.000.000,00	Rp. 0,00		
1.17.1.16.02.15.003	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DKI Jakarta	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	1. Ketoprak	4 Kali	Tumbuhnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian khas Yogyakarta	100 %	Rp. 765.000.000,00	Rp. 0,00	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.	Sedang Berjalan
							2. Wayang Kulit	4 Kali						
							3. Joget Mataram	2 Kali						
							4. Pawai Budaya	1 Kali						
							5. Pementasan Tari	4 Kali						
							6. Kirab1 Suro	1 Kali						
							7. Kirab Budaya Rakyat	1 Kali						
							8. Gelar Seni Tradisi	1 Kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.											Jumlah Pagu : Rp. 765.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							9. Parade Tari Daerah	1 Kali						
							10. Parade Lagu Daerah	1 Kali						
							11. Parade Perkusi Daerah	1 Kali						
							12. Campursari	2 Kali						
							13. Workshop Tari	1 Kali						
							14. Wirabudaya	1 Kali						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.17	Kebudayaan													
1.17.01	Dinas Kebudayaan													
1.17.1.17.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA*										Rp. 166.286.677.000,00	Rp. 181.430.344.700,00		
1.17.1.17.01.15.005	Pengembangan Desa dan kantong Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi budaya dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	5. Promosi & publikasi "	395 Desa/Kelurahan	Berkembangya Kelembagaan Kebudayaan	100 %	Rp. 39.500.000.000,00	Rp. 43.450.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							4. Gelar Potensi	395 Desa/Kelurahan						
							3. penguatan kelembagaan	395 Desa/Kelurahan						
							2. pelatihan	395 Desa/Kelurahan						
							1. Sarana Prasarana	395 Desa/Kelurahan						
1.17.1.17.01.15.046	Pendampingan Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	3. Sarana dan prasarana	200 Orang	Terdampinginya Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya	100 %	Rp. 8.200.000.000,00	Rp. 9.020.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Pendampingan Tenaga Seni Budaya	100 desa/kelurahan @ 2 Orang						
							1. Rekruiemen Tenaga Pendamping	200 Orang						
1.17.1.17.01.15.049	Pengembangan bahasa dan sastra	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	6. Inventarisasi dan dokumentasi bahasa dan sastra	1 dokumen	Berkembangnya Bahasa dan Sastra	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							5. Pertemuan Sastrawan Nusantara	1 Kali						
							4. Macapat Rutin	10 Kali						
							3. Kompetisi Bahasa dan Sastra	5 kab/kota						
							2. Majalah Sempulur	3600 eksemplar						
							"1. Temu Karya sastra	1 Even						
1.17.1.17.01.15.050	Pelestarian, Pengembangan dan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi	DIY	Persentase organisasi	1.24 %	6. Lomba Dagelan Mataram	5 Kab / Kota	Lestari dan bkembangnya Nilai	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Aplikasi Nilai-Nilai Budaya Luhur di Masyarakat		masyarakat dalam pengembangan sosial budaya		budaya berkategori maju				Nilai Budi Luhur di Masyarakat					
							5. Gelar Pakeliran Padat	5 kab/kota						
							4. Animasi Tokoh Wayang	3 Tokoh Wayang						
							3. Fasilitasi Dewan Kebudayaan "	1 tahun						
							2. Gelar Ketoprak Pendapan	5 Pergelaran						
							1. Revitalisasi Seni	25 karya seni						
1.17.1.17.01.15.051	Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	7. Pembinaan Penghayar Kepercayaan "	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							6. Inventarisasi dan Rehabilitasi Petilasan	5 lokasi						
							5. Sarasehan dan Dialog	3 Kali						
							4. Pawai Budaya	1 Even						
							3. Pembinaan Pelaku Upacara Adat	60 peserta						
							2. Adat Suran	1 Pagelaran Dan Jamasan Pusaka						
							"1. festival upacara adat dan tradisi	5 Upaara Adat						
1.17.1.17.01.15.053	Pengelolaan dan Penguatan Desa Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	6. Promosi & publikasi	43 Desa	Terkelolanya Desa Budaya	100 %	Rp. 109.086.677.000,00	Rp. 119.995.344.700,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							5. Gelar Potensi "	43 Desa						
							4. penguatan kelembagaan	43 Desa						
							3. pelatihan	43 Desa						
							2. Sarana Prasarana	43 Desa						
							"1. Infrstruktur	43 Desa						
1.17.1.17.01.15.054	Pemberian Penghargaan Bagi	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi	DIY	Persentase organisasi	1.24 %	4. Seniman Budayawan	5 Orang/Lembaga	Terlaksananya Kegiatan	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelestari, Penggiat dan Maestro Budaya		masyarakat dalam pengembangan sosial budaya		budaya berkategori maju				Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari, Penggiat dan Maestro Budaya					
							3. Penggiat adat tradisi (termasuk penggiat kepercayaan)	5 Orang/Lembaga						
							2 Pelestari warisan budaya	5 Orang/Lembaga						
							"1. Pelestari Cagar budaya "	5 Orang/Lembaga						
1.17.1.17.01.15.055	Gelar Warisan budaya tak benda	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase organisasi budaya berkategori maju	1.24 %	3. Gelar Wayang	5 Hari	Dikenalnya Warisan Budaya Tak Benda oleh masyarakat secara luas	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Gelar Keris	5 Hari						
							"1.Gelar Batik	5 Hari						
1.17.1.17.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA*										Rp. 340.225.947.000,00	Rp. 374.248.541.700,00		
1.17.1.17.01.16.113	Fasilitasi Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Keraton & Puro Pakualaman	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	50.29 %	Kesekretariatan, nilai-nilai Kraton dan Puro, kegiatan-kegiatan seni budaya Kraton dan Puro	15 kegiatan	Terfasilitasinya Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya	100 %	Rp. 45.000.000.000,00	Rp. 49.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.16.116	Pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Dinas Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	50.29 %	15. seminar nasional permuseuman	1 event	Berkembang dan Terkeolanya Museum Sonobudoyo	100 %	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 22.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							14. pembuatan katalog perpustakaan	1 katalog						
							13.Publikasi dan Promosi Museum	1 Paket						
							12.Penggaadaan Peralatan Pengamanan	1 Paket						
							11. Inventariasi dan dokumentasi	5000 Koleksi						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan										Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							koleksi							
							10. Kajian Koleksi	5 Kali						
							9. Gelar Wisata Museum	1 Hari						
							8. Penyelamatan Koleksi	10 Jenis Koleksi						
							7. Penyelamatan Naskah	5 naskah						
							6. Reaktualiasi sastra	10 Kali						
							5. Pameran Museum	4 pameran						
							4. Wayang Durasi singkat	275 Kali						
							3. Pameran Temporer	2 pameran						
							2. Rehab Unit 2	1 Paket						
							"1. Rehab Unit 1	1 Paket						
1.17.1.17.01.16.117	Pembinaan dan Pengembangan Museum	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	50.29 %	8. Fasilitas Museum anggota Barahmus"	42 museum Anggota Barahamus	Berkembagnya Museum Museum di DIY	100 %	Rp. 32.550.000.000,00	Rp. 35.805.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							7. data base koleksi	1 Paket						
							6. Festival Museum	1 Even						
							5. Pelatihan museum,	42 museum						
							4. wajib Kunjung Museum,	1 Tahun Wajib						
							3. Revitalisasi museum	42 museum						
							2. Duta Museum,	10 Duta Museum						
							1. Regulasi Museum	1 Regulasi Museum						
1.17.1.17.01.16.119	Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	50.29 %	16.Konservasi Masjid Gereja Klenteng Cagar Budaya	8 BCB	Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya	100 %	Rp. 211.175.947.000,00	Rp. 232.293.541.700,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							15.Penataan Lightning	1 Paket						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan										Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Ketandan							
							14.Gapura Sisi Timur	1 Paket						
							13.Panggung Dan Ruang Kuliner	1 Paket						
							12.Pembangunan Parkir Tiga Lantai	1 Paket						
							11.Arcade sisi Selatan	1 Paket						
							10.Penguatan Karakter Bangunan Perempatan Ketandan	1 Paket						
							9. Penguatan Karakter bangunan4. Pelestarian Struktur dan Bangunan Utara Pasar Beringharjo	1 Paket						
							8. Penguatan Karakter bangunan ujung Barat ketandan	1 Paket						
							7.Pembebasan Lahan bekas UPN	3915 m2						
							6. Pendokumentasian	1 sistem informasi dan Penyusunan Buku						
							5. Pengawasan dan pengendalian	1 tim						
							4. Pelestarian Struktur dan Bnagunan	5 Pelestarian						
							3. Konservasi BCB	2 Jenis BCB						
							2. Fasilitas DP2WB	1 tahun						
							1. Regulasi	2 regulasi						
1.17.1.17.01.16.120	Pembinaan dan Pengembangan kesejarahan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasi masyarakat dalam pengembangan	Dinas Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan	50.29 %	6. Animasi Cerita rakyat	1 Paket	terlaksananya kegiatan pembinaan pengembangan kesejarahan	100 %	Rp. 6.500.000.000,00	Rp. 7.150.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan											Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			sosial budaya		cagar budaya yang dilestarikan		5. Lawatan Sejarah	50 peserta						
							4. dialog kesejarahan	50 peserta						
							3. pengembangan data base sejarah dan aplikasi infromasi sejarah, "	1 Paket						
							2. penulisan,	1 dokumen						
							1. pemetaan,	1 dokumen						
1.17.1.17.01.16.124	Warisan Budaya Nasional yang Dinominasikan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	50.29 %	6. bangunan fisik "	1 Paket	Terkelolanya Kekayaan Budaya	100 %	Rp. 25.000.000.000,00	Rp. 27.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							5. Penguatan Kelembagaan Kotagede,	1 lembaga						
							4. Sosialisasi,	5 Kali						
							3. Penyusunan Buku,	1 dokumen						
							2. Pendampingan,	1 tim						
							1. Terlaksananya Seminar,	3 Kali						
1.17.1.17.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA*										Rp. 55.000.000.000,00	Rp. 60.500.000.000,00		
1.17.1.17.01.17.046	Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	15 %	13.Gelar Seni Rupa	1 Even	Berkembangnya Seni Budaya Daerah	100 %	Rp. 11.000.000.000,00	Rp. 12.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							12. Ketoprak Lintas Generasi	1 Even						
							11. Partisipasi dalam HUT RI	1 Even						
							10. Festival dalang anak	1 Even						
							9. Kompetisi Budaya bagi anak-anak	1 Even						
							8. Pelatihan Seni	1 Even						
							7. Gelar Keroncong	1 Even						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan										Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							6. Gelar Musik	1 Even						
							5. Gelar teater Kolosal	1 Even						
							4. Festival Gamelan	1 Even						
							3. wayang orang	1 Even						
							2. Parade lagu1	1 Even						
							1. Pemberdayaan Organisasi	1 Even						
1.17.1.17.01.17.054	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM di bidang Kebudayaan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	15 %	1. Pawiyatan Nilai-nilai Budaya	50 Orang	Berkembngnya kapasita SDM di bidang Kebudayaan	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.17.055	Aktualisasi Kesenian Tradisional dan budaya kontemporer	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	15 %	"1. FKY 2. Fasilitas seni tradisional dan konteporer "	1 kabupaten/kota& Hari	Teraktualisasinya Kesenian Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer	100 %	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. 8.800.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.17.056	Promosi dan publikasi seni budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	15 %	6. Jogja Semesta "	12 Kali	Terpublikasinya Seni Budaya	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							5. Festival Ketoprak Kab/kota	10 Kali						
							4. Ensiklopedi Audio Visual	1 Paket						
							3. Talkshow budaya	6 Kali						
							2. Publikasi media Cetak	10 episode						
							1. Publikasi media elektronik	1 Paket						
1.17.1.17.01.17.058	Pembinaan dan Pengembangan Perfilman	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Dinas Kebudayaan	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	15 %	8. Penyusunan regulasi	1 dokumen	Berkembangnya Seni Perfilman di DIY	100 %	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 11.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							7. Pemetaan Perfilman DIY	1 dokumen						
							6. Perintisan BSFD DIY	1 dokumen						
							5. Pekan Film	5 Even						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan										Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							4. Pengadaan buku dan copyright film	0 Film Dan Buku						
							3. Pembuatan film	17 film						
							2. Muhibah seni film	1 Kali						
							1. Pemutaran film sepanjang tahun;	1 Paket						
1.17.1.17.01.17.059	Gelar Budaya Jogja	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	15 %	Gelar Budaya Jogja	1 event	Terlaksananya Kegiatan Gelar Budaya Jogja	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.17.060	Fasilitasi even lembaga Penggiat Seni dan Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Lemabaga Budaya	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	15 %	Event Seni Budaya yang Dilaksanakan oleh Lembaga Budaya	5 event	Terfasilitasinya Event Seni Budaya yang Dilaksanakan oleh Lembaga Budaya	100 %	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.400.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.17.062	Pengembangan Taman Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	15 %	18.Pergelaran Karawitan	1 Even	Berkembangnya Kegiatan D Taman Budaya Yogyakarta	100 %	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 16.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							17.Konser Musik Orkestra	1 Even						
							16.Eksperimentasi Seni	1 Even						
							15.Rekontruksi Seni	1 Even						
							14.Pameran Seni	1 Even						
							13.Fasilitasi Pentas Di TBY	1 Even						
							12.Majalah Seni Mata Jendela	1 Even						
							11. Dokumentasi dan publikasi Seni	1 Even						
							10. buku profil seni	2 profil						
							9. Pentas Seni Sepanjang Tahun9. Pentas Seni Sepanjang	1 Even						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan										Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Tahun							
							8. Bimbingan Seni	150 peserta						
							7. Gelar Karya Maestro	1 Even						
							6. musikalisasi sastra	1 Even						
							5. Festival teater	1 Even						
							4. Festival Pantomim	1 Even						
							3. Festival Sendratari	1 Even						
							2. Festival Ketoprak	1 Even						
							1. Duta Seni Budaya	1 Even						
1.17.1.17.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA*										Rp. 18.920.000.000,00	Rp. 17.380.000.000,00		
1.17.1.17.01.18.011	Misi Kebudayaan dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Dalam Negeri &Luar Negeri	Persentase implementasi hasil kesepakatan	15 %	3. Rintisan Ruah Budaya di Luar Negeri	10 Negara	Terlaksananya Misi Kebudayaan dalam rangka diplomasi budaya	100 %	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 11.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. 5 Negara	5 Negara						
							1. Dalam Negri	5 Daerah						
1.17.1.17.01.18.012	Jogja Performing Art	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase implementasi hasil kesepakatan	15 %	4 Seminar	2 Kali	Terselenggaranya Kegiatan Jogja Performng Art	100 %	Rp. 3.000.000.000,00	Rp. 3.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							3. Pameran	5 Hari						
							2. Workshop "	2 Hari						
							1. Pentas Seni Budaya	5 Hari						
1.17.1.17.01.18.013	Gelar Pelangi Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase implementasi hasil kesepakatan	15 %	5. Seminar	1 Kali	Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pelangi Budaya	100 %	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							4. Kemah Budaya	4 Kali						
							3. Karnaval Budaya	1 Minggu						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan										Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.17.1.17.01.18.014	Membangun Kemitraan dengan lembaga pelestari budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY & LUAR DAERAH	Persentase implementasi hasil kesepakatan	15 %	2. Pentas Seni Budaya	1 bulan			Rp. 750.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							1. Gelar dan Dialog	7 Hari						
1.17.1.17.01.18.015	Membangun Kemitraan dengan Instansi	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY & Luar Daerah	Persentase implementasi hasil kesepakatan	15 %	3. lembaga pelestari budaya "	5 lembaga	Terjalinya Kemitraan Dengan Lembaga Pelestari Budaya	100 %	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 1.980.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. Pentas/workshop	5 Daerah						
							1. Kerjasama antar daerah	10 Daerah						
1.17.1.17.01.18.016	Membangun Kemitraan bilateral	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Luar Negeri	Persentase implementasi hasil kesepakatan	15 %	2. WCF "	1 event	Terjalinya Kemitraan Bilateral	100 %	Rp. 2.370.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							1. Frankfurt book Fair	1 event						
1.17.1.17.01.19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN*										Rp. 56.750.000.000,00	Rp. 62.425.000.000,00		
1.17.1.17.01.19.008	Pengembangan Kompleks Taman Budaya Yogyakarta	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kompleks Taman Budaya Yogyakarta	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	40 %	2.Penataan Lingkungan Taman Budaya	1 kompleks	Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Tertatanya Lingkungan di Taman Budaya Yogyakarta	100 %	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 5.500.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							1. Review Master Plan	1 dokumen						
1.17.1.17.01.19.012	Pengembangan Pusat Konservasi dan Pengembangan Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	40 %	3. Penyiapan pembebasan lahan	1 laporan	3.1.Tersedianya Laporan Pembebasan Lahan	100 %	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							2. DED Pusat Konservasi Budaya	1 dokumen	2.Tersedianya Dokumen Pusat Konservasi Budaya	100 %				

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan										Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							1. DED pusat Pengembangan Budaya	1 dokumen	1.Tersedianya Dokumen Pengembangan Budaya	100 %				
1.17.1.17.01.19.013	Pengadaan sarana kesenian ke sekolah	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	40 %	Gamelan Perunggu	10 unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Sekolah	100 %	Rp. 4.000.000.000,00	Rp. 4.400.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.19.014	Pengadaan sarana kesenian ke masyarakat	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	40 %	6. Peralatan Seni5	5 jenis	Tersedianya Sarana Kesenian di Masyarakat	100 %	Rp. 12.000.000.000,00	Rp. 13.200.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							5. Pakaian seni	5 jenis						
							4. Pakaian Prajurit	3 jenis						
							3. Gamelan Besi	15 unit						
							2. Gamelan Kuningan	10 unit						
							1. Gamelan Perunggu	15 unit						
1.17.1.17.01.19.015	Pembangunan dan Pengembangan Taman Budaya di Kab/kota	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kabupaten/Kota	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	40 %	2. Sarana prasarana Taman Budaya KP	1 Paket	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Taman Budaya di Kab/kota	100 %	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 33.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							1. Taman Budaya Kab/kota	2 bangunan						
1.17.1.17.01.19.016	Fasilitasi Rumah Budaya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	40 %	Fasilitasi Rumah Budaya	5 Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Rumah Budaya di 5 Kabupaten/Kota	100 %	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.750.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.19.017	Pembangunan Laboratorium budaya di satuan pendidikan	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Kabupaten / Kota	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	40 %	Laboratorium Kebudayaan	5 laboratorium	Terlaksananya pembangunan laboratorium di Satuan Pendidikan	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 825.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
1.17.1.17.01.19.018	dukungan manajemen dan teknis lainnya	Sosial Budaya	Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	DIY	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	40 %	2. Manajemen perkantoran "	40 Orang	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 550.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							1. Pelatihan pengelolaan dan penatausahaan	40 Orang						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan										Jumlah Pagu : Rp. 637.182.624.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Keuangan							

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 23.775.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.09	Pertanahan													
1.09.01	Biro Tata Pemerintahan													
1.09.1.20.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN PENDAFTARAN TANAH										Rp. 23.775.000.000,00	Rp. 23.500.000.000,00		
1.09.1.20.01.18.301	Inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Terlaksananya Fasilitasi Inventarisasi Tanah dan Pengukuran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah DIY	1000 persil	Teridentifikasinya Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah DIY dan adanya Surat Ukur atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten	100 %	Rp. 3.500.000.000,00	Rp. 4.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.09.1.20.01.18.302	Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN	100 bidang	Terdaptarnya Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.09.1.20.01.18.303	Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Pembuatan sistem informasi pertanahan	1 sistem	Tersedianya Sistem informasi Pertanahan	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan
1.09.1.20.01.18.304	Fasilitasi Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Terlaksananya operasionalisasi Lembaga Pertanahan Kraton dan Puro	2 lembaga	Operasionalisasi lembaga dan proses kekancangan Tanah SG PAG berjalan lancar	100 %	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan											Jumlah Pagu : Rp. 23.775.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.09.1.20.01.18.306	Pengembalian Status Tanah Kasultanan dan Kadipaten sesuai Peruntukannya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Kraton Pakualaman	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Terlaksananya pengembalian status tanah Kasultanan dan Kadipaten	7 bidang	Tertibnya tata kelola tanah kasultanan dan kadipaten	100 %	Rp. 15.475.000.000,00	Rp. 15.000.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.09.1.20.01.18.307	Penyusunan Draft Rapergub Pertanahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Tata Pemerintahan	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	9653 bidang	Tersusunnya draft rapergub turunan Perdais Pertanahan	1 draft rapergub	Ketetapan hukum terkait pertanahan	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Tata Pemerintahan	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 750.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Hukum													
1.20.1.20.01.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp. 750.000.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.26.029	Penyebarluasan Produk Hukum Keistimewaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	DIY	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah istimewa melalui media cetak	1 Kali	Terlaksananya penyebarluasan produk hukum keistimewaan DIY	1 Kali	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Hukum	Baru - Mempercepat Capaian Target
							1. Terlaksananya pencetakan peraturan daerah istimewa 2. Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah istimewa 3. Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah istimewa melalui media cetak	5100 buku						
							Terlaksananya pencetakan peraturan daerah istimewa	5100 buku						
							Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah istimewa	2 Kali 100 Orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 750.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah istimewa melalui media cetak	1 Kali						
							1. Terlaksananya pencetakan peraturan daerah istimewa 2. Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah istimewa 3. Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah istimewa melalui media cetak	5100 buku						
1.20.1.20.01.26.100	Legislasi Rapergub dan Produk Hukum Lainnya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	100 %	Tersusunnya 2 Draft peraturan Gubernur yang mengatur tentang keistimewaan	2 buah	Tertandatanganinya 2 draft peraturan Gubernur yang mengatur tentang keistimewaan	2 buah	Rp. 350.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Hukum	Sedang Berjalan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 750.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Hukum											Jumlah Pagu : Rp. 750.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Rumah Sakit Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD										

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan											Jumlah Pagu : Rp. 300.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Administrasi Pembangunan													
1.20.1.20.01.30	PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN										Rp. 300.000.000,00	Rp. 350.000.000,00		
1.20.1.20.01.30.300	Konservasi dan Pengembangan Kawasan Geoheritage	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Administrasi Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	36.45 %	Dokumen usulan penetapan cagar budaya	1 dokumen	Usulan penetapan cagar budaya	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 350.000.000,00	Biro Administrasi Pembangunan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi											Jumlah Pagu : Rp. 2.250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Organisasi													
1.20.1.20.01.29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH*										Rp. 2.250.000.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.29.219	Evaluasi Kelembagaan Pemda DIY	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Dokumen evaluasi kelembagaan Pemda DIY	1 dokumen	Bahan penataan kelembagaan Pemda DIY	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.220	Peningkatan Implementasi Budaya Pemerintahan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Fasilitasi agen perubahan (agent of change) Budaya pemerintahan dari semua SKPD	68 Orang	Meningkatnya pemahaman Budaya pemerintahan SATRIYA bagi aparatur di kabupaten/kota	100 %	Rp. 450.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.221	Pedoman tatacara upacara Hari Keistimewaan dan lagu mars Keistimewaan untuk upacara HUT Keistimewaan D I Yogyakarta	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Pedoman tatacara upacara Hari Ulang Tahun Keistimewaan	1 pedoman	1. Tersedianya tata urutan upacara/keprotokolan pada upacara Hari Keistimewaan 2. Tersedianya Lagu Mars Keistimewaan yang dinyanyikan pada upacara hari keistimewaan	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Sedang Berjalan
							Lagu mars Keistimewaan untuk	1 lagu mars						

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Biro Organisasi										Jumlah Pagu : Rp. 2.250.000.000,00				
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							upacara HUT Keistimewaan D I Yogyakarta							
1.20.1.20.01.29.222	Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kelembagaan Istimewa	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Pedoman / Kartu Jabatan	1 pedoman	1. Acuan pelaksanaan tugas; 2. Sebagai acuan pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan pelaksanaan Analisis Beban Kerja; 3. Dasar pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan tugas.	100 %	Rp. 700.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.20.1.20.01.29.223	Penyusunan Rapergub Pola Hubungan Lembaga Keisimewaan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Organisasi	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	85 %	Rapergub Pola Hubungan Lembaga Keisimewaan	1 Rapergub	Pedoman hubungan kerja antar instansi di Pemda DIY	100 %	Rp. 400.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Organisasi	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Biro Umum, Humas dan Protokol											Jumlah Pagu : Rp. 116.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.01	Biro Umum, Humas dan Protokol													
1.20.1.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp. 116.000.000.000,00	Rp. 0,00		
1.20.1.20.01.02.067	Penataan Bangunan Cagar Budaya	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	Pembebasan tanah	9000 m2	Tertatanya kawasan Kompleks Kepatihan	100 %	Rp. 116.000.000.000,00	Rp. 0,00	Biro Umum, Humas dan Protokol	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan											Jumlah Pagu : Rp. 752.963.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia													
1.20.10	Badan Pendidikan dan Pelatihan													
1.20.1.20.10.32	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN										Rp. 752.963.000,00	Rp. 920.000.000,00		
1.20.1.20.10.32.001	Diklat Pengembangan Karakter PNS melalui Budaya Satriya Yogyakarta	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Pendidikan dan Latihan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	25 %	Diklat Pembentukan Karakter PNS Baru Berbasis Budaya Lokal	90 Orang	Peserta mengetahui dan memahami budaya-budaya DIY dalam rangka menghadapi Keistimewaan Yogyakarta	100 %	Rp. 752.963.000,00	Rp. 920.000.000,00	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Sedang Berjalan
							Diklat Pengembangan Karakter PNS melalui Budaya Satriya	60 Orang						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 3.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Wajib													
1.24	Kearsipan													
1.24.01	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah													
1.24.1.26.01.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH*										Rp. 1.700.000.000,00	Rp. 2.320.000.000,00		
1.24.1.26.01.16.002	Pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis di Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	11 %	Kajian tentang Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis di Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	1 dokumen	sistem pengelolaan arsip dinamis yang tepat di di Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	100 %	Rp. 300.000.000,00	Rp. 330.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.24.1.26.01.16.003	Preservasi bahan pustaka dan arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	11 %	Restorasi bahan pustaka dan arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	1 Paket	bahan pustaka dan arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman terselamatkan	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 825.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.16.004	Pengolahan Arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	11 %	Pengolahan arsip Kraton Yk dan Puro Pakualaman	1000 Berkas	Arsip Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman tertata baik	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.16.005	Penelusuran Arsip	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya	11 %	1. Penelusuran arsip Kraton Yogyakarta yang tersimpan di Inggris 2. Penelusuran arsip seniman/budayawan	1 Paket	Khasanah arsip bertambah, arsip seniman terselamatkan	100 %	Rp. 500.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.24.1.26.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI										Rp. 450.000.000,00	Rp. 495.000.000,00		
1.24.1.26.01.18.002	Bimtek Kearsipan bagi Seniman/Budayawan	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Bimtek Kearsipan Seniman	2 Kali	Seniman dapat mengelola arsipnya sendiri	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.24.1.26.01.18.003	Alih Media Arsip	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja	Badan Perpustakaan	Bertambahnya pemanfaatan	20 %	Alih media arsip Kraton Yogkarta dan	1 Paket	terselamatkannya arsip Kraton	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Perpustakaan	Sedang Berjalan

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah											Jumlah Pagu : Rp. 3.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Pemerintah Daerah Meningkatkan	dan Arsip Daerah	arsip sebagai sumber informasi		Puro Pakualaman		Yogkarta dan Puro Pakualaman				dan Arsip Daerah	
1.24.1.26.01.18.004	Pengembangan Khasanah Arsip Digital	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	20 %	Khasanah arsip digital arsip Kraton Yogkarta dan Puro Pakualaman arsip	1 Paket	Kualitas layanan arsip bagi masyarakat meningkat	100 %	Rp. 150.000.000,00	Rp. 165.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26	Perpustakaan													
1.26.01	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah													
1.26.1.26.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN*										Rp. 850.000.000,00	Rp. 935.000.000,00		
1.26.1.26.01.15.002	Festival Buku Indoensia	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan fasilitas perpustakaan	85 %	Pelaksanaan Festival Buku	2 Paket	Pelayanan ke pustaka meningkat	100 %	Rp. 750.000.000,00	Rp. 825.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sedang Berjalan
1.26.1.26.01.15.003	Pembuatan Abstraksi Bahan Pustaka Koleksi Perpustakaan di situs Cagar Budaya	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peningkatan fasilitas perpustakaan	85 %	Abstraksi Bahan Pstakan di 5 Situs Cagar Budaya	500 abstraksi	Terkoleksinya abstraksi bahan pustaka di situs cagar budaya	100 %	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah Pagu : Rp. 0,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Tidak ada data

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta														
Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 15.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.04	Pariwisata													
2.04.01	Dinas Pariwisata													
2.04.2.04.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN*										Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 16.500.000.000,00		
2.04.2.04.01.17.021	Aktualisasi Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisata	Ekonomi	Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Meningkat	Dinas Pariwisata	Jumlah pokdarwis	86 Pokdarwis	1. Fasilitasi Jogja Internasional Heritage Walk	1 kegiatan	Meningkatnya penyelenggaraan kesenian tradisional Yogyakarta	0 100%	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 16.500.000.000,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							2. Fasilitasi Asia Tri di Kaliurang	1 kegiatan						
							3. Fasilitasi Pekan Wisata Budaya Kota Gede	1 kegiatan						
							4. Fasilitasi Festival Budaya Bekakak	1 kegiatan						
							5. Fasilitasi Festival Gerobak Wisata	1 kegiatan						
							6. Penyelenggaraan Karnaval Andong, becak wisata dan sepeda wisata	1 kegiatan						
							7. Penyelenggaraan Pagelaran seni di Candi Ratu Boko	1 kegiatan						
							8. Penyelenggaraan Jogja Bike Heritage	1 kegiatan						
							9. Penyelenggaraan Festival Malioboro	1 kegiatan						
							10. Penyelenggaraan Jogja International Street Performance	1 kegiatan						
							11. Penyelenggaraan Festival Perahu Naga	1 kegiatan						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata											Jumlah Pagu : Rp. 15.000.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							12.Penyelenggaraan Festival Reog dan Jathilan	1 kegiatan						
							13. PenyelenggaraanPentas Seni 1 Muharam	1 kegiatan						
							14.Penyelenggaraan Pentas Seni Tutup Tahun	1 kegiatan						
							15. Penyelenggaraan Festival Kuliner Kaliurang	1 kegiatan						
							16.Penyelenggaraan Festival Njeron Beteng	1 kegiatan						
							17.Penyelenggaraan Festival Budaya Nglanggeran	1 kegiatan						
							18. Penyelenggaraan Festival Perkusi	1 kegiatan						
							19. Penyelenggaraan Atraksi Kesenian di Puro Pakualaman	22 Kali						
							20.Penyelenggaraan Atraksi Kesenian di ODTW Kab/Kota	100 Kali						
							21. Penyelenggaraan Atraksi Kesenian di Kawasan Malioboro & Tugu	126 Kali						
							22. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	1 kegiatan						
							23. Pentas Atraksi Kesenian di Bandara dan TIC	150 Kali						

**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan perikanan.											Jumlah Pagu : Rp. 250.000.000,00			
Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pilihan													
2.05	Kelautan dan Perikanan													
2.05.01	Dinas Kelautan dan perikanan.													
2.05.2.05.01.26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN										Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00		
2.05.2.05.01.26.009	Pengembangan Budaya Bahari	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	DIY	NTP sektor perikanan	116.89 %	"1.Workshop Tradisi budaya bahari 2.Regenerasi Budaya Kemaritiman 3.Fasilitasi sedekah laut 4.Publikasi Kegiatan 5.Pencetakan Buku Pranata Mangsa Penangkapan Ikan "	50 Orang	peningkatan budaya	5 %	Rp. 250.000.000,00	Rp. 0,00	Dinas Kelautan dan perikanan.	Baru - Kebijakan Pemerintah

RKPD Tahun 2015

Tabel 5.4 Rekapitulasi usulan kegiatan dan pendanaan pembangunan melalui APBN Tahun 2015

NO	KEMENTERIAN	USULAN
		(Dalam Juta)
1	2	3
1	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	3,250
2	Kementerian Dalam Negeri	200
3	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	14,500
4	Kementerian Kesehatan	1,500
5	Kementerian Lingkungan Hidup	3,500
6	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	8,250
7	Kementerian Pekerjaan Umum	77,500
8	Kementerian Perdagangan	40,000
9	Kementerian Perhubungan	105,800
10	Kementerian Pertanian	1,000
11	Kementerian Perumahan Rakyat	25,000
12	Kementerian Sosial	5,000
	Jumlah	285,500

Tabel 5.5 Usulan Kegiatan Dan Pendanaan APBN DIY 2015

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Pemetaan Tata Ruang dan Atlas	Jumlah Dokumen Wilayah Prototype RDTR, Pembinaan IGT Tata Ruang Nasional, Pemetaan dan Integrasi IGT Tata Ruang, Atlas & Pemetaan sosial, serta Utilisasi Data IGT Dinamika Sumberdaya untuk mendukung Program P3EI	Di Yogyakarta : Kab. Sleman	Citra Quickbird bencana Merapi dan Citra Quickbird bencana gempa	1,000
2	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Program Penanggulangan Bencana	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kesiapsiagaan	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	300 EWS	1,000
3	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Program Penanggulangan Bencana	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah Fasilitas Pengurangan Risiko Bencana	Di Yogyakarta : Kota Yogyakarta	5 lokasi	750
4	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Program Penanggulangan Bencana	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah Pedoman Pengurangan Risiko Bencana	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	5 kabupaten/kota	500

RKPD Tahun 2015

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kementerian Dalam Negeri	Program Bina Pembangunan Daerah	Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah (Target Kumulatif)	Di Yogyakarta : Kab. Gunung Kidul	20 unit	200
6	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi)	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	2 Paket	14,500
7	Kementerian Kesehatan	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	91%	1,500

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Kementerian Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)	Di Yogyakarta : Kab. Sleman	Penanaman pohon 30.000 batang; 1 (satu) unit Embung, Guly Plug; Ternak Kambing 50 ekor	1,500
9	Kementerian Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)	Di Yogyakarta : Kota Yogyakarta	1 kawasan	2,000
10	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah lokasi daya tarik di DPN yang dikembang-kan menjadi	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	6 Lokasi (kali urang, Kuwaru-Samas, Baron-Krakal, Kali Suci, Suroloyo-Kiskendo, dan pengembangan desa wisata)	6,250

RKPD Tahun 2015

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	1 kegiatan	1,000
12	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Jumlah daerah yang difasilitasi/didukung untuk menjadi destinasi pariwisata nasional	Di Yogyakarta : Kab. Gunung Kidul	1 dokumen	1,000.00
13	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Nasional	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	laporan hasil studi	15,000
14	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	1 paket RTH	2,500

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah buah embung/Situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	3 buah embung	20,000
16	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	2 paket pekerjaan groud sill	40,000
17	Kementerian Perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Percontohan yang dibangun (unit)	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	5 pasar (Semin 5M, Mangiran 5M, Sentolo 5M, Sleman 20M, Terban 5M)	40,000

RKPD Tahun 2015

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Kementerian Perhubungan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Paket Rehabilitasi Simpul Llaaj	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	1 unit fasilitas park and ride; 1 unit pembangunan terminal	14,000
19	Kementerian Perhubungan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Jumlah Paket Pengembangan Bus Rapid Transit (Brt), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	1 paket gedung parkir	85,000
20	Kementerian Perhubungan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Paket Alat Kinerja Angkutan Jalan	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	3 unit APILL ATCS; 19 unit Pelican Crossing di 4 simpang empat dan 1 simpang tiga; 10 unit VMS	6,800

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Kementerian Pertanian	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Pengembangan Mutu dan Standardisasi	Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu (unit)	Di Yogyakarta : Provinsi DI Yogyakarta	2 Paket	1,000
22	Kementerian Perumahan Rakyat	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya	Di Yogyakarta : Kab. Gunung Kidul	2000 unit	20,000
23	Kementerian Perumahan Rakyat	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Di Yogyakarta : Kota Yogyakarta	500 rumah	5,000

RKPD Tahun 2015

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Lokasi	Target Fisik	Dana (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Jumlah Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti	Di Yogyakarta : Kab. Sleman	22 Titik Lokasi	5,000
JUMLAH							285,500

Tabel 5.6 Program Kegiatan Dak Dan Dana Pendampingan DIY TAHUN 2015.

No	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi	Kegiatan 2015	DAK	Pendampingan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Terselenggaranya rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi Grembyangan, Kuton, Sapon, Kanoman dan Simo.	6 Daerah Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	12,620,000,000	10,620,000,000	2,000,000,000

No	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi	Kegiatan 2015	DAK	Pendampingan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Peningkatan Jalan (DAK)	Peningkatan Jalan	4 km	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	2,512,456,800	12,456,800	2,500,000,000
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Fasilitasi Keselamatan Jalan (DAK)	fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	1 Paket	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9,200,000,000	8,000,000,000	1,200,000,000
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Prasarana dan Sarana Laboratorium Perbenihan Perkebunan (DAK)	Sarana dan Prasarana Kantor dan Laboratorium Perbenihan Perkebunan	6 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	128,084,000	116,440,000	11,644,000
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Prasarana dan Sarana Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan (DAK)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan	13 jenis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	369,735,500	336,123,182	33,612,318

RKPD Tahun 2015

No	Nama Program	Kegiatan	Keluaran Tolok Ukur	Target	Organisasi	Kegiatan 2015	DAK	Pendampingan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK)	Penanaman di kawasan hutan konservasi Pemeliharaan I dan II Penambahan sarana dan prasarana	3 kegiatan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1,639,300,750	1,490,273,409	149,027,341
	JUMLAH					26,469,577,050	20,575,293,391	5,894,283,659

BAB 6

Penutup

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang mengembang misi pelaksanaan pembangunan tahun ketiga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah periode 2012 – 2017. RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah DIY Tahun 2015 tergantung pada sikap mental, semangat, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2015 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

RKPD Tahun 2015

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Yogyakarta, 20 Mei 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

MATRIK ALUR LOGIKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

Tema	Isu Strategis	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	SKPD	Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menguatkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.	1.Peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY	Ekonomi	Pendapatan Masyarakat Meningkat	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK).	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Angka ketersediaan dan Konsumsi ikan per kapita	Dislautkan.	7	Rp. 2,178,200,000
					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Peningkatan produksi hasil hutan	Dishutbun	8	Rp. 4,795,317,075
					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas penyuluh	BKPP	4	Rp. 1,132,000,000
					Program Pembinaan Dan Penterbitan Industri Hasil Hutan	Persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang telah dilakukan pembinaan	Dishutbun	2	Rp. 200,485,000
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kreatif*	Jumlah IKM Industri Kreatif	Disperindagkop	1	Rp. 750,000,000
					Program Penataan Kawasan Hutan	Persentase luas hutan	Dishutbun	8	Rp. 1,754,469,130
					Program Pengankaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan*	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	BKPP	9	Rp. 1,694,000,000
					Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	NTP sektor perkebunan	Dishutbun	7	Rp. 1,481,216,000
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan budidaya	Dislautkan.	8	Rp. 9,877,601,000
					Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah*	Jumlah IKM	Disperindagkop	13	Rp. 7,328,000,000
					Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Dislautkan.	3	Rp. 1,211,250,000
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase usaha ekonomi desa	BPPM	7	Rp. 3,040,000,000
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap*	Produksi perikanan tangkap	Dislautkan.	6	Rp. 6,359,193,500
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	Disperindagkop	6	Rp. 2,495,000,000
					Program Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	BKPP	5	Rp. 1,560,000,000
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah SIUP	Disperindagkop	9	Rp. 20,303,000,000
					Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase profil desa sesuai standar	BPPM	3	Rp. 2,000,000,000
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*	Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat	BPPM	9	Rp. 3,020,000,000
					Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Nilai produksi IKM	Disperindagkop	5	Rp. 955,000,000
					Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	Dislautkan.	4	Rp. 546,700,000
					Program Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan	Ketersediaan dan cadangan pangan	BKPP	4	Rp. 1,231,000,000
					Program Peningkatan Kualitas S D M Dan Kelembagaan Petani	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)	Dinas Pertanian	20	Rp. 1,528,000,000
					Program Peningkatan Kualitas Sdm Dan Kelembagaan Perikanan Dan Kelautan	NTP sektor perikanan	Dislautkan.	8	Rp. 829,300,000
					Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim	Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Dislautkan.	1	Rp. 135,729,000
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat	BPPM	6	Rp. 3,257,315,000
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	Dinas Pertanian	10	Rp. 1,939,500,000
					Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa pangan	BKPP	4	Rp. 3,120,000,000
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan*	Populasi peternakan	Dinas Pertanian	12	Rp. 7,553,490,000
					Program Peningkatan Produksi Hortikultura*	Produksi pertanian hortikultura	Dinas Pertanian	13	Rp. 2,450,485,850
					Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan	Dishutbun	16	Rp. 2,022,177,350
					Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan*	Produksi pertanian tanaman pangan	Dinas Pertanian	25	Rp. 5,790,608,050
					Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan*	Persentase kerusakan hutan	Dishutbun	7	Rp. 2,232,232,550
					Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	Disperindagkop	7	Rp. 805,000,000
					Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Cadangan Sumberdaya Alam	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	Dislautkan.	4	Rp. 257,741,000
					Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Luas lahan kritis	Dishutbun	4	Rp. 5,430,450,605
			Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Meningkat	Jumlah wisatawan mancanegara.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata*	Jumlah kunjungan wisatawan di DTW	Dispar	8	Rp. 5,335,000,000
			Lama tinggal wisatawan mancanegara.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata*	Jumlah daya tarik wisata	Dispar	3	Rp. 4,735,000,000	
			Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara Meningkat	Jumlah wisatawan nusantara.	Program Pengembangan Kemitraan*	Jumlah pokdarwis	Dispar	7	Rp. 20,115,000,000
			Lama tinggal wisatawan nusantara.	Program Pengembangan Desa Wisata*	Jumlah desa wisata	Dispar	2	Rp. 2,250,000,000	
	2.Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan publik	Hukum dan Aparatur	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW anggota DPRD dan pelantikan Gubernur/Wagub	B.Tapem	5	Rp. 10,566,272,875
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	Bappeda	6	Rp. 2,080,648,000
					Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	Bappeda	5	Rp. 1,617,144,500
					Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	Bappeda	6	Rp. 1,467,444,700
					Program Analisis Kebijakan Pembangunan	Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan	B.Kesra, B.adpem,	22	Rp. 5,193,608,000
					Program Fasilitasi Bantuan Dan Layanan Hukum	Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	Biro Hukum	10	Rp. 2,102,518,250
					Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Pns	Prosentase kelancaran pindah dan purna PNS	BKD	2	Rp. 161,135,000
					Program Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi Dan Frekuensi	Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat	Hubkominfo	6	Rp. 1,064,768,500
					Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan kasus konflik sosial	Bakesbanglinmas	7	Rp. 569,780,000
					Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	B.umum	9	Rp. 2,370,160,000
					Program Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah kab/kota yang telah terbentuk community Policing	Bakesbanglinmas	9	Rp. 1,232,500,000
					Program Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Layanan pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT	B.adpem	1	Rp. 4,431,399,300

Tema	Isu Strategis	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	SKPD	Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu	BKD, Diklat, B.adpem, B.umum, DPPKA, Inspektorat	6	Rp. 690,888,300
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD	16	88,770,204,977
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase informasi kepegawaian yang dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan kepegawaian	BKD, Diklat, B.adpem	35	Rp. 7,366,785,650
					Program Pemeliharaan Kantrambimas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan kasus tindak kriminal	Satpolpp	10	Rp. 567,000,000
					Program Penanggulangan Korban Bencana	tingkat waktu tanggap (response time rate)	BPBD	24	Rp. 6,004,697,700
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kesepakatan penerapan NSPK (Norma, standar, prosedur dan kriteria)	B.Tapem	7	Rp. 423,459,000
					Program Penataan Dan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang Ber-KTP (NIK)	B.Tapem	17	Rp. 1,151,713,500
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan	BKD, Biro Hukum	15	Rp. 2,233,810,550
					Program Pencegahan Dini Bencana	Peningkatan jumlah desa tangguh	BPBD	25	Rp. 5,097,652,300
					Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang mengikuti diklat	Diklat	23	Rp. 10,476,621,000
					Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi dalam pemilu	Bakesbanglinmas	6	Rp. 1,182,000,000
					Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase pencapaian penelitian dan pengembangan	Diklat, B.adpem	16	Rp. 2,258,037,000
					Program Pengawasan Produk Hukum	Persentase produk hukum yang dibatalkan	Biro Hukum	3	Rp. 433,948,500
					Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	Bappeda	3	Rp. 372,486,500
					Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	B.Kesra	4	Rp. 7,755,315,000
					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	Hubkominfo	6	Rp. 17,891,447,750
					Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi	Penguatan jaringan IT di Pemda DIY	Hubkominfo	2	Rp. 7,389,898,100
					Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah	Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum	B.Tapem	8	Rp. 23,905,397,000
					Program Pengembangan Statistik Daerah	persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	Bappeda	2	Rp. 1,360,000,000
					Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD	Bappeda	11	Rp. 1,981,704,550
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase disiplin aparaturnya	BKD, B.umum, Satpolpp, Setwan	10	Rp. 7,242,827,000
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian	B.Tapem	6	Rp. 2,206,627,125
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah*	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	Biro Organisasi	28	Rp. 6,124,500,000
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah*	Persentase prolegda yang terselesaikan	Setwan	25	Rp. 36,559,214,500
					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya apatur	BKD	3	Rp. 8,815,609,450
					Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Penurunan kasus pelanggaran perda	Bakesbanglinmas, Satpolpp	23	Rp. 5,209,525,000
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	BKPM, B.Tapem	14	Rp. 2,262,931,750
					Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah	Persentase tindaklanjuti pelaksanaan diklat atas kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar daerah.	Diklat	4	Rp. 318,000,000
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi	BPAD	17	Rp. 7,392,000,000
					Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan	B.umum, Satpolpp	4	Rp. 2,705,000,000
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Biro Organisasi	5	Rp. 580,000,000
					Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekal)	Penurunan kasus pekal	Satpolpp	3	Rp. 160,000,000
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparaturnya	BKD	11	262,916,946,957
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan	DPPKA, Inspektorat	11	Rp. 3,885,713,300
					Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah*	Bertambahnya khsanah arsip sebagai warisan budaya	BPAD	7	Rp. 2,900,000,000
					Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	B.Tapem	1	Rp. 85,000,000
					Program Perbaikan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah*	Persentase kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	B.Tapem	4	Rp. 255,291,000
					Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY	BKD, BPAD, B.umum	15	Rp. 3,176,624,000
					Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	Bappeda	7	Rp. 1,722,183,600
					Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana	Bappeda	7	Rp. 1,845,450,000
			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	Opini pemeriksaan BPK.	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pengelolaan keuangan Kabupaten-Kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar	DPPKA	2	Rp. 562,550,000
					Program Pengembangan Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Dan Lembaga Keuangan Mikro	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	DPPKA	2	Rp. 725,627,000
					Program Pengembangan Investasi Dan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan	DPPKA	5	Rp. 845,578,700
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan PAD	DPPKA	37	Rp. 14,527,780,150
					Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD	DPPKA	1	Rp. 802,939,625
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	SKPD	131	Rp. 5,952,710,750
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase peningkatan profesionalisme pemeriksa	Inspektorat	3	Rp. 155,208,750
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan.		Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	Disnakerstrans.	13	Rp. 1,323,858,000
					Program Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial	Persentase besaran penyelesaian kasus perselesaian hubungan industrial	Disnakerstrans.	15	Rp. 1,025,519,000
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya *	Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin	Dinas Sosial	7	Rp. 5,873,864,323

Tema	Isu Strategis	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	SKPD	Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran
					Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial	Dinas Sosial	11	Rp. 7,572,160,300
					Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UKM	Disperindagkop	3	Rp. 525,000,000
					Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Persentase keanggotaan perempuan dalam organisasi politik	BPPM	3	Rp. 1,650,000,000
					Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha UMKM Baru	Disperindagkop	2	Rp. 74,000,000
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	Disnakerstrans.	9	Rp. 2,797,745,000
					Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase pembinaan organisasi perempuan	BPPM	8	Rp. 2,375,000,000
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	Disnakerstrans.	21	Rp. 13,018,897,000
					Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	Disnakerstrans.	23	Rp. 8,899,343,000
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	Disperindagkop	1	Rp. 75,000,000
					Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Disnakerstrans.	7	Rp. 293,884,000
					Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	BPPM	3	Rp. 1,831,256,000
					Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan*	Persentase partisipasi perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah	BPPM	4	Rp. 880,000,000
			Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	Load factor angkutan perkotaan meningkat	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi Di DIY	Hubkominfo	1	Rp. 4,449,490,000
					Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan pelayanan transportasi antar moda	Hubkominfo	2	Rp. 2,196,149,000
					Program Pengaturan Sistem Simbang Bersinyal	Pengendalian sistem simbang bersinyal di perkotaan yogyakarta	Hubkominfo	1	Rp. 3,250,000,000
					Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan*	Persentase dukungan Sapras Transportasi pada kawasan budaya	Hubkominfo	5	Rp. 21,600,000,000
					Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	Hubkominfo	4	Rp. 3,350,000,000
					Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi	Hubkominfo	8	Rp. 1,835,549,200
					Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	Hubkominfo	2	Rp. 79,527,000
					Program Peningkatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan	Hubkominfo	2	Rp. 2,086,816,250
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta	Hubkominfo	7	Rp. 70,115,713,770
					Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan	Hubkominfo	5	Rp. 2,902,530,882
			Aksesibilitas Pendidikan Meningkat	Rata-rata lama sekolah.	Program Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase kinerja pelayanan PKPLK	Disdikpora	26	Rp. 15,533,725,000
					Program Pendidikan Menengah*	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK)	Disdikpora	34	Rp. 105,462,162,000
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar	Disdikpora	31	Rp. 353,966,695,000
			Daya Saing Pendidikan Meningkat	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka*	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Disdikpora	11	Rp. 4,582,800,000
					Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	Disdikpora	36	Rp. 45,335,957,000
					Program Pendidikan Anak Usia Dini*	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Disdikpora	11	Rp. 3,288,188,000
					Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya*	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Disdikpora	8	Rp. 13,115,800,000
					Program Pendidikan Tinggi	Persentase peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi	Disdikpora	5	Rp. 4,617,200,000
					Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	Disdikpora	12	Rp. 5,094,200,000
					Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada B L U D	Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik standart	Disdikpora	1	Rp. 11,000,000,000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan*	Jumlah sentra pemberdayaan pemuda	Disdikpora	7	Rp. 3,200,000,000
					Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Peningkatan Jumlah kelompok wirausaha muda	Disdikpora	1	Rp. 550,000,000
					Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan	Persentase lulusan SMK tereserap dalam dunia kerja	Disdikpora	6	Rp. 4,370,400,000
			Melek Huruf Masyarakat Meningkat	Angka Melek huruf.	Pengembangan Budaya Baca	Peningkatan pemustaka	BPAD	15	Rp. 4,323,000,000
					Pengembangan Dan Pembinaan Perpustakaan*	Persentase peningkatan jumlah perpustakaan Desa	BPAD	13	Rp. 4,450,000,000
					Program Pendidikan Non Formal Dan Informal*	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal	Disdikpora	23	Rp. 4,829,780,000
					Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan*	Peningkatan fasilitas perpustakaan	BPAD	3	Rp. 20,850,000,000
		Sosial Budaya	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Angka Harapan Hidup.	Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera*	Persentase cakupan peserta KB Aktif	BPPM	6	Rp. 1,410,360,000
					Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun	BPPM	4	Rp. 2,087,340,000
					Program Pelatihan Kesehatan Dan Peningkatan Mutu Diklat	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	Dinkes	3	Rp. 935,685,000
					Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	Dinkes	15	Rp. 2,241,035,000
					Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda*	Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda	Disdikpora	5	Rp. 1,900,000,000
					Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase cakupan kesepertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri	Dinkes	5	Rp. 421,208,000
					Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga*	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga	Disdikpora	3	Rp. 1,295,410,000
					Program Pembinaan Kesehatan Anak Dan Remaja	Persentase cakupan penjangkaran kesehatan siswa sekolah	Dinkes	3	Rp. 164,500,000
					Program Pembinaan Kesehatan Bayi Dan Balita	Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)	Dinkes	5	Rp. 121,750,000
					Program Pembinaan Kesehatan Ibu	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanaan	Dinkes	6	Rp. 172,300,000
					Program Pembinaan Kesehatan Lansia	Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada usia (PSU)	Dinkes	5	Rp. 278,499,040
					Program Pembinaan Pantli Asuhan/ Pantli Jompo	Persentase pelayanan pantli asuhan/jompo sesuai standar pelayanan	Dinas Sosial	1	Rp. 8,432,956,446
					Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	Dinkes	5	Rp. 582,434,000
					Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit*	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	Dinkes	12	Rp. 3,444,288,170
					Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya	Dinkes	10	Rp. 14,062,019,905
					Program Pengembangan Bina Keluarga	Persentase lembaga bina keluarga berkategori percontohan	BPPM	1	Rp. 1,410,385,560
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat	Dinkes	5	Rp. 871,066,000
					Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Persentase tahapan keluarga sejahtera	BPPM	2	Rp. 2,634,541,240

Tema	Isu Strategis	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	SKPD	Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran
					Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak	Jumlah penanganan anak korban kekerasan	BPPM	3	Rp. 2,825,000,000
					Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan	BPPM	10	Rp. 3,280,000,000
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Bapeljamkesos	Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel	Dinkes	1	Rp. 64,146,657,900
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Rsj Ghasia	Persentase penderita jiwa yang dirawat di RSJ Ghasia	RS Ghasia	1	Rp. 16,221,149,000
					Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Cakupan peningkatan prestasi cabang olahraga	Disdikpora	13	Rp. 8,282,000,000
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga	Disdikpora	5	Rp. 36,800,000,000
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat*	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	Dinkes	6	Rp. 1,065,000,000
					Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat*	Persentase rumah tangga ber PHBS	Dinkes	8	Rp. 2,944,254,100
					Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Dan Pengawasan Makanan	Persentase keterlambatan obat esensial generik di fasyankes dasar	Dinkes	3	Rp. 564,000,000
			Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial*	Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial	Dinas Sosial	8	Rp. 3,913,944,150
					Program Pelayanan Dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar	Dinas Sosial	6	Rp. 2,476,032,000
					Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks)*	Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	20	Rp. 4,716,443,100
					Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma	Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma	Dinas Sosial	4	Rp. 379,127,200
					Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Dan Kesetiakawanan Sosial (K 3 S)*	Persentase PSKS terbina dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Dinas Sosial	10	Rp. 751,297,300
					Program Penanganan Dan Penanggulangan Bencana	Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana	Dinas Sosial	5	Rp. 820,575,550
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya*	Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	Disbud	7	Rp. 342,725,947,000
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya*	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	Disbud	8	Rp. 55,000,000,000
					Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya*	Persentase implementasi hasil kesepakatan	Disbud	6	Rp. 18,920,000,000
					Program Pengembangan Nilai Budaya*	Persentase organisasi budaya berkategori maju	BKPM	3	Rp. 1,270,810,000
					Program Pengembangan Nilai Budaya*	Persentase organisasi budaya berkategori maju	Disbud	8	Rp. 166,286,677,000
					Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial	Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	7	Rp. 1,450,696,100
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan*	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	Disbud	8	Rp. 56,750,000,000
					Program Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Persentase keberfungsian sosial bagi korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan	Dinas Sosial	2	Rp. 580,848,050
	4. Pengelolaan resiko Bencana	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Ketimpangan Antar Wilayah Menurun	Indek Ketimpangan Antar Wilayah	Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi	DPUPESDM	2	Rp. 584,224,800
					Program Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan jumlah sertifikat/laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian	DPUPESDM	4	Rp. 3,190,270,000
					Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku	DPUPESDM	2	Rp. 300,000,000
					Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pengurangan jumlah titik genangan	DPUPESDM	2	Rp. 5,350,000,000
					Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan performance/kinerja jasa kontruksi	DPUPESDM	12	Rp. 1,320,000,000
					Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur	Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru	DPUPESDM	1	Rp. 3,100,000,000
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan	DPUPESDM	2	Rp. 10,500,000,000
					Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	DPUPESDM	6	Rp. 18,248,000,000
					Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan Dan Desa Potensi	Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi	DPUPESDM	1	Rp. 4,000,000,000
					Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	DPUPESDM	1	Rp. 5,050,000,000
					Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin	DPUPESDM	2	Rp. 3,800,000,000
					Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY	DPUPESDM	6	Rp. 10,550,000,000
					Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	DPUPESDM	2	Rp. 25,000,000,000
					Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Penambahan penyediaan air baku	DPUPESDM	6	Rp. 29,260,000,000
					Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik rawan banjir yang ditangani	DPUPESDM	2	Rp. 3,900,000,000
					Program Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum	DPUPESDM	5	Rp. 1,375,000,000
					Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	BKPM	10	Rp. 1,606,316,000
					Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	DPUPESDM	3	Rp. 50,362,805,000
					Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, Dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi	Jumlah surat persetujuan/ijin prinsip	BKPM	6	Rp. 3,965,831,000
					Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Penambahan penyediaan air baku	DPUPESDM	2	Rp. 1,520,000,000
					Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	DPUPESDM	4	Rp. 54,158,013,000
			Pemanfaatan Ruang Terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/kot dan RTRW Provinsi	DPUPESDM	2	Rp. 900,000,000
					Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas	DPUPESDM	2	Rp. 2,550,000,000
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi	Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi	DPUPESDM	2	Rp. 1,170,000,000
					Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Bahan Bakar	Pencapaian kinerja pengelolaan bahan bakar	DPUPESDM	5	Rp. 985,000,000
					Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	DPUPESDM	4	Rp. 6,050,000,000
					Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah	Rerata penurunan muka air tanah	DPUPESDM	6	Rp. 6,000,000,000
					Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan	DPUPESDM	8	Rp. 4,750,000,000
					Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan	Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan	DPUPESDM	3	Rp. 1,040,000,000
					Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan*	Persentase penataan kawasan budaya	DPUPESDM	14	Rp. 149,100,000,000
					Program Penataan Ruang Keistimewaan Diy*	Persentase pengaturan dan pengembangan kawasan strategis yang mempunyai nilai dan fungsi budaya	DPUPESDM	12	Rp. 3,400,000,000

Tema	Isu Strategis	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	SKPD	Jumlah Kegiatan	Jumlah Anggaran
	5. Peningkatan keekonomian keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	DPUPESDM	7	Rp. 10,800,000,000
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian data ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan	DPUPESDM	6	Rp. 1,165,923,500
					Program Pengurangan Kawasan Kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan pemukman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	DPUPESDM	1	Rp. 4,500,000,000
					Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi	DPUPESDM	2	Rp. 600,000,000
					Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya*	Persentase pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis budaya dalam rangka mendukung keistimewaan	BLH	1	Rp. 12,500,000,000
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan	BLH	1	Rp. 1,000,000,000
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sumber pencemar lingkungan yang dibina	BLH	2	Rp. 538,797,975
					Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	BLH	25	Rp. 5,636,956,415
					Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan akses informasi sumberdaya air dan lingkungan hidup	BLH	5	Rp. 495,000,000
					Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha	BLH	3	Rp. 617,966,710
					Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan	BLH	9	Rp. 4,456,658,100
					Total				Rp. 2,798,549,955,305